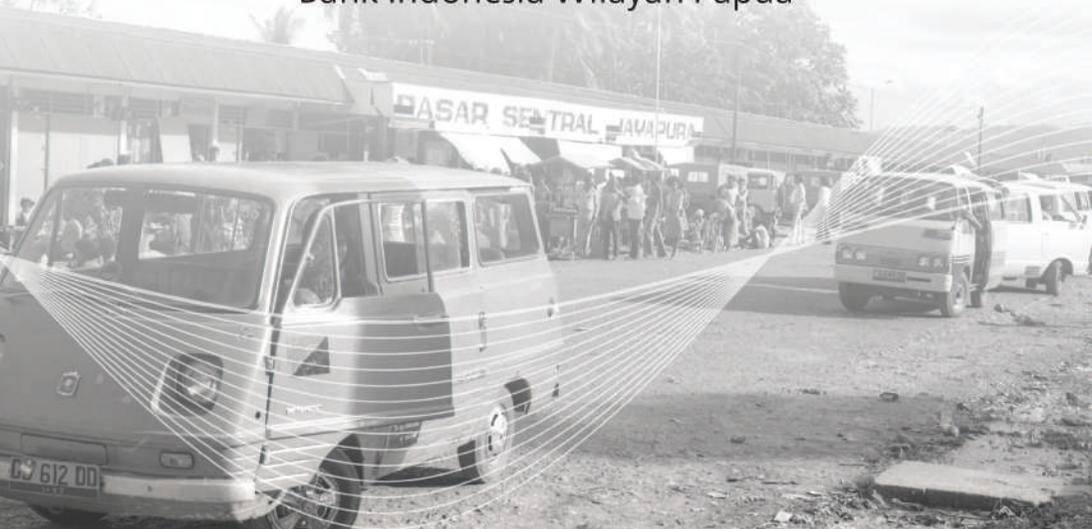




MEMBANGUN PILAR
KEDAULATAN EKONOMI DI

INDONESIA TIMUR

Sejarah Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Wilayah Papua



MEMBANGUN PILAR KEDAULATAN EKONOMI DI
INDONESIA TIMUR

SEJARAH KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
WILAYAH PAPUA

MEMBANGUN PILAR KEDAULATAN EKONOMI DI
INDONESIA TIMUR

SEJARAH KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
WILAYAH PAPUA

Editor:

Abdul Wahid

Tim Penyusun:

Ravando (Penulis Utama),
Dandung Marsetyo, Lesta Alfatiana

Bank Indonesia Institute
2025

**Membangun Pilar Kedaulatan
Ekonomi di Indonesia Timur:**

Sejarah Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Wilayah Papua

Penanggung Jawab:
Clarita Ligaya Iskandar

Koordinator Tim Penyusun:
G.A. Diah Utari

Editor:
Abdul Wahid

Tim Penyusun:
Ravando (Penulis Utama)
Dandung Marsetyo
Lesta Alfatiana

Kontributor:
Tony Noor Tjahjono, Emilia Andam Suri, Felicia V.I. Barus,
Oktoviana Banda S., Ayu Ambarwati, Remon Samora,
Julian Dwi Efendi, Qonitan Lilahi Hanifa

Perancang Sampul dan Penata Letak:
Moh. Masruhan

Cetakan pertama, 2025
14,5 x 20,5 cm; xlv + 477 halaman
ISBN: 978-623-5662-80-0
978-623-5662-79-4(PDF)

Bank Indonesia Institute
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 Indonesia
<https://www.bi.go.id>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



SAMBUTAN
GUBERNUR BANK INDONESIA
PERRY WARJIYO

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Tanah Papua, dengan julukannya sebagai “surga kecil yang jatuh ke bumi”, menyimpan kekayaan alam dan nilai budaya yang tiada ternilai harganya. Lebih dari itu, Papua adalah tanah dengan sejarah panjang perjuangan, keterpencilan yang dilampaui oleh daya tahan masyarakatnya, serta potensi ekonomi yang terus tumbuh seiring waktu. Dalam konteks itulah, sejarah kehadiran Bank Indonesia di wilayah Papua menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang integrasi ekonomi nasional, serta penguatan fondasi kesejahteraan masyarakat di ujung timur Indonesia.

Proses pendirian Kantor Cabang Bank Indonesia di Wilayah Papua menunjukkan pola yang unik dan berbeda jika dibandingkan dengan kantor cabang di wilayah lain. Keunikan ini berakar dari posisi wilayah Papua sebagai “frontier” politik dan ekonomi sepanjang sejarahnya. Wilayah yang luas dengan kondisi geografis menantang serta perkembangan sosial-budaya yang khas, menyebabkan proses kolonisasi oleh Belanda berjalan lambat

dan berbeda dibandingkan dengan wilayah Nusantara lainnya. Keterbatasan investasi dan pembangunan di masa kolonial, ditambah statusnya yang kembali menjadi perebutan pasca Perang Dunia II, menjadikan Tanah Papua sebagai wilayah sengketa antara Belanda dan Republik Indonesia setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949.

Dalam konteks sengketa dan upaya integrasi inilah, Bank Indonesia memainkan peran penting. Sebagai bagian dari konfrontasi ekonomi dan politik melalui seruan TRIKORA, Pemerintah Indonesia mendirikan lima kantor cabang Bank Indonesia di kota-kota strategis Irian Barat antara tahun 1962 dan 1963. Dimulai dengan peresmian Kantor Cabang Jayapura (saat itu Kotabaru) pada 12 Desember 1962. Permulaan ini menjadi langkah fundamental untuk memastikan roda ekonomi tetap berputar dan membangun fondasi sistem perbankan nasional di Bumi Cenderawasih. Menyusul kemudian, pada 18 Februari 1963, Kantor Cabang Biak dibuka, memanfaatkan lokasinya yang sangat strategis sebagai gerbang udara dan laut utama di kawasan timur.

Tak berhenti di situ, ekspansi berlanjut ke pusat-pusat ekonomi lainnya. Kantor Cabang Sorong diresmikan pada 15 Maret 1963, mengakui perannya sebagai simpul perdagangan penting dengan kekayaan alam dan fasilitas pelabuhan internasionalnya. Hampir bersamaan, pada 17 Maret 1963, Kantor Cabang Manokwari berdiri, secara khusus didorong oleh amanat Deklarasi Ekonomi Presiden Sukarno untuk mendukung pembangunan dan distribusi kebutuhan pokok di daerah. Melengkapi jaringan ini, persiapan pendirian Kantor Cabang Merauke di ujung timur dimulai pada akhir Februari 1963. Meskipun menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur yang berat, kehadirannya vital untuk menjangkau wilayah perbatasan, memastikan stabilitas moneter, dan mendorong pertumbuhan.

Pendirian kelima kantor cabang ini, bersama dengan penerbitan mata uang Rupiah Irian Barat, merupakan langkah

nyata Bank Indonesia dalam mendukung proses integrasi. Upaya ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan yang berpuncak pada Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, momen bersejarah yang mengakhiri status “frontier” Papua dan menyatukannya secara utuh dengan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga hari ini, Bank Indonesia terus menjalankan amanahnya, berkomitmen sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat di Tanah Papua.

Hadirnya buku “**Membangun Pilar Kedaulatan Ekonomi di Indonesia Timur: Sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Papua**” menjadi persembahan dari Bank Indonesia untuk masyarakat Papua. Publikasi ini juga menegaskan peran aktif Bank Indonesia dalam riset ilmiah, khususnya terkait studi sejarah ekonomi. Melalui penerapan metode penelitian yang saksama, buku ini diharapkan membawa kontribusi baru bagi perkembangan historiografi di Indonesia, terutama dalam penulisan sejarah ekonomi dan institutional memory Bank Indonesia. Selain itu, kehadiran buku ini diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi dan solusi praktis untuk pembangunan regional yang digali dari pembelajaran masa lalu.

Jakarta, Mei 2025



SAMBUTAN
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA
JUDA AGUNG

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Kehadiran lima kantor cabang Bank Indonesia di wilayah Papua – Jayapura, Biak, Sorong, Mankowari, dan Merauke – menjadikan Bank Indonesia sebagai salah satu aktor institusional pertama yang menancapkan kehadirannya di Bumi Cenderawasih. Lebih dari sekadar simbol politik, pendirian kantor-kantor cabang Bank Indonesia di berbagai kota strategis Papua merupakan langkah fundamental dalam membangun infrastruktur moneter dan meletakkan dasar bagi sistem perekonomian modern di wilayah yang sebelumnya beroperasi dengan tatanan berbeda.

Buku ini secara khusus menelusuri dan menganalisis peran historis Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) Jayapura (Kotabaru), Biak, Manokwari, Sorong, dan Merauke sebagai garda terdepan Bank Indonesia dalam mengawal transisi dan mendorong perkembangan ekonomi awal di Papua. Didirikan antara tahun 1962 dan 1963 dalam konteks perjuangan Tiga Komando Rakyat (TRIKORA), kelima kantor cabang ini tidak hanya berfungsi sebagai agen sirkulasi mata uang Rupiah Irian Barat (IBRP) dan

kepanjangan tangan kebijakan moneter pemerintah pusat, tetapi juga sebagai simpul vital dalam memfasilitasi perdagangan, menyediakan layanan perbankan dasar bagi masyarakat dan pemerintah daerah, serta mendukung upaya-upaya awal pembangunan di sektor-sektor potensial.

Sejak awal pendiriannya, KCBI Jayapura dirancang untuk berbagai fungsi dan tugas krusial yang berkaitan dengan perekonomian Papua, yang salah satunya dilakukan melalui fasilitasi pembayaran domestik dan internasional. Melalui fungsi tersebut, KCBI Jayapura menghubungkan Papua ke dalam sistem keuangan global melalui hubungan langsung dengan bank-bank internasional utama, serta mengelola transaksi valuta asing melalui rekening khusus.

Fungsi lain yang diimplementasikan oleh KCBI Jayapura di luar fungsi moneter adalah sebagai kreditur bagi pengembangan perekonomian penduduk setempat. KCBI Jayapura memberikan kredit dalam batas yang ditentukan dan secara aktif berintegrasi dengan masyarakat dan pemerintah setempat dengan mendukung program pembangunan, berpartisipasi dalam diskusi kebijakan strategis, dan membina hubungan yang kuat dan kolaboratif dengan otoritas daerah, memperkuat posisinya sebagai mitra kunci dalam stabilitas ekonomi dan pertumbuhan Papua.

Pada periode Orde Baru, fungsi KCBI wilayah Papua berjalan beriringan dengan program pemerintah dalam rangka pembangunan. Peran penting KCBI wilayah Papua pada saat itu di antaranya sebagai penasihat Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam bidang ekonomi dan moneter, membantu penanggulangan masalah-masalah ekonomi di wilayah ini, serta menjadi *financial agent* dari Pemerintah Pusat.

Hingga saat ini, KPw BI Papua dan Papua Barat senantiasa berupaya untuk memainkan peran penting dan memberikan kontribusi nyata dalam gerak pembangunan di Wilayah Papua dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Papua. Peran dan kontribusi tersebut, dilakukan melalui beragam program sebagai mitra aktif dari Pemerintah Daerah, dan fasilitasi serta pendampingan bagi para pelaku usaha UMKM.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua dan Papua Barat, telah mengawal laju perekonomian wilayah Papua sejak puluhan tahun yang lalu. Buku berjudul “**Membangun Pilar Kedaulatan Ekonomi di Indonesia Timur: Sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Papua**” yang hadir di tangan pembaca, merupakan buku yang membahas mengenai perkembangan ekonomi-politik Papua dan peran Bank Indonesia di dalamnya. Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi catatan sejarah perkembangan Papua, tetapi juga dapat menjadi sumber refleksi yang berharga bagi para pemangku kebijakan. Dengan memahami sejarah panjang, potensi ekonomi, serta aspirasi masyarakat Papua, kiranya kebijakan yang lahir akan semakin relevan dan mampu mewujudkan cita-cita ekonomi yang diimpikan oleh seluruh masyarakat Papua.

Jakarta, Mei 2025



SAMBUTAN

KEPALA BANK INDONESIA INSTITUTE

CLARITA LIGAYA ISKANDAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan yang kompleks dalam membangun konektivitas antardaerah, khususnya dalam menghadirkan kesetaraan ekonomi di wilayah-wilayah yang secara geografis terpencil seperti Papua. Namun, bagi Bank Indonesia, tantangan ini bukan sekadar kendala, melainkan panggilan untuk memperluas mandat dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional melalui kebijakan yang adaptif dan inklusif.

Buku *“Membangun Pilar Kedaulatan Ekonomi di Indonesia Timur: Sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Papua”* hadir sebagai kontribusi penting dalam memahami dinamika pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia serta peran strategis Bank Indonesia dalam proses tersebut. Buku ini bukan hanya menyajikan catatan sejarah institusi, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang bagaimana institusi moneter negara menjawab tantangan disrupsi, ketimpangan, dan kompleksitas sosial-politik di wilayah yang kaya akan sumber daya, namun

kerap terpinggirkan dari arus pembangunan nasional.

Melalui buku ini, kita dapat melihat bahwa peran Bank Indonesia jauh melampaui kebijakan moneter. Dari menjaga distribusi uang layak edar hingga memperkuat literasi ekonomi masyarakat, dari penguatan sistem pembayaran hingga mendorong inklusi keuangan berbasis komunitas lokal—Bank Indonesia hadir sebagai katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Papua. Kehadiran lima Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) di wilayah ini menjadi simbol komitmen institusional yang konkret dan berkelanjutan.

Papua, dengan seluruh kompleksitas geografis dan etnografisnya, justru menjadi cermin dari bagaimana pendekatan kebijakan nasional perlu bersifat kontekstual dan berdimensi lokal. Buku ini secara kronologis memaparkan bagaimana proses “*pengrupiahan*” Papua tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolis—yakni integrasi ekonomi sebagai bagian dari proses merawat keutuhan bangsa.

Dengan pendekatan historis, buku ini memperlihatkan bahwa kedaulatan ekonomi bukan sekadar capaian teknokratis, melainkan proses kolaboratif yang menuntut sensitivitas sosial, pemahaman budaya lokal, serta keberanian untuk berinovasi di tengah keterbatasan. Oleh karena itu, pembaca diajak tidak hanya mengenang capaian masa lalu, tetapi juga merenungkan arah ke depan: bagaimana kebijakan moneter dapat lebih transformatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat di wilayah-wilayah “*frontier*” seperti Papua.

Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk menjadikan buku ini sebagai jendela untuk memahami Papua bukan dari sisi tantangannya semata, tetapi juga dari potensi dan kekuatannya. Dalam konteks ini, Bank Indonesia tidak hanya berperan sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga sebagai penjaga harapan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Mei 2025

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA	v
SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA	viii
SAMBUTAN KEPALA BANK INDONESIA INSTITUTE	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GRAFIK	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxvii
GLOSARIUM	xxxiii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Kerangka Konseptual	10
C. Tujuan Penulisan	14
D. Metode Penulisan	14
E. Sistematika Penulisan	16

BAB I

PROSES MENJADI BAGIAN HINDIA BELANDA	19
A. Interaksi Awal Papua dengan Wilayah Nusantara lain	20
B. Perluasan Pengaruh (Hindia) Belanda	33
C. Perkembangan Ekonomi Papua (Barat)	45
D. Papua (Barat) Selama Perang Pasifik	67

BAB II

DARI DIPLOMASI HINGGA KONFRONTASI: PERKEMBANGAN POLITIK DI PAPUA, 1945 – 1960-AN	81
A. Silang Sengkarut Klaim Politik Atas Papua	82
B. Papua sebagai Isu Politik Nasional	91
C. Kegagalan Diplomasi dan Munculnya Aksi-aksi Ofensif	101
D. Gencatan Senjata dan Penyerahan Papua Kepada Indonesia	111

BAB III

PERKEMBANGAN EKONOMI PAPUA HINGGA PERIODE TRANSISI, 1950-AN - 1960-AN	133
A. Perkembangan Demografis dan Struktur Ekonomi Papua	134
B. Deklarasi Ekonomi, Peleton Bank dan Konsekuensinya bagi Papua	145
C. Perekonomian Papua Menjelang dan Setelah Transisi	151
D. Perkembangan Ekonomi Lokal/Regional	158
D.1. Perkembangan Ekonomi di Jayapura	158
D.2. Perkembangan Ekonomi di Biak	164
D.3. Perkembangan Ekonomi di Sorong	169

D.4. Perkembangan Ekonomi di Manokwari	176
D.5. Perkembangan Ekonomi di Merauke	183
BAB IV	
PENDIRIAN KANTOR-KANTOR CABANG BANK INDONESIA DI PAPUA	193
A. Kantor Cabang BI Jayapura (Kotabaru)	195
A.1. Proses Pendirian	195
A.2. Nasionalisasi Aset Nederlandse Handels Maatschappij (NHM)	201
A.3. Tantangan Awal Pasca Peralihan	210
A.4. Peran Penting KCBI Jayapura	213
B. Pembukaan Kantor-kantor Cabang BI Lainnya	218
B.1. Kantor Cabang BI Biak	218
B.2. Kantor Cabang BI Sorong	232
B.3. Kantor Cabang BI Manokwari	240
B.4. Kantor Cabang BI Merauke	248
C. Inspeksi Soekasah Somawidjaja	257
BAB V	
PEREDARAN RUPIAH IRIAN BARAT (IBRp.) DAN PROSES 'PENGRUPIAHAN' PAPUA, 1963 - 1973	265
A. Diperkenalkannya Rupiah Irian Barat	266
B. Karakteristik Spesimen Uang Kertas Rupiah Irian Barat	274
C. Penerbitan Rupiah Baru Pasca Transisi	291
D. Proses Pengrupiahan Papua	307
D.1. Pembentukan 'Tim Pengrupiahan Irian Barat'	311
D.2. Proses Penarikan Rupiah Irian Barat	317

D.3. Beberapa Kendala Pengrupiahan di Lapangan	321
--	-----

BAB VI

KCBI JAYAPURA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI PAPUA, 1968 – 1998	331
A. Pelepasan Aktivitas Komersial Bank Indonesia	332
B. Persiapan KCBI Jayapura sebagai Kantor Cabang Tunggal	347
B.1. Restrukturisasi Organisasi dan Kepegawaian	347
B.2. Pembentukan Tim Skrining KCBI Jayapura	354
B.3. Pembangunan Infrastruktur Kantor	357
C. Tugas dan Fungsi Baru KCBI Jayapura	361
D. KCBI Jayapura dan Papua dalam Gerak Pembangunan Nasional	369

BAB VII

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) PAPUA DAN PEMBANGUNAN PAPUA HINGGA ERA OTONOMI KHUSUS, 1998 – 2024	383
A. Papua dalam Pusaran Krisis Ekonomi Tahun 1998	385
A.1. Dampak Krisis Ekonomi 1998	385
A.2. Peran Bank Indonesia dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1998	387
B. Otonomi Daerah, Otonomi Khusus dan Pemekaran Wilayah	390
B.1. Otonomi Daerah dan Lahirnya Otonomi Khusus	390
B.2. Pemekaran Wilayah Administrasi	393
C. Pembangunan Papua di Era Otonomi Khusus (Otsus)	396
C.1. Perkembangan PDRB Wilayah Papua	396

C.2. Indikator Perekonomian Lainnya di Papua	404
C.3. Tantangan Pengembangan Perekonomian Wilayah Papua	409
C.4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	411
D. KPw BI Provinsi Papua di Era Otonomi Daerah	422
D.1 Transformasi Kelembagaan KPw BI Papua	422
D.2. Pelaksanaan Tugas di KPw BI Provinsi Papua	428
E. Sinergi Kelembagaan TPID dan Pembinaan UMKM	434
E.1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	434
E.2. Pengembangan UMKM di Papua: Sinergi Bank Indonesia dan <i>Stakeholders</i>	437
E.3. Festival Kopi Papua: Mengangkat Kopi Papua ke Pentas Dunia	440
BAB VIII	449
PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	457
Arsip dan Laporan	457
Arsip Meneg Ekuin	457
Arsip dan Laporan Bank Indonesia	458
Surat Kabar	463
Buku & Bab dalam Buku	470
Jurnal	476

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta awal Papua Barat, yang dicetak oleh Penerbit Isaak Tirion pada 1753.	28
Gambar 1.2. Sketsa Peta ‘Naderlands Papoea of Nieuw-Guinea’ yang diproduksi pada tahun 1824.	42
Gambar 1.3. Proses pengambilan getah kopal yang dilakukan melalui teknik penyadapan.	50
Gambar 1.4. Peta di atas menampilkan karakteristik ekologis yang sangat beragam dari Papua Barat dan Papua Nugini.	53
Gambar 1.5. Proses pengiriman kopal yang dilakukan oleh salah satu kapal KPM. Foto kira-kira diambil pada November 1961.	58
Gambar 1.6. Peta administratif Papua Barat (1962) yang menggambarkan pembagian Papua oleh Belanda ke dalam enam wilayah: Hollandia, Geelvink-Baai, Zuid Nieuw-Guinea, Centraal Bergland, Fakfak, dan West Nieuw-Guinea.	80
Gambar 2.1. Konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946.	83
Gambar 2.2. Suasana Konferensi Denpasar di Bali Hotel, Denpasar.	85
Gambar 2.3. S.J.L. van Waardenburg, Gubernur Nieuw Guinea (1950-53).	88

- Gambar 2.4.** Silas Papare tengah berpidato dalam sebuah rapat umum pembebasan Irian Barat. 93
- Gambar 2.5.** Rapat raksasa menuntut pengembalian Irian Barat ke Indonesia di Lapangan Merdeka, Jakarta. 97
- Gambar 2.6.** Perundingan di atas Kapal Talisse antara Kapten Kapal S. Tol (kiri) dan Kapten Muljono selaku komando pelabuhan Tandjung Priok. 99
- Gambar 2.7.** Coret-coretan bernada provokatif pada salah satu bangunan Milik Belanda di Jakarta (besar kemungkinan Bank Belanda). 102
- Gambar 2.8.** Coret-coretan pada gedung Borsumij (Borneo Sumatra Maatschappij). 103
- Gambar 2.9.** Coret-coretan pada gedung Radio Holland di Kotabaru, yang kemudian diambil alih para buruh Indonesia di akhir 1957. 103
- Gambar 2.10.** Kapal laut ‘Castel Felice’ berlabuh di Pelabuhan Rotterdam pada 6 Agustus 1958, membawa 500 penumpang Belanda yang direpatriasi dari Indonesia karena peristiwa ‘Zwarte Sinterklaas.’ 104
- Gambar 2.11.** Proses pemilihan calon anggota Dewan Nugini yang dilakukan di desa nelayan Kayu Pulau, Hollandia. 106
- Gambar 2.12.** Pada 5 April 1961, Kantor Pos Nugini Belanda mengeluarkan dua buah prangko khusus bernilai 25 dan 30 sen dalam rangka peresmian Dewan Nugini. 106
- Gambar 2.13.** Dr. Djalal Abdoh (1909–1996), seorang diplomat ulung asal Iran. 113
- Gambar 2.14.** Upacara penyerahan kekuasaan Irian Barat dari UNTEA ke Indonesia. 119
- Gambar 2.15.** Dr. Djalal Abdoh (dengan topi di tangan) dan Dr. Soebandrio (berkacamata hitam) tengah menginspeksi satuan pasukan Papua. 120
- Gambar 2.16.** J.E. Bonay, mantan pimpinan redaksi harian *Tjenderawasih* yang diangkat sebagai Gubernur pertama Irian Barat. 122

- Gambar 2.17.** Iklan Rumah Makan “Tjahaja Kota” di Jakarta yang ditutup pada 1 Mei 1963 guna merayakan ‘kembalinya’ Papua ke Indonesia. 125
- Gambar 2.18.** Dua buah foto yang menampilkan suasana persidangan Dewan Keamanan PBB di New York terkait dengan sengketa Papua. 132
- Gambar 3.1.** Transaksi penjualan kopra di Papua yang dilakukan di atas geladak kapal Cycloop. 143
- Gambar 3.2.** Kantor utama Nieuw-Guinea Import en Export Maatschappij (NIGIMY) yang terletak di Jayapura. 154
- Gambar 3.3.** Lintasan Bandara Mokmer (sekarang Bandara Frans Kaisiepo) di Biak sebagai jalur penghubung utama antara Jakarta dan Papua. 166
- Gambar 3.4.** Suasana Pelabuhan Doom di Sorong sebagai pelabuhan ekspor terbesar di Papua. 171
- Gambar 3.5.** Proses penyortiran kopal yang dilakukan oleh penduduk setempat. 172
- Gambar 3.6.** Salah satu sudut kota Manokwari dilihat dari atas (Foto diperkirakan diambil antara tahun 1950-an atau 1960-an) 177
- Gambar 3.7.** Go Siang Kie, seorang pedagang Tionghoa dari Manokwari, tengah menimbang seikat kulit kayu massoia. 178
- Gambar 3.8.** Sketsa wilayah Manokwari yang menggambarkan rencana pendirian kawasan pertanian di sekitaran Amban-Manokwari. 180
- Gambar 3.9.** Proyek ‘Padi Kumbe’ yang selama puluhan tahun diinisiasi oleh pemerintah kolonial Belanda di Merauke. 186
- Gambar 3.10.** Peta ini menunjukkan sejauh mana pemerintah kolonial Belanda telah merencanakan dan mengeksplorasi lahan yang akan digunakan untuk kepentingan pertanian dan riset ilmiah di Papua Barat. 192
- Gambar 4.1.** Berita tentang pembukaan Kantor Cabang Bank Indonesia Kotabaru di halaman depan Harian *Tjenderawasih*. 200
- Gambar 4.2.** Kantor NHM Hollandia yang kemudian menjadi KCBI Kotabaru. 208

Gambar 4.3. Suasana di dalam perkantoran NHM Hollandia pada Juni 1960.	209
Gambar 4.4. Foto gedung KCBI Jayapura yang menempati gedung bekas NHM.	217
Gambar 4.5. Ruangan pemimpin Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura.	217
Gambar 4.6. Denah rancang bangun KCBI Biak di bekas gedung Pacific Import Maatschappij (PIM).	225
Gambar 4.7. Kantor Cabang Bank Indonesia Biak setelah mengalami renovasi. Foto diambil pada November 1968.	226
Gambar 4.8. Para pegawai KCBI Biak.	231
Gambar 4.9. Kantor NHM dan KPM Sorong yang nantinya menjadi KCBI Sorong.	234
Gambar 4.10. Berita mengenai pembukaan KCBI Sorong secara resmi pada 15 Maret 1963.	239
Gambar 4.11. Foto dari Kantor Cabang Bank Indonesia Manokwari yang diambil pada 22 Januari 1963.	244
Gambar 4.12. Kondisi Kantor Cabang Bank Indonesia Manokwari yang kemudian digunakan sebagai rumah tinggal. Foto diambil pada 21 Januari 1988.	244
Gambar 4.13. Kantor NHM Merauke yang kemudian digunakan sebagai KCBI Merauke.	251
Gambar 5.1. Pecahan 5 (lima) Nieuw-Guinea Gulden dengan ilustrasi Ratu Juliana di sebelah kiri dan burung cenderawasih di kanan.	270
Gambar 5.2. Pecahan 1 (satu) Nederlands Nieuw-Guinea Gulden (NNG) dengan ilustrasi Ratu Juliana, ukiran khas Papua, dan salah satu jenis cenderawasih.	270
Gambar 5.3. Uang logam Rupiah Irian Barat dengan nominal 1 (satu) sen.	273
Gambar 5.4. Pecahan 1 (satu) Rupiah Uang Kepulauan Riau.	275
Gambar 5.5. Pecahan 2½ Rupiah Kepulauan Riau.	275

Gambar 5.6. Tampak Depan dan belakang dari pecahan 1 Rupiah Irian Barat	278
Gambar 5.7. Tampak depan dan belakang dari pecahan 2½ Rupiah Irian Barat.	279
Gambar 5.8. Tampak depan dan belakang dari pecahan 5 Rupiah Irian Barat.	281
Gambar 5.9. Tampak depan dan belakang dari pecahan 10 Rupiah Irian Barat.	283
Gambar 5.10. Tampak depan dan belakang dari pecahan 100 Rupiah Irian Barat.	284
Gambar 5.11. Suasana salah satu kantor pos di Merauke yang kelak digunakan sebagai salah satu lokasi penukaran Rupiah.	318
Gambar 5.12. Mata uang Rupiah seri Sudirman yang beberapa pecahannya dianggap membingungkan bagi masyarakat Irian Barat, seperti pecahan Rp25- dan Rp500- & pecahan Rp2,5 dan Rp10-.	330
Gambar 6.1. Pengumuman mengenai penyerahan tugas komersil dari Kantor Cabang Bank Indonesia di Papua kepada Bank Ekspor – Impor Indonesia.	342
Gambar 6.2. Pengumuman Penyerahan Aktivitas Komersil BI kepada Bank Ekspor-Impor di Merauke.	346
Gambar 6.4. Bagan Organisasi dan Personalia Kantor Cabang Bank Indonesia – Jayapura.	353
Gambar 6.5. Proses Pembangunan KCBI Jayapura sekitar tahun 1971 – 1974.	360
Gambar 6.6. Presiden Soeharto pada saat peresmian Jalan Tembus Ganyem-Sentani sepanjang 60 km di Desa Kemiri.	379
Gambar 7.1. Proses pemekaran wilayah Papua antara tahun 2003 hingga 2022.	394
Gambar 7.2. Beberapa destinasi wisata di Biak.	413
Gambar 7.3. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Jayawijaya.	415

Gambar 7.4. Berbagai bentuk hasil kerajinan patung Asmat.	420
Gambar 7.5. Struktur Organisasi KPw BI Provinsi Papua	426
Gambar 7.6. Penyelenggaraan Festival Cenderawasih 2024 yang merupakan program unggulan KPw BI Papua bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua.	439
Gambar 7.7. Antusiasme masyarakat Kota Jayapura menyaksikan Festival Kopi Papua 2024.	442

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Wilayah Papua Berdasarkan Hasil Sensus penduduk 1930	47
Tabel 1.2. Jumlah kapal yang datang di Pelabuhan-pelabuhan Papua Barat, 1924 – 1935	60
Tabel 1.3. Ekspor Kopra dari Papua Barat atau Nugini Belanda, 1910-1936 (dalam ton)	62
Tabel 3.1. Perbandingan Populasi Beberapa Kabupaten di Papua tahun 1961 dan 1971	137
Tabel 3.2. Jenis Komoditas Ekspor Papua Berdasarkan Volume, 1951 – 1971	142
Tabel 3.3. Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia, 1960-1965 (dalam juta Rupiah)	150
Tabel 3.4. Daftar Pengusaha yang Menerima Kredit Pemerintah di Jayapura (Hollandia) dan Sentani	160
Tabel 3.5. Produk-produk yang Difasilitasi oleh Koperasi “Werkgemeenschap Amberbaken” untuk Dikirim ke Manokwari (1960)	181
Tabel 4.1. Remise yang Diterima KCBI Biak dari Kantor Pusat Jakarta untuk Diteruskan ke KCBI Jayapura (31 Maret 1965)	228

Tabel 5.1. Karakteristik uang logam IBRp. khusus untuk Provinsi Papua	273
Tabel 5.2. Besaran nominal distribusi uang seri Presiden Sukarno di Papua	285
Tabel 5.3. Nilai Tukar Rupiah Irian Barat terhadap Rupiah dan Dolar Amerika (1963 – 1971)	297
Tabel 5.4. Nilai Tukar Mata Uang Eropa dan Amerika terhadap Rupiah Irian Barat (IBRp.) (per 31 Maret 1964)	298
Tabel 5.5. Nilai Tukar Mata Uang Asia dan Pasifik terhadap Rupiah Irian Barat (IBRp.) (per 31 Maret 1964)	299
Tabel 5.6. Perbandingan Tarif Impor antara Papua dengan Wilayah Indonesia Lainnya (Per Oktober 1972)	300
Tabel 5.7. Perbandingan Anggaran Belanja Irian Barat 1969/70 dengan Kurs Lama dan Baru	305
Tabel 5.8. Jumlah Uang Panjar yang Harus Disediakan Cabang Kantor Pos di Papua dalam Rangka Pengrupiahan	313
Tabel 5.9. Rincian Pengiriman Rupiah Tahap Pertama dari Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta ke Kantor Cabang Bank Indonesia di Papua	319
Tabel 5.10. Hasil Penukaran/Penarikan Mata Uang IBRp. di Seluruh Irian Barat (1 Juni – 14 Juli 1971)	324
Tabel 6.1. Daftar Pejabat yang Diplot untuk Menduduki Posisi Pimpinan di Bank Ekspor-Impor Indonesia Cabang Papua	341
Tabel 6.2. Daftar Nama Pegawai yang Tidak Dialihkan ke Bank Ekspor-Impor Indonesia	352
Tabel 6.3. Jumlah Kantor Bank di Wilayah Kerja Kantor Cabang BI Jayapura pada 1977	362
Tabel 6.4. Alokasi Dana Pembangunan untuk Sektor Pendidikan di Papua, 1969-1973	364
Tabel 6.5. Perkembangan Angka Ekspor di Irian Barat Selama Tiga Tahun 1975 - 1977	371

Tabel 6.6. Perkembangan Jumlah Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi di Wilayah Kerja Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura	377
Tabel 6.7. Proyek-Proyek yang Dibiayai dengan Bantuan/Kredit Luar Negeri Wilayah Kerja BI Jayapura	381
Tabel 7.1. Pembagian Kabupaten/ Kota di Papua setelah Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)	395
Tabel 7.2. Proyek-proyek Infrastruktur Penting di Papua, 2014-2024	400

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Jumlah Impor Beras ke Wilayah Papua Barat dari Tahun 1928 hingga 1936	64
Grafik 3.1. Perbandingan Ekspor dan Impor Papua, 1954-1971	140
Grafik 6.1. Penyaluran Kredit Investasi Kecil (KIK) di Papua, 1974-1980	374
Grafik 6.2. Perkembangan Jumlah Kredit KMKP dan Kontribusi Papua terhadap Nasional (1974-1980)	375
Grafik 7.1. Perkembangan PDRB Wilayah Papua Berdasarkan Lapangan Usaha (2019-2024)	397
Grafik 7.1. Pangsa Pasar Ekspor Konsentrat Tembaga Papua (Triwulan IV 2022)	405
Grafik 7.2. Pangsa Pasar Ekspor Non-Tambang Papua (Triwulan IV 2023)	405
Grafik 7.3. Komposisi Pengangguran di Papua Berdasarkan Tingkat Pendidikan (2022)	409

DAFTAR SINGKATAN

AB	:	Amerika-Belanda
ADB	:	<i>Asian Development Bank</i>
ADHK	:	Atas Dasar Harga Konstan
ADO	:	Alokasi Devisa Daerah Otomatis
ALRI	:	Angkatan Laut Republik Indonesia
AMN	:	Akademi Militer Nasional
Ampera	:	Amanat Penderitaan Rakyat
ANETA	:	<i>Algemeen Nieuws- en Telegraaf- Agentschap</i>
ANRI	:	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APMK	:	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
BE	:	<i>Bill of Exchange</i>
BEII	:	Bank Ekspor-Impor Indonesia
Berdikari	:	Berdiri di Atas Kaki Sendiri
BI	:	Bank Indonesia
BI-RTGS	:	<i>Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement</i>
BK3	:	Badan Kerjasama Kredit Kecamatan
BLLD	:	Badan Lalu Lintas Devisa

BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPU-PDN	: Badan Pimpinan Umum - Perusahaan Dagang Negara
CIF	: <i>Cost, Insurance, and Freight</i>
DAU	: Dana Alokasi Umum
Dekon	: Deklarasi Ekonomi
Depertan	: Dewan Pertahanan Nasional
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DOB	: Daerah Otonomi Baru
DPU	: Dinas Pekerjaan Umum
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
ERB	: Ekspedisi Rupiah Berdaulat
FEKDI	: Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FOB	: <i>Freight on Board</i>
FUNDWI	: <i>Fund of the United Nations for the Development of West Irian</i>
KAD	: Kerjasama Antar-Daerah
Komba	: Kombinasi Baru
KPWD	: Koordinator Pertukaran Warkat Debit
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani
Gerwis	: Gerakan Wanita Sedar
GIA	: <i>Garuda Indonesian Airways</i>
GNPIP	: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
GPM	: Gerakan Pasar Murah
IBRp.	: Rupiah Irian Barat
IHK	: Indeks Harga Konsumen
JCJL	: <i>Java China Japan Lijn</i>
JDF	: <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i>
KCBI	: Kantor Cabang Bank Indonesia

KEKDA	:	Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
KER	:	Kajian Ekonomi Regional
KIK	:	Kredit Investasi Kecil
KKI	:	Karya Kreatif Indonesia
KKPA	:	Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya
KKUD	:	Kredit kepada Koperasi Unit Desa
KLBI	:	Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KLM	:	<i>Koninklijke Luchtvaart Maatschappij</i>
KMB	:	Konferensi Meja Bundar
Kolognas	:	Komando Logistik Nasional
KOTI	:	Komando Tertinggi
KNIL	:	<i>Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger</i>
KMKP	:	Kredit Modal Kerja Permanen
KPKM	:	Kredit Pengusaha Kecil dan Menengah
KPKU	:	Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha
KPM	:	<i>Koninklijk Paketvaart Maatschappij</i>
KSSK	:	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
K.v.F	:	<i>Kantoor van Financien</i>
KUK	:	Kredit Usaha Kecil
KUPVA BB	:	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
KUT	:	Kredit Usaha Tani
Laksus	:	Pelaksana Khusus
L/C	:	<i>Letter of Credit</i>
LPP	:	Laporan Perekonomian Provinsi
LVD	:	<i>Landbouw Voorlichtingsdienst</i>
MRP	:	Majelis Rakyat Papua
Muspida	:	Musyawah Pimpinan Daerah
NIB	:	<i>Nederlandsch-Indische Handelsbank</i>
NICA	:	<i>Netherlands Indies Civil Administration</i>

NIGIMY	: <i>Nieuw-Guinea Import en Export Maatschappij</i>
NISM	: <i>Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij</i>
NNG	: <i>Nederlands Nieuw-Guinea Gulden</i>
OAP	: Orang Asli Papua
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
Otsus	: Otonomi Khusus
P2SK	: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pangkopkamtib	: Panglima Komando untuk Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Pangkowilhan	: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan
Permesta	: Piagam Perjuangan Semesta
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PEKDA	: Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah
PELNI	: Pelayaran Nasional Indonesia
PEPERA	: Penentuan Pendapat Rakyat
Peperti	: Penguasa Perang Tertinggi
PIHPS	: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
PIK	: Pusat Informasi Kompas
PKT	: Program Kemitraan Terpadu
PIM	: <i>Pacific Import Maatschappij</i>
PIT	: Pungutan Impor Tambahan
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PSBI	: Program Sosial Bank Indonesia
PSN	: Proyek Strategis Nasional
PUR	: Pengelolaan Uang Rupiah

QRIS	:	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
Repelita	:	Rencana Pembangunan Lima Tahun
Satgaswal	:	Satuan Tugas Pengawasan
SBPU	:	Surat Berharga Pasar Uang
SEKDA	:	Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
Sek-KIB	:	Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat
SFE	:	<i>Strategic Flagship Event</i>
SHK	:	Survei Harga Konsumen
SKN	:	Sistem Kliring Nasional
STANVAC	:	<i>Standard Vacuum Oil Company</i>
RIS	:	Republik Indonesia Serikat
SKDU	:	Survei Kegiatan Dunia Usaha
SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SPE	:	Survei Pedagang Eceran
SPH	:	Survei Pemantauan Harga
SPI	:	Statistik Perbankan Indonesia
SSP	:	Statistik Sistem Pembayaran
TPID	:	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	:	Tim Pengendalian Inflasi Pangan
Teningda	:	Tim Screening Daerah
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
Trikora	:	Tri Komando Rakyat
UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah
ULN	:	Utang Luar Negeri
UNTEA	:	<i>United Nations Temporary Executive Authority</i>
UTLE	:	Uang Tidak Layar Edar
VOC	:	<i>Vereenigde Oost-Indische Compagnie</i>
WPP	:	Wilayah Pengelolaan Perikanan

GLOSARIUM

- Afdeeling* : setingkat wilayah administrasi utama
- Agresi Militer : serangan bersenjata yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang melanggar kedaulatan dan integritas wilayah negara yang diserang.
- Akuisisi : Proses pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan oleh pihak lain.
- Amandemen : Perubahan atau perbaikan pada suatu dokumen resmi, seperti undang-undang atau konstitusi.
- Amberbaken : Nama sebuah koperasi dan wilayah di Manokwari yang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi lokal pada masa kolonial.
- Atas Dasar Harga Konstan : Perhitungan nilai ekonomi yang disesuaikan dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi).
- Beschikking* : Peraturan administratif Belanda yang mengatur penarikan dan penggantian uang kertas yang beredar di wilayah Nugini Belanda.
- Intrekking* : Peraturan administratif Belanda yang mengatur penarikan dan penggantian uang kertas yang beredar di wilayah Nugini Belanda.
- Bill of Exchange* (BE) : Surat perintah bayar tanpa syarat yang ditarik oleh satu pihak kepada pihak lain untuk

- membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan kepada pihak tertentu atau pembawanya. Dalam konteks ini, merujuk pada kurs valuta asing yang berlaku.
- Binnenlandsch-Bestuur* : Istilah dalam bahasa Belanda yang merujuk pada administrasi atau pemerintahan dalam negeri pada masa kolonial Hindia Belanda.
- Blokade : Tindakan pengepungan suatu wilayah (biasanya pelabuhan atau negara) untuk mencegah orang atau barang keluar masuk.
- Cash supply* : Ketersediaan uang tunai,
- Clearance test* : Uji atau pemeriksaan untuk memastikan seseorang tidak terlibat dalam kegiatan terlarang.
- Crude Oil* : Minyak bumi yang belum mengalami proses penyulingan atau pemurnian.
- Daerah Otonomi Baru : Wilayah yang baru dimekarkan dan menjadi daerah otonom.
- Daerah transmigrasi : Wilayah tempat pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya.
- Deadlock* : Keadaan buntu atau jalan buntu, di mana tidak ada kemajuan yang dapat dicapai karena kedua belah pihak memiliki posisi yang bertentangan dan tidak mau mengalah.
- Debitur : Pihak yang berutang.
- Defisit : Kondisi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sering kali mengindikasikan masalah keuangan.
- Deforestasi : Penebangan hutan secara besar-besaran.
- Dekarantinisasi : Proses penghapusan karantina, dalam konteks ini karantina moneter.
- Deklarasi Ekonomi (Dekon) : Kebijakan ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Soekarno pada 1963 untuk

- menghapuskan sisa-sisa pengaruh ekonomi kolonial dan membangun ekonomi nasional berbasis ekonomi demokrasi dan sosialisasi (swasembada).
- Deposan : Orang yang menyimpan uang di bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Depresi Ekonomi : Periode penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan, ditandai dengan penurunan produksi, pengangguran tinggi, dan penurunan harga.
- Desentralisasi : Penyerahan sebagian kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada badan-badan lain (daerah).
- Devaluasi : Penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing.
- Devisa : Cadangan mata uang asing yang dimiliki suatu negara dan digunakan dalam perdagangan internasional.
- Dislokasi uang : Proses distribusi ulang uang dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menjamin kecukupan kas.
- Disparitas harga : Perbedaan harga yang signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
- Dualisme harga : Keberadaan dua sistem penetapan harga yang berbeda dalam satu waktu (dalam hal ini, harga yang disebutkan dalam Rupiah nasional dan referensi mental masyarakat pada IBRp.).
- Ekonomi Subsisten : Sistem ekonomi di mana masyarakat menghasilkan barang dan jasa terutama untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, dengan sedikit atau tanpa surplus untuk diperdagangkan
- Ekpedisi Rupiah Berdaulat (ERB) : Program tahunan Bank Indonesia untuk menjangkau daerah 3T dengan layanan kas dan sosialisasi Rupiah.

- Ekspedisi* : Perjalanan atau penjelajahan dengan tujuan tertentu, seringkali ilmiah, militer, atau penjelajahan wilayah baru.
- Eksplorasi* : Pemanfaatan sumber daya atau tenaga kerja secara berlebihan untuk keuntungan sendiri, seringkali merugikan pihak yang dieksplorasi.
- Financial agent* : Pihak yang bertindak sebagai pengelola keuangan pemerintah.
- Frontier* : Wilayah perbatasan suatu negara atau wilayah yang masih belum banyak dijelajahi atau dihuni. Bisa juga berarti batas terdepan dari suatu perkembangan atau pengetahuan.
- Gezaghebber* : Istilah dalam bahasa Belanda yang berarti penguasa atau gubernur, terutama pada masa kolonial.
- Gross Domestic Product* : Produk Domestik Bruto, nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu.
- Hiperinflasi* : Tingkat inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali.
- Home staff* : Sebutan lain untuk pegawai penempatan Kantor Pusat.
- Hortikultura* : Cabang pertanian yang fokus pada budidaya tanaman sayur, buah, dan tanaman hias.
- Hulpgezaghebber* : Istilah dalam bahasa Belanda yang berarti wakil penguasa atau wakil gubernur pada masa kolonial.
- IBRp. (Irian Barat Rupiah)* : Mata uang khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1963 untuk wilayah Irian Barat sebagai bagian dari integrasi ekonomi Papua.
- In Dispute* : Dalam sengketa atau perselisihan, status suatu wilayah atau masalah yang belum diselesaikan dan menjadi perdebatan.

- Indeks Harga Konsumen : Ukuran perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga.
- Indoktrinasi : Proses mengajarkan suatu doktrin, ideologi, atau keyakinan secara sistematis dan tanpa memberikan ruang untuk pandangan alternatif.
- Infiltrasi : Penyusupan secara diam-diam ke wilayah musuh atau organisasi tertentu dengan tujuan spionase, sabotase, atau mempengaruhi.
- Inflasi : Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.
- Inspeksi : Kegiatan peninjauan atau pemeriksaan langsung di lapangan untuk menilai kinerja dan kondisi suatu kantor atau institusi.
- Inspeksi Gedung : Pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk menilai kelayakan dan kebutuhan renovasi gedung operasional.
- Inspektur Muda : Jabatan struktural di Bank Indonesia yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kinerja kantor-kantor cabang BI.
- Integrasi Moneter : Proses penyatuan sistem keuangan dan alat pembayaran suatu wilayah ke dalam kerangka sistem keuangan nasional.
- Interniran : Penahanan atau pengasingan seseorang atau sekelompok orang, biasanya tanpa proses hukum yang normal, seringkali terjadi pada masa perang atau konflik.
- Intervensi Moneter : Langkah pengaturan nilai tukar mata uang lokal oleh otoritas keuangan.
- Invasi : Serangan militer suatu negara ke wilayah negara lain dengan tujuan menduduki atau menguasainya.
- Inventaris : Seluruh perlengkapan dan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan/instansi, termasuk mebel,

- mesin, dan arsip
- K.R. Rp. (Rupiah Kepulauan Riau) : Mata uang khusus yang diterbitkan untuk menggantikan Dolar Malaya dan British Borneo Dollar di wilayah Riau pada tahun 1963 sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
- Kantor remise : Kantor perwakilan bank sentral yang bertugas menangani pengiriman uang.
- Karantina moneter : Kebijakan pemerintah untuk membatasi atau melarang operasi bank-bank selain bank sentral di suatu wilayah dalam periode tertentu.
- Kartal : Uang tunai yang beredar di masyarakat.
- Kas Keliling : Layanan Bank Indonesia untuk menjangkau wilayah terpencil dalam mendistribusikan uang rupiah dan memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat.
- Kas Keliling Luar Kota (KKLK) : Kegiatan Bank Indonesia membawa uang Rupiah langsung ke masyarakat di berbagai lokasi di luar kota kantor perwakilan.
- Kas Titipan : Fasilitas penyimpanan dan pengelolaan uang rupiah yang ditempatkan pada bank umum tertentu atas penunjukan Bank Indonesia, terutama di daerah terpencil yang belum memiliki kantor BI.
- Khazanah : Tempat penyimpanan kas utama (uang tunai dan logam mulia) di lembaga keuangan seperti bank sentral.
- Komando Mandala : Komando gabungan militer yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1962 dalam rangka kampanye pembebasan Irian Barat.
- Konfrontasi : Pertentangan atau permusuhan secara terbuka antara dua pihak atau lebih. Dalam sejarah Indonesia, istilah ini sering merujuk pada Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966).

- Konsesi : Pemberian hak, izin, atau kelonggaran oleh pemerintah, perusahaan, atau pihak lain kepada pihak lain untuk mengelola atau memanfaatkan sesuatu (misalnya, tanah, sumber daya alam).
- Konsolidasi : Proses penguatan, pemantapan, atau penyatuan berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang lebih kuat dan stabil.
- Konversi Mata Uang : Proses penukaran mata uang lama (gulden) ke mata uang baru (rupiah).
- Kopal : Resin atau getah keras dari pohon tertentu, biasanya digunakan dalam industri vernis dan bahan kimia.
- Koperasi : Organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama.
- Kopra : Daging kelapa yang dikeringkan dan menjadi bahan baku utama untuk minyak kelapa dan produk turunannya.
- Kreditur : Pihak yang memberikan kredit.
- Kuasa Kas : Pejabat yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kas harian di kantor cabang BI.
- Laksus Pangkoptik : Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
- Layanan Penukaran Uang Tidak Layak Edar (UTLE) : Layanan BI untuk menukar uang yang sudah rusak atau lusuh.
- Likuidasi : Proses pembubaran suatu perusahaan atau organisasi dengan cara menjual aset-asetnya dan membayar kewajiban-kewajibannya.
- Likuiditas : Kemampuan suatu organisasi atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
- Manifesto : Pernyataan publik tentang prinsip-prinsip,

- tujuan, atau kebijakan suatu kelompok, gerakan, atau partai politik.
- Marginalisasi** : Proses peminggiran atau pengucilan suatu kelompok dari partisipasi penuh dalam masyarakat.
- Mesianistik** : Berkaitan dengan kepercayaan akan datangnya seorang penyelamat atau pembebas (mesias) yang akan membawa perubahan besar atau zaman keemasan.
- Minutering** : Serat-serat halus berwarna (hijau dan coklat) yang tertanam dalam kertas uang sebagai salah satu fitur keamanan.
- mtm (*month-to-month*)** : Perbandingan data antara bulan saat ini dengan bulan sebelumnya.
- Mutasi** : Perpindahan tugas ke unit atau lokasi lain.
- Nasionalisasi** : Pengambilalihan aset-aset milik Belanda, termasuk NHM, oleh Pemerintah Indonesia.
- Onderafdeeling*** : wilayah setingkat sub-distrik
- Operasi Integrasi** : Langkah-langkah administratif, politik, dan ekonomi yang diambil untuk mengintegrasikan Irian Barat ke dalam Republik Indonesia.
- Operasi Mandala** : Operasi militer dan diplomatik Indonesia untuk merebut Irian Barat dari Belanda, yang kemudian diikuti dengan pembentukan infrastruktur pemerintahan dan perbankan.
- Operasi Pembersihan** : Tindakan sistematis untuk menghilangkan unsur-unsur yang dianggap tidak diinginkan atau mengancam, bisa dalam konteks politik, ideologi, atau etnis.
- Otonomi Daerah** : Pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

- aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Otonomi Khusus : Otonomi yang diberikan secara khusus kepada suatu daerah dalam negara karena kekhususannya, seperti yang diberikan kepada Papua melalui UU Nomor 21 Tahun 2001.
- Pasifikasi : Proses penenangan atau penundukan suatu wilayah yang bergejolak atau memberontak, seringkali melalui tindakan militer atau kekerasan.
- Paternalistis : Bersifat kebapakan atau seperti seorang ayah yang mengatur dan mengawasi orang lain dengan anggapan bahwa mereka lebih tahu apa yang terbaik, terkadang dengan mengabaikan otonomi pihak yang diatur.
- Pengrupiahan : Proses penggantian mata uang lokal (dalam hal ini IBRp.) dengan Rupiah nasional.
- Pengrupiahan Irian Barat : Istilah khusus untuk proses penggantian IBRp. dengan Rupiah nasional di wilayah Irian Barat (Papua).
- Peristiwa Cikini : Merujuk pada percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957 di Perguruan Cikini, Jakarta.
- Personalia : Bagian yang mengurus kepegawaian (saat ini Departemen Sumber Daya Manusia)
- PN Irian Bhakti : Perusahaan Negara yang disiapkan untuk mendukung perekonomian Papua, antara lain melalui penyediaan kredit impor.
- Produk Domestik Regional Bruto : Nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu wilayah dalam periode tertentu.
- Redenominasi : Penggantian atau perubahan satuan mata uang secara resmi.
- Rekening Koresponden : Rekening antar bank lintas negara yang memungkinkan transaksi devisa dan pembayaran.

- internasional
- Remitansi : Pengiriman dana dari satu wilayah ke wilayah lain, dalam konteks ini dari Kantor Pusat BI atau KCBI Jayapura ke cabang di Sorong atau Manokwari.
- Resolusi : Pernyataan resmi pendapat atau keputusan suatu badan deliberatif (seperti organisasi internasional atau parlemen) yang biasanya berisi tindakan yang harus diambil.
- Restrukturisasi : Proses perombakan atau penataan ulang sistem dan manajemen organisasi agar lebih efisien dan efektif.
- Revolusi : Perubahan mendasar dan cepat dalam suatu sistem atau struktur, seringkali melibatkan kekerasan. Dalam konteks Indonesia, merujuk pada perjuangan kemerdekaan setelah proklamasi 1945.
- Rosette : Motif geometris dekoratif berbentuk bunga atau lingkaran, digunakan sebagai elemen ornamen pada uang kertas untuk memperindah sekaligus menambah fitur pengaman.
- Rust en Orde* : Frasa dalam bahasa Belanda yang berarti “ketenangan dan ketertiban”. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tujuan pemerintah kolonial Belanda dalam mengendalikan wilayah jajahannya.
- Schakelofficieren* : stilah dalam bahasa Belanda yang berarti perwira penghubung, yang bertugas untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara kelompok atau pihak yang berbeda.
- Sentralistik : Sistem pemerintahan di mana seluruh kekuasaan pemerintahan dipusatkan pada pemerintah pusat.

- Separatis : Bersifat atau mendukung pemisahan diri suatu wilayah atau kelompok dari suatu negara.
- Sinkretisme : Penggabungan atau perpaduan berbagai unsur kepercayaan, agama, atau budaya yang berbeda.
- Stabilitas Moneter : Kondisi ekonomi di mana nilai uang dan sistem pembayaran berjalan dengan lancar tanpa gangguan inflasi atau ketidakpercayaan publik terhadap mata uang.
- Subsidi : Bantuan keuangan yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban atau mendorong produksi/konsumsi suatu barang atau jasa.
- Suku bunga : Tingkat biaya pinjaman atau imbal hasil investasi dalam bentuk persentase per periode waktu.
- Swasembada Pangan : Kondisi di mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya tanpa ketergantungan dari wilayah lain.
- Tanah Ulayat : Hak penguasaan atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
- Tanda Air : Fitur keamanan berupa gambar yang tampak transparan saat uang diterawang, dalam hal ini berupa potret Presiden Sukarno.
- Trading Contact Zone* : Wilayah geografis di mana berbagai budaya dan kelompok bertemu untuk melakukan perdagangan dan pertukaran barang, ide, dan budaya.
- Trikora : Tri Komando Rakyat, adalah tiga seruan yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta dalam rangka pembebasan Irian Barat dari pendudukan Belanda.
- Uang Panjar : Dana muka yang disediakan untuk memperlancar kegiatan operasional, dalam konteks ini digunakan Djawatan Pos untuk mendukung proses penukaran mata uang.

- Unilateral : Tindakan atau keputusan yang diambil hanya oleh satu pihak tanpa persetujuan atau konsultasi dengan pihak lain yang terlibat.
- Utang Kredit : Pinjaman dana yang harus dikembalikan oleh individu atau organisasi kepada pemberi pinjaman.
- Utrechtsche Zendingsvereeniging* : Salah satu organisasi Zending (misionaris Kristen) yang berasal dari Utrecht, Belanda.
- Vandalistik : Bersifat merusak atau menghancurkan properti publik atau milik orang lain secara sengaja dan tanpa alasan yang jelas.
- yoy (*year-on-year*) : Perbandingan data antara periode saat ini dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
- ytd (*year-to-date*) : Perbandingan data dari awal tahun hingga saat ini.
- Zending* : Kegiatan penyebaran agama Kristen (misionaris), terutama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dari Eropa ke wilayah-wilayah lain.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“...Saudara-saudara, sebagai tadi saya katakan, perjuangan kita di PBB tidak berhasil. Maka oleh karena itu, pada satu ketika kita berkata: Kita tidak akan bicara lagi di dalam PBB. Sudah bertahun-tahun kita coba di PBB, ... tidak berhasil! Pada satu hari saya berkata kepada Pemerintah Republik Indonesia: jangan bicarakan soal Irian Barat ini lagi di dalam PBB, tetapi jalankanlah satu politik baru terhadap imperialisme Belanda. Marilah kita mengadakan konfrontasi kekuatan terhadap imperialisme Belanda.”

.... Aku berkata konfrontasi di segala bidang. “Apa abamu” kataku, “Ya, iki dadaku. Dada Indonesia. Endi dadamu.” Konfrontasi, konfrontasi apa? Situ mengadakan konfrontasi ekonomi, kita adakan konfrontasi ekonomi. Konfrontasi politik, kita jalankan konfrontasi politik. Konfrontasi militer, kita jalankan pula konfrontasi militer.”¹

1 *Pembebasan Irian Barat: Kumpulan Pidato Presiden Sukarno dan Keterangan-keterangan Mengenai Perjuangan Pembebasan Irian Barat dari 17 Agustus 1961 sampai 17 Agustus 1962.* (Djakarta: Departemen Penerangan RI, 1962); Lihat pula dalam *Dua Puluh Lima Tahun Trikora* (Jakarta: Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, 1988), hlm. 57.

Paragraf di atas merupakan kutipan dari pidato penuh semangat yang disampaikan Presiden Sukarno di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961, di hadapan para kadet Akademi Militer Nasional (AMN) dan khalayak umum. Dalam pidatonya tersebut, Presiden Sukarno menunjukkan kegusarannya atas masalah Papua,² yang saat itu dalam perspektif Indonesia disebut sebagai Irian Barat, yang berlarut-larut di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta sikap Belanda yang dianggap terus mengulur waktu karena enggan melepaskannya kepada Indonesia. Terhadap kondisi tersebut, Presiden Sukarno memerintahkan seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya tentara serta segenap aparaturnegara untuk mengambil sikap tegas, yaitu melancarkan konfrontasi politik dan militer. ‘Perintah’ tersebut kemudian dikenal dengan istilah Tri Komando Rakyat atau Trikora, yang berisi seruan untuk: “(1) Menggagalkan pembentukan ‘Negara Papua’ yang dibentuk oleh Belanda; (2) Mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat; (3) Mempersiapkan mobilisasi umum untuk merebut Irian Barat dari Belanda.”³

2 Dalam sejarahnya, wilayah ini mengalami beberapa kali pergantian nama dan perubahan batas administrasi wilayah. Pada masa kolonial, sumber-sumber Belanda menyebut wilayah ini dengan istilah ‘Nederlandse Nieuw Guinea’ atau ‘Dutch New Guinea.’ Kemudian, pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Pemerintah Indonesia menyebut wilayah ini sebagai ‘Irian Barat’ atau ‘West Irian’; dan secara resmi menjadikannya sebagai nama provinsi pada tahun 1963. Selanjutnya, Pemerintahan Orde Baru mengantinya menjadi Provinsi ‘Irian Jaya’ pada tahun 1973, dan kemudian pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid kembali diganti menjadi Provinsi ‘Papua’. Dewasa ini, Provinsi Papua telah dimekarkan menjadi lima provinsi, yaitu 1) Provinsi Papua dengan ibukota Jayapura, 2) Provinsi Papua Barat dengan ibukota Manokwari, 3) Papua Barat Daya dengan ibukota Sorong, 4) Provinsi Papua Pegunungan dengan ibukota di Kabupaten Jayawijaya, 5) Provinsi Papua Selatan dengan ibukota di Kabupaten Merauke, dan 6) Provinsi Papua Tengah dengan ibukota di Kabupaten Nabire. Lihat dalam I Ngurah Suryawan, *Siasat Elite Mencuri Kuasa: Dinamika Pemekaran Daerah di Papua Barat*. (Yogyakarta: Basabasi, 2020). Untuk konsistensi penulisan, istilah Papua akan digunakan dalam buku ini, kecuali jika disebutkan secara khusus dalam sumber-sumber yang digunakan.

3 Ir. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Djilid Kedua, Tjetakan Kedua. (Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), hlm. 329-330

Historiografi Indonesia telah mencatat bagaimana konfrontasi yang diserukan oleh Sukarno tersebut benar-benar diwujudkan dalam beragam bentuk diplomasi politik dan melalui operasi militer. Sudah banyak kajian dan publikasi yang membahas secara rinci terkait diplomasi politik yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meraih dukungan internasional terkait isu Papua, termasuk di PBB.⁴ Demikian pula halnya dengan kajian-kajian tentang Operasi Trikora dari sudut pandang militer, khususnya yang diterbitkan oleh Tentara Nasional Indonesia.⁵ Berbeda dengan diplomasi politik dan operasi militer terkait Papua, konfrontasi ekonomi yang diserukan Presiden Sukarno untuk dilaksanakan di Papua waktu itu relatif belum banyak dikaji oleh para sejarawan. Dalam konteks nasional, banyak kajian menyebut bahwa ‘konfrontasi ekonomi’ yang diserukan oleh Sukarno terhadap Belanda, diwujudkan melalui kebijakan nasionalisasi dan ‘Indonesianisasi’ perusahaan dan aset-aset ekonomi milik Belanda dan kekuatan asing lainnya oleh Pemerintah Indonesia, serta melalui berbagai aksi di tingkat akar rumput oleh berbagai unsur masyarakat.⁶

-
- 4 Beberapa di antaranya adalah John Saltford, *United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of a Betrayal*. (London dan New York: Routledge Curzon, 2003); Soebandrio, *Meluruskan Sejarah Pembebasan Irian Barat*. (Jakarta: Yayasan Kepala bangsaku, 2001); dan Siswanto, *Indonesia dan Diplomasi Irian Barat 1949-1962: Memanfaatkan Perang Dingin*. (Jakarta: LIPI Press, 2020).
 - 5 M. Cholil, *Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat*. (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1979); Saleh A. Djamhari, *Tri Komando Rakyat: Pembebasan Irian Barat (Trikora)*. (Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995); *Pertempuran Laut Aru dalam ‘Operasi Trikora’*. (Jakarta: Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut, 1974); dan *Dua Puluh Lima Tahun Trikora*. (Jakarta: Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, 1988).
 - 6 Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001); J. Thomas Lindblad, *Bridges to New Business: The Economic Decolonization of Indonesia*. (Leiden: Brill, 2008); J. Thomas Lindblad & Peter Post (eds.), *Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective*. (Leiden: KITLV, 2009).

Namun demikian, dalam konteks ‘pembebasan Irian Barat’, bagaimana sebenarnya konfrontasi ekonomi yang diserukan oleh Presiden Sukarno tersebut dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, masih relatif belum banyak dikaji oleh para sejarawan Indonesia. Dalam konteks itulah, penulisan sejarah pendirian Kantor Cabang Bank Indonesia (selanjutnya ditulis KCBI) di Papua, menjadi sangat penting artinya, karena bisa memberikan secercah cahaya bagi keremangan historiografi yang ada. Fakta bahwa pendirian kantor cabang Bank Indonesia di wilayah ini dilakukan secara berturut-turut di beberapa kota utama, yaitu Hollandia atau Jayapura pada 1962, kemudian di Sorong, Biak, Manokwari, dan Merauke pada tahun 1963, bukanlah semata-mata merupakan strategi ekonomi untuk membangun perekonomian wilayah ini, tetapi jelas merupakan bagian dari siasat politik yang lebih besar dari Pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisi dan kedaulatannya atas wilayah ini dari klaim Belanda, yang pada saat bersamaan juga terus bergerilya untuk mementahkan klaim Indonesia tersebut. Dari sudut pandang inilah, pendirian lima unit kantor cabang Bank Indonesia di Papua, merupakan wujud dari ‘konfrontasi ekonomi’, sebagai bagian tidak terpisah dari upaya pembebasan Papua, melengkapi berbagai langkah diplomasi dan operasi militer yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Indonesia.

Pendirian kantor cabang Bank Indonesia di Papua tersebut, sejarah dan prosesnya sangat berbeda dengan sejarah kantor cabang Bank Indonesia di daerah lainnya di Indonesia, yang sebagian besar memiliki kaitan historis dengan lembaga perbankan kolonial *De Javasche Bank*, atau dengan perkembangan ekonomi kapitalistik seperti perkebunan maupun industri gula. Hingga akhir periode kolonial, ekspansi kapitalisme Belanda dan bahkan pengaruh negara kolonial Hindia Belanda di wilayah Papua bisa dibilang masih sangat terbatas. Tidak ada kantor cabang *De Javasche Bank* di sana, dan sektor ekonomi kapitalistik masih

dalam tahap awal perkembangannya sebelum dihentikan oleh Perang Pasifik di tahun 1940-an awal.

Pun demikian, tidak seperti wilayah lain di Indonesia, pendudukan Jepang di Papua berlangsung lebih singkat dan perang kemerdekaan yang terjadi kemudian antara Indonesia dan Belanda di sepanjang periode 1945 hingga 1949, juga relatif tidak berdampak luas di wilayah ini. KMB yang diselenggarakan di Den Haag pada akhir tahun 1949, berhasil membawa kedua pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan. Salah satunya adalah bahwa Kerajaan Belanda setuju – dengan sejumlah syarat – untuk menyerahkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, wilayah Papua dikecualikan dalam kesepakatan tersebut, dan ditunda penyelesaiannya karena kedua pihak gagal mencapai kata sepakat dan pembicaraan mengalami *deadlock*.⁷

Kondisi tersebut memperpanjang kondisi Papua sebagai sebuah wilayah *frontier* politik dan ekonomi, yang menjadi ajang perebutan antara berbagai kekuatan politik, khususnya antara Indonesia dan Belanda. Bagi Indonesia sendiri, yang kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia di tahun 1950, persoalan Papua tersebut menambah panjang daftar ‘pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan, karena pada saat bersamaan, Pemerintah Indonesia juga disibukkan dengan gerakan separatisme dan konflik vertikal serta horizontal. Kondisi Indonesia saat itu digambarkan secara dramatis oleh seorang pengamat sebagai ‘*doomed to disaster*’,⁸ sebuah kondisi yang banyak ditemukan di negara-negara pasca mengalami pergolakan revolusi dan perang. Dari segi ekonomi, tahun 1950–

7 John Coast, *Recruit to Revolution: Adventure and Politics During the Indonesian Struggle for Independence*. (Copenhagen: Nordic Institute for Asian Studies, 2015), hlm. 278

8 Henk Schulte Nordholt, “Indonesia in the 1950s: Nation, Modernity, and the Post-Colonial State,” dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 2011, Vol. 167, No. 4(2011), hlm. 386-404.

an merupakan periode ketika Indonesia sedang berupaya untuk membentuk sistem ekonomi nasionalnya. Melalui kebijakan nasionalisasi, Pemerintah Indonesia berupaya melepaskan diri dari sistem ekonomi Barat, dan sebisa mungkin menemukan 'formula' pembangunan baru yang lebih cocok untuk negara baru ini. BI yang baru saja dideklarasikan sebagai bank sentral pasca nasionalisasi, dihadapkan pada tugas dan tekanan yang berat untuk membantu menstabilkan perekonomian nasional sambil melakukan restrukturisasi lembaga dari dalam.⁹

Bagi BI, masalah Papua merupakan 'turunan' dari embrio yang sama, yaitu KMB. Di satu sisi, proses nasionalisasi yang melahirkan BI berawal dari keberanian Pemerintah Indonesia mengubah kesepakatan konferensi tersebut, sedangkan masalah Papua muncul karena kegagalan kedua pihak mencapai kesepakatan. Menurut Van der Veur, situasi *deadlock* tersebut terjadi karena sejak awal Indonesia dan Belanda memandang dan menempatkan Papua dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Sejak 1951, Belanda menganggap dirinya memiliki beban moral untuk mempersiapkan penduduk di wilayah ini agar bisa menjalankan pemerintahannya sendiri. Sementara itu, Indonesia sejak awal menganggap Papua adalah bagian dari wilayahnya. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian membuat isu tersebut tidak dapat diselesaikan.¹⁰

Penundaan status Papua tersebut, akhirnya menciptakan ketegangan politik antara Belanda dan Indonesia, lantaran kedua belah pihak secara diam-diam berupaya untuk memperkuat klaimnya masing-masing atas wilayah ini. Dari sisi Indonesia, Pemerintah RI mengusahakan berbagai cara untuk bisa

9 Howard Dick, "The Indonesian Economy in the 1950s: Multiple Exchange Rates and Business Networks and Center-Region Relations," dalam Hanneman Samuel dan Henk Schulte Nordholt (ed.), *Indonesia in Transition: Rethinking 'Civil Society,' 'Region,' and 'Crisis'*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 175 - 194.

10 Paul W. Van Der Veur, "The United Nations in West Irian: A Critique," *International Organization*, Vol. 18, No. 1 (Winter, 1964), hlm. 53.

menancapkan bendera merah putih di Papua. Salah satunya adalah dengan memperkuat kedaulatan dan integrasi ekonomi melalui pendirian lima kantor cabang BI, sebagai perwakilan dari lembaga bank sentral nasional di wilayah ini. Sebagai langkah awal, Pemerintah Indonesia mendirikan kantor cabang BI di Ambon pada Maret 1956. Ambon sendiri sebelumnya mengalami gejolak politik tersendiri di awal 1950-an, ketika masa transisi dari RIS menjadi RI. Sjafruddin Prawiranegara selaku Gubernur BI, memimpin langsung proses pendiriannya.¹¹ Banyak surat kabar yang menduga bahwa tujuan pendirian kantor cabang BI di Ambon adalah untuk mengaktifkan pariwisata di daerah tersebut.¹² Namun, Sjafruddin Prawiranegara sendiri menegaskan dalam pidato sambutannya ketika pembukaan KCBI Ambon, bahwa:

“.....Dari sudut pandang perjuangan kami untuk Irian Barat, peningkatan ekonomi di Maluku dapat menjadi faktor penentu, karena ini dapat membuktikan bahwa kita mampu membangun negara kita, bahkan di daerah yang jauh dari ibukota.”¹³

Setelah mendirikan KCBI Ambon, pada tahun berikutnya BI kembali membuka kantor cabang lainnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, yakni di Ampenan pada 1 September 1957.¹⁴ Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, KCBI Ampenan menggunakan bekas kantor *Nederlandsch-Indische Handelsbank* (NHB) yang pada saat itu sudah tutup dan dibeli seharga 300 juta rupiah oleh Bank Indonesia. Pada saat pembukaan, Sjafruddin Prawiranegara selaku Gubernur BI kembali menyampaikan bahwa tujuan pendirian KCBI Ampenan ini adalah untuk mewujudkan

11 “Bank Indonesia Opent Bijkantoor te Ambon,” *Algemeene Indisch Dagblad*, 20 Maret 1956.

12 “Bank Indonesia en Toerisme,” *De Nieuwsgier*, 1 Februari 1956.

13 “Mr. Sjafruddin,” *De Nieuwsgier*, 20 Maret 1956.

14 “Agentschap van Bank Indonesia in Ampenan,” *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 29 Agustus 1957.

distribusi uang rupiah yang merata dan teratur di seluruh wilayah Indonesia. Dalam sambutannya tersebut, Sjafruddin juga menyampaikan rencana pembukaan kantor cabang berikutnya yakni di Jember dan Lampung. Pada tahun 1958, KCBI Jember pun resmi dibuka, yang kemudian disusul dengan pendirian KCBI Lampung pada 1961.¹⁵

Di wilayah Papua sendiri, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Kantor Cabang Bank Indonesia didirikan berturut-turut di Hollandia/Jayapura pada 1962, kemudian di Sorong, Biak, Manokwari, dan Merauke pada tahun 1963. Pemilihan kota-kota pelabuhan tersebut jelas didasarkan pada pertimbangan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi penunjang aktivitas komersial yang sudah dibangun di era kolonial. Dalam sejarahnya, kota-kota tersebut telah menjadi 'urat nadi' bagi hubungan dagang antara wilayah ini dengan dunia internasional.¹⁶ Selain itu, kantor-kantor cabang tersebut dibuka untuk mendukung proses likuidasi fungsi perbankan dan komersial yang telah dijalankan oleh perusahaan Belanda, seperti *Nederlandsche Handels-Maatschappij* atau NHM. Pembukaan KCBI di Jayapura pada 13 Desember 1962 contohnya, ternyata berdampak langsung pada runtuhnya dominasi NHM atas perekonomian di kota tersebut.¹⁷ Tetapi di sisi lain, perubahan ini menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan pihak swasta untuk meneruskan aktivitas komersilnya, sehingga mereka memindahkan kegiatan bisnisnya ke luar Indonesia, seperti ke Belanda, Australia, atau Hong Kong.¹⁸

Proses yang sama juga kembali terlihat dalam pembukaan

15 "Bank Indonesia Opent Agentschap op Lombok," *Algemeen Indisch Dagblad*, 4 September 1957.

16 Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 8, No. 3, (1972), hlm. 40-1

17 "Indonesië Opent Bankkantoor in Hollandia," *Nieuwe Eindhovense Krant*, 13 Desember 1962.

18 "Zij zijn gemakkelijik te winnen, Veel Papoea's verbroederen zich al met Indonesiërs," *De Tijd De Maasbode*, 11 Desember 1962.

KCBI yang lainnya di kota Manokwari, Biak, Sorong, dan Merauke yang juga merupakan tindakan pengambilalihan peran dari NHM. Dalam pemberitaan di *Limburgsch Dagblad*, sejak Februari 1963, diskusi penjualan fasilitas NHM kepada BI sudah terjadi antara Drs. Soerjadi yang mewakili urusan perbankan Indonesia dengan Dr. Ghulam Abbas, Direktur Finansial dan Ekonomi untuk UNTEA.¹⁹ Selama proses ini berlangsung, BI juga mengirimkan tim survei ke seluruh kota tersebut untuk mempersiapkan pengambilalihan yang direncanakan. Dr. Ghulam Abbas menyatakan harapannya agar Pemerintah Indonesia dapat menyediakan tim ahli finansial guna memastikan bahwa dampak transisi tersebut mampu menunjang stabilitas ekonomi di Papua.²⁰ Pernyataan ini cukup penting, mengingat dalam waktu yang sangat singkat, yakni sejak 25 Maret 1963, seluruh kantor NHM di kota-kota lain telah resmi diambil alih dan diubah menjadi Kantor Cabang BI.²¹ Dengan peralihan peran ekonomi ini, pendirian KCBI di Papua menunjukkan adanya tujuan khusus, yakni untuk mempercepat proses Indonesianisasi dan transisi ekonomi yang masih ‘tertinggal’ dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Bernard K. Gordon berpendapat bahwa Sukarno memiliki misi untuk menanamkan semangat ‘Indonesia’ ke dalam agenda politiknya, termasuk di Papua, tak lama setelah integrasi wilayah tersebut pada 1 Mei 1963.²² Berbagai kebijakan, seperti penghentian perdagangan internasional dengan Singapura, regulasi ekspor-impor barang ke Papua, serta penerbitan mata uang ‘Rupiah Irian Barat,’²³ merupakan beberapa langkah yang

19 “Verkoop eigendommen en belangen van N.H.M. aan Nationale Bank Indonesia?” *Limburgsch Dagblad*, 22 Februari 1963.

20 *Ibid.*

21 “N.H.M. draagt zaken op Nieuw.-Guinea over aan Bank Indonesia,” *Nieuwe Haarlemsche Courant*, 26 Maret 1963.

22 Bernard K. Gordon, “The Potential for Indonesian Expansionism,” dalam *Pacific Affairs* Vol. 36, No. 4, (1963-1964), hlm. 389

23 Ross Garnaut & Chris Manning, *Irian Jaya The Transformation of a Melanesian Economy*. (Canberra: Australian National University, 1971), hlm. 32-33.

diambil untuk mendukung proses Indonesianisasi perekonomian di wilayah tersebut, khususnya menjelang pelaksanaan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969.

Salah satu hal menarik yang membedakan masa operasional KCBI di Papua adalah penutupan kantor-kantornya pada tahun 1969, yang kebetulan bertepatan dengan tahun diselenggarakannya PEPERA. Penutupan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1968, yang mengharuskan seluruh aktivitas komersial KCBI di Papua dihentikan paling lambat akhir tahun 1969.²⁴ Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang menetapkan pemisahan fungsi perbankan komersial dari tugas Bank Indonesia.²⁵

B. Permasalahan dan Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa sejarah pendirian dan perkembangan kantor cabang Bank Indonesia (BI) di Papua sangat berbeda dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, sehingga penting untuk dikaji secara tersendiri. Pendirian kantor-kantor cabang BI di Papua berlangsung seiring dengan upaya Pemerintah Indonesia memperkuat klaim politik dan kedaulatannya atas wilayah tersebut, yang sejak akhir tahun 1949 statusnya digantung secara politik oleh Belanda atas persetujuan dunia internasional. Oleh karena itu, pendirian lima kantor cabang BI pada tahun 1962–1963 di kota-kota utama Papua dapat dilihat sebagai bagian dari strategi politik Indonesia untuk menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari Republik Indonesia, sekaligus sebagai penolakan atas klaim Belanda terhadap wilayah tersebut.

Peran BI dalam mendukung agenda politik ini tidak berhenti pada saat Papua secara resmi menjadi bagian dari Republik

24 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1968 tentang Pelepasan Aktivitas Komersil Dari Cabang-Cabang Bank Indonesia di Wilayah Irian Barat, 27 Desember 1968.

25 Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, 7 Desember 1968.

Indonesia pada tahun 1969. Sebaliknya, peran BI terus berlanjut pada periode-periode berikutnya, meskipun dengan tugas yang berbeda, yaitu mendukung upaya pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan demikian, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam buku ini adalah: ‘bagaimana, dan dalam aspek apa saja, pendirian serta perkembangan KCBI di Papua turut memperkuat proses integrasi wilayah ini ke dalam negara dan sistem ekonomi nasional Indonesia hingga masa kini?’

Melalui pertanyaan utama tersebut, buku ini bertujuan untuk mengkaji sejarah panjang KCBI di Papua, mulai dari masa-masa transisi menuju integrasi dengan Republik Indonesia hingga perkembangan mutakhir, dalam konteks di mana proses pembentukan dan pembangunan negara Indonesia (*nation-state formation*) setempat masih terus berlangsung dan kerap menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Sebagai wilayah yang paling akhir bergabung ke dalam Republik Indonesia, Papua juga menjadi wilayah dengan usia ‘pembangunan’ yang paling muda. Berbagai persoalan dasar masih dihadapi, termasuk ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia yang relatif tertinggal, keterbatasan fasilitas publik, serta tantangan geografis yang luas dan beragam. Dalam konteks inilah, penting untuk memahami bagaimana keberadaan kantor-kantor cabang BI berkontribusi dalam membantu pemerintah pusat dan daerah menjawab tantangan-tantangan tersebut, serta mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Perjalanan historis KCBI di Papua, khususnya pada periode awal pendiriannya, mengingatkan pada kajian Yusuke Takagi mengenai sejarah perkembangan bank sentral di Filipina. Takagi menunjukkan bahwa pendirian bank sentral di Filipina merupakan bagian dari upaya pelebagaan dan penguatan nasionalisme, sekaligus instrumen pembentukan identitas negara-bangsa (*nation-building*) Filipina pasca merdeka dari Amerika Serikat. Dalam proses

tersebut, para pengelola dan pengambil keputusan (*policy makers*) di bank sentral berupaya secara aktif melakukan dekolonisasi terhadap warisan kolonial dalam tata kelola, administrasi, dan program kerja institusi tersebut. Dengan demikian, menurut Takagi, bank sentral tidak hanya berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional, tetapi juga dalam membentuk identitas bangsa.²⁶ Cara pandang serupa juga ditunjukkan oleh Chafik Ben Rouine dalam kajiannya mengenai peran bank sentral Tunisia, yang turut mendorong proses dekolonisasi ekonomi dari warisan penjajahan Prancis.²⁷

Sementara itu, kebijakan BI untuk mendirikan lima kantor cabang sekaligus di wilayah Papua merupakan sebuah kebijakan ‘khusus’ yang tidak diterapkan di wilayah lain di Indonesia. Langkah ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan moneter, melainkan juga berkaitan dengan misi yang lebih besar: menegakkan kedaulatan Republik Indonesia sekaligus mengintegrasikan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kebijakan penerbitan mata uang khusus ‘Rupiah Irian Barat’ pada Mei 1963, serta upaya berkelanjutan untuk mendistribusikan rupiah secara konsisten di wilayah tersebut, mencerminkan peran penting KCBI Papua dalam memperkuat integrasi ini. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kedudukan rupiah di tengah masyarakat

-
- 26 Yusuke Takagi, *Central Banking as State Building: Policymakers and Their Nationalism in the Philippines. 1933-1964*. (Singapore: National University Singapore Press, 2016). Gagasan dan cara pandang yang mirip sebenarnya juga dikembangkan oleh para pemimpin Bank Indonesia di tahun-tahun awal pasca nasionalisasi, termasuk melalui pendirian kantor-kantor cabang di daerah. Lihat W.G. Wolters, “Decolonizing Money: Central banks in the Philippines and Indonesia,” dalam Els Bogaerts & Remco Raben (eds.), *Beyond Empire and Nation: The Decolonization of African and Asian Societies, 1930s-1970s*. (Leiden: Brill, 2012), hlm. 109-35,
- 27 Chafik Ben Rouine, “Economic Decolonisation and the Role of the Central Bank in Postcolonial Development in Tunisia”, *Africa Development*, Vol. 47, No. 1, Special Issue from the *Post-Colonialisms Today Project: Lessons to Africa from Africa: Reclaiming Early Post-Independence Progressive Policies* (2022), hlm. 135-158.

Papua, bukan hanya sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai simbol budaya nasional dan instrumen penegakan kedaulatan negara-bangsa, sebagai *territorial currency* di dalam kerangka NKRI.²⁸

Pendirian KCBI di Papua, yang kemudian disusul dengan penggabungan resmi wilayah ini ke dalam Indonesia melalui PEPERA pada tahun 1969, dapat dimaknai sebagai momentum historis yang mengakhiri silang klaim antara Indonesia dan Belanda sejak penandatanganan KMB pada tahun 1949. Momentum ini secara teoritis menandai berakhirnya episode panjang sejarah Papua sebagai sebuah (*colonial*) *frontier*,²⁹ yakni wilayah yang secara geografis terletak di batas terluar kekuasaan teritorial kolonial, dan karena itu menjadi arena kontestasi antara berbagai kekuatan kolonial serta gerakan nasionalis yang berupaya merebutnya sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan dan penegakan kedaulatan nasional.

Dengan mengambil inspirasi dari kajian-kajian tersebut, buku ini berupaya menganalisis berbagai kompleksitas proses, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi oleh KCBI di Papua. Seluruh dinamika ini akan dibaca dalam kerangka interaksi antara kekuatan eksternal yang menuntut BI dan para pengelolanya untuk senantiasa beradaptasi dalam merespons perubahan yang cepat. Pemahaman yang memadai terhadap dinamika politik-ekonomi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana BI dan kantor cabangnya di Papua mengalami proses kontinuitas

28 Hanspeter K. Scheller, *The European Central Banks: History, Role, and Functions*. (Frankfurt: European Central Bank, 2004), hlm. 12; Nawayanto, dkk. *Rupiah untuk Kedaulatan Negara*. (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2024), hlm. 19-20.

29 Lynette Russell, "Introduction," dalam Lynette Russell (ed.), *Colonial-Frontiers: Indigenous-European Encounters in Settlers Societies*. (Manchester: Manchester University Press, 2001), hlm. 13. Menurut Russell, terminologi *frontier* dalam konteks kolonial tidak saja bermakna sebagai 'sebuah wilayah geografi, tetapi juga sebagai sebuah proses'.

dan diskontinuitas, yang turut membentuk kondisinya pada masa kini dan masa mendatang.

C. Tujuan Penulisan

Seperti buku-buku sebelumnya, tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk mencatat dan memelihara *institutional memory* atau ingatan kelembagaan kolektif BI melalui karya sejarah (historiografi). Dengan mengadopsi format sebuah monograf, buku ini menjadi bagian dari kelanjutan seri sejarah dan *heritage* Kantor Perwakilan Bank Indonesia, yang sebelumnya telah diterbitkan dalam 16 judul. Monograf ini bertujuan untuk memperkaya khazanah pengetahuan mengenai sejarah BI pada masa awal kemerdekaan, sekaligus menempatkan fenomena KMB sebagai tonggak baru dalam kerangka penulisan sejarah institusi perbankan nasional.

Buku ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi seluruh insan BI sebagai bagian dari penguatan identitas kelembagaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah ekonomi dan perbankan di Indonesia. Dari sisi akademis, karya ini diharapkan dapat melengkapi historiografi BI, terutama mengenai perkembangan lembaga perbankan di tingkat lokal, yang selama ini masih relatif sedikit dikaji secara mendalam.

D. Metode Penulisan

Penulisan buku ini menggunakan metode sejarah, yang meliputi empat tahapan utama: heuristik, kritik, interpretasi (analisis), dan historiografi. Pada tahap heuristik, tim penulis mengumpulkan berbagai sumber sejarah primer dan sekunder. Sumber primer utama berasal dari arsip-arsip koleksi BI yang tersimpan di Khazanah Arsip Bank Indonesia. Sumber tersebut dilengkapi dengan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),

yang mencakup informasi mengenai kondisi ekonomi lokal, peta, statistik, dan dokumentasi foto. Untuk memperkaya perspektif, digunakan pula berita-berita surat kabar sezaman yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional dan Pusat Informasi Kompas (PIK). Selain itu, berbagai sumber sekunder berupa buku-buku sejarah ekonomi, sejarah sosial-politik Papua, artikel ilmiah, serta terbitan resmi lainnya dikumpulkan dari berbagai perpustakaan, antara lain Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan BRIN, dan beberapa perpustakaan daerah di Papua.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara sejarah lisan dengan sejumlah narasumber yang memiliki pengalaman langsung dalam pengembangan KCBI di Papua. Para narasumber, yang sebagian besar adalah pejabat dan pegawai KCBI Papua pada masa lalu, memberikan informasi berharga yang tidak tercatat dalam dokumen tertulis, sehingga memperkaya data historis yang disajikan.

Tahap berikutnya adalah kritik sumber, yang terdiri atas kritik intern dan kritik ekstern. Pada tahap ini, semua sumber yang telah dikumpulkan dievaluasi untuk menguji validitas dan kredibilitasnya. Kritik intern difokuskan pada verifikasi nilai intrinsik sumber, seperti tahun penerbitan, konsistensi isi dengan sumber lain sezaman, dan akurasi informasi. Sementara kritik ekstern dilakukan untuk menilai faktor-faktor di luar isi, seperti orisinalitas sumber dan relevansinya terhadap konteks sejarah yang sedang diteliti.

Tahap ketiga adalah interpretasi (analisis), di mana penulis melakukan penafsiran terhadap seluruh sumber yang telah lolos tahap kritik. Sumber-sumber tersebut 'dialogkan' satu sama lain untuk merekonstruksi fakta sejarah, dengan mengutamakan objektivitas dan kedalaman analisis. Penulis memberikan penilaian kritis atas masing-masing sumber, sehingga mampu menghasilkan narasi sejarah yang solid dan berbasis data.

Tahap terakhir adalah historiografi atau proses penulisan

sejarah. Pada tahap ini, seluruh data yang telah dikumpulkan, dikritisi, dan dianalisis, disusun dalam bentuk penulisan naratif-analitis ke dalam beberapa bab. Penulisan dilakukan dengan standar akademik yang ketat, sehingga karya ini dapat diuji kebenarannya secara ilmiah dan dapat berkontribusi secara nyata terhadap pengembangan historiografi Bank Indonesia dan sejarah ekonomi nasional.

E. Sistematika Penulisan

Buku ini dibagi menjadi delapan bab secara tematis, dengan tetap mengikuti prinsip utama penulisan sejarah yakni kronologis. Diawali dengan **Bab Pendahuluan** yang menyajikan penjelasan tentang latar belakang penulisan buku, tujuan yang ingin dicapai, pendekatan atau kerangka teoritik, serta sumber penulisan buku.

Kemudian dilanjutkan dengan **Bab 1** yang berisi penjelasan tentang proses awal kontak dan komunikasi penduduk Papua dengan penduduk dari bagian Nusantara lainnya. Kemudian dibahas juga bagaimana wilayah ini mulai diintegrasikan dengan negara kolonial Hindia Belanda, serta bagaimana perkembangan umum perekonomian wilayah ini sebelum dan sesudah kehadiran orang-orang Eropa.

Bab 2 membahas mengenai berbagai perkembangan politik yang penting di Papua sejak berakhirnya Perang Pasifik, saat Belanda kembali diperbolehkan untuk menguasai wilayah ini oleh Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Inggris hingga penyerahan wilayah Papua dari UNTEA kepada Pemerintah Indonesia.

Bab 3 membahas tentang perkembangan-perkembangan ekonomi Papua pasca berakhirnya Perang Pasifik, yang terjadi seiring perubahan-perubahan politik di tingkat lokal, regional maupun internasional.

Bab 4 membahas mengenai proses pendirian empat KCBI di

wilayah Papua, yaitu di Jayapura, Sorong, Biak, Manokwari, dan Merauke. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana kelima KCBI tersebut berfungsi hingga penutupannya kembali di tahun 1969, dan digabungkan menjadi satu kantor perwakilan di Jayapura. Dalam bagian ini juga dibahas tentang situasi perekonomian di wilayah Papua secara umum selama periode yang dikaji.

Bab 5 membahas tentang pengedaran uang Rupiah Irian Barat yang dicetak khusus untuk wilayah ini, dan proses pengrupiahan Papua sebagai upaya menegaskan posisi rupiah sebagai *national currency* di wilayah ini.

Bab 6 membahas tentang pembangunan ekonomi Papua selama periode Orde Baru, dan bagaimana kontribusi KCBI Papua di dalamnya hingga menjelang terjadinya Krisis Ekonomi tahun 1998.

Bab 7 membahas tentang perkembangan KCBI Papua pasca krisis ekonomi tahun 1998, dan terjadinya reformasi politik hingga perkembangan mutakhirnya dewasa ini.

Bab 8 merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam buku ini. §



Sumber: Koleksi Nationaal Archief Belanda

BAB I

PROSES MENJADI BAGIAN HINDIA BELANDA

Pembahasan tentang sejarah pendirian dan perkembangan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Papua, harus diawali dengan sejarah awal bagaimana wilayah ini terintegrasikan ke dalam wilayah negara kolonial Hindia Belanda. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa secara faktual-historis wilayah negara Indonesia dewasa ini, mulai dari Sabang di ujung barat Aceh di Pulau Sumatra hingga Merauke di ujung timur Papua, merupakan kelanjutan dari wilayah teritorial negara kolonial Hindia Belanda. Dengan demikian, walaupun proses integrasi wilayah Papua ke dalam negara kolonial Hindia Belanda dan kemudian negara Indonesia terjadi lebih belakangan dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Kepulauan Nusantara, namun fondasi historis atas klaim tersebut didasarkan pada realitas historis-politis bahwa wilayah ini juga

merupakan bagian dari wilayah negara kolonial Hindia Belanda.

Atas pertimbangan itulah Bab I akan membahas proses panjang integrasi wilayah yang kini menjadi Papua ke dalam wilayah Hindia Belanda. Istilah Papua sendiri mengacu ke wilayah yang disebut dalam sumber-sumber Belanda sebagai *Nederlandse Nieuw Guinea* atau *Dutch New Guinea*, bagian sebelah barat pulau Nieuw Guinea yang pada awal abad ke-20 diklaim oleh otoritas kolonial Belanda. Pembahasan akan dimulai dengan interaksi awal penduduk yang ada di wilayah ini dengan penduduk dari wilayah-wilayah terdekat, terutama Kepulauan Maluku, yang terlebih dahulu masuk ke dalam orbit pengaruh dan kekuasaan politik kolonial Belanda, sejak dekade-dekade awal abad ke-17 melalui VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*). Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan ekspansi pengaruh kekuasaan kolonial Belanda pasca runtuhnya VOC pada dekade awal abad ke-19, sebagai awal proses integrasi wilayah ini dengan negara kolonial Hindia Belanda, baik dalam bentuk perluasan birokrasi dan aparatur pemerintahan negara Hindia Belanda, maupun masuknya berbagai kepentingan bisnis dan ekonomi dari pengusaha swasta Belanda maupun kelompok pendatang Eropa dan non-Eropa lainnya. Pembahasan akan ditutup dengan perkembangan terakhir yang terjadi selama Perang Dunia II, seiring dengan kedatangan tentara Jepang dan meletusnya perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda.

A. Interaksi Awal Papua dengan Wilayah Nusantara lain

Upaya untuk menelusuri dan merekonstruksi sejarah awal wilayah Papua telah dilakukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Para arkeolog, misalnya, dengan menggunakan data-data arkeologis telah memperkirakan bahwasanya wilayah yang saat ini menjadi bagian dari Papua dan Papua Nugini ini

telah dihuni oleh manusia sejak sekitar 50.000 tahun yang lalu. Para pendatang awal ini kemudian selama ribuan tahun, secara bertahap mulai bermukim di wilayah ini, di pesisir dan kemudian di pedalaman hingga ke daerah dataran tinggi, di mana mereka mulai mengembangkan pertanian sederhana. Gelombang migrasi berikutnya diyakini terjadi ribuan tahun berikutnya, saat orang-orang Austronesia yang melakukan migrasi antar-benua melalui perairan Asia Tenggara, mulai mendatangi dan menempati wilayah ini sekitar 3.000 tahun yang lalu, terutama di daerah pesisir sekitar Teluk Cendrawasih saat ini.¹ Orang-orang itulah yang kemudian diyakini sebagai leluhur dari penduduk asli Papua. Mereka mengembangkan kebudayaan dan bahasa yang berbeda-beda, walaupun semuanya masih dalam rumpun Austronesia. Selain itu, mereka juga aktif terlibat dalam jaringan perdagangan jarak jauh antara wilayah barat dan timur dan sebaliknya, yang kemungkinan besar sudah ada sejak tahun 1000 SM.²

Informasi lebih lanjut tentang sejarah awal wilayah Papua dan penduduknya, ditemukan dalam berbagai sumber tertulis, misalnya dalam 'historiografi tradisional' Nusantara dan catatan perjalanan orang-orang Eropa. Di dalam sumber-sumber tersebut, para penulis seringkali menyebut wilayah Papua dengan istilah yang berbeda-beda.³ Pada abad ke-8 di zaman kerajaan Sriwijaya, orang Tiongkok menyebut daerah ini dengan nama "Tungki" yang merupakan bagian dari wilayah Maluku.⁴ Sementara itu, Mpu

-
- 1 Peter Bellwood, J.J. Fox, D. Tryon, *The Austronesian: Historical and Comparative Perspective*. (Canberra: Australian National University Press, 2006).
 - 2 Para peneliti arkeologi menemukan sejumlah artefak arkeologis di Sabah yang berasal dari wilayah Irlandia Baru berusia sekitar 1000 SM. Menurut mereka ini membuktikan adanya aktivitas perdagangan jarak jauh tersebut. R.F. Ellen, *On the Edge of the Banda Zone: Past and Present in the Social Organization of a Moluccan Trading Network* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2003), hlm. 4.
 - 3 Tentang asal usul nama Papua lihat dalam J. Sollewijn Gelpke, "On the Origin of the Name Papua," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 149, No. 2, 1993, hlm. 318-332.
 - 4 "Irian Barat Ditinjau dari Segi Penerangan," *Merdeka*, 30 April 1963.

Prapanca dalam *Kakawin Nagarakretagama*, sebuah karya sastra Jawa kuno yang ditulis sekitar tahun 1365 M, menyebutkan sebuah wilayah bernama “Ewanin” yang memiliki hubungan politik dan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit. Wilayah ini sekarang dikenal dengan nama “Semenanjung Onin”. Salah seorang sejarawan setempat meyakini, Ewanin merupakan nama lain yang digunakan untuk menyebut wilayah Papua Barat saat ini.⁵

Penyebutan Papua dalam literatur Jawa kuno tersebut, menjadi dasar bagi Muhammad Yamin, sejarawan sekaligus tokoh nasionalis terkemuka, untuk meyakinkannya sebagai bukti historis bahwa Papua telah menjadi bagian dari jaringan negara lokal Nusantara yang pada abad ke-14 berpusat di Kerajaan Majapahit.⁶ Beberapa studi lain bahkan meyakini bahwa jauh sebelumnya, penduduk Papua khususnya dari wilayah pesisir Kepala Burung sudah aktif dalam jaringan perdagangan Asia dan berinteraksi dengan para pedagang dan pelancong (*travellers*), serta menjalin hubungan dengan perwakilan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, seperti Sriwijaya, bahkan juga kekaisaran Ayutthaya - Siam, Cina, Persia, dan Turki Usmani.⁷

-
- 5 Jusuf F. Onim, “A Regional History of Desa Wersar (in the Sub-District of Teminabuan) on the South Coast of the Bird’s Head in Irian Jaya Indonesia,” *paper presented at the conference Perspectives on the Bird’s Head of Irian Jaya, Indonesia*, Universiteit Leiden, 13-17 Oktober 1997.
 - 6 Muhammad Yamin melihat ini sebagai bukti bahwa Papua Barat memiliki basis historis untuk menjadi bagian dari Indonesia modern. Muhammad Yamin, *Kedaulatan Indonesia atas Irian Barat yaitu tentang Tuntutan Rakyat terhadap Wilayah Indonesia Bagian Barat*. (Bukittinggi-Jakarta-Medan: Nusantara, 1956), hlm. 47-55. Lihat pula Jaap Timmer, “Papua Coming of Age: The Cycle of Man’s Civilization and the Other Papuan Histories,” dalam Martin Slama & Jenny Munro (eds.), *From ‘Stone-Age’ to ‘Real-Time’: Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities* (Canberra: Australian University Press, 2015), hlm. 108-109
 - 7 Harsja W. Bachtiar, “Sejarah Irian Jaya”, dalam Koentjaraningrat (ed.), *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk* (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 44. Sebuah studi mengungkapkan bahwa burung-burung eksotik seperti kakatua, beo, cenderawasih, dan sebagainya yang hanya ada di wilayah timur Indonesia, utamanya Papua, masuk daftar hadiah persembahan untuk raja dan komoditi dagang dalam sumber-sumber Cina, dari era Dinasti Tang, Song, dan Ming. Lihat

Catatan perjalanan orang-orang Eropa di periode modern awal juga sudah menyebutkan tentang Papua. Salah satu yang paling tua berasal dari tahun 1521, ditulis oleh Antonio Pigafetta, seorang penjelajah Venesia yang bergabung dalam ekspedisi Portugis pimpinan Ferdinand Magellan. Dalam catatannya, Pigafetta menyebutkan nama “Papua” ketika menggambarkan keberadaan seorang Raja Papua yang tinggal di Jailolo, Halmahera. Selain itu, penjelajah Spanyol, Martin de Uriarte, pada tahun 1527, juga menghasilkan catatan yang menyebutkan tentang “Pulau-pulau Papua,” yang kemungkinan besar merujuk pada Kepulauan Raja Ampat. Seorang penjelajah berkebangsaan Spanyol bernama Yñigo Ortiz de Retez sempat menamakan wilayah ini pada tahun 1545 dengan sebutan “Nova Guinee”. Nama ini diberikan karena kemiripan penduduk asli yang ia temukan di sana dengan penduduk asli di pantai Guinea Afrika. Besar kemungkinan, nama inilah yang kemudian diadopsi Belanda menjadi “Nieuw Guinea” dua abad berselang.⁸

Tidak ketinggalan, penjelajah Belanda, Adriaen van der Dussen, turut memberikan kontribusi dengan laporannya yang mengkonfirmasi adanya hubungan antara Kesultanan Bacan dan Raja Ampat. Catatan-catatan ini tidak hanya menunjukkan ketertarikan bangsa Eropa terhadap wilayah Papua, tetapi juga menggambarkan adanya interaksi politik dan budaya antara wilayah Papua dengan pusat-pusat kekuasaan di Maluku.⁹

Semua catatan perjalanan orang Eropa tersebut menegaskan bahwa penduduk pesisir barat Papua atau Nieuw Guinea sudah memiliki hubungan dagang maritim dengan penduduk di wilayah kepulauan Maluku, jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa

dalam Roderich Ptak, *Exotische Vogel: Chinesische Beschreibungen und Importe. East Asian Maritime History 3* (Wiesbaden: Harrassowitz, 2006).

8 “Irian Barat Ditinjau dari Segi Penerangan,” *Merdeka*, 30 April 1963.

9 Muridan Widjojo, *The Revolt of Prince Nuku: Cross-Cultural Alliance-Making in Maluku 1780-1810*. (Leiden/Boston: Brill, 2009), hlm. 95

di kawasan ini. Koneksi perdagangan tersebut merupakan bagian kecil dari jaringan perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan Samudra Hindia, yang berkembang pesat pada masa “Kurun Niaga”, selama abad ke-15 hingga abad ke-17.¹⁰

Secara geografis, pada awal abad ke-16 setidaknya ada dua wilayah kontak perdagangan (*trading contact zone*) antara dua kawasan tersebut. Zona pertama adalah Kepulauan Raja Ampat, pesisir utara daerah Kepala Burung, Teluk Cendrawasih dan pulau-pulau Biak, yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Maluku Utara, khususnya Kesultanan Tidore. Sementara itu, zona kedua melibatkan penduduk dari pesisir selatan daerah Kepala Burung sekitar Teluk MacCluer dan Semenanjung Bomberai, meliputi Fakfak, Onin dan Teluk Arguni, yang berdagang dengan suku-suku dan kerajaan dari Maluku bagian tengah, terutama Pulau Seram Laut dan Pulau Gorom. Di dua zona perdagangan tersebut, berbagai produk dari Papua bagian Barat dan Nieuw Guinea secara umum menjadi komoditi perdagangan utama, yaitu kulit pohon *massoia* (*Cryptocaria massoia*), pala, bulu burung, sagu, cangkang penyu, batu ambar, dan produk hutan dan laut lainnya. Adapun komoditi yang dibeli penduduk Papua dari Maluku antara lain beras dan sagu, barang-barang logam seperti gong, pisau dan pedang, manik-manik kaca, pakaian dan keramik Cina. Selain itu, sumber Portugis juga menyebutkan adanya perdagangan budak mulai muncul di zona perdagangan ini pada akhir abad ke-16.¹¹

Para peneliti tentang Islam meyakini bahwa seiring dengan meningkatnya interaksi penduduk Papua dengan pedagang dari kawasan Nusantara lain dalam jaringan perdagangan Asia selama

10 Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. Volume One: The Lands below the Winds*. (New Heaven: Yale University Press, 1990).

11 R. F. Ellen, *On the Edge of the Banda Zone*, hlm. 73; Holger Warnk, “The Coming of Islam and Moluccan-Malay Culture to New Guinea c. 1500-1920,” *Indonesia and the Malay World*, 110, (March 2020), hlm. 111-12.

periode ‘Kurun Niaga’ ini, mereka mulai mengenal dan bahkan menerima Islam sebagai kepercayaan baru mereka. Antropolog Martin Slama, misalnya, meyakini bahwa kontak pertama penduduk Papua dengan para pedagang Islam terjadi pada abad ke-15, atau bahkan mungkin lebih awal meskipun sulit untuk dipastikan karena minimnya bukti sejarah. Proses ‘Islamisasi’ di kawasan tersebut baru bisa benar-benar dipastikan terjadi pada abad ke-16, khususnya di wilayah pesisir Papua bagian Barat, karena kesultanan Islam di Maluku Utara bersaing untuk mendapat pengaruh di wilayah ini, yaitu Kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan. Kesultanan Bacan, khususnya, disebutkan telah mengirimkan ekspedisi yang dipimpin Sultan Zainal Abidin pada tahun 1521 dan berhasil menguasai dan meng-Islamkan daerah Waigeo, Misool, Waigama, Salawati (Kepulauan Raja Ampat) dan semenanjung Onin, di Barat laut Papua. Wilayah-wilayah tersebut, kemudian dikuasai oleh Kesultanan Tidore yang muncul sebagai kerajaan terkuat dan menjadi penentang para pedagang Belanda dan pedagang Eropa lainnya yang ingin memonopoli perdagangan rempah di wilayah ini sejak akhir abad ke-16.¹²

Sebagai wujud loyalitas dan ketundukannya terhadap Kesultanan Tidore, para pemimpin Papua menerima berbagai gelar, beragam hadiah seperti pakaian, bahan makanan seperti garam dan beras, serta barang-barang logam. Sebagian dari mereka melakukan konversi ke Islam, dan mempelajari Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi Kesultanan Tidore dan identitas Islam di wilayah ini. Gelar-gelar dari Tidore tersebut di antaranya adalah *kolano* (*korano*), *samguajem* (*Sengaji*), *orang kaya*, dan *jugugu*. Sebaliknya, mereka diharuskan untuk menyerahkan upeti dan

12 Martin Slama, “Papua as an Islamic Frontier: Preaching in ‘the Jungle’ and the Multiplicity of Spatio-Temporal Hierarchisations”, dalam Martin Slama & Jenny Munro, *From ‘Stone-Age’ to ‘Real-Time’: Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities* (Canberra: Australian University Press, 2015), hlm. 249. dan Toni Victor M. Wanggai, “Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua,” Disertasi, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2008, hlm. 47-48.

persembahan untuk Sultan Tidore berupa perahu-perahu berisi hasil hutan, permata, sarang burung, teripang dan budak. Jika upeti dan persembahan itu tidak disampaikan, maka Sultan Tidore akan mengirimkan pasukan untuk mengambilnya secara paksa melalui perompakan dan perburuan budak. Selain itu, para pemimpin Papua juga diwajibkan mengirimkan pasukan perahunya yang biasa melakukan perompakan untuk mendukung Kesultanan Tidore sewaktu berperang dengan musuh-musuhnya, termasuk dengan kekuatan Eropa yang datang kemudian.¹³

Para penjelajah dan pedagang Eropa sejak akhir abad ke-16 memang sudah berupaya untuk melanjutkan eksplorasi dan kompetisi mereka untuk menguasai pusat produksi rempah-rempah lainnya setelah kepulauan Maluku ke wilayah Papua. Mereka adalah orang-orang Portugis dan Spanyol (sejak abad ke-16), Belanda dan Inggris (sejak awal abad ke-17). Kedatangan mereka secara berurutan hampir bersamaan dengan menguatnya pengaruh para pedagang dan penguasa Islam dari Maluku bagian utara, terutama Kesultanan Ternate dan Tidore di kawasan pesisir barat Papua. Tidak mengherankan bila kawasan ini kelak terseret dan menjadi kelanjutan arena kompetisi, perselisihan dan bahkan peperangan antar sesama kekuatan Eropa.

Situasi ini semakin kompleks dengan keterlibatan berbagai kekuatan lokal yang saling berebut pengaruh dan hegemoni politik. VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) muncul sebagai kekuatan dominan di kawasan Maluku sejak awal abad ke-17. Perusahaan dagang ini melakukan manuver politik di tengah persaingan sengit Portugis dan Spanyol, yang saat itu keduanya tengah berkonflik dengan Kesultanan Ternate dan Tidore. Portugis akhirnya tersingkir dari persaingan di akhir abad ke-16, disusul kemudian oleh Spanyol pada awal abad ke-18, yang kemudian memilih untuk mengkonsentrasikan kekuatannya di wilayah

13 Holger Warnk, "The Coming of Islam and Moluccan-Malay Culture," hlm. 114-15.

Filipina sekarang. Sejak saat itu VOC tinggal berhadapan dengan EIC (*East Indian Company*) milik Inggris sebagai pesaing utamanya di kawasan ini.¹⁴

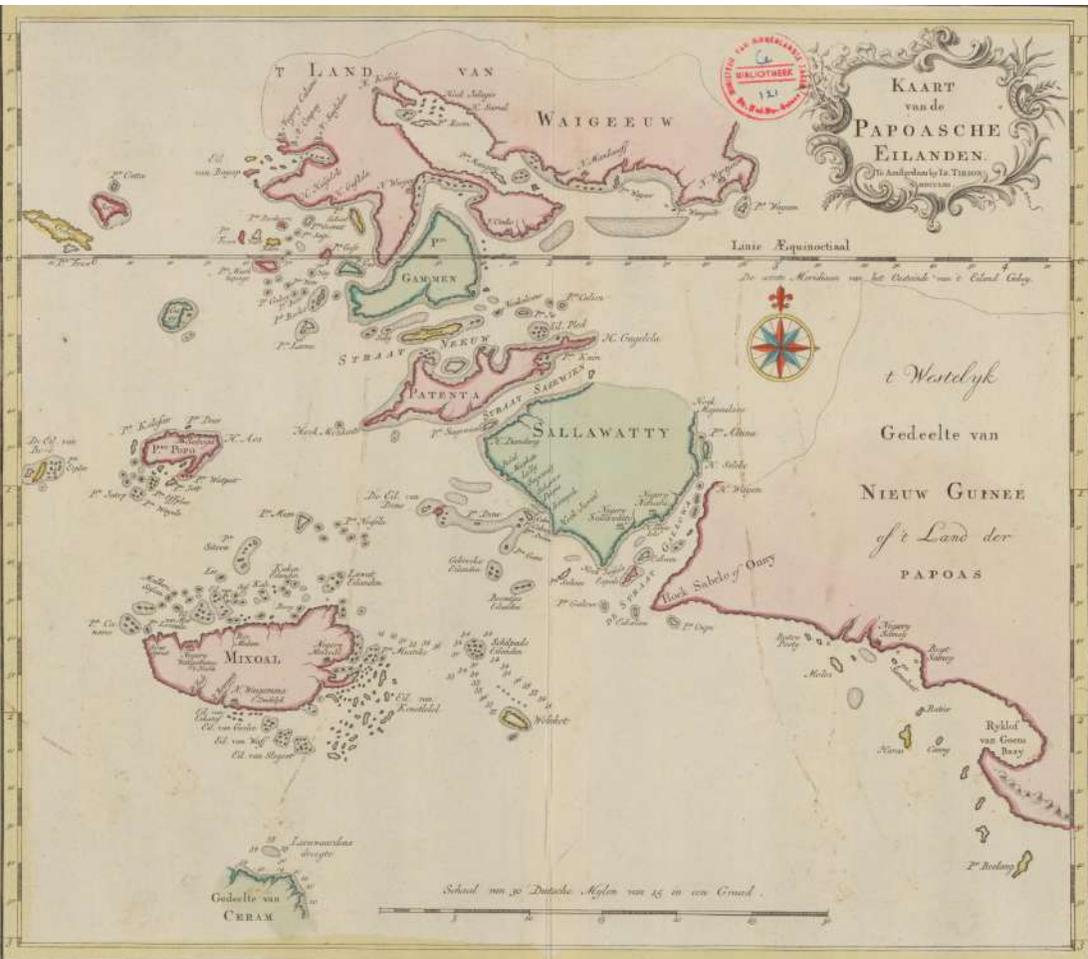
Setelah berhasil menancapkan monopoli atas perdagangan rempah-rempah di kepulauan Maluku, VOC segera berupaya melebarkan aktivitas perdagangan dan pengaruh politiknya di kawasan Papua bagian barat. VOC mengirimkan beberapa ekspedisi ke perairan Papua, di antaranya adalah Abel Janszoon Tasman dikirim ke Waigeo pada tahun 1643, Nicolaes Vinck pada tahun 1662 dan 1663 ke Rumbati, Johannes Keyt pada tahun 1678 ke Onin, lalu Jacob Weyland ke kepulauan Raja Ampat dan lanjut ke Teluk Cenderawasih pada tahun 1705. Ekspedisi-ekspedisi tersebut dilaporkan berhasil menjalin kerja sama dagang dengan para 'raja' lokal di Papua. Pedagang VOC membeli berbagai komoditas dari pedagang lokal, seperti budak, kulit kayu massoia, kayu wangi, dan sagu. Sebagai gantinya, mereka menukar barang-barang tersebut dengan tembakau, tikar, keramik Cina, kain dari kawasan Timur, dan lainnya. Pengaruh VOC di kawasan ini semakin kuat, terutama setelah Kesultanan Tidore menerima mereka sebagai 'pelindung' pada tahun 1677.

Meskipun kaya akan cengkeh, Kesultanan Tidore yang berpusat di pulau kecil Tidore tidak akan memiliki arti politik yang signifikan tanpa pengakuan dari pulau-pulau lain di sekitarnya. Selain Raja Ampat, wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pengaruh politiknya meliputi Gamrange di tenggara Halmahera, pesisir Semenanjung Kepala Burung Papua, termasuk penduduk di Teluk Cenderawasih (Geelvink Bay) dan Onin, serta Pulau Seram.¹⁵

Hubungan erat Kesultanan Tidore dan penduduk Papua, khususnya dengan Raja Ampat, tidak terlepas dari kebijakan

14 Leonard Y. Andaya, *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), hlm. 220-239.

15 Pim Schoorl, *Belanda di Irian Jaya: Amtenaar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962*. (Jakarta: Garba Budaya, 2001), hlm. 1.



Gambar 1.1. Peta awal Papua Barat, yang dicetak oleh Penerbit Isak Tirion pada 1753.

Sumber: https://www.nationaalarchief.nl/en/research/archive/4.MIKO/invnr/6121/file/NL-HaNA_4.MIKO_6121

Sultan Tidore yang mengizinkan, bahkan melindungi, tradisi perompakan (*raiding*) yang dilakukan oleh orang-orang Papua terhadap armada dagang yang melintasi perairan kawasan tersebut, termasuk armada dagang Eropa. Dukungan ini juga erat kaitannya dengan upaya Sultan Tidore dalam mempertahankan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut.¹⁶ Aktivitas perompakan itulah yang menjadi salah satu pemicu konflik antara Tidore dengan VOC, yang akhirnya mendorong terjadinya Pemberontakan Pangeran Nuku di tahun 1780-an.

Sumber-sumber VOC mencatat bahwa aktivitas perompakan yang dilakukan oleh orang-orang Papua mengalami peningkatan dan perluasan pada awal abad ke-18. Kondisi ini memicu kemarahan VOC, terutama karena mereka mengetahui bahwa aksi-aksi tersebut dibiarkan bahkan didukung oleh Sultan Tidore. VOC menemukan bahwa para perompak Papua kerap memperoleh pasokan mesiu dari Sultan Tidore untuk melancarkan serangan mereka, dan Sultan sendiri sering kali berada di lokasi saat aksi perompakan berlangsung. Akibat dari perompakan berulang ini, VOC menderita kerugian yang cukup besar. Sebagai respon, VOC menuntut Kesultanan Tidore untuk menghukum para perompak Papua. Namun, tuntutan ini hanya dipenuhi oleh beberapa sultan, seperti Sultan Hamzah Fahrudin (memerintah 1689–1708), Sultan Hasanudin (1708–1728), dan Sultan Malikul Manan (1728–1756). Pada masa Sultan Muhammad Mas'ud Jamaluddin (1756–1779), hubungan antara Kesultanan Tidore dan para perompak Papua kembali pulih, bahkan diperkuat pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Amirudin atau Sultan Nuku (1779–1805).¹⁷

Namun demikian, tuntutan VOC tersebut ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Nuku; sikap mana yang kemudian memicu konflik bersenjata antara kedua pihak. Sikap tersebut didukung oleh kemampuan Pangeran Nuku dalam mempersatukan para

16 Muridan Widjojo, *The Revolt of Prince Nuku*, hlm. 119-20.

17 Muridan Widjojo, *The Revolt of Prince Nuku*, hlm. 117.

pemimpin lokal, seperti *kapitein laut*, *orangkaya*, *kimelaha*, *sangaji*, dan *mambri*. Mereka memiliki pengalaman memimpin aktivitas perompakan di wilayah Kepulauan Raja Ampat, Gamrange, serta Seram bagian utara dan timur. Nuku bahkan mampu menarik dukungan dari penduduk Tidore, Aru, dan Kei, sebagaimana terlihat dari dukungan mereka terhadap pengukuhan Pangeran Nuku sebagai Sultan Papua dan Seram pada tahun 1780. Selain itu, Pangeran Nuku sukses membangun aliansi politik dengan Inggris, yang pada waktu itu merupakan rival sekaligus musuh utama Belanda. Inggris sendiri mulai memperluas pengaruhnya di wilayah Maluku dan Papua pada akhir abad ke-18. Dengan demikian, Pangeran Nuku berhasil memobilisasi kelompok-kelompok ‘perompak’ menjadi kekuatan politik yang mampu menantang hegemoni VOC-Belanda di Maluku. Dengan lebih dari 150 kapal dan sekitar 7.500 tentara/perompak, Pangeran Nuku melancarkan peperangan terhadap VOC segera setelah ia naik tahta pada tahun 1780.¹⁸

Demikianlah, selama kurang lebih dua dekade berikutnya pemberontakan Pangeran Nuku secara terus menerus berlangsung mengusik hegemoni VOC-Belanda di kawasan Maluku dan Papua bagian barat. Atas bantuan Inggris, yang muncul sebagai kekuatan tandingan baru bagi VOC di akhir abad ke-18, Pangeran Nuku berhasil meraih kembali posisinya sebagai Sultan Tidore pada tahun 1801 yang sebelumnya dicabut oleh VOC. Namun

18 Sebuah laporan mengungkapkan bahwa Inggris sudah mulai mengirimkan ekspedisi dagang/tentaranya pada awal abad ke-18, karena tertarik dengan rempah-rempah dan komoditi lainnya dari wilayah ini. Berdasarkan perjanjian damai di Paris pada tahun 1784, Inggris memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam ‘pelayaran bebas’ di perairan Timur. Pada tahun 1791, kapten Inggris Deli mengambil alih sebuah pulau di Selat Torres, serta pulau-pulau tetangga dan pantai Papua, atas nama Raja Inggris. Pada tahun 1793, EIC, Perusahaan Hindia Timur Inggris membangun sebuah benteng di Doreh, Papua Utara, namun benteng tersebut ditinggalkan pada tahun 1795 karena penyakit dan serangan penduduk asli. Lihat “Nieuw Guinea voorheen en thans,” *De Preanger Bode*, 18 April 1913.

demikian, perjuangan Pangeran Nuku tersebut berakhir antiklimaks. Perubahan politik yang terjadi di Eropa, di mana tiga kekuatan imperial utama, yakni Inggris, Perancis, dan Belanda menandatangani kesepakatan damai, yang dikenal sebagai 'Perjanjian Amiens'. Salah satu isi perjanjian ini menetapkan bahwa Inggris harus menyerahkan kekuasaannya kembali ke Belanda, termasuk Maluku. Kesepakatan ini menjadi pukulan keras bagi Pangeran Nuku, karena dia kini harus berurusan kembali dengan musuh lamanya: Belanda. Sampai kematiannya pada tahun 1805, Pangeran Nuku bersikeras menolak berdamai dengan Belanda, dan tetap menjadikan Inggris sebagai aliansi politiknya.¹⁹

Selama perjuangan Pangeran Nuku melawan VOC, sejumlah kelompok penduduk Papua terus memberikan dukungan dan menjadi bagian penting dari kekuatan pemberontakan tersebut. Selain didorong oleh motivasi politik, mereka juga tergerak untuk melancarkan aksi perompakan terhadap armada-armada dagang VOC-Belanda guna memperoleh keuntungan ekonomi dari barang rampasan bernilai tinggi. Barang-barang rampasan itu, seperti gong, tembaga, keramik Cina, manik-manik perhiasan, kain sutra, pisau, tongkat besi, hingga budak, menjadi aset berharga yang digunakan untuk melunasi utang, membayar denda, sebagai hadiah perkawinan, atau dalam berbagai pertukaran seremonial. Sebagai imbalan, mereka tidak hanya memperoleh barang-barang berharga, tetapi juga mendapatkan pengakuan, ketenaran, dan pengaruh dalam lingkungan keluarga serta kerabat mereka. Semua itu memberi mereka prestise, otoritas, dan kekuasaan, sehingga

19 Pada November 1801, Pangeran Nuku menandatangani perjanjian dengan Inggris, yang mengukuhkan posisinya sebagai Sultan Tidore, menetapkan Tidore sebagai sebuah negara merdeka, namun melepaskan Banda menjadi wilayah kekuasaan Inggris dan menyerahkan semua produk rempah-rempah ke Inggris. Dengan demikian, Inggris mengambil alih monopoli VOC atas rempah-rempah, dan sebagai imbalannya Pangeran Nuku akan menerima uang pengakuan sebesar 6.000 dollar Spanyol dari Inggris. Lihat dalam Muridan Widjojo, *The Revolt of Prince Nuku*, hlm. 200-201.

memperkuat posisi sosial mereka di komunitas.²⁰

Setelah berakhirnya pemberontakan Pangeran Nuku, pengaruh VOC di kawasan Maluku dan Papua semakin melemah. Kondisi ini semakin diperburuk dengan merosotnya kekuatan politik dan finansial VOC pada akhir abad ke-18. Situasi ini mendorong VOC, pada awal tahun 1770-an, untuk mengizinkan pedagang Tionghoa dari Ternate dan Tidore berdagang di wilayah Papua hingga ke Biak. Para pedagang Tionghoa ini tidak dianggap sebagai ancaman oleh VOC karena mereka tidak terlibat dalam perdagangan rempah-rempah. Mereka lebih tertarik pada komoditas seperti kulit kayu, kelapa, teripang, mutiara, cangkang kura-kura, burung cenderawasih, dan kakatua. Komoditas-komoditas tersebut lalu ditukar dengan perkakas besi, pakaian, porselen, dan keramik.

Selain pedagang Tionghoa, VOC juga mulai mengizinkan ekspedisi dagang Inggris menjelajahi kawasan Papua. Salah satu contoh adalah ekspedisi Inggris yang dipimpin oleh Thomas Forrest pada awal tahun 1775. Forrest tercatat singgah di Teluk Doreri, dekat kota Manokwari saat ini, di mana ia berinteraksi dan berdagang dengan para pedagang Tionghoa. Pedagang-pedagang tersebut memiliki surat izin dari Kesultanan Tidore, berbicara dalam bahasa Melayu, dan mengenakan pakaian bergaya Belanda. Forrest melanjutkan perjalanannya ke arah timur Teluk Doreri hingga mencapai Waropen, Kurudu, dan Pulau Yapen. Penjelajah Inggris lainnya, John McCluer juga dilaporkan mengunjungi Biak, Yapen, Doreri, Numfor, dan Teluk Bintuni dua kali, yakni pada tahun 1791 dan 1794. Dalam perjalanannya, McCluer bertemu dengan pedagang Makassar yang aktif dalam perdagangan antara Ternate dan kawasan Papua.²¹

Dengan demikian, menjelang keruntuhannya di tahun 1799, VOC tidak bisa lagi memonopoli perdagangan di kawasan Papua.

20 Muridan Widjojo, *The Revolt of Prince Nuku*, hlm. 130.

21 Holger Warnk, "The Coming of Islam and Moluccan-Malay Culture," hlm. 118.

VOC harus merelakan kekuatan Eropa lain, terutama Inggris untuk mulai mengeksplorasi wilayah Papua dan kawasan pedalaman Nieuw Guinea lainnya.

B. Perluasan Pengaruh (Hindia) Belanda

Informasi mengenai perkembangan situasi umum di Papua Barat selama periode transisi dari VOC ke rezim Franco-Dutch Napoleon dan Inggris, hingga pembentukan Hindia Belanda pada dekade pertama abad ke-19 sangatlah terbatas. Kemunduran VOC hingga keruntuhannya pada dua dekade akhir abad ke-18 menyebabkan arus informasi tentang wilayah Papua nyaris terhenti. Namun demikian, penandatanganan kesepakatan pada 13 Agustus 1824 antara Inggris dan Belanda, yang mengatur pengembalian kekuasaan Belanda atas Jawa, sebagian Sumatra, dan eks-kekuasaan VOC lainnya di Nusantara, turut mencakup wilayah Tidore, pulau-pulau Papua, dan sebagian Nieuw Guinea.

Meski pengakuan tersebut telah diberikan, status tersebut bersifat sementara. Proses penetapan batas wilayah kekuasaan Belanda berlangsung sangat lambat hampir sepanjang abad ke-19. Titik terang baru muncul melalui traktat pada 16 Mei 1895, yang disepakati oleh Inggris dan Jerman, dua kekuatan Eropa lainnya yang memiliki kepentingan atas Nieuw Guinea. Dari perspektif Belanda, batas-batas tersebut kemudian resmi ditetapkan dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) No. 221 tahun 1895.²²

Sebelum tercapainya kesepakatan tersebut, Belanda secara aktif berupaya memperkuat klaimnya atas wilayah Papua bagian barat. Sepanjang abad ke-19, upaya-upaya tersebut dilakukan

22 Adapun batas-batas wilayah 'Nederlandsch Nieuw Guinea' atau New Guinea Belanda tersebut adalah muara sungai Bensbach di bagian tengah, garis pantai selatan di sepanjang koordinat 141° 1'47"9 bujur timur Greenwich, sepanjang garis meridian arah utara hingga sungai Fly, dan sepanjang sungai ini hingga garis bujur 141° hingga ke pantai utara. Lihat J. Tideman, "Algemeene Inleiding," *Nieuw Guinee*, Deel I (Amsterdam: Molukken Instituut - J.H. De Bussy, 1935), hlm. 5.

melalui pengiriman ekspedisi militer ke berbagai wilayah strategis, pendirian pos militer, serta ekspedisi ilmiah dan keagamaan. Ekspedisi militer pertama dimulai setelah Gubernur Jenderal van der Capellen melakukan perjalanan ke Maluku pada tahun 1824. Dalam perjalanan tersebut, ia mengunjungi Tidore dan bertemu dengan raja-raja dari Misol, Waigeo, dan Waigama, yang memberikan informasi penting tentang kepulauan Raja Ampat. Pada saat yang sama, militer Belanda mulai menjelajahi wilayah Semenanjung Bomberai dan pesisir Barat Daya hingga Teluk Arguni. Selain itu, terdorong oleh rumor tentang keberadaan pos dagang Inggris di wilayah selatan Nieuw Guinea, Pemerintah Hindia Belanda mengirimkan ekspedisi militer ke Laut Arafura pada tahun 1825 di bawah pimpinan Letnan Dirk Hendrik Kolff. Ekspedisi berikutnya pada tahun 1828 berhasil mendirikan sebuah pos militer di Teluk Triton. Namun, pos tersebut hanya bertahan selama delapan tahun dan dirobuhkan pada tahun 1836. Meski demikian, Belanda terus melanjutkan ekspedisi militer ke wilayah-wilayah pedalaman Papua lainnya untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut.²³

Selain ekspedisi militer, Belanda juga memperluas pengaruhnya di wilayah Papua bagian barat melalui aktivitas *zending* dan *misi*. Menurut F.J.F. van Hasselt, pengiriman aktivitas *zending* ke wilayah ini dimulai pada tahun 1855 oleh aktivis *zending* asal Jerman. Inisiatif pengiriman misi tersebut digagas oleh O.G. Heldring, yang dikenal sebagai “De Zendeling Werkman.” Heldring mengutus dua muridnya, J.G. Geissler dan C.W. Ottow, untuk menjalankan misi *zending* di Papua. Keduanya tiba di Mansinam, sebuah pulau kecil dekat Manokwari, pada 5 Februari 1855.

Pada awalnya, Geissler dan Ottow menghadapi kesulitan dalam mendekati penduduk lokal, yang melihat mereka sebagai

23 Holger Warnk, “The Coming of Islam and Moluccan-Malay Culture,” hlm. 119.

sosok asing karena berkulit putih. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka berhasil mendapatkan penerimaan dari masyarakat setempat. Keberhasilan mereka menetap dan memulai aktivitas zending menjadi inspirasi bagi Augusta Letz, yang berangkat dari Jerman pada tahun 1857 untuk menyusul kekasihnya, Ottow. Kedatangan Letz menjadi momen bersejarah, karena ia tercatat sebagai perempuan Eropa pertama yang menjejakkan kaki di Papua.²⁴

Berita tentang aktivitas zending di Papua juga sampai ke Belanda, yang akhirnya mendorong Utrechtsche Zendingsvereniging, sebuah organisasi zending berpengaruh di negara tersebut, untuk mengirimkan ekspedisi pertama mereka ke Papua. Ekspedisi ini direalisasikan pada tahun 1862 dengan mengutus J.L. van Hasselt, Th. F. Klaasen, dan W. Otterspoor sebagai delegasi zending pertama dari Belanda. Mereka tiba di Papua pada tahun 1863, namun tidak berhasil menemukan Ottow yang telah meninggal dunia, sementara istrinya sudah kembali ke Jerman. Posisi Ottow sendiri ternyata telah digantikan oleh petugas zending Jerman lainnya, G. Jaesrich.

Dalam dua dekade berikutnya, ekspedisi dan aktivitas zending terus dilakukan meskipun penerimaan dari masyarakat lokal berjalan sangat lambat. Dilaporkan bahwa hingga saat itu hanya 20 orang Papua yang dibaptis, meski aktivitas zending telah melibatkan 29 aktivis laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pada tahun 1865, pengiriman aktivis zending ke Papua semakin ditingkatkan. Usaha ini akhirnya membuahkan hasil yang signifikan, dan pada tahun 1905 dilaporkan bahwa sekitar 50.000 orang Papua telah dibaptis setelah 25 tahun kerja keras zending berlangsung.²⁵

24 F.J.F. van Hasselt, "De Zending op Nieuw Guinee," dalam W.C. van Klein (ed.), *Nieuw Guinee*, Deel I, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1937), hlm. 319.

25 F.J.F. van Hasselt, "De Zending op Nieuw Guinee," hlm. 321. Sejak awal abad

Sementara aktivitas zending lebih terkonsentrasi di wilayah utara Papua bagian barat, misi Katolik Romawi memusatkan kegiatannya di wilayah selatan Papua. Upaya pertama untuk mengirimkan misi Katolik ke Nieuw Guinea dilakukan pada tahun 1845, namun upaya ini gagal setelah para misionaris yang dikirim mengalami penolakan dan beberapa di antaranya terbunuh. Upaya berikutnya baru dilakukan kembali pada tahun 1881, bersamaan dengan misi kolonisasi di bawah pimpinan seorang Prancis bernama Marquis de Rays. Misi ini dikepalai oleh Pastor Navarre, yang berhasil mendirikan pos misi di Teluk Blanche, dekat dengan lokasi Rabaul saat ini, dan di Pulau Yule pada tahun 1884. Pada saat itu, wilayah timur laut Nieuw Guinea dan Kepulauan Bismarck berada di bawah protektorat Jerman.²⁶

Di wilayah 'Dutch New Guinea' atau Papua bagian barat, aktivitas misi Katolik baru dimulai pada tahun 1894 ketika Peter Le Cocq d'Armandville, S.J., tiba di Fakfak bersama rombongan yang juga mendirikan pos pemerintahan Hindia Belanda di sana. Proses penerimaan masyarakat setempat berjalan sangat lambat, sehingga setelah 15 tahun, hasil misi hanya mencakup beberapa area pemukiman penduduk lokal. Barulah pada tahun 1920, aktivitas misi mulai menunjukkan hasil yang lebih konkret dengan dibukanya beberapa gereja dan sekolah kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, gerakan misi membeli sekitar 400 *bau* kebun kelapa untuk memberikan lapangan pekerjaan sekaligus mengajarkan masyarakat setempat cara hidup menetap di bawah bimbingan para Broeders. Pada tahun 1926,

ke-20, aktivitas zending di Papua Barat semakin berkembang seiring dibukanya kantor pemerintahan dan perkembangan infrastruktur di wilayah ini, dan munculnya aktivitas zending lain dari 'Indische Kerk'. Termasuk di dalamnya adalah pembukaan rute pelayaran KPM (Koninklijk Paketvaart Maatschaappij) ke wilayah perairan Papua, dan pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah yang didirikan gereja protestan.

26 H. Geurtjens, "De Katholieke Missie op Nieuw Guinee," Hoofdstuk X, *Nieuw Guinee*, Deel I, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1937), hlm. 352-53.

kerja misi diperluas ke wilayah Mimika, kemudian Fakfak pada tahun 1928, dan ke Muju, di mana pos misi berhasil didirikan di pinggir hulu Sungai Digul. Hingga tahun 1934, tercatat bahwa di wilayah selatan New Guinea telah berdiri 54 sekolah misi dengan 58 orang guru, di Mimika terdapat 28 sekolah dengan 29 guru, di Fakfak terdapat 19 sekolah dengan 21 guru, dan di Digul terdapat 6 sekolah dengan 7 guru. Jumlah anak yang terdaftar di sekolah-sekolah tersebut mencapai 2.076, sementara total pemeluk Katolik tercatat sebanyak 3.359 orang.²⁷

Demikianlah, meskipun tidak memiliki kaitan langsung, aktivitas zending dan misi yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesejahteraan lainnya memiliki peran penting dalam mendukung perluasan pengaruh dan kekuasaan politik negara kolonial. Hal yang sama terjadi pula di Papua, di mana kegiatan zending dan misi menjalin hubungan mutualistik dengan pemerintah kolonial Belanda. Dalam praktiknya, proses perkembangan keduanya tidak selalu berjalan secara bersamaan. Kadangkala ekspedisi militer pemerintah kolonial datang terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh kegiatan zending dan misi. Di lain waktu, zending dan misi mendahului kehadiran militer. Namun, yang pasti adalah ekspansi militer dan perluasan administrasi pemerintahan menciptakan keamanan, ketertiban, serta kondisi lain yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan zending dan misi. Sebaliknya, aktivitas zending dan misi turut membantu mempermudah penerimaan masyarakat setempat terhadap kehadiran pegawai pemerintah kolonial.²⁸

Sebuah laporan mengungkapkan bahwa pada tahun 1881, Gubernur Jenderal van Lansberge memulai upaya untuk membangun pemerintahan di Papua Barat. Langkah ini dilakukan dengan mengirimkan pegawai birokrasi guna mendirikan pos-

27 H. Geurtjens, M.S.C., "De Katholieke Missie," hlm. 371-72, 374.

28 Pim Schoorl, *Belanda di Irian Jaya*, hlm. 2-3.

pos pemerintahan di berbagai wilayah strategis di Papua. Upaya tersebut diperkuat dengan pelaksanaan patroli kapal perang di sepanjang perairan Papua bagian barat, yang dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun.

Pada tahun 1889, Kapten H. Ch. Everill dari Australia menerima konsesi tanah di New Guinea Selatan seluas sekitar 1 juta acre (sekitar 400.000 hektar) dari Pemerintah Inggris. Perkembangan ini memicu kekhawatiran Pemerintah Belanda, karena wilayah tersebut berdekatan dengan area yang mereka klaim sebelumnya, yang ditandai dengan keberadaan Fort Du Bus—sebuah benteng yang didirikan pada tahun 1828, namun ditinggalkan pada tahun 1836. Melihat ancaman tersebut, Pemerintah Belanda merasa perlu untuk segera memperkuat klaim dan membangun pemerintahan yang lebih terorganisir di wilayah-wilayah Papua bagian barat, yang sebelumnya menjadi lokasi utama aktivitas zending dari Belanda.²⁹

Oleh karena itu, pada tahun 1896, Menteri Kolonial Bergsma mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat klaim penguasaan Belanda atas wilayah Papua. Salah satu langkah penting adalah mendirikan pos administrasi pemerintahan di Saleriki, dekat pantai barat Merauke, yang diawasi oleh seorang pegawai pemerintah dan didukung oleh 10 orang polisi. Pada tahun 1898, pos pemerintahan serupa juga didirikan di Fakfak dan Manokwari. Selain itu, Pemerintah Belanda menetapkan ketentuan khusus untuk wilayah Papua melalui *Staatsblad* tahun 1898 No. 62, yang menyatakan bahwa wilayah ini secara administratif dimasukkan ke dalam wilayah Ternate. Papua kemudian dibagi menjadi dua wilayah administratif: Nugini (Papua) Utara dengan ibu kota di Manokwari, dan Papua Barat serta Selatan dengan ibu kota di Fakfak. Pada perkembangan selanjutnya, melalui *Staatsblad* tahun 1901 No. 239, Pemerintah Belanda menetapkan bahwa

29 W.A. Hovenkamp, *Bestuur, Justitie, Politie, en Financien*. (Amsterdam: De Bussy, 1937), hlm. 5.

wilayah Papua Barat dan Selatan dipecah menjadi dua bagian administratif: Papua Barat, dengan ibu kota Fakfak, meliputi wilayah hingga Kaap Steenboom; sementara Papua Selatan, dengan ibu kota Merauke, mencakup wilayah dari Kaap Steenboom hingga perbatasan dengan wilayah kekuasaan Inggris.³⁰

Inggris, bersama Jerman, telah menduduki wilayah Nugini bagian timur sejak tahun 1880-an. Inggris bahkan telah mengibarkan benderanya di Port Moresby pada tahun 1883, sekaligus mengklaim semua wilayah di antara garis meridian 141 hingga 156 derajat sebagai wilayah protektoratnya. Sementara itu, Jerman menguasai wilayah Nugini bagian utara, yang sebelumnya diklaim oleh Belanda. Perbatasan antara wilayah Papua (yang dikuasai Belanda) dengan Nugini Jerman baru benar-benar ditetapkan secara jelas setelah kedua negara mencapai kesepakatan pada tahun 1911. Adapun perbatasan Papua Belanda dengan Nugini Inggris hingga saat itu masih belum disepakati secara resmi. Walaupun demikian, garis batasnya secara umum telah ditentukan oleh kedua belah pihak secara kasar, menunggu penetapan resmi di masa mendatang.³¹

Untuk memperkuat klaim teritorial atas wilayah Papua bagian selatan dan utara, Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz mengirimkan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kapten Colijn. Tujuan utama ekspedisi ini adalah mempelajari kondisi lokal secara langsung dan menyusun proposal langkah strategis berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Pada tahun 1907, Colijn menyampaikan laporannya (*Colijn Rapport*) yang menyoroti pentingnya eksplorasi awal terhadap wilayah yang sangat luas ini, di mana pengaruh pemerintah Hindia Belanda saat itu masih terbatas di sekitar pos-pos pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari *Colijn Rapport*, pemerintah Belanda memutuskan untuk mengintensifkan eksplorasi pedalaman Papua dengan melibatkan tentara Hindia

30 W.A. Hovenkamp, Bestuur, *Justitie, Politie, en Financien*, hlm. 6.

31 "Nieuw Guinea voorheen en thans," *De Preanger Bode*, 18 April 1913.

Belanda (KNIL). Dari tahun 1908 hingga 1915, serangkaian ekspedisi militer besar-besaran dilaksanakan, yang menelan biaya hingga 5,5 juta gulden. Aktivitas ini hanya dihentikan akibat meletusnya Perang Dunia I, yang mengalihkan perhatian dan sumber daya Belanda ke konflik global tersebut.³²

Pada periode yang hampir bersamaan, berbagai ekspedisi ilmiah dilakukan oleh sejumlah ahli untuk mengeksplorasi potensi alam Papua. Salah satu contohnya adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Prof. Wichmann pada tahun 1903, yang menjelajahi wilayah pesisir utara Papua. Selanjutnya, pada tahun 1904 dan 1905, terdapat ekspedisi Rocnemont-Posthumus Meijes di pantai barat daya Papua, yang merupakan bagian dari ekspedisi Zuid-West Nieuw Guinea 1904-1905 yang diorganisasikan oleh *Royal Geographical Society* Belanda. Setelah ekspedisi tersebut, aktivitas penjelajahan dilanjutkan oleh Assistent Resident Papua bagian selatan, Kroesen, dan Posthumus Meijes. Mereka dilaporkan mengeksplorasi daerah hilir Sungai Digul untuk memetakan potensi dan kondisi geografis kawasan tersebut, yang sekaligus memperkuat klaim Belanda atas wilayah tersebut.³³

Ekspedisi ilmiah terakhir tercatat dilakukan oleh Dr. Hunger pada akhir tahun 1920-an. Dalam ekspedisi ini, Dr. Hunger tinggal selama lebih dari satu tahun di Papua untuk mempelajari potensi pertanian, terutama terkait budidaya kelapa. Selama masa tinggalnya di Papua, ia dilaporkan melakukan perjalanan hingga ke Hollandia, melalui Danau Sentani dan daerah Bongga. Wilayah tersebut dikenal memiliki lahan terbaik untuk budidaya kelapa di Papua bagian utara, sehingga menjadi fokus utama dalam penelitiannya.³⁴

32 W.A. Hovenkamp, *Bestuur, Justitie, Politie, en Financien*, hlm. 74; Pim Schoorl, *Belanda di Irian Jaya*, hlm. 3.

33 "Nieuw Guinea voorheen en thans," *De Preanger Bode*, 18 April 1913.

34 "Een Studie over de Klappercultuur," *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 20 Januari 1922.

Serangkaian ekspedisi militer dan ilmiah yang dilakukan Belanda berhasil mengumpulkan data serta informasi yang sangat berharga tentang wilayah pedalaman Papua. Informasi tersebut menjadi landasan penting bagi upaya perluasan administrasi pemerintahan pada tahun 1914 dan 1918. Bahkan, di kalangan pengamat kolonial di Belanda, muncul wacana untuk memberikan Papua status sebagai provinsi tersendiri. Selain itu, ada pula gagasan untuk menjadikan Papua sebagai wilayah kolonisasi bagi penduduk keturunan Indo-Belanda di masa mendatang. Namun, gagasan tersebut tidak pernah terwujud karena terhalang oleh Depresi Ekonomi Dunia pada tahun 1930-an. Sebagai bagian dari perluasan administrasi, wilayah Papua sempat digabungkan dengan provinsi Ternate dan Ambon sebelum akhirnya dipecah kembali menjadi dua provinsi. Pada tahun 1925, ketika pemerintahan Maluku dibentuk, Papua kembali dibagi menjadi dua distrik utama, yaitu distrik yang berada di bawah yurisdiksi Ternate dan distrik yang dikelola dari Ambon.³⁵

Selama periode sebelum Perang Dunia I, yaitu antara tahun 1907 hingga 1918, dilaporkan bahwa di Papua bagian Utara, Papua Barat, dan Papua Selatan masing-masing ditugaskan seorang Asisten Residen dan seorang *Controleur*, sehingga total terdapat 6 pejabat kolonial yang bertugas di wilayah ini. Hingga tahun 1918, jumlah Asisten Residen tetap di angka 6 orang, tetapi jumlah *Controleur* meningkat menjadi 13 orang. Jumlah pejabat pemerintahan kolonial ini terus bertambah pada periode berikutnya, yakni antara tahun 1920 hingga 1937. Pada tahun 1920, terdapat 3 Asisten Residen yang dibantu oleh 10 *gezaghebber* dan *hulpgezaghebber*. Kemudian, pada tahun 1926, struktur administrasi berubah menjadi 1 Asisten Residen, 9 *gezaghebber*/*hulpgezaghebber*, 2 pejabat Bumiputra, serta 28 kepala desa. Pada tahun 1937, administrasi kolonial semakin berkembang dengan adanya 2

35 W.A. Hovenkamp, *Bestuur, Justitie, Politie, en Financien*, hlm. 75.



Gambar 1.2. Sketsa Peta 'Naderlands Papoea of Nieuw-Guinea' yang diproduksi pada tahun 1824.

Sumber: https://www.nationaalarchief.nl/en/research/archive/4.MIKO/invnr/628/file/NL-HaNA_4.MIKO_628

Keterangan: Peta ini digambar berdasarkan peta umum J.E. Baron von Derfelden van Hinderstein pada tahun 1842. Nama-nama tempat diberikan oleh kepala suku setempat, sebagaimana dicatat oleh Gubernur A.L. Weddik.

Asisten Residen, 2 *gezaghebber*, 2 Controleur *Binnenlandsch-Bestuur* (BB), 8 *gezaghebber* BB, dan 4 *schakelofficieren*. Selain itu, terdapat 4 pejabat Bumiputra dan 43 *bestuurassistant* yang turut mendukung jalannya pemerintahan di wilayah ini.³⁶

Seiring dengan perluasan birokrasi pemerintahan, Pemerintah Hindia Belanda juga memperkuat keberadaan pasukan kepolisian di wilayah Papua. Pada tahun 1931, di wilayah Papua Utara (meliputi Manokwari, Bosnik, Serui, Sarmi, Demta, dan Hollandia)

telah dibentuk pasukan ‘polisi bersenjata’ (*gewapende politie*) yang berjumlah 220 personel, serta ‘polisi lapangan’ (*veldpolitie*) yang pada tahun 1934 tercatat memiliki 177 personel. Di wilayah Papua Barat (meliputi Fakfak, Kaimana, dan Inanwatan), pasukan kepolisiannya terdiri dari 80 personel ‘polisi bersenjata’ pada tahun 1931, dan 63 personel ‘polisi lapangan’ pada tahun 1934. Sementara itu, di Papua Selatan, kekuatan kepolisian mencakup 120 personel ‘polisi bersenjata’ pada tahun 1931 dan 88 personel ‘polisi lapangan’ pada tahun 1934. Dengan demikian, total kekuatan kepolisian Hindia Belanda di seluruh wilayah ‘Papua Belanda’ mencapai 420 personel ‘polisi bersenjata’ pada tahun 1931 dan 328 personel ‘polisi lapangan’ pada tahun 1934.³⁷

Dalam tulisannya yang membahas perkembangan pemerintahan dan kekuatan kepolisian, Hovenkamp sama sekali tidak menyinggung keberadaan kamp interniran Boven Digul, yang secara khusus disiapkan sebagai tempat pembuangan sekaligus penjara alam bagi para ‘pemberontak komunis’ sejak tahun 1926. Menurut Takashi Shiraishi, keputusan untuk mendirikan kamp interniran berskala besar ini diambil dalam pertemuan khusus Dewan Hindia Belanda (*Raad van Nederlandsch-Indië*) bersama Gubernur Jenderal de Graeff pada 18 November 1926, hanya sekitar satu minggu setelah pecahnya pemberontakan komunis di Banten pada 12 November malam. Kamp interniran ini dipandang sebagai solusi strategis untuk mengisolasi para pemimpin gerakan pemberontakan komunis tersebut dari para pengikutnya.

Untuk itu, Digul dipilih sebagai lokasi yang dianggap ideal karena wilayahnya “hampir tidak berpenghuni, terisolasi, dan memiliki jalur akses yang sangat terbatas.” Dalam kata-kata pejabat tinggi kolonial sebagaimana dikutip Shiraishi: “benar-benar menjadikan mereka terisolasi dari masyarakat, hampir tidak akan bisa dikontak, dan akan selalu terpisah sepanjang hidupnya.”

37 W.A. Hovenkamp, *Bestuur, Justitie, Politie, en Financien*, hlm. 52.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Boven Digul ditetapkan sebagai sub-divisi administrasi baru dengan Tanah Merah sebagai pusatnya, yang dipisahkan dari *onderafdeeling* Zuid Nieuw Guinea (Papua Selatan). Kapten L.Th. Becking, yang sebelumnya berperan dalam menumpas pemberontakan komunis di Banten, ditugaskan ke Digul pada Januari 1927 untuk mempersiapkan kamp interniran ini. Ia membangun berbagai fasilitas seperti barak, gudang, klinik, stasiun radio, kantor pos, serta perahu-rakit untuk transportasi sungai. Pada Maret 1927, rombongan pertama tahanan politik tiba di Digul, terdiri atas lima puluh orang tahanan, termasuk satu orang Tionghoa, serta tiga puluh anggota keluarga. Populasi kamp interniran ini terus bertambah dan mencapai puncaknya pada April 1930 dengan jumlah 2.000 orang, termasuk 1.308 tahanan politik.³⁸

Demikianlah, hingga periode akhir kolonial, Pemerintah Hindia Belanda terus berupaya memperkuat kehadirannya di wilayah Papua. Secara administratif, mereka membagi wilayah Papua menjadi tiga afdeeling (setingkat wilayah administrasi utama), yaitu Papua Utara, Papua Selatan, dan Papua Barat. Papua Utara mencakup *onderafdeeling* (wilayah setingkat sub-distrik) seperti Hollandia, Nimboran, Sarmi, Serui, Kepulauan Schouten, Yapen, Waropen, Waren, Biak, dan Oostbergland. Di sisi lain, Papua Selatan meliputi wilayah Guinea Baru Selatan, Merauke, Mappi, Asmat, Boven Digul, dan Muyu. Adapun Papua Barat mencakup wilayah Guinea Baru Bagian Barat, Sorong, Makbon, Raja Ampat, Manokwari, Teminabuan, Inanwatan, Ayamaru, Bintuni, Ransiki,

38 Populasi kamp interniran Digul pada tahun bulan Oktober 1927 berjumlah 930, terdiri dari 538 tahanan dan 382 anggota keluarga tahanan. Pada bulan Februari 1928, jumlahnya meningkat menjadi 1.139 yang terdiri dari 666 tahanan dan 473 keluarga tahanan. Tahanan baru tersebut sebagian besar adalah mereka yang terlibat dalam pemberontakan komunis di Sumatra Barat pada Januari 1927. Kemudian pada April 1930, populasi kamp interniran dilaporkan telah mencapai jumlah sekitar 2000 orang, termasuk 1.308 tahanan. Lihat Takashi Shiraiishi, *The Phantom World of Digul. Policing as Politics in Colonial Indonesia, 1926-1941* (Singapore/Kyoto: NUS Press & Kyoto University Press, 2021), hlm. 31-36.

Wandammen, Kepala Burung, Pantai Kasuari, Wisselmeren, Fakfak, Kaimana, dan Mimika.

Melalui perluasan birokrasi dan penguatan kepolisian kolonial, Pemerintah Hindia Belanda semakin memiliki keleluasaan dalam memetakan dan mengeksplorasi berbagai sumber daya ekonomi yang tersebar di wilayah Papua bagian barat. Hal ini menandai babak baru dalam upaya Belanda untuk mengintegrasikan Papua ke dalam sistem administrasi negara kolonialnya. Sejauh mana eksplorasi ini berhasil dilakukan, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal, akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab berikutnya.

C. Perkembangan Ekonomi Papua (Barat)

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui berbagai ekspedisi dan eksplorasi yang disebutkan sebelumnya, sejumlah pengamat kolonial Belanda menyusun ulasan tentang perkembangan demografi serta potensi berbagai sektor ekonomi di wilayah Papua. Namun, data yang tersedia mengenai perkembangan demografi di wilayah ini sangat terbatas. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh para pegawai kolonial Belanda lebih banyak berfokus pada informasi kualitatif, seperti ciri-ciri fisik, klasifikasi ras, dan aspek-aspek antropologis penduduk Papua lainnya tanpa disertai data kuantitatif yang memadai. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa perhatian kolonial pada masa itu lebih diarahkan pada pengelompokan sosial-budaya daripada pemahaman yang mendalam terhadap struktur demografi masyarakat Papua.³⁹

39 Misalnya tulisan Hendricus Johannes Tobias Bijlmer, *Anthropological Results of the Dutch Scientific Central New-Guinea Expedition A° 1920 Followed by an Essay on the Anthropology of the Papuans* (Leiden: N.V. Boekhandel en Drukkerij Voorheen E.J. Brill, 1922); dan H.J.T. Bijlmer, "Bevolking," dalam W.C. van Klein (ed.), *Nieuw Guinee*, Deel I, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1935), hlm 219-225.

Hal ini dapat dimengerti mengingat keterbatasan akses ke seluruh pemukiman penduduk, terutama di wilayah pedalaman Papua. Selain itu, absennya administrasi pemerintahan yang mampu menjangkau semua wilayah semakin mempersulit upaya survei dan pencatatan kependudukan. Bahkan, sensus penduduk pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 tidak mencakup wilayah Papua, sehingga tidak ada data yang tersedia terkait kondisi demografis di kawasan tersebut. Baru pada sensus penduduk tahun 1930, pemetaan demografi di wilayah Papua mulai dilakukan. Namun, upaya ini masih terbatas pada daerah-daerah di mana perwakilan pemerintah Hindia Belanda telah berdiri secara lebih representatif. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.1, wilayah-wilayah tersebut meliputi Sorong, Manokwari, Papua Barat (West Nieuw Guinea), Kepulauan Biak atau Geelvink (Schouten Islands), Pulau Yapen, Jayapura (Hollandia), Boven Digul, dan Papua Selatan (Zuid Nieuw Guinea).

Hasil Sensus Penduduk 1930 menunjukkan bahwa jumlah total penduduk Papua yang berhasil tercatat mencapai 331.387 jiwa. Jumlah ini mencakup empat kelompok penduduk, yaitu 331.148 jiwa penduduk pribumi, 330 jiwa penduduk Eropa, 1.722 jiwa penduduk Tionghoa, dan 187 jiwa penduduk Timur Asing lainnya. Namun, khusus untuk kategori penduduk pribumi, tidak terdapat penjelasan rinci mengenai komposisinya—apakah hanya mencakup penduduk asli Papua atau juga termasuk penduduk pribumi dari wilayah Nusantara lainnya seperti pendatang dari Jawa, Makassar, Bugis, dan sebagainya. Jayapura menjadi afdeeling atau distrik dengan jumlah penduduk terbesar, termasuk jumlah penduduk Eropa yang paling banyak. Hal yang menarik adalah konsentrasi jumlah penduduk Tionghoa yang signifikan, terutama di wilayah ‘West Nieuw Guinea’ dan ‘Zuid Nieuw Guinea’. Dua wilayah ini memiliki karakteristik berbeda, di mana jumlah penduduk Eropa di wilayah pertama jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Wilayah Papua Berdasarkan Hasil Sensus penduduk 1930

No.	Afdeeling/Distrik	Pribumi	Eropa	Tionghoa	Timur Asing lain
1.	Sorong	18.697	25	194	36
2.	Manokwari	31.128	66	156	2
3.	West Nieuw Guinea	43.779	30	566	98
4.	Schouten-eiland	25.392	18	77	-
5.	Jappen-groep	28.494	8	182	-
6.	Hollandia (Jayapura)	165.155	57	97	14
7.	Boven Digoel	2.686	51	30	3
8.	Zuid Nieuw Guinea	15.817	75	420	34
Total		331.148	330	1.722	187

Sumber: Diolah dari *Volkstelling 1930, Inheemsche Bevolking van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden en De Molukken, Deel V.* (Batavia: Departemen van Economische Zaken – Landsdrukkerij, 1936)

wilayah kedua. Kehadiran orang Tionghoa dalam jumlah besar menjadi bukti tak langsung dari semakin terbukanya dua kawasan tersebut bagi para pendatang yang memiliki naluri bisnis yang kuat serta keberanian untuk mengeksplorasi potensi ekonomi di wilayah yang masih berkembang.

Sementara itu, terkait perkembangan sektor pertanian di Papua, K. van der Veer, seorang penasihat bagian Museum Perdagangan di Kolonial Instituut Amsterdam, dalam tulisannya menggambarkan bahwa aktivitas pertanian dan hortikultura penduduk lokal masih sangat terbatas. Jenis dan jumlah tanaman yang dibudidayakan oleh penduduk lokal bertambah seiring adanya bantuan dari pemerintah Belanda dan Australia. Namun demikian, penduduk lokal belum sepenuhnya mampu memanfaatkan bantuan tersebut secara ekonomis. Menurut van

der Veer, pengolahan tanah bagi penduduk lokal Papua erat kaitannya dengan dunia mistik. Akibatnya, sektor pertanian tidak berkembang dengan optimal, dan bahan pangan utama penduduk lokal, yaitu sagu, memiliki ketersediaan yang sangat terbatas. Proses pengolahan sagu untuk konsumsi pun masih dilakukan dengan teknik yang sederhana.⁴⁰

Di wilayah Papua bagian Selatan, aktivitas pertanian berkembang dengan menyesuaikan kondisi lahan dan karakter alam setempat. Setiap penduduk lokal umumnya memiliki kebun kecil milik pribadi yang terpisah dari kebun tetangganya, serta sebuah kebun besar yang dikelola secara bersama-sama. Peralatan seperti kapak dan perkakas berbahan besi masih jarang digunakan; sebagai gantinya, mereka lebih sering memanfaatkan tongkat kayu untuk membuat lubang tanam. Pengolahan tanah tidak dilakukan secara intensif, hanya sebatas menggali parit untuk mengalirkan air, dan jika terjadi serangan hama, mereka cenderung membiarkannya tanpa penanganan khusus. Jenis tanaman yang biasa ditanam meliputi ubi rambat, talas, kentang, dan pisang, sedangkan sagu diambil dari pohon-pohon sagu yang tumbuh liar di hutan sekitar. Proses pengambilan sagu dilakukan dengan menebang dan membelah pohon tersebut. Dari satu pohon sagu, mereka dilaporkan mampu menghasilkan sekitar 100 kilogram tepung sagu.⁴¹

Pada dekade 1930-an, di wilayah Papua bagian Selatan mulai berkembang perkebunan kelapa dan karet dengan luas masing-masing sekitar 1.270 hektar dan 630 hektar. Namun, hingga saat itu, pengelolaan perkebunan tersebut belum melibatkan partisipasi aktif penduduk lokal. Upaya pengembangan perkebunan ini lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak luar, sementara masyarakat

40 K. van der Veer, "Land- en Tuinbouw," *Nieuw Guinee*, Deel II, Hoofdstuk XII, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1937), hlm. 519.

41 K. van der Veer, *Ibid.*

setempat masih menjalankan pola pertanian tradisional yang berfokus pada kebutuhan subsisten.⁴²

Di wilayah sekitar Merauke, sebagaimana diungkapkan oleh van der Veer, terdapat petak-petak lahan rawa di sepanjang pesisir yang telah digarap oleh penduduk setempat menjadi kebun. Di lahan-lahan tersebut, mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti ketela, batata/kentang, ubi, dan talas. Sedikit ke arah timur dari Merauke, terdapat pemukiman orang Jawa yang berhasil mengembangkan aktivitas pertanian dengan menanam padi dan memelihara ternak. Selain itu, mereka juga membudidayakan tanaman jagung, kacang tanah, dan kacang polong. Sayangnya, perkembangan aktivitas pertanian semacam ini belum diikuti oleh penduduk asli Papua. Di kawasan barat daya Digul, yang wilayahnya terpecah-pecah oleh aliran sungai, sebagian besar tanah terdiri atas rawa-rawa, sehingga budidaya tanaman hanya memungkinkan di sepanjang tepian sungai. Di daerah ini, suku-suku yang tinggal di wilayah pegunungan dilaporkan telah menjalankan aktivitas perdagangan komoditas, terutama tembakau, dengan komunitas yang bermukim di sekitar kawasan pantai.⁴³

Wilayah Papua bagian Barat diketahui memiliki potensi besar dalam menghasilkan pala, kopal (getah damar),⁴⁴ dan kopra. Para pengamat menyatakan bahwa daerah ini menawarkan peluang untuk pengembangan perkebunan besar. Namun, upaya ini masih memerlukan waktu karena minimnya eksplorasi ke wilayah pedalaman. Aktivitas pertanian yang telah berkembang di wilayah ini sebagian besar berpusat di sepanjang pesisir dekat Amberbaken, di mana penduduk Papua telah lama menanam

42 K. van der Veer, "Land- en Tuinbouw," hlm. 519

43 K. van der Veer, "Land- en Tuinbouw," hlm. 520.

44 Kopal adalah hasil olahan getah (resin) yang disadap dari batang damar (*Agathis dammara* dan beberapa *Agathis* lainnya) serta batang dari batang pohon anggota suku *Burseraceae* (*Bursera*, *Protium*). Biasanya, kopal dijadikan sebagai bahan dasar bagi cairan pelapis kertas supaya tinta tidak menyebar.



Gambar 1.3. Proses pengambilan getah kopal yang dilakukan melalui teknik penyadapan. Kopal menjadi salah satu produk ekspor unggulan Papua. Meskipun kayunya tergolong lunak, namun kopal dapat menjadi bahan bangunan yang sangat kokoh. Tidak heran bila selama periode perang, Jepang dan Amerika berlomba-lomba menebang pohon ini. Bila sebelum perang Papua bisa mengekspor kopal antara puluhan hingga ratusan ton setiap bulannya, maka angka tersebut turun drastis menjadi hanya empat sampai lima ton menjelang akhir 1950-an. Foto di atas diambil kira-kira pada Agustus 1959.

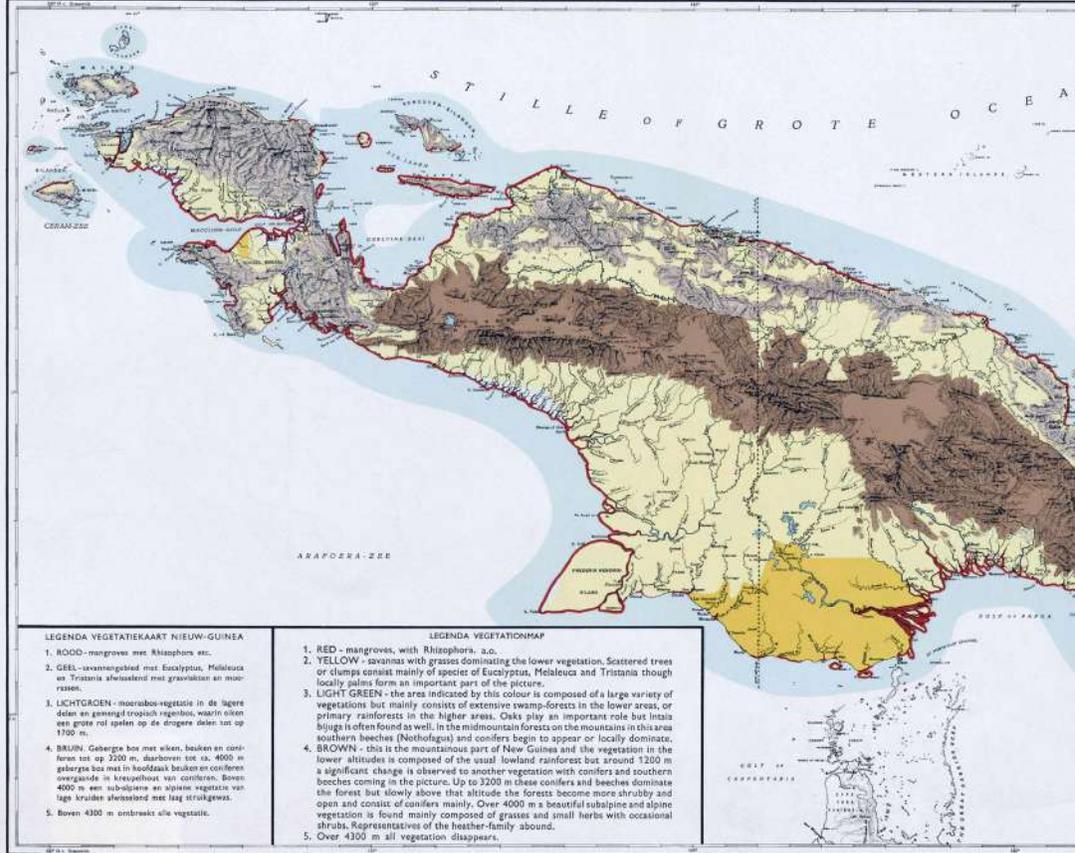
Sumber: *Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea*. <http://hdl.handle.net/10648/ae33962a-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

padi bukit (gogo). Di sekitar Danau Anggi, mereka juga diketahui menanam kentang sebagai bahan pangan utama.

Sejak tahun 1932, sebuah perusahaan besar asal Jepang, *Nanyo Kohatsu Kaisha*, bekerja sama dengan beberapa kolonis Belanda, melakukan eksperimen penting di wilayah ini untuk menanam kapas. Namun, proyek tersebut gagal karena curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun, yang menyebabkan tanaman kapas tidak dapat tumbuh dengan optimal. Meski demikian, perusahaan ini dilaporkan berhasil mengekspor kopal dalam jumlah besar dari pedalaman Nabire. Selain itu, beberapa perkebunan kelapa di wilayah ini juga berhasil menghasilkan kopra berkualitas tinggi yang diekspor ke Makassar. Para kolonis di daerah ini tidak hanya mencoba membudidayakan sayuran, tetapi juga menanam kopi, kapuk, dan kapas sebagai upaya diversifikasi hasil pertanian.⁴⁵

Dengan demikian, secara keseluruhan, praktik pertanian di kalangan penduduk asli Papua masih sangat terbatas dan berada pada tingkat yang sederhana. Sebaliknya, para pendatang justru menjadi penggerak utama dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, meskipun upaya tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penduduk lokal. Untuk mengubah kondisi ini, Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan Ordinansi Perkebunan Penduduk Pribumi, yang berhasil membuka lahan perkebunan seluas 24.000 hektar. Dari luas tersebut, sekitar 20.000 hektar digunakan untuk menanam kelapa, sementara sisanya, sekitar 3.600 hektar, ditanami karet. Perkebunan karet ini dilaporkan mampu menghasilkan hingga 1.000 ton karet mentah setiap tahunnya. Sementara itu, perkebunan kopi dilaporkan tidak memberikan hasil yang signifikan, dan pengembangan padi hanya terbatas di satu distrik dengan hasil yang kurang memuaskan. Selain itu, di wilayah Papua bagian Selatan yang berada di bawah kekuasaan Belanda, hampir tidak ada sistem moneter yang

45 K. van der Veer, "Land- en Tuinbouw," hlm. 521.



berlaku. Monetisasi ekonomi praktis belum menyentuh kehidupan masyarakat lokal, yang sebagian besar masih bergantung pada sistem ekonomi subsisten dan barter.⁴⁶

Berbeda dengan sektor pertanian dan perkebunan yang perkembangannya relatif lamban di wilayah Papua Belanda (Nugini-Belanda), aktivitas eksploitasi kelautan dan perikanan serta penangkapan binatang liar di wilayah ini telah berlangsung sejak lama, bahkan hingga periode awal modern. Produk-produk laut utama yang menjadi komoditas komersial dari wilayah ini



Gambar 1.4. Peta di samping menampilkan karakteristik ekologis yang sangat beragam dari Papua Barat dan Papua Nugini. Bagian tengah dan selatan Papua Barat didominasi hutan hujan tropis dan sabana, sedangkan pegunungan tengah (Central Highlands) didominasi dengan hutan montana dan vegetasi unik yang hanya tumbuh di dataran tinggi. Kawasan berwarna merah didominasi oleh hutan mangrove dengan *Rhizophora*. Kawasan dengan warna kuning merupakan sabana yang didominasi pohon *Eucalyptus*, *Melaleuca*, dan *Tristania*. Kawasan berwarna hijau muda didominasi oleh vegetasi rawa dan hutan hujan tropis dataran rendah. Kemudian kawasan dengan warna coklat merupakan hutan pegunungan tropis dengan pohon konifer dan tumbuhan dataran tinggi (hingga 3.200 m). Terakhir adalah kawasan berwarna putih (di atas 4.300 m), di mana tidak lagi ditemukan adanya vegetasi.

Sumber: *Inventaris van Kaarten en Tekeningen Behorende tot het Archief van het Ministerie van Koloniën en Rechtsopvolgers, (1702) 1814-1963.* https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.MIKO/invnr/5007/file/NL-HaNA_4.MIKO_5007

mencakup kura-kura, berbagai jenis ikan seperti makarel, sarden, tenggiri, tuna, serta berbagai jenis kerang, mutiara, dan teripang. Dari jenis kura-kura atau penyu, terdapat dua yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi, yaitu penyu hijau dan penyu sisik (*hawksbill*). Penyu hijau biasanya ditangkap untuk dikonsumsi dagingnya, sedangkan penyu sisik dimanfaatkan cangkangnya. Sementara itu, dari hasil laut lainnya, ikan sarden menjadi komoditas bernilai ekonomis tinggi. Ikan ini biasanya dikeringkan dan diasinkan sebelum diekspor ke Jawa. Selain itu, makarel—dikenal juga sebagai *Spanish mackerel* atau bonito—menjadi salah satu produk utama dari aktivitas penangkapan ikan yang

dilakukan oleh komunitas Eropa di perairan ini. Ikan tersebut juga diproses menjadi ikan kering untuk kebutuhan ekspor.⁴⁷

Dari semua produk laut, mutiara dan kerang merupakan komoditas dengan nilai ekonomi tertinggi yang banyak ditemukan di perairan Papua. Eksplorasi dan pengelolaan komoditas ini melibatkan perusahaan-perusahaan dari Jepang, Australia, dan Belanda. Salah satu perusahaan Belanda yang aktif dalam bisnis ini adalah *Celebes Trading Company*. Sebuah laporan mencatat bahwa pada tahun 1934 hingga 1935, ekspor mutiara dari perairan Papua mencapai 200.348 karat dengan nilai setara 5.742 poundsterling. Pada periode yang sama, ekspor ibu mutiara (*paarlemour*) dari perairan Papua mencapai 23 ton, dengan nilai jual total sebesar 1.641 poundsterling. Tidak ketinggalan, *Koninklijk Paketvaart Maatschappij* (KPM) pada tahun 1933 dilaporkan telah mengangkut sebanyak 57 *last* atau sekitar 1,5 ton kerang dari perairan Papua, dengan nilai per *last* mencapai 350 gulden. Jenis mutiara dengan nilai tertinggi adalah mutiara kerang asli yang dikenal sebagai *Pteria (Pinctada) margaritifera*, serta mutiara 'gold lip' dan 'silver lip.' Mutiara dan ibu mutiara ini sangat diminati di pasar dunia untuk digunakan sebagai bahan pembuat gagang pisau, kipas, kotak kartu, dan pembuatan kancing. Industri mutiara dan ibu mutiara berkembang pesat di pusat-pusat perdagangan global seperti Jepang, New York, Sydney, dan London.⁴⁸

Burung-burung eksotik dari Papua, khususnya Cenderawasih spesies kuning, telah lama menjadi komoditas komersial yang diperdagangkan oleh penduduk Papua. Burung ini sering ditukar dengan bahan makanan, keramik, dan barang-barang lain. Bahkan, sejak akhir abad ke-17, VOC sudah terlibat dalam perdagangan burung Cendrawasih dari Papua. Daya tarik burung

47 Hilbrand Boschma, "Zeeproducten, Visscherij, en Vogeljacht," *Nieuw Guinee*, Deel II, Hoofdstuk XIII, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1937), hlm. 544-45.

48 Hilbrand Boschma, "Zeeproducten, Visscherij, en Vogeljacht," hlm. 531.

ini terletak pada keindahan bulunya yang memukau, yang sering dijadikan bahan utama pembuatan topi dan perhiasan mewah dengan nilai tinggi di pasar internasional, termasuk di London. Selain Cenderawasih, burung merpati mahkota (*Goura coronata*) dan spesies eksotik lainnya juga menjadi target perburuan dan diperdagangkan secara luas. Pada tahun 1931, atas desakan berbagai kelompok pecinta satwa, Pemerintah Hindia Belanda secara resmi melarang penangkapan dan pembunuhan burung Cendrawasih dan spesies lainnya. Namun demikian, larangan tersebut tidak sepenuhnya efektif dan aktivitas penangkapan burung-burung eksotik dari Papua terus berlangsung.⁴⁹

Seluruh produk dan komoditas dari Papua, baik hasil pertanian dan perkebunan, sumber daya alam dari hutan, maupun hasil tangkapan laut, dapat dinikmati oleh masyarakat luar dan menjadi komoditas komersial dalam jaringan perdagangan yang sudah berkembang. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan infrastruktur transportasi air, khususnya dalam penggunaan perahu, pelabuhan, dan pelayaran kapal laut. Beberapa suku di pedalaman Papua bagian Barat telah lama mengenal teknologi transportasi air tradisional, seperti rakit, kano, dan perahu kecil. Alat-alat tersebut mereka gunakan untuk mengangkut barang-barang melalui jalur sungai, yang kemudian ditukarkan dengan barang lain di daerah pesisir. Sementara itu, penduduk yang tinggal di kawasan pesisir sudah menguasai teknologi pembuatan perahu dan pelayaran jarak jauh. Dengan perahu-perahu tersebut, penduduk pesisir terbiasa melakukan perjalanan ke Ternate, Tidore, atau kepulauan Maluku lainnya untuk menjual produk lokal dan menukar barang dengan produk-produk yang mereka butuhkan. Melalui transportasi ini, penduduk Papua Barat memperkenalkan komoditas khas daerah mereka sekaligus membangun transaksi ekonomi dengan masyarakat luar Papua.⁵⁰

49 Hilbrand Boschma, "Zeeproducten, Visscherij, en Vogeljacht," hlm. 545.

50 J.W. Tissot van Patot, "Scheepvaart en Verkeer te Land," *Nieuw Guinee*, Deel III,

Selain pelayaran ekspedisi militer yang telah berlangsung di wilayah Papua sejak awal abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda baru mengeluarkan izin untuk pelayaran sipil-komersial pertama pada tahun 1852. Jalur pelayaran ini menghubungkan Jawa dengan Ambon dan Ternate. Jalur tersebut kemudian diperluas hingga mencapai wilayah Papua bagian Barat oleh *Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij* (NISM), sebuah perusahaan patungan antara Inggris dan Belanda. Namun, operasi NISM hanya bertahan hingga tahun 1890. Pada tahun 1888, Pemerintah Hindia Belanda menandatangani kontrak dengan *Koninklijk Paketvaart Maatschappij* (KPM) untuk menyelenggarakan jalur pelayaran komersial ke wilayah Papua selama 15 tahun. Berdasarkan kontrak tersebut, KPM mulai mengoperasikan jalur pelayaran dengan frekuensi tiga bulan sekali yang menghubungkan Ternate, Ambon, dan sejumlah pelabuhan di pantai Utara, Barat, dan Selatan Papua Barat. Layanan ini menggunakan kapal uap s.s. ‘Camphuys’ yang memiliki kapasitas angkut kargo hingga 700 ton. Sejak mendapatkan kontrak ini, KPM menjadi penyedia utama layanan pelayaran samudra yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Papua dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Hindia Belanda serta pelabuhan utama di Asia, Eropa, Australia, dan Amerika.⁵¹

Dalam jaringan pelayaran KPM, semua barang kargo yang berasal dari wilayah Papua dibawa menuju wilayah barat Hindia Belanda melalui Ambon dan Ternate. Jika barang-barang tersebut akan diteruskan ke Eropa, kapal-kapal KPM akan melakukan bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan tersebut sebelum melanjutkan perjalanan ke Jawa atau Singapura. Ketika armada KPM mengalami perluasan, kargo dari Papua juga mulai transit

Hoofdstuk XVI, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1937), hlm. 733.

51 J.W. Tissot van Patot, “Scheepvaart en Verkeer te Land,” hlm. 738. Pelabuhan-pelabuhan utama di Papua Barat adalah Manokwari, Fakfak, Hollandia, dan Merauke. Selain itu, terdapat beberapa pelabuhan yang lebih kecil seperti Serui, Sorong, Babo, Muturo, Ansus, Korido, Digul, dan Teluk Etna.

di Surabaya dan Makassar. Hingga akhir tahun 1920-an, jalur pelayaran KPM ke pantai barat dan selatan Papua mengalami perubahan. Selama beberapa tahun, kapal KPM yang berangkat dari Merauke menjadi bagian dari jalur pelayaran Surabaya-Timor, yang kadang-kadang diperpanjang hingga Pulau Thursday dan Port Darwin di Australia.

Selain itu, beberapa kapal KPM yang singgah di Papua juga merupakan bagian dari jalur pelayaran Jawa-Australia, dan bahkan terhubung dengan rute pelayaran Rabaul-London. Pada tahun 1936, misalnya, ketika pelabuhan Babo mulai berfungsi sebagai pusat persinggahan untuk eksplorasi minyak, jalur pelayaran KPM ke pantai barat dan selatan Papua dipecah menjadi dua rute utama. Rute pertama adalah jalur Ambon-Pantai Barat Papua, yang melewati Banda Neira, Seram, Kei, dan Kepulauan Aru. Rute kedua adalah jalur Ambon-Merauke, yang juga melewati Kei, Kepulauan Aru, dan Babo.⁵²

Sebuah laporan menyebutkan bahwa hingga tahun 1936, terdapat sekitar 39 kapal KPM yang berlayar ke perairan Papua untuk membongkar muatan di berbagai pelabuhan di wilayah tersebut. Setiap tahunnya, kapal-kapal ini dilaporkan membawa kargo dengan total antara 2.500 hingga 3.500 ton. Muatan yang dibawa sebagian besar berupa barang kebutuhan sehari-hari, terutama bahan makanan, bahan bakar minyak, dan batu bara yang diangkut dari Palembang, Balikpapan, serta Bula, Seram. Sebaliknya, dari pelabuhan-pelabuhan di Papua, kapal-kapal KPM mengangkut muatan rata-rata antara 5.000 hingga 7.000 ton per tahun. Barang-barang yang dibawa meliputi kopra, kopal, kayu, buah pala, fuli, cangkang penyu, teripang, kayu kuning, kayu hitam, sirip hiu, rotan, kapas, dan kapuk untuk dikirim ke wilayah barat Hindia Belanda. Kopra, sebagai salah satu komoditas utama, biasanya dikirim ke Makassar untuk dijual bersama dengan kopra

52 J.W. Tissot van Patot, "Scheepvaart en Verkeer te Land," hlm. 739.



Gambar 1.5. Proses pengiriman kopal yang dilakukan oleh salah satu kapal KPM. Foto kira-kira diambil pada November 1961.

Sumber: *Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea*. <http://hdl.handle.net/10648/ae33c92e-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

hasil produksi lokal Sulawesi, seperti dari Pulau Selayar dan kawasan Minahasa.⁵³

Selain kapal-kapal uap milik KPM, sejak pertengahan dekade 1930-an, sejumlah rute pelayaran internasional yang dikelola oleh perusahaan dari Inggris, Australia, dan Jepang mulai menjadikan beberapa pelabuhan di Papua sebagai bagian dari jalur pelayaran mereka. Di pelabuhan-pelabuhan tersebut, kapal-kapal ini melakukan aktivitas bongkar muat barang serta menaikkan

53 J.W. Tissot van Patot, "Scheepvaart en Verkeer te Land," hlm. 740.

atau menurunkan penumpang, sehingga turut meningkatkan konektivitas Papua dengan dunia internasional. Beberapa jalur pelayaran tersebut antara lain *Silver Java Pacific Line* (Belanda), *Java China Japan Lijn* (Belanda & Hongkong), *Nanyo Kohatsu Kabushiki Kaisha* (N.K.) (Jepang), *South Africa (Millars) Line* (Afrika Selatan), *W.R. Carpenter* (Inggris/Australia), *Australian Oriental Line* (Australia), *Nippon Yusen Kaisha* (Jepang), *Osaka Shosen Kaisha* (Jepang), *Burn Philp* (Australia), *Messengeries Maritimes* (Perancis/Belanda), *Nord Deutshcer Lloyd* (Jerman), dan *Prince Silver Line* (Amerika Serikat).⁵⁴

Sejumlah pengusaha Tionghoa juga dilaporkan memiliki perahu bermesin kecil yang mereka gunakan untuk transportasi jarak dekat. Perahu-perahu ini umumnya dimanfaatkan untuk mengangkut komoditas hasil hutan dari pedalaman ke pesisir melalui jalur sungai. Sungai Mamberamo dan Sungai Digul merupakan dua sungai besar yang dapat dilayari oleh kapal bertonase besar, sementara sungai-sungai kecil hanya dapat dilewati oleh perahu-perahu kecil, seperti yang dimiliki oleh para pedagang Tionghoa tersebut.⁵⁵

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, terlihat dengan jelas bahwa pelabuhan Manokwari dan Sorong, selama periode 1924-1935, merupakan dua pelabuhan di Papua yang paling sering dilabui oleh kapal-kapal uap bertonase besar dengan daya angkut lebih dari 500 meter kubik, yaitu sekitar 30 kapal per tahun. Sementara itu, pelabuhan Merauke menjadi pelabuhan utama di Papua untuk kapal-kapal berukuran sedang, dengan daya muat antara

54 J.W. Tissot van Patot, "Scheepvaart en Verkeer te Land," hlm. 748.

55 J.W. Tissot van Patot, "Scheepvaart en Verkeer te Land," hlm. 810. Selain kapal laut dan perahu, pada akhir 1930-an, Pemerintah Belanda bekerja sama dengan pihak swasta juga mulai menjajaki dibukanya jalur penerbangan dari wilayah Barat Hindia Belanda ke wilayah Papua Barat ini. Namun demikian, upaya tersebut hanya berhasil dilakukan untuk kepentingan militer, namun tidak untuk urusan komersial. Lihat W.C. Klein & R.N. De Ruyter van Steveninck, "Luchtverkenning en Luchtverkeer in Nederlandsch en Australische Nieuw Guinee," *Nieuw Guinee*, Deel III, Hoofdstuk XXIII, (1937), hlm. 1044-1049.

Tabel 1.2. Jumlah kapal yang datang di Pelabuhan-pelabuhan Papua Barat, 1924 – 1935

Tahun	Hollandia	Manokwari	Sorong	Kokas	Fakfak	Merauke
Kapal mesin uap dengan dengan daya angkut lebih dari 500 m kubik						
1924	13	26	26	13	13	13
1928	12	25	25	13	13	13
1930	13	26	26	12	12	14
1932	13	30	30	13	12	13
1934	13	43	43	15	14	13
1935	13	36	36	19	19	14
Kapal mesin uap dengan daya angkut antara 16 hingga 500 m kubik						
1924	3	-	-	8	7	56
1928	-	13	-	14	-	43
1930	1	12	1	6	-	74
1932	1	30	1	13	-	28
1934	-	21	2	2	1	75
1935	-	32	8	32	1	133

Sumber: J.W. Tissot van Patot, "Scheepvaart en Verkeer," hlm. 812

16 hingga 500 meter kubik. Selama periode tersebut, jumlah kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Papua relatif stabil, kecuali di Merauke yang mengalami lonjakan signifikan dari 75 kapal pada tahun 1934 menjadi 133 kapal pada tahun berikutnya. Kehadiran kapal-kapal tersebut di pelabuhan-pelabuhan Papua (Papua Barat) telah memungkinkan para pedagang dan pengusaha dari berbagai latar belakang—termasuk Belanda, Tionghoa, Arab, Jepang, Makassar, dan Jawa—untuk mengirimkan produk-produk komersial dari Papua ke pasar-pasar lokal dan regional di Hindia Belanda, bahkan hingga ke pasar dunia.

Dr. W.C. Klein, Sekretaris Komite Nugini Belanda yang berkantor di Den Haag, menulis laporan ekstensif mengenai aktivitas perdagangan masuk (impor) dan keluar (ekspor) dari wilayah Papua, terutama pada tahun 1930-an. Dalam perdagangan keluar (ekspor), produk-produk hasil hutan, seperti damar, getah damar, kayu, kulit pohon, rotan, pala, dan bunga pala, dilaporkan cukup menonjol. Sebagai contoh, untuk komoditas damar, dilaporkan bahwa pada tahun 1910, KPM telah mengekspor sebanyak 1.519 ton damar dengan nilai mencapai 379.750 gulden. Jumlah ini meningkat pada tahun 1915 dan 1920 masing-masing menjadi 995 ton dan 2.053 ton, dengan nilai jual sebesar f 319.200 dan f 780.140. Puncaknya terjadi pada tahun 1925 ketika KPM mengangkut sebanyak 3.112 ton damar yang nilainya mencapai f 964.720. Namun, akibat krisis ekonomi, ekspor damar dari Papua Barat mengalami penurunan pada tahun 1930 menjadi 2.048 ton atau senilai f 464.322, dan terus menurun hingga 1.651 ton pada tahun 1935, dengan nilai jual hanya sebesar f 157.056. Sementara itu, untuk komoditas kayu, KPM melaporkan telah mengangkut total 3.995 ton kayu dari Papua pada tahun tertentu, meskipun nilai jualnya tidak diketahui. Pada tahun 1931, jumlah ini menurun drastis menjadi 1.578 ton dengan nilai jual diperkirakan mencapai f 45.693, dan kembali turun pada tahun 1936 menjadi 1.239 ton dengan nilai f 45.570. Hal ini menunjukkan dampak signifikan dari situasi ekonomi global terhadap perdagangan ekspor hasil hutan dari wilayah Papua.⁵⁶

Selain damar dan kayu, pala dan bunga pala juga menjadi komoditas hasil hutan yang banyak diekspor dari pedalaman Papua Barat. Kedua komoditas ini sebagian besar dikirim ke Pulau Jawa, tetapi juga diekspor ke pasar internasional seperti Amerika Serikat dan Mesir. Pada tahun 1933, W.C. Klein mengungkapkan

56 W.C. Klein, "In- en Uitvoer, Handel en Nijverheid," *Nieuw Guinee*, Deel III, Hoofdstuk XV, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1937), hlm. 619.

Tabel 1.3. Ekspor Kopra dari Papua Barat atau Nugini Belanda, 1910-1936 (dalam ton)

Tahun	Nugini Utara	Nugini Barat	Nugini Selatan	Total Nugini	Nilai dalam Gulden
1910	208	0	1267	1475	250.750
1915	373	0	1231	1604	384.960
1920	578	0	1288	1866	856.120,86
1925	1023	20	1332	2375	688.750
1930	1439	124	2189	3752	484.570,80
1935	762	1068	2792,4	4622,4	257.572,22
1936	995	945	1568	3508	238.890,40

Sumber: W.C. Klein, "In- en Uitvoer, Handel en Nijverheid," hlm. 645.

bahwa ekspor pala dan bunga pala dari Papua mencapai 423 ton dengan total nilai jual sebesar f 47.376. Sampai dengan tahun 1936, total ekspor dan nilainya ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, menjadi 442,5 ton di tahun 1934 dengan nilai jual f 66.375, kemudian 523,5 ton di tahun 1935 dengan nilai f 78.525, dan 502,5 ton di tahun 1936 yang nilainya setara f 124.575.⁵⁷

Kopra menjadi komoditas utama dari sektor pertanian dan perkebunan yang dihasilkan dan diekspor dari wilayah Papua. KPM telah mulai mengangkut kopra dari Papua sejak tahun 1910 untuk diekspor ke Jawa dan Singapura melalui Makassar, dan aktivitas ini terus berlanjut hingga akhir tahun 1930-an. Tabel 1.3 menyajikan data lengkap terkait perdagangan ekspor kopra dari Papua antara tahun 1910 hingga 1936. Dari data tersebut, terlihat jelas bahwa wilayah Papua bagian Selatan merupakan pusat produksi kopra yang paling signifikan di Papua. Secara

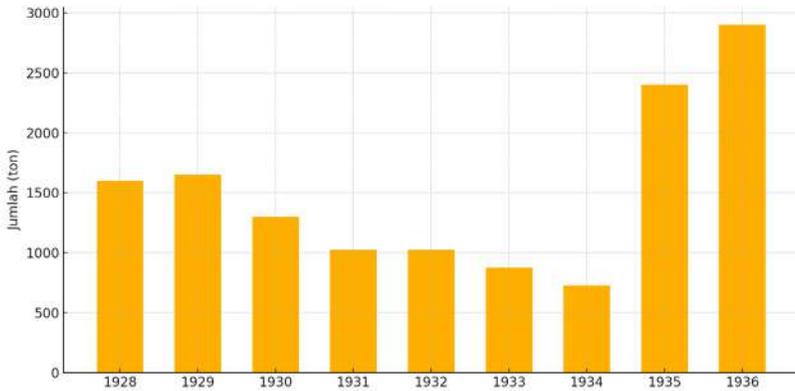
57 W.C. Klein, "In- en Uitvoer, Handel en Nijverheid," hlm. 633.

kuantitatif, volume kopra yang diekspor dari Papua menunjukkan peningkatan yang konsisten. Namun, dari sisi nilai ekonomis, kopra mengalami penurunan sejak tahun 1930. Penurunan ini disebabkan oleh dampak Depresi Ekonomi pada tahun 1930 yang turut memengaruhi harga kopra dari Papua di pasar Hindia Belanda. Sebagai gambaran di tahun 1910, ekspor kopra Papua total mencapai nilai jual sebesar f 250.750. Jumlah ini meningkat menjadi 3.752 ton di tahun 1930 dengan nilai jual setara f 484.570, dan kembali meningkat di tahun 1935 menjadi 4.622 ton tetapi dengan nilai jual yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu f 238.890,40.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, selain hasil hutan, produk tangkapan laut dari perairan Papua juga menjadi komoditas komersial yang signifikan dan diekspor ke pasar regional, nasional, maupun internasional. Salah satu komoditas tersebut adalah cangkang penyu (*schelpen*), yang terus diekspor sejak tahun 1910 hingga akhir 1930-an, meskipun dari segi kuantitas mengalami penurunan bertahap. Laporan KPM mencatat bahwa ekspor cangkang penyu dari Papua pada tahun 1910 mencapai 153 ton, kemudian menurun menjadi 79,5 ton pada tahun 1920, 64,5 ton pada tahun 1925, dan 30 ton pada tahun 1930. Angka tersebut sedikit meningkat pada tahun 1936 menjadi 69 ton. Sayangnya, laporan KPM tidak mencantumkan informasi mengenai nilai ekonomi dari ekspor cangkang penyu tersebut.⁵⁸

Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan ekspor produk-produk komersial dari Papua, para pedagang dan perusahaan perdagangan juga mendatangkan berbagai barang dari luar untuk dijual di wilayah Papua. Salah satu komoditas impor terpenting adalah beras, yang menjadi kebutuhan utama penduduk pendatang dan hanya dapat diproduksi secara terbatas di tanah Papua. Sebagian besar beras tersebut berasal dari Jawa

58 W.C. Klein, "In- en Uitvoer, Handel en Nijverheid," hlm. 665



Grafik 1.1. Jumlah Impor Beras ke Wilayah Papua Barat dari Tahun 1928 hingga 1936

Sumber: Data diolah dari W.C. Klein, "In- en Uitvoer, Handel en Nijverheid," hlm. 665 dan W.C. Klein, *Economische Gegevens Betreffende Nederlandsch Nieuw Guinea*, Uitgegeven door het Nieuw Guinea Comite, April 1934, Den Haag. (Leiden: E. J. Brill, 1934), hlm. 30-31.

dan Sulawesi Selatan, dengan sebagian kecil didatangkan dari Jepang.

Berdasarkan data statistik yang ada, impor beras ke Papua menunjukkan tren penurunan dari 1.608 ton pada tahun 1928 menjadi 732 ton pada tahun 1934, sebelum melonjak menjadi 2.477 ton pada tahun 1935 dan meningkat lagi menjadi 2.840 ton pada tahun berikutnya. Dalam catatannya, W.C. Klein menyebutkan bahwa pelabuhan Merauke dan Digul adalah dua pelabuhan dengan volume impor beras terbesar dibandingkan pelabuhan lainnya. Tampaknya, keberadaan ribuan tahanan politik di Digul berkontribusi signifikan terhadap tingginya permintaan beras di wilayah tersebut. Selain itu, W.C. Klein juga mengungkapkan bahwa selama Depresi Ekonomi pada tahun 1930-an, impor beras sempat menurun drastis, menyebabkan kelangkaan stok beras di pasaran Papua. Kondisi ini mendorong penduduk setempat untuk kembali mengandalkan sagu sebagai pengganti beras.⁵⁹

59 W.C. Klein, "In- en Uitvoer, Handel en Nijverheid," hlm. 680.

Data yang ditampilkan dalam Grafik 1.1 di atas memunculkan pertanyaan penting: siapa sebenarnya konsumen atau pasar utama dari impor beras tersebut? Jelas, konsumen beras tidak sepenuhnya berasal dari penduduk asli Papua, mengingat beras bukan makanan pokok utama mereka. Pertanyaan ini juga terkait dengan isu yang lebih besar, yaitu bagaimana struktur demografis penduduk di wilayah Papua Barat selama berlangsungnya berbagai perkembangan ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya. Tabel 1.3, bersama dengan laporan H.J.T. Bijlmer yang membahas karakteristik penduduk Papua Barat, memberikan gambaran awal untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Walaupun data yang tersedia masih terbatas, informasi tersebut cukup membantu dalam memahami dinamika konsumsi beras di wilayah ini serta kaitannya dengan komposisi penduduk selama periode tersebut.⁶⁰

Secara keseluruhan, Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Bumiputra di Papua pada masa itu masih relatif sedikit. Namun, tidak dijelaskan secara rinci apakah kategori penduduk Bumiputra ini hanya mencakup penduduk asli Papua atau juga termasuk penduduk pendatang dari wilayah lain, seperti Makassar, Bugis, Jawa, Maluku, dan sebagainya. Hal menarik lainnya adalah jumlah penduduk Eropa serta kelompok yang disamakan status hukumnya dengan Eropa, yang pada tahun 1930 sudah cukup signifikan. Penduduk Eropa ini cenderung terkonsentrasi di wilayah utara dibandingkan wilayah selatan dan barat Papua. Sementara itu, kelompok yang disamakan dengan Eropa, seperti orang Jepang, sudah mulai aktif memperluas aktivitas ekonominya di Papua sejak awal abad ke-20, meskipun jumlah pastinya tidak disebutkan dalam data ini.

Data lain yang tak kalah menarik adalah jumlah penduduk Tionghoa, yang mencapai sekitar 1.700 orang. Mirip dengan pola persebaran orang Eropa, sebagian besar penduduk Tionghoa

60 H.J.T. Bijlmer, "Bevolking," *Nieuw Guinee*, Deel I, Hoofdstuk VII, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1935), hlm. 260.

juga terkonsentrasi di wilayah utara Papua, dibandingkan dengan bagian selatan atau barat wilayah tersebut. Terkait peran mereka di Papua, khususnya dalam sektor perdagangan lokal, W.C. Klein menggambarkan para pedagang Tionghoa sebagai “*een zeer belangrijke factor*” (sebuah faktor yang sangat penting), terutama dalam perdagangan ekspor dari pesisir Nugini Belanda ke Makassar. Tampaknya, banyak pedagang Tionghoa tersebut berasal dari Makassar dan tertarik mengadu nasib di wilayah Papua Barat setelah mengetahui potensi ekonomi yang ada, terutama dalam perdagangan komoditi kopra dan barang-barang konsumsi harian. Namun demikian, menurut Klein, keterlibatan pedagang Tionghoa dalam perdagangan komoditi hutan lainnya, seperti rotan dan kulit kayu, masih relatif kecil dibandingkan peran yang dimainkan oleh para pedagang Eropa.⁶¹

Namun demikian, salah satu hal yang mengkhawatirkan para pedagang Eropa dan otoritas kolonial setempat adalah kemampuan luar biasa para pedagang Tionghoa dalam menjalin koneksi perdagangan antara wilayah pesisir dan pedalaman. Hal ini terbukti melalui laporan Asisten Residen Kuik, yang melakukan perjalanan ke daerah Jabi-stam di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Di sana, ia menyaksikan sendiri bagaimana penduduk setempat membeli pakaian dan minyak tanah dari pedagang Tionghoa. Fakta ini menegaskan kegigihan dan ketangguhan para pedagang Tionghoa dalam menghadapi tantangan geografis yang sulit. Oleh karena itu, otoritas kolonial mulai melakukan inventarisasi terhadap jumlah toko milik pedagang Tionghoa. Berdasarkan hasil pendataan tahun 1935, diketahui bahwa di seluruh wilayah Papua bagian Barat terdapat 220 toko milik pedagang Tionghoa, dibandingkan dengan hanya satu toko milik pedagang Jepang. Temuan ini mendorong pihak kolonial untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap

61 W.C. Klein, “In- en Uitvoer, Handel en Nijverheid,” hlm. 700.

aktivitas orang-orang Tionghoa, termasuk dengan menerapkan kebijakan perizinan perjalanan dan pengenaan pajak yang lebih intensif.⁶²

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas perdagangan ekspor dan impor di wilayah Papua bagian Barat mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini, tanpa diragukan lagi, mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Namun demikian, dinamika perekonomian ini hampir sepenuhnya digerakkan oleh para pedagang dan pengusaha Belanda serta Eropa, termasuk kelompok pendatang dari wilayah lain di Nusantara. Sayangnya, keterlibatan penduduk asli Papua dalam proses ini sangatlah minim, sehingga manfaat dari perkembangan ekonomi tersebut hanya dirasakan oleh segelintir pihak. Meskipun secara demografis penduduk asli merupakan kelompok terbesar, mereka tetap berada di pinggiran dari geliat perekonomian yang terjadi di tanah mereka sendiri.

D. Papua (Barat) Selama Perang Pasifik

Jauh sebelum kecamuk Perang Dunia II sampai di wilayah Hindia Belanda, khususnya Papua, para pengusaha Eropa dan pemerintah kolonial setempat sudah merasa khawatir dan curiga terhadap ekspansi perusahaan dan aktivitas pengusaha Jepang di Papua Barat yang berkembang pesat sejak awal 1930-an. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, perusahaan Jepang telah terlibat dalam berbagai sektor ekonomi di wilayah Nugini-Belanda, mulai dari industri mutiara, pelayaran, perdagangan ekspor-impor, hingga kegiatan perkebunan di pedalaman. Kehadiran perusahaan-perusahaan Jepang tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah Hindia Belanda dan otoritas kolonial di Papua Barat. Mereka mencurigai bahwa perusahaan dan

62 W.C. Klein, "In- en Uitvoer, Handel en Nijverheid," hlm. 702.

pengusaha Jepang tidak hanya berfokus pada aktivitas ekonominya tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan informasi strategis tentang potensi alam Papua Barat serta kekuatan pemerintahan sipil dan militer Hindia Belanda di wilayah ini. Pada awal 1940-an, kecurigaan ini semakin menguat. Pemerintah kolonial Belanda mulai melihat kemungkinan bahwa perusahaan dan pengusaha Jepang tersebut dapat membocorkan informasi strategis yang mereka peroleh kepada militer Kekaisaran Jepang, yang diketahui tengah mempersiapkan invasi ke wilayah Pasifik. Hal ini membuat kehadiran Jepang di Papua Barat menjadi ancaman potensial, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga bagi keamanan strategis wilayah kolonial Belanda.⁶³

Pemerintah Hindia Belanda, seperti halnya otoritas kolonial Inggris di India, Singapura, Australia, dan British New Guinea, serta Perancis di Indo-China, telah menangkap sinyal-sinyal politik yang menunjukkan ambisi Jepang untuk melakukan invasi militer di kawasan Asia dan Pasifik, setidaknya sejak akhir 1930-an. Menurut seorang sejarawan militer, pada saat itu Jepang mengalami apa yang disebut sebagai ‘mabuk kemenangan’ atau ‘*victory disease*’, yaitu tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi bahwa kekuatan militer Jepang mampu mengatasi tantangan apa pun dan meraih kemenangan. Kondisi ini dipicu oleh pengalaman transformatif dari kemenangan Jepang dalam Perang Rusia-Jepang (1904-1905), yang menjadi simbol keberhasilan bangsa Asia pertama menundukkan kekuatan besar Barat. Kemenangan tersebut menanamkan rasa percaya diri yang luar biasa di kalangan rakyat Jepang, yang terobsesi membayangkan negaranya sebagai kekuatan besar yang mampu menyaingi, bahkan melampaui,

63 Tentang isu ini lihat Meta Sekar Puji Astuti, *Apakah Mereka Mata-mata: Orang-orang Jepang di Indonesia (1868-1942)*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008). Pemerintah Kolonial Inggris di India dan Papua Nugini juga memiliki kecurigaan dan kekhawatiran yang sama, lihat Max Everest-Phillips, “The Pre-War Fear of Japanese Espionage: Its Impact and Legacy,” *Journal of Contemporary History*, Vol. 42 (2), (2007), hlm. 243-265.

bangsa-bangsa Barat. Meski dihantam oleh berbagai tantangan domestik, seperti gempa bumi besar dan tsunami pada tahun 1923 serta Depresi Ekonomi tahun 1930-an, semangat ekspansif ini tetap didukung oleh mayoritas penduduk Jepang. Mereka memandang visi pemerintah untuk membangun imperium baru di kawasan Asia sebagai sebuah tujuan yang mulia dan layak diperjuangkan.⁶⁴

Bahan-bahan mentah, khususnya minyak bumi, mendorong Jepang untuk menginvasi Manchuria, sebuah provinsi di wilayah Cina, pada September 1931. Tindakan agresif ini memicu kecaman dari Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations), organisasi pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, meskipun mendapat perhatian internasional, Liga Bangsa-Bangsa gagal menjatuhkan sanksi konkret terhadap Jepang. Menurut sejumlah sejarawan, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk memberikan hukuman tegas atas aksi brutal Jepang ini menjadi preseden bagi negara-negara lain untuk melakukan tindakan serupa. Hal ini terlihat ketika Italia menginvasi Abisinia (Ethiopia) pada tahun 1935, diikuti oleh Jerman yang mencaplok Cekoslowakia (1938) dan menyerang Polandia (1939). Tindakan Jerman ini kemudian memicu reaksi dari Uni Soviet, sebagai pemimpin Blok Komunis Internasional, serta Inggris dan Amerika Serikat, sebagai pemimpin Blok Sekutu Demokrasi. Peristiwa ini menjadi awal mula Perang Dunia II, yang membawa dampak besar bagi tatanan global.⁶⁵

64 James Jay Carafano, *Brutal War: Jungle Fighting in Papua New Guinea, 1942*. (London/Colorado: Lynne Rienner Publisher, 2021), hlm 37.

65 Sejak sebelum meletusnya Perang Dunia II, Jepang telah menjalin aliansi militer dengan Jerman dan Italia, yang kemudian dikenal sebagai 'Axis Powers.' Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan Anti-Comintern Pact pada tahun 1937, yang bertujuan menghadapi Uni Soviet dan Komunis Internasional. Selanjutnya, aliansi tersebut diperkuat dengan penandatanganan 'Tripartite Pact' pada September 1940, yang secara eksplisit ditujukan untuk menghadapi blok 'Allied Powers', yang dipimpin oleh Inggris dan Amerika Serikat. Lihat Willem Rummelink (ed.), *The Invasion of the Dutch East Indies*. (Leiden: Leiden University Press – The War History Office of the National Defense College of Japan, 2015), hlm. 1-3.

Invasi Jepang ke kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dipicu oleh berbagai kemelut politik. Salah satunya adalah penandatanganan Anti-Comintern Pact pada tahun 1937, di mana Jepang, Jerman, dan Italia sepakat menjadikan Komunis Internasional, terutama Uni Soviet, sebagai musuh bersama. Selanjutnya, ketiga negara ini kembali menandatangani *Tripartite Pact* pada 27 September 1940, kali ini sepakat menetapkan blok Barat yang dipimpin Inggris dan Amerika Serikat sebagai lawan utama mereka. Namun, pemicu utama invasi Jepang tampaknya adalah penolakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap desakan Jepang untuk memenuhi permintaan impor minyak bumi mereka sejak September 1941. Jepang mengajukan permohonan pembelian minyak sebanyak 3.150.000 hingga 3.800.000 ton, tetapi Batavia, mengikuti anjuran Inggris dan Amerika Serikat, menolak permintaan tersebut. Situasi ini mendorong Jepang untuk mengambil langkah ekstrem dengan melancarkan serangan militer mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawai'i pada 8 Desember 1941. Serangan ini diikuti oleh serangan simultan ke wilayah Malaya, Filipina, dan Hindia Belanda, menandai dimulainya ekspansi militer besar-besaran Jepang di kawasan Asia-Pasifik.⁶⁶

Seperti halnya wilayah Asia Tenggara lainnya, target utama serangan militer Jepang di Hindia Belanda adalah pusat-pusat produksi minyak strategis, seperti Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan, Palembang dan Plaju di Sumatra, serta Jawa bagian timur dan seluruh Jawa yang menjadi pusat administrasi dan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahap awal operasinya, Jepang tampaknya tidak langsung menargetkan Papua bagian Barat. Sebaliknya, fokus serangan diarahkan ke Rabaul, Kepulauan Bismarck, wilayah Nugini Timur yang sebelumnya berada di bawah kendali Inggris sejak Perang Dunia I, dan kemudian Australia sejak 1937. Rabaul dipandang penting oleh Jepang

66 Willem Rimmelinck (ed.), *The Invasion of the Dutch East Indies*, hlm. 4.

karena memiliki fasilitas strategis, termasuk pelabuhan, lapangan terbang, serta potensi eksplorasi minyak. Angkatan Laut Jepang mulai membombardir Rabaul pada 4 Januari 1942 dan berhasil menguasainya pada 23 Januari 1942. Setelah itu, Jepang menjadikan Rabaul sebagai pangkalan militer utama dan markas Angkatan Laut untuk operasinya di Pasifik Selatan. Secara bersamaan, Jepang melancarkan invasi ke Morotai dan Ambon. Jepang baru memasuki wilayah Papua Barat pada 11 April 1942, dengan mendarat di Hollandia (Jayapura), dan kemudian mencapai Manokwari pada 11 Mei 1942. Setelah itu, balatentara Jepang berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Papua, kecuali Merauke dan Boven-Digul. Memasuki pertengahan tahun 1942, Jepang pun telah mencapai ambisi militernya untuk menguasai sebagian besar Asia Tenggara, mulai dari Burma hingga Nieuw Guinea.⁶⁷

Wilayah Papua, bersama dengan pulau-pulau lainnya di kawasan timur Nusantara, seperti Kalimantan, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, Sulawesi, Halmahera, Sulu, Buru, Ambon, dan Seram, berada di bawah kendali penuh Angkatan Laut dan Angkatan Udara Jepang selama masa pendudukan.⁶⁸ Angkatan Laut Jepang menjadikan Jayapura sebagai pangkalan utamanya, sedangkan Angkatan Udara memilih Biak sebagai basis militernya. Di Biak, berbagai infrastruktur strategis, seperti jalan baru, landasan pacu, dan benteng pertahanan, dibangun dengan memanfaatkan tenaga kerja penduduk Papua. Meski demikian, kebijakan administrasi militer Jepang di Papua relatif lebih longgar dibandingkan wilayah lain. Sebagai contoh, kebijakan penyerahan wajib hasil pertanian tidak diberlakukan secara ketat. Bahkan, ketika kebijakan tersebut diterapkan, penduduk lokal

67 Petra Groen, "The War in The Pacific," dalam Peter Post, William H. Frederick, Iris Heidebrink, Shigeru Sato (eds.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War*. (Leiden/Boston: Brill, 2010), hlm. 15.

68 Ooi Keat Gin, "Of 'Permanent Possession': Territories under the Imperial Japanese Navy," dalam Peter Post (eds.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War*. (Leiden/Boston: Brill, 2010), hlm. 71.

sering kali memiliki peluang untuk menghindarinya dan tetap dibiarkan menjalankan kegiatan ekonomi mereka guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶⁹

Namun, di banyak wilayah Papua, penduduk dipaksa bekerja keras sepanjang tahun untuk mendukung kebutuhan perang Jepang. Kondisi di Papua saat itu sangat sulit, diperburuk oleh isolasi yang terjadi akibat blokade yang dilancarkan oleh Sekutu terhadap wilayah tersebut. Blokade ini semakin membatasi akses Papua ke dunia luar dan memperburuk situasi ekonomi dan sosial di daerah tersebut.⁷⁰ Seperti halnya di wilayah-wilayah pendudukan lain di Hindia Belanda, penguasa militer Jepang juga melakukan berbagai aksi brutal dan kekejaman terhadap penduduk Eropa maupun penduduk lokal di Papua.⁷¹ Selain memenjarakan penduduk Eropa di kamp interniran, tentara Jepang juga dilaporkan menutup gereja-gereja Katolik maupun Protestan yang sebelumnya dikelola oleh gerakan zending dan misi. Kebijakan ini memicu kebangkitan kembali gerakan-gerakan keagamaan sinkretis bernuansa mesianistik di Papua. Salah satunya adalah gerakan Koreri di Biak dan wilayah sekitarnya di Papua bagian utara, yang pernah muncul pada akhir tahun 1930-an dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa kolonial Belanda. Gerakan ini dipimpin oleh Stefanus Simopjaref, yang sebelumnya dihukum penjara oleh otoritas kolonial Belanda atas tuduhan pembunuhan, namun kemudian dibebaskan oleh Jepang saat menduduki Manokwari.⁷²

69 Shigeru Sato, "Relocation of Labor and the Romusha Issue," dalam Peter Post (eds.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War*. (Leiden/Boston: Brill, 2010), hlm. 259.

70 Jan Boelaars, *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 163.

71 Hiromitsu Iwamoto, "The Pacific War in Relation to Japanese Settlers in Papua and New Guinea," *South Pacific Study*, Vol. 17, No. 2, (1997), hlm. 304.

72 Studi mendalam dan komprehensif tentang 'Gerakan Koreri' tersebut, bisa ditemukan dalam karya Freerk Ch. Kamma, *Koreri: Messianic Movement in the Biak-Numfor Culture Area*. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1972).

Setelah dibebaskan, Stefanus menghidupkan kembali gerakan Koreri di Biak bersama Angganitha Menufaur, seorang perempuan karismatik yang diangkat sebagai pemimpin. Gerakan ini menobatkan Angganitha sebagai “Ratu Papua” dan membentuk pasukan bernama AB (*Amerika-Blanda*) yang pada Juli 1942 menyatakan perang terhadap kekuasaan militer Jepang. Jepang menganggap gerakan ini sebagai ancaman serius dan mengambil tindakan tegas untuk mencegah perkembangannya. Mereka menangkap Stefanus, Angganitha, beserta para pengikutnya, lalu mengeksekusi mereka pada Agustus 1942.

Meskipun kedua pemimpin tersebut telah dieksekusi, para pengikut gerakan Koreri tetap melanjutkan perjuangan mereka, bahkan menyebar ke daerah-daerah lainnya. Tentara Jepang berusaha menumpas gerakan ini, namun mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan AB. Pada Oktober 1943, tentara Jepang menghancurkan pemukiman para pengikut Koreri, memenggal ratusan orang, dan memaksa pengikut yang tersisa, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak, untuk menjalani kerja paksa yang berat.⁷³

Secara keseluruhan, kekuasaan tentara Jepang di Papua tidak bertahan lama dan mulai mengalami kemunduran sejak pertengahan tahun 1942. Tentara Sekutu berhasil mengalahkan pasukan Jepang di Teluk Milne dan Kokoda Trail, memaksa mereka mundur dari Morobe hingga West Sepik, serta merebut Manus dan Rabaul. Jepang tidak mampu melancarkan serangan balasan karena minimnya logistik, meskipun mereka memiliki benteng pertahanan yang kuat di Rabaul. Dalam pertempuran ini, tentara Jepang kehilangan sekitar 60.000 pasukan yang tewas di medan perang dan 110.000 lainnya meninggal akibat kelaparan. Di sisi

73 Karel Steenbrink, “Christianity,” dalam Peter Post (eds.), *The Encyclopedia of Indonesia*, hlm. 316; Carmel Budiarto & Liem Soei Liong, *West Papua, the Obliteration of a People*, 3rd edition. (London: TAPOL, the Indonesian Human Rights Campaign, 1988), hlm. 6-7.

lain, pihak Sekutu, terutama Australia, mencatat sekitar 14.500 anggotanya menjadi korban dalam peperangan tersebut.⁷⁴

Sementara itu, Tentara Sekutu, yang dipimpin oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan Australia di bawah komando Jenderal MacArthur, mulai mendarat di wilayah Papua pada akhir tahun 1943. Mereka bergerak menyusir perbatasan dan berhasil merebut Jayapura dari tangan Jepang pada April 1944, diikuti dengan merebut Biak dan Numfor pada Juli, serta Morotai pada September di tahun yang sama. Dalam operasi militer tersebut, kontribusi tentara Belanda, khususnya NICA (Netherlands Indies Civil Administration), dilaporkan sangat terbatas. Mereka hanya mengirimkan detasemen kecil dan satu skuadron tempur yang terdiri dari 160 tentara. Selain itu, NICA juga mengorganisir sebuah batalyon yang beranggotakan sekitar 1.000 orang Papua untuk membantu 'operasi pembersihan' di wilayah tersebut.⁷⁵

Kemenangan Tentara Sekutu tersebut secara efektif mengakhiri kekuasaan militer Jepang di Papua, seperti halnya di wilayah lain di Nusantara. Selanjutnya, Sekutu melaksanakan sejumlah langkah penting, termasuk demobilisasi tentara Jepang, pembebasan para tahanan perang dari kamp-kamp konsentrasi, investigasi kejahatan perang yang dilakukan tentara Jepang selama masa pendudukan, serta penyelenggaraan pengadilan militer (*tribunal court*) di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Jayapura.

Pengadilan tersebut didukung oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang telah menerima kembali mandat dari Sekutu untuk menjalankan administrasi pemerintahan di Papua. Proses pengadilan kejahatan perang yang melibatkan tentara Jepang tersebut dimulai secara serentak pada Agustus 1946 dan berakhir pada 24 Desember 1949. Sebagian besar kasus yang diadili di

74 Hiromitsu Iwamoto, "The Pacific War," hlm. 305.

75 Petra Groen, "The War in the Pacific," dalam Peter Post (eds.), *The Encyclopedia of Indonesia*, hlm. 17.

Pengadilan Militer Jayapura berkaitan dengan kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap 637 pemuda Indonesia anggota Heiho, yang ditugaskan di wilayah Sarmi. Dari jumlah tersebut, 480 orang dilaporkan tewas, sementara 91 orang berhasil melarikan diri. Secara keseluruhan, Pemerintah Belanda di Indonesia mengadili 448 kasus kejahatan perang dengan jumlah terdakwa mencapai 1.038 tentara Jepang. Dari total tersebut, sebanyak 236 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, 28 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, 705 orang menerima hukuman penjara dengan durasi yang beragam, 55 orang dinyatakan tidak bersalah, dan 14 orang dijatuhi hukuman ringan.⁷⁶

Dengan demikian, penjajahan Jepang di Papua berakhir lebih awal dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, di mana kekuasaan Jepang baru benar-benar berakhir pada pertengahan Agustus 1945, setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah berhasil mengalahkan tentara Jepang, Tentara Sekutu menyerahkan otoritas atas Papua kepada Belanda pada akhir 1944. Hal ini menyebabkan Papua berada di bawah kendali NICA lebih awal dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Kondisi ini berlangsung tanpa adanya perlawanan dari pihak Republik Indonesia, yang baru memproklamasikan kemerdekaannya pada Agustus 1945.

Kondisi ini tentu menjadi keuntungan bagi Belanda, karena mereka memiliki keleluasaan untuk merestorasi posisi politik dan administrasi kolonialnya di Papua, termasuk dalam memetakan potensi ekonomi wilayah ini untuk kepentingan jangka panjang pascaperang. Sebuah sumber mengungkapkan bahwa ketika Tentara Sekutu mendarat di Papua pada April 1944, mereka membawa serta tim ahli geologi yang ditugaskan untuk mengevaluasi temuan-temuan dari masa sebelum perang sekaligus

76 Aiko Utsumi, "Local Military Tribunal," dalam Peter Post (eds.), *The Encyclopedia of Indonesia*, hlm. 409-410.

melakukan eksplorasi baru. Hasil eksplorasi tersebut tidak sepenuhnya dipublikasikan, namun beberapa di antaranya tersedia di perpustakaan. Temuan tersebut mencakup deposit nikel, kobalt, dan kromit dalam jumlah besar di Pegunungan Cycloop, daerah Kepala Burung, dan Pulau Gag. Selain itu, di Gunung Cartenz atau Puncak Jaya ditemukan deposit tembaga dalam jumlah besar dengan kandungan emas yang tinggi, sementara di kawasan Kepala Burung juga ditemukan minyak bumi berkualitas tinggi.⁷⁷

Hasil eksplorasi tersebut sebagian besar mengkonfirmasi dan memperkuat temuan survei geologis yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebelum Perang Dunia II meletus. Besar kemungkinan, potensi sumber daya alam yang melimpah di Papua menjadi alasan utama Pemerintah Belanda bersikeras mempertahankan klaim atas wilayah tersebut. Hal ini terbukti dengan keputusan mereka untuk mengecualikan Papua dari penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir 1949.

Selama masa ketidakpastian status Papua, Belanda aktif mencari dukungan internasional sambil memperkuat pengaruh politik dan ekonominya di wilayah tersebut. Berbagai langkah dilakukan, termasuk menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan Belanda dan Eropa yang sebelumnya beroperasi di Papua, membangun infrastruktur, mengedarkan uang NICA, serta membuka kembali gereja, sekolah, dan lembaga sosial lainnya. Upaya ini menunjukkan tekad Belanda untuk mempertahankan kendali atas Papua sekaligus memanfaatkan potensi ekonominya.

Di sisi lain, Pemerintah Republik Indonesia menyadari strategi terselubung Belanda untuk terus menguasai Papua. Oleh karena

77 Carmel Budiardjo & Liem Soei Liong, *West Papua, the Obliteration of a People*, hlm. 6-7. Semua potensi alam tersebut nantinya akan digali dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan dengan melibatkan Amerika Serikat, termasuk Freeport McMoRan.

itu, Indonesia tidak tinggal diam dan mengambil berbagai langkah untuk mematahkan klaim Belanda atas wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan mencakup jalur politik diplomasi melalui lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), operasi militer, serta kebijakan politik dan ekonomi.

Salah satu langkah strategis yang menonjol adalah pendirian lima kantor cabang Bank Indonesia sebagai perwakilan bank sentral, yang juga menjadi simbol kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya di Papua. Bagaimana kebijakan politik dan ekonomi tersebut dijalankan, khususnya sejak paruh kedua tahun 1950-an, akan dibahas secara mendalam dalam bab-bab berikutnya. §

Gerakan Mesianis ‘Koreri’ dan Angganitha

Adalah gerakan rakyat beranuansa ideologi mesianistik yang embrionya mulai muncul sejak pertengahan abad ke-19 di wilayah Biak-Numfor. Seiring menguatnya pengaruh zending, gerakan ini menyerap unsur-unsur ajaran kristiani dan muncul secara sporadis di sepanjang periode kolonial di wilayah Biak-Numfor dan sekitarnya. Gerakan ini meyakini akan kembalinya Manseren Mangundi, tokoh pemimpin lokal yang diyakini memiliki kharisma dan kekuatan, untuk membebaskan penduduk Biak dari kesengsaraan dan mengembalikan mereka ke kehidupan yang makmur dan sejahtera. Manseren Mangundi memiliki sejumlah gelar, salah satunya adalah Manseren Koreri (*Raja Koreri*), yang kemudian dijadikan sebagai identitas dari gerakan mesianistik ini.

Menurut Freerk Kamma (1972), laporan paling awal tentang gerakan ini tercatat pada tahun 1855 di Numfor, di mana penduduk setempat melakukan pembangkangan dan pembe-

rontakan terhadap kewajiban penyerahan wajib kepada Kesultanan Tidore. Sejak peristiwa tersebut, tercatat di sepanjang abad ke-19 bahkan hingga akhir periode kolonial gerakan serupa muncul secara sporadis di berbagai wilayah Numfor dan Kepulauan Burung, di mana beberapa di antaranya menyerupai gerakan Ratu Adil di pulau Jawa.

Di sekitar tahun 1938, gerakan Koreri menunjukkan karakteristik yang berbeda ketika Angganitha Menufaur muncul menjadi sosok pemimpin baru. Dilahirkan sekitar tahun 1905 dan dibaptis tahun 1932, Angganitha awalnya merupakan perempuan biasa, namun kemudian menjelma menjadi sosok yang diyakini memiliki kekuatan mistik dan spiritual yang bisa menyembuhkan orang sakit. Kisahnya berawal ketika dia kehilangan suami dan anaknya dalam perjalanan ke kepulauan Raja Ampat. Didera kesedihan mendalam dia jatuh sakit, terkena beri-beri dan penyakit kulit, yang tak kunjung sembuh. Kondisi itu membuat-

nya dikucilkan di sebuah pulau terpencil, di mana dia harus hidup sendiri dan hanya sesekali dikunjungi anaknya untuk mengantar makan. Suatu ketika dia dikunjungi lelaki asing, yang mengobati dan mengajarnya berbagai ilmu kesaktian. Singkat cerita, dia benar-benar sembuh dan kembali ke keluarga besarnya di Biak.

Kedatangan kembali Angganitha dalam kondisi sehat membuat penduduk setempat geger; terlebih ketika dia menunjukkan kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Penduduk setempat meyakini bahwa laki-laki yang mengunjungi Angganitha adalah *Manar-makeri*, figur legendaris, yang kemudian mewariskan kekuatannya kepada Angganitha. Menyaksikan kemampuan Angganitha itu, penduduk setempat kemudian memberinya gelar *Nona Mas ro Judea* (Perempuan Emas Judea). Berita tentang kesaktian Angganitha pun dengan cepat menyebar ke pulau-pulau lain di sekitar Biak, Raja Ampat dan kepala Burung. Kondisi itu, mengkhawatirkan pemerintah kolonial setempat, tetapi juga para Misionaris yang melihat Angganitha telah menyebarkan ajaran kristiani yang sesat. Ang-

ganitha pun kemudian ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial hingga kedatangan tentara Jepang.

Setelah dibebaskan, bersama dengan Stefanus Simopjaref, yang juga dipenjarakan oleh otoritas kolonial Belanda atas tuduhan pembunuhan, Angganitha menghidupkan kembali gerakan koreri. Mereka membentuk pasukan bernama AB (*Amerika-Blanda*) yang pada Juli 1942 menyatakan perang terhadap kekuasaan militer Jepang. Akibatnya, tentara Jepang menangkap mereka berdua beserta dengan para pengikutnya dan kemudian mengeksekusinya pada Agustus 1942.

Namun demikian, meskipun Angganitha dan Stefanus telah dieksekusi, para pengikutnya terus bertambah dan tetap melanjutkan perjuangan mereka. Tentara Jepang berusaha menumpas gerakan Koreri ini, namun mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan AB. Pada Oktober 1943, tentara Jepang menghancurkan permukiman para pengikut Koreri, memenggal ratusan orang, dan memaksa pengikut yang tersisa, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak, untuk menjalani kerja paksa yang berat.

SCHETSKAART
VAN
NEDERLANDS-
NIEUW-GUINEA
Schaal 1:250 000

BENAMING VAN DE BESTUURSDEELSTUKEN

1. AFDEELING HOLLANDIA	HOOFDPLAATS	HOLLANDIA
Onderafdeling Hollandia	---	Hollandia
---	---	Serui
---	---	Saruni
---	---	Oelabiki
---	---	Biak
2. AFDEELING GEELVINK-BAAI		
Onderafdeling Soekamo-Bladen	---	Bias
---	---	Sagap-Wahpeni
		Merauke
3. AFDEELING ZUID-NIEUW-GUINEA		
Onderafdeling Merauke	---	Merauke
---	---	Kes
---	---	Tetabuarah
---	---	Apili
---	---	Wadigwata
4. AFDEELING CENTRAAL BERGLAND		Hollandia (TUWUK)
Onderafdeling Paniai	---	Enawethi
---	---	Waghu
---	---	Wotene
Exploratorium Waduk Bergland	---	
---	---	Bladen Oelabiki
---	---	Banden en Soekamo
---	---	Bandab in West-Balen
---	---	Banduk Bergland
5. AFDEELING FAKFAK		FAKFAK
Onderafdeling FAKFAK	---	Fakfak
---	---	Katiana
---	---	Kakapa
---	---	Makimaki
6. AFDEELING WEST-NIEUW-GUINEA		
Onderafdeling Masiwani	---	Masiwani
---	---	Sarung
---	---	Tafel-Besat
---	---	Ternakabanan
---	---	Witoban
---	---	Paniki

LEGENDA

- Afdeeling hoofdstad (hoofdonderafdeling hoofdstad)
- Onderafdeling hoofdstad
- Afdeeling

Aangepaste de kadasteraartstelling na de overname van het District van de Gouverneur van Nieuw-Guinea van de D. Oorlog van 28 December 1961 na 01.1.1962
1 Januari 1962 (G.B. 1961/598)

Gambar 1.6. Peta administratif Papua Barat (1962) yang menggambarkan pembagian Papua oleh Belanda ke dalam enam wilayah: Hollandia, Geelvink-Baai, Zuid Nieuw-Guinea, Centraal Bergland, Fakfak, dan West Nieuw-Guinea. Garis putus-putus merupakan batas antar afdeeling.

Sumber: *Inventaris van Kaarten en Tekeningen Behorende tot het Archief van het Ministerie van Koloniën en Rechtsopvolgers, (1702) 1814-1963.* https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.MIKO/invnr/6539/file/NL-HaNA_4.MIKO_6539

BAB II

DARI DIPLOMASI HINGGA KONFRONTASI: PERKEMBANGAN POLITIK DI PAPUA, 1945 – 1960-AN

Setelah Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tugas besar langsung menanti mereka, bersama dengan para pemimpin lainnya, untuk menentukan arah perjalanan negara-bangsa ini. Dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berlangsung pada 19 Agustus 1945, diputuskan bahwa wilayah Indonesia secara administratif dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Papua, yang saat itu dikenal sebagai Irian Barat, dimasukkan ke dalam Provinsi Maluku dengan J. Latuharhary sebagai gubernur pertamanya. Namun, situasi Papua yang masih berada di bawah kendali Belanda membuat pemerintah Republik Indonesia belum

dapat menempatkan pejabatnya di wilayah tersebut. Meskipun demikian, berita tentang kemerdekaan Indonesia dipastikan telah tersebar luas di sana, terutama di kalangan penduduk yang mendukung Republik Indonesia.

Bab ini membahas tentang perkembangan politik yang terkait dengan Papua maupun yang terjadi di Papua. Pembahasan difokuskan pada periode pasca berakhirnya konflik bersenjata yang dimulai sejak akhir 1945 antara Republik Indonesia dengan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*), negara baru yang diproyeksikan Belanda sebagai penerus Hindia Belanda sejak April 1944, hingga tahun 1960-an ketika nasib Papua dalam penandatanganan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di akhir tahun 1949.

A. Silang Sengkarut Klaim Politik Atas Papua

Dalam pidato perdananya setelah ditetapkan sebagai presiden pada 23 Agustus 1945, disampaikan di depan peserta rapat PPKI, Soekarno menyebut 'Merauke' sebagai bagian dari Indonesia. Dalam pidato tersebut, Bung Karno menyapa seluruh bangsa Indonesia, dengan ungkapan sebagai berikut: "Bangsaku sekalian! Di Sumatera, di Djawa, di Borneo, Sulawesi, Kepulauan Sunda Ketjil, Maluku, dari Atjeh sampai ke Merauke!" Dari petikan tersebut, tersirat gagasan Bung Karno bahwasanya 'Merauke' yang merepresentasikan wilayah Papua sebagai bagian dari Bangsa Indonesia. Besar kemungkinan, dari pidato inilah slogan "dari Sabang sampai Merauke" lahir dan menjadi semboyan perjuangan untuk mewujudkan persatuan wilayah Indonesia.¹

Proyeksi kebangsaan Bung Karno tersebut menjadi sangat penting, karena secara politis, status wilayah Papua menjadi

1 Osman Raliby, *Documenta Historica: Sedjarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Bulan-Bintang, 1953), hlm. 17.



Gambar 2.1. Konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946.

Sumber: Fotocollectie Anefo. <http://hdl.handle.net/10648/a8a2b25e-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

sumber sengketa, dan tarik-ulur yang terus berlanjut antara pihak Belanda dan Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, kedua belah pihak sama-sama mengklaim memiliki hak atas wilayah ini dan berupaya memperjuangkan penyatuannya ke dalam wilayahnya masing-masing. Dalam sejumlah perundingan yang diadakan, pembahasan mengenai posisi Papua seringkali disematkan sebagai salah satu topik pembicaraan. Pada 1-12 Oktober 1946 misalnya, sebuah konferensi digelar di Pangkal Pinang untuk membahas kedudukan kaum minoritas dalam susunan ketatanegaraan Indonesia.² Dalam konferensi tersebut, sempat muncul usulan dari

2 Konferensi ini dihadiri oleh para perwakilan golongan minoritas, mulai dari peranakan Tionghoa, peranakan Arab, hingga Belanda (termasuk Indo-Belanda). Konferensi ini juga dihadiri oleh Lord Killearn (Inggris) dan Sutan Sjahrir yang mewakili delegasi Indonesia.

kaum Indo-Eropa untuk menjadikan Papua Barat sebagai wilayah pemukiman baru bagi mereka yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Namun, usulan ini pada akhirnya tidak pernah dibahas lebih lanjut.

Status Papua juga dibicarakan dalam Konferensi Denpasar yang diselenggarakan pada 18-24 Desember 1924. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Malino dan Konferensi Pangkal Pinang, yang secara khusus dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia Timur. Setidaknya 70 orang peserta menghadiri konferensi Denpasar ini, termasuk di dalamnya 15 orang perwakilan golongan minoritas yang sebelumnya diangkat oleh Van Mook. Meskipun salah satu isu yang dibahas dalam konferensi ini berkaitan dengan Papua, tidak ada satu pun perwakilan dari Papua yang diundang untuk hadir. Dalam kesempatan ini, H.J. Van Mook sebagai perwakilan Belanda mengusulkan agar status Karesidenan Nieuw Guinea ditentukan sendiri oleh penduduk setempat melalui mekanisme yang lebih inklusif.³ Namun usulan itu ditolak oleh para peserta konferensi dengan argumen bahwa wilayah Papua sudah sejak lama menjalin hubungan dengan Kesultanan Ternate dan Tidore.

Isu mengenai nasib Papua kembali mencuat dalam proses negosiasi pengakuan kedaulatan oleh Belanda terhadap Indonesia di KMB. Perundingan yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 ini tidak menghasilkan kesepakatan terkait penyelesaian status Papua dan menundanya untuk dibahas dalam pertemuan khusus yang akan diselenggarakan berikutnya.

Meski demikian, KMB menyepakati beberapa poin lainnya, termasuk masalah utang-piutang negara Hindia Belanda. Terkait poin ini, Pemerintah Belanda mengajukan syarat agar pemerintah

3 Sebagai catatan, pada 15 Juli 1946, pemerintah Belanda menjadikan wilayah Papua sebagai sebuah karesidenan. Penetapan ini mencerminkan strategi Belanda untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan itu, terutama di tengah menguatnya klaim Indonesia terhadap wilayah tersebut.



Gambar 2.2. Suasana Konferensi Denpasar di Bali Hotel, Denpasar.

Sumber: Fotocollectie Elsevier. <http://hdl.handle.net/10648/add3cdd0-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

Indonesia menanggung seluruh utang pemerintah kolonial Belanda sebagai kompensasi atas pengakuan kedaulatan yang akan diberikan. Jumlah utang tersebut mencapai 6,5 miliar gulden, yang mencakup pembiayaan dua agresi militer yang dilakukan Belanda pada 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Selain itu, Belanda juga berupaya mengikat Indonesia dalam sebuah sistem Uni Indonesia-Belanda yang ketat di bawah pimpinan Ratu Juliana. Sebaliknya, delegasi Indonesia menginginkan sistem uni yang lebih longgar dengan ikatan yang seminimal mungkin.⁴

Adapun terkait urusan Papua, pada 26 Oktober 1949, *steering committee* KMB kembali mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan poin-poin perbedaan antara kedua pihak. Beberapa media memprediksi bahwa pertemuan ini akan berlangsung alot

4 Agus Setiawan (eds.), *Konferensi Meja Bundar: Jalan Menuju Terbentuknya Bank Sentral Republik Indonesia*. (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2023), hlm. 173.

dan berpotensi menemui jalan buntu. Prediksi tersebut terbukti benar, sebab setelah berlangsung selama dua hari, pertemuan tersebut gagal mencapai kesepakatan terkait persoalan Papua. Belanda mengajukan berbagai argumen, termasuk alasan etnologis, dengan menyatakan bahwa penduduk Papua tidak termasuk bagian dari Indonesia. Sangat jelas terlihat bahwa Belanda memiliki hasrat yang besar untuk tetap menguasai Papua, wilayah yang dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Hingga dua hari berselang, belum ditemukan kata sepakat mengenai klaim atas Papua. Masing-masing pihak tetap bersikukuh mempertahankan pandangan dan klaimnya. *Deadlock* ini akhirnya menghasilkan solusi sementara berupa penangguhan status Papua, yang akan dirundingkan kembali satu tahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda.

KMB, yang berlangsung alot selama lebih dari dua bulan pun akhirnya menghasilkan lima poin penting kesepakatan antara Indonesia dan Belanda, yaitu:

1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat.
2. Status Karesidenan Papua akan diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.
3. Sebuah Uni Indonesia-Belanda akan dibentuk berdasarkan kerja sama yang bersifat sukarela dan setara.
4. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru kepada perusahaan-perusahaan Belanda.
5. RIS bersedia membayar semua utang Belanda yang terhitung sejak tahun 1942.

Pada intinya, KMB gagal menghasilkan kesepakatan final terkait Papua, dan karenanya kedua belah pihak melakukan berbagai upaya, baik secara terbuka maupun terselubung untuk memperkuat klaimnya atas Papua. Kondisi ini menyebabkan Papua

menjadi ‘duri dalam daging’ dalam hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda, dan menjadi sumber konflik antara kedua belah pihak pasca penandatanganan KMB.

Sebagai contoh Pemerintah Belanda mengambil langkah politik ofensif terkait Papua pada 18 Desember 1949, yaitu dengan mengubah status “Karesidenan Nieuw Guinea” menjadi “Gubernemen Nederlands Nieuw Guinea (NNG).” Dengan perubahan status tersebut, Belanda menegaskan bahwa Papua berada langsung di bawah kendali pemerintahan pusat Belanda, bukan lagi sekadar bagian dari struktur administratif Hindia Belanda.

Kira-kira seminggu setelah perubahan status tersebut, Jan Pieter Karel van Eechoud, yang menjabat sebagai pejabat Gubernur Nugini Belanda (1949–1950), mengumumkan bahwa pemerintahan NNG akan dijalankan atas nama Ratu Belanda. Tidak berhenti di situ, pada Januari 1950, Pemerintah Belanda mengangkat Stephan Lucien Joseph van Waardenburg sebagai Gubernur NNG. Ia memegang jabatan tersebut selama lebih dari tiga tahun sebelum digantikan oleh J.A. van Baal pada 1 April 1953.⁵

Jadi, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, Belanda telah membuat serangkaian keputusan administratif terkait Papua, yang jelas memicu kecurigaan dan kemarahan di kalangan pejabat Republik Indonesia.

Sebagai contoh, pada awal Desember 1950, dalam sebuah sidang parlemen terbuka, Sukiman, yang menjabat sebagai Ketua Misi Parlemen untuk Irian Barat, menyampaikan pandangannya dengan tegas. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa persoalan Papua tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Masalah ini tidak hanya menyangkut integrasi wilayah, tetapi juga citra Indonesia di kancah internasional. Ia juga mengingatkan bahwa terdapat berbagai kepentingan strategis yang harus dipertimbangkan secara

5 Rosmaida Sinaga, *Masa Kuasa Belanda di Papua, 1898-1962*. (Depok: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 318.



Gambar 2.3. S.J.L. van Waardenburg, Gubernur Nieuw Guinea (1950-53).

Sumber: Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea. <http://hdl.handle.net/10648/25b44856-4673-da0e-8359-289b4fc17219>

matang. Sukiman menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini memerlukan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia:

“...bersatunya seluruh rakyat Indonesia dalam menuntut Irian Barat sebagai *claim* nasional yang dipegang teguh oleh delegasi Indonesia adalah memberi *backing* yang sentosa kepada delegasi.”⁶

Sukiman juga menyoroti bahwa masyarakat di Belanda sendiri cenderung terpecah dalam menyikapi persoalan Papua. Ketegangan internal ini semakin meningkat setelah J.H. van Maarseveen, Menteri Negara Urusan Kolonial, secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah Belanda tidak akan menyerahkan Papua kepada Indonesia. Situasi di Belanda semakin memanas dengan beredarnya rumor bahwa Indonesia berencana menggunakan kekerasan jika Papua tidak segera diserahkan. Rumor tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerugian, baik dalam bentuk harta maupun nyawa, yang dapat dialami pihak Belanda.⁷ Ketegangan ini tidak hanya memperumit hubungan diplomatik antara kedua negara tetapi juga menciptakan dinamika politik yang memengaruhi kebijakan Pemerintah Belanda terkait Papua.

Sebagai catatan, tidak semua politisi di Belanda memiliki pandangan yang sejalan dengan keputusan pemerintah terkait persoalan Papua. Dalam perdebatan yang berlangsung pada 30 November 1951 di parlemen Belanda, Paul de Groot, yang mewakili Partai Komunis Belanda, secara tegas mendesak agar Papua segera dikembalikan kepada Republik Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa kaum komunis di Belanda akan berjuang bersama rakyat Indonesia untuk merealisasikan tujuan tersebut.⁸

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Prof. Supomo,

6 “Soal Irian Tak Mudah,” *Java Post*, 6 Desember 1950.

7 “Soal Irian Tak Mudah,” *Java Post*, 6 Desember 1950.

8 “Supomo Harap Goodwill Indonesia Disambut Baik,” *Sin Po*, 4 Desember 1951.

sebagai menteri kehakiman Republik Indonesia saat itu, dalam keterangannya kepada Kantor Berita ANETA (*Algemeen Nieuws- en Telegraaf- Agentschap*) menyampaikan bahwa salah satu poin dari Piagam Penyerahan Kedaulatan di KMB adalah kewajiban Belanda untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Berdasarkan hal tersebut, Prof. Supomo menilai bahwa kekuasaan Belanda atas Papua setelah Desember 1950 adalah *onrechtmatig* atau melanggar hukum.⁹

Pihak Belanda tampaknya mengabaikan perjanjian yang telah disepakati dengan terus berupaya memperkuat pengaruhnya di Papua, baik dari segi politik maupun ekonomi. Pada awal Mei 1951, misalnya, pemerintah Belanda menyetujui pencairan pinjaman sebesar 24 juta gulden yang digunakan untuk membangun infrastruktur secara masif di Papua. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas, mulai dari perumahan, perkantoran, rumah sakit, hingga infrastruktur transportasi seperti bandara dan pelabuhan. Pembangunan difokuskan pada kota-kota utama, seperti Hollandia, Sorong, Biak, dan Merauke, yang dirancang untuk memperkuat kehadiran Belanda di wilayah tersebut.¹⁰

Ketika Kabinet Sukiman dibentuk pada 27 April 1951, isu Papua menjadi salah satu perhatian utama. Selain mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil KMB dan meniadakan perjanjian yang dianggap merugikan negara, Kabinet Sukiman juga berjanji untuk “memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia setjepat-tjepatnja.”¹¹ Pernyataan yang menegaskan bahwa persoalan ini memiliki urgensi tinggi dalam agenda nasional Kabinet Sukiman.

Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Penerangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia

9 “Soal Irian,” *Sin Po*, 17 April 1951.

10 “24 Djuta untuk Irian Barat,” *Sin Po*, 9 Mei 1951.

11 “Kabinet Terlahir Djuga,” *Sin Po*, 27 April 1951.

memiliki hak untuk menggunakan segala upaya yang sah, baik melalui jalur nasional maupun internasional, guna memasukkan Papua ke dalam wilayah kekuasaan Indonesia.¹² Cara-cara inilah yang kemudian dikedepankan pihak Indonesia dalam bernegosiasi dengan Belanda.

B. Papua sebagai Isu Politik Nasional

Dalam proses perjuangan mengintegrasikan Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia, kota-kota di Indonesia Timur turut memainkan peran vital. Makassar, misalnya, tidak hanya menjadi pusat kedudukan ‘Badan Perdjuangan Irian’¹³ untuk seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi tempat penerbitan majalah *Suara Irian*. Sebagai catatan, majalah ini diasuh oleh Latumahina, Ketua Pusat Badan Perdjuangan Irian, yang juga menjabat sebagai pimpinan redaksi. Sebelumnya, *Suara Irian* sempat diterbitkan di Jakarta dan Yogyakarta sebelum akhirnya berpusat di Makassar. Dalam salah satu wawancaranya dengan *Sin Po*, Latumahina pernah menyatakan: “Adalah suatu keheranan, bahwa dalam memperdjuangkan Irian Barat, rakjat Indonesia dapat besatu-padu, walaupun di Indonesia sekarang ini terdapat berbagai ideologie dan aliran-aliran.”¹⁴

Selain Makassar, Maluku juga memainkan peran penting dalam perjuangan pengintegrasian Papua. Pada awal Juni 1951, sempat diadakan rapat akbar yang bertujuan mengakomodasi seluruh Badan Perdjuangan Irian. Dalam rapat tersebut, dibentuk sebuah komisariat Badan Perdjuangan Irian yang berpusat di

12 “Irian dalam Lemari Es Belanda: Indonesia Pertahankan Claim Nasionalnja, Irian Masuk RI,” *Sin Po*, 27 Februari 1951.

13 Salah satu organisasi yang dibentuk pada bulan Oktober 1949 oleh beberapa tokoh Papua, di antaranya Silas Papare, sebagai wadah komunikasi dan aktivitas politik untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia mengintegrasikan Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Republik Indonesia. *25 Tahun Trikora* (Jakarta: Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, 1988).

14 “Irian Barat Diperdjuangkan Terus,” *Sin Po*, 12 Juni 1951.

Ternate, Maluku Utara. Komisariat ini diproyeksikan sebagai pusat koordinasi untuk membawahi puluhan konsulat Badan Perjuangan Irian lainnya yang tersebar di wilayah Maluku. Langkah ini menunjukkan strategi yang terorganisasi untuk memperkuat perjuangan melalui struktur kelembagaan yang terpusat di kawasan Indonesia Timur.

Silas Papare, salah satu tokoh kunci dalam Badan Perjuangan Irian, menyampaikan rasa optimisnya di hadapan para wartawan *Sin Po* bahwa Papua pasti akan kembali ke pangkuan Indonesia. Namun, ia juga menyoroti kurangnya perhatian dari organisasi-organisasi dan partai-partai politik di Indonesia terhadap isu penting ini. “Benar sekarang giliran Belanda untuk mengemukakan sikapnja, tetapi hal ini djanganlah hendaknja mendjadi sebab untuk mengurangi *activiteit* kita dalam usaha mengembalikan Irian Barat itu.”¹⁵

Pada 2 November 1951, Pemerintah Belanda kembali mengambil langkah kontroversial dengan mengajukan enam rancangan undang-undang untuk mengamandemen undang-undang dasar yang berlaku. Rancangan tersebut diajukan dari Staten-Generaal ke Majelis Rendah Belanda (*Tweede Kamer*). Salah satu usulan penting dalam rancangan tersebut adalah penambahan kata “Nieuw Nederland Guinea” ke dalam Pasal 1. Dengan perubahan ini, pasal tersebut akan berbunyi: “Wilayah Kerajaan Belanda meliputi Suriname, Nederland Antillen, dan Nieuw Nederland Guinea.”

Keputusan tersebut sontak memicu kemarahan di kalangan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi salah satu pihak yang paling keras mengkritik keputusan Belanda tersebut. Dalam sidang pleno, Dewan Komisaris PNI Jakarta Raya mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghapus Uni Indonesia-Belanda secara sepihak (*unilateral*).

15 “Irian Barat Toch Kembali?” *Sin Po*, 21 Mei 1951.



Gambar 2.4. Silas Papare tengah berpidato dalam sebuah rapat umum pembebasan Irian Barat.

Sumber: “Silas Papare: Intel dan Mantri di Papua yang Melawan Belanda,” *Tempo*, 23 Agustus 2023.

Menurut PNI, langkah yang diambil oleh Belanda tidak sah dan melanggar kesepakatan yang telah ditandatangani dalam KMB pada 27 Desember 1949.¹⁶

Dewan Pimpinan PNI dengan tegas mengecam langkah yang diambil oleh Belanda tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan jelas melanggar kesepakatan yang telah disepakati antara kedua negara. PNI menegaskan bahwa status Papua masih berada dalam tahap *in dispute* (dipersengketakan), sehingga setiap langkah sepihak yang diambil Belanda dianggap tidak sah. Mereka juga menjelaskan bahwa itulah alasan mengapa dalam UUD Republik Indonesia tidak secara eksplisit mencantumkan status Papua, karena masih menunggu penyelesaian melalui jalur diplomasi sesuai perjanjian yang telah

16 “Putuskan Perundingan dengan Belanda,” *Sin Po*, 13 November 1951; “Kerdja-sama dengan Belanda Tidak Mungkin Lagi,” *Sin Po*, 15 November 1951.

disepakati sebelumnya. Terkait dengan polemik itu, redaktur *Sin Po* menulis:

“Memberi nama kepada Irian Barat ‘Nederlandsch Nieuw-Guinea’ dalam undang-undang dasar Belanda jang begitu penting artinja, baik politis, maupun *staatsrechtelijk* (secara konstitusional), untuk tiap-tiap negara, berarti bahwa pemerintah Belanda menganggap Irian Barat dengan terang dan djelas sebagai djadjahan Belanda.”¹⁷

Surat kabar *Sin Po* menyoroti bahwa baik pihak Belanda maupun Indonesia sebenarnya masih berada dalam proses negosiasi terkait persoalan Papua. Oleh karena itu, keputusan Belanda dianggap sebagai tindakan yang mencederai kesepakatan yang telah terjalin antara dua negara yang berdaulat. *Sin Po* juga mengingatkan bahwa para politisi Belanda jarang menggunakan retorika yang penuh semangat atau pidato dengan kata-kata yang menggugah. Sebaliknya, mereka justru bekerja dalam senyap (*geruisloos*). Manuver-manuver seperti inilah, menurut *Sin Po*, yang harus diwaspadai oleh seluruh bangsa Indonesia dan negara-negara Asia lainnya yang menentang kolonialisme.¹⁸

Menanggapi rencana perubahan undang-undang tersebut, Sukiman segera memanggil A. Th. Lamping, yang saat itu menjabat sebagai Komisararis Agung Belanda. Dalam pertemuan tersebut, Sukiman mengecam keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak terpuji (*onvriendelijke daad*), yang hanya akan memperkecil peluang untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat secara damai. Ia juga memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi memicu tekanan publik untuk mempercepat putusnya hubungan Uni Indonesia-Belanda.

Sementara itu, Prof. Soepomo menegaskan pentingnya Papua bagi stabilitas politik Indonesia. Menurutnya, kestabilan politik di

17 “Irian Djadjahan Belanda,” *Sin Po*, 5 November 1951.

18 “Irian Djadjahan Belanda,” *Sin Po*, 5 November 1951.

Indonesia tidak hanya penting bagi negara itu sendiri, tetapi juga vital bagi keamanan dunia. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa persoalan Papua harus diselesaikan sebelum rancangan undang-undang tersebut disahkan. Jika undang-undang itu benar-benar disahkan, ia memperingatkan bahwa penyelesaian sengketa Papua akan menjadi semakin sulit.¹⁹

Di Belanda, beberapa pihak menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana perubahan undang-undang tersebut. *Partij van de Arbeid* (Partai Buruh, PvdA) menjadi salah satu pihak yang paling keras menolak usulan itu. Sebelum dilakukan pemungutan suara di parlemen Belanda, PvdA sempat mengajukan amandemen sebagai alternatif. Dalam amandemen tersebut, PvdA mengusulkan agar istilah “Nederlands Nieuw-Guinea” diganti menjadi “suatu daerah yang tidak berpemerintahan sendiri dan kedaulatannya saat ini dijalankan oleh Nederland.” Namun, usulan ini ditolak mentah-mentah dalam sidang parlemen Belanda.²⁰

Singkat cerita, isu ini membuat hubungan antara Indonesia dan Belanda kembali memanas. Wakil Perdana Menteri RI, Suwirjo, mengimbau agar seluruh elemen bangsa Indonesia bersatu, antara “pemerintah, parlemen, partai-partai, serta organisasi-organisasi dan masyarakat umumnya.”²¹ Di tengah ketegangan ini, Muhammad Yamin mengusulkan agar Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret dengan mendirikan Provinsi Papua, dengan gubernurnya berkedudukan di Jakarta. Selain itu, ia juga mengusulkan agar perwakilan dari Papua diikutsertakan dalam parlemen, sehingga mereka dapat berpartisipasi dan memberikan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan.²²

Pada 10 November 1951, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi melayangkan protes keras terhadap tindakan

19 “Masalah Irian: Pemerintah Akan Nyatakan Sikapnja,” *Sin Po*, 6 November 1951.

20 “Irian Masuk Grondwet Belanda,” *Sin Po*, 20 Februari 1952.

21 “Sukiman Panggil Lampung,” *Sin Po*, 7 November 1951.

22 “Yamin Usulkan Propinsi Irian Barat,” *Sin Po*, 9 November 1951.

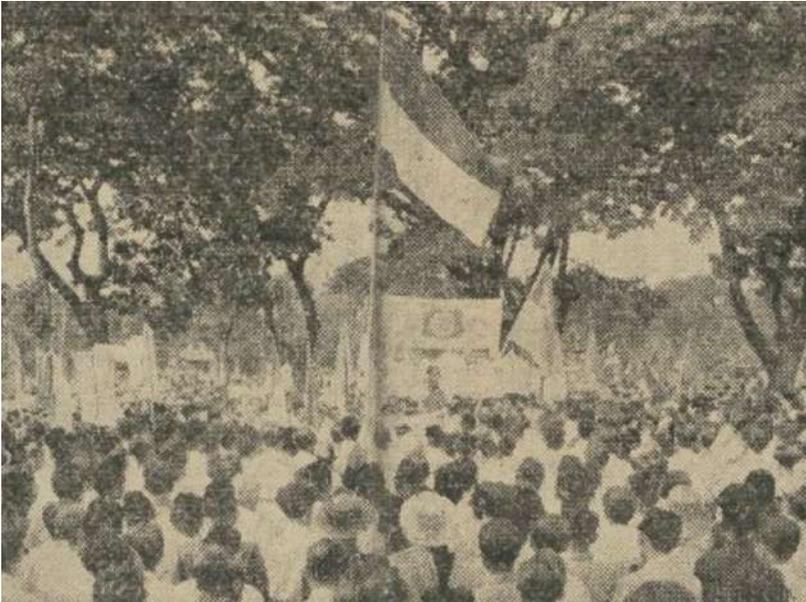
Belanda. Dalam memorandum tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya menyelesaikan sengketa terkait Papua sebelum usulan perubahan konstitusi Belanda disahkan. Beberapa hari kemudian, Pemerintah Belanda merespons memorandum tersebut dengan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk memasukkan Papua ke dalam konstitusi Belanda. Belanda mengklaim bahwa langkah tersebut tidak akan mengubah status Papua maupun memengaruhi perundingan yang sedang berlangsung antara kedua negara. Sebaliknya, Pemerintah Belanda justru berencana melayangkan protes balik kepada Indonesia atas penggunaan istilah *onvriendelijke daad* (tindakan tidak bersahabat) dalam protes resmi tersebut, yang dianggap menyakiti hubungan diplomatik kedua negara.²³

Meskipun nota protes telah disampaikan kepada pihak Belanda, gelombang demonstrasi dan aksi protes terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Pada 20 Desember 1951, sebuah rapat akbar dan demonstrasi besar digelar di Banjarmasin dengan dihadiri sekitar lima ribu orang. Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk agar Pemerintah Indonesia segera memberlakukan undang-undang mobilisasi umum, membatalkan keputusan KMB dan Uni Indonesia-Belanda, serta membekukan segala bentuk kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia.²⁴

Sepuluh hari kemudian, sebuah rapat akbar digelar di Lapangan Merdeka, Jakarta, untuk menuntut pengembalian Papua kepada Indonesia. Acara ini dipimpin oleh Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dengan dukungan dari lima partai politik dan belasan organisasi massa. Dalam rapat tersebut, para peserta menyampaikan beberapa tuntutan utama, termasuk pembatalan KMB dan segera memasukkan Papua ke dalam UUD Republik

23 "Belanda Protes Terhadap Utjapan Onvriendelijke Daad," *Sin Po*, 16 November 1951.

24 "Demonstrasi Irian," *Sin Po*, 27 Desember 1951.



Gambar 2.5. Rapat raksasa menuntut pengembalian Irian Barat ke Indonesia di Lapangan Merdeka, Jakarta.

Sumber: *Sin Po*, 31 Desember 1951.

Indonesia. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk segera memulangkan Prof. Supomo dari perundingan di Belanda. Tuntutan lainnya adalah agar seluruh senjata selundupan yang belakangan ditemukan di kapal-kapal Belanda segera disita, sebagai langkah untuk mengamankan kedaulatan nasional.²⁵

Sementara itu, demonstrasi dan aksi politik lainnya semakin marak di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kongres perdananya yang digelar di Surabaya pada 17–22 Desember 1951, Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) mengusulkan pembatalan perjanjian KMB. Selain itu, organisasi ini juga mendorong pembentukan sebuah front persatuan nasional yang didukung oleh rakyat yang

25 “Gedung Kabinet Dipenuhi Poster-Poster Irian,” *Sin Po*, 31 Desember 1951.

menentang imperialisme.²⁶

Pada 9 Februari 1952, bertempat di Makassar, digelar *Kongres Rakjat Perdjjuangan Irian* yang dihadiri oleh 26 utusan dari seluruh Indonesia dan 88 peninjau yang mewakili partai politik, organisasi buruh, pelajar, gerakan perempuan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting yang disepakati secara bulat, di antaranya: (1) Mendesak Pemerintah Indonesia untuk secara tegas menyatakan bahwa Irian Barat adalah bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Apabila Belanda tetap tidak mengakui keputusan tersebut, maka delegasi Indonesia tidak perlu melanjutkan perundingan dengan Belanda; (2) Menegaskan bahwa *Kongres Rakjat Perdjjuangan Irian* berdiri di belakang perjuangan pemerintah Republik Indonesia dalam upaya mengintegrasikan Irian Barat ke dalam wilayah kedaulatan negara.²⁷

Situasi Papua menjadi semakin pelik karena pihak Indonesia beberapa kali menemukan kapal-kapal Belanda yang mengangkut senjata menuju wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyitaan terhadap persenjataan yang dibawa oleh Kapal *Blitar*, pada 18 Desember 1951, pihak Indonesia kembali menemukan 170 ton senjata dan mesiu yang diangkut oleh Kapal *Talisse*. Kapal tersebut diketahui berencana bergerak menuju Papua, namun berhasil digeledah lebih dahulu ketika menepi di Pelabuhan Tanjung Priok. Melalui perundingan alot, otoritas pelabuhan berhasil menyita senjata dan mesiu tersebut.²⁸ Di Makassar, komando pelabuhan juga sempat menyita tujuh peti senjata berisi 70 pucuk senjata pemburu dari Kapal *Nieuw Holland*. Tidak diketahui pasti siapa pengirim senjata tersebut, dan ke mana senjata itu akan dibawa.

26 "Keputusan Kongres Gerwis," *Sin Po*, 27 Desember 1951.

27 "Boleh Berunding, Tapi Atas Dasar Irian Masuk Indonesia," *Sin Po*, 11 Februari 1952.

28 "Lagi Sendjata untuk Irian: Kapal Talise Masuk Priok," *Sin Po*, 20 Desember 1951; "Peristiwa Blitar dan Talisse," *Sin Po*, 26 Desember 1951.



Gambar 2.6. Perundingan di atas Kapal Talisse antara Kapten Kapal S. Tol (kiri) dan Kapten Muljono selaku komando pelabuhan Tandjung Priok.

Sumber: *Sin Po*, 26 Desember 1951.

Namun kecurigaan mengarah ke Papua.²⁹

Menurut laporan surat kabar *Evening News* di Manila, sebagaimana dikutip oleh *Sin Po*, persenjataan tersebut diduga diselundupkan dari Filipina ke Irian Barat. Tidak hanya itu, harian *Abadi* juga melaporkan bahwa Belanda beberapa kali mengirim pasukan militernya ke Papua menggunakan pesawat KLM, dengan rute dari Amsterdam ke Biak melalui Manila.³⁰

Tudingan tersebut segera dibantah oleh perwakilan Belanda di Den Haag yang menyatakan “terlalu dungu untuk berkata bahwa Pemerintah (Belanda) tersangkut dalam penjelundupan sendjata.” Lantaran Belanda mengklaim berdaulat atas Irian Barat, maka Belanda menyatakan perlu mengirim senjata untuk

29 “Sendjata-Sendjata Belanda Dibeslah di Makassar,” *Sin Po*, 26 Desember 1951.

30 “Sendjata Gelap ke Irian,” *Sin Po*, 9 Januari 1952.

menjaga keamanan dan ketertiban di sana. Belanda mengklaim proses pengiriman dilakukan sesuai prosedur yang legal, sehingga tuduhan penyelundupan dianggap sangat berlebihan. Pihak Belanda juga menantang Pemerintah Filipina untuk mengambil tindakan tegas bila sekiranya penyelundupan senjata itu memang betul-betul ada.³¹

Di sisi lain, Belanda terus memperluas pengaruhnya di Irian Barat dengan membuka pos-pos pemerintahan baru yang dipimpin oleh pejabat Belanda. Pada April 1952, misalnya, Belanda mendirikan sebuah pos pemerintahan di Wisselmeren, Enarotali. Frits Veldkamp ditunjuk sebagai *controleur* pertama yang memimpin wilayah tersebut.

Pada 10 Mei 1952, Belanda membagi wilayah Gubernemen Nederlands Nieuw Guinea (NNG) menjadi empat *afdeeling* (distrik administratif). Pembagian administratif ini mencerminkan upaya Belanda untuk memperkuat kontrol mereka di wilayah Papua dengan membangun struktur pemerintahan yang lebih terorganisasi. Keempat *afdeeling* tersebut adalah:³²

1. Afdeeling Nieuw Guinea Utara dengan ibu kota di Hollandia. Distrik ini membawahi enam *onderafdeeling* (sub-distrik), yaitu Hollandia, Nimboran, Sarmi, Waropen, Yapen, dan Biak.
2. Afdeeling Nieuw Guinea Selatan dengan ibu kota di Merauke. Distrik ini terdiri atas empat *onderafdeeling*, yaitu Merauke, Boven Digul, Mappi, dan Mimika.
3. Afdeeling Nieuw Guinea Tengah, dengan ibu kota yang belum ditetapkan. Distrik ini mencakup *onderafdeeling* Wisselmeren, yang berpusat di Enarotali.
4. Afdeeling Nieuw Guinea Barat dengan ibu kota di Sorong. Distrik ini membawahi sembilan *onderafdeeling*, yaitu Sorong, Makbon, Raja Ampat, Manokwari, Ransiki, Wandamen, Ayamaru, Bintuni, dan Fakfak.

31 "Soal Sendjata ke Irian," *Sin Po*, 25 Januari 1952.

32 Rosmida Sinaga, *Masa Kuasa Belanda di Papua*, hlm. 319.

C. Kegagalan Diplomasi dan Munculnya Aksi-aksi Ofensif

Selama sebelas tahun, upaya penyelesaian persoalan Irian Barat terus menemui jalan buntu. Berbagai pertemuan antara pihak Indonesia dan Belanda berkali-kali dilakukan, namun selalu berakhir dengan *deadlock*. Masalah ini bahkan sempat dibawa ke Majelis Umum PBB pada tahun 1954, 1955, 1957, dan 1960, tetapi tidak ada satu pun resolusi yang mampu menyelesaikan perselisihan di antara kedua negara. Pada tahun 1954, Uni Indonesia-Belanda, yang merupakan salah satu hasil dari KMB, secara resmi berakhir.

Pada tahun 1957, Indonesia kembali membawa sengketa Papua ke Majelis Umum PBB dengan tekanan yang lebih kuat. Dalam sidang tersebut, Indonesia menyatakan bahwa jika usulan mereka tidak diindahkan, maka Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan persoalan ini dengan caranya sendiri. Namun, desakan tersebut tidak mampu membawa perubahan yang signifikan dalam sidang PBB. Indonesia gagal memperoleh suara mayoritas untuk mendesak Belanda agar bersedia berunding.

Kegagalan tersebut memicu ketegangan yang semakin memanas di Indonesia. Sentimen anti-Belanda meningkat tajam, yang berujung pada serangkaian aksi penyerangan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Kantor dari beberapa perusahaan besar, seperti *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) dan *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij* (KLM), menjadi sasaran massa. Dalam aksi-aksi tersebut, serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI dan PNI memainkan peran kunci dalam mengorganisir massa di lapangan. Sejak awal, kedua kelompok ini telah menunjukkan sikap antipati terhadap hasil KMB dan terus berupaya melawan dominasi Belanda di sektor perkebunan dan industri.³³ Situasi

33 Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, perusahaan-perusahaan besar Belanda yang dijuluki *The Big Five* kembali berkuasa di Indonesia. Mereka

tersebut semakin mencekam dengan merebaknya berbagai aksi vandalistik mulai dari membuat coretan di gedung-gedung milik perusahaan Belanda hingga pemasangan spanduk provokatif yang bertuliskan “Milik RI,” “Usir Belanda dari Irian Barat!”, “Usir Belanda dari Irian Barat,” “Rebutlah Irian Barat,” dan “Pemuda Siap Panggul Sendjata ke Irian Barat” dan lain sebagainya. Hal itu bisa dilihat dalam Gambar 2.7, 2.8 dan 2.9 berikut.



Gambar 2.7. Coret-coretan bernada provokatif pada salah satu bangunan Milik Belanda di Jakarta (besar kemungkinan Bank Belanda).

Sumber: Fotocollectie Spaarnestad Onderwerpen. <http://hdl.handle.net/10648/af70a511-7a5b-1e11-32a7-fad63f9f4c6d>

adalah N.V Borsumij, N.V Jacobson van den Berg, N.V Internatio, N.V Lindeteves, dan N.V Geo Wehry. Korporasi ini bergerak di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, transportasi, ekspor-impor, hingga perkebunan. Lantaran sudah disepakati dalam KMB, pemerintah Indonesia pun tidak bisa menghalangi kegiatan perusahaan-perusahaan itu. Situasi ini membuat perekonomian milik orang Indonesia (masih) terpinggirkan. Mereka tidak mampu bersaing dari segi modal, kualitas pekerja, hingga jaringan distribusi.



Gambar 2.8. Coret-coretan pada gedung Borsumij (Borneo Sumatra Maatschappij).

Sumber: Fotocollectie Spaarnestad Onderwerpen. <http://hdl.handle.net/10648/3688b80d-f580-29f6-4d1b-a7e34e864606>



Gambar 2.9. Coret-coretan pada gedung Radio Holland di Kotabaru, yang kemudian diambil alih para buruh Indonesia di akhir 1957.

Sumber: Fotocollectie Spaarnestad Onderwerpen, 12 Desember 1957. Inventarisnummer: 347033. <http://hdl.handle.net/10648/b07ff764-ca78-9691-0f17-9109126ecbe8>



Gambar 2.10. Kapal laut 'Castel Felice' berlabuh di Pelabuhan Rotterdam pada 6 Agustus 1958, membawa 500 penumpang Belanda yang direpatrisi dari Indonesia karena peristiwa 'Zwarte Sinterklaas.'

Sumber: Nationaal Archief, J.D. Noske, Anefo. <https://www.canonvannederland.nl/nl/kalender/12/1957-12-05>

Situasi politik di Indonesia semakin memanas setelah muncul upaya pembunuhan terhadap Presiden Sukarno pada 30 November 1957, yang kemudian dikenal sebagai 'Peristiwa Cikini'.³⁴ Walaupun tidak memiliki kaitan langsung dengan isu Papua, dan lebih terkait dengan konflik politik dalam negeri Indonesia, peristiwa ini meningkatkan tensi politik yang ada. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 5 Desember 1957, Departemen Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan perintah pengusiran terhadap sekitar 46

34 M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200*, 4th edition. (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 297-8

ribu warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan istilah *Zwarte Sinterklaas* (Sinterklas Hitam) karena bertepatan dengan perayaan hari Sinterklas yang biasa dirayakan oleh masyarakat Belanda. Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan antara kedua negara. Puncaknya, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda resmi terputus sepenuhnya pada tahun 1960.

Pada 5 April 1961, Nieuw Guinea Raad (Dewan Nugini), sebuah lembaga yang disponsori oleh Kerajaan Belanda, didirikan sebagai badan legislatif semi-otonom yang bertugas mengawal terbentuknya pemerintahan sendiri bagi penduduk asli Papua. Dewan ini terdiri dari 28 orang anggota yang sebagian besar merupakan perwakilan Papua yang dipilih secara langsung. Salah satu keputusan penting yang diambil oleh Dewan Nugini adalah mendeklarasikan “Manifesto Papua” pada Oktober 1961. Manifesto tersebut menentukan nama, bendera, hingga lagu kebangsaan Papua. Mereka bahkan mengusulkan agar bendera Papua mulai dikibarkan sejak tanggal 1 November 1961.³⁵ Langkah politik ini kemudian menjadi pemicu utama konflik yang lebih panjang antara Indonesia dengan Belanda.

Pada tingkat tertentu proses nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, merupakan respon Pemerintah dan Masyarakat Indonesia terhadap langkah politik Belanda tersebut. Meski demikian, proses nasionalisasi aset-aset Belanda ini sejatinya telah dimulai sejak awal tahun 1950-an, meskipun skalanya tidak sebesar nasionalisasi yang terjadi pada tahun 1957. Proses ini dilakukan secara bertahap dan tidak selalu melalui perebutan atau penyitaan aset, melainkan melalui pembelian saham secara resmi. Salah satu contohnya adalah nasionalisasi De Javasche Bank oleh Pemerintah Republik Indonesia. Proses ini dimulai pada tahun 1951

35 Setelah transisi kekuasaan dari UNTEA ke pemerintahan Indonesia, Dewan Nugini sepakat untuk membubarkan diri pada 1 Mei 1963, pukul 12.30. Lihat “Dewan Papua Bubar,” *Merdeka*, 2 Mei 1963.



Gambar 2.11. Proses pemilihan calon anggota Dewan Nugini yang dilakukan di desa nelayan Kayu Pulau, Hollandia. Tampak Lukas Jouwe yang memperoleh 23 suara tengah menerima ucapan selamat dari para pemilih. Foto di atas diambil kira-kira pada Januari 1961.

Sumber: *Fotocollectie Spaarnestad Onderwerpen*. <http://hdl.handle.net/10648/85c39eff-30bd-f78c-b13b-5f88037a5906>



Gambar 2.12. Pada 5 April 1961, Kantor Pos Nugini Belanda mengeluarkan dua buah prangko khusus bernilai 25 dan 30 sen dalam rangka peresmian Dewan Nugini. Prangko tersebut bergambar gedung Dewan Nugini yang dirancang oleh Ir. van Noortwijk. Kebetulan Noortwijk jugalah yang merancang pembangunan gedung tersebut.

Sumber: *Fotocollectie Spaarnestad Onderwerpen*. <http://hdl.handle.net/10648/4e23f80b-0b31-90b9-23fa-0ee3a6309a90>

melalui pembelian saham bank tersebut. Pada 26 September 1952, Dewan Menteri mengadakan sidang untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pokok Bank Peredaran, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Bank Indonesia. RUU ini memuat anggaran dasar baru untuk bank peredaran, yaitu De Javasche Bank, yang telah dinasionalisasi berdasarkan UU No. 24/1951 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPR. Rencananya, RUU tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 1953. Menteri Penerangan saat itu, Arnold Mononutu, menjelaskan bahwa nama De Javasche Bank akan diubah menjadi Bank Indonesia, sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional.³⁶ Singkat cerita, seluruh saham De Javasche Bank pada akhirnya berhasil dibeli oleh pemerintah Indonesia. Namun, pada tahap awal, jajaran direksi bank tersebut masih diisi oleh orang-orang Belanda.

Berdasarkan riset sejarawan Bondan Kanumuyoso, setidaknya 90 persen produksi perkebunan beralih ke tangan Pemerintah Indonesia selama proses yang kelak dikenal dengan istilah “nasionalisasi” tersebut. Angka ini belum termasuk sekitar 60 persen nilai perdagangan luar negeri, ditambah dengan 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank, perusahaan perkapalan, hingga sektor jasa lainnya. Nasionalisasi ini menciptakan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sekaligus mengakhiri dominasi modal Belanda yang telah berlangsung selama beberapa dekade di sektor ekonomi nasional.³⁷

Namun demikian, respon paling keras Pemerintah Indonesia terhadap langkah politik Pemerintah Belanda terkait Papua di atas adalah digaungkannya Tri Komando Rakyat (Trikorra) oleh Presiden Sukarno pada 19 Desember 1961. Tiga komando yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Gagalakan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda

36 “Asjura Hari Libur,” *Sin Po*, 27 September 1952.

37 Bondan Kanumuyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2001).

Kolonial

2. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa

Untuk mewujudkan amanat Trikora tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) melalui Keputusan presiden No 618 Tahun 1961. Dewan ini beranggotakan Presiden Panglima Tertinggi ABRI sebagai ketua, dibantu Menteri Pertama dan Menteri Keamanan Nasional, dan KASAD, KASAL, KSAU, Ketua MPRS, Ketua DPRGR, dan sejumlah menteri sebagai anggota. Depertan selanjutnya membentuk Komando Tertinggi (KOTI) Pembebasan Irian Barat pada tanggal 14 Desember 1961, yang dipimpin langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi APRI dibantu oleh ketiga Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara. Untuk melaksanakan operasi pembebasan Irian Barat Presiden Sukarno membentuk Komando Mandala, yang dipimpin oleh Brigjen Suharto pada 11 Januari 1962.³⁸

Adapun tugas utama Komando Mandala ini adalah: “merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer untuk mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia”. Operasi militer tersebut dirancang untuk dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu tahap infiltrasi (hingga akhir 1962) meliputi upaya pendaratan pasukan dari udara dan laut untuk menguasai wilayah Irian Barat dan mengajak rakyatnya untuk membebaskan wilayahnya; kemudian dilanjutkan dengan tahap eksploitasi (awal 1963) berupa serangan terbuka ke pusat-pusat militer Belanda dan semua pos militer pentingnya; dan terakhir adalah tahap konsolidasi (awal 1964), yaitu menegakan kekuasaan Republik Indonesia di seluruh wilayah

38 25 Tahun Trikora, hlm. 47-48.

Irian Barat. Operasi militer ini melibatkan semua angkatan dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia, ditambah dengan Kesatuan Brigadir Mobil dari Kepolisian, dan tenaga sukarelawan yang direkrut melalui mobilisasi umum berbagai kelompok Masyarakat.³⁹

Konflik senjata pertama selama Operasi Trikora ini terjadi di Lautan Aru pada tanggal 15 Januari 1962 antara armada kapal perang Indonesia dengan kapal Belanda. Pada saat itu, 3 kapal perang Indonesia, yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul, dan KRI Harimau tengah berpatroli di perairan sekitar Kepulauan Aru. Rombongan kapal Indonesia ini berpapasan dengan 2 kapal Belanda, sehingga tembak menembak kedua belah pihak tidak terhindarkan. Dalam insiden itu, KRI Macan Tutul yang dipimpin oleh Laksamana Muda Yos Sudarso tertembak dan karam, sehingga mengakibatkan 27 awaknya tenggelam termasuk Yos Sudarso.⁴⁰ Insiden tersebut semakin memperuncing konflik antara kedua belah pihak, baik di medan pertempuran maupun di sektor diplomasi dan politik secara umum. Di medan pertempuran, Pimpinan Komando Mandala melaksanakan sejumlah operasi militer untuk melakukan infiltrasi melalui udara dan laut, penyusupan dan intelijen ke pedalaman Papua, di antaranya melalui Operasi Serigala. Walaupun tidak dilaporkan adanya konflik bersenjata skala besar, namun ketegangan antara kedua belah pihak semakin kuat, sehingga mengundang perhatian dunia internasional untuk terlibat mencegah konflik yang berkelanjutan.

Sementara itu, di luar medan pertempuran, pasca gugurnya Yos Sudarso dalam pertempuran di Laut Aru pada 15 Januari 1962, upaya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik

39 Pusjarah ABRI, *Trikora Pembebasan Irian Barat* (Jakarta: Pusjarah ABRI, 1995), hlm. 90-93; "Semua Warga Negara 18-40 Tahun Dipanggil untuk Mobilisasi Umum," *Merdeka*, 25 Januari 1962.

40 *25 Tahun Trikora*, hlm. 88-89.

Belanda semakin digencarkan. Dalam penutupan sesi *coaching* indoktrinasi yang diselenggarakan oleh PN Tulus Bhakti dalam rangka pelaksanaan Trikora, Menteri Wakil Ketua DPA, Roeslan Abdulgani, menyatakan bahwa “semua perusahaan-perusahaan negara yang dulu milik modal Belanda adalah sepenuhnya dan tanpa syarat menjadi modal Rakyat dan Negara Indonesia.”⁴¹ Namun, Roeslan juga menekankan bahwa seluruh perusahaan tersebut harus dikelola dengan baik untuk kepentingan kemakmuran rakyat bersama.

Selain itu, propaganda melalui berbagai media, seperti radio, film, seni suara, seni pertunjukan, hingga penerbitan stensilan, juga gencar dilakukan di Papua. Salah satu penerbitan penting yang menjadi sumber informasi utama tentang perkembangan di Papua adalah harian *Tjenderawasih* yang terbit di Kotabaru. Awalnya, harian ini diterbitkan pada 28 Oktober 1962 dalam bentuk stensilan sederhana, sebelum akhirnya berkembang menjadi surat kabar resmi setelah penyerahan Papua dari UNTEA kepada pemerintah Indonesia. Hingga akhir tahun 1963, *Tjenderawasih* menjadi satu-satunya harian di Papua, memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik di wilayah tersebut.⁴²

Koran ini awalnya dipimpin oleh Jan Eliezer Bonay, tokoh yang kemudian menjadi Gubernur pertama Papua. Setelah Bonay tidak lagi menjabat, operasional harian ini diteruskan oleh dua rekannya, Wanggai dan Sujono Djanadi. Keduanya tidak hanya berperan sebagai jurnalis, tetapi juga menjalankan berbagai

41 “Semua Warga Negara 18-40 Tahun Dipanggil untuk Mobilisasi Umum,” *Merdeka*, 25 Januari 1962.

42 Menyadari pentingnya memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat Papua, pada 2 Februari 1963, sempat terbit juga surat kabar *Keswari* di Merauke. Nama *Keswari* merupakan singkatan dari “Kesatuan Wilayah Republik Indonesia” dan juga merujuk pada burung kasuari, yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat Papua. Namun, karena berbagai kendala teknis di lapangan, surat kabar ini hanya mampu terbit sekali dalam seminggu, tepatnya setiap hari Sabtu. Lihat “Keswari di IB,” *Merdeka*, 15 Maret 1963.

tugas lainnya, termasuk sebagai distributor yang secara langsung mengantarkan koran ini kepada para pembacanya. Namun, keterbatasan dana dan sumber daya membuat cakupan berita yang disajikan *Tjenderawasih* menjadi sangat terbatas. Selain itu, minimnya jumlah pelanggan membuat nasib koran ini kerap berada di ujung tanduk. Kondisi ini tergambar secara implisit dalam pernyataan berikut:

“Tidaklah perlu berketjil hati djika kita mendapat kesan kurangnja minat masjarakat Kotabaru akan membatja harian ‘Tjenderawasih’ jang diterbitkan sedjak 28 Oktober 1962 dengan edisi stensilan.”⁴³

Sekalipun harus jatuh bangun karena keterbatasan finansial, harian *Tjenderawasih* terus berupaya untuk bertahan. Bersama-sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) yang telah menggantikan Radio Holland N.V., kedua institusi ini terus menjadi garda terdepan dalam menyediakan berita bagi masyarakat Irian Barat, sebab “...dalam suasana terang benderangnja sinar-sinar api kemerdekaan jang telah membebaskan Irian Barat dari imperialis/ kolonialis Belanda, Rakjat di sana tidak boleh ‘kegelapan’ berita.”⁴⁴

D. Gencatan Senjata dan Penyerahan Papua Kepada Indonesia

Setelah kurang lebih enam bulan konflik senjata dan ketegangan terkait Papua antara pihak Republik Indonesia dan Belanda, atas desakan Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1962 kedua belah pihak akhirnya bersedia bertemu dan menyetujui gencatan senjata. Persetujuan tersebut dicapai dalam sebuah perundingan yang dilaksanakan di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-

43 “Irian Barat Ditinjau dari Segi Penerangan,” *Merdeka*, 30 April 1963.

44 “Djarak Djakarta-Kotabaru Sama dengan Perdjalan ke Hongkong,” *Warta Bhakti*, 6 Mei 1963.

bangsa) di New York, sehingga dikenal sebagai ‘New York Agreement’ (Persetujuan New York). Adapun garis besar dari persetujuan damai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setelah persetujuan ini, maka Belanda akan menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB.
2. Pemerintahan UNTEA akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun militer bersama-sama dengan putra-putra Irian Barat dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan
3. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat dan statusnya berada di bawah kekuasaan UNTEA
4. Angkatan Perang Belanda secara berangsur dikembalikan, dan prosesnya diawasi oleh PBB
5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas
6. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB
7. Pemulangan tentara dan sipil Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963, dan selambat-lambatnya 1 Mei 1963 Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA.⁴⁵

Dalam pertemuannya dengan Ir. Juanda, Dr. Subandrio (Menteri Luar Negeri Indonesia), dan A.H. Nasution (Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia) di Jakarta, Dr. Djalal Abdoh (Kepala UNTEA) mendorong agar pemerintah pusat

45 *25 Tahun Trikora*, hlm. 155. Pada awalnya Belanda tidak menerima poin-poin tersebut dan melakukan protes keras. Namun berkat negosiasi dan kepemimpinan Sekjen PBB U Thant, Belanda akhirnya menyetujuinya. Persetujuan ini pun secara resmi ditandatangani pada 15 Agustus 1962 dan disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September 1962.



Gambar 2.13. Dr. Djalal Abdoh (1909–1996), seorang diplomat ulung asal Iran. Pada tahun 1955, ia diangkat sebagai perwakilan tetap Iran (sebelumnya Persia) untuk PBB. Pada Oktober 1962, ia ditunjuk sebagai Kepala UNTEA guna menangani sengketa wilayah Papua. Foto di atas diambil pada 1 November 1962.

Sumber: Fotocollectie Anefo. <http://hdl.handle.net/10648/aa1db642-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

Indonesia mengirim lebih banyak tenaga untuk mengisi pos-pos pemerintahan di Papua.⁴⁶ Ia cukup optimis seluruh jabatan sipil maupun militer di Papua akan diisi sepenuhnya oleh orang Indonesia pada 1 Mei 1963.⁴⁷

Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Indonesia. Pada 7 Desember 1962, dengan menumpang pesawat Hercules AURI, lebih dari 100 guru tiba di Bandara Sentani, Kotabaru. Kedatangan mereka disambut oleh beberapa pejabat

46 "Lebih Banjak Dibutuhkan Tenaga-Tenaga Indonesia," *Tjenderawasih*, 13 November 1962.

47 "Stabilisasi Ekonomi," *Tjenderawasih*, 22 Februari 1963.

perwakilan Republik Indonesia di Kotabaru beserta masyarakat setempat. Para guru ini ditugaskan untuk mengembangkan pendidikan di Papua dengan fokus utama pada pemberantasan buta huruf.⁴⁸ Optimisme pun membumbung tinggi, sebagaimana dilaporkan oleh harian *Tjenderawasih*:

“Sebentar lagi di seluruh Irian Barat akan dibuka berpuluh-puluh sekolah-sekolah rakjat, sekolah-sekolah vak, SMP-SMP, dan SMA-SMA. Di Kotabaru Complex, gedung-gedung Universitas Tjenderawasih akan dibangun setjara besar-besaran dan modern. Semuanya ini adalah untuk kemandjauan Rakjat Irian Barat.”⁴⁹

Guna mengisi pos-pos yang akan ditinggalkan oleh pejabat UNTEA, yang sebelumnya diisi oleh tenaga-tenaga asing, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan ratusan tenaga dari berbagai departemen dan instansi pemerintahan, untuk dikirim ke Papua selambat-lambatnya pada awal Maret 1963. Pengiriman itu dilakukan melalui kerja sama antara seluruh pembantu menteri dengan Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, dalam dua misi yang dinamakan “Operasi Damai I” dan “Operasi Damai II”. Seluruh tenaga ini bertugas melanjutkan jalannya pemerintahan di Irian Barat pasca pemerintahan UNTEA berakhir.⁵⁰

Pada awal Februari 1963, sempat diresmikan dua Kantor Perburuhan Tjabang di Kotabaru dan juga Manokwari. Cakupan kerja kantor cabang Kotabaru meliputi wilayah karesidenan Kotabaru, Pegunungan Tengah, dan Papua bagian Selatan. Kantor ini dikepalai oleh Hasan Oemoer. Sementara kantor cabang Manokwari dipimpin oleh Sumali Dirdjosaputro dengan wilayah cakupan meliputi karesidenan Papua Barat, Teluk Geelvink, dan Fakfak. Sebagai informasi, kantor-kantor cabang

48 “100 Guru Pria dan Wanita Tiba,” *Tjenderawasih*, 8 Desember 1962.

49 “Pendidikan Rakjat,” *Tjenderawasih*, 13 Desember 1962.

50 “Sekitar Pemerintahan Irian Barat,” *Merdeka*, 30 April 1963.

ini berada di bawah Departemen Urusan Sosial dan Kehakiman bagian perburuhan yang dikepalai oleh Arrie Benggalo M.T. Selain bertugas memajukan dan mengembangkan undang-undang perburuhan, kantor cabang ini juga bertugas mengurus segala persoalan yang berkaitan dengan kaum buruh, mulai dari kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, jaminan sosial, hingga pengawasan.⁵¹

Pada 3 Maret 1963, bertempat di Sekolah Tionghoa Kotabaru, didirikan sebuah badan yang berfungsi untuk mengatur masyarakat Tionghoa di Kotabaru dan memudahkan hubungan komunikasi antara mereka dengan pemerintah Indonesia. Susunan pengurus badan ini terdiri dari lima orang, yaitu Oen Njuk Soe (Ketua), Oei Tjie Sian (Wakil Ketua), Tjoeng Sek Jong (Bendahara), The Hok Hian (Sekretaris), dan Go Tjiang keng (Pengurus Umum). Peresmian itu dihadiri oleh Sjarif Harahap (Sekretaris Residen Kotabaru) dan D.N. Saifudin (Kepala Pemerintah Setempat Kotabaru). Keduanya berharap agar masyarakat Tionghoa di Kotabaru bisa tetap tenang selama masa transisi dan tidak terpengaruh propaganda Belanda.⁵²

Menjelang transfer kekuasaan, kekhawatiran sempat membunyah di kalangan pejabat pemerintahan Indonesia di Papua. Kondisi ini tidak lepas dari buruknya diseminasi informasi dari UNTEA kepada penduduk Papua, yang diperparah dengan upaya propaganda dan hasutan yang dilancarkan Belanda, khususnya kepada masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota, agar menentang transisi pemerintahan tersebut. Tidak hanya itu, Belanda juga sempat menyabotase perusahaan listrik dan merusak beberapa mesin penting. Beruntung tenaga ahli yang didatangkan pemerintah Indonesia ke Papua bisa langsung memperbaikinya.⁵³

51 "Dua Kantor Perburuhan Tjabang Telah Diresmikan," *Tjenderawasih*, 5 Februari 1963.

52 "Badan Pengurus Masjarakat Tionghoa," *Tjenderawasih*, 5 Maret 1963.

53 "Stabilisasi Ekonomi, Bukan Pertahankan Kemewahan," *Tjenderawasih*, 22

Guna mengatasi persoalan itu, salah satu strategi yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah mengadakan penerangan berkala ke berbagai wilayah yang ada di Papua. Pada tanggal 14 - 19 Februari 1963 misalnya, D.N. Saifudin selaku Kepala Pemerintah Setempat (KPS) Kotabaru sempat mengunjungi 20 kampung yang tersebar di wilayah Sentani. Dalam kunjungan tersebut ia didampingi oleh L.J. Marani (Kepala Distrik Sentani), 6 Anggota Pelopor Brigade Mobil, dan petugas dari Dinas Penerangan Rakjat di Kotabaru.⁵⁴

Sebagai Kepala Perwakilan Pemerintah RI di Irian Barat, Soedjarwo Tjondronegoro berusaha menenangkan masyarakat yang gelisah melalui berbagai pidato radionya. Hingga menjelang perpisahannya, Soedjarwo menegaskan bahwa transisi kekuasaan ini tidak hanya memiliki makna besar bagi masyarakat Papua, melainkan juga momentum bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Ia menegaskan, integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia mencerminkan keberhasilan perjuangan nasional Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan dan kesatuan negara.

“Mari kita menjambut hari besar jang bersedjarah tanggal 1 Mei jang akan datang dengan meriah, sebagai penjabutan djaman baru chusunja, bagi Rakjat di Irian Barat serta bangsa Indonesia seluruhnja dari Sabang sampai Merauke. Pada tanggal 1 Mei itu pemerintahan sementara UNTEA akan berachir dan kekuasaannja akan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan persetudjuan Indonesia-Belanda tanggal 15 Agustus 1962.”⁵⁵

Soedjarwo menjamin pergantian pemerintahan tidak akan menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi maupun keuangan,

Februari 1963.

54 “Murid-Murid Minta Buku Lagu Nasional dan Wadajib,” *Tjenderawasih*, 21 Februari 1963.

55 “Merdeka adalah Bekerdjia Keras,” *Tjenderawasih*, 26 April 1963.

lantaran persediaan pasokan barang di Papua sudah tercukupi untuk beberapa bulan ke depan. Terkait dengan mata uang NNG (Gulden) juga dinyatakan masih berlaku setelah tanggal 1 Mei 1963, tanpa ada perubahan nilai. Rencana peredaran mata uang baru oleh pemerintah Indonesia juga dijamin “tidak menggontjangkan serta merugikan rakyat.” Ia juga menegaskan bahwa baik pemerintah RI maupun pemerintah daerah Irian Barat akan berupaya menjaga kepentingan rakyat dengan segenap tenaga. Berbagai peraturan yang menjamin keamanan dan kestabilan perekonomian juga tengah dirancang oleh pemerintah pusat di Jakarta dan akan dikeluarkan dalam waktu dekat.⁵⁶

Menjelang transisi kekuasaan sempat beredar rumor bahwa Bank Indonesia akan menutup layanannya selama beberapa hari. Namun rumor ini segera dibantah oleh pihak BI yang menyatakan KCBI Kotabaru dan cabang lainnya akan tetap beroperasi seperti biasa.⁵⁷ Klarifikasi ini merupakan langkah strategis yang krusial dalam meredam kekhawatiran publik sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi dan perbankan di tengah situasi transisi yang sarat ketidakpastian. Dari perspektif sejarah ekonomi Papua, respons cepat Bank Indonesia untuk membantah rumor penutupan layanan perbankan mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap peran vital sektor keuangan dalam menjaga kepercayaan publik. Jika layanan perbankan terganggu atau bahkan terhenti, dampaknya tentu bisa sangat luas—mulai dari terhambatnya arus perdagangan, terganggunya likuiditas pelaku usaha, hingga terciptanya kepanikan massal.

Seiring dengan proses peralihan administrasi Papua kepada Indonesia, sejumlah perubahan kebijakan di sektor ekonomi pun mulai diberlakukan. Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah pencabutan tarif pos khusus yang sebelumnya diterapkan di Papua. Terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963, pengiriman surat

56 “Merdeka adalah Bekerja Keras,” *Tjenderawasih*, 26 April 1963.

57 “Bank Indonesia Buka Terus,” *Tjenderawasih*, 22 April 1963.

ke dan dari Papua akan mengikuti tarif pos internasional yang berlaku secara umum di seluruh Indonesia. Selain itu, untuk layanan pengiriman melalui pos udara, akan diberlakukan biaya tambahan sesuai dengan ketentuan tarif penerbangan domestik yang berlaku saat itu.⁵⁸

Akhirnya, tepat pada 1 Mei 1963 sebuah upacara penyerahan kekuasaan yang penting diselenggarakan di Kotabaru. Upacara penyerahan kekuasaan berlangsung di Lapangan Imbi yang dihadiri oleh ribuan orang. Masyarakat diimbau untuk berkumpul sejak pukul 11.15 lantaran tepat pada pukul 11.40, rangkaian upacara ini resmi dimulai. Tepat pada pukul 12.25, barisan kehormatan langsung mengambil tempat, yang disusul dengan penurunan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁵⁹

Pengibaran Sang Saka Merah Putih disaksikan oleh Dr. Subandrio selaku perwakilan Wampa/Menlu Indonesia, C.V. Narasimhan selaku utusan PBB, Sudjarwo Tjondronegoro sebagai Kepala Perwakilan RI di Irian Barat semasa UNTEA, Dr. Djalal Abdoh selaku Kepala UNTEA, Ipik Gandamana sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia, Rusiah Sardjono selaku Menteri Sosial Indonesia, sejumlah wartawan dari dalam maupun luar negeri, dan tentu saja lautan massa rakyat yang menjadi saksi hidup dari peristiwa monumental tersebut.⁶⁰

Dr. Djalal Abdoh selaku Kepala Pemerintahan UNTEA mengemukakan bahwa UNTEA telah mencapai tujuannya, yakni menjalankan pemerintahan yang stabil di Papua dan mewujudkan proses serah-terima kekuasaan yang damai. Sementara itu C.V. Narasimhan mewakili Sekretaris Jenderal PBB saat itu, U Thant, menyampaikan ucapan selamat seraya berharap kemakmuran bisa segera terwujud di Papua. Ia menambahkan, PBB bersedia

58 "Ontheffing uit hun Functie van Enkele N-Guinea-Raadsleden," *Limburgsch Dagblad*, 26 April 1963.

59 "Atjara Tgl 1 Mei," *Tjenderawasih*, 22 April 1963.

60 "Kemenangan RI Tidaklah Diperoleh dengan Mudah," *Merdeka*, 3 Mei 1963.



Gambar 2.14. Upacara penyerahan kekuasaan Irian Barat dari UNTEA ke Indonesia.

Sumber: Fotocollectie Spaarnestad Onderwerpen, 1 Mei 1963. Inventarisnummer: 347032.
<http://hdl.handle.net/10648/c666dd39-65bd-490b-1bb2-2cded9285c9c>

Keterangan: Tampak Bendera Indonesia dikibarkan menggantikan bendera Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diturunkan oleh seorang tentara Pakistan (kiri).



Gambar 2.15. Dr. Djalal Abdoh (dengan topi di tangan) dan Dr. Soebandrio (berkacamata hitam) tengah menginspeksi satuan pasukan Papua yang rencananya akan segera menggantikan kedudukan pasukan UNTEA di Papua. Foto di atas diambil saat upacara serah-terima dari UNTEA kepada pihak Indonesia yang berlangsung pada 1 Mei 1963 di Kotabaru.

Sumber: *Fotocollectie Spaarnestad Onderwerpen*. <http://hdl.handle.net/10648/0fabe89e-1599-9cf5-4781-57a7e175471f>

membantu Pemerintah Indonesia untuk terus berpegang teguh pada poin-poin Perjanjian New York yang telah disepakati pada 15 Agustus 1962.⁶¹

Sekjen PBB, U Thant, juga berjanji akan mengupayakan dana untuk membiayai proyek-proyek dasar di wilayah tersebut. PBB juga berjanji untuk menyediakan para tenaga ahli sampai wilayah tersebut benar-benar mandiri. Dalam surat yang ditulisnya, ia mengemukakan:

“Dengan senang hati saja mengumumkan bahwa setelah mengadakan perembukan dengan pemerintah-pemerintah yang bersangkutan, saja memutuskan untuk mendirikan

61 “Dr. Djalal Abdoh: UNTEA Telah Tjapai Tudjuannya,” *Merdeka*, 3 Mei 1963.

suatu dana PBB bagi pembangunan Irian Barat, dan dana ini akan merupakan ‘dana gabungan’ dan terbuka bagi sokongan-sokongan oleh negara-negara anggota PBB dan badan-badan khusus.”⁶²

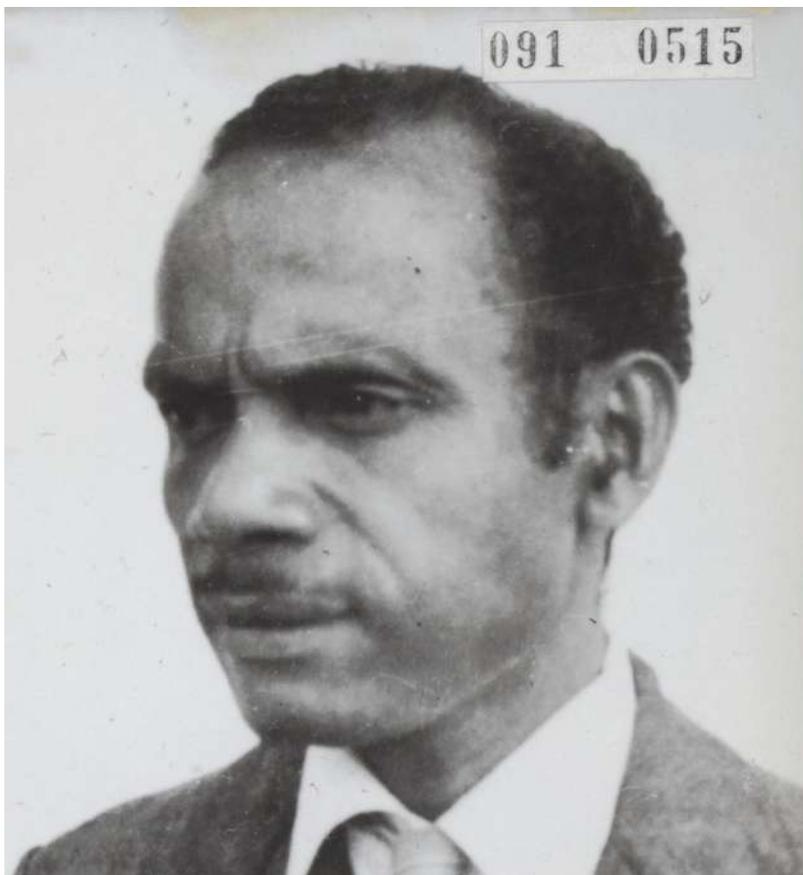
Setelah upacara serah terima kekuasaan, Radio Kotabaru mulai memutar lagu-lagu nasional setiap hari, sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan oleh Pemerintahan UNTEA. Untuk merayakan momen bersejarah ini, Toko Gunung Agung menggelar pesta dan pameran buku serentak selama seminggu di tiga daerah, yakni Kotabaru, Biak, dan Merauke. Selama satu minggu penuh, berbagai pertandingan olahraga akbar juga diadakan di Kotabaru. Pada kesempatan yang sama, bertempat di Gedung Negara Kotabaru—yang sebelumnya digunakan sebagai kediaman Gubernur Belanda dan Kepala UNTEA—dilaksanakan prosesi pelantikan Jan Eliezer Bonay sebagai Gubernur Irian Barat. Selain itu, di Kotabaru juga diselenggarakan rapat umum yang meriah untuk memeringati dan merayakan momen bersejarah tersebut.

Dalam prosesi pelantikan tersebut, Dr. Subandrio menyebut pemerintah RI di Papua memiliki tugas berat untuk “membebaskan rakjat Irian Barat dari kemelaratan dan kegelapan yang diwariskan oleh kolonialisme.” Baginya, hanya dengan cara itu rakyat Papua bisa mencapai taraf perkembangan yang sama dengan penduduk di wilayah Indonesia lainnya.

J.E. Bonay, sebagai pejabat Gubernur, berjanji untuk membangun Papua dalam berbagai aspek, baik secara moral maupun spiritual. Dalam menjalankan tugasnya, ia didampingi oleh Kolonel Pamudji selaku Wakil Gubernur. Pada 3 Mei 1963, J.E. Bonay resmi memimpin sidang perdana DPRGR di Papua yang dihadiri segenap Badan Pengurus Harian dan seluruh kepala dinas provinsi Irian Barat.⁶³

62 “Sekdjen PBB akan Dirikan Dana untuk Irian Barat,” *Merdeka*, 6 Mei 1963.

63 “Bebaskan Rakjat Irian Barat dari Kemelaratan dan Keggelapan,” *Merdeka*, 3 Mei



Gambar 2.16. J.E. Bonay, mantan pimpinan redaksi harian *Tjenderawasih* yang diangkat sebagai Gubernur pertama Irian Barat.

Sumber: Fotocollectie Elsevier Binnenland, 1 Mei 1963. Nummer toegang: 2.24.05.02. <http://hdl.handle.net/10648/ae20367a-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

Transfer kekuasaan tersebut juga dirayakan dengan penuh gegap gempita di Sorong. Bertempat di Lapangan Klademak III, dilakukan upacara pengibaran bendera Merah-Putih yang dihadiri

1963.

Kepala Perwakilan Pemerintah RI Cabang Sorong, Wakil Residen Manokwari selaku Koordinator Kepala Pemerintah Setempat, dan seorang pemuka masyarakat setempat. Dalam upacara tersebut dilakukan juga penghormatan terhadap 45 jenazah yang gugur di Sorong dan Teminabuan, selama peperangan dengan Belanda. Setelahnya, selama seminggu penuh diadakan Pasar Malam di dua lokasi berbeda, yakni Doom dan Klademak II.

Pada 4 Mei 1963, Presiden Sukarno untuk pertama kalinya menyampaikan pidato di Papua. Bertempat di Lapangan Imbi, Kotabaru, ia menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berjuang bagi Papua. Menurut Sukarno, “tanpa rakjat saja tidak dapat berbuat apa-apa, saja hanja penjambung lidah rakjat.”⁶⁴ Di samping itu, Sukarno juga menegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia kini telah membentang dari Sabang sampai Merauke.

Presiden Sukarno mengingatkan, meskipun Papua sudah kembali ke Indonesia perjuangan bangsa Indonesia masih belum tuntas. Masih ada tiga hal lagi yang harus diperjuangkan dalam kerangka revolusi Indonesia, yakni negara kesatuan yang kuat, masyarakat yang adil dan makmur, serta perdamaian dunia. Oleh karena itu, Sukarno mengingatkan, selama masih ada kolonialisme dan neokolonialisme perdamaian dunia tidak akan pernah tercapai.

Dalam kunjungan tersebut Sukarno juga menerima gelar “Maha Putera Irian Barat” yang diberikan oleh J.E Bonay mewakili seluruh penduduk Papua. Dalam kesempatan itu, Bonay menyatakan bahwa sesungguhnya Irian Barat merupakan bagian dari tanah air Indonesia dan rakyat Irian Barat adalah bagian dari bangsa Indonesia. Lebih jauh ia menambahkan: “Bahwa perjuangannya dan pembebasan Irian Barat dari tjengkeraman imperialisme dan kolonialisme ternjata berhasil berkat pimpinan

64 “Presiden Soekarno di Irian Barat,” *Merdeka*, 6 Mei 1963.

PJM Presiden Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.”⁶⁵

Dari Kotabaru, Sukarno kemudian langsung menuju Biak. Di hadapan kira-kira 10 ribu orang ia berorasi, menyampaikan kepada khalayak luas bahwa Irian Barat sejatinya telah menjadi bagian dari Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 1945. Namun, secara resmi, wilayah ini baru bergabung dengan Indonesia pada 1 Mei 1963.⁶⁶ Lebih jauh lagi, Sukarno menekankan, persoalan Papua merupakan ujian bagi revolusi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan Irian Barat bukan hanya menjadi masalah lokal semata, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia.⁶⁷

Euforia serah-terima tersebut juga dirayakan dengan penuh gegap gempita di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai pagelaran seni dan pesta rakyat pun dilaksanakan dengan cuma-cuma. Banyak toko di berbagai kota di Indonesia, khususnya Jakarta, yang mengadakan promo besar-besaran pada 1 Mei 1963 atau sekadar menutup dagangannya untuk satu hari. Intinya, mereka ingin turut berpartisipasi dalam momen bersejarah tersebut.

Mengingat situasi politik yang masih belum stabil di Papua pasca proses peralihan, pemerintah pun mengeluarkan Penetapan Presiden No. 8 Tahun 1963, yang membatasi aktivitas politik di Papua untuk sementara waktu. Salah satunya adalah larangan untuk melakukan segala bentuk kegiatan politik dengan cara mengadakan rapat, pertemuan, demonstrasi, penerbitan, pengumuman, dan lain sebagainya, tanpa izin dari Gubernur Kepala Daerah Irian Barat maupun pejabat yang ditunjuk. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenai hukuman

65 “Piagam Pemberian Gelar Maha Putera Irian Barat kepada Presiden Sukarno,” *Merdeka*, 6 Mei 1963.

66 “Komando Mandala Pembebasan Iriar Dibubarkan,” *Kedaulatan Rakjat*, 7 Mei 1963.

67 “Djarak Djakarta-Kotabaru Sama dengan Perdjalanana ke Hongkong,” *Warta Bhakti*, 6 Mei 1963.



Gambar 2.17. Iklan Rumah Makan “Tjahaja Kota” di Jakarta yang ditutup pada 1 Mei 1963 guna merayakan ‘kembalinya’ Papua ke Indonesia.

Sumber: *Merdeka*, 30 April 1963.

penjara selama-lamanya lima tahun. Larangan lainnya adalah membentuk sebuah partai atau cabang partai politik baru. Bagi pihak yang melanggar akan dikenai hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun.⁶⁸

68 “Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia,” *Arsip*

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia terus berupaya melunturkan pengaruh Belanda dengan jalan mengganti seluruh nama Belanda yang sebelumnya melekat pada berbagai wilayah maupun institusi yang ada di Papua, dengan nama Indonesia. Sebagai contoh, “Puncak Wilhelmina” (Wilhelmina Top) yang merupakan titik tertinggi di daratan Papua, diubah namanya menjadi “Puncak Trikora”. Begitu juga dengan “Puncak Juliana” (Juliana Top) yang diubah menjadi “Puncak Mandala”, “Puncak Carstensen” menjadi “Puncak Soekarno”, “Puncak Prins Hendrik” menjadi “Puncak Yamin”, dan “Puncak Oranje” menjadi “Puncak Djajawidjaja”. Perubahan nama tersebut dilakukan secara formal, dengan upacara peresmian yang dihadiri oleh Presiden Sukarno langsung. Perubahan nama ini juga dilakukan untuk toko-toko dan jalan-jalan yang sebelumnya masih menggunakan nama Belanda.⁶⁹

Pada 23 Agustus 1965, Wakil PM I/Menlu/Koordinator Urusan Irian Barat, Subandrio, secara resmi menghapus status pemerintahan ‘Karesidenan’ dalam provinsi Irian Barat dan menggantinya dengan status pemerintahan ‘Kabupaten Administratif.’ Itu berarti jabatan Residen selaku kepala pemerintahan Karesidenan juga resmi diubah menjadi Bupati. Upaya ini dilakukan dalam rangka penyeragaman bentuk susunan dan tata pemerintahan di Papua, dengan bentuk susunan dan tata pemerintahan seperti di wilayah Indonesia lainnya.⁷⁰

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 1965, diangkat juga tiga orang wakil dari Papua sebagai anggota baru DPRGR. Ketiga anggota tersebut masing-masing adalah Godlip Mirono, Else Ajamiseba, dan Tokoro Manapse. Dengan demikian, ada tujuh orang perwakilan Papua yang duduk dalam DPRGR.⁷¹

Bank Indonesia, Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia, No. 7/63/KEP/MUBS/, Jakarta, 23 April 1963.

69 “Puntjak Trikora dan Puntjak Soekarno,” *Merdeka*, 3 Mei 1963; “Puntjak Karstens djadi Puntjak Soekarno,” *Merdeka*, 6 Mei 1963.

70 “Status Irian Barat,” *Kompas*, 26 Agustus 1965.

71 “7 Orang Wakil Irbat dalam DPRGR,” *Kompas*, 18 November 1965.

Pada tanggal 14 Juli hingga 4 Agustus 1969, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) untuk memberikan kesempatan kepada penduduk Papua menentukan pilihan, antara menjadi negara merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Agenda ini merupakan bagian dari Perjanjian New York tahun 1962. Pelaksanaan PEPERA itu sendiri terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap pertama, dimulai pada 24 Maret 1969, di mana proses konsultasi dilakukan dengan dewan kabupaten mengenai tata cara penyelenggaraan PEPERA;
2. Tahap kedua, diselenggarakan pemilihan Dewan Musyawarah Papua yang berakhir pada bulan Juli 1969;
3. Tahap ketiga, pelaksanaan PEPERA yang dimulai dari kabupaten Merauke hingga berakhir di Jayapura pada 4 Agustus 1969

Pelaksanaan dari seluruh tahapan PEPERA tersebut disaksikan oleh perwakilan PBB, Australia, dan Belanda. Hasilnya kemudian dilaporkan bahwa 1.026 perwakilan masyarakat Papua menyatakan secara lisan memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Terlepas dari berbagai kontroversi yang mempertanyakan keabsahannya, PBB kemudian membawa hasil PEPERA ini ke Sidang Umum PBB, untuk diterima dan kemudian disahkan pada 19 November 1969.⁷²

Pasca penetapan hasil PEPERA tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian memberikan hak otonomi kepada Pemerintah Daerah Irian Barat. Hak otonomi itupun kemudian benar-benar dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Irian Barat. Sebagai contoh, di akhir 1969 seluruh jabatan strategis di Papua, mulai dari gubernur hingga bupati, dipegang oleh para putra dari Papua sendiri. Situasi ini tidak pernah terjadi sebelumnya,

72 Carmel Budiarto, Liem Soei Liong, *West Papua: The Obliteration of a People*, 3rd edition. (London: TAPOL, the Indonesian Human Rights Campaign, 1988), hlm. 24-26.

terutama ketika masa penjajahan Belanda.⁷³ Pada 16 Maret 1970, Gubernur Irian Barat, Frans Kaisiepo, melantik para Bupati dari sembilan daerah Kabupaten di Irian Barat, yakni Jayapura, Teluk Cenderawasih, Manokwari, Sorong, Fakfak, Merauke, Jayawijaya, Paniai, dan Yapen-Warokan.⁷⁴

Terhitung sejak 1 Maret 1973, nama “Irian Barat” pun diubah menjadi “Irian Jaya.” Perubahan nama ini diumumkan langsung oleh Presiden Soeharto, sesaat sebelum ia meresmikan tambang tembaga “Freeport” di Pegunungan Jayawijaya pada 3 Maret 1973. Perubahan itu didasarkan pada keputusan DPRD Provinsi Irian Barat Nomor 1/DPRD/1973 tanggal 28 Februari 1973, yang kemudian diusulkan ke Pemerintah Pusat dan kemudian disepakati. Meskipun demikian, dalam penyebutan sehari-hari tetap dapat dipergunakan nama ‘Irian.’⁷⁵

Demikianlah gambaran umum perkembangan politik penting yang terjadi baik di Papua sendiri maupun di luar Papua, namun berdampak pada status Papua secara keseluruhan. Perkembangan politik tersebut, tentunya juga berdampak pada kondisi perekonomian di Papua. Sejauhmana perkembangan politik tersebut berkaitan atau berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Papua akan dijelaskan secara lebih mendalam di Bab berikutnya. §

73 “Seluruh Djabatan Penting Irian Barat Sudah Dipegang Putera Irbar,” *Kompas*, 17 November 1969.

74 “9 Kabupaten Irian Barat Berotonomi Penuh,” *Kompas*, 25 Maret 1970.

75 “Irian Jaya,” *Kompas*, 5 Maret 1973.

DARI PERJANJIAN NEW YORK HINGGA PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA)

Perjanjian New York atau *New York Agreement* merupakan kesepakatan penting yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, dengan mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perjanjian ini menjadi tonggak sejarah dalam penyelesaian konflik mengenai status wilayah Papua (saat itu dikenal sebagai Irian Barat) yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda pasca pengakuan kedaulatan pada 1949.

Latar belakang dari perjanjian ini tidak bisa dilepaskan dari sengketa berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda mengenai status Papua. Sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Belanda bersikeras memperta-

hankan Papua dengan alasan “mempersiapkan penduduk asli untuk kemerdekaan,” sementara Indonesia menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian integral dari bekas Hindia Belanda dan karenanya harus masuk ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Ketegangan terus meningkat sepanjang 1950-an hingga awal 1960-an. Di satu sisi, muncul ancaman konfrontasi politik dan militer dari pihak Indonesia yang dipimpin Presiden Sukarno melalui kampanye *Trikora* (Tiga Komando Rakyat). Sementara di sisi lain, Belanda mulai mempersiapkan kemerdekaan Papua secara terpisah dari Indonesia, dengan membentuk dewan perwakilan lokal yang disebut *Nieuw Guinea*

Raad (Dewan Nugini).

Dalam upaya menghindari perang terbuka, terutama di tengah situasi Perang Dingin dan tekanan internasional, PBB melalui utusan khusus Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, memfasilitasi perundingan antara kedua pihak. Keterlibatan AS ditengarai tidak terlepas dari kekhawatiran terhadap meningkatnya pengaruh blok komunis di Indonesia. Perundingan alot yang berlangsung antara Indonesia dan Belanda kemudian berujung pada ditandatanganinya Perjanjian New York.

Perjanjian New York berisi sejumlah poin penting yang mengatur transisi kekuasaan atas Papua dari Belanda ke Indonesia melalui lembaga sementara PBB, UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*). Dalam perjanjian tersebut diterangkan bahwa mulai 1 Oktober 1962, Belanda akan menyerahkan kendali administratif Papua kepada UNTEA. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan sementara di Papua sampai penyerahan ke Indonesia pada 1 Mei 1963.

Poin penting lainnya adalah ketentuan bagi Indonesia untuk menyelenggarakan *Penentuan Pendapat Rakyat* (Pepera/ *Act of Free Choice*) paling lambat pada tahun 1969, guna memberikan

kesempatan kepada rakyat Papua dalam menentukan masa depan mereka: tetap menjadi bagian Indonesia atau merdeka. Pelaksanaan ini harus dilakukan dengan jaminan kebebasan politik dan diawasi oleh perwakilan Sekretaris Jenderal PBB.

Penyelenggaraan Pepera kemudian menuai kritik karena dilaksanakan melalui sistem musyawarah terbatas dan bukan pemungutan suara langsung. Alih-alih melakukan referendum satu orang satu suara, Indonesia memilih metode musyawarah melalui 1.026 tokoh terpilih (dari populasi sekitar 800.000 orang), yang secara bulat menyatakan bergabung dengan Indonesia. Banyak kalangan mengkritik metode ini sebagai tidak demokratis dan berada di bawah tekanan militer.

Meski PBB menerima laporan pelaksanaan tersebut dan mencatat hasilnya dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV), banyak organisasi internasional dan masyarakat sipil menganggap bahwa proses tersebut cacat secara prosedural dan moral. Kritik terhadap Pepera terus bergema hingga saat ini, menjadi dasar bagi berbagai kelompok di Papua untuk menuntut kemerdekaan. Mereka menganggap perjanjian ini sebagai ha-

sil kompromi politik global yang tidak melibatkan suara asli penduduk Papua secara sah.

Namun demikian, tetap tidak dapat dimungkiri bagaimana Perjanjian New York menjadi salah satu peristiwa diplomatik paling signifikan dalam sejarah pasca-kolonial Asia Tenggara, di mana kekuatan internasional, diplomasi multilateral, dan tekanan geopolitik. Berbagai komponen tersebut kemudian menjadi dasar legal transisi kekuasaan atas Papua dari Belanda ke Indonesia di mata hukum internasional, sekaligus menentukan arah sejarah wilayah tersebut.

Referensi

Drooglever, Pieter. *An Act of Free Choice: Decolonization and the Right to Self-Determination in West Papua*. Oxford: Oneworld Publications, 2009.

Penders, C.L.M. *The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia 1945-1962*. University of Queensland Press, 2002.

Saltford, John. *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal*. London: Routledge Curzon, 2003.

Subandrio. *Laporan Menteri Luar Negeri RI tentang Persetujuan New York*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 1962.



Gambar 2.18. Dua buah foto yang menampilkan suasana persidangan Dewan Keamanan PBB di New York terkait dengan sengketa Papua. Foto pertama menunjukkan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Soebandrio. Di sebelah kirinya tampak A.S. Sall (Duta Besar India) dan di belakangnya tampak juga Ali Sastroamidjojo. Foto kedua menampilkan delegasi Belanda yang diwakili oleh Schürmann dan juga Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Marie Antoine Hubert Luns (duduk di sebelah kanan baris ketiga). Foto di atas diambil pada 21 November 1957.

Sumber: *Fotocollectie Spaarnestad Onderwerpen*. <http://hdl.handle.net/10648/5084879e-808b-e896-d8d0-bd884514d4c1>

BAB III

PERKEMBANGAN EKONOMI PAPUA HINGGA PERIODE TRANSISI, 1950-AN - 1960-AN

Sebelum membahas kemunculan Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) di Papua, penting untuk terlebih dahulu memahami situasi geografis dan kondisi ekonomi Papua secara umum, khususnya pada periode 1950-an dan 1960-an. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat keunikan wilayah Papua yang membuat pengelolaan ekonominya berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Selain itu, bab ini juga menyajikan pembahasan tentang latar belakang lokasi-lokasi yang dipilih untuk mendirikan lima KCBI. Lokasi KCBI, yang umumnya dipilih berdasarkan potensi strategis dan ekonomi lokal, mencerminkan kebijakan pemerintah dalam menghadirkan layanan keuangan serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif di Papua. Pada akhirnya,

kelima KCBI ini memainkan peran penting sebagai katalisator dalam mengintegrasikan Papua ke dalam sistem ekonomi nasional.

A. Perkembangan Demografis dan Struktur Ekonomi Papua

Papua merupakan salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk terendah di Indonesia, dengan rata-rata kurang dari 2 orang per kilometer persegi pada tahun 1961. Pada tahun 1971, hanya 13 persen penduduk Papua yang tercatat tinggal di kawasan perkotaan, angka yang lebih rendah dibandingkan rata-rata wilayah lainnya, yakni sebesar 15 persen. Beberapa kota utama di Papua seperti Jayapura, Sorong, Nabire, dan kawasan tambang tembaga di Kokonau mengalami pertumbuhan pesat lantaran didorong oleh migrasi dari luar Papua, terutama dari kawasan Jawa, Sulawesi, dan Maluku.¹

Distribusi penduduk Papua mencerminkan kondisi geografis dan sosial yang khas dari wilayah ini. Papua dikelilingi begitu banyak pegunungan tinggi dan lembah, menjadikan wilayah ini terisolasi dan sulit diakses. Hal ini berimbas pada pola pemukiman di sana. Masyarakat cenderung menetap di sekitaran dataran tinggi, lembah sungai, dan pesisir karena akses dan tanahnya yang lebih subur.

Kawasan dataran tinggi, terutama Kabupaten Jayawijaya dan Paniai, bersama pulau-pulau Biak dan Numfor, merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi, mencakup hampir 40 persen populasi Papua. Wilayah pesisir seperti Jayapura, Sorong, dan Manokwari juga memiliki jumlah penduduk yang signifikan berkat kemudahan akses terhadap infrastruktur dan aktivitas ekonomi modern. Sebaliknya, hingga tahun 1960-an, daerah rawa di selatan dan pegunungan di wilayah tengah sebagian besar tetap

1 Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 8, (1972), hlm. 35-37.

jarang dihuni dan tidak terjangkau oleh administrasi kolonial, sehingga sistem ekonomi tradisional tetap dipertahankan.²

Dengan luas wilayah mencapai 41,6 juta hektar, Pemerintah Papua dihadapkan pada tantangan geografis yang luar biasa. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya sekitar 800 ribu hektar yang pernah ditinjau atau dieksplorasi. Kondisi ini membuat upaya pengembangan ekonomi di Papua menjadi tugas yang sangat berat, mengingat keterbatasan akses dan minimnya infrastruktur pendukung.³

Hingga tahun 1959, jumlah pasti penduduk Papua tidak pernah diketahui pasti. Meskipun terdapat berbagai estimasi, populasi wilayah ini diperkirakan berkisar antara 600 ribu hingga satu juta jiwa. Pada tahun tersebut, pemerintah Belanda sempat melaksanakan sensus untuk menghitung jumlah penduduk secara lebih akurat. Namun, hasil sensus tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pasca peralihan kekuasaan dari UNTEA. Sebaliknya, data tersebut diterbitkan secara sepihak oleh pemerintah Belanda antara tahun 1964 hingga 1967, dalam sebuah karya berjudul *Resultaten van het Demografisch Onderzoek: Westelijk Nieuw Guinea* (Hasil Penelitian Demografis: Papua Barat). Buku ini terdiri dari enam jilid dan ditulis oleh Dirk J. van de Kaa dan K. Groenewegen dengan sponsor dari pemerintah Belanda.⁴

Berdasarkan publikasi tersebut, jumlah penduduk Papua

2 Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," hlm. 35-37.

3 "Djarak Djakarta-Kotabaru Sama dengan Perdjalananan ke Hongkong," *Warta Bhakti*, 6 Mei 1963.

4 Keenam buku tersebut diterbitkan di The Hague (Den Haag) oleh Government Printing and Publishing Office. Masing-masing jilid dari buku ini memiliki tema berbeda, seperti *Nieuw-Guinea als Gebied voor Demografische Onderzoekingen* (Papua sebagai Wilayah Penelitian Geografis, Jilid I, 1964); *Methoden en Opnamegebieden* (Metode dan Wilayah Pengumpulan Data, Jilid II, 1965); *Tabellen* (Tabel-tabel, Jilid III, 1965); *De Papoea Bevolking van de Opnamegebieden* (Penduduk Papua di Wilayah Pengumpulan Data, Jilid V, 1967); *De Progenituur van Papoea Vrouwen* (Keturunan dari Perempuan Papua, Jilid VI, 1967).

pada tahun 1959 ternyata hanya sekitar 500 ribu jiwa, jauh di bawah estimasi sebelumnya. Konsentrasi penduduk terbesar ditemukan di wilayah selatan Papua, kawasan barat Kepala Burung (Cenderawasih) beserta pulau-pulaunya, daerah Pegunungan Tengah, serta area di sekitar Danau Sentani.⁵

Menjelang pertengahan tahun 1960, jumlah populasi di Papua diperkirakan mencapai sekitar 700 ribu jiwa, termasuk di dalamnya 35 ribu penduduk asing. Dari total populasi tersebut, sebanyak 462 ribu orang telah tercatat dalam sistem administrasi resmi. Sementara itu, sekitar 54 ribu penduduk diketahui terlibat dalam sektor ekonomi modern pada periode tersebut.⁶

Berdasarkan hasil riset lapangannya pada tahun 1960-an, Koentjaraningrat, seorang antropolog terkemuka dari Universitas Indonesia, menggambarkan kondisi wilayah Papua pada tahun 1950-an sebagai daerah yang masih sangat jarang penduduk. Ia menerangkan, bila jumlah penduduk Papua diasumsikan sebanyak satu juta jiwa dan tersebar merata di seluruh wilayah, maka setiap satu kilometer persegi hanya akan dihuni oleh tidak lebih dari tiga orang.⁷

Pada tahun 1955, hanya ada beberapa kota di Papua yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa, di antaranya Kotabaru, Sorong, Biak, Merauke, Fakfak, dan Serui. Sementara itu, di Belanda jumlah penduduk pada tahun 1958 tercatat sekitar 11 juta jiwa. Dengan luas wilayah yang jauh lebih kecil dibandingkan Papua, kepadatan penduduk di Belanda mencapai rata-rata 341 orang per kilometer persegi, memberikan kontras yang signifikan dengan kondisi demografis Papua pada masa itu. Sebagai perbandingan tambahan, pada tahun 1930, wilayah-wilayah di

5 "Pembangunan Sektor Sosial-Budaja di Irian Barat," *Kompas*, 8 September 1969.

6 "Speech Held at the Opening Reception of the Bank Indonesia Branch in Kotabaru by the Deputy Governor of Bank Indonesia, Dr. Soerjadi," Lampiran Surat KB No. 10 tanggal 13 Desember 1962 dari Kotabaru, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 13 Desember 1962.

7 Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar, *Penduduk Irian Barat*, hlm. 97.

Pulau Jawa sudah dihuni oleh lebih dari 40 juta jiwa (310 orang per satu kilometer persegi).⁸

Tabel 3.1. Perbandingan Populasi Beberapa Kabupaten di Papua tahun 1961 dan 1971

Kabupaten	Populasi 1961 ('000)	Populasi 1971 ('000)	Jumlah Orang per km ² (1971)	% Populasi di Kota Utama (1961)	% Populasi di Kota Utama (1971)
Jayapura	64	95	2.0	23	37
Teluk Cenderawasih	44	57	14.2	24	42
Yapen Waropen	38	43	2.3	-	-
Manokwari	54	56	1.5	21	30
Sorong	70	93	2.3	8	21
Fakfak	33	45	1.6	-	-
Merauke	140	140	1.1	4	7
Jayawijaya	193	167	3.0	-	-
Paniai	110	141	3.5	-	-
TOTAL	746	837	2.0	-	-

Sumber: Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 8:3, hlm. 37.

Dari riset yang ia lakukan, Koentjaraningrat juga sempat mengklasifikasikan masyarakat Papua ke dalam tiga kategori utama. Pembabakan ini dilakukan berdasarkan area di mana mereka bermukim, yakni:⁹

Penduduk desa yang bermukim di hilir dan muara sungai. Biasanya hidup dalam rumah-rumah kecil dengan keluarga yang terdiri atas empat sampai lima individu. Mereka umumnya hidup dalam rumah-rumah kecil bersama keluarga kecil yang terdiri dari empat hingga lima orang. Kehidupan mereka sebagian besar

8 Cornelis Lekkerkerker, *Land en Volk van Java*. (Batavia: Wolters, 1938), hlm. 195.

9 "Pembangunan Sektor Sosial-Budaja di Irian Barat," *Kompas*, 8 September 1969.

bergantung pada aktivitas meramu sagu, yang tumbuh liar di sekitar rawa-rawa, serta menangkap ikan. Sebagian kecil dari mereka juga melengkapi mata pencaharian dengan berburu dan berkebun.

Penduduk desa yang tinggal di bagian pedalaman, khususnya di daerah hulu sungai. Mereka umumnya menetap dalam rumah-rumah besar bersama keluarga yang terdiri dari sepuluh hingga lima belas individu. Kehidupan mereka bergantung pada aktivitas meramu sagu yang dilakukan dalam kelompok-kelompok kerja kecil. Selain itu, mereka juga memanfaatkan perkebunan dan sumber daya sungai untuk memenuhi kebutuhan tambahan. Di beberapa wilayah pedalaman, perusahaan Belanda telah mulai mempekerjakan penduduk setempat sebagai tenaga buruh, terutama untuk mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti damar.

Penduduk yang tinggal di lembah-lembah Pegunungan Tengah. Mereka umumnya hidup dalam rumah-rumah besar bersama keluarga yang terhubung melalui jaringan klan, gabungan klan, dan federasi desa yang kompleks. Mayoritas penduduknya bertani dengan cara membuka ladang baru melalui proses tebang dan bakar hutan. Ladang-ladang tersebut kemudian ditanami ubi jalar, ubi manis, keladi, dan tanaman lain yang tidak memerlukan pengolahan tanah maupun irigasi. Ketika tanah mulai kehilangan kesuburannya, mereka akan berpindah ke lokasi lain untuk membuka ladang baru. Tidak seperti di daerah lain, makanan pokok mereka bukanlah sagu, melainkan ubi dan keladi.

Perubahan sosial dan ekonomi di Papua semakin menguat seiring dengan meningkatnya interaksi dengan dunia luar, khususnya melalui masuknya tenaga kerja asing dan pengenalan sistem kerja modern. Sistem gotong royong dan struktur komunal tradisional ini pun mulai bergeser dengan diperkenalkannya pekerjaan berupah, terutama di wilayah perkotaan. Memasuki akhir tahun 1949, banyak orang Belanda dan Eropa yang datang ke Papua untuk terlibat dalam berbagai proyek, termasuk

administrasi, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Jumlah mereka pun meningkat tajam dari 1.000 menjadi 8.500 jiwa.¹⁰

Para penduduk lokal mulai dipekerjakan dalam perkebunan dan proyek infrastruktur yang dikelola oleh pihak Belanda, meskipun sering kali dengan upah yang sangat minim. Dalam situasi ini, pendidikan yang diperkenalkan oleh misionaris Kristen memainkan peran penting dalam membuka akses masyarakat lokal ke sistem ekonomi modern. Namun demikian, program pendidikan ini umumnya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu dan belum mampu menjangkau daerah pedalaman Papua secara menyeluruh.

Berbagai kontak yang tercipta melalui proses pasifikasi dan Kristenisasi membawa perubahan besar dalam pola hidup masyarakat asli Papua. Keamanan dan ketertiban (*rust en orde*), yang menjadi fokus propaganda pemerintah kolonial, mulai terwujud. Pola permukiman pun berubah, dengan rumah-rumah yang mulai berderet mengelilingi lapangan desa, yang sering digunakan untuk aktivitas seperti bermain bola. Selain itu, masuknya pakaian bergaya Barat dan konsumsi beras perlahan mengubah kebiasaan serta gaya hidup penduduk Papua. Jan Boelaars menggambarkan perubahan tersebut dengan cukup detail dalam bukunya yang berjudul *Manusia Irian*:

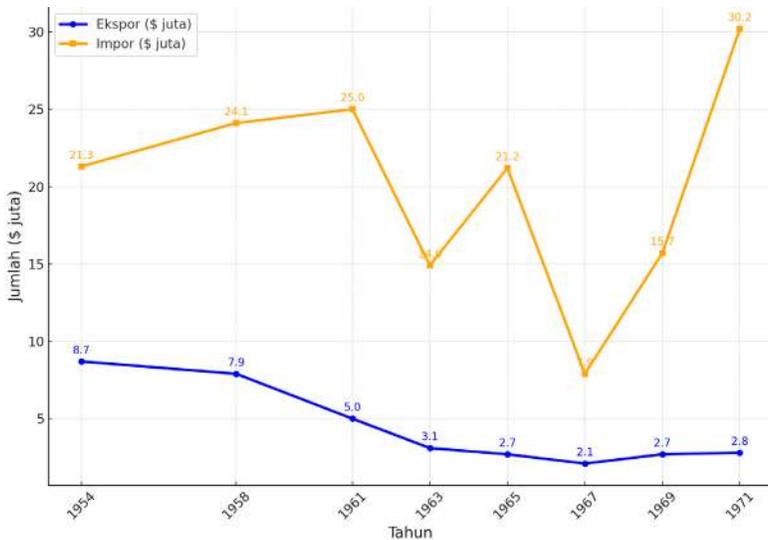
“Anak-anak sekolah membentuk orkes suling dan membuat kebun-kebun; perayaan bersemangat pesta-pesta sipil dan gerejani diselenggarakan dengan tari-tarian adat dalam bentuk yang lebih berdisiplin dan menambahkan nyanyian-nyanyian baru dan perlombaan-perlombaan dengan hadiah.”¹¹

Kehadiran teknologi baru, seperti alat pertanian berbahan logam, membawa dampak positif dengan meningkatkan efisiensi

10 A. Lijphart, *The Trauma of Decolonization*. (New Haven and London: Yale University Press, 1966), hlm. 55.

11 Jan Boelaars, *Manusia Irian* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 163.

kerja dan produktivitas masyarakat Papua. Namun, di sisi lain, interaksi ini turut menciptakan ketergantungan yang semakin besar terhadap barang-barang impor, sehingga melemahkan kemandirian ekonomi lokal. Kondisi ini diperparah oleh minimnya infrastruktur lokal, keterbatasan teknologi, serta kurangnya kapasitas produksi domestik yang memadai, yang membuat sebagian besar kebutuhan dasar, seperti bahan pangan, pakaian, dan barang konsumsi lainnya, harus didatangkan dari luar Papua. Ketergantungan ini membuat perekonomian Papua rentan terhadap fluktuasi harga, kendala logistik, dan ketidakpastian pasokan dari daerah atau negara lain, sehingga memperlambat pembangunan ekonomi lokal.



Grafik 3.1. Perbandingan Ekspor dan Impor Papua, 1954-1971

Sumber: Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, (1972), 8:3, hlm. 40.

Di sisi lain, keterbatasan dalam sistem ekonomi kolonial semakin menegaskan ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli Papua. Mereka jarang diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun administrasi, yang didominasi oleh tenaga kerja Belanda atau imigran Eropa lainnya. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alam, hasil kekayaan ini tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Sebaliknya, keuntungan dari ekspor hasil bumi lebih banyak dialirkan kembali ke pusat kolonial di Belanda, menimbulkan ketergantungan pada ekonomi subsidi yang tidak memberdayakan masyarakat Papua secara mandiri. Situasi ini mencerminkan ketimpangan struktural yang melekat dalam sistem kolonial pada masa itu.

Koentjaraningrat pun mengingatkan, untuk bisa memahami keunikan karakteristik masyarakat Papua, pemerintah pusat sebaiknya tidak menerapkan ‘standar ala Jakarta’ dalam mendekati penduduk asli Papua. Pendekatan yang bersifat paternalistis harus dihindari, termasuk pandangan bahwa budaya Papua dianggap ‘primitif’ dan perlu ‘diadabkan’. Sebaliknya, pendekatan yang menghormati dan memahami nilai-nilai lokal lebih diutamakan untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Ia mengkhawatirkan bila pemerintah Indonesia hanya akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang pernah dilakukan pemerintah kolonial Belanda dalam mendekati penduduk Papua. Berikut pernyataannya seperti dilansir oleh *Kompas*:

“Dalam hal usaha memajukan penduduk Irian Barat, sebaiknya dihindari sikap paternalistis, kalau kita tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu dibuat oleh pendjadjah terhadap kita. Sebaiknja dihindari djuga sikap jang berpangkal kepada pendirian bahwa kita lebih tinggi dari mereka, bahkan kalau bisa sebaiknya dihindarilah istilah ‘mengsivilisasi,’ tetapi memakai misalnja pembangunan sektor sosial-budaja...Djuga djangan mentjoba untuk mempengaruhi orang Irian itu dengan membuat

mereka kagum terhadap kita dengan upatjara-upatjara jang serba hebat dan megah. Orang Irian adalah orang praktis, dan di belakang kita, mereka terbukti sering menertawakan *grandeur* jang biasanja kita sukai itu.”¹²

Dalam struktur ekonomi, sebagian besar penduduk Papua masih bergantung pada kegiatan tradisional subsisten, seperti pertanian ladang, berburu, dan meramu. Sistem barter juga masih berlaku di beberapa daerah pedalaman yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan ekonomi pasar. Pola ekonomi ini terutama terlihat di wilayah pedalaman, di mana penduduk mengandalkan sumber daya lokal seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian ladang. Komoditas utama yang menjadi makanan pokok meliputi sagu, ubi, pisang, dan ikan.¹³

Tabel 3.2. Jenis Komoditas Ekspor Papua Berdasarkan Volume, 1951 – 1971

Komoditas	Volume (dalam ton)				
	1951-52	1960-61	1966	1969	1971
Kopra	3385	5428	4374	2112	1834
Pala	184	392	424	517	357
Bunga Pala	43	111	99	151	100
Kulit Buaya	47	-	52	49	-
Getah Damar	327	564	36	27	26
Kayu Gelondongan (dalam kubik meter)	61	13000	2400	20700	5433
Udang	-	-	-	-	642
Minyak	259	208	70	79	71

Sumber: Ross Garnaut & Chris Manning, “An Economic Survey of West Irian. Part I,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, (1972), 8:3, hlm. 41.

- 12 “Pembangunan Sektor Sosial-Budaja di Irian Barat,” *Kompas*, 8 September 1969.
 13 D. Hart, *Melanesia: A Geographical Interpretation of an Island World*. (London: Methuen, 1971).



Gambar 3.1. Transaksi penjualan kopra di Papua yang dilakukan di atas geladak kapal Cycloop. Foto di atas diambil pada Desember 1953.

Sumber: *Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea*. <http://hdl.handle.net/10648/ae39db0c-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

Di sisi lain, ekonomi modern mulai berkembang, ditandai dengan kontribusi ekspor komoditas desa seperti kopra, kayu, dan kulit buaya terhadap pendapatan lokal. Di perkotaan seperti Jayapura dan Sorong, aktivitas ekonomi menjadi lebih terorganisir dengan hadirnya koperasi, pasar, dan institusi perbankan.¹⁴

Koperasi di Papua pun semakin berkembang dan memainkan peran sentral menjelang penyerahan kedaulatan dari UNTEA ke pemerintah Indonesia. Setelah dua kali mengadakan pertemuan pada tanggal 24 dan 29 Maret 1963, sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Primer Gotong Rojong atau yang disingkat

14 Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," hlm. 56.

“Kosgoro”, pun resmi didirikan di Kotabaru. Hampir seluruh pengurus koperasi ini merupakan mantan veteran yang pernah terlibat dalam perjuangan bersenjata antara tahun 1945–1949. Mereka terdiri dari: Taslim Oemar (Ketua), Kapten S. Pugu (Sekretaris), Kolonel Sudharta, Jaksa Tinggi Sutrisno Hamidjojo, dan Komisar Besar Polisi drs. Sabar (Penasihat). Koperasi ini beralamat di Zeezicht 7293 dan berfungsi untuk mengadakan simpanan wajib selain juga menghidupi berbagai industri kecil di Papua.¹⁵

Dari segi akses, transportasi udara yang tersedia Papua memang belum cukup optimal, terutama jika dibandingkan dengan rute domestik lainnya di Indonesia. Penerbangan dari Jakarta ke Biak misalnya, bila ditempuh dengan pesawat *Electra* diperkirakan akan memakan waktu sekitar enam jam. Sementara penerbangan dari Jakarta ke Kotabaru sekurang-kurangnya membutuhkan waktu delapan jam. Waktu tempuh ini bahkan bisa jauh lebih panjang bila penerbangan dilakukan dengan pesawat kecil tipe Convair atau Dakota. Perbandingan ini pernah diangkat oleh harian *Warta Bhakti*, yang menyebutkan bahwa perjalanan dari Jakarta ke Kotabaru sama panjangnya dengan perjalanan ke Hong Kong.¹⁶

Kapal laut dilaporkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, mobil juga tidak bisa diandalkan sebagai sarana penghubung antardaerah, mengingat jalan-jalan yang belum banyak dibuka. Biak, yang dikenal sebagai pusat aktivitas penerbangan, hanya memiliki tiga pesawat terbang, dan itu pun sering kali tidak dapat digunakan. Kabut tebal atau kendala ketersediaan bahan bakar menjadi hambatan utama dalam operasional transportasi udara.¹⁷

15 “Pembentukan Koperasi Primer Kosgoro,” *Tjenderawasih*, 30 Maret 1963.

16 “Djarak Djakarta-Kotabaru Sama dengan Perdjalan ke Hongkong,” *Warta Bhakti*, 6 Mei 1963.

17 “Pertjakapan tentang Irian Barat,” *Kompas*, 9 Mei 1966.

Terlepas dari berbagai kendala di atas, tetap saja Papua memiliki posisi penting bagi pihak Indonesia maupun Belanda. Dari segi geopolitik, penguasaan atas Papua dapat memperkuat posisi masing-masing negara di kawasan Asia Pasifik. Apalagi Belanda juga baru saja kehilangan ‘Hindia Belanda,’ bekas koloninya yang paling berharga. Dari aspek ekonomi, Papua juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan, tambang, hingga perikanan, seluruhnya masih begitu potensial untuk dikembangkan. Menimbang berbagai faktor itulah, masing-masing negara pun berupaya melancarkan klaimnya atas wilayah ini.

B. Deklarasi Ekonomi, Peleton Bank dan Konsekuensinya bagi Papua

Pada akhir dekade 1950-an hingga awal 1960-an, Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan berat di sektor ekonomi, terutama dalam hal defisit keuangan dan inflasi. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan strategis, seperti melakukan devaluasi pada tahun 1959, merasionalisasi pajak dan memberlakukan biaya tambahan untuk kegiatan ekspor dan impor pada tahun 1960, hingga meluncurkan “Deklarasi Ekonomi” (Dekon) pada tahun 1963.¹⁸

Melalui Dekon, Pemerintah Indonesia memperlakukan visi baru untuk membangun sistem ekonomi yang demokratis, berorientasi pada kepentingan rakyat, dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan negara. Dalam pidatonya yang bertajuk “Deklarasi Ekonomi” pada 28 Maret 1963, Presiden Sukarno menegaskan bahwa dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi umum Revolusi Indonesia dan

18 Anne Booth, *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. (London: Macmillan, 1998), hlm. 169

Manifesto Politik. Bila merujuk pada strategi tersebut, tahapan pertama yang ditekankan adalah menciptakan susunan ekonomi nasional dan demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme. Selanjutnya, adalah tahapan ekonomi sosialis Indonesia, yakni ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*). Melalui sistem ini, setiap orang akan dijamin pekerjaan dan kebutuhan dasarnya. Sukarno menyebut, “susunan ekonomi jang demikian inilah jang harus mendjadi tudjuan segenap kegiatan ekonomi kita, jang harus mendjadi tudjuan tiap-tiap putera Indonesia”.¹⁹

Guna mewujudkan impian tersebut secara berkesinambungan, potensi pemerintah, koperasi, dan swasta harus terus dikembangkan dan berjalan beriringan. Produksi berdasarkan kekayaan alam harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan juga harus diberdayakan untuk kebutuhan masyarakat luas.

Bila pada tahun 1950-an aktivitas di berbagai sektor ekonomi di Indonesia masih dikuasai oleh bangsa asing, maka satu dekade berselang, sekitar 80 persen di antaranya sudah berada di tangan bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia juga sudah mulai secara aktif menyusun aktivitas ekonominya secara konseptual dan terstruktur, di mana Papua diproyeksikan akan memainkan peranan sentral di dalamnya.²⁰

Menariknya, menjelang diumumkannya Deklarasi Ekonomi, banyak pedagang di Pasar Baru, Pintu Besi, dan pusat perdagangan lainnya di Jakarta, merasa gelisah dengan berbagai desas-desus yang beredar. Sjurman Dipawidjaja, wartawan harian *Merdeka* yang meninjau langsung di lapangan, mengemukakan bahwa banyak orang berduit yang merasa panik dengan tindakan moneter yang akan diambil. Ketakutan terbesar mereka adalah dikeluarkannya uang baru yang dikhawatirkan akan menurunkan nilai uang

19 “Deklarasi Ekonomi (I),” *Merdeka*, 30 Maret 1963.

20 “Deklarasi Ekonomi (I),” *Merdeka*, 30 Maret 1963.

lama dan mengacaukan kondisi pasar. Beredar juga rumor bahwa uang pecahan ribuan akan merosot drastis nilainya, dan situasi tersebut mendorong banyak orang untuk menukarkan uangnya dengan pecahan yang lebih kecil. Kondisi tersebut juga mendorong mereka untuk membelanjakan uangnya dalam bentuk barang. Para pedagang pun menjadi sangat berhati-hati dalam mengeluarkan stok yang mereka miliki, menjadikan harganya melambung tinggi.²¹

Namun sesudah Dekon diumumkan, ketakutan tersebut ternyata tidak terbukti. Situasi pun berangsur-angsur kembali normal. Orang-orang berduit yang sudah membelanjakan sebagian uangnya sehari sebelum Deklarasi, memutuskan untuk menahan uangnya. Para pedagang pun kembali menjual barangnya dengan harga normal. Intinya, Sjurman menganggap Dekon justru memberi harapan bagi sebagian besar masyarakat lantaran adanya upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sandang, pangan, dan papan yang kala itu memang menjadi persoalan serius di Indonesia.²²

Spirit Dekon ini terus-menerus digaungkan oleh Sukarno dalam perebutan Papua dengan Belanda. Sepanjang masa ekonomi terpimpin (1959-1966) Presiden Sukarno berupaya menempatkan pembangunan ekonomi dalam narasi besar perjuangan revolusioner bangsa. Ia menyerukan agar seluruh unsur negara dan masyarakat, termasuk lembaga keuangan, menjadi bagian integral dari usahanya untuk menggapai cita-cita revolusi nasional. Dalam kerangka inilah, Bank Indonesia dan lembaga perbankan lainnya tidak lagi dipandang sekadar sebagai institusi yang mengatur stabilitas moneter dan peredaran uang, melainkan juga sebagai “alat revolusi” yang berperan aktif dalam menciptakan transformasi sosial dan ekonomi. Bank Indonesia tidak lagi berfungsi hanya sebagai pengatur neraca keuangan,

21 “Jang Punja Duit pada Panik,” *Merdeka*, 30 Maret 1963.

22 “Jang Punja Duit pada Panik,” *Merdeka*, 30 Maret 1963.

melainkan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, hingga dapat menyentuh lapisan masyarakat terbawah.

Memasuki tahun 1961, pemerintah Indonesia mulai menjalankan Rencana Pembangunan Nasional 1961–1968, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memulihkan stabilitas politik dan hukum, serta melanjutkan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme, khususnya dalam upaya mengembalikan Papua ke pangkuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Tiga Pilar, yang mencakup tiga aspek utama, yaitu penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat seperti pangan dan sandang, pemulihan ketertiban hukum dan keamanan nasional, serta perjuangan melawan pengaruh ekonomi dan politik asing. Program ini menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah pada awal 1960-an.

Periode awal 1960-an ini menjadi fase penuh tantangan bagi pemerintah Indonesia, baik dari segi ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Seiring dengan upaya memulihkan stabilitas nasional, pengeluaran negara pada tahun 1961 meningkat drastis, terutama akibat langkah-langkah pemulihan pasca-pemberontakan yang dilakukan oleh berbagai kelompok separatis, seperti PRRI, Permesta, dan DI/TII. Upaya pemulihan ketertiban ini memerlukan alokasi anggaran yang besar, sehingga pengeluaran untuk angkatan bersenjata mencapai sekitar 35% dari total anggaran negara. Selain itu, pada tahun yang sama, Indonesia juga bersiap menjadi tuan rumah Asian Games 1962, yang membutuhkan dana besar dan turut berkontribusi pada meningkatnya defisit anggaran pemerintah.²³

Salah satu kebijakan pemerintah yang paling menyedot anggaran adalah Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat), yang

23 *Bank Indonesia, Report for the Year 1960-1965.* (Jakarta: PN Pertjetakan Gita Karya, 1966), hlm. 10-11.

digaungkan pertama kali oleh Bung Karno di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Sebagai prioritas utama dalam pertahanan dan kebijakan luar negeri Indonesia, Operasi Trikora menyebabkan terjadinya lonjakan signifikan dalam alokasi pengeluaran negara. Pada tahun 1962, pemerintah mengalokasikan Rp 11.751 juta untuk mendanai operasi ini, yang setara dengan 24% dari total anggaran nasional. Pengeluaran untuk Trikora terus meningkat pada 1963, dengan total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 17.521 juta. Biaya yang sangat besar ini berkontribusi pada membengkaknya defisit negara dan memicu berbagai dampak ekonomi lainnya. Apalagi pada tahun yang sama pemerintah Indonesia juga harus menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Situasi semakin sulit ketika harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak tinggi akibat inflasi yang tidak terkendali, sehingga pengeluaran negara terus meningkat hingga tahun 1964.²⁴

Berbagai kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada masa awal 1960-an pada akhirnya justru mengalami kegagalan. Alih-alih menciptakan stabilitas, perekonomian Indonesia terus mengalami kemunduran hingga mencapai titik nadir. Salah satu penyebab utamanya adalah membengkaknya pengeluaran negara untuk sektor militer, terutama dalam rangka mendukung ambisi-ambisi politik luar negeri seperti Konfrontasi Malaysia dan integrasi Papua.

Berbagai kebijakan ekonomi yang diinisiasi pemerintah Indonesia pada akhirnya harus menemui kegagalan. Perekonomian Indonesia pun terus terpuruk hingga berada pada titik nadir. Hal ini dikarenakan pengeluaran di sektor militer yang meningkat tajam, proyek-proyek mercusuar pemerintah yang menelan biaya tinggi, hingga pembatasan investasi modal asing. Situasi ini berimbas terhadap kelangkaan dan mahalanya barang-barang pokok lantaran kasus penimbunan yang terjadi di mana-mana.

24 Lihat Bank Indonesia, *Report for the Year 1960-1965*. (Jakarta: PN Pertjetakan Gita Karya, 1966), hlm. 29.

Tabel 3.3. Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia, 1960-1965 (dalam juta Rupiah)

Tahun	Anggaran Utama	Anggaran Tambahan	Total Anggaran
1960	45.961	+ 16.195	62.156
1961	82.651	+ 15.147	97.798
1962	97.996	+ 18.823	116.819
1963	305.625	+ 28.842	334.467
1964	392.212	+ 277.783	669.995
1965	964.910	+ 784.902	1.749.812

Sumber: *Bank Indonesia: Report for the Year, 1960-1965.* (Jakarta: Pertjetakan Gita Karya, 1966), hlm. 23.

Di sisi lain, proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Monumen Nasional, Hotel Indonesia, dan Gelora Bung Karno, menelan biaya yang sangat besar dan menguras anggaran negara, tanpa menghasilkan dampak langsung terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembatasan terhadap investasi modal asing semakin mempersempit ruang gerak ekonomi Indonesia, menjadikannya semakin terisolasi dari aliran modal dan perkembangan teknologi global.

Kondisi ini jelas berimbas langsung pada kehidupan rakyat. Di berbagai wilayah, terjadi kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, yang kemudian diperparah dengan maraknya praktik penimbunan barang oleh spekulan. Di Papua, Menteri Perdagangan Republik Indonesia sempat menetapkan 22 jenis barang yang memerlukan izin khusus untuk bisa diangkut ke Papua dari wilayah RI lainnya. Kebijakan ini diperlukan guna menjaga stabilitas harga di sana. Barang-barang tersebut di antaranya berupa hasil bumi, seperti beras, gula, karet, teh, kopra, tembakau, kopi, dan sebagainya. Lalu ada juga hasil tambang seperti emas, perak, minyak bumi, timah, dan lain-lain.²⁵

25 "Barang-Barang jang Perlu Izin untuk Diangkut ke IB," *Merdeka*, 25 April 1963.

C. Perekonomian Papua Menjelang dan Setelah Transisi

Menjelang transfer kekuasaan, perhatian pemerintah Indonesia terhadap persoalan ini menjadi lebih serius. Pemerintah menyadari, stabilisasi di sektor ekonomi dan keuangan akan diiringi pula dengan stabilnya harga-harga. Fokus perhatian pun secara khusus dicurahkan pada kelangsungan pasokan bahan primer. Harapannya, kelangkaan dan mahalnya harga kebutuhan pokok -yang sebenarnya cukup sering terjadi di Papua- bisa ditekan sedemikian rupa.²⁶

Dalam kesempatan berbeda, Dr. Djalal Abdoh sebagai perwakilan UNTEA juga meminta agar para pengusaha tidak mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak sah dan tidak bermoral, seperti terlibat dalam pasar gelap atau mengambil keuntungan terlalu besar. Djalal juga menegaskan bahwa “siapa jang terbawa dalam perbuatan2 demikian, akan ditindak sekeras2nja.”²⁷

Sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan, Kepala perwakilan Belanda di Jayapura, Frans Johannes Goedhart, secara umum menyatakan puas dengan berjalannya pemerintahan UNTEA selama tujuh bulan di Papua. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat telah menunjukkan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga kesulitan-kesulitan yang dikhawatirkan akan muncul pasca transisi, bisa ditekan seminimal mungkin. Goedhart juga berjanji untuk menarik seluruh pasukan bersenjata dan hanya akan menyisakan pasukan tak bersenjata untuk membantu menjaga keamanan di beberapa titik.

Goedhart mengakui bahwa sejumlah kendala memang sempat dihadapi di lapangan, khususnya dalam hal komunikasi. Namun,

26 “Stabilisasi Ekonomi,” *Tjenderawasih*, 22 Februari 1963.

27 “Tindakan Tidak Sah dan Tidak Bermoral akan Ditindak Sekeras2nja,” *Tjenderawasih*, 16 Maret 1963.

berkat bantuan para penerjemah, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Ia juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang tetap menjalankan perannya dalam menyalurkan bahan-bahan pokok, sehingga Papua mampu terhindar dari krisis pangan selama proses transisi berlangsung.²⁸

Salah satu perusahaan yang perlu mendapat sorotan adalah Perusahaan Negara Irian Bhakti.²⁹ Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi di Papua, PN Irian Bhakti mengambil langkah strategis dengan mengimpor barang secara langsung dari Hong Kong, Singapura, dan Papua Nugini. Proses pengangkutan dilakukan oleh tiga kapal milik PELNI, yang pada saat itu mulai menggantikan peran Koninklijk Paketvaart Maatschappij (KPM) dalam proses distribusi barang di Papua. Barang-barang impor ini ditujukan untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, yang sebagian besar dikirim dari Jakarta.

Wakil Direktur Badan Pimpinan Umum – Perusahaan Dagang Negara (BPU-PDN), Soedjono, yang saat itu menjabat sebagai pimpinan sementara PN Irian Bhakti, menjelaskan kepada wartawan *Tjenderawasih* bahwa sejak November 1962, PN Irian Bhakti telah mulai mengirimkan berbagai kebutuhan pokok ke Papua. Pengiriman tersebut mencakup 320 ton gula pasir, 1.000 karung tepung terigu, serta sejumlah bahan pangan dan sandang lainnya. Proses distribusi dilakukan secara bergantian menggunakan dua kapal, yakni kapal *Brantas* dan *Selat Karimata*. Pengalaman ini membuktikan bahwa perusahaan ini memang mampu menyalurkan barang ke berbagai kota kecil di Papua.

28 "Mr. Goedhart Puas atas Kelantjaran di Irian Barat," *Tjenderawasih*, 13 November 1962.

29 PN Irian Bhakti diisi oleh 30 orang pegawai yang diambil dari tiap-tiap perusahaan dagang di Jakarta. Ia merupakan kongsi dari sembilan perusahaan yang terdiri dari Djaja Bhakti, Tri Bhakti, Aneka Bhakti, Budi Bhakti, Marga Bhakti, Tulus Bhakti, Sedjati Bhakti, Sinar Bhakti, dan Fadjar Bhakti. Kantor cabang PN Irian Bhakti kemudian dibuka di kota-kota besar di seluruh Papua, seperti Biak, Sorong, Manokwari, Fakfak, dan Merauke. Lihat "Bahan-Bahan Konsumsi untuk Irian Barat Mulai Datang," *Tjenderawasih*, 14 Desember 1962.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai kelancaran dan kesinambungan impor ini, Sudjono menjawab dengan yakin: “Kenapa tidak? Sedangkan Belanda dulu sanggup mensupply orang2 jang bermewah2 disini, kenapa kita tak sanggup melajani orang2 kita sendiri jang sudah biasa hidup prihatin?”³⁰ Sudjono juga menegaskan, seluruh aktivitas Irian Bhakti akan selaras dengan rencana pemerintah untuk membangun Papua.

Saat itu, PN Irian Bhakti sudah berdiri di enam lokasi di Papua, mulai dari Kotabaru, Biak, Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Merauke. Di antara kantor-kantor cabang tersebut, kantor ranting Biak memainkan peran sentral sebagai penghubung distribusi barang di Nabire dan Serui. Persiapan pembukaan perwakilan cabang juga dilakukan di Teminabuan, Kaimana, dan Pegunungan Tengah (Enarotali dan Wagate). Melalui pembukaan kantor-kantor cabang tersebut, pemerintah berharap, kebutuhan akan sandang dan pangan di Papua bisa terpenuhi hingga ke tempat-tempat yang sulit dijangkau.³¹

Terhitung sejak 1 April 1963, PN Irian Bhakti resmi mengambil alih seluruh inventaris dan aktivitas dari NV Nieuw-Guinea Import en Export Maatschappij (NIGIMY). Beberapa inventaris yang NIGIMY yang dibeli pemerintah Indonesia meliputi 12 gedung kantor, 50 rumah tinggal, 31 gudang, 2 supermarket yang terletak di Kotabaru dan Sorong, dan 19 buah kendaraan. Adapun seluruh pegawai NIGIMY tetap dipekerjakan dan ditampung oleh PN Irian Bhakti.³²

Guna memastikan kelancaran distribusi logistik selama masa transisi pemerintahan, PN Irian Bhakti juga memperoleh fasilitas kredit sebesar 4 juta gulden Belanda (NNG) dari UNTEA. Dana ini kemudian dimanfaatkan untuk pengadaan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan pangan, sandang, dan barang

30 “Impor jang Teratur Didjalankan oleh Irian Bhakti,” *Tjenderawasih*, 26 Maret 1963.

31 “Irian Bhakti Aktip Distribusi,” *Tjenderawasih*, 16 April 1963.

32 “Irian Bhakti Aktip Distribusi,” *Tjenderawasih*, 16 April 1963.



Gambar 3.2. Kantor utama Nieuw-Guinea Import en Export Maatschappij (NIGIMY) yang terletak di Jayapura. Gedung yang diklaim sebagai salah satu gedung terindah di Jayapura ini kelak digunakan sebagai kantor dari PN Irian Bhakti.

Sumber: Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea, Mei 1958. Nummer Toegang: 2.24.05.02. <http://hdl.handle.net/10648/ae3690fa-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

konsumsi lainnya yang sangat diperlukan di Papua. Direktur PN Irian Bhakti, Sudjono, menyatakan keyakinannya bahwa stok yang telah disiapkan melalui pembiayaan tersebut akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat setidaknya selama beberapa bulan ke depan.³³

Menjelang transisi kekuasaan sempat beredar rumor bahwa Bank Indonesia di Papua akan menutup layanannya selama beberapa hari. Namun rumor ini segera dibantah oleh pihak BI yang menyatakan KCBI Kotabaru dan cabang lainnya akan tetap beroperasi seperti biasa.³⁴ Pihak BI menyadari, jika layanan

33 "Irian Bhakti Aktip Distribusi," *Tjenderawasih*, 16 April 1963.

34 "Bank Indonesia Buka Terus," *Tjenderawasih*, 22 April 1963.

perbankan sampai dihentikan, hal itu dapat memperparah ketidakpastian, menyebabkan gangguan dalam perdagangan, dan bahkan memicu kepanikan di kalangan masyarakat serta pelaku usaha. Klarifikasi ini pun menjadi langkah strategis untuk meredam kekhawatiran masyarakat dan memastikan kelangsungan aktivitas ekonomi dan perbankan di tengah situasi yang begitu krusial. Dari perspektif sejarah ekonomi Papua, respons cepat Bank Indonesia dalam membantah rumor ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memahami pentingnya menjaga kelangsungan layanan keuangan dalam proses transisi.

Setelah melalui proses negosiasi dan benturan yang panjang, Papua pada akhirnya berhasil disatukan sebagai bagian dari Indonesia. Itu artinya, Belanda harus segera angkat kaki dari Papua, meninggalkan seluruh aset yang sebelumnya telah dibangun atau dikembangkan. Namun sebelum meninggalkan Papua, pihak Belanda sempat berupaya mengacaukan kondisi moneter di sana dengan berbagai upaya, mulai dari mengedarkan uang palsu, memindahkan barang-barang kekayaan daerah keluar Papua, memacetkan produksi dan distribusi, menghamburkan uang untuk kredit bank, dan lain sebagainya.³⁵ Dengan menciptakan kekacauan moneter tersebut, jelas Belanda berupaya melakukan sabotase ekonomi guna menghambat integrasi Papua ke dalam sistem ekonomi Indonesia.

Upaya tersebut juga dilakukan di sektor politik dan pemerintahan, dengan cara melakukan penarikan besar-besaran tenaga ahli yang sebelumnya mengurus objek-objek vital di Papua. Tidak hanya itu, Belanda juga dikabarkan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang bertujuan mempersukar jalannya administrasi negara pasca transisi.³⁶

Menghadapi serangan tersebut, Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah cepat. Guna mengisi pos-pos yang akan

35 "Belanda Edarkan Uang Palsu dan Perhebat Inflasi," *Merdeka*, 27 Februari 1963.

36 "Belanda Edarkan Uang Palsu dan Perhebat Inflasi," *Merdeka*, 27 Februari 1963.

ditinggalkan oleh pejabat UNTEA, telah dipersiapkan ratusan tenaga dari berbagai departemen dan instansi pemerintahan, untuk dikirim ke Papua selambat-lambatnya pada awal Maret 1963. Pengiriman itu dilakukan melalui kerja sama antara seluruh pembantu menteri dengan Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, dalam dua misi yang dinamakan “Operasi Damai I” dan “Operasi Damai II”. Seluruh tenaga ini bertugas melanjutkan jalannya pemerintahan di Papua pasca pemerintahan UNTEA berakhir.³⁷

Sebelumnya, selama masa pendudukan Belanda, dilakukan upaya pembinaan kader di desa dan kota dengan tujuan agar para penduduk bisa selekas mungkin berpartisipasi dalam pemerintahan. Usaha ini kemudian coba diteruskan oleh pemerintah Indonesia pasca transfer kekuasaan dari UNTEA. Untuk susunan pemerintahan provinsi, dibentuk sebuah Badan Pemerintah Harian yang terdiri dari lima orang yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden atas persetujuan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Irian Barat. Pemerintahan *afdeling*, *onderafdeling*, dan distrik, termasuk juga badan-badan perwakilannya, membantu pemerintahan provinsi menurut petunjuk Gubernur.

Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur Irian Barat dibantu oleh seorang Wakil Gubernur dan, bila diperlukan, oleh Komandan dari ketiga Angkatan Bersenjata. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seluruh anggotanya harus melalui proses pemilihan, sebelum diangkat oleh Presiden. Seluruh kebijakan tersebut diatur berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1963.

Di sektor ekonomi, Pemerintah Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan rencana daerah, seperti penanaman kelapa, perkebunan karet, perkebunan kopi, dan lain sebagainya,

37 “Sekitar Pemerintahan Irian Barat,” *Merdeka*, 30 April 1963.

yang bertujuan untuk memperkenalkan ekonomi pasar selain ekonomi subsisten. Melalui cara tersebut, penduduk Papua pun mendapat penghasilan dalam bentuk uang. Melalui gaji para pegawai dan subsidi untuk berbagai proyek baru, peredaran uang di Papua mulai terjadi. Keadaan tersebut berbanding lurus dengan perkembangan di sana, seiring dengan perbaikan infrastruktur di beberapa daerah di Papua. Intinya, sistem transaksi dengan uang kemudian menjadi sesuatu yang lazim dilakukan di sana.³⁸

Pasca transisi kekuasaan dari UNTEA, ekonomi Papua langsung mengalami guncangan signifikan akibat dislokasi perdagangan internasional, terutama karena pemutusan hubungan dagang dengan Singapura dan dihentikannya subsidi dari Belanda. Situasi ini diperburuk oleh pasokan kebutuhan pokok yang tidak teratur, yang umumnya diakibatkan oleh keterbatasan transportasi laut. Untuk mengatasi kekurangan ini, pemerintah pusat memberikan subsidi pengiriman dan kredit untuk impor barang konsumsi, meskipun dampaknya baru terasa secara bertahap. Harga komoditas strategis, seperti listrik, bahan bakar, dan transportasi, juga disesuaikan dengan kondisi pasar yang saat itu berubah.³⁹

Subsidi dari pemerintah pusat otomatis menjadi penopang utama ekonomi Papua. Subsidi ini digunakan untuk menutupi defisit anggaran daerah, mendukung pembangunan infrastruktur, serta memberikan insentif bagi sektor pertanian dan perdagangan. Selain itu, subsidi ini juga mencakup distribusi barang-barang pokok seperti beras, gula, dan bahan bakar, yang diimpor dengan harga yang lebih rendah daripada biaya pengiriman sebenarnya. Strategi ekonomi ini perlu diambil guna mengatasi keterbatasan pasokan barang di wilayah Papua.

Berbagai keunikan dan tantangan tersebut tergambar lebih jelas di masing-masing daerah. Sebagai kota-kota utama yang

38 Jan Boelaars, *Manusia Irian*, hlm. 167.

39 Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," hlm. 53.

menjadi sentra ekonomi di masing-masing kawasan di Papua, pihak Bank Indonesia tentu memiliki alasan kuat mengapa Kantor Cabang Bank Indonesia kemudian didirikan di kelima kota ini: Kotabaru/Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong, dan Biak. Pertimbangan tersebut di antaranya didasarkan pada aspek geografis, ekonomis, dan lain sebagainya.

D. Perkembangan Ekonomi Lokal/Regional

D.1. Perkembangan Ekonomi di Jayapura

Sejak era kolonial Belanda, ketika wilayah ini masih dikenal dengan nama Hollandia, Jayapura (waktu itu Kotabaru) telah menjadi salah satu pusat ekonomi dan administrasi terpenting di Papua. Pada tahun 1950-an, Jayapura memiliki tiga pelabuhan. Namun, hanya satu yang dapat digunakan secara optimal untuk melayani distribusi barang dari luar Papua ke wilayah pedalaman. Situasi ini diperburuk oleh kondisi gudang di sekitar pelabuhan yang tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Tata letak barang di dalam gudang sering kali tidak teratur, sehingga menyebabkan kekacauan dalam pengelolaan barang. Akibatnya, para importir sering harus menunggu berbulan-bulan untuk dapat mengeluarkan barang mereka. Kondisi ini berimbas terhadap kelancaran arus barang (*flow of goods*) di Jayapura dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian wilayah tersebut.

Koperasi memainkan peran yang signifikan dalam mendorong perkembangan sektor ekonomi mikro di kalangan masyarakat Jayapura. Sejak era 1950-an dan 1960-an, Pemerintah Kolonial Belanda telah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dengan memberikan dukungan berupa kredit usaha kecil kepada para pengusaha lokal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor produksi, perdagangan, transportasi, dan perikanan. Kredit tersebut dialokasikan terutama kepada penduduk asli Papua dan

pengusaha kecil, dengan harapan dapat membantu terciptanya ekonomi lokal yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Kredit yang disediakan oleh pemerintah kolonial di Jayapura sebagian besar bersifat modal usaha, digunakan untuk pembelian barang, mesin, kendaraan, serta sarana transportasi. Total kredit yang diberikan mencapai *f*42.720,11 pada tahun 1960. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan mendorong para pengusaha kecil di sektor yang paling membutuhkan dukungan finansial. Program kredit ini berfokus pada sektor-sektor penting seperti: (1) Perdagangan kecil, khususnya usaha yang mendukung kebutuhan lokal; (2) Perikanan, untuk membantu pengadaan peralatan pancing dan distribusi hasil tangkapan; (3) Transportasi, yang menjadi kunci utama dalam mobilitas barang dan jasa di wilayah Kotabaru dan Sentani.

Sejumlah pengusaha kecil di Jayapura, Sentani, dan beberapa wilayah di sekitarnya, dilaporkan menerima manfaat langsung dari program ini. Tabel 3.4 menunjukkan beberapa penerima kredit beserta penggunaannya.

Secara keseluruhan, program kredit ini berupaya memperkuat sektor-sektor utama dalam ekonomi lokal dan juga mendorong pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kedua kawasan tersebut. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat keberhasilan penuh dari program ini. Salah satu kendala utama adalah penyaluran kredit yang terbatas. Jumlah kredit yang diberikan sering kali hanya mencakup sebagian kecil dari kebutuhan usaha penerima. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan mencapai operasional yang optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka.

Selain itu, keterlambatan pembayaran kredit juga menjadi masalah yang sering terjadi. Banyak penerima kredit mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran akibat berbagai faktor, seperti pendapatan yang terbatas, pengelolaan usaha yang

Tabel 3.4. Daftar Pengusaha yang Menerima Kredit Pemerintah di Jayapura (Hollandia) dan Sentani

Nama Penerima	Asal	Nama Perusahaan	Kredit (f)	Tujuan
La Ode Soro Suera	Kotabaru Pantai	-	f2.000	Pengembangan usaha perdagangan kecil
Andreas Nies	-	Polimac	-	Mengelola perusahaan peralatan pancing yang mendukung sektor perikanan
Soang Buraro	Netar	-	f500	Pengembangan usaha kecil berbasis lokal
Pieter Norotau	Kamp Kei	-	f600	Perdagangan lokal
M. Kalem	Jobe, Danau Sentani	-	f800	Usaha perdagangan dan ekonomi kecil
M. Awie	Nafri	-	f250	Pengembangan usaha kecil yang berdampak pada ekonomi lokal
B. Rumbekwan	-	-	f6.200	Pembelian kendaraan VW Combi untuk usaha transportasi dan taksi
L. Ajamiseba	-	-	f4.000	Pembukaan sekolah mengemudi
A. Wally	-	Signal Hill	f5.000	Pembelian mesin jahit untuk usaha konveksi
J. Manoby	Babrongko, Sentani	-	f800	Pembelian mesin jahit untuk produksi tekstil dan pakaian

Sumber: Disarikan dari J.J.W. Dubois, *Memorie van Overgave van het Onderafdelingshoofd Hollandia (Periode September 1960 – Agustus 1961)*, hlm. 146-47.

belum efisien, serta pasar yang masih terfragmentasi dan belum stabil. Kendala lainnya adalah kelemahan dalam administrasi kredit, yang mengakibatkan pengelolaan utang-piutang menjadi

kurang transparan. Minimnya pengawasan terhadap proses administrasi ini menyulitkan pemantauan efektivitas penggunaan kredit, sehingga potensi penyalahgunaan dana atau tidak efektifnya alokasi kredit menjadi lebih tinggi.⁴⁰

Perkembangan koperasi di Jayapura juga perlu mendapat sorotan tersendiri. Sebagai pusat ekonomi terbesar di Papua, di wilayah ini sempat berdiri beberapa koperasi penting yang memegang peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Koperasi ini berperan dalam mendukung produksi, distribusi hasil bumi, dan penyediaan kredit usaha kecil bagi masyarakat. Peran ini menjadi penting dalam mendorong perkembangan sektor perdagangan, perkebunan, dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Meskipun koperasi-koperasi ini memiliki tujuan penting, yakni mendukung pengembangan ekonomi lokal, mereka dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berat. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya sistem administrasi. Tata kelola koperasi yang buruk kerap memicu terjadinya kebocoran dana dan meningkatnya angka kredit macet. Kondisi ini masih diperparah dengan modal usaha yang terbatas, sehingga skala operasional mereka tergolong kecil dan tidak mampu mendorong pertumbuhan usaha yang lebih besar.

Minimnya partisipasi anggota juga menjadi kendala yang serius. Rendahnya tingkat keterlibatan dan kepercayaan anggota terhadap koperasi mempersulit operasional dan pengambilan keputusan kolektif. Di sisi lain, wilayah pedalaman seperti Depapre dan Asei menghadapi hambatan transportasi yang mengakibatkan masalah distribusi. Infrastruktur yang belum memadai membuat pengangkutan hasil produksi ke pusat distribusi menjadi sulit dan mahal, sehingga mengurangi efisiensi dan daya saing koperasi di wilayah ini.

40 J.J.W. Dubois, *Memorie van Overgave van het Onderafdelingshoofd Hollandia (Periode September 1960 - Augustus 1961)*, hlm. 141-43.

Sebagai informasi, di Jayapura pernah berdiri beberapa koperasi besar yang memainkan peran sentral dalam penyaluran kredit bagi penduduk setempat. Pada September 1952 misalnya, sebuah koperasi bernama “Voorwaarts” sempat didirikan di wilayah Sentani, tepatnya di Lembah Dojo. Koperasi ini beranggotakan sejumlah pegawai kolonial dan beberapa orang Papua, dengan tujuan untuk mendorong pengembangan perekonomian lokal. Setiap anggota diharuskan menyetorkan kontribusi sebesar f600 sebagai modal awal, yang diharapkan dapat menjadi fondasi operasional koperasi. Koperasi ini menawarkan kebebasan bagi anggotanya dalam memproduksi hasil panen, sementara koperasi akan bertanggung jawab untuk menjual hasil tersebut dengan harga tetap dan mendistribusikannya ke berbagai wilayah.

Namun, operasional koperasi ini tidak pernah berjalan optimal. Aktivitas Voorwaarts pun mulai melemah seiring dengan munculnya konflik internal yang tak kunjung usai. Perselisihan yang sering terjadi memicu beberapa anggota memilih untuk mundur, sehingga jumlah anggota koperasi berkurang drastis. Upaya terakhir untuk menyelamatkan koperasi dilakukan dengan mengelola lahan besar yang rencananya akan direklamasi dan dimanfaatkan oleh penduduk setempat, mengingat lokasinya yang strategis di dekat bandara paling barat. Sayangnya, proyek ini juga menemui jalan buntu dan berakhir tanpa hasil.

Seiring berjalannya waktu, aktivitas koperasi Voorwaarts semakin redup. Ketidakmampuan pimpinan dan anggotanya untuk menyelesaikan berbagai tantangan internal membuat koperasi ini lambat laun kehilangan fungsinya. Akhirnya, koperasi ini pun berhenti beroperasi sepenuhnya dan resmi dibubarkan.

Selain koperasi “Voorwaarts” ada juga koperasi “Sentani” yang berfokus pada pemberdayaan petani lokal dengan mengorganisir produksi hasil pertanian untuk pasar lokal dan distribusi ke daerah lain. Selain itu, koperasi ini juga menyediakan

akses kredit sederhana bagi anggotanya guna mendukung usaha kecil yang mereka jalankan. Namun kegiatan ekonomi koperasi ini mengalami kemunduran akibat pengelolaan yang tidak efisien dan lemahnya partisipasi anggota. Modal usaha yang kecil menjadi penghambat utama dalam memperluas operasi koperasi sehingga skala cakupannya tetap terbatas. Kondisi ini membuat koperasi Sentani kesulitan bertahan dalam persaingan ekonomi lokal.⁴¹

Selain beberapa koperasi yang telah disebutkan di atas, “CV Tanah Merah” juga menjadi salah satu aktor penting dalam mendukung perekonomian lokal di Jayapura. Didirikan pada Januari 1953, koperasi ini berperan sebagai fasilitator perdagangan hasil bumi dari distrik Depapre. CV Tanah Merah membantu mengorganisir produksi lokal, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat maupun untuk perdagangan ke wilayah lain.

Namun, seperti halnya koperasi lainnya, CV Tanah Merah juga menghadapi berbagai tantangan yang menghambat operasionalnya. Kesulitan keuangan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi, terutama akibat lemahnya administrasi dan pengelolaan kredit. Modal awal yang terbatas semakin mempersempit kemampuan operasional perusahaan, sehingga perusahaan ini tidak mampu berkembang secara optimal.⁴²

Kemudian ada juga koperasi “Chena Tadge” di Jayapura memiliki peran penting dalam menyediakan kredit usaha kecil untuk penduduk lokal. Koperasi ini mendukung usaha di bidang perdagangan, pertanian, dan usaha kecil lainnya. Berbeda dengan koperasi lainnya, koperasi Chena Tadge dikenal memiliki struktur kepengurusan yang cukup jelas dan terorganisir. Tokoh-tokoh utama yang terlibat di antaranya L. Jouwe yang menjabat

41 J.J.W. Dubois, *Memorie van Overgave van het Onderafdelingshoofd Hollandia (Periode September 1960 – Augustus 1961)*, hlm. 138-39.

42 J.J.W. Dubois, *Memorie van Overgave van het Onderafdelingshoofd Hollandia (Periode September 1960 – Augustus 1961)*, hlm. 139.

sebagai Ketua, dengan H. Puij sebagai Wakil Ketua. Sementara posisi Sekretaris dipegang oleh H. Sibi, dan J. Makanuey sebagai Bendahara. Selain itu, terdapat juga beberapa anggota aktif yang turut berperan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan koperasi, yaitu Ch. Soro, L. Puij, I. Puij, dan Th. Jouwe.

Pada 9 November 1956, koperasi ini mengalami restrukturisasi dan berganti nama menjadi Koperasi Penghasilan dan Perdagangan Chena Tadge, yang turut melibatkan penduduk dari Desa Kayu Batu dan Kayu Pulau. Namun ketergantungan pada kredit dari pemerintah dan lemahnya manajemen internal menyebabkan koperasi ini mengalami kebangkrutan. Kesulitan mengelola keuangan dan operasional memperburuk kondisi koperasi, hingga akhirnya likuidasi menjadi solusi terakhir.⁴³

Terakhir ada koperasi “Oheikoi” di Asei yang berfokus pada penyediaan kredit dan modal usaha kecil kepada masyarakat lokal. Koperasi ini juga mendirikan fasilitas toko kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Aktivitas koperasi ini mulai berkurang seiring munculnya masalah kredit macet dan pengelolaan yang tidak efisien. Administrasi yang lemah sering kali mengakibatkan kebocoran dana, sehingga kepercayaan anggota terhadap koperasi pun menurun drastis.⁴⁴

D.2. Perkembangan Ekonomi di Biak

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Biak memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat militer dan komunikasi utama di wilayah Papua. Belanda memanfaatkan Biak sebagai pangkalan militer dan pos penghubung udara menuju wilayah lainnya yang terletak di Pasifik. Sebelum Jayapura berkembang menjadi kota utama di Papua, Biak merupakan gerbang masuk utama ke kawasan Papua.

43 J.J.W. Dubois, *Memorie van Overgave van het Onderafdelingshoofd Hollandia (Periode September 1960 – Augustus 1961)*, hlm. 140-45.

44 J.J.W. Dubois, *Memorie van Overgave van het Onderafdelingshoofd Hollandia (Periode September 1960 – Augustus 1961)*, hlm. 139-40.

Pasca integrasi, Biak tetap memainkan peran penting dalam konsolidasi kekuasaan Indonesia, termasuk menjadi titik awal kehadiran militer dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat di Papua.

Secara geografis, Biak merupakan pulau karang yang terletak di Teluk Cenderawasih, dengan garis pantai yang panjang dan perairan yang kaya sumber daya laut. Topografinya relatif landai dengan vegetasi tropis yang lebat, menjadikannya cocok untuk pemukiman dan pengembangan infrastruktur. Karesidenan Teluk Cenderawasih mencakup berbagai kepulauan yang tersebar di sekitar Teluk Cenderawasih, seperti Biak, Numfor, Supiori, Mios, Yapen, serta sebagian wilayah daratan Papua yang dikenal sebagai Waropen. Karesidenan ini juga meliputi gugusan pulau Mapia, yang terletak sekitar 130 mil di barat laut Supiori. Secara keseluruhan, wilayah ini dihuni oleh sekitar 100 ribu penduduk, dengan setengah dari jumlah tersebut bermukim di Biak dan Numfor.

Sebagian besar tanah di Biak merupakan tanah karang kapur, yang membuat budidaya sayur-mayur dan peternakan menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, kebutuhan ini harus dipasok dari wilayah lain di Indonesia, terutama dari Makassar. Sebagian kecil pasokan juga berasal dari Yapen, yang memiliki kontur tanah lebih subur dibandingkan Biak. Sementara itu, kebutuhan barang-barang esensial diatur secara terorganisir oleh PD. Irian Bhakti.

Pelabuhan Biak dilengkapi dengan gudang berkapasitas 6.720 m³ (berukuran 48 meter x 20 meter x 7 meter) dan dermaga sepanjang 142 meter, yang mampu menampung kapal dengan bobot hingga 25 ribu ton. Hingga tahun 1965, arus keluar-masuk barang ekspor dan impor melalui pelabuhan ini berjalan dengan cukup lancar, menjadikan Biak sebagai salah satu titik logistik penting di wilayah Karesidenan Teluk Cenderawasih. Sebagai kota transit, Biak memang menjadi salah satu pintu gerbang utama bagi provinsi Papua.



Gambar 3.3. Lintasan Bandara Mokmer (sekarang Bandara Frans Kaisiepo) di Biak sebagai jalur penghubung utama antara Jakarta dan Papua.

Sumber: *Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea*. Nummer Toegang: 2.24.05.02. <http://hdl.handle.net/10648/ae382cc6-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

Sebagai salah satu wilayah administratif utama di Papua, antara tahun 1950-an hingga awal 1960-an, Biak pernah menjadi lokasi berdirinya sub-*resortkantoor* keuangan yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan di tingkat distrik. Kantor ini menjadi pusat aktivitas keuangan yang krusial bagi wilayah Biak, dengan berbagai tanggung jawab utama yang diembannya. Salah satu fungsi utamanya adalah pengelolaan kas terpusat, di mana kantor ini bertugas memastikan alur keuangan yang terorganisir dan terkontrol dengan baik di tingkat lokal. Dengan demikian, distribusi dana untuk berbagai kebutuhan distrik dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sub-*resortkantoor* ini juga diberi mandat penting untuk menangani administrasi serta pengawasan pajak dan pungutan yang berlaku di wilayah distrik. Peran tersebut seharusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Namun, dalam menjalankan tugasnya, kantor ini harus menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan dalam klasifikasi aset. Data terkait aset dan harta milik daerah sering kali tidak akurat atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga menyulitkan pelaksanaan pajak secara rutin. Ketidakpastian ini menjadi tantangan besar dalam proses pengawasan dan penilaian aset daerah. Selain itu, proses pengumpulan pajak berlangsung dengan sangat lambat akibat kurangnya data yang valid dan metode administrasi yang kurang memadai. Sistem pengumpulan yang masih bergantung pada metode manual yang sudah usang tidak hanya menghambat efisiensi, tetapi juga sering menyebabkan tumpang tindih data dan kesalahan dalam administrasi.

Situasi ini semakin diperburuk oleh berbagai hambatan prosedural yang memperlambat proses birokrasi di Biak, khususnya dalam pelaporan dan penyelesaian pajak. Prosedur yang panjang dan kompleks sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan pendapatan. Hal ini berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan distrik secara keseluruhan, sehingga menciptakan kesenjangan yang signifikan antara target pendapatan yang ditetapkan dan realisasinya.⁴⁵

Sejak tahun 1955, Pemerintah kolonial Belanda sebenarnya mulai menyadari kelemahan dalam sistem yang ada dan mengambil

45 "Laporan Pemimpin Tjabang Biak (Bambang Susilo) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan yang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

langkah-langkah perbaikan. Pembaruan dilakukan dengan memperkenalkan metode administrasi yang lebih terstruktur serta menyederhanakan prosedur perpajakan. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan mempercepat proses pengumpulan pajak, tetapi juga meningkatkan akurasi data sehingga sistem perpajakan menjadi lebih transparan dan dapat diandalkan. Upaya ini menjadi tonggak penting dalam memperbaiki efektivitas pengelolaan pajak di Biak, meskipun implementasinya memerlukan waktu dan penyesuaian yang signifikan.

Kantor keuangan di Biak juga menjalin koordinasi erat dengan instansi pemerintah dan pihak swasta lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Melalui kerja sama tersebut, berbagai aspek penting dalam keuangan distrik, seperti penagihan pajak, distribusi anggaran, dan pelaporan keuangan, dapat dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Sinergi yang terbangun antara berbagai lembaga ini menjadi fondasi penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik di wilayah Biak. Setelah transisi dari UNTEA ke Pemerintah Indonesia, pembenahan ini dilanjutkan dan diperkuat. Fokus perbaikan juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Biak yang selama ini kerap terabaikan dalam sistem ekonomi kolonial Belanda.⁴⁶

Menjelang akhir Desember 1962, Biak sempat dilanda krisis bahan pangan, terutama gula. Perwakilan Indonesia di Kotabaru pun segera menyelenggarakan pengangkutan gula sebanyak 30 ton dari Kotabaru ke Biak. Proses pengangkutan dilakukan oleh PELNI

46 “Laporan Pimpinan Tjabang Biak (Bambang Susilo) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pimpinan-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan yang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

dengan kapal laut “Brantas”. Kapal laut ini sejatinya tidak memiliki rute pelayaran antara Kotabaru dan Biak, namun lantaran keadaan yang mendesak, perubahan jadwal pun terpaksa harus dilakukan. Singkat cerita, strategi ini dilaporkan berjalan dengan baik dan menuai pujian dari pihak UNTEA.⁴⁷

Kondisi komunikasi dan distribusi logistik di Biak pada masa itu memang dilaporkan kerap mengalami berbagai hambatan serius. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terganggunya arus distribusi adalah tidak lancarnya komunikasi laut—terutama kapal pengangkut barang—yang diperparah dengan kondisi pelabuhan setempat yang masih jauh dari memadai. Fasilitas bongkar muat yang terbatas serta kurangnya jadwal pelayaran reguler berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang-barang kebutuhan pokok.

Menjelang akhir tahun 1964, situasi ini mencapai titik krisis ketika pasar di Biak mengalami kelangkaan sejumlah komoditas esensial, seperti minyak goreng, garam, mentega, dan sabun cuci. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah hilangnya pasokan tepung terigu, yang mengakibatkan pabrik roti milik ‘Perindustrian Rakjat’ terpaksa menghentikan seluruh aktivitas produksinya. Dampak dari kelangkaan ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri kecil, tetapi juga masyarakat umum yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁸

D.3. Perkembangan Ekonomi di Sorong

Secara geografis, Sorong terletak di ujung barat laut Pulau Papua, menghadap ke Selat Sele dan berdekatan dengan Kepulauan

47 “Brantas Angkut 30 Ton Gula untuk Biak,” *Tjenderawasih*, 10 Desember 1962.

48 “Laporan Pemimpin Tjabang Biak (Bambang Susilo) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan yang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

Raja Ampat. Wilayah ini didominasi oleh bentang alam pesisir dengan garis pantai yang panjang, perbukitan rendah, dan hutan tropis lebat yang kaya akan keanekaragaman hayati. Keberadaan pelabuhan alam yang terlindung menjadikan Sorong lokasi strategis untuk kegiatan pelayaran dan perdagangan sejak era kolonial. Selain itu, letaknya yang dekat dengan ladang minyak di kawasan Klamono dan sekitarnya semakin memperkuat posisinya sebagai pusat industri ekstraktif di Papua Barat pada masa 1950-an dan 1960-an. Kombinasi antara kondisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam menjadikan Sorong sebagai wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik.

Pelabuhan Sorong merupakan pelabuhan ekspor terbesar di Papua setelah Kotabaru/Sukarnapura. Pelabuhan ini sering menjadi titik awal maupun akhir bagi kapal-kapal yang datang, baik dari wilayah Indonesia lainnya maupun dari luar negeri. Sebagai pelabuhan *transshipment*, Pelabuhan Sorong tidak hanya melayani ekspor dari wilayah Sorong dan Raja Ampat, tetapi juga dari daerah Irian Barat bagian selatan, seperti Fakfak dan Merauke.

Sebagian besar transaksi perdagangan di Sorong dilakukan dengan perusahaan-perusahaan Hong Kong dan Singapura.⁴⁹ Namun, pasca pemutusan hubungan perdagangan dengan Singapura serta pembatasan hubungan dengan Australia dan Hong Kong, aktivitas perdagangan ekspor-impor di pelabuhan ini dialihkan ke Belanda dan Jepang. Perubahan ini mengakibatkan aliran barang mengalami hambatan signifikan. Sebagai contoh, pembukaan *letter of credit* (L/C) untuk Jepang ternyata membutuhkan waktu tambahan hingga empat hingga lima bulan, sehingga menunda proses perdagangan dan memengaruhi kelancaran ekonomi wilayah tersebut.⁵⁰

49 "Bank Negara Indonesia, Hong Kong," Surat No. 11/3/ULN/HPLN, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 November 1963.

50 "Laporan Pemimpin Tjabang Sorong (Soegiono) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-



Gambar 3.4. Suasana Pelabuhan Doom di Sorong sebagai pelabuhan ekspor terbesar di Papua.

Sumber: *Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea*, Agustus 1961. Nummer Toegang: 2.24.05.02. <http://hdl.handle.net/10648/ae35ee48-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

Ekonomi Sorong bertumpu pada beragam sumber daya alam yang menjadi pilar utama bagi penduduk lokal dan pelaku ekonomi. Sektor industri, seperti eksploitasi minyak bumi, pengolahan kayu, dan pengumpulan kopal, berperan sebagai tulang punggung perekonomian wilayah ini. Minyak bumi, meskipun produksinya belum sebesar cadangan yang terdapat di Kalimantan atau Sumatra, tetap menjadi salah satu komoditas unggulan dengan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi daerah.

Aktivitas pengeboran minyak di kawasan Kepala Burung (*Vogelkop*) sejatinya telah berlangsung sebelum pecahnya

perwakilan jang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965,” *Arsip Bank Indonesia*, DPLP/SKA-DPLP/ROP/47/1/0872.



Gambar 3.5. Proses penyortiran kopal yang dilakukan oleh penduduk setempat.

Sumber: *Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nieuw-Guinea*. <http://hdl.handle.net/10648/ae32caec-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

Perang Dunia II. Namun aksi pemboman yang dilakukan oleh pesawat-pesawat terbang Jepang pada awal Perang Pasifik telah memusnahkan berbagai instalasi penting. Barulah setelah perang berlalu, eksplorasi dan eksploitasi mulai kembali dilakukan di Sorong, yang seluruh proses impornya dilakukan oleh N.V. NIGIMY.⁵¹

Beberapa titik pengeboran minyak di Sorong tersebar di sejumlah wilayah seperti Klamono, Steenkool, Wasian, Tembuni, Maturi, dan Kasim Sele. Namun, memasuki awal tahun 1960-an,

51 "Bank Negara Indonesia, Hong Kong," Surat No. 11/3/ULN/HPLN, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 November 1963.

hanya Klamono yang masih aktif memproduksi minyak bumi. Sorong pun sempat menjadi salah satu pengeksport minyak mentah (*crude oil*) terbesar di Papua. Sebagai gambaran, pada tahun 1954, Sorong berhasil mengeksport setengah juta ton minyak mentah senilai 26,4 juta gulden. Sayangnya, angka tersebut terus mengalami penurunan hingga hanya mencapai 12,4 juta gulden pada tahun 1960 dan turun drastis menjadi 3,4 juta gulden pada pertengahan tahun 1961. Kondisi ini mendorong *Nederlandsche Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij*—yang sahamnya dimiliki oleh Shell (40 persen), STANVAC (40 persen), dan gabungan beberapa perusahaan kecil (20 persen)—untuk mengakhiri kegiatan eksploitasi minyak bumi di Sorong.⁵²

Selain itu, sektor pertanian dan hortikultura turut berkontribusi terhadap perekonomian Sorong, meskipun skalanya masih tergolong kecil. Produksi sayuran dan buah-buahan terkonsentrasi di kawasan Remu dan sekitarnya, namun hasil panennya lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Sebagian kecil surplus hasil pertanian dijual ke pasar Sorong, tetapi skala distribusinya masih terbatas. Tantangan utama dalam sektor ini meliputi keterbatasan tenaga kerja dan penggunaan teknologi pertanian yang masih sangat sederhana. Akibatnya, kapasitas produksi belum optimal dan tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang lebih luas.

Namun, upaya pengembangan ekonomi di Sorong menghadapi berbagai tantangan besar. Salah satu kendala utama adalah buruknya infrastruktur, khususnya transportasi di wilayah pedalaman, yang menghambat distribusi hasil pertanian dan sumber daya alam. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja terampil dan minimnya akses terhadap pendidikan teknis juga memperlambat kemajuan industri dan perekonomian secara keseluruhan.

52 “Sorong Petroleum Company,” Surat No. 11/1/ULN/HPLN, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 25 April 1963.

Dalam aktivitas perdagangan di Sorong, pedagang Tionghoa memainkan peran dominan, terutama dalam perdagangan komoditas strategis seperti kopra dan barang-barang dagangan lainnya. Salah satu tokoh penting adalah Lie Toh, seorang pedagang di Pulau Doom, yang menjadi perantara utama dalam perdagangan lokal. Lie Toh memiliki peran signifikan dalam perekonomian koperasi, dengan membeli kopra dari koperasi-koperasi lokal untuk dijual kembali kepada perusahaan besar seperti N.V. Pho Eng Liong.

Namun, di tengah dominasi tersebut, muncul sejumlah tantangan, khususnya dalam pengelolaan koperasi perdagangan. Koperasi yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal sering kali terbebani oleh utang kredit yang besar. Masalah ini diperparah dengan buruknya tata kelola administrasi dan keterbatasan modal, yang secara signifikan menghambat koperasi dalam menjalankan perannya secara optimal.

Kondisi keuangan koperasi utama di Sorong dilaporkan tidak sehat. Faktor utama yang memicu situasi ini meliputi tingginya beban utang kredit dan lemahnya sistem manajemen. Dampaknya, koperasi menghadapi kesulitan dalam menjaga likuiditas serta efektivitas operasionalnya, yang dapat mengarah pada kebutuhan restrukturisasi hingga risiko likuidasi.⁵³

Koperasi ini menghadapi tantangan ekonomi yang cukup serius akibat ketergantungan signifikan terhadap para pedagang perantara, seperti Lie Toh. Praktik ini, meskipun awalnya membantu, justru memperumit situasi keuangan koperasi dalam jangka panjang. Koperasi terpaksa menanggung utang besar kepada Lie Toh, dengan jumlah mencapai f.8.969,38, angka yang jauh melampaui kemampuan finansial koperasi untuk melunasinya.

53 W.J.H. Kouwenhoven, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Hoofdamtenaar B.B. Onderafdeling Sorong (Periode Desember 57 - Oktober 59)*. hlm. 66.

Situasi ini semakin memburuk akibat lemahnya sistem administrasi di tubuh koperasi. Catatan keuangan yang tidak tertata rapi serta kebijakan pemberian kredit yang tidak terkendali menghasilkan piutang yang sulit ditagih dari para anggota. Akibatnya, kondisi neraca keuangan koperasi menunjukkan kas yang sangat minim, hanya sebesar f.104,20. Lebih jauh, penyalahgunaan dana dan kurangnya pengawasan dari otoritas terkait turut memperparah kerentanan koperasi, sehingga kelangsungan operasionalnya menjadi sangat sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang.⁵⁴

Kondisi krisis yang melanda koperasi telah menempatkan institusi ini di ambang kehancuran, dengan likuidasi menjadi opsi realistis yang harus dipertimbangkan. Dalam situasi kacau yang tidak terkendali ini, melanjutkan operasional koperasi tanpa perombakan besar dianggap tidak memungkinkan. Sebagai langkah alternatif, muncul usulan untuk mendirikan koperasi baru dengan dukungan sistem manajemen yang lebih profesional dan efisien.

Upaya perbaikan yang diusulkan mencakup pengawasan keuangan yang lebih ketat dengan menjadikan transparansi sebagai prinsip utama untuk mencegah penyalahgunaan dana. Selain itu, diperlukan penerapan kebijakan manajemen yang terarah untuk memastikan pengelolaan kredit berjalan secara efektif. Berbagai strategi diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga institusi tersebut dapat kembali berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang andal, berkelanjutan, dan relevan bagi kebutuhan komunitas.⁵⁵

Kondisi koperasi di Sorong mencerminkan kelemahan mendasar dalam manajemen dan pengawasan yang ada pada struktur koperasi masa itu. Ketergantungan yang tinggi

54 W.J.H. Kouwenhoven, *Aanvullende Memorie van Overgave*, hlm. 68.

55 W.J.H. Kouwenhoven, *Aanvullende Memorie van Overgave*, hlm. 68-69.

terhadap satu pihak yang mendominasi perdagangan lokal telah mengakibatkan hilangnya kendali finansial koperasi. Tanpa adanya sistem pencatatan yang memadai serta kebijakan penagihan piutang yang efektif, koperasi terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dipulihkan. Untuk mengatasi situasi ini, pembentukan koperasi baru dengan struktur manajemen yang lebih kuat dan kebijakan keuangan yang transparan serta ketat, menjadi langkah paling strategis.

D.4. Perkembangan Ekonomi di Manokwari

Secara geografis, Manokwari dikelilingi oleh perbukitan hijau dan hutan tropis lebat, dengan wilayah pesisir yang subur dan kaya akan hasil laut. Terletak di ujung timur Semenanjung Doberai (Kepala Burung), Manokwari merupakan daerah yang menyimpan banyak potensi dan harapan. Letaknya yang strategis di pesisir utara Papua, menghadap Teluk Doreh, menjadikan Manokwari sebagai titik penting dalam jaringan komunikasi dan transportasi antara wilayah pesisir dan pedalaman. Wilayah ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan swasembada di sektor pangan, menjadikannya salah satu pusat aktivitas ekonomi dalam upaya pengembangan Papua.

Manokwari dikenal memiliki nilai historis tinggi karena menjadi lokasi awal misi Kristen Protestan di tanah Papua sejak abad ke-19, yang kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan intelektual dan pelatihan bagi generasi muda Papua. Di sana didirikan sekolah-sekolah guru, seminari, dan lembaga-lembaga pelatihan kejuruan yang sebagian besar dikelola oleh misi Kristen. Kota ini pun menjadi saksi awal munculnya aktivisme politik lokal dan pergerakan intelektual Papua yang kelak memainkan peranan penting dalam sejarah sosial-politik kawasan tersebut.

Ekonomi Manokwari pada umumnya bertumpu pada sektor pertanian, koperasi perdagangan, dan eksploitasi sumber daya



Gambar 3.6. Salah satu sudut kota Manokwari dilihat dari atas (Foto diperkirakan diambil antara tahun 1950-an atau 1960-an)

Sumber: Kantoer voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea. Nummer Toegang: 2.24.05.02. <http://hdl.handle.net/10648/ae32f74c-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

alam. Produksi kopra, kopal, kayu hutan, serta hasil bumi lainnya menjadi pilar utama yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga memberikan kontribusi untuk ekspor, meskipun masih dalam skala kecil. Sebagai contoh, wilayah Ransiki yang berada di selatan Manokwari menunjukkan potensi besar di sektor perkebunan, sementara dataran Prafi dan Warjori memiliki kualitas tanah yang ideal untuk pengembangan persawahan. Selain



Gambar 3.7. Go Siang Kie, seorang pedagang Tionghoa dari Manokwari, tengah menimbang seikat kulit kayu massoia. Kulit kayu massoia kerap digunakan sebagai pewarna dalam industri batik dan memiliki pasar yang cukup besar di Singapura. Foto di atas kira-kira diambil pada Desember 1953.

Sumber: *Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea*. <http://hdl.handle.net/10648/ae39ecbe-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

itu, wilayah Sausapor dan Werur telah lama dikenal sebagai sentra produksi kopra, sementara kawasan hutan di Sausapor menjadi sumber utama penghasil kopal dengan kualitas tinggi.⁵⁶

Pertanian dan perkebunan di Manokwari memiliki peluang besar untuk pengembangan intensif, terutama produksi ubi jalar, kacang hijau, dan singkong. Peternakan babi, selain memiliki nilai sosial dalam adat istiadat, juga memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan jika dikelola secara profesional. Sumber daya alam di Manokwari, termasuk eksploitasi minyak bumi yang masih dalam tahap eksplorasi, menjanjikan prospek ekonomi jangka panjang. Statistik ekonomi Manokwari menunjukkan bahwa pendapatan dari produksi lokal dan koperasi pada tahun 1960 mencapai f. 20.635,10, dengan kontribusi terbesar datang dari distrik Imboean, Sanfarmon dan Weifani.⁵⁷ Kombinasi dari berbagai sektor ini

56 F.H. Peters, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Controleur der Onderafdeling Manokwari (Medio 1959 – Begin 1961)*, hlm. 170-74.

57 F.H. Peters, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Controleur der*

menjadikan Manokwari sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang menjanjikan.

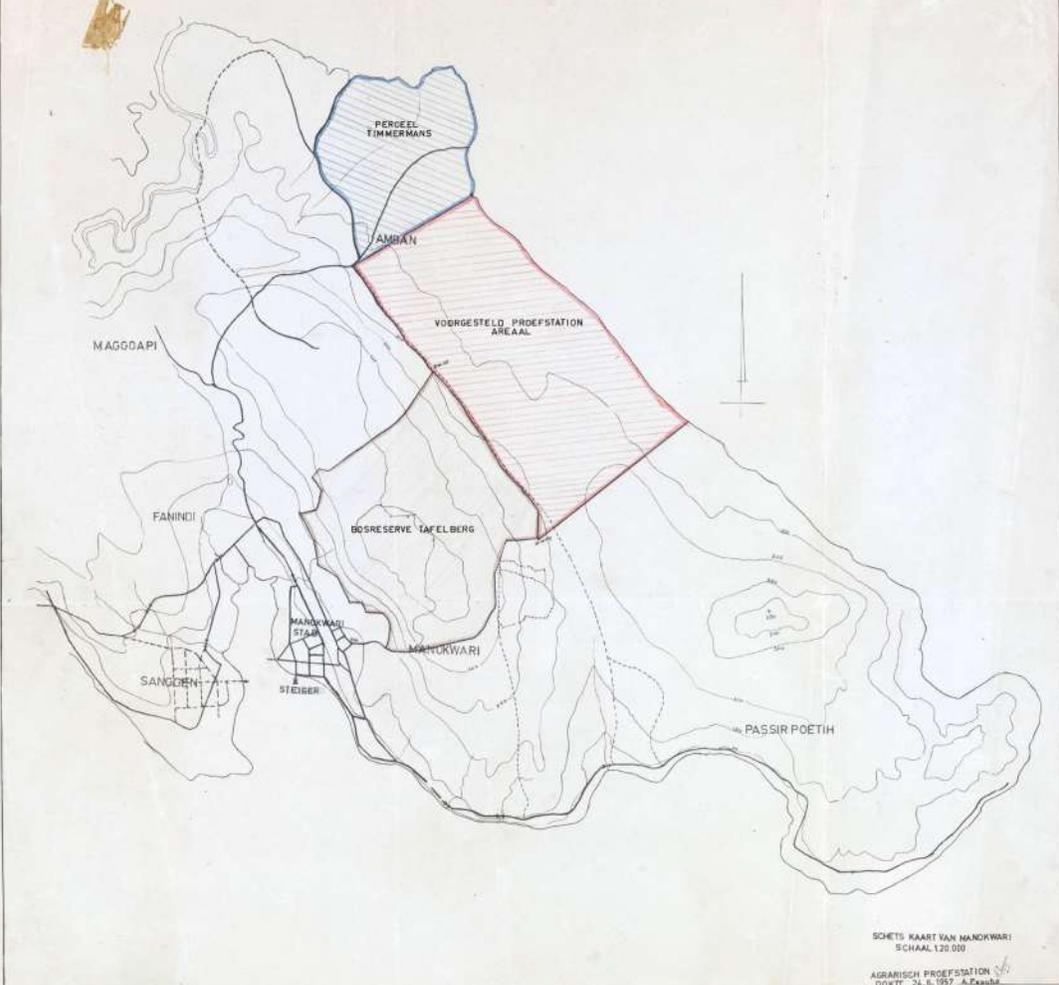
Peranan Lembaga Penelitian Pertanian Manokwari menjadi sangat penting dalam mendukung pengembangan sektor pertanian di wilayah ini. Dengan tugas utama melakukan penyelidikan terhadap kualitas tanah, lembaga ini membantu mengidentifikasi jenis tanaman yang paling sesuai untuk dikembangkan di Manokwari. Namun demikian, kemajuan sektor pertanian di Manokwari masih terkendala oleh minimnya infrastruktur antarwilayah. Kondisi ini tidak hanya memperlambat distribusi hasil produksi, tetapi juga menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Di sisi lain, tingginya ketergantungan pada barang-barang impor—seperti tekstil, beras, gula, minyak tanah, dan bensin—menjadikan ekonomi Manokwari sangat rentan terhadap fluktuasi harga serta potensi keterlambatan distribusi.

Koperasi di Manokwari memegang peran kunci sebagai penggerak ekonomi lokal, penyedia kebutuhan pokok, dan pemberdayaan komunitas. Dengan mengumpulkan hasil bumi seperti kopra dan kopal untuk dipasarkan, koperasi menjadi saluran distribusi utama yang mendukung ekonomi lokal dan regional. Selain itu, toko-toko koperasi memainkan peran penting dalam menyediakan barang kebutuhan dasar bagi masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh pedagang swasta. Lebih jauh lagi, koperasi turut mendorong partisipasi anggota dalam struktur manajemen, yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan administrasi dan finansial mereka.⁵⁸

Koperasi seperti “*Werkgemeenschap Amberbaken*” misalnya, sengaja dibentuk untuk mendukung perekonomian komunitas dengan menyediakan akses ke barang dagangan dan hasil bumi.

Onderafdeling Manokwari, hlm. 175-77.

58 F.H. Peters, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Controleur der Onderafdeling Manokwari*, hlm. 182-84.



Gambar 3.8. Sketsa wilayah Manokwari yang menggambarkan rencana pendirian kawasan pertanian di sekitaran Amban-Manokwari. Yang ditandai merah (*Voorgesteld Proefstation Areaal*) merupakan area yang diusulkan sebagai lokasi percobaan pertanian. Sementara yang berwarna biru (*Perceel Timmermans*) merupakan sebidang tanah yang kemungkinan telah disewakan kepada pihak perorangan untuk keperluan pertanian atau penelitian. Lalu yang berwarna coklat (*Bosreserve Tafelberg*) merupakan kawasan cagar hutan. Peta ini disusun oleh Agrarisch Proefstation pada tanggal 26 September 1957.

Sumber: *Inventaris van Kaarten en Tekeningen Behorende tot het Archief van het Ministerie van Koloniën en Rechtsopvolgers, (1702) 1814-1963.* https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.MIKO/invnr/6540.2/file/NL-HaNA_4.MIKO_6540.2

Selain menjadi wadah distribusi bahan pangan, koperasi ini juga diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang memperkuat solidaritas antaranggota. Namun faktanya, koperasi ini sering kali mengalami masalah lantaran modal kecil, buruknya tata kelola administrasi, dan minimnya pengawasan.⁵⁹ Situasi tersebut pun berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan mempersulit tumbuhnya usaha-usaha lokal.

Tabel 3.5. Produk-produk yang Difasilitasi oleh Koperasi “Werkgemeenschap Amberbaken” untuk Dikirim ke Manokwari (1960)

Produk	Omzet	Satuan
Bawang Merah	5140	kg
Kacang Tanah Berkulit	13153	kg
Kacang Tanah Kupas	1706.5	kg
Kacang Hijau	25	kg
Jagung	307	kg
Atap	3775	buah
Gula Merah	1046	kg
Padi	1385	kg
Kopra	9525	kg
Kelapa	3200	buah
Babi	1	ekor
Kapuk	4	kg

Sumber: F.H. Peters, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Controleur der Onderafdeling Manokwari (Medio 1959 – Begin 1961)*, hlm. 174.

Meskipun memiliki potensi besar, koperasi di Manokwari menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Sistem pengelolaan koperasi di Manokwari begitu bergantung pada pedagang perantara, terutama pedagang Tionghoa yang

59 F.H. Peters, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Controleur der Onderafdeling Manokwari*, hlm. 176-78.

memainkan peran sentral dalam perdagangan. Selain itu, masalah keuangan menjadi salah satu kendala utama, dengan beberapa koperasi mengalami defisit besar akibat pengelolaan yang buruk dan utang kredit yang tidak terkendali. Dalam kasus koperasi “Bonsapija” misalnya, di mana ketuanya, S. Bonsapija, tertangkap basah menyalahgunakan dana koperasi hingga menimbulkan kerugian bagi anggota lainnya. Kasus tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem manajemen koperasi di Manokwari. Apalagi transparansi dalam pengelolaan keuangan sering kali tidak dijalankan, yang berimbas terhadap turunnya kepercayaan para anggota koperasi.⁶⁰

Minimnya pengawasan dari pihak kolonial turut memperparah kondisi koperasi di Manokwari. Pemerintah dinilai kurang memberikan kontrol dan pengawasan yang memadai terhadap operasional koperasi. Akibatnya, koperasi seringkali berjalan tanpa mekanisme audit yang jelas, sehingga penyimpangan dan penyalahgunaan dana menjadi hal yang umum terjadi. Restrukturisasi untuk memperbaiki manajemen koperasi pun berjalan lambat, karena keterbatasan tenaga ahli di tingkat lokal yang mampu mengambil alih pengelolaan koperasi.⁶¹

Beberapa koperasi akhirnya dilikuidasi akibat tidak mampu membayar utang dan manajemen yang buruk. Koperasi kecil di beberapa desa, misalnya, banyak yang gagal bertahan karena beban defisit yang terlalu besar. Namun, ada pula upaya restrukturisasi dan reformasi yang dilakukan untuk memperbaiki koperasi. Koperasi “Arfak,” yang didirikan pada September 1960, berhasil menarik kembali kepercayaan anggota dengan melibatkan pengurus baru seperti Joh. Kafiar, Ef. Rumsarwir, dan Sol. Rumarbar. Reformasi ini dilakukan dengan menekankan

60 F.H. Peters, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Controleur der Onderafdeling Manokwari*, hlm. 184.

61 F.H. Peters, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Controleur der Onderafdeling Manokwari*, hlm. 184-85.

transparansi dan partisipasi aktif dari anggota komunitas lokal.⁶²

Selain Arfak, koperasi “Sersec” (Serikat Social dan Ekonomi) juga menjadi contoh upaya baru untuk memperbaiki tata kelola koperasi di Manokwari. Didirikan pada Desember 1960 dengan dukungan pemerintah lokal dan militer, koperasi ini bertujuan mendorong perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Pengurus seperti S. Bonsapija, M. Kesaulya, dan J. Pitoy berfokus pada evaluasi kelayakan dan perencanaan yang lebih matang untuk memastikan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

Dengan perbaikan infrastruktur, manajemen koperasi, dan pengelolaan hasil bumi yang lebih baik, Manokwari sebenarnya memiliki peluang untuk berkembang menjadi pusat ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Namun, masalah tata kelola koperasi, infrastruktur logistik, serta ketergantungan pada impor dan pedagang perantara masih menjadi kendala utama.⁶³

Ke depannya, Bank Indonesia akan berperan sentral dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait aspek moneter dan ekonomi di Manokwari. Melalui dukungan kebijakan yang tepat serta pengawasan terhadap tata kelola koperasi dan distribusi logistik, Bank Indonesia mampu mendorong terciptanya stabilitas ekonomi yang lebih kuat di Manokwari. Dengan peran strategis ini, Bank Indonesia tidak hanya menjadi pilar moneter, tetapi juga katalisator pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

D.5. Perkembangan Ekonomi di Merauke

Dikenal sebagai “kota tentara” pada masa Hindia Belanda, Merauke merupakan pos penjagaan penting dalam strategi pertahanan wilayah sekaligus pusat pemerintahan kolonial di bagian timur Indonesia. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Papua

62 F.H. Peters, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Controleur der Onderafdeling Manokwari*, hlm. 185.

63 F.H. Peters, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Controleur der Onderafdeling Manokwari*, hlm. 175-77.

Nugini menjadikan Merauke penting secara geopolitik, terutama dalam konteks pengawasan wilayah dan hubungan lintas batas setelah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1963.

Secara geografis, Merauke terletak di dataran rendah yang luas, berdekatan dengan rawa-rawa dan hutan sabana khas Papua selatan. Berbeda dengan wilayah pegunungan atau pesisir utara Papua, Merauke memiliki tanah yang relatif datar, sehingga menjadikannya cocok untuk aktivitas peternakan. Pada masa kolonial dan awal integrasi ke Indonesia, kawasan Merauke sempat dijadikan lokasi percobaan pertanian modern, termasuk proyek-proyek transmigrasi terbatas yang mulai dirintis untuk mengembangkan ekonomi lokal. Namun upaya ini ternyata tidak sepenuhnya berhasil.

Ditinjau dari segi ekonomi, Merauke memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lain di Papua. Impor dan perdagangan antar pulau dengan daerah lain di Indonesia menjadi kebutuhan mutlak bagi Merauke untuk memenuhi berbagai kebutuhan primer dan sekundernya. Kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya, yang hampir tidak pernah melakukan upaya konkret untuk menjadikan Merauke mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Akibatnya, wilayah ini sangat bergantung pada pasokan dari luar. Sebagai respons, pemerintah daerah dan Bank Indonesia cabang Merauke kelak harus bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidup penduduk setempat, dengan tujuan jangka panjang untuk mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Kelancaran arus barang (*flow of goods*) di Merauke, baik untuk ekspor maupun impor, sangat bergantung pada jadwal pengangkutan dari dan menuju Sorong. Hingga akhir tahun 1965, Merauke hanya memiliki satu pelabuhan yang mampu menampung kapal dengan kapasitas maksimum 3.000 ton. Meski demikian,

fasilitas pelabuhan tersebut relatif memadai, karena proses keluar-masuk barang dari gudang berjalan lancar dan tidak mengalami kemacetan seperti yang sering terjadi di pelabuhan-pelabuhan di kota besar di Papua.

Namun, barang-barang yang menuju Merauke sering tertahan di Pelabuhan Sorong, yang saat itu digunakan sebagai pelabuhan transit, baik untuk barang ekspor maupun impor. Sebagai gambaran, jarak perjalanan pulang-pergi antara Merauke dan Sorong memakan waktu sekitar dua minggu. Setiap perjalanan biasanya mengangkut barang impor rata-rata sebanyak seribu ton, dan saat kembali membawa bahan ekspor sekitar 200 hingga 300 ton.

Dari sudut pandang bisnis, kondisi ini jelas kurang menguntungkan. Letak Merauke yang sering dianggap kurang strategis membuat wilayah ini kerap dianaktirikan oleh perusahaan-perusahaan pengangkutan. Meskipun begitu, keberadaan Merauke tetap memiliki peran penting dalam melancarkan arus barang ke berbagai daerah di Irian Barat, menjadikannya titik vital dalam rantai distribusi wilayah tersebut.

Terkait upaya untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan di Merauke, tidak banyak rencana konkret dan signifikan yang berhasil diinisiasi. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Merauke terhadap impor dan perdagangan antar pulau untuk memenuhi kebutuhan logistik di sana. Menjelang transisi kekuasaan tanggal 1 Mei 1963, di Merauke bahkan sempat dilaporkan terjadi krisis sandang. Kondisi tersebut timbul bukan hanya lantaran persediaannya saja yang tipis, namun daya beli penduduk yang juga terbatas. Sebagai solusi sementara terkait persoalan tersebut, pemerintah setempat pun memohon sumbangan sandang dari pemerintah pusat dan masyarakat luas.⁶⁴

Kondisi tanah Merauke yang kurang subur juga menjadi

64 "Sumbangkan Bahan Sandang untuk Merauke," *Tjenderawasih*, 10 April 1963.



Gambar 3.9. Proyek ‘Padi Kumbe’ yang selama puluhan tahun diinisiasi oleh pemerintah kolonial Belanda di Merauke.

Sumber: Kantoer voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea, April 1956. Nummer Toegang: 2.24.05.02. <http://hdl.handle.net/10648/ae401238-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

salah satu tantangan utama, khususnya terkait budidaya sayur-sayuran yang sulit tumbuh di wilayah itu. Salah satu inisiatif yang pernah dijalankan adalah ‘Proyek Padi Kumbe,’ yang diinisiasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Proyek ini sempat menghasilkan padi kering sebanyak 194 ton. Namun, biaya operasional yang sangat tinggi membuat proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pada tahun 1964 saja, proyek tersebut telah mencatat kerugian sebesar IBRp300 ribu, sehingga tidak lagi dianggap layak untuk diteruskan.⁶⁵

Dalam perjalanan sejarah ekonomi Merauke, komunitas

65 Sebagai catatan, proyek ini sempat dilanjutkan oleh pemerintah setempat, tapi akhirnya dihentikan karena tidak membawa profit yang diharapkan.

pedagang Tionghoa memegang peranan penting dalam mengembangkan jaringan perdagangan hasil bumi, khususnya kopra. Komoditas kopra menjadi salah satu unggulan utama Merauke, dengan peran strategis pedagang Tionghoa yang bertindak sebagai penghubung antara produsen lokal, koperasi, dan perusahaan dagang besar.

Perdagangan kopra yang dikelola oleh pedagang Tionghoa memiliki fokus utama pada beberapa area strategis di Merauke, khususnya di sepanjang Sungai Maro dan Bulaka, yang menjadi pusat utama pengumpulan kopra. Di sekitaran sungai tersebut, tersebar beberapa desa yang berperan sebagai pemasok utama kopra. Kopra yang dihasilkan dari desa-desa ini kemudian dikumpulkan dan ditimbang sebelum diangkut ke pusat perdagangan seperti Merauke dan Boven-Digoel. Proses pengangkutan dilakukan melalui jalur sungai atau darat, tergantung pada kondisi geografis dan infrastruktur setempat.

Perdagangan kopra ini juga berkembang ke daerah-daerah produksi lain yang memiliki kontribusi signifikan. Okaba/Alako, misalnya, dikenal sebagai wilayah yang sangat produktif dan menjadi salah satu kontributor utama produksi kopra. Sanggase berperan sebagai pusat pengumpulan komoditas dari berbagai desa di sekitarnya, sementara Kalboeroe mendukung produksi kopra dalam skala yang cukup besar. Sinergi dari berbagai wilayah ini menjadikan perdagangan kopra di Merauke sebagai salah satu pilar penting penggerak ekonomi kawasan.

Fakta di lapangan menunjukkan bagaimana para pedagang Tionghoa kerap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam berbagai urusan ekonomi, termasuk koperasi lokal dan organisasi pemerintah kolonial. Salah satu lembaga yang turut mendukung kelancaran perdagangan adalah L.V.D. (*Landbouw Voorlichtingsdienst*), yang berperan sebagai pengawas dan fasilitator untuk memastikan bahwa setiap transaksi perdagangan berjalan dengan lancar dan efisien.

Peran pedagang Tionghoa ini tidak hanya terbatas pada membantu petani menjual hasil produksinya, tetapi juga mencakup penyediaan barang-barang kebutuhan pokok yang sebagian besar diimpor dari luar Merauke. Salah satu figur kunci dalam jaringan perdagangan ini adalah Go Mie Tjioen. Go menjalankan operasinya di kawasan Boven-Digoel dan Merauke dengan peran strategis yang melampaui sekadar aktivitas perdagangan. Ia juga menjadi penghubung utama yang menjembatani berbagai elemen dalam sistem ekonomi lokal, menciptakan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Salah satu kontribusi utamanya adalah mendistribusikan kopra ke perusahaan eksportir seperti N.V. Zuidkust. Kopra yang dikumpulkan dari Merauke tersebut kemudian dikirimkan ke pusat-pusat ekonomi yang lebih besar, sehingga memperluas jaringan perdagangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.⁶⁶

Meskipun memiliki jaringan yang kuat, pedagang Tionghoa menghadapi beberapa hambatan dalam aktivitas perdagangan mereka. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya infrastruktur transportasi, terutama di daerah pedalaman seperti Boven-Digoel. Ketergantungan pada jalur sungai dan kondisi transportasi darat yang buruk sering kali menyebabkan keterlambatan pengiriman kopra ke pasar atau perusahaan dagang besar. Ketidaktepatan waktu dalam distribusi ini tidak hanya merugikan pedagang, tetapi juga berdampak langsung pada petani dan koperasi yang bergantung pada pendapatan dari penjualan kopra. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada jaringan perdagangan Tionghoa menjadikan pasar lokal sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan kondisi eksternal.⁶⁷

Demikianlah, bab ini telah menunjukkan bahwa kondisi

66 W.M. van der Veen, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdelingschef Merauke (Oktober 1959 - April 1961)*, hlm. 21.

67 W.M. van der Veen, *Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdelingschef Merauke*, hlm. 21.

ekonomi di Papua pada periode 1950-an hingga 1960-an diwarnai dinamika yang unik dan penuh tantangan. Keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses ke berbagai wilayah, serta ketergantungan pada ekonomi subsisten menjadi hambatan utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kehadiran koperasi, program kredit, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meskipun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kelemahan administrasi dan kurangnya tenaga kerja terampil. Bagian berikutnya akan membahas tentang proses pendirian lima KCBI di Papua dan berbagai perkembangan selanjutnya. §

Nasionalisasi dan Pembangunan Lanjutan di Papua

Setelah menasionalisasi perusahaan-perusahaan besar Belanda seperti *Nederlandsche Handel-Maatschappij* (NHM) dan *Nieuw-Guinea Import en Export Maatschappij* (NIGIMY), pemerintah Indonesia melanjutkan langkah strategisnya dengan mengambil alih sejumlah perusahaan penting lainnya yang beroperasi di Papua. Fokus utama berikutnya adalah sektor transportasi, baik udara maupun laut, yang dinilai sangat vital bagi konektivitas dan integrasi Papua. Langkah ini tidak terlepas dari tantangan besar yang harus dihadapi dalam mengatasi kondisi geografis Papua yang terpencil, terpisah-pisah oleh laut dan pegunungan, serta terbatasnya infrastruktur transportasi yang tersedia.

Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Iskandar selaku perwakilan dari Departemen Aviasi Indonesia, menyatakan bahwa mulai 1 Januari 1963, *De Kroonduif* selaku anak perusahaan *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij* (KLM), resmi diambil alih oleh *Garuda Indonesian Airways* (GIA). Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Iskandar mewakili GIA dan Dr. van Konijnenburg sebagai perwakilan dari KLM. Dalam kesepakatan itu, GIA berkomitmen untuk mengoperasikan layanan pe-

nerbangan reguler yang menghubungkan Jakarta dan Biak sebanyak dua kali dalam sepekan. *De Kroonduif* sendiri pernah berkantor pusat di Biak dan pertama kali melayani penerbangan di Papua pada tahun 1955.

Sebagai informasi, seluruh aset milik *De Kroonduif*—mulai dari armada pesawat, kantor, hanggar, hotel, hingga kendaraan operasional—secara resmi dialihkan ke GIA. Satu-satunya pengecualian adalah sebuah pesawat Dakota tua yang tidak diinginkan oleh pihak Indonesia; pesawat ini kemudian dikembalikan ke Belanda dan difungsikan sebagai pesawat angkut barang. Selain pengambilalihan aset, seluruh staf Belanda yang sebelumnya bekerja di *De Kroonduif* digantikan oleh tenaga kerja asal Indonesia.

Di sektor transportasi laut, *Pelayaran Nasional Indonesia* (PELNI) secara resmi mengambil alih jalur pelayaran dari *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) dan mulai mengoperasikan rute Jakarta–Irian Barat sejak Maret 1963. Pada bulan yang sama, PELNI juga membuka jalur ekspres yang menghubungkan Jakarta–Surabaya–Makassar–Manado–Ambon, dan sebaliknya, untuk meningkatkan aksesibilitas dan ko-

nektivitas antar pulau di Indonesia.

Tak kalah penting, sebuah universitas pun didirikan di Kotabaru sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempercepat integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Institusi ini kemudian berkembang menjadi Universitas Cenderawasih yang kita kenal saat ini. Sejak awal, kurikulum universitas tersebut dirancang secara strategis untuk membentuk kesadaran nasional, dengan menghadirkan mata kuliah seperti “Sejarah Nasional Indonesia” dan “Pancasila-Manipol” sebagai komponen utama. Upaya ini mencerminkan tidak hanya komitmen pemerintah dalam bidang pendidikan, tetapi juga strategi propagandistik yang terencana untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai keindonesiaan di kalangan kaum terdidik Papua.

Sejumlah wartawan Belanda melaporkan bahwa masyarakat Papua tampak relatif tenang dalam menyikapi proses “Indonesianisasi” yang tengah berlangsung di wilayah mereka. Salah satu faktor yang mendorong sikap ini adalah kesan positif yang dibawa oleh berbagai delegasi Papua setelah mengunjungi Jakarta. Pengalaman mereka selama berada di ibu kota membawa narasi yang lebih kuat mengenai integrasi, yang kemudian memengaruhi persepsi publik secara lebih luas. Selain itu, bertambahnya jumlah pemuda Papua yang melanjutkan pendidikan ke Jakarta, juga dianggap sebagai katalisator yang memperkuat jalinan sosial dan budaya antara Papua dan

Indonesia. Namun demikian, meskipun proses integrasi tersebut terus berjalan dengan berbagai pendekatan, semangat nasionalisme Papua masih terus terjaga.

Koran *De Tijd Maasbode* sempat melaporkan bagaimana sekelompok tentara Indonesia berselisih dengan warga Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora sebagai bentuk perlawanan simbolik. Menyadari potensi eskalasi yang bisa mengguncang stabilitas di masa transisi yang masih rawan, pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meredam situasi. Alih-alih menggunakan pendekatan represif, pemerintah justru mengadopsi kebijakan yang lebih fleksibel terkait isu bendera ini. Masyarakat Papua diizinkan mengibarkan bendera tersebut tanpa rasa takut terhadap tindakan aparat. Dalam perkembangannya, bendera Papua bahkan sempat dipertimbangkan sebagai bendera resmi provinsi. Hingga akhir 1962, pendekatan ini dinilai cukup berhasil dalam menurunkan ketegangan dan menjaga kondusivitas di wilayah Papua.

Referensi

- “Indonesie Actief in Nieuw-Guinea,” *De Volksrant*, 4 Desember 1962.
- “Veel Contacten op Nieuw-Guinea: Nederlanders op Goede Voet met de Indonesiërs,” *De Tijd Maasbode*, 15 Desember 1962.
- Bank Indonesia, Report for the Year 1960-1965*. Jakarta: PN Pertjetakan Gita Karya, 1966.

BAB IV

PENDIRIAN KANTOR-KANTOR CABANG BANK INDONESIA DI PAPUA

Menjelang transisi kekuasaan dari pihak UNTEA ke pihak Indonesia yang disepakati akan berlangsung pada 1 Mei 1963, salah satu aspek yang menjadi fokus utama pembenahan dari pemerintah Indonesia adalah percepatan pembangunan ekonomi dan integrasi moneter Papua secara penuh ke dalam Republik Indonesia. Peran dari Bank Indonesia pun menjadi begitu sentral dalam hal ini. Dengan kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan di Papua, terutama dalam urusan menyediakan akses layanan keuangan dasar bagi masyarakat di sana.

Sebagai provinsi baru dalam wilayah Indonesia, posisi Papua memang tergolong unik. Papua tidak hanya memiliki anggaran belanjanya sendiri, tetapi juga peraturan devisa, peraturan

mengenai perdagangan internasional, hingga mata uangnya sendiri yang dinamakan “Rupiah Irian Barat” (IBRp.). Kondisi ini membuat kebijakan moneter yang kelak diterapkan di Papua berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya.¹

Salah satu kebijakan penting yang diinisiasi pemerintah Indonesia adalah mendirikan lima unit kantor cabang yang tersebar di kota-kota utama di Papua, yakni Kotabaru (Jayapura), Biak, Manokwari, Sorong, dan Merauke. Pendirian kelima cabang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah yang lebih luas untuk sesegera mungkin mengonsolidasikan Papua ke dalam ekonomi nasional.

Kelima kantor cabang ini kelak memainkan peran vital dalam mengelola peredaran uang, menyalurkan kredit, dan menerapkan kebijakan moneter di Papua yang saat itu tengah beradaptasi dengan sistem perekonomian Indonesia. Lebih dari itu, kantor-kantor cabang ini berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional Indonesia, menjadikan perbankan sebagai pilar penting dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal sekaligus menjaga kesinambungan

1 (1) Kesatuan uang Rupiah khusus ini diatur dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1963 dan Surat Keputusan Menteri U.R.S. P.3 No. BPN I/3/1/7 dan BPN I/3/1/8 yang kemudian dikenal dengan Rupiah Irian Barat; (2) Anggaran pendapatan dan belanja provinsi Irian Barat diatur dengan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1963 dan Keputusan Menteri Urusan Anggaran Negara No. M/UAN/11-1-76/K; (3) Peraturan-peraturan devisa khusus untuk provinsi Irian Barat diatur dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1963 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan P3 dan Menteri Urusan Bank Sentral No.15/M/P3/63; (4) Peraturan lalu lintas barang perdagangan antara Republik Indonesia dengan daerah-daerah di Irian Barat diatur dengan Surat Keputusan Bersama dan pengumuman mengenai Irian Barat yang disiapkan oleh Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN); (5) Perdagangan Irian Barat dengan luar negeri diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 300/M/SK/1963. Lihat “Laporan Pemimpin Tjabang Sukarnapura (Gusti Abdul Aziz) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan jang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

pembangunan di wilayah Papua.

Sekalipun berusia relatif singkat, dampak dari kelima kantor cabang ini sangat signifikan dalam menghadirkan Indonesia di Papua. Di tengah dinamika transisi yang penuh tantangan, mereka tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator dalam pembangunan ekonomi di Papua. Melalui kolaborasi yang terjalin erat dengan berbagai instansi pemerintahan sekaligus pihak swasta, Bank Indonesia mampu hadir sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di Papua.

A. Kantor Cabang BI Jayapura (Kotabaru)

A.1. Proses Pendirian

Seperti sudah disinggung sekilas dalam bab sebelumnya, berdirinya KCBI Papua tidak dapat dipisahkan dari peranan “Peleton Bank” yang dikomandoi oleh E. Soekasah Somawidjaja. Berawal dari keputusan Bung Karno untuk melancarkan Operasi Trikora pada akhir 1961, pihak Bank Indonesia pun terlibat aktif mendukung rencana tersebut dengan mengirimkan orang-orang terbaiknya. Unit Peleton Bank ini kemudian berperan penting dalam pembukaan kantor cabang Bank Indonesia di lima kota utama di Papua, yaitu Kotabaru (kelak berganti nama menjadi Jayapura), Biak, Manokwari, Sorong, dan Merauke.

Bank Indonesia menjadi salah satu institusi pemerintahan Indonesia pertama yang didirikan di Papua, jauh sebelum transisi kekuasaan resmi dari pihak UNTEA. Kebijakan ini begitu krusial untuk menjaga kelangsungan ekonomi di Papua agar tidak mengalami kekosongan setelah penarikan administrasi Belanda. Selain itu, KCBI Kotabaru diharapkan juga dapat membantu mempersiapkan jaringan perbankan lokal, sehingga begitu proses transisi usai, sistem ekonomi Papua sudah memiliki struktur dasar yang bisa langsung berfungsi.

KCBI Kotabaru/Jayapura diresmikan pada 12 Desember 1962,

sehari sebelum diresmikannya Kantor Berita *Antara* di Papua. Strategi ini mencerminkan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kedaulatan dan pengaruh di Papua melalui dua jalur utama, yakni sektor moneter dan juga pemberitaan.² Kedua institusi ini menjadi instrumen penting dalam konsolidasi kekuasaan Indonesia di Papua selama masa transisi dari UNTEA.

Prosesi peresmian KCBI Kotabaru dihadiri oleh berbagai tokoh penting, baik dari dalam maupun luar negeri. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Soerjadi, hadir sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia, sementara Sudjarwo Tjondronegoro turut serta dalam kapasitasnya sebagai Kepala Perwakilan RI di Irian Barat. Sejumlah perwakilan UNTEA, seperti Dr. Djalal Abdoh, Dr. Sudhir Sen, Dr. Ghulam Abbas, dan Dr. George Janecek, juga turut hadir. Kehadiran mereka mencerminkan betapa strategisnya peran KCBI Kotabaru dalam memperkuat hubungan ekonomi serta diplomasi internasional di masa transisi.³

Perwakilan Kepala UNTEA, Dr. Sudhir Sen, menerangkan dalam sambutannya bahwa pembukaan KCBI Kotabaru memiliki makna penting bagi wilayah-wilayah yang ada di Papua. Menurutnya, kehadiran Bank Indonesia bukan hanya menjadi simbol transisi administratif, melainkan juga sebuah langkah konkret dalam membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif bagi masyarakat Papua. Ia pun menaruh harapan besar agar Bank Indonesia bisa berperan aktif dalam mendorong

2 Pada 13 Desember 1962, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-25 Kantor Berita Antara, di Kotabaru didirikan cabang dari kantor berita nasional ini. Untuk sementara waktu, pimpinan *Antara* Kotabaru dipegang oleh Suwito. Dalam kata sambutannya, Sudjarwo Tjondronegoro selaku Kepala Perwakilan RI di Irian Barat berharap agar hubungan pemberitaan antar seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, bisa terus dipererat. Lihat "KB Antara Kotabaru Dibuka pada Hari Ulang Tahunnya ke-25," *Tjenderawasih*, 14 Desember 1962.

3 "Speech Held at the Opening Reception of the Bank Indonesia Branch in Kotabaru by the Deputy Governor of Bank Indonesia, Dr. Soerjadi," Lampiran Surat KB No. 10 dari Kotabaru, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 13 Desember 1962.

pertumbuhan ekonomi, membuka akses keuangan yang lebih luas, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua.⁴

Sudjarwo Tjondronegoro secara khusus menghaturkan terima kasih kepada pihak UNTEA yang telah berkenan membantu proses persiapan sampai dengan mengawal terwujudnya institusi ini. Dalam pidatonya, Sudjarwo menyatakan:

“Pembukaan Tjabang Bank Indonesia di Kotabaru merupakan tindakan madju selangkah dari Republik Indonesia, karena Bank mempunyai fungsi penting bagi perekonomian modern sekarang.”⁵

Sudjarwo juga menambahkan, dalam menghadapi situasi moneter Papua yang penuh tantangan, KCBI Kotabaru diyakini dapat memberikan berbagai sumbangan positif bagi perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Ia pun berharap agar Bank Indonesia dapat menjadi simpul perekat bagi jalinan kerja sama ekonomi di Papua.

Dalam pidato panjangnya, Soerjadi menerangkan sekelumit akar historis dari Bank Indonesia. Menurutnya, sejak Bank Indonesia didirikan pertama kali pada tahun 1953 yang didasarkan pada UU No. 11 Tahun 1953 mengenai Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, BI selalu berupaya untuk memperluas jangkauan pelayanannya supaya dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Soerjadi, Bank Indonesia memiliki berbagai peran strategis, mulai dari bank sentral, bank sirkulasi, bank devisen, bank umum, hingga penasihat sekaligus agen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, fungsi bank sentral di berbagai

4 “Bank Indonesia Punja Tjabang di Bumi Tjenderawasih,” *Tjenderawasih*, 13 Desember 1962.

5 “Bank Indonesia Punja Tjabang di Bumi Tjenderawasih,” *Tjenderawasih*, 13 Desember 1962.

negara pun mengalami perubahan dan penyesuaian. Hal ini juga berlaku bagi Bank Indonesia, yang dituntut untuk tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia yang terus berkembang dengan cepat.⁶

Soerjadi juga secara khusus menyoroti kesenjangan antara penduduk asli dan penduduk asing yang bermukim di Papua. Sekalipun jumlah penduduk asing jauh lebih sedikit, mereka memiliki pengaruh yang lebih besar dalam urusan ekonomi bila dibandingkan dengan penduduk asli. Berdasarkan data statistik yang tersedia pada akhir tahun 1960, jumlah penduduk asli Papua diperkirakan berkisar di angka 700 ribu jiwa dan penduduk asing ada di angka 35 ribu jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk asli tersebut, sebanyak 462 ribu di antaranya sudah masuk dalam pengawasan administrasi secara teratur. Kemudian 54 ribu dari mereka juga dilaporkan telah berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi di Papua, dengan 16 ribu di antaranya dilaporkan menjadi pekerja upah, yang bila dirinci secara kasar adalah sebagai berikut: 9.000 bekerja pada sektor pemerintahan dan 7.000 bekerja pada sektor swasta (partikelir). Data ini menunjukkan, sebagian besar penduduk asli masih bergantung pada sistem ekonomi tradisional, seperti pertanian subsisten, perburuan, hingga sistem barter, sehingga membuat mereka tidak terdaftar dalam ekonomi modern.⁷

Selain itu, Soerjadi juga menyoroti ketimpangan distribusi pendapatan di Papua. Sebagai catatan, jumlah pendapatan resmi yang diterima oleh penduduk asli tercatat sebesar f. 20 juta/tahun dari keseluruhan pendapatan di Papua yang mencapai f. 200 juta/tahun. Itu berarti, para penduduk asli ini hanya menerima kira-kira 10 persen saja dari total pendapatan. Sementara 90 persen

6 "Speech Held at the Opening Reception of the Bank Indonesia Branch in Kotabaru," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 13 Desember 1962.

7 "Tjabang BI di Kotabaru Bekerja Menurut Kebutuhan Setempat (!)," *Tjenderawasih*, 13 Desember 1962.

pendapatan Papua dikendalikan oleh kelompok minoritas, terutama penduduk asing dan elite ekonomi yang mengendalikan sektor bisnis, perkebunan, dan pertambangan.⁸ Oleh karena itu, Soerjadi pun berharap agar kehadiran Bank Indonesia dapat berperan dalam menaikkan taraf ekonomi masyarakat asli Papua.

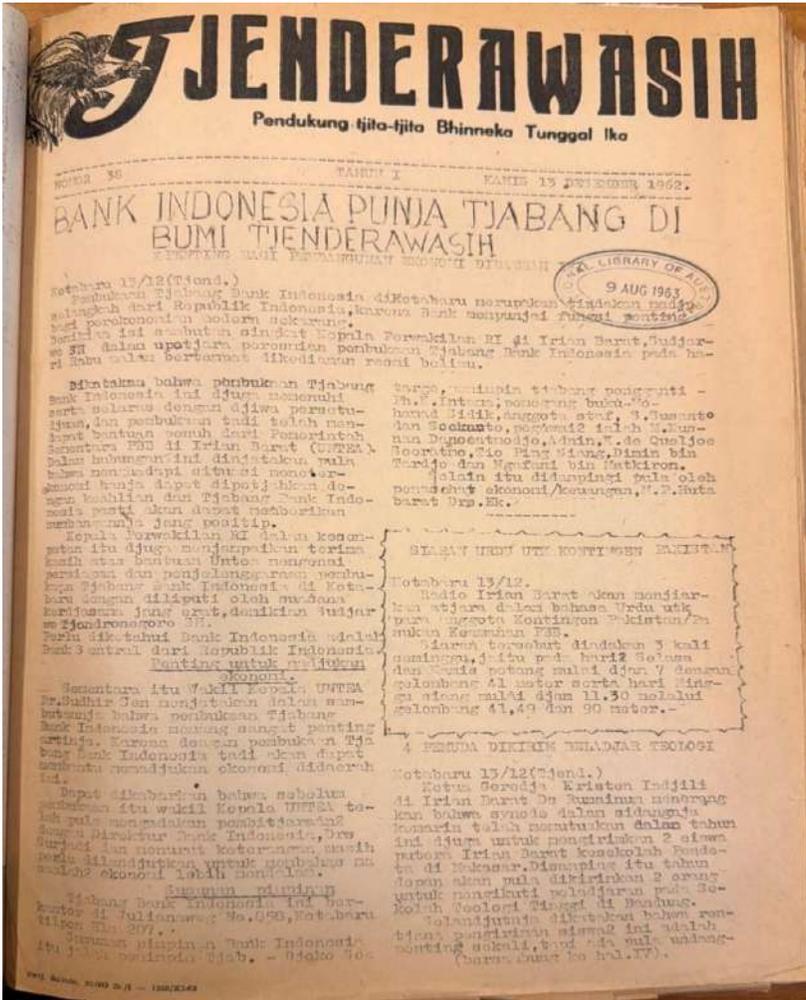
Dengan berdirinya KCBI Kotabaru, itu berarti Bank Indonesia telah memiliki 19 cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut masih belum mencakup cabang internasional Bank Indonesia, yang tersebar di Amsterdam, London, dan New York. Sebagai informasi, KCBI Kotabaru semula terletak di Julianaweg No. 858 (kemudian berganti nama menjadi Jalan Trikora), sebelum berpindah ke bekas gedung NHM.

Susunan kepengurusan awal KCBI Kotabaru terdiri dari Djoko Soetargo (Pimpinan Cabang), Ph. K. Intama (Pimpinan Cabang Pengganti), Mohamad Sidik (Pemegang Buku), S. Susanto dan Soekanto (Anggota Staf), M. Kusnan Danoeatmodjo, Adnin, K. de Queljoe, Soeratmo, Tio Ping Siang, Dimin bin Tardjo, Ngafani bin Matkirom (Pegawai). Dalam kegiatan operasionalnya, kepengurusan ini didampingi oleh M.P. Hutabarat yang bertindak sebagai Penasihat Ekonomi/Keuangan.⁹

KCBI Kotabaru—serta kantor cabang lainnya yang akan dibuka beberapa bulan berselang—beroperasi dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat. Jam operasional utama untuk KCBI Kotabaru berlangsung dari Senin hingga Sabtu, dengan rincian sebagai berikut: pada hari Senin hingga Jumat, kantor buka mulai pukul 07.10 hingga 14.00, sedangkan pada hari Sabtu, jam operasional lebih singkat, yaitu dari pukul 07.10 hingga 13.00. Sementara itu, kantor kas yang melayani transaksi keuangan masyarakat juga beroperasi dari Senin hingga Sabtu, tetapi

8 "Tjabang BI di Kotabaru Bekerdja Menurut Kebutuhan Setempat (I)," *Tjenderawasih*, 13 Desember 1962.

9 "Bank Indonesia Punja Tjabang di Bumi Tjenderawasih," *Tjenderawasih*, 13 Desember 1962.



Gambar 4.1. Berita tentang pembukaan Kantor Cabang Bank Indonesia Kotabaru di halaman depan Harian *Tjenderawasih*.

Sumber: *Tjenderawasih*, 13 Desember 1962

dengan jam layanan yang lebih singkat dibandingkan dengan kantor cabang utama. Pada hari Senin hingga Jumat, kantor kas melayani nasabah dari pukul 08.00 hingga 12.00, dan pada hari Sabtu, operasionalnya dibatasi hingga pukul 11.00.¹⁰

Dengan susunan kepengurusan yang solid dan didukung oleh penasihat ekonomi berpengalaman, KCBI Kotabaru memainkan peran krusial dalam membangun fondasi sistem keuangan di Papua pasca-transisi dari UNTEA ke Indonesia. Keberadaannya tidak hanya menandai babak baru dalam integrasi moneter, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dalam upaya menstabilkan perekonomian serta mempercepat pertumbuhan sektor keuangan di wilayah ini. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, KCBI Kotabaru menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional, sekaligus membuka jalan bagi perkembangan ekonomi Papua di masa-masa berikutnya.

A.2. Nasionalisasi Aset *Nederlandse Handels Maatschappij* (NHM)

Pihak UNTEA menyatakan kepuasannya terhadap kinerja KCBI Kotabaru dan berharap pendirian kantor cabang ini dapat diikuti oleh pembukaan kantor-kantor cabang lain di Papua. Menurut UNTEA, kebijakan ini sangat diperlukan setelah menimbang berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan di Papua, rendahnya tingkat literasi keuangan, serta resistensi masyarakat terhadap sistem perbankan yang baru.

Menjelang akhir Januari 1963, dalam pertemuan dengan M.

10 Terhitung sejak awal Maret 1964 terjadi sedikit perubahan untuk jam operasional kantor kas. Khusus untuk hari Jumat jam operasionalnya disamakan dengan hari Sabtu, yakni mulai pukul 08.00 - 11.00. Kebijakan ini diambil untuk memberikan waktu lebih panjang bagi pegawai yang beragama Islam untuk menunaikan Salat Jumat. Lihat "Tjabang Biak," dalam Surat KB No. 10/3/UU/INSP, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 21 Februari 1963.

Rifai—yang saat itu menjabat sebagai Pimpinan KCBI Jayapura menggantikan Djoko Soetargo—Dr. Ghulam Abbas, Kepala Departemen Keuangan dan Ekonomi UNTEA, menyatakan ketertarikannya terhadap rencana ekspansi BI ke wilayah Papua lainnya. Ia mengungkapkan telah mendengar mengenai rencana pembukaan kantor cabang baru dan meminta kepastian mengenai jadwal operasional masing-masing kantor tersebut. Selain itu, Dr. Abbas juga secara khusus meminta penjelasan mengenai rencana keuangan dan ekonomi Indonesia terhadap Papua di masa mendatang.¹¹

Dalam pertemuan itu, Dr. Ghulam Abbas mengungkapkan bahwa Seegers, pimpinan NHM Jayapura, sempat menemuinya untuk menyampaikan beberapa informasi penting, di antaranya rencana NHM untuk menutup seluruh kantor cabangnya di seluruh wilayah Papua sebelum 1 Mei 1963. Penutupan ini secara otomatis akan berdampak terhadap terhentinya seluruh aktivitas perbankan NHM di Papua, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi lokal.¹²

Menyikapi situasi ini, Dr. Ghulam Abbas menyarankan agar M. Rifai segera merealisasikan pembukaan kantor-kantor cabang Bank Indonesia di luar wilayah Kotabaru. Ia pun menyarankan kepada pihak BI untuk sesegera mungkin mengakuisisi bekas kantor NHM tersebut, dan segera mengirim pakar keuangan dari Indonesia guna membahas penawaran yang diberikan pihak NHM. Langkah ini dinilai sangat penting untuk menjamin kelancaran aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas moneter di wilayah Papua, mengingat aktivitas ekonomi NHM tersebar di berbagai kota penting di wilayah tersebut. Terkait dengan rencana itu, Dr.

11 “Verkoop Eigendommen en Belangen van NHM aan Nationale Bank Indonesia,” *Limburgsch Dagblad*, 22 Februari 1963.

12 “Surat kepada Kepala UNTEA Melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kotabaru,” dalam Surat No. 10/1064/ULN/LN tanggal 14 Januari 1963, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 14 Januari 1963.

Abbas menyatakan bahwa UNTEA siap membantu menjembatani prosesnya.¹³

Bank Indonesia menyambut baik rencana akuisisi tersebut dan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. Sebagai tindak lanjut, BI mengutus tiga kader terbaiknya ke Papua untuk melaksanakan berbagai persiapan yang diperlukan sebelum pembukaan. Ketiga orang tersebut—Djoko Soetargo, S. Soesanto, dan M. Koesnan Danuatmodjo—memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup mengenai kondisi di Papua. Tugas utama mereka mencakup pencarian lokasi perumahan bagi calon karyawan bank serta penyelidikan terkait mekanisme penarikan dan peredaran uang. Seluruh hasil persiapan ini kemudian dilaporkan kepada pimpinan cabang Kotabaru sebelum diteruskan kepada Direksi di Jakarta untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Setelah laporan diterima, langkah selanjutnya adalah memberangkatkan pegawai-pegawai yang akan mengisi formasi di kantor cabang baru. Menjelang akhir Januari 1963, Bank Indonesia sudah mengirim 18 orang pegawai untuk ditempatkan di KCBI Biak, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Sebelum kantor-kantor tersebut resmi dibuka, para pegawai ini diwajibkan sudah berada di Biak dan Jayapura untuk memperoleh pelatihan. Selanjutnya, barulah mereka disebar ke masing-masing lokasi sesuai dengan kebutuhan operasional di keempat kantor cabang tersebut. Jika di masa mendatang terdapat kebutuhan tambahan pegawai atau penarikan pegawai, proses tersebut harus dikoordinasikan melalui cabang Jayapura.¹⁴

Pada tanggal 20 Februari 1963, Dr. Abbas mengadakan

13 “Surat kepada Kepala UNTEA Melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kotabaru,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 14 Januari 1963.

14 “Rentjana Pembukaan Kantor-Kantor Tjabung Bank Indonesia di Manokwari, Sorong dan Merauke,” dalam Surat KB No. 10 tanggal 8 Februari 1963, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 8 Februari 1963.

pertemuan di Jakarta dengan Sumarno (Menteri Urusan Bank Sentral) dan Soerjadi (Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Abbas mengajukan penawaran kepada pemerintah Indonesia untuk membeli gedung dan inventaris peralatan NHM yang tersebar di beberapa titik di Papua. Pihak Indonesia pada prinsipnya menyatakan kesanggupannya untuk mengakuisisi aset-aset tersebut. Selain itu, BI juga telah menyatakan kesiapannya untuk segera mengambil alih operasional perbankan di wilayah tersebut.¹⁵ Sebagai bagian dari rencana tersebut, kantor cabang di Biak direncanakan untuk mulai beroperasi sebelum tanggal 15 Februari 1963. Sementara itu, pembukaan kantor-kantor cabang lainnya ditargetkan dapat terlaksana pada akhir Februari 1963 atau paling lambat pada minggu pertama Maret 1963.¹⁶

Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta kemudian menunjuk Gusti Abdul Azis, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Pimpinan di KCBI Pontianak, serta F.H. Rarung, yang pernah menempati posisi kasir di KCBI Surabaya, untuk masing-masing mengisi posisi pimpinan di KCBI Biak dan Sorong. Sementara itu, Johnny Mardjono, yang sebelumnya bertugas sebagai kasir di KCBI Medan, dipercaya untuk memimpin KCBI Manokwari. Dengan ditetapkannya para calon pimpinan untuk masing-masing kantor cabang, proses pembukaan KCBI di berbagai wilayah Papua dapat dipercepat. Seluruh kantor cabang ini diperkirakan sudah dapat beroperasi sebelum 15 Maret 1963.¹⁷

Seiring dengan penunjukan nama-nama pimpinan baru, tiga pegawai yang sebelumnya dipinjamkan dari Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta diputuskan untuk ditarik kembali. Mereka adalah Moh. Sidik, yang menjabat sebagai pemegang

15 "NHM Dioper Bank Indonesia," *Tjenderawasih*, 22 Februari 1963.

16 "NHM di Irian Barat Mau Didjual Kepada Indonesia," *Merdeka*, 21 Februari 1963.

17 "Pembukaan Kantor-Kantor Tjabang Bank Indonesia di Manokwari, Sorong dan Merauke," dalam Surat KB No. 10/6/UU/INSP tanggal 2 Maret 1963, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 2 Maret 1963.

buku di Bank Indonesia Kotabaru; Saenan Soesanto, yang bertugas sebagai pegawai staf di Bank Indonesia Biak; serta M. Koesnan Danoeatmodjo, yang menjabat sebagai pegawai tata usaha di Biak.

Setelah seluruh urusan teknis diselesaikan, Bank Indonesia mengusulkan tanggal 23 Maret 1963 sebagai waktu penandatanganan kesepakatan jual-beli, diikuti oleh seremoni serah-terima pada 25 Maret 1963. Pimpinan KCBI Kotabaru mengusulkan agar prosesi seremoni dilaksanakan secara sederhana dan hanya dihadiri oleh masing-masing calon pimpinan cabang di Papua. Usulan ini diajukan mengingat kondisi transportasi yang sangat terbatas, sehingga sulit untuk mengumpulkan lebih banyak peserta dalam acara tersebut. Selain itu, ketersediaan penerbangan tidak dapat dijamin sepenuhnya karena jadwal pesawat kerap kali berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Meskipun demikian, pihak KCBI Kotabaru menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi tamu-tamu dari Jakarta jika diperlukan.¹⁸

Pada 23 Maret 1963, Bank Indonesia dan NHM secara resmi mencapai kesepakatan jual-beli. Penandatanganan perjanjian ini berlangsung di Jakarta dengan L. de Jong sebagai perwakilan NHM dan Soerjadi selaku perwakilan Bank Indonesia.¹⁹ Dengan demikian, terhitung sejak 24 Maret 1963, seluruh aktiva dan pasiva dari kantor cabang NHM yang tersebar di Kotabaru, Biak, Sorong, Manokwari, dan Merauke secara resmi beralih ke Bank Indonesia.²⁰

Langkah ini sebenarnya tidak sepenuhnya bersifat sukarela, karena Pemerintah Indonesia tidak ingin sistem perbankan—yang merupakan sektor strategis—berada di tangan pihak asing. Berdasarkan undang-undang keuangan yang berlaku, bank-bank Belanda saat itu telah dikeluarkan dari sistem perbankan

18 “Pembukaan Kantor-Kantor Tjabang Bank Indonesia di Manokwari, Sorong dan Merauke,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 2 Maret 1963.

19 Selama beberapa tahun terakhir, de Jong dipercaya sebagai salah satu agen NHM di Rotterdam, Belanda. Lihat “NHM Kreeg in Nieuw Guinea Andere Naam,” *Algemeen Dagblad*, 26 Maret 1963.

20 “Bank Indonesia Oper Nederlands Handel N.V.,” *Tjenderawasih*, 25 Maret 1963.

Indonesia. Sementara itu, terkait dengan akuisisi NHM, beberapa sumber informasi yang beredar menunjukkan bahwa dalam perundingannya di Jakarta, de Jong hanya berhasil memperoleh kompensasi terbatas untuk gedung-gedung serta inventaris NHM.²¹

Segera setelah akuisisi disepakati, para pegawai NHM yang berkebangsaan Belanda, dengan bantuan istri mereka, mulai menyelesaikan seluruh daftar pertanggungjawaban yang harus dirampungkan. Secara simbolis, mereka menurunkan papan bertuliskan “Nederlandsche Handelmaatschappij” dan menggantinya dengan papan baru bertuliskan “Bank Indonesia.” Di depan gedung tersebut, bendera merah-putih Indonesia dikibarkan, yang semakin menegaskan peralihan kendali atas institusi keuangan ini.²²

Prosesi ini hanya disaksikan oleh para pegawai BI, mengingat upacara serah terima resmi belum dilaksanakan. Meskipun demikian, proses tersebut berlangsung lancar, dengan seluruh pihak yang terlibat menunjukkan sikap yang sangat kooperatif. Berikut adalah potongan laporan mengenai peristiwa tersebut:

“Sajang bahwa peristiwa ini tidak dapat diabadikan, karena dengan demikian dapat ditundjukkan suatu ‘goodwill’ mereka untuk sungguh-sungguh membantu kita tanpa adanya perasaan paksaan atau sikap superioritas jang berlebihan. Benar-benar suatu sikap dan perasaan jang amat kami hargai dari para pegawai staf berbangsa Belanda jang selama kita bergaul dan bekerdja sebelum, selama dan sesudah pengoperan, senantiasa tertjipta suasana penuh persaudaraan dan penuh goodwill untuk membantu, sehingga segala sesuatu dapat berdjalan dengan lantjar.”²³

Peralihan tersebut kemudian diikuti dengan seremoni resmi

21 “Ned. Handel-Mij,” *De Telegraaf*, 30 Maret 1963.

22 “NHM Kreeg in Nieuw Guinea Andere Naam,” *Algemeen Dagblad*, 26 Maret 1963.

23 “Pengoperan Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. di Kotabaru,” Surat KB No. 10/7/UU/INSP, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 Maret 1963.

yang digelar sehari setelahnya. Acara ini berlangsung di ruang serba guna dari gedung NHM Jayapura dan dihadiri oleh berbagai tamu kehormatan. Seegers, selaku pimpinan NHM, turut hadir bersama Dhoemadi Singowigoeno, yang menjabat sebagai Direktur KCBI Kotabaru. Hadir pula Dr. Djalal Abdoh sebagai perwakilan UNTEA, Frans Johannes Goedhart selaku kepala perwakilan Kerajaan Belanda, serta Soedjarwo Tjondronegoro yang menjabat sebagai kepala perwakilan Pemerintah Republik Indonesia selama masa transisi UNTEA.

Selama prosesi berlangsung, kegiatan operasional NHM tetap berjalan seperti biasa. Setelah peralihan resmi, Bank Indonesia segera mengambil alih operasional perbankan dengan menerapkan sistem yang sama seperti sebelumnya guna memastikan kelangsungan layanan keuangan bagi masyarakat di Papua. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Djalal Abdoh menyampaikan apresiasinya atas kontribusi dan layanan yang telah diberikan oleh NHM selama masa transisi. Ia juga mengungkapkan harapannya agar Bank Indonesia dapat melanjutkan tugas tersebut dengan kualitas pelayanan yang sama.²⁴

Selain kantor utama di Kotabaru, BI juga telah mengambil alih cabang-cabang NHM yang tersebar di beberapa kota strategis, yakni Biak, Manokwari, Merauke, dan Sorong. Untuk memastikan kelancaran transisi, staf Belanda yang sebelumnya bekerja di NHM akan tetap membantu staf BI dalam masa transisi, sebelum kendali penuh atas operasional bank sepenuhnya berada di tangan BI.²⁵

Momen bersejarah ini diliput secara langsung oleh perwakilan dari Djawatan Radio dan Kantor Berita *Antara*, yang hadir untuk mengabadikan jalannya prosesi. Acara berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh semangat persaudaraan, mencerminkan semangat kerja sama antar pihak yang terlibat. Prosesi pun

24 "NHM Kreeg in Nieuw Guinea Andere Naam," *Algemeen Dagblad*, 26 Maret 1963.

25 "NHM Kreeg in Nieuw Guinea Andere Naam," *Algemeen Dagblad*, 26 Maret 1963.



Gambar 4.2. Kantor NHM Hollandia yang kemudian menjadi KCBI Kotabaru.

Sumber: Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea, Maret 1960. Nummer Toegang: 2.24.05.02. <http://hdl.handle.net/10648/ae3687d6-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

berjalan lancar dan resmi berakhir pada pukul 12.00.²⁶

Meskipun NHM secara resmi telah kehilangan kendali atas operasional perbankan di Papua, hubungan bisnis dengan kantor-kantor NHM di Indonesia yang kini berada di bawah kendali pemerintah Indonesia masih terus berlanjut. Transaksi tetap dilakukan dengan sistem akreditasi antarbank, memungkinkan NHM beroperasi sebagai bank asing di Indonesia.²⁷

Menghadapi transisi tersebut, para importir besar di Papua telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko bisnis mereka. Sejak September 1962, seluruh transaksi dilakukan secara tunai, sementara stok barang sengaja dijaga tetap rendah guna menghindari potensi kerugian akibat ketidakpastian

26 "Pengoperan Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. di Kotabaru," Surat KB No. 10/7/UU/INSP, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 Maret 1963.

27 "Ned. Handel-Mij," *De Telegraaf*, 30 Maret 1963.



Gambar 4.3. Suasana di dalam perkantoran NHM Hollandia pada Juni 1960.

Sumber: Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea, Juni 1960. Nummer Toegang: 2.24.05.02. <http://hdl.handle.net/10648/ae368c90-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

ekonomi. Sebagai contoh, perusahaan Geveke tidak lagi melakukan pengisian ulang stok dalam jumlah besar. Barang hanya dikirim melalui udara jika terdapat permintaan mendesak untuk suku cadang atau produk tertentu. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menghindari penumpukan persediaan yang berisiko tinggi dalam situasi ekonomi yang belum stabil.²⁸

Proses serah-terima aset ini ternyata menarik perhatian masyarakat luas. Banyak di antara mereka yang terkejut dengan cepatnya transisi yang terjadi, terutama ketika mereka mendapati nama “Nederlandsche Handelmaatschappij” tiba-tiba menghilang dari gedung dan telah digantikan oleh papan nama bertuliskan

28 “Ned. Handel-Mij,” *De Telegraaf*, 30 Maret 1963.

“Bank Indonesia.” Perubahan yang berlangsung dalam waktu singkat ini pun menandai babak baru dalam sistem perbankan di Papua, sekaligus memperkuat posisi Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan utama di wilayah tersebut.

A.3. Tantangan Awal Pasca Peralihan

Pasca-transisi, operasional KCBI Jayapura tidak langsung berjalan dengan lancar. Hari-hari awal diwarnai oleh berbagai kendala, terutama dalam penerapan sistem kerja yang baru. Salah satu tantangan utama adalah kerusakan pada salah satu mesin pembukuan utama, yang terjadi tepat saat operasional dimulai. Meskipun telah dibawa ke bengkel servis terbaik untuk diperbaiki, mesin tersebut tetap tidak berfungsi hingga saat pengoperan. Akibatnya, pada hari pertama operasional Bank Indonesia di Jayapura, sistem pembukuan sementara masih harus menggunakan metode yang sebelumnya diterapkan oleh NHM.²⁹

Pada minggu pertama operasional, hampir seluruh karyawan di kantor cabang ini harus bekerja lembur hingga tengah malam, bahkan hingga pukul 00.00. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya pemahaman yang memadai terkait tugas-tugas yang harus dilakukan, terutama yang berkaitan dengan transaksi luar negeri. Namun, setelah beberapa hari melakukan penyesuaian dan adaptasi, operasional kantor cabang mulai menunjukkan peningkatan. Kegiatan perbankan pun akhirnya berjalan lebih stabil, menunjukkan kemampuan tim dalam beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan yang dihadapi.

Pergantian pucuk pimpinan di kantor-kantor cabang di Papua terbilang cukup sering terjadi. Dalam banyak kasus, rotasi tersebut hanya melibatkan pertukaran posisi antar kota di dalam wilayah Papua, sehingga para pimpinan acap kali tetap berada di wilayah

29 Salah seorang pegawai Bank Indonesia Kotabaru yang bernama Sardjunaedi kemudian memberanikan diri untuk membongkar mesin yang rusak tersebut. Berkat ketekunannya, mesin tersebut pun berhasil digunakan pada hari kedua.

tersebut. Salah satu contohnya terjadi pada 5 Juli 1963, ketika M. Rifai menyerahkan kepemimpinan KCBI Jayapura kepada Gusti Abdul Azis.³⁰

Bersamaan dengan prosesi serah terima jabatan, dilakukan pula serah terima angka kombinasi untuk berbagai fasilitas keamanan, termasuk pintu utama khazanah BI, lemari besi bekas NHM, dan lemari besi BI. Namun, angka kombinasi untuk pintu khazanah milik *Kantoor van Financiën* (K.v.F) ternyata masih belum diterima. Akibatnya, pintu khazanah K.v.F hanya dapat dibuka dan ditutup menggunakan kunci utama, yang sedikit menghambat efisiensi operasional.³¹

Kondisi pintu khazanah BI dan lemari besi bekas NHM juga dilaporkan kurang terawat, karena sudah lama tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Saat Gusti Abdul Azis melakukan pemeriksaan langsung, ia mendapati bahwa kedua fasilitas tersebut dalam kondisi agak macet (*stroef*). Menghadapi situasi ini, KCBI Kotabaru segera mengajukan permohonan untuk mendatangkan seorang ahli teknis bernama Coenraad dari Biak, mengingat di Kotabaru masih belum tersedia ahli yang mampu menangani perbaikan tersebut.

Pada 15 Agustus 1963, pimpinan KCBI Kotabaru akhirnya berhasil membuat angka kombinasi baru untuk keamanan khazanah dan lemari besi. Namun, angka kombinasi baru tersebut dilaporkan hilang. Situasi ini semakin diperburuk karena kombinasi tersebut tidak segera diteruskan ke Kantor Pusat di Jakarta atau diberikan kepada staf yang bertugas di Kotabaru. Akibatnya, seluruh pintu khazanah dan lemari besi harus dibongkar. Untuk menyelesaikan masalah ini, Bank Indonesia

30 Dalam menjalankan tugasnya, Gusti Abdul Azis didampingi oleh tim yang terdiri dari Sjamsoeddin Sudjaja, R. Moeljadi, Tan Tjeng Hauw, Thung Tjeng An, Batubara, dan Nudjumudin.

31 "Penjerahan Pimpinan Kantor Bank Indonesia Tjabang Kotabaru dari Sdr. M. Rifai kepada Sdr. Gusti Abdul Azis," dalam Surat KB No. 11/2/UU/INSP tanggal 8 Juli 1963, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 8 Juli 1963.

terpaksa mengeluarkan biaya sebesar IBRp6.166 (setara dengan Rp532.092) untuk menggunakan jasa Coenraad, termasuk ongkos transportasi Biak-Kotabaru (pulang-pergi). Biaya tersebut belum mencakup pengeluaran tambahan, seperti biaya akomodasi selama proses perbaikan berlangsung.³²

Permasalahan di KCBI Jayapura tidak berhenti sampai di situ. Kantor cabang ini sempat beroperasi tanpa Kuasa Kas dan Pimpinan Cabang Pengganti selama beberapa minggu, yang menyebabkan banyak tugas operasional tertunda serta koordinasi internal menjadi kurang optimal. Berbagai permasalahan yang dihadapi kantor cabang ini tergambar jelas dalam salah satu korespondensi Gusti Abdul Azis, yang menggantikan M. Rifai, kepada Gubernur dan Direktur-Direktur Bank Indonesia di Jakarta. Dalam suratnya, ia menuliskan: “Sebagaimana Saudara maklum, pada waktu kami mengambilalih pimpinan kantor tjabang Kotabaru, keadaan dan suasana kantor ketika itu sangat menjedihkan sekali.”³³

Gusti Abdul Azis jelas menghadapi tugas berat untuk menata kembali seluruh aspek operasional kantor, mulai dari tingkat eksekutif hingga level pelaksana. Selain itu, ia juga bertanggung jawab membangun kembali iklim kerja yang sehat, mengingat kondisi pegawai di KCBI Jayapura saat itu tampak lesu dan kurang bersemangat. Ia harus memastikan bahwa seluruh staf mampu beradaptasi dengan sistem baru yang diterapkan BI, sekaligus menanamkan disiplin dan etos kerja yang lebih baik. Tantangan ini tidak hanya menuntut kepemimpinan yang tegas, tetapi harus mampu membangkitkan motivasi di tengah berbagai keterbatasan yang ada.

32 “Laporan Perdjalan di Irian Barat tanggal 22 Agustus 1963 s/d 17 September 1963,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 September 1963.

33 “Penjerahan Pimpinan Kantor Bank Indonesia Tjabang Kotabaru dari Sdr. M. Rifai kepada Sdr. Gusti Abdul Azis,” dalam Surat KB No. 11/2/UU/INSP tanggal 8 Juli 1963, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 8 Juli 1963.

A.4. Peran Penting KCBI Jayapura

Terhitung sejak 1 Februari 1963, kantor cabang Kotabaru sudah bisa melakukan segala pekerjaan yang bertalian dengan pembayaran, baik di dalam maupun luar negeri. Hal itu menjadi penanda mulai terhubungnya sistem moneter Papua tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga dalam ekonomi global. Saat itu, kantor cabang Kotabaru sudah memiliki hubungan korespondensi dan memelihara rekening secara langsung dengan bank-bank di New York, Sydney, Singapura, Bangkok, Hong Kong, Tokyo, dan juga London.³⁴

Untuk mendukung kelancaran transaksi devisa, KCBI Jayapura membuka sebuah rekening khusus dengan nama “Bank Indonesia Branch Office Kotabaru.” Rekening ini berfungsi sebagai jalur utama untuk semua penerimaan dan pengeluaran devisa dari dan ke luar negeri, memastikan bahwa seluruh transaksi berjalan dengan terorganisir dan sesuai dengan regulasi perbankan. Para pimpinan cabang dan pimpinan cabang pengganti memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi kepada para koresponden terkait penggunaan rekening ini. Sementara itu, Direksi Kantor Pusat juga memiliki hak tarik yang hanya akan digunakan dalam keadaan mendesak, guna menjaga stabilitas dan fleksibilitas operasional.³⁵

Selain itu, KCBI Kotabaru juga memiliki tanggung jawab utama dalam menyelesaikan proses penutupan buku tahunan,

34 Dalam perkembangannya kelak, seluruh kantor cabang yang ada di Papua diperkenankan untuk mengadakan hubungan langsung dengan para koresponden Bank Indonesia di luar negeri, seperti Bankers Trust (New York), Westminster Bank Ltd. (London), Bank Indonesia Amsterdam (Belanda), Bank Negara Indonesia (Singapura), The Chartered Bank (Hong Kong), The Bank of Tokyo (Jepang), Bangkok Bank (Thailand), Commonwealth Trading Bank of Australia (Sydney). Lihat “Hubungan dengan Bank-Bank di Luar Negeri,” Surat No. 11/6/ULN/HPLN, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 10 Mei 1963; “Pengiriman Uang Sudah Dimulai,” *Tjenderawasih*, 8 Februari 1963.

35 “Hubungan dengan Bank-Bank di Luar Negeri,” Surat No. 11/6/ULN/HPLN, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 10 Mei 1963.

serta menyusun neraca tahunan dan laporan laba-rugi untuk seluruh kantor cabang di Papua. Tugas ini mencakup pengolahan dan rekapitulasi transaksi keuangan dari berbagai cabang, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, serta melakukan audit internal guna menjamin akurasi laporan keuangan. KCBI Kotabaru juga bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, yang nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis oleh manajemen pusat. Berikut merupakan rincian dari pekerjaan yang harus dilakukan KCBI Jayapura:³⁶

KCBI Kotabaru memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan moneter di Papua. Sebagai pengawas utama, cabang ini bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengawasi kas di seluruh cabang di wilayah tersebut. Jika saldo kas, termasuk persediaan simpanan, mulai menipis, cabang Kotabaru memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan tambahan dana dari kantor pusat.

KCBI Kotabaru memainkan peran penting dalam menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat. Cabang ini memiliki wewenang dalam menentukan dislokasi uang kertas dan uang logam. Dalam operasionalnya, KCBI Kotabaru berhak meneliti posisi kas di cabang-cabang lain, guna mengoptimalkan distribusi dan menghindari kekurangan likuiditas. KCBI Kotabaru juga berhak menetapkan penggantian nilai uang kertas yang rusak, cacat, atau salah cetak, selama dapat dipastikan keabsahannya.

Di bidang kredit, KCBI Kotabaru memiliki kuasa umum untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan negara hingga IBRp50.000 dan perusahaan swasta hingga IBRp25.000. Namun, seluruh pemberian kredit ini wajib dilaporkan ke Kantor Pusat. Jika ada permohonan kredit yang melebihi batas tersebut, maka keputusan akhir harus diajukan kepada Direksi.

36 "Lampiran S.E. No. 11/5 Rupa-Rupa Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 24 Maret 1964.

Sebagai perwakilan Bank Indonesia pertama dan terbesar di Papua, KCBI Kotabaru juga dituntut untuk dapat berintegrasi dengan perjuangan masyarakat setempat. Peran ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab teknis di bidang moneter, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah. Program-program tersebut meliputi pembangunan mental dan materiil, serta kontribusi dalam sektor pertahanan.

Bila merujuk pada berbagai laporan berkala BI, bisa ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara KCBI Jayapura dan seluruh instansi pemerintah daerah terjalin dengan harmonis dan produktif. Tingginya tingkat kepercayaan pemerintah daerah terhadap KCBI Jayapura menjadi bukti nyata atas kontribusi strategis yang telah diberikan dalam mendukung pembangunan daerah. KCBI Jayapura tidak hanya berperan dalam memberikan masukan di sektor moneter, tetapi juga memainkan peran penting dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah secara lebih luas.

Pimpinan KCBI Kotabaru secara rutin diikutsertakan dalam perundingan-perundingan strategis antara pemerintah daerah dan pusat, baik yang berlangsung di Papua maupun di Jakarta. Peran ini semakin signifikan dengan kedudukan pimpinan KCBI Kotabaru sebagai anggota tetap Badan Komando Ekonomi Daerah (BKED) dan Badan Komando Pembangunan Daerah (BKPD). Keberadaan KCBI Kotabaru dalam forum-forum ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai mitra utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di Papua.³⁷

Sementara itu, dalam sektor pembangunan, KCBI Kotabaru dilaporkan berperan aktif dalam perencanaan pembangunan daerah, memastikan kebijakan ekonomi dan moneter selaras dengan kebutuhan lokal. Adapun kontribusi di bidang

37 "Laporan Pemimpin Tjabang Sukarnapura pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan yang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

pembangunan mental diwujudkan melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan kebudayaan, seni, dan olahraga, yang bertujuan mempercepat transformasi sosial di Papua. Di sektor pertahanan, karyawan KCBI Kotabaru beserta keluarga mereka turut dilibatkan dalam aktivitas pertahanan sipil. Keterlibatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang diemban pada masa itu, terutama dalam menghadapi situasi politik yang tidak menentu.

Berdirinya KCBI Kotabaru menandai tonggak penting dalam proses integrasi ekonomi dan moneter Papua ke dalam Republik Indonesia. Melalui akuisisi aset-aset strategis seperti NHM dan pembentukan jaringan perbankan nasional di berbagai kota utama, Bank Indonesia tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi pasca peralihan kekuasaan dari UNTEA, tetapi juga membangun fondasi keuangan modern di wilayah yang sebelumnya berada di bawah administrasi Belanda.

Kehadiran KCBI Kotabaru tidak hanya menjadi simbol formal integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia, melainkan juga representasi nyata dari upaya membangun infrastruktur keuangan yang modern dan terkoordinasi di tengah tantangan politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Di tengah kekosongan institusi pasca peralihan kekuasaan, kehadiran Bank Indonesia membawa harapan baru: sebuah jaminan bahwa roda ekonomi akan terus berputar, bahkan di wilayah yang paling jauh sekalipun.

Di tengah berbagai keterbatasan yang ada, KCBI Kotabaru mampu menjalankan fungsinya sebagai institusi sentral yang mendukung pengelolaan kas, distribusi uang, pengembangan kredit, serta penyusunan kebijakan ekonomi daerah. Peran aktifnya dalam forum-forum strategis pemerintahan daerah menegaskan bahwa KCBI Kotabaru bukan sekadar cabang perbankan, melainkan mitra utama dalam upaya pembangunan Papua yang berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional.



Gambar 4.4. Foto gedung KCBI Jayapura yang menempati gedung bekas NHM.

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia. Kode Berkas: DPLF/PS/FC/04/1/0029



Gambar 4.5. Ruangan pemimpin Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura.

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia. Kode Berkas: DPLF/PS/FC/04/1/0029

B. Pembukaan Kantor-kantor Cabang BI Lainnya

B.1. Kantor Cabang BI Biak

Sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah Indonesia untuk mempercepat integrasi ekonomi Papua ke dalam sistem keuangan nasional, Bank Indonesia memperluas operasionalnya dengan mendirikan KCBI Biak. Pemilihan Biak sebagai lokasi kantor cabang didasarkan pada beberapa faktor. Salah satunya adalah posisi geografis Biak yang menjadi pintu gerbang utama ke kawasan Indonesia Timur. Terletak di pesisir, Biak memiliki akses langsung ke jalur perdagangan internasional, menjadikannya titik strategis bagi aktivitas ekonomi dan perbankan. Selain itu, Biak juga memiliki konektivitas udara dan laut yang sangat baik—bahkan mungkin yang terbaik di Papua pada saat itu—sehingga memudahkan arus perdagangan dan mobilitas keuangan.

KCBI Biak menjadi kantor cabang kedua yang didirikan di Papua setelah KCBI Kotabaru. Menariknya, KCBI Biak telah resmi berdiri sebelum NHM diakuisisi, menunjukkan peran vital Biak dalam memperluas akses keuangan dan mempercepat integrasi ekonomi di Papua. Prosesi peresmian KCBI Biak berlangsung secara sederhana pada 18 Februari 1963. Acara tersebut diselenggarakan di kediaman resmi Kepala Perwakilan Pemerintah RI di Biak dan dihadiri oleh sekitar 40 tamu undangan. Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam kesempatan tersebut, termasuk perwakilan UNTEA, pejabat militer, perwakilan Pemerintah RI, serta tokoh masyarakat setempat. Di antara tamu kehormatan yang hadir terdapat Kepala UNTEA dan Kepala Perwakilan Pemerintah RI di Biak. Pihak Bank Indonesia sendiri diwakili oleh M. Rifai, yang saat itu menjabat sebagai pimpinan KCBI Kotabaru.

Sebagai perwakilan Direksi BI yang berhalangan hadir, M. Rifai diberikan amanah untuk menyampaikan pidato sambutan. Dalam sambutannya itu, ia mengungkapkan harapan besar dari Direksi BI agar KCBI Biak, bersama seluruh kantor cabang lainnya

di Papua, dapat memainkan peran strategis dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Harapan ini mencerminkan komitmen BI untuk berkontribusi aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Papua. Berikut salah satu potongan pidatonya:

“Kami pertjaja bahwa kerdjasama jang telah ditjapai dengan segala pihak di Irian Barat ini, untuk selandjutnja dapat merupakan landasan bagi tjabang Bank Indonesia Biak chususnja dan tjabang-tjabang kami di Irian Barat umumnja dalam melaksanakan tugasnja nanti untuk turut serta dalam membangun suatu masjarakat Indonesia jang adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke, masjarakat mana merupakan Masjarakat Sosialis Indonesia jang berdasarkan pada djiwa Manifesto Politik.”³⁸

Dalam sambutannya, Dr. Djalal Abdoh, selaku Kepala UNTEA, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas berdirinya KCBI Biak. Ia menegaskan keyakinannya bahwa kehadiran kantor cabang ini akan berperan penting dalam memperlancar arus keuangan antarwilayah di Papua serta mendukung stabilitas ekonomi di masa transisi.

Selain itu, Dr. Abdoh juga menyinggung adanya keraguan di kalangan masyarakat mengenai mata uang yang akan digunakan setelah penyerahan resmi Papua dari UNTEA kepada Pemerintah Indonesia. Ia menyatakan bahwa masyarakat masih menghadapi kebingungan terkait nilai mata uang yang berlaku saat itu, terutama menjelang transfer kekuasaan yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei 1963. Dr. Abdoh menyoroti potensi risiko yang dapat muncul apabila isu mata uang tidak segera mendapatkan kejelasan. Ia mengungkapkan bahwa ketidakpastian ini dapat memicu ketegangan, khususnya di sektor

38 “Tjabang Biak,” dalam Surat KB No. 10/3/UU/INSP, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 21 Februari 1963.

perdagangan. Para pedagang, menurutnya, cenderung menahan barang dagangan mereka karena khawatir akan kerugian akibat ketidakjelasan mengenai mata uang yang akan diberlakukan di Papua.³⁹

Sebagai langkah antisipatif, Dr. Abdoh mendesak BI untuk segera memberikan pengumuman resmi terkait mata uang yang akan digunakan di wilayah tersebut, termasuk nilai tukarnya. Ia meyakini bahwa langkah ini sangat penting untuk menenangkan keresahan masyarakat dan menghindari potensi disrupsi yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi lokal. Keputusan ini, menurutnya, tidak hanya akan memberikan kepastian kepada pelaku ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang baru diterapkan.

Lebih lanjut, Dr. Abdoh menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi di Papua dengan memastikan kelancaran pasokan barang-barang impor. Ia menggarisbawahi bahwa keberlanjutan aliran barang ini merupakan faktor krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal dan menghindari kelangkaan yang dapat mengganggu stabilitas harga. Sebagai bentuk komitmen terhadap hal tersebut, UNTEA telah menyediakan fasilitas kredit sebesar NNG⁴⁰ 4 juta melalui PN Irian Bhakti. Langkah ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan, sehingga roda perekonomian di wilayah tersebut tetap berjalan dengan stabil menjelang transisi kekuasaan ke Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Irian Barat, Sudjarwo Tjondronegoro, mengambil kesempatan untuk memberikan sambutan. Dalam momen

39 "Tjabang Biak," dalam Surat KB No. 10/3/UU/INSP, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 21 Februari 1963.

40 NNG merupakan singkatan dari Nederlands Nieuw-Guinea Gulden, mata uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Belanda untuk diedarkan di wilayah Papua. Mata uang ini diluncurkan dua kali, yaitu pada tahun 1950 dan kemudian 1954, yang berisi pecahan 1, 2½, 5, 10, 25, 100 dan 500 gulden.

tersebut, ia secara khusus menanggapi sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh Kepala UNTEA dalam pidato sebelumnya. Terkait dengan mata uang yang akan digunakan setelah 1 Mei 1963, Sudjarwo menjelaskan bahwa mulai tanggal tersebut, mata uang NNG akan digantikan dengan IBRp dengan kurs perbandingan 1:1. Ia juga menegaskan bahwa proses transisi ini akan diawasi secara ketat oleh BI guna memastikan kelancaran dan mencegah terjadinya gangguan dalam sistem keuangan di Papua.

Singkatnya, berbagai sambutan yang disampaikan selama acara tersebut menandai dimulainya operasional KCBI Biak secara resmi. Peresmian ini menjadi langkah konkret Pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat layanan keuangan di wilayah Papua serta mempercepat integrasinya ke dalam sistem ekonomi nasional. Dengan pembukaan kantor cabang ini, KCBI Biak secara resmi menjadi cabang ke-21 dari BI dan cabang kedua dari KCBI di Papua, yang mempertegas peran strategisnya dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Keberadaan KCBI Biak diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perkembangan sektor perdagangan, perbankan, dan investasi di wilayah ini.

Namun demikian, seperti halnya KCBI Kotabaru, di awal operasionalnya KCBI Biak juga menghadapi berbagai kendala. Dari segi kepemimpinan, KCBI Biak awalnya dipimpin oleh Sunjoto Kusumodidjojo, yang sebelumnya menjabat sebagai kasir di KCBI Semarang di bawah kepemimpinan E. Soekasah Somawidjaja. Dalam menjalankan tugasnya, Sunjoto didukung oleh Sjarief Iksanoeddien (kuasa kas), Soedibjo (pemegang buku pembantu), Suyud (kasir), dan Soedjonoko.⁴¹ Namun formasi ini terus mengalami perubahan dengan cukup cepat.

Dari segi formasi kepegawaian, KCBI Biak dinilai masih sangat lemah dibandingkan dengan kantor cabang Bank Indonesia

41 "Laporan Perjalanan di Irian Barat tanggal 22 Agustus 1963 s/d 17 September 1963," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 September 1963.

lainnya. Menyikapi kondisi ini, Soekasah, selaku Inspektur Muda Bank Indonesia, menyarankan agar segera dilakukan perekrutan tambahan untuk mengisi posisi strategis. Setidaknya, dibutuhkan satu tenaga kasir, satu tenaga tata usaha yang bertanggung jawab atas urusan ekspor-impor, serta satu tenaga tata usaha untuk menangani urusan rumah tangga kantor cabang.

Selain menghadapi keterbatasan dalam hal kepegawaian, KCBI Biak juga dihadapkan pada tantangan terkait standar keamanan gedung yang dinilai belum memadai. Mengingat KCBI Biak didirikan sebelum nasionalisasi aset-aset NHM dilakukan, kantor cabang ini masih belum dapat menempati bekas gedung NHM yang memiliki fasilitas lebih layak. Pada awal operasionalnya, KCBI Biak menggunakan sebuah gedung tua berukuran kecil yang sebenarnya tidak ideal untuk mendukung kegiatan perbankan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, sempat diajukan usulan pemindahan operasional kantor ke rumah dinas yang saat itu ditempati oleh pimpinan cabang sebagai solusi sementara.

Di Biak, terdapat empat rumah sewa yang digunakan untuk mendukung operasional dan akomodasi pegawai KCBI Biak. Tiga di antaranya berlokasi di sebuah jalan, yang kini bernama Jalan Yos Sudarso. Satu rumah difungsikan sebagai kantor cabang, sementara dua lainnya berada dalam kompleks pekarangan kantor dan digunakan sebagai tempat tinggal pegawai. Rumah pertama dihuni oleh Sunjoto Kusumodidjojo selaku pimpinan cabang, sedangkan rumah kedua ditempati secara bersama oleh pemegang buku, kasir, dan pegawai tata usaha. Sementara itu, rumah keempat yang berlokasi di Jalan Isori 6 ditempati oleh Sjarief Iksanoeddien yang menjabat sebagai kuasa kas.⁴²

Setelah proses nasionalisasi aset NHM selesai, KCBI Biak sebenarnya memiliki opsi untuk pindah ke gedung tersebut. Namun, Sunjoto memilih tawaran yang pernah disampaikan oleh

42 "Laporan Perdjalan di Irian Barat tanggal 22 Agustus 1963 s/d 17 September 1963," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 September 1963.

Dr. Djalal Abdoh saat prosesi peresmian, bahwa KCBI Biak juga dapat mempertimbangkan opsi lain, yakni menempati bekas gedung Pacific Import Maatschappij (PIM) apabila gedung NHM dinilai kurang representatif. Gedung PIM sendiri direncanakan akan dijual beserta seluruh rumah dinas karyawan dan perabotan di dalamnya. Dr. Abdoh menyatakan bahwa UNTEA bersedia memfasilitasi proses akuisisi gedung ini oleh KCBI Biak.

Sunjoto kemudian menyampaikan tawaran ini ke Kantor Pusat di Jakarta, yang langsung ditindaklanjuti dengan mengirim Mardjono—yang kelak menjadi pimpinan pertama KCBI Manokwari—ke Biak. Bersama Dr. Djalal Abdoh dan Sunjoto, Mardjono melakukan peninjauan langsung terhadap gedung Pacific Import Maatschappij (PIM) yang berlokasi di Mappiaweg. Dari hasil peninjauan tersebut, Mardjono menyimpulkan bahwa gedung PIM lebih representatif untuk digunakan sebagai kantor KCBI Biak, meskipun beberapa bagian tetap harus direnovasi. Berikut beberapa alasan yang mendasari keputusan tersebut:⁴³

- Gedung PIM memiliki area yang cukup luas, dengan gudang yang terintegrasi dengan kantor, sehingga memungkinkan dilakukan perluasan jika diperlukan.
- Gedung ini berada di persimpangan jalan yang ramai dan dekat dengan pelabuhan, sehingga memiliki lokasi yang sangat strategis untuk kegiatan operasional.
- Gedung PIM dihubungkan dengan kompleks perkantoran melalui jalan raya utama, memudahkan mobilitas antar kantor.
- Terdapat dua rumah dinas yang berlokasi sekitar 200 meter dari gedung utama.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, KCBI Biak akhirnya sepakat untuk memindahkan operasionalnya ke gedung Pacific

43 "Berkas Gedung Kantor/Ruang Dinas KCBI Biak, 1964/1968," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, MT.07.00.

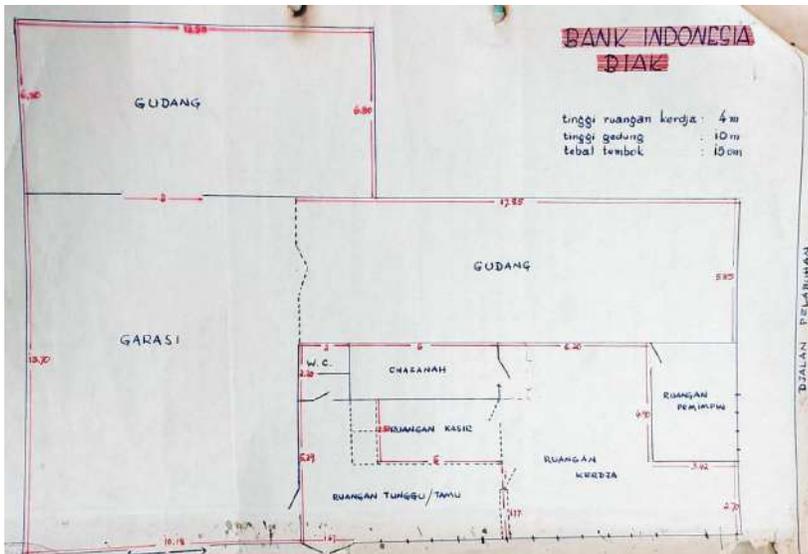
Import Maatschappij (PIM). Keputusan ini kemudian diresmikan melalui prosesi serah terima yang dilaksanakan pada 3 Februari 1964, berdasarkan Surat Keputusan Residen Teluk Cenderawasih No. 1 tanggal 6 Januari 1964. Serah terima tersebut dipimpin oleh F. Imbiri, Kepala Pemerintahan Biak-Numfor sekaligus perwakilan dari Residen Teluk Cenderawasih, yang secara resmi menyerahkan gedung PIM kepada Sjamsoeddin Sudjaja selaku pimpinan baru KCBI Biak.

Segera setelah kunci gedung diserahkan, dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh bagian bangunan. Hasil inspeksi menunjukkan bahwa gedung tersebut memerlukan banyak perbaikan sebelum dapat difungsikan secara optimal. Dari segi keamanan, meskipun kondisinya lebih baik dibandingkan gedung NHM, gedung ini masih belum memenuhi standar yang memadai.

Salah satu temuan utama adalah ruang khazanah yang tidak dilengkapi dengan kunci kombinasi dan hanya memiliki satu kunci akses, sehingga rentan terhadap risiko penyalahgunaan. Selain itu, struktur langit-langit yang terbuat dari eternit rapuh berpotensi menjadi celah keamanan, memungkinkan akses tak sah ke ruang kerja. Kondisi ini semakin diperburuk dengan ketiadaan penerangan di sekitar area luar gedung, yang meningkatkan risiko keamanan, terutama pada malam hari. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan segera sebelum gedung dapat digunakan sepenuhnya.

Pimpinan KCBI Biak tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perombakan besar-besaran terhadap gedung tersebut guna memastikan kelayakan operasionalnya. Beberapa langkah prioritas yang segera dilakukan meliputi:

1. Melakukan pengapuran ulang pada tembok ruang kerja, baik bagian dalam maupun luar, untuk meningkatkan kebersihan dan estetika.
2. Memasang kawat berduri dengan ketinggian yang memadai di sekeliling gedung guna meningkatkan keamanan.



Gambar 4.6. Denah rancang bangun KCBI Biak di bekas gedung Pacific Import Maatschappij (PIM).

Sumber: “Berkas Gedung Kantor/Ruang Dinas KCBI Biak, 1964/1968,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, MT.07.00.

3. Mengganti pintu masuk yang rusak dengan pintu baru yang lebih kokoh.
4. Memperbaiki lantai yang telah mengalami kerusakan parah agar lebih aman dan nyaman bagi para pegawai serta nasabah.
5. Memasang penerangan di area luar gedung, yang pelaksanaannya dikerjakan oleh Djawatan Listrik setempat untuk meningkatkan keamanan, terutama pada malam hari.

Upacara peresmian ini dihadiri oleh sekitar 350 tamu undangan, termasuk perwakilan Direksi Bank Indonesia Pusat, anggota Pantja-Tunggal, perwira angkatan bersenjata, kepala dinas, tokoh masyarakat, serta para nasabah bank. Acara ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi penanda resmi dimulainya



Gambar 4.7. Kantor Cabang Bank Indonesia Biak setelah mengalami renovasi. Foto diambil pada November 1968.

Sumber: "Kantor/Perumahan Kantor Tjabang Biak," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 20 November 1968.

operasional gedung baru sebagai pusat aktivitas perbankan di Biak. Berbarengan dengan peresmian ini, KCBI Biak pun semakin siap menjalankan fungsinya dalam mendukung kebijakan moneter dan perekonomian daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran Bank Indonesia di Papua.

Setelah permasalahan gedung terselesaikan, KCBI Biak dihadapkan pada tantangan lain yang tak kalah mendesak, yaitu keterbatasan akomodasi. Setiap kali menerima kunjungan dinas, KCBI Biak kerap mengalami kesulitan dalam menyediakan tempat menginap yang layak bagi para tamu. Menyadari urgensi masalah ini, Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat (Sek-KIB) segera menginstruksikan Biro Khusus Sek-KIB untuk membangun beberapa losmen dan perumahan guna menampung tamu-tamu

dinas yang berkunjung ke Biak.⁴⁴ Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kendala fasilitas penginapan yang selama ini menjadi hambatan.

Meskipun KCBI Biak memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran sistem moneter di Papua, keterbatasan akses terhadap pengetahuan menjadi hambatan utama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Pelaksanaan berbagai program pelatihan dan kursus, seperti Bahasa Inggris, tata buku, kepegawaian, investigasi, hingga identifikasi pemalsuan dokumen, sulit direalisasikan. Kendala utama terletak pada minimnya tenaga pembimbing yang memadai untuk mendukung program-program tersebut. Dalam salah satu laporannya, Bambang Susilo, Pimpinan KCBI Biak, menulis:

“Memang, oleh kami jang bertugas di Irian Barat, chususnja di Biak, maka kursus-kursus untuk penambah pengetahuan maupun ketrampilan tidak ada, dan pula batjaan-batjaan jang ‘actueel dan populair wetenschappelijk’ (terbaru dan pengetahuan umum) sangat diperlukan sekali.”⁴⁵

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai KCBI Biak, Bambang Susilo pun mengusulkan agar Kantor Pusat di Jakarta secara berkala mengirimkan tenaga pembimbing guna memberikan pelatihan dan pendampingan langsung. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengiriman majalah serta buku-buku guna memperluas wawasan pegawai dan menjaga standar profesionalisme mereka. Dengan kedua langkah ini, diharapkan kapasitas pegawai KCBI Biak dapat terus berkembang, sehingga mampu mendukung operasional kantor secara optimal.

44 “Biak Segera Bangun Losmen,” *Kompas*, 30 November 1965.

45 “Laporan Pemimpin Tjabang Biak (Bambang Susilo) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan jang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

Sebagai salah satu penghubung utama dalam distribusi dana dari pusat ke wilayah Papua, KCBI Biak memegang peran strategis dalam memastikan kelancaran aliran uang antar daerah. Namun, efisiensi distribusi sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi cabang ini. Salah satu contohnya adalah dalam pengelolaan remise eks Jakarta untuk Papua, di mana seluruh dana terlebih dahulu ditampung di KCBI Biak sebelum diteruskan ke Jayapura (Kotabaru/Sukarnapura).

Dari Kotabaru, dana tersebut kemudian dikelola dan didistribusikan ke berbagai cabang lain di Papua. Mengingat seluruh lalu lintas udara menuju wilayah ini harus melewati Biak, KCBI Biak memegang peran krusial dalam mengawasi serta memastikan kelancaran pengiriman dana ke cabang-cabang lain, seperti Sorong dan Manokwari. Dengan peran strategis ini, KCBI Biak menjadi simpul utama dalam rantai distribusi moneter di Papua.

Mengingat tingginya biaya pengangkutan yang seharusnya dapat ditekan serta keterbatasan jumlah pegawai di KCBI Biak, muncul sebuah usulan pada 24 April 1965 agar remise eks Jakarta untuk KCBI Jayapura dan kantor-kantor cabang lain di Papua disimpan langsung di KCBI Biak. Kebijakan ini dinilai dapat memangkas biaya operasional secara signifikan sekaligus meningkatkan efisiensi kerja. Dengan demikian, proses distribusi dana dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik.

Untuk memastikan stabilitas ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, berbagai upaya terus dilakukan di Biak. Salah satu langkah strategis yang diambil KCBI Biak adalah mendorong kebiasaan menabung sebagai bagian dari edukasi keuangan yang lebih luas. Meskipun Bank Tabungan Pos telah beroperasi di Biak saat itu, program menabung masih belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utamanya adalah suku bunga yang kurang kompetitif serta persyaratan yang dianggap terlalu rumit, sehingga menyulitkan masyarakat untuk

berpartisipasi dalam sistem perbankan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari promosi, KCBI Biak menawarkan suku bunga yang kompetitif serta persyaratan yang lebih mudah.

Selain bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang berlebihan, inisiatif ini juga dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan serta membangun kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan (*bank-minded*). Melalui langkah ini, KCBI Biak berharap agar pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan semakin kuat, sehingga fondasi ekonomi di wilayah tersebut akan semakin kokoh. Tidak hanya itu, melalui program ini KCBI Biak berharap agar arus barang dari Papua ke wilayah lain di Indonesia bisa terkendali, sehingga mengurangi tekanan ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam berbagai kesempatan dan aktivitas Pemerintah setempat, KCBI Biak kerap dipercaya dan diminta untuk bertindak sebagai bendahara dalam berbagai kegiatan kenegaraan dan sosial. KCBI Biak turut aktif dalam organisasi seperti Panitia Pembimbing Pramuka, Panitia Tetap Hari-Hari Nasional, Palang Merah Indonesia, dan sejumlah inisiatif lainnya. “Sebanjak mungkin kami mentjeburkan diri dalam masyarakat,” tulis Bambang Susilo. Pernyataan ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Biak. Hal tersebut juga tergambar jelas dalam laporan Bambang Susilo yang berbunyi:

“Berhubung sangat eratnja pergaulan-pergaulan kami dalam rapat-rapat Panitia-panitya tsb. dengan pedjabat-pedjabat Pemerintah, Swasta dan masyarakat, maka antara kami terdjalinlah suatu hubungan jang akrab berdasarkan azas kekeluargaan, sehingga dengan demikian pula memudahkan tugas kami se-hari-hari.”⁴⁶

46 “Laporan Pimpinan Tjabang Biak (Bambang Susilo) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-



Gambar 4.8. Para pegawai KCBI Biak. Duduk (ki-ka): Anny Siti Noerzaihan Burhanuddin, J.S. Pattipeilohy, A. Martinoes, S. Baroto, Michdar. S, Sri Soedarjanti-Soetoedjo. Berdiri di tengah (ki-ka): E.J. Warikar, Tohir bin Abdullah, J.N. Soumokil, Tarjono bin Sukatma, Suyud, Sem Wambrauw, P.J. Uneputti, Madi Sutrisno. Berdiri di atas (ki-ka): Th. Kafiar, W. Marin, D. Simbiak, J.P. Mangge, J. Kajoi, A. Arampajai, W. Mangge, S. Kurni. Foto diambil pada tahun 1966.

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia.

Melalui pergaulan yang intens dalam rapat-rapat dan kegiatan bersama, terjalin hubungan yang akrab dan didasarkan pada asas kekeluargaan. Kedekatan ini kemudian berdampak positif dalam mempermudah tugas sehari-hari KCBI Biak, karena adanya rasa saling percaya dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan kata lain, keterlibatan aktif dalam komunitas tidak hanya memperkuat peran sosial KCBI Biak tetapi juga meningkatkan efektivitas kerja mereka dalam menjalankan tugasnya.

perwakilan jang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

Sebagai salah satu penghubung utama dalam distribusi moneter di Papua, KCBI Biak jelas memainkan peran krusial dalam memastikan kelancaran arus dana dari pusat ke berbagai daerah. Berbagai langkah strategis yang diambil, mulai dari peningkatan keamanan kantor, perbaikan fasilitas, hingga penguatan literasi keuangan masyarakat melalui program menabung, merupakan beberapa kebijakan penting yang perlu digarisbawahi.

Namun upaya KCBI Biak dalam membangun sistem perbankan yang inklusif bukanlah hal yang mudah. Kantor cabang ini tidak hanya menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan ekonomi setempat. Kendati demikian, komitmen KCBI Biak untuk terus beradaptasi dan berkembang menjadikannya elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta stabilitas perbankan di Biak dan sekitarnya.

B.2. Kantor Cabang BI Sorong

Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) Sorong menjadi kantor cabang ketiga yang didirikan di Papua, setelah KCBI Jayapura dan KCBI Biak. Diresmikan pada 15 Maret 1963, pemilihan Sorong sebagai lokasi KCBI tidak terlepas dari perannya sebagai salah satu pusat ekonomi dan perdagangan utama di kawasan Papua bagian Barat. Sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya, Sorong memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti kopra dan minyak bumi, yang menjadi komoditas unggulan dalam perdagangan regional. Selain itu, keberadaan pelabuhan internasional di Sorong menjadikannya sebagai salah satu pintu gerbang utama aktivitas ekspor-impor di Papua, sehingga memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi yang strategis.

Upacara pembukaan KCBI Sorong dihadiri oleh Max Maramis (Wakil Kepala Perwakilan Indonesia di Papua), Sumarno (Menteri Urusan Bank Sentral), pejabat BI Jayapura, pejabat Republik

Indonesia, pejabat UNTEA, para pengusaha, dan masyarakat setempat. Dalam pidatonya, Max Maramis mengimbau masyarakat agar tidak perlu merasa khawatir atau gelisah menghadapi situasi Papua pasca transisi kekuasaan. Dirinya menaruh harapan besar kepada para pengusaha di Papua untuk turut berperan dalam menopang aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Maramis juga mengingatkan agar para pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi yang tidak menentu untuk mengambil keuntungan secara tidak etis. Ia menegaskan bahwa jangan sampai ada pihak yang melakukan “segala tindakan yang merugikan yang bisa mengakibatkan kekatjauan ekonomi dan keuangan.”⁴⁷ Harapan besar yang ia letakkan pada para pengusaha Papua mencerminkan kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia untuk mendorong sektor swasta agar lebih aktif dalam pembangunan ekonomi daerah. Dalam situasi transisi seperti ini, kehadiran serta partisipasi para pengusaha menjadi faktor krusial dalam menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi di Sorong. Selain itu, peran mereka juga sangat dibutuhkan untuk mencegah stagnasi yang dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Papua, memastikan stabilitas serta pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, Maramis juga menekankan peran sentral dari BI. Menurutnya, tanpa adanya BI, “perekonomian dan perdagangan tidak bisa berdjalan lantjar.” Sebaliknya, BI tanpa adanya kegiatan ekonomi juga “tidak mungkin akan mentjapai banjak artinja.”⁴⁸ Bagi Maramis, sektor ekonomi dan perbankan memiliki hubungan timbal balik yang erat. Tanpa sistem perbankan yang kuat, perdagangan dan perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, tanpa adanya kegiatan ekonomi yang dinamis, peran BI sebagai regulator keuangan juga akan kehilangan makna. Ini adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap interdependensi antara institusi ekonomi dan aktor-aktor ekonomi di lapangan.

47 “Bank Indonesia Tjabang Sorong Dibuka,” *Tjenderawasih*, 16 Maret 1963.

48 “Bank Indonesia Tjabang Sorong Dibuka,” *Tjenderawasih*, 16 Maret 1963.



Gambar 4.9. Kantor NHM dan KPM Sorong yang nantinya menjadi KCBI Sorong.

Sumber: *Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea*, Maret 1960. Nummer Toegang: 2.24.05.02. <http://hdl.handle.net/10648/ae36865a-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

Menempati bekas gedung NHM, KCBI Sorong diproyeksikan sebagai pusat pengelolaan sistem moneter dan perbankan di wilayah Papua Barat. Fungsi utamanya mencakup distribusi serta pengawasan peredaran uang, pengelolaan remitansi dari pusat ke daerah, serta mendukung aktivitas perdagangan, khususnya di sektor-sektor ekonomi strategis. Bersama dengan KCBI Manokwari, KCBI Sorong kelak menjadi pusat aktivitas keuangan dan distribusi uang ke berbagai daerah di Papua Barat, termasuk Kaimana dan Fakfak. Keberadaannya berperan penting dalam memastikan stabilitas moneter serta memperkuat infrastruktur perbankan di wilayah tersebut.

KCBI Sorong memainkan peran strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah Papua untuk menghapus sisa-sisa pengaruh ekonomi kolonial, sebagai wujud pelaksanaan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Salah satu langkah utama yang dilakukan Pemerintah

Indonesia adalah mengambil alih aset perusahaan-perusahaan milik Belanda yang masih beroperasi di wilayah tersebut, termasuk Sorong Petroleum Co., yang kemudian dilebur ke dalam PN PERMINA pada 15 Desember 1964. Dengan adanya perubahan signifikan terkait masa depan perusahaan-perusahaan asing di Sorong, KCBI Sorong berperan penting dalam menyediakan pembiayaan dan mengatur alokasi dana yang diperlukan untuk kebijakan tersebut. Langkah ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penyediaan kredit dan pengelolaan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat.⁴⁹

Bila dibandingkan dengan wilayah lainnya, Sorong memiliki ekosistem ekonomi yang cukup mandiri dan tidak terlalu bergantung pada transfer kas dari wilayah lain. Salah satu indikatornya terlihat jelas dari peredaran uang di wilayah tersebut. Ketika NHM masih beroperasi di Sorong, kebutuhan akan uang kartal mencapai jumlah yang signifikan, yakni sekitar NNG 300 ribu setiap akhir bulan. Kelebihan kas NHM juga selalu terjadi setiap bulan, dengan jumlah berkisar antara NNG 300 ribu hingga NNG 600 ribu. Kelebihan kas NHM ini selalu disetorkan ke *Sub-kantoor van Financien* (K.v.F), menjadikan K.v.F Sorong hampir tidak pernah memerlukan tambahan kas dari Jayapura.⁵⁰ Faktor inilah yang membuat aktivitas ekonomi dan perdagangan di Sorong relatif stabil dibandingkan dengan wilayah lainnya di Papua, meskipun letak geografisnya cukup sulit dijangkau.

Situasi tersebut jelas membantu meringankan kondisi di

49 Namun, pengambilalihan perusahaan-perusahaan ini belum sepenuhnya tuntas. Hingga pertengahan tahun 1965, masih terdapat perusahaan-perusahaan milik Belanda, seperti Perusahaan Galangan Perkapalan KARIM, yang belum diambil alih oleh pemerintah. Lihat "Laporan Pemimpin Tjbang Sorong pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjbang, Pemimpin-pemimpin Tjbang, dan Perwakilan-perwakilan yang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

50 "Persediaan Uang Kas," Surat No. 11/1/UPU/Pekas, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 3 April 1963.

Sorong, yang relatif lebih terisolasi dibandingkan kantor cabang lainnya. Sebagai informasi, pengiriman remitansi dari Jayapura ke Sorong kerap menghadapi berbagai kendala akibat keterbatasan moda transportasi. Pada masa itu, lapangan terbang di Sorong hanya terletak di Pulau Jefman, sekitar 7 mil dari pusat kota Sorong. Perjalanan menuju lokasi tersebut memerlukan waktu sekitar satu jam dengan kapal bermotor, sehingga proses distribusi keuangan dan logistik sering mengalami keterlambatan.

Pengiriman melalui Garuda Indonesian Airways (GIA) masih menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan, yang kerap menghambat distribusi barang dan remitansi. Sementara itu, jalur laut yang dioperasikan oleh PELNI juga sangat terbatas, dengan hanya dua kapal—*Towuti* dan *Togaran*—yang singgah di Sorong setiap bulan. Rute pelayaran yang tersedia kala itu harus ditempuh dengan melewati Singapura-Jakarta-Sorong-Jayapura-Sorong-Merauke, sehingga konektivitas ke Sorong bisa dikatakan cukup sulit pada masa itu.

Namun, jika dibandingkan dengan kantor cabang lainnya di Papua, KCBI Sorong tetap memiliki susunan pegawai yang paling lengkap dan solid. Hanya saja, pada tahap awal pendiriannya Kantor Pusat Jakarta menghadapi tantangan besar dalam merekrut pegawai yang bersedia ditempatkan di KCBI Sorong. Dari berbagai kandidat yang diajukan, hanya Djoko Sutrisno yang secara langsung menyatakan kesediaannya untuk mengisi posisi sebagai pemegang buku di KCBI Sorong. Keengganan calon pegawai lainnya diduga dipengaruhi oleh faktor geografis dan infrastruktur yang masih terbatas di Sorong saat itu. Kondisi ini memaksa Kantor Pusat untuk mencari strategi baru dalam merekrut tenaga kerja tambahan agar operasional cabang Sorong dapat berjalan optimal. Beruntung, akhirnya mereka berhasil mendapatkan kader-kader terbaik untuk ditempatkan di sana.

Menilik struktur pemerintahan di Sorong, jabatan-jabatan tertinggi di berbagai dinas atau instansi sipil umumnya masih

dipegang oleh petugas yang didatangkan dari luar wilayah. Namun, sebagai bentuk penghormatan terhadap penduduk lokal, posisi kepala pemerintahan telah dipercayakan kepada putra daerah. Hubungan antara KCBI Sorong dengan pejabat pemerintah, instansi sipil, angkatan bersenjata, dan masyarakat setempat terjalin dengan sangat baik. Sinergi yang harmonis ini mencerminkan kerja sama yang solid dalam mendukung stabilitas moneter serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sorong.⁵¹

Sementara itu, terkait bekas gedung NHM yang menjadi lokasi operasional KCBI Sorong, kondisinya secara umum cukup memadai. Namun, terdapat beberapa kendala, terutama pada gudang penyimpanan arsip dan barang-barang inventaris yang dianggap kurang representatif. Gudang arsip, misalnya, selain penuh dengan arsip eks-NHM, juga digunakan sebagai tempat tinggal bagi dua pegawai KCBI Sorong. Di sisi lain, kondisi mobil inventaris kantor cabang sangat memprihatinkan, sehingga para pegawai KCBI Sorong sering kali terpaksa berjalan kaki untuk melaksanakan tugas mereka.

Meskipun harus beroperasi dengan segala keterbatasan, hubungan antara KCBI Sorong dan para nasabahnya, baik individu maupun perusahaan, dilaporkan terjalin dengan sangat erat. KCBI Sorong secara aktif memfasilitasi pemberian berbagai bentuk kredit kepada pengusaha dari berbagai skala, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Banyak pengusaha dan perusahaan yang mampu berkembang pesat atau bahkan terselamatkan dari kesulitan finansial, berkat dukungan kredit yang diberikan oleh KCBI Sorong.

Salah satu perusahaan yang menerima manfaat tersebut

51 "Laporan Pemimpin Tjabang Sorong pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan yang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

adalah “Pho Eng Liong,” satu-satunya perusahaan swasta di Sorong yang aktif dalam sektor ekspor-impor, khususnya sandang dan pangan. Kiprah perusahaan ini telah dikenal sejak masa NHM masih beroperasi di Sorong. Selain mengumpulkan kopra dari para petani untuk diekspor, Pho Eng Liong juga diketahui memiliki pulau-pulau sendiri yang mampu menghasilkan hingga 150 ton kopra setiap bulannya.

Pada tahun 1960-an, Pho Eng Liong sempat menghadapi kesulitan finansial hingga terpaksa mengajukan permohonan kredit ekspor sebesar IBRp50.000 kepada BI. Permintaan tersebut mendapat dukungan penuh dari KCBI Sorong. Sebagai satu-satunya bank yang beroperasi di Sorong, BI memegang peran penting dalam membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang terkait dengan ekspor. Terlebih lagi, kredit tersebut diperlukan oleh Pho Eng Liong untuk mendukung pembiayaan ekspor kopra, komoditas utama yang menjadi tumpuan hidup banyak petani di wilayah tersebut.⁵²

Di samping itu, sebagai lembaga keuangan utama di Sorong, KCBI Sorong juga memegang peran sentral dalam pengelolaan lalu lintas giro. Seluruh transaksi giro di wilayah ini ditampung dan dikelola dengan penuh tanggung jawab oleh KCBI Sorong. Hal ini tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi setempat tetapi juga menegaskan perannya sebagai institusi strategis yang mendukung kedaulatan keuangan di Papua secara menyeluruh.

Berdasarkan berbagai contoh yang telah disampaikan, jelas bahwa KCBI Sorong memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas moneter dan ekonomi di tingkat lokal. Peran ini mencakup pengelolaan peredaran uang, stabilisasi harga, serta upaya mengendalikan inflasi dan mencegah gejolak ekonomi yang dapat timbul akibat perubahan struktur kepemilikan perusahaan besar. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, KCBI Sorong

52 “N.V. Handel-Mij Pho Eng Liong,” Surat No. 11/6/UM/PK, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 4 Oktober 1963.

Tjenderawasih

PENDUKUNG TJITA 2 BHINEKA TUNGGAL IKA

NOMOR 114 TAHUN I. SABTU 16 MARET 1963.

BANK INDONESIA TJABANG SORONG DIBUKA

==== MASJARAKAT TAK PERLU GELISAH.

Biak baru 16/3. (Tjend.)
 Pada tanggal 1 Mei nanti dibidang moneter ekonomi akan didjajit
 dan diliberasnja, oleh karena itu masjarakat tak perlu meraga ragu dan geli-
 siah, demikian Max Maramis Wakil Kepala Perwakilan Indonesia di Irian Ba-
 wa dalam pidatonja pada pembukaan Bank Indonesia Tjabang Sorong di So-
 rong kemarin.

Disamping djaminan tersebut
 Max Maramis menandakan pula harap-
 anja agar kaum pengusaha terutama,
 berakinja benar2 menginsjafi fungsi
 bank ini. Tanpa adanja Bank, pereko-
 nomian dan perdagangan tidak bisa
 berjalan lantjar, sebaliknya bank
 tanpa adanja kegitatan2 ekonomi tiak
 mungkin akan mentjapai banjak
 pertinja.

Max Maramis selanjutnja mempe-
 rikatkan kaum pengusaha agar mere-
 ka lebih keras mendjalankan kegiat-
 an2 dengan rasa tanggung djawab dan
 tanggungjawab sekali-kali mengguakani
 kesempatan untuk mengadakan tinda-
 ran2 yang merugikan yang bisa menga-
 thatkan keketjauan ekonomi dan ke-
 sejahteraan. Demikian Max Maramis pada
 pidatoman Bank Indonesia Tjabang So-
 rong.

Djajara pembukaan Bank Indonesia
 Sorong ini berlangsung kemari-
 ni di Sorong dengan dihadiri sela-
 ma Max Maramis djuga Sumarmo pedjabat
 di Kotabaru, pedjabat 2 R.I. dan
 pejabat setempat, para pengusaha dan
 masjarakat setempat.

Dapat ditambahkan bahwa dengan
 pembukaan Tjabang Sorong ini, yang
 dikepalai S.H. Rarung, maka telah di-
 bukakan Tjabang2 Bank Indonesia di Kota-
 baru, Biak dan Sorong.

Dalam waktu singkat dikabarkan,
 Tjabang2 lainnja segera akan dibuka.

TINDAKAN TIDAK SAH DAN
TIDAK BERHORA L AKAN DI-
TINDAK SE-KERAS2NJA.

Biak 16/3. (Tjend.)
 Saja mesti memberi peringatan
 kepada semua mereka yang bekerja
 dalam perusahaan dan perdagangan
 yang hendak mentjaba menarik ke-
 untungan pada masa peralihan ini
 dengan tjara-tjara yang tidak sah
 dan tidak bermoral seperti men-
 djalankan pasar gelap, dan mengam-
 bil keuntungan terlalu banjak, jg
 mana tak akan dibiarkan oleh peme-
 tah ini, demikian Penguasa UNTEA
 Dr. Djajal Abdoh pada Pengresmian
 Rumah Sakit Umum Pusat jang baru
 di Biak kemarin. Ditandakan pula
 "siapa jang terbawa dalam perbu-
 atan2 demikian, akan ditindak se-
 keras2nja".

Dalam hubungan dengan pem-
 bukaan RSUP jg baru itu Abdoh me-
 njatakan Rumah Sakit ini akan mem-
 berikan setjara luas perawatan ba-
 gi jg sakit dan jg menderita bukan
 sadja terbatas di Biak. Dgn mema-
 dang kedepan saja jakin, RS ini a-
 kan berkembang menjjadi pusat utk
 mengadjarikan ilmu obat2an dan pe-
 njelidikan ilmu pengobatan.

Rentjana djangka panjang.
 Dlm hubungan pertjegahan berba-
 gai rupa penjakit dgn memberikan
 ukuran2 makanan jg sesuai, Abdoh men-
 djelaskan bahwa "sebagai hasil dari
 usaha pemerintah ini telah mem-
 (kehal II)

Gambar 4.10. Berita mengenai pembukaan KCBI Sorong secara resmi pada 15 Maret 1963.
 Sumber: Tjenderawasih, 16 Maret 1963.

menerapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor moneter di Papua, memastikan kelancaran aktivitas ekonomi, dan mendukung pembangunan daerah.

B.3. Kantor Cabang BI Manokwari

Seperti halnya di Sorong, Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar pada peran KCBI di wilayah lain. Salah satu cabang yang turut berperan dalam dinamika ekonomi Papua adalah KCBI Manokwari, yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya.

Sesuai dengan amanat Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi dalam Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada 28 Maret 1963, pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di Manokwari harus dijalankan sesuai dengan garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong produksi dan ekspor, serta memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat mendirikan KCBI Manokwari guna memperkuat sistem moneter dan mendukung perekonomian daerah. Cabang ini diresmikan pada 17 Maret 1963, menjadikannya sebagai cabang ke-23 dari Bank Indonesia dan cabang keempat dari KCBI yang beroperasi di Papua. Pada awal operasionalnya, KCBI Manokwari dipimpin oleh Mahfud Jakile, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai salah satu kasir di KCBI Bandung. Dalam melaksanakan tugasnya, ia dibantu oleh R. Saptadi Baroto (pemegang buku), Soewarto, Soeharmanto, dan K. de Queljoe.

Dari sisi kepegawaian, formasi di KCBI Manokwari sudah tergolong cukup solid, meskipun masih terdapat kebutuhan akan tambahan tenaga kasir. Saat diresmikan, KCBI Manokwari hanya memiliki satu kasir yang harus bekerja lembur setiap

malam untuk memenuhi kebutuhan operasional yang semakin meningkat. Sebagai solusi sementara, seorang karyawan dari Kantor Pusat, Rusta, diperbantukan sebagai pembantu kasir atas persetujuan pimpinan cabang. Kehadirannya membawa dampak yang signifikan. Selama empat bulan bertugas, ia menjalankan pekerjaannya dengan tingkat keakuratan tinggi, tanpa pernah mengalami selisih atau kekurangan dalam pencatatan keuangan.

Sementara itu, dari sisi akomodasi, hasil peninjauan yang dilakukan oleh Saenan Soesanto di Manokwari menunjukkan bahwa setidaknya terdapat tiga unit rumah yang kemudian digunakan sebagai tempat tinggal bagi pimpinan dan karyawan. Penyediaan fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan stabilitas bagi para pegawai dalam menjalankan tugas mereka, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan produktif.

Namun, meskipun kondisi akomodasi bagi pegawai mulai membaik, tantangan lain muncul di sektor perdagangan dan distribusi barang. Untuk beberapa waktu lamanya, wilayah Manokwari sempat mengalami kekosongan pasokan barang. Situasi ini tidak hanya disebabkan oleh tersendatnya transportasi, tetapi juga oleh terputusnya hubungan perdagangan antara Manokwari dan Hong Kong sejak Oktober 1964. Sebelumnya, hubungan perdagangan antara Merauke dan Malaysia juga telah terputus pada tahun 1963 akibat Konfrontasi Indonesia dengan Malaya. Akibatnya, para pedagang harus mencari pasar baru di negara lain, yang menciptakan *gap* dalam pasokan barang.

Dalam kondisi tersebut, KCBI Manokwari mengambil peran aktif dengan memberikan berbagai bantuan guna memastikan perdagangan ekspor dan impor dapat kembali berjalan seperti sedia kala. Sebagai langkah awal, KCBI Manokwari bekerja sama dengan otoritas perdagangan dan perbankan untuk memfasilitasi akses kredit bagi para pedagang yang mengalami kesulitan modal akibat terganggunya arus distribusi. Kredit ini memungkinkan

mereka untuk mengamankan stok barang dari sumber alternatif dan mempercepat pemulihan pasokan. Selain itu, KCBI Manokwari juga berperan dalam menyalurkan instruksi dari pemerintah pusat terkait kebijakan pengendalian harga guna mencegah spekulasi dan lonjakan harga yang tidak terkendali.

Di sisi lain, guna mengatasi kendala logistik, KCBI Manokwari turut mengkoordinasikan jalur distribusi barang dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan pelayaran dan otoritas transportasi, untuk memastikan kelancaran arus masuk barang kebutuhan pokok. Dalam beberapa kasus, bank ini juga memberikan dukungan administrasi bagi pengusaha lokal dalam mengurus izin ekspor-impor yang terdampak oleh perubahan regulasi akibat terputusnya hubungan perdagangan dengan beberapa negara.

Sebagai pimpinan KCBI Manokwari, Noek Hartono Hardjopranoto—yang menggantikan Mahfud Jakile—mengajukan permintaan kepada Kantor Pusat BI untuk meninjau kembali tarif yang saat itu diberlakukan. Ia menekankan pentingnya membedakan antara *trade transfer* dan *social transfer*, sehingga harga barang yang dikirim dari wilayah lain di Indonesia dapat disesuaikan dengan ketentuan harga yang berlaku di Papua secara umum.⁵³

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keselarasan harga di wilayah tersebut, terutama mengingat tantangan logistik dan distribusi yang cukup besar. Faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur sering kali menyebabkan harga barang kebutuhan pokok di Manokwari melonjak lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Dengan adanya penyesuaian tarif, diharapkan harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memberikan kepastian

53 Sebelum menggantikan Mahfud Jakile sebagai pimpinan KCBI Manokwari, Noek Hartono Hardjopranoto sempat menjabat sebagai kasir di KCBI Padang. Setelah menuntaskan tugasnya di Manokwari, Noek sempat menjadi pimpinan KCBI Merauke, hingga ia ditunjuk sebagai manajer di KCBI Cirebon. Lihat *Bank Indonesia: Report for the Financial Year 1970/71*. (Jakarta: Bank Indonesia, 1972), hlm. 112.

usaha bagi para pedagang dan distributor lokal.

Selain itu, muncul pula usulan untuk mengubah sistem impor di Papua dari *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) menjadi *Free on Board* (FOB). Perubahan ini diusulkan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar bagi importir dalam memilih perusahaan asuransi, sekaligus membuka peluang bagi perusahaan asuransi lokal untuk beroperasi di Papua. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses perdagangan, tetapi juga memperkuat sektor jasa keuangan di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, transisi ke sistem FOB diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada perusahaan asuransi asing dan memungkinkan pemerintah daerah memiliki kontrol lebih besar terhadap regulasi perdagangan. Selain itu, skema ini dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap barang impor, terutama dalam menghadapi risiko perjalanan laut yang sering kali dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrem dan infrastruktur pelabuhan yang masih terbatas.

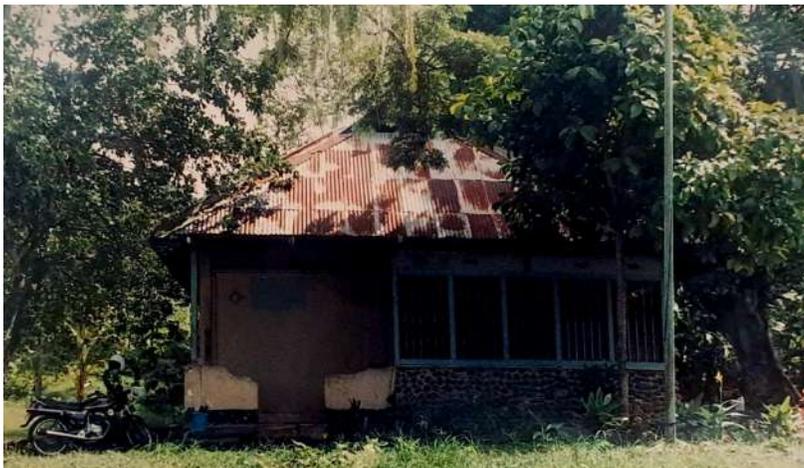
Dengan langkah-langkah strategis ini, KCBI Manokwari tidak hanya bertindak sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi lokal, memastikan ketersediaan barang serta mendukung stabilitas harga di Manokwari. Harapannya, kebijakan perdagangan di Papua dapat menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi lokal, sekaligus mempercepat pembangunan sektor keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Upaya ini mencerminkan komitmen KCBI Manokwari dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan berat yang harus dihadapi.⁵⁴

54 “Laporan Pemimpin Tjabang Manokwari (Noek Hartono) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan yang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/ SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.



Gambar 4.11. Foto dari Kantor Cabang Bank Indonesia Manokwari yang diambil pada 22 Januari 1963.

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia.



Gambar 4.12. Kondisi Kantor Cabang Bank Indonesia Manokwari yang kemudian digunakan sebagai rumah tinggal. Foto diambil pada 21 Januari 1988.

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia.

Tidak dapat dimungkiri bahwa Bank Indonesia Cabang Manokwari memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan dan kemajuan masyarakat, terutama dalam bidang perekonomian. Dalam konteks ini, peran KCBI Manokwari sangat signifikan, tidak hanya dalam menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga dalam memastikan kelancaran pasokan barang dan memperkuat daya saing wilayah.

Dalam menjalankan tugasnya, KCBI Manokwari tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter, tetapi juga berupaya mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Salah satu aspek penting dari peran ini adalah bagaimana cabang tersebut berkontribusi dalam menyeimbangkan kebutuhan regional dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan visi pimpinan KCBI Manokwari yang menegaskan bahwa “kita harus selalu memikirkan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam masyarakat serta menyalurkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam daerah itu untuk daerah lainja.”⁵⁵

Lebih lanjut, Noek menegaskan bahwa KCBI Manokwari tidak boleh mengisolasi diri sebagai entitas eksklusif, tetapi harus terus berperan aktif dalam mendukung dan mendorong berbagai kegiatan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Bank, menurutnya, bukan sekadar institusi keuangan yang beroperasi secara terpisah dari dinamika sosial, melainkan bagian integral dari perjuangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana ia ungkapkan:

“Njata bahwa gerak Bank serta perdjolongan Bank harus diserahkan dengan perdjolongan masjarakat, sehingga tidak djarang terdjadi bahwa Bank merupakan pula suatu barisan

55 “Laporan Pemimpin Tjabang Manokwari (Noek Hartono) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLP/SKA-DPLP/ROP/47/1/0872.

depan dari perdjolongan masjarakat.”⁵⁶

Oleh karena itu, kehadiran KCBI Manokwari menjadi sangat vital sebagai tempat masyarakat mencari solusi, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam berbagai aspek lain yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Bank tidak hanya sekedar menjalankan fungsi perbankan, melainkan juga menjadi pusat pemikiran dan kebijakan yang dapat memberikan arahan bagi perkembangan ekonomi serta sosial masyarakat. Sebagaimana yang Noek tegaskan dalam pernyataan berikut:

“Kita merasa bahwa kita dapat menjumbangkan fikiran serta pengetahuan kita untuk kemadjuan masjarakat tersebut dan bahkan lebih dari itu, kita ingin memberikan djasa-djasa kita kepada masjarakat.”⁵⁷

Di sinilah KCBI Manokwari memainkan peran ganda yang unik. Tidak hanya sebagai institusi yang menggerakkan masyarakat, tetapi juga sebagai entitas yang mendapat dorongan dan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya interaksi yang saling menopang ini, KCBI Manokwari tidak hanya menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Sementara itu, dalam upaya merombak mental sumber daya manusia (*mentale omschakeling*), KCBI Manokwari telah berkontribusi secara luas melalui berbagai bidang, termasuk media penerangan, kesenian, olahraga, dan pendidikan bagi generasi muda. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan

56 “Laporan Pemimpin Tjabang Manokwari (Noek Hartono) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

57 “Laporan Pemimpin Tjabang Manokwari (Noek Hartono) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, sekaligus mengikis mentalitas pasif yang terbentuk selama masa kolonial. Prakarsa BI Manokwari dalam mendirikan gedung pertemuan, menghidupkan berbagai organisasi sosial, serta secara aktif melibatkan putra-putra daerah, telah berhasil menumbuhkan semangat baru di tengah masyarakat. Mereka tidak lagi sekedar menjadi penonton (*toeschouwer*) seperti di masa lalu, tetapi didorong untuk turut serta sebagai pemain aktif (*medespeler*) dalam perjuangan membangun daerah.

Hingga pertengahan tahun 1965, hubungan antara KCBI Manokwari dan para pejabat setempat terjalin dengan sangat baik. Bank ini tidak hanya berperan sebagai penggerak utama (*leading and commanding position*) dalam sektor ekonomi moneter dan perbankan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam perumusan serta implementasi kebijakan ekonomi daerah. Lebih dari sekedar lembaga keuangan, KCBI Manokwari mengambil peran kepemimpinan yang inspiratif bagi para petugas di wilayah lain, memberikan arahan serta contoh dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang progresif. Sinergi yang dibangun dengan berbagai pihak tidak hanya memperkuat stabilitas moneter, tetapi juga membantu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di Papua.

Manokwari bukan satu-satunya wilayah di Papua yang mengalami perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan kehadiran BI. KCBI Merauke, sebagai cabang lain dari Bank Indonesia, juga memegang peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan serta dinamika unik di daerah perbatasan. Dengan posisi geografis Merauke sebagai pintu gerbang ekonomi menuju Papua Nugini, KCBI Merauke berperan penting dalam menopang sistem keuangan dan mendukung kelancaran perdagangan di wilayah tersebut.

B.4. Kantor Cabang BI Merauke

Pendirian KCBI Merauke tidak hanya berfungsi sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam memperluas jaringan perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan stabilitas ekonomi, memperkuat kontrol moneter, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Kondisi ekonomi dan perbankan di Merauke memiliki karakteristik yang unik, yang membedakannya dari wilayah lain di Papua. Oleh karena itu, keberadaannya menjadi krusial dalam melengkapi jaringan Bank Indonesia, sehingga sistem keuangan nasional dapat berfungsi lebih optimal dan merata di seluruh Papua.

Proses pendirian KCBI Merauke merupakan salah satu yang paling menantang di Papua. Sebagai daerah yang terletak di ujung timur Indonesia, tantangan geografis Merauke menjadi faktor krusial dalam distribusi serta pengelolaan uang. Jarak yang jauh dari pusat ekonomi nasional, infrastruktur yang masih terbatas, serta konektivitas yang minim menjadikan arus keuangan di wilayah ini lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja terampil serta rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat menjadi tantangan tambahan yang memperlambat operasional awal kantor cabang ini. Namun, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan KCBI Merauke dapat beroperasi secara optimal guna mendukung stabilitas ekonomi dan sistem moneter di wilayah perbatasan.

Sebagai langkah awal dalam persiapan pembukaan, Bank Indonesia menugaskan tiga pegawai untuk diperbantukan di Merauke. Mereka diberangkatkan pada 28 Februari 1963 dengan jadwal penerbangan yang tersedia. Noek Hartono Hardjopranoto, yang kelak menjabat sebagai pimpinan cabang KCBI Manokwari, ditunjuk sebagai pimpinan pertama KCBI Merauke, dengan R. Soenokarto Darsopanampang dan Tan Siau Hong sebagai pendamping dalam operasional awal kantor cabang ini.

Meskipun struktur kepemimpinan telah terbentuk, KCBI Merauke masih menghadapi kendala serius dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Permasalahan ini terungkap dalam salah satu surat korespondensi yang dikirimkan ke Kantor Pusat di Jakarta, yang mengungkapkan kebutuhan mendesak akan tambahan pegawai guna memastikan kelancaran operasional kantor cabang.

“Saudara dapat mengirimkan dalam waktu singkat beberapa pegawai yang merupakan tenaga inti, dengan membawa serta perbekalan setjukupnja, termasuk alat-alat dapur dan rumah tangga darurat, guna persiapan-persiapan selanjutnja dengan harapan agar kantor Tjabang Saudara di Merauke dapat dibuka dengan resmi sebelum tanggal 15 Maret 1963.”⁵⁸

Menanggapi situasi tersebut, Soekasah Somawidjaja, selaku Inspektur Muda Bank Indonesia, menyarankan agar KCBI Merauke segera merekrut satu tenaga tata usaha khusus untuk menangani urusan ekspor-impor serta mengangkat pemegang buku sebagai kuasa kas sementara. Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan seluruh kegiatan operasional awal KCBI Merauke dapat berjalan lancar tanpa kendala administratif yang berarti.

Dari segi infrastruktur, hasil peninjauan Djoko Sutargo—mantan pimpinan KCBI Kotabaru sekaligus pejabat Bank Indonesia Pusat—ke Merauke pada awal 1963 menunjukkan bahwa kondisi perumahan di wilayah tersebut sangat berbeda dibandingkan daerah lain di Papua. Djoko menghadapi kesulitan besar dalam menemukan gedung dan tempat tinggal bagi para pegawai, mengingat hampir seluruh properti yang tersedia telah terisi. Beruntung, pemerintah daerah setempat memberikan bantuan dengan menjanjikan ketersediaan rumah sebelum prosesi

58 “Pembukaan Tjabang-Tjabang Bank Indonesia Sorong, Manokwari, dan Merauke,” dalam Surat KB No. 10/5/UU/INSP tanggal 22 Februari 1963, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 22 Februari 1963.

peresmian. Bahkan, bila diperlukan, beberapa rumah yang saat itu ditempati oleh pejabat RI yang diperbantukan di UNTEA juga dapat dikosongkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan pegawai KCBI Merauke.

Pada awalnya, KCBI Merauke direncanakan akan menempati halaman depan rumah pimpinan cabang sebagai lokasi operasional sementara. Namun, lokasi ini dinilai tidak memenuhi standar keamanan minimal yang diperlukan bagi sebuah kantor perbankan. Sebagai solusi, sempat muncul usulan untuk membangun gedung baru khusus di Merauke. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) telah melakukan kalkulasi awal, dengan estimasi biaya pembangunan berkisar antara IBRp250 hingga IBRp300 per meter persegi. Untuk memastikan kualitas serta ketepatan waktu dalam proses pembangunan, DPU menyarankan agar beberapa material konstruksi diimpor dari luar negeri guna menjamin daya tahan serta kelayakan teknis bangunan yang akan dibangun.

Ketika Djoko Sutargo mengusulkan penggunaan bekas gedung NHM sebagai kantor cabang, sempat keberatan dari I Njoman Muna, yang meragukan kelayakan bangunan tersebut. Menurutnya, gedung itu tidak memenuhi standar untuk dijadikan kantor cabang karena kondisi fisiknya yang kurang memadai. Namun, Djoko dengan tegas menyatakan bahwa gedung tersebut merupakan opsi terbaik yang tersedia, baik dari segi struktur maupun lokasi strategisnya. Dengan mempertimbangkan keterbatasan pilihan yang ada, ia menekankan bahwa penggunaan gedung NHM adalah solusi paling realistis untuk mendukung operasional KCBI Merauke secara optimal.⁵⁹

Terkait dengan aspek keamanan dalam pengiriman dan penyimpanan uang, Djoko Sutargo memastikan bahwa ia telah memperoleh jaminan dari Kepala Cabang Perwakilan RI di

59 "Pembukaan Tjabang-Tjabang Bank Indonesia Sorong, Manokwari, dan Merauke," dalam Surat KB No. 10/5/UU/INSP tanggal 22 Februari 1963, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 22 Februari 1963.



Gambar 4.13. Kantor NHM Merauke yang kemudian digunakan sebagai KCBI Merauke.

Sumber: Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea, November 1961. Nummer Toegang: 2.24.05.02. <http://hdl.handle.net/10648/ae36e780-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

Jayapura serta Komandan Kontingen Indonesia di Merauke. Dukungan dari kedua pihak ini menjadi faktor krusial dalam menjamin kelancaran arus kas dan perlindungan aset keuangan di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi wilayah tersebut.

Singkat cerita, KCBI Merauke pun resmi beroperasi pada 19 Maret 1963, menjadikannya sebagai kantor cabang ke-24 sekaligus yang terakhir didirikan di Papua. Segera setelah diresmikan, KCBI Merauke langsung dihadapkan pada berbagai tantangan besar, terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pola pikir masyarakat Merauke yang umumnya belum terbiasa dengan sistem perbankan modern atau belum *bank minded*. Hal ini

tercermin dari lalu lintas giro di KCBI Merauke yang masih sangat terbatas, menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi keuangan masih dilakukan secara tunai atau lewat sistem barter. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi keuangan serta memperluas pemahaman masyarakat mengenai manfaat layanan perbankan.

Oleh karena itu, segera setelah diresmikan, KCBI Merauke mengambil langkah strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif. Kebijakan awal yang diterapkan mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung perjuangan masyarakat setempat, khususnya dalam mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) di berbagai aspek kehidupan. Prinsip utamanya, KCBI Merauke harus mampu hadir di seluruh lini kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Langkah ini dianggap krusial untuk menghilangkan persepsi bahwa KCBI Merauke adalah institusi eksklusif yang terisolasi, seolah-olah berada di ‘menara gading.’ Sebaliknya, KCBI Merauke merasa harus menempatkan diri sebagai mitra sejati yang berjuang bersama masyarakat, aktif mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memastikan akses layanan keuangan yang lebih luas bagi semua lapisan warga.⁶⁰

Tantangan lain juga muncul dari sektor moneter. Penerapan kurs IBRp terhadap valuta asing ternyata tidak memberikan dampak signifikan di Merauke. Hal ini disebabkan oleh minimnya kunjungan wisatawan asing ke wilayah tersebut, sehingga transaksi penukaran valuta asing praktis tidak terjadi atau hanya

60 “Laporan Pimpinan Tjabang Merauke (Sjamsuddin Sudjaja) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan yang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/ SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

berlangsung dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan demikian, aspek moneter di Merauke lebih bergantung pada dinamika perdagangan lokal dan distribusi uang dari pemerintah pusat dibandingkan dengan interaksi ekonomi lintas negara.

Kasus penarikan cek kosong hampir tidak pernah ditemukan di Merauke, kecuali dalam beberapa kejadian tertentu yang melibatkan instansi pemerintah atau pengusaha besar. Seluruh aktivitas perbankan dan perkreditan di wilayah ini masih dapat ditangani secara efektif oleh KCBI Merauke, sehingga kebutuhan akan pendirian bank baru belum dirasakan.

Seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi KCBI Merauke semakin kompleks. Hal ini terekam dalam pernyataan pimpinan KCBI Merauke berikutnya, Sjamsoeddin Sudjaja, yang pernah menjabat sebagai kasir di KCBI Palembang. Ia mengungkapkan bahwa proses integrasi KCBI Merauke ke dalam dinamika kehidupan masyarakat setempat bukanlah hal yang sederhana.

Menurut Sjamsoeddin, kendala utama berasal dari karakteristik wilayah Merauke yang unik serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Namun, ia menekankan pentingnya melanjutkan upaya untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat agar keberadaan KCBI Merauke benar-benar memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah. Pernyataan ini disampaikannya dalam Konferensi BERDIKARI Direktur Bank Cabang, yang diadakan di Jakarta pada Mei 1965:

“Walaupun setjara terus terang harus kami akui bahwa dengan suatu struktur perekonomian seperti sekarang ini diwilajah kerdja kami ditambah dengan suatu keterbelakangan jang menjolok pada rakjatnja, maka pengintergrasian perdjoangan Bank dengan perdjoangan masjarakat membutuhkan suatu usaha dan ketekunan jang

mendalam.”⁶¹

Sjamsuoddin menyadari bahwa bank tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan, tetapi juga harus berkontribusi terhadap perjuangan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dan terdidik agar bank dapat beroperasi secara efektif serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Sjamsuoddin sebagai pimpinan cabang, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal menjadi salah satu program prioritas.

Peningkatan pendidikan dipandang sebagai langkah strategis untuk memberikan kesempatan bagi putra daerah Papua agar dapat berperan aktif dalam pengembangan KCBI Merauke. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan kualifikasi yang memadai masih sangat terbatas, seiring dengan kualitas pendidikan yang belum merata di wilayah tersebut.

Hingga pertengahan tahun 1965, hanya terdapat dua tenaga kerja asli Papua yang bekerja di KCBI Merauke, dan keduanya masih menduduki posisi dasar. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam menciptakan sumber daya manusia lokal yang siap bersaing di sektor perbankan, sehingga mendorong perlunya investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dalam Konferensi BERDIKARI itu pun Sjamsuoddin menyatakan:

“Kami berpendapat bahwa djika Saudara bermaksud untuk ‘mempertahankan’ Kantor Tjabang Saudara di Merauke ini, sudah waktunjalah kini untuk menerima tenaga-tenaga tata-usaha putera-putera Irian Barat, yakni untuk membentuk suatu kader terdiri dari tenaga-tenaga tata-usaha setempat guna menggantikan tenaga-tenaga tata-usaha pindahan

61 “Laporan Pemimpin Tjabang Merauke (Sjamsuoddin Sudjaja) pada Konperensi BERDIKARI,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

dari daerah Indonesia lainnja. Mengingat akan kesukaran jang harus kami hadapi dalam penerimaan tenaga-tenaga tata-usaha putera Irian Barat, maka menurut hemat kami alangkah baiknja apabila Sdr. dapat memberikan kesempatan bagi putera-putera Irian Barat jang mempunjai minat bekerdja dibidang perbankan untuk bersekolah ke Djakarta atau tempat lainnja didaerah Indonesia lainnja atas biaya Bank dan kelak apabila selesai pendidikannja dipekerdjakan pada kantor-kantor Sdr. didaerah Irian Barat.”⁶²

Bagi Sjamsoeddin, konsepsi “Bank Berdjuang” tidak hanya sebatas membangun infrastruktur perbankan, tetapi juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan mentalitas dan kapasitas masyarakat lokal. Ia berpendapat bahwa pembangunan sumber daya manusia di Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab BI.

Sjamsoeddin pun mengusulkan agar seluruh karyawan KCBI Merauke diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai program pendidikan tambahan yang diselenggarakan secara internal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja, terutama bagi karyawan dengan latar belakang pendidikan dasar, seperti lulusan SD, sehingga dapat memperoleh keterampilan baru melalui kursus-kursus kepegawaian. Hal yang sama juga berlaku bagi karyawan dengan tingkat pendidikan SMP dan seterusnya, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan operasional bank.

Usulan tersebut muncul karena pada masa itu hanya terdapat dua program pendidikan formal di bidang perbankan, yaitu “Kursus Tertulis Yayasan Pendidikan Kader Bank” dan “Perguruan Tinggi Ilmu Perbankan.” Namun, akses terhadap kedua program ini sangat terbatas, karena hanya diperuntukkan bagi individu

62 “Laporan Pemimpin Tjabang Merauke (Sjamsuddin Sudjaja) pada Konperensi BERDIKARI,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA. Dengan adanya pelatihan internal yang lebih inklusif, diharapkan seluruh karyawan, tanpa memandang latar belakang pendidikan, dapat terus mengembangkan kemampuan mereka dan berkontribusi secara optimal terhadap operasional KCBI Merauke.⁶³

Lebih jauh lagi, Sjamsoeddin menegaskan bahwa komitmen jangka panjang dari Bank Indonesia sangat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Papua, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dari luar wilayah. Ia berharap kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran KCBI Merauke sekaligus mendorong pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Keberhasilan program ini diyakini dapat menciptakan tenaga kerja lokal yang lebih mandiri serta memperkuat sistem perbankan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, KCBI Merauke juga berperan aktif dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, KCBI Merauke berhasil menjalin hubungan yang erat dengan pejabat setempat, pihak swasta, dan masyarakat. Salah satu bukti nyata dari hubungan ini terlihat ketika KCBI Merauke mengumumkan rencana peringatan Hari Bank. Baik pihak sipil maupun militer secara spontan menyatakan kesediaan mereka untuk memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana KCBI Merauke diterima dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini juga menegaskan posisi KCBI Merauke yang tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang aktif dalam membangun hubungan sosial dan memperkuat solidaritas komunitas.

63 "Laporan Pemimpin Tjabang Merauke (Sjamsuddin Sudjaja) pada Konperensi BERDIKARI," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

Perjalanan KCBI Merauke menjadi bukti nyata bagaimana BI berupaya beradaptasi dengan kondisi unik di Papua. Tantangan geografis, keterbatasan sumber daya manusia, serta karakteristik ekonomi lokal menjadi beberapa kendala yang harus dihadapi dengan strategi yang matang. Namun, keberhasilan KCBI Merauke dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat operasional perbankan menunjukkan bahwa institusi ini mampu mengatasi berbagai keterbatasan. Pencapaian ini tidak hanya memperkuat peran Bank Indonesia di wilayah perbatasan, tetapi juga membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, sistem perbankan dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dengan komitmen jangka panjang untuk memberdayakan putra daerah, KCBI Merauke menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Papua. Keberadaan institusi ini membuktikan bahwa sistem perbankan dapat menjadi motor penggerak bagi kemajuan daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks.

C. Inspeksi Soekasah Somawidjaja

Seluruh kejadian perkembangan yang terjadi di KCBI Kotabaru dan kantor-kantor cabang BI lainnya, selalu dilaporkan secara rutin kepada Kantor Pusat di Jakarta. Menyikapi situasi di berbagai cabang yang penuh dengan tantangan dan permasalahan operasional, Kantor Pusat mengambil langkah cepat dengan mengutus E. Soekasah Somawidjaja, seorang Inspektur Muda Bank Indonesia, untuk melakukan peninjauan langsung ke seluruh kantor cabang di Papua. Penunjukan Soekasah tentu bukan tanpa alasan; ia dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi Papua, mengingat sebelumnya ia pernah diutus langsung oleh Bung Karno untuk memimpin Unit Peleton Bank di wilayah tersebut.

Perjalanan dinas Soekasah berlangsung selama 27 hari, dimulai pada 22 Agustus 1963 dan berakhir pada 17 September 1963. Tujuan utama dari kunjungan tersebut adalah membantu memperbaiki tata kelola administrasi di seluruh kantor cabang BI di Papua, sekaligus mengumpulkan informasi penting yang dapat dijadikan rekomendasi perbaikan bagi Direksi BI di Kantor Pusat Jakarta.

Awalnya, rencana keberangkatan Soekasah melibatkan beberapa pegawai lainnya. Namun, akibat kendala dalam mendapatkan jadwal penerbangan yang memadai untuk seluruh tim, akhirnya hanya Jo Tek Soei dari Bagian Inspeksi yang ditugaskan untuk mendampinginya. Pembagian tugas pun dilakukan: Jo Tek Soei bertanggung jawab meninjau KCBI Jayapura dan Biak, sementara Soekasah menginspeksi KCBI Manokwari, Sorong, dan Merauke. Pada 12 September 1963, Kantor Pusat memutuskan untuk mengirim dua tenaga tambahan guna membantu operasional di KCBI Jayapura, yaitu Tjoa Tiang Tjoen dan Joesoef Soeparto.

Secara garis besar, mereka menghabiskan lebih banyak waktu di Jayapura dan Biak, mengingat kedua cabang tersebut “masih memerlukan banjak bantuan dalam membangun tata usahanya.” Kondisi di KCBI Biak masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat stabilitas operasional, terutama akibat seringnya pergantian kepemimpinan. Selain itu, cabang ini juga mengalami kekurangan tenaga kerja, yang semakin memperlambat upaya untuk merapikan tata usahanya. Tantangan utama lainnya adalah pengelolaan urusan ekspor-impor serta pemberian kredit, yang membutuhkan perhatian khusus agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Tanpa perbaikan signifikan di aspek ini, operasional perbankan di Biak dikhawatirkan tidak akan mencapai tingkat kestabilan yang diharapkan.⁶⁴

64 “Laporan Perjalanan di Irian Barat tanggal 22 Agustus 1963 s/d 17 September 1963,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 September 1963.

Dari kelima kantor cabang BI yang ada, kondisi di KCBI Jayapura bisa dikatakan paling memprihatinkan. M. Rifai, selaku Pimpinan Cabang, mengakui bahwa ia belum dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk memperbaiki situasi di sana. Sebagian besar waktunya tersita untuk melacak selisih dalam neraca, yang menurutnya akhirnya berhasil ditemukan. Akibatnya, Soekasah dan timnya harus menghabiskan waktu jauh lebih lama di cabang Jayapura dibandingkan dengan cabang-cabang lainnya.

Sebaliknya, kondisi di KCBI Sorong, Manokwari, dan Merauke relatif lebih stabil. Ketiga kantor cabang ini sudah mulai beroperasi secara normal dengan sistem tata usaha yang lebih tertata. Kehadiran tenaga baru yang lebih berpengalaman juga memberikan kontribusi besar terhadap soliditas operasional, memungkinkan kantor-kantor cabang tersebut menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan lebih efisien.

Selama inspeksi di Jayapura, Soekasah mencatat setidaknya ada 37 kekurangan yang memerlukan perbaikan segera di cabang tersebut. Salah satu kesalahan yang dianggap cukup fatal adalah ketika Pimpinan Cabang Jayapura tidak segera mengirimkan Kombinasi Baru (Komba) ke Kantor Pusat dan juga tidak menyerahkan ekstra Komba kepada pejabat yang telah ditentukan di KCBI Jayapura. Selain itu, beberapa kekurangan lainnya yang cukup signifikan juga ditemukan, di antaranya:⁶⁵

- Tidak segera melakukan pembukuan terkait pengiriman NNG dari kantor-kantor cabang lain, sehingga jumlah uang IBRp yang beredar di Papua tidak mencerminkan jumlah uang yang beredar sesungguhnya.
- Kartu tanda tangan/instruksi banyak yang tidak diisi lengkap dan belum disahkan oleh pejabat yang berhak menandatangani.
- Ada bukti pembukuan yang hilang mengenai penjualan uang

65 "Laporan Perjalanan di Irian Barat tanggal 22 Agustus 1963 s/d 17 September 1963," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 September 1963.

kertas asing US\$.

- Pembuatan dan pengiriman laporan berkala kepada Kantor Pusat belum dilakukan secara lengkap.
- Surat-surat kuasa dari para pemegang rekening tidak disusun secara rapi dan teratur berdasarkan abjad.
- Buku daftar transfer ‘keluar’ banyak yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, pencatatan transfer dalam buku daftar tersebut banyak yang dilakukan dengan pensil biasa dan bukan dengan pulpen.
- Setiap transfer ‘masuk’ tidak dicatat dalam buku daftar yang bersangkutan, sehingga ada kemungkinan perhitungan atau pembayaran yang terjadi lebih dari satu kali.
- Tidak ada daftar terbaru mengenai para importir luar negeri yang masuk dalam daftar hitam (*blacklist*).
- Setiap transaksi impor tidak dibuatkan map sendiri, sehingga dokumen (*stukken*) yang berkaitan dengan transaksi impor tersebut sulit dicari.
- Telegram-telegram yang masuk/keluar tidak dibundel secara rapi dan teratur berdasarkan abjad.
- Dokumen-dokumen pengawasan dari bank-bank di luar negeri tidak disimpan dalam satu tempat yang berada di bawah pengawasan seorang staf.
- Surat-surat dari UNTEA masih banyak yang belum dibalas.
- Kesalahan transfer yang terjadi dua kali masih belum diupayakan pengembaliannya.

Setelah pengambilalihan NHM oleh BI, seluruh pegawai NHM seharusnya secara otomatis menjadi bagian dari BI. Namun, surat keputusan resmi mengenai pengangkatan mereka tidak kunjung diterbitkan, menyebabkan ketidakpastian di kalangan karyawan. Mereka terus mempertanyakan status mereka, terutama karena sebelumnya mereka terbiasa bekerja dengan prosedur yang tertulis secara resmi. Menanggapi permasalahan ini, Soekasah

mengusulkan agar setiap pimpinan cabang segera mengeluarkan surat keputusan pengangkatan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi para karyawan serta menjaga stabilitas dan kelancaran operasional di seluruh kantor cabang.

Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam aspek pengelolaan dan manajemen antara NHM dan Bank Indonesia. Oleh karena itu, para pegawai eks-NHM memerlukan pendidikan dan pelatihan tambahan sebelum dapat dimasukkan ke dalam kategori tenaga inti di BI. Selama proses pendidikan ini berlangsung, tenaga kerja dari luar sangat dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi strategis, seperti di seksi ekspor-impor, perkreditan dana devisa, serta beberapa bidang operasional lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa transisi operasional berjalan dengan lancar tanpa mengganggu stabilitas layanan perbankan.⁶⁶

Gusti Abdul Azis mengajukan permohonan agar seluruh mantan pegawai NHM yang telah menjadi bagian dari formasi pegawai BI juga dapat menerima tunjangan Natal. Sebagai catatan, mayoritas eks-pegawai NHM memang beragama Kristen. Namun, mengingat mereka baru saja ditetapkan sebagai pegawai BI, muncul pertanyaan apakah mereka berhak menerima tunjangan tersebut. Bagi Gusti, pemberian tunjangan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga langkah penting “untuk memberikan suatu kepertjajaan yang lebih mendalam tentang maksud-maksud yang baik dari Bank Indonesia terhadap mereka.”⁶⁷ Selain itu, pemberian hadiah Natal ini diyakini akan berdampak positif secara psikologis, memperkuat rasa kebersamaan dan loyalitas mereka sebagai bagian dari keluarga besar BI.

Soekasah juga sempat menyoroti kesenjangan yang begitu mencolok antara pegawai asli Papua dengan pegawai dari luar

66 “Uang Hadiah Natal,” Surat KB No. 11/7/UU/PEG, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 18 November 1963.

67 “Uang Hadiah Natal,” Surat KB No. 11/7/UU/PEG, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 18 November 1963.

daerah, terutama dalam hal upah dan tunjangan. Sebagai contoh, seorang pegawai dengan posisi rendah yang berasal dari Jakarta dan bekerja di kantor cabang Kotabaru dapat menerima gaji sekitar IBRp550 per bulan, termasuk uang lembur. Sementara itu, seorang pegawai asli Papua dengan beban kerja yang setara hanya mendapatkan sekitar IBRp100 per bulan.⁶⁸

Sementara itu, seluruh pegawai, termasuk pimpinan cabang, menerima uang lembur sebesar IBRp2,50 per jam. Lembur ini umumnya lebih sering dilakukan di kantor cabang Kotabaru dan Biak, mengingat volume kerja di kedua lokasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan cabang lainnya. Selain uang lembur, tunjangan uang lauk-pauk juga menjadi sorotan karena diduga tidak diberikan secara merata di setiap kantor cabang. Beberapa pegawai dilaporkan menerima uang lauk-pauk sebesar IBRp5 per hari, sementara yang lain hanya menerima pasokan kebutuhan pokok seperti beras, teh, kopi, hingga sabun cuci. Namun tidak ada dasar yang jelas dalam pemberian tunjangan ini,

Tunjangan lainnya juga bervariasi antar kantor cabang. Pegawai di kantor cabang Jayapura, Manokwari, dan Merauke mendapatkan jatah makanan kecil setiap harinya. Sementara itu, pegawai di KCBI Biak menerima kompensasi dalam bentuk uang sebesar IBRp 0,75 per hari. Ketimpangan ini menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan pegawai, terutama di antara pegawai asli Papua yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Soekasah pun menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan uang lembur, tunjangan makan, serta kebijakan distribusi sembako. Menurutnya, perbedaan dalam pemberian tunjangan ini hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat berdampak pada produktivitas dan stabilitas internal BI.⁶⁹

68 "Laporan Perdjalanan di Irian Barat tanggal 22 Agustus 1963 s/d 17 September 1963," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 September 1963.

69 "Laporan Perdjalanan di Irian Barat tanggal 22 Agustus 1963 s/d 17 September 1963," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 September 1963.

Selain itu, ketimpangan antara kelima kantor cabang BI juga ditemukan dalam fasilitas dan kualitas gedung yang dipakai sebagai kantor. Sebagai informasi, dari lima KCBI yang beroperasi di Papua, hanya cabang Jayapura dan Sorong saja yang menempati gedung perkantoran yang layak, sedangkan tiga cabang lainnya—Biak, Manokwari, dan Merauke—masih beroperasi di rumah-rumah biasa. Sebagai bank sentral, BI memiliki persyaratan keamanan yang ketat, mencakup infrastruktur yang kokoh, sistem penyimpanan uang yang aman, dan protokol pengamanan yang ketat. Sebelumnya, NHM beroperasi di ketiga cabang tersebut dengan penuh keterbatasan, mereka menyimpan uang tunai perusahaan hanya di dalam *brandkast* (brankas). Meskipun kondisi keamanan di Papua dilaporkan relatif stabil, penggunaan rumah sebagai kantor cabang tetap dianggap belum memenuhi standar operasional yang diterapkan BI.

Menanggapi situasi tersebut, Kantor Pusat BI di Jakarta segera menginstruksikan para pimpinan cabang untuk meningkatkan keamanan, termasuk melakukan renovasi dan menambah penjagaan bersenjata sepanjang hari. Beberapa langkah yang diwajibkan antara lain pemasangan pagar di sekeliling kantor, pemasangan jeruji pada jendela, serta memperkuat struktur pintu-pintu utama. Selain itu, penerangan di sekitar kantor juga harus ditingkatkan guna meminimalisir risiko kejahatan pada malam hari. Untuk menjaga privasi dan keamanan operasional, semua kantor cabang diwajibkan memasang gorden di jendela guna menghalangi pandangan dari luar.

Demikianlah, setelah laporan Soekasah disampaikan, berbagai perbaikan dan pembenahan segera dilakukan, khususnya di KCBI Jayapura. Sebagai kantor cabang pertama dan terbesar di Papua, KCBI Jayapura jelas harus menjadi *role model* bagi kantor-kantor cabang BI lainnya. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka hanya tinggal menunggu waktu sebelum seluruh jaringan kantor cabang mengalami disfungsi, yang pada akhirnya akan berdampak negatif

terhadap stabilitas ekonomi di Papua.

Dari seluruh pembahasan di atas, jelas tergambar bahwasanya BI melalui lima kantor cabangnya di lima kota Papua memiliki tugas yang tidak ringan. Dengan kondisi geografis Papua yang sangat menantang, kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan, dan ketergantungan ekonomi lokal di Papua terhadap barang-barang impor, pihak BI pun harus memikirkan strategi terbaik untuk mendukung perkembangan ekonomi di sana. Apalagi situasi ini juga dipersulit dengan masih belum terbiasanya sebagian besar penduduk Papua terhadap sistem perbankan modern (*bank minded*). Pada saat yang sama, penduduk Papua juga harus menghadapi situasi ‘persaingan mata uang’ antara NNG yang dikeluarkan oleh Pemerintah kolonial Belanda, dan IBRp yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk persoalan terakhir ini, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat kehadiran IBRp sebagai mata uang resmi di Papua. Di satu ia berfungsi sebagai penanda hadirnya negara Indonesia dan memperkuat integrasi wilayah ini ke dalam sistem perekonomian nasional Indonesia, pada saat yang sama sekaligus menghilangkan pengaruh NNG dan kepentingan politik-ekonomi Belanda di tanah Papua.

Bab selanjutnya akan membahas secara mendalam bagaimana proses pengenalan Rupiah Irian Barat (IBRp.) dan proses pengrupihan Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. §

BAB V

PEREDARAN RUPIAH IRIAN BARAT (IBRP.) DAN PROSES 'PENGRUPIAHAN' PAPUA, 1963 - 1973

Proses pengintegrasian Papua ke dalam sistem moneter dan perekonomian nasional merupakan salah satu tantangan terbesar pasca transisi kekuasaan. Sebagai wilayah yang sebelumnya memiliki sistem keuangan tersendiri, Papua harus menghadapi kompleksitas yang tidak dialami daerah lain di Indonesia. Pengelolaan devisa, lalu lintas perdagangan luar negeri, serta perbedaan kebijakan ekonomi yang diterapkan selama masa administrasi sebelumnya membuat transisi ekonomi di Papua tidak bisa dilakukan secara langsung. Butuh strategi yang matang dan berkesinambungan agar perubahan sistem yang terjadi tidak mengganggu stabilitas ekonomi lokal maupun kesejahteraan masyarakat.

Menyadari pentingnya kelancaran transisi keuangan di Papua, Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah penerbitan mata uang khusus yang hanya berlaku di Papua, yaitu Rupiah Irian Barat (IBRp.). Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi integrasi ekonomi wilayah tersebut, sekaligus memastikan stabilitas keuangan selama masa transisi.

Setelah transisi politik dan ekonomi mulai berjalan di Papua, program pengrupiahan nasional pun diimplementasikan sebagai solusi jangka panjang untuk menstandarkan alat pembayaran dan meningkatkan efektivitas sistem moneter di Papua. Kebijakan-kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk memastikan kesinambungan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat posisi Papua dalam perekonomian nasional.

Bab ini mengupas proses integrasi sistem moneter Papua ke dalam kerangka ekonomi nasional, yang diawali dengan pengenalan Rupiah Irian Barat hingga transisi penuh menuju Rupiah nasional. Meskipun proses ini dihadapkan pada berbagai tantangan—mulai dari perbedaan nilai tukar, kendala logistik, hingga ketimpangan harga—kebijakan ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan mewujudkan kesatuan moneter di Papua.

A. Diperkenalkannya Rupiah Irian Barat

Pada 21 Februari 1963, Bung Karno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 2/1963 yang menetapkan penggunaan satuan mata uang khusus untuk Provinsi Papua, yakni Rupiah Irian Barat (IBRp.). Mata uang ini diterbitkan untuk menggantikan “Nederlands Nieuw-Guinea Gulden” (NNG atau Ngf.), yang sebelumnya digunakan di wilayah tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi transisi moneter yang bertujuan

menjaga stabilitas ekonomi Papua pasca integrasi dengan Indonesia. Dengan adanya keputusan ini, berbagai spekulasi mengenai mata uang yang akan digunakan di Papua pun terjawab. Adapun nilai tukar yang ditetapkan adalah IBRp1 (satu) setara dengan Ngf. 1 (satu).

Pada 2 April 1963, Kolonel Sutjipto, Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi (Peperti), mengumumkan bahwa IBRp. akan mulai diedarkan di Papua mulai 1 Mei 1963. Namun, mengingat keadaan khusus Papua, maka “devisen dan lalu lintas perdagangan luar negeri untuk daerah Irian Barat akan diatur secara khusus pula.” Sutjipto pun menjamin bahwa peredaran IBRp. tidak akan memengaruhi daya beli masyarakat setempat maupun berdampak negatif terhadap devisa dan lalu lintas perdagangan di Papua. Secara khusus, ia mengapresiasi seluruh jajaran pemerintahan, khususnya pihak BI, yang telah bekerja keras untuk memastikan transisi ini berjalan lancar. Berbagai langkah strategis pun segera dirancang guna menjamin kelancaran perdagangan luar negeri, pengelolaan devisa, serta penyimpanan dan peredaran IBRp. secara optimal.¹

Pada 24 April 1963, Menteri Urusan Bank Sentral, Soemarno, secara resmi menetapkan nilai tukar IBRp. terhadap Dolar Amerika Serikat (US\$) dan Rupiah Indonesia (Rp). Berdasarkan kebijakan tersebut, nilai tukar IBRp. ditetapkan sebesar IBRp3,62 untuk setiap 1 US\$, sementara IBRp1 nilainya setara dengan Rp62,25.² Keputusan ini menjadi langkah krusial dalam menyesuaikan sistem moneter Papua dengan kebijakan ekonomi nasional.

Mengingat nilai tukar IBRp. yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar Rupiah yang berlaku secara nasional, Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk tidak memberlakukan Rupiah nasional di wilayah Papua selama masa transisi. Sebagai gantinya, IBRp. akan menjadi mata uang

1 “Rupiah Khusus untuk IB,” *Merdeka*, 2 April 1963.

2 “Kurs Rp. I.B.” *Merdeka*, 2 Mei 1963.

tunggal yang digunakan selama periode tersebut. Kebijakan ini bertujuan menjaga kestabilan moneter sekaligus mendukung kelancaran transisi ekonomi di Papua.³ Keputusan ini secara resmi diundangkan di Jakarta pada 20 April 1963 oleh Moch. Ichsan selaku Sekretaris Negara, dan mulai berlaku efektif sejak 1 Mei 1963.⁴

Selanjutnya, M. Djoena Koesoemahardja, selaku Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri, bersama Khouw Bian Tie yang mewakili Gubernur dan Direktur Bank Indonesia, mengeluarkan surat keputusan khusus yang mengatur secara tegas peredaran Rupiah Irian Barat. Dalam surat keputusan tersebut ditegaskan bahwa mata uang Rupiah nasional yang berlaku di wilayah lain di Indonesia tidak diizinkan untuk digunakan di Papua. Demikian pula sebaliknya, IBRp. hanya berlaku secara eksklusif di wilayah Papua dan dinyatakan tidak sah apabila digunakan atau dibawa keluar menuju wilayah Indonesia lainnya.⁵

Tepat pada 1 Mei 1963, bersamaan dengan euforia perayaan “kembalinya” Papua ke pangkuan Indonesia, Rupiah Irian Barat pun resmi diberlakukan sebagai mata uang yang sah di wilayah tersebut. Sebelumnya, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan, Notohamiprodjo, bersama Menteri Urusan Bank Sentral, Soemarno, telah menerbitkan Surat Edaran yang mengatur peredaran uang logam dan uang kertas Belanda di Papua. Kebijakan ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 40) serta disesuaikan dengan peraturan yang

- 3 “Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia, No. 7/63/KEP/MUBS/, Djakarta, 23 April 1963.
- 4 “Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1963 tentang Satuan Uang Rupiah yang Khusus Berlaku untuk Daerah Propinsi Irian Barat,” *Bundel Arsip Irian Barat Bank Indonesia Tahun 1963*, DPFL/SKA-DPLF/ROP/47/2/0875
- 5 “Surat Keputusan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri/Gubernur dan Direktur Bank Indonesia,” *Bundel Arsip Irian Barat Bank Indonesia Tahun 1963*, l.B. No. 4.

tercantum dalam Peraturan Presiden. Langkah ini memastikan bahwa transisi moneter berlangsung dengan tertib dan selaras dengan kebijakan ekonomi nasional.

Sejalan dengan penerapan kebijakan moneter baru, mulai 1 Juni 1963, seluruh uang logam Belanda yang sebelumnya beredar di Irian Barat resmi ditarik dari peredaran. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 4 dari *Wet Geldregeling Nederlands-Nieuw Guinea* (Undang-Undang Pengaturan Keuangan Nugini Belanda), yang kemudian mengalami perubahan dalam *Wet van 15 December 1955* (Undang-Undang tanggal 15 Desember 1955). Aturan serupa juga berlaku untuk uang kertas Belanda, sebagaimana yang diatur dalam bagian *ten vierde* (keempat) dari *Beschikking intrekking, omwisseling en uitgifte muntbiljetten Nederlands Nieuw-Guinea* (Peraturan tentang Penarikan, Penukaran, dan Penerbitan Uang Kertas Nugini Belanda).⁶

Sebagai bagian dari kebijakan transisi moneter, seluruh uang logam dan uang kertas Pemerintah Belanda yang masih beredar sebelum penetapan Rupiah Irian Barat diwajibkan untuk ditarik dari peredaran dalam kurun waktu maksimal tujuh bulan setelah peraturan ini disahkan. Penarikan ini dilakukan melalui mekanisme penukaran dengan Rupiah Irian Barat, sesuai dengan nilai tukar yang telah ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral. Selain itu, terhitung sejak 1 Mei 1963, seluruh Kantor Cabang Bank Indonesia di Papua dilarang mengeluarkan mata uang gulden (NNG.) dari kas mereka.

Adapun jenis uang kertas dan logam “Nederlands Nieuw-Guinea Gulden” (NNG) yang ditarik adalah sebagai berikut:

1. Uang kertas Nederlands Nieuw-Guinea Gulden pecahan f. 500, f. 100, f. 25, f. 10, f. 5, f. 2,50, dan f. 1, yang memuat gambar Ratu Juliana.

6 “Keputusan Bersama Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan, dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral,” *Bundel Arsip Irian Barat Bank Indonesia Tahun 1963*, No. BPN I.3.1.9.



Gambar 5.1. Pecahan 5 (lima) Nieuw-Guinea Gulden dengan ilustrasi Ratu Juliana di sebelah kiri dan burung cenderawasih di kanan. Pecahan ini dikeluarkan pada 2 Januari 1950, dicetak oleh *Joh. Enschedé en Zonen* di Haarlem (Belanda) dan dianggap sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Nieuw-Guinea Nederlands (*wettig betaalmiddel*).

Sumber: UnO, *Oeang Noesantara*, (Bandung: Genera Publishing, 2015).



Gambar 5.2. Pecahan 1 (satu) Nederlands Nieuw-Guinea Gulden (NNG) dengan ilustrasi Ratu Juliana, ukiran khas Papua, dan salah satu jenis cenderawasih. Pecahan ini dikeluarkan pada 8 Desember 1954, ditandatangani oleh Willem Jan Arend Kernkamp (Menteri Urusan Seberang Laut), dan kelak menjadi salah satu yang ditarik pasca diperkenalkannya Rupiah Irian Barat (IBRp.).

Sumber: Koleksi Oeang Noesantara - OeN

2. Uang logam Nederlands Nieuw-Guinea Gulden pecahan 25 sen, 10 sen, dan 1 sen, yang memuat gambar Ratu Wilhelmina/Ratu Juliana.

Sebagai catatan, ketentuan ini berlaku pula untuk uang kertas NNG. dari Emisi 1950 yang sebenarnya telah ditarik dari peredaran, namun besar kemungkinan masih beredar dalam masyarakat.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk menukarkan NNG. yang mereka miliki dalam periode yang ditetapkan, yaitu mulai 1 Juni hingga 30 November 1963. Setelah tenggat waktu tersebut, penukaran tidak lagi dapat dilakukan dan tidak akan ada kompensasi dalam bentuk apapun. Mengingat kondisi geografis Papua yang menantang dan dapat menghambat proses penukaran, pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran khusus di beberapa wilayah pedalaman. Di Papua, penukaran mata uang dapat dilakukan di tiga lokasi utama, yaitu:

1. Kas Kantor-Kantor Cabang Bank Indonesia
2. Kantor-Kantor Perbendaharaan/Kantor-Kantor Perbendaharaan Pembantu
3. Kas-Kas Kepala Pemerintah Setempat (sebelumnya bernama H.P.B atau *Districtkassen*)

Dengan demikian, terhitung sejak 1 Mei 1963 di Papua berlaku tiga jenis alat pembayaran yang sah, yakni:

1. Uang kertas bank “Seri Presiden Sukarno” dalam pecahan 5 (lima) Rupiah, 10 (sepuluh) Rupiah, dan 100 (seratus) Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia khusus untuk provinsi Irian Barat, sesuai dengan pengumuman Gubernur dan Direktur-direktur Bank Indonesia tanggal 30 April 1963.
2. Uang kertas pemerintah “Seri Presiden Sukarno” yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan khusus untuk wilayah Irian Barat. Adapun uang logam yang dikeluarkan adalah pecahan 1 (satu) Rupiah, 2,5 (dua setengah) Rupiah, 5 (lima) Rupiah, 10 (sepuluh)

- Rupiah, dan 100 (seratus) Rupiah.
3. Uang logam “Seri Presiden Sukarno” yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan khusus untuk wilayah Irian Barat. Adapun uang logam yang dikeluarkan adalah pecahan 1 (satu) sen, 5 (lima) sen, 10 (sepuluh) sen, 25 (duapuluh lima) sen, dan 50 (limapuluh sen).

Fakta di atas menarik, karena berbeda dengan wilayah Republik Indonesia lainnya, di Papua, peredaran ketiga jenis uang di atas diselenggarakan sepenuhnya oleh BI. Dalam hal ini, KCBI di Papua juga diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penyediaan uang bagi Kantor-kantor Perbendaharaan dan Pembantu, serta melaksanakan tugas-tugas kas untuk pemerintahan Provinsi Papua. Langkah ini dianggap penting sebagai bagian dari pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Belanja Provinsi Papua guna memastikan stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan di wilayah tersebut.⁷

Selain itu, momen tersebut tercatat sebagai peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya pengiriman Rupiah Irian Barat dilakukan secara langsung dari Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta ke masing-masing kantor cabang di Papua. Namun, kebijakan ini bersifat sementara. Di masa mendatang, pengiriman tambahan uang kas dilakukan sepenuhnya melalui KCBI Jayapura, yang telah ditetapkan sebagai Kantor Cabang Induk di Papua. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam distribusi keuangan di wilayah tersebut.⁸

Selain menerbitkan uang kertas, dalam upaya memastikan kelancaran sistem pembayaran di Papua, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan uang logam dengan desain yang mencerminkan

7 “Pengedaran Uang di Irian Barat Mulai 1 Mei 1963,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 11/1, Djakarta, 10 April 1963.

8 “Pengedaran Uang di Irian Barat Mulai 1 Mei 1963,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 11/1, Djakarta, 10 April 1963.



Gambar 5.3. Uang logam Rupiah Irian Barat dengan nominal 1 (satu) sen.

Sumber: Koleksi Oeang Noesantara - OeN

Tabel 5.1. Karakteristik uang logam IBRp. khusus untuk Provinsi Papua

Berat, Tebal, dan Garis Tengah Uang Logam yang Dikeluarkan Khusus untuk Wilayah Provinsi Papua

Nominal	1 sen	5 sen	10 sen	25 sen	50 sen
Berat (gram)	0,822	1,272	1,753	2,320	3,00
Tebal (mm)	1,2	1,38	1,50	1,63	1,90
Garis tengah (mm)	18,00	21,00	23,50	26,00	29,15

Sumber: "Tjiri-Tjiri Uang Logam yang Dikeluarkan Khusus untuk Daerah Propinsi Irian Barat," *Bundel Arsip Irian Barat Koleksi Bank Indonesia Tahun 1963, DPFL/SKA-DPLF/ROP/47/2/0875.*

identitas nasional. Uang logam ini tersedia dalam lima nominal, yakni 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, dan 50 sen. Pada bagian muka, uang logam ini menampilkan potret Presiden Sukarno sebagai simbol kepemimpinan nasional, disertai dengan tulisan "Presiden Republik Indonesia Sukarno" serta dua bintang segi lima dalam lingkaran yang melambangkan nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, bagian belakang uang logam menampilkan ilustrasi padi dan

kapas—simbol kemakmuran dan kesejahteraan—bersama dengan nominal mata uang. Dari segi desain, uang logam dengan pecahan 1 hingga 25 sen memiliki pinggiran polos, sedangkan nominal 50 sen memiliki pinggiran bergerigi sebagai penanda nilai yang lebih tinggi.⁹

B. Karakteristik Spesimen Uang Kertas Rupiah Irian Barat

Sebagai bagian dari kebijakan moneter yang dirancang untuk memperkuat integrasi Papua ke dalam sistem ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas khusus yang berlaku di wilayah ini. Uang kertas Rupiah Irian Barat dicetak oleh Pertjetakan Kebajoran (sekarang Perum Peruri) dan diterbitkan dalam pecahan 1 (satu) Rupiah, 2,5 (dua setengah) Rupiah, 5 (lima) Rupiah, 10 (sepuluh) Rupiah, dan 100 (seratus) Rupiah.

Menariknya, desain pecahan tersebut memiliki kemiripan dengan Rupiah Kepulauan Riau (K.R. Rp.), yang secara resmi diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia pada 15 Oktober 1963 untuk menggantikan Malaya dan British Borneo Dollar. Hal ini disebabkan karena Riau, meskipun secara geopolitik merupakan bagian dari Republik Indonesia, namun secara ekonomi wilayah ini masih berada dalam bayang-bayang pengaruh British Malaya. Pengenalan Rupiah Kepulauan Riau pun menjadi langkah penting dalam mengukuhkan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi permulaan konfrontasi dengan Malaya.¹⁰

9 “Pengedaran Uang di Irian Barat Mulai 1 Mei 1963,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 11/3, Djakarta, 12 Juni 1963.

10 Kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1963 yang menetapkan penggunaan satuan Rupiah khusus untuk Kepulauan Riau (K.R. Rp.) sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah tersebut. Nilai tukarnya ditetapkan sebesar US\$ 1 = K.R. Rp 3,06, sementara nilai tukar antara K.R. Rupiah dan Rupiah Indonesia (kecuali di Irian Barat) adalah K.R. Rp 1 = Rp 14,70. Dolar Malaya, yang masih beredar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44/1952, secara bertahap akan ditarik dari peredaran dan digantikan dengan K.R. Rupiah.



Gambar 5.4. Pecahan 1 (satu) Rupiah Uang Kepulauan Riau.

Sumber: Koleksi Oeang Noesantara - OeN



Gambar 5.5. Pecahan 2½ Rupiah Kepulauan Riau.

Sumber: Koleksi Oeang Noesantara - OeN

Mata uang K.R. Rp. diterbitkan dalam dua bentuk, yaitu koin dengan pecahan 1, 5, 10, 25, dan 50 sen, serta uang kertas dengan pecahan 1, 2,5, 5, 10, dan 100 Rupiah. Nilai tukarnya ditetapkan

Lihat *Bank Indonesia: Report for the Year 1960-1965*. (Jakarta: Pertjetakan Gita Karya, 1966), hlm. 338-39 & 343.

sebesar 1 Rupiah Riau = 14,7 Rupiah Indonesia. Terhitung sejak 1 November 1963, Dolar Malaya pun secara resmi dinyatakan tidak lagi berlaku di wilayah Riau dan digantikan sepenuhnya oleh Rupiah Riau. Berbeda dengan IBRp., yang hanya berlaku di wilayah Papua, Rupiah Kepulauan Riau memiliki keunikan karena dapat digunakan sebagai mata uang asing di wilayah lain Indonesia.¹¹

Kembali ke pembahasan mengenai Rupiah Irian Barat, mata uang ini memiliki kemiripan dalam desain dengan Rupiah Indonesia pada umumnya, terutama pada tampilan depan yang menampilkan gambar Presiden Sukarno sebagai elemen utama. Namun, perbedaan utama terletak pada warna dan desain tampilan belakangnya, yang memberikan identitas khusus bagi Rupiah Irian Barat.

Untuk pecahan 1 (satu) Rupiah dan 2½ (dua setengah) Rupiah Irian Barat misalnya, memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

1. Gambar utama di bagian depan merupakan wajah Presiden Sukarno yang terletak di sisi kiri. Di bagian belakang tampak sekumpulan pohon tebu sebagai flora yang begitu lazim ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia.
2. Di bagian tengah terdapat kata-kata “Republik Indonesia,” nominal uang kertas dalam huruf, tanda tangan Menteri Keuangan, dan tanda tahun “1961.”
3. Di bagian bawah sebelah kanan terdapat tulisan “Irian Barat.”
4. Di bagian kanan tampak gambar roset yang dilukis dengan garis geometris putih dengan lukisan pohon lontar/siwalan (*Borassus flabellifer*) di atasnya. Bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berasal dari Indonesia Timur, pohon lontar dipandang sebagai pohon kehidupan.

11 Namun masa berlaku K.R. Rp. ini tidak berlangsung lama. Sejak 1 Juli 1964, pemerintah Indonesia secara resmi menghentikan penggunaan Rupiah Kepulauan Riau dan menggantinya sepenuhnya dengan Rupiah Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Aturan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1964.

5. Di pojok kiri atas terdapat nominal angkat berwarna putih dan berbingkat roset yang terlukis dengan garis-garis geometris.
6. Di bagian latar belakang lainnya terdapat lukisan pahatan batu dari Candi Borobudur dan lukisan pahatan batu lainnya yang halus.
7. Kertas dari uang kertas ini mengandung minuterling (penanda serat-serat halus yang berwarna hijau dan coklat

Sementara itu, untuk ilustrasi di bagian belakang terdapat gambar seorang penari wayang orang dari Jawa yang terletak di bagian kanan. Sementara di sisi tengah terdapat nominal uang dalam angka yang digambar dalam suatu lingkaran dan tidak berwarna.

Selain ciri-ciri umum di atas, kedua pecahan ini juga memiliki beberapa ciri khusus yang bisa didedah sebagai berikut:

a) Pecahan 1 (satu) Rupiah

1. Berukuran 61 x 122 mm.
2. Bagian depan dan belakang memiliki warna utama merah dan warna hijau-kuning sebagai latar belakang, juga warna hijau untuk kata "Irian Barat" di bagian depan.
3. Gambar utama di bagian belakang adalah seorang penari wayang orang dari Jawa yang memainkan peran sebagai "Srikandi" di bagian kanan dan suatu lukisan pahatan batu dari pintu gerbang Candi Sari di bagian kiri.
4. Ketentuan-ketentuan hukum pidana terletak di bagian pinggir bawah dalam satu baris yang terdiri dari huruf-huruf yang sama besarnya.
5. Angka 1 (satu) yang berwarna putih terdapat di pojok kiri dan kanan atas. Nomor dan huruf seri yang berwarna merah ditempatkan di belakang, dicetak dua kali, dan letaknya sebaris: di sebelah kiri atas dan kanan bawah. Selain itu ia juga terdiri atas tiga huruf yang dimulai dengan huruf "IB" dan diikuti dengan enam angka.



Gambar 5.6. Tampak Depan dan belakang dari pecahan 1 Rupiah Irian Barat

Sumber: Koleksi Oeang Noesantara - OeN

b. Pecahan $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) Rupiah

1. Bagian depan dan belakang memiliki warna dominan ungu dan jingga sebagai latar belakang. Kata “Irian Barat” dicetak dalam warna hitam.
2. Gambar utama di bagian belakang adalah seorang penari wayang orang dari Jawa yang tengah memainkan peran “Larasati.”
3. Di bagian pinggir sebelah kiri terdapat roset dalam garis-



Gambar 5.7. Tampak depan dan belakang dari pecahan 2½ Rupiah Irian Barat.

Sumber: Koleksi Oeang Noesantara - OeN

- garis putih dengan nominal yang dilingkari oleh lukisan pahatan kayu. Di pojok kiri atas terdapat juga lukisan pahatan batu dari Candi Prambanan.
4. Ketentuan hukum pidana terletak di bagian pinggir bawah dalam satu baris dan terdiri dari huruf-huruf yang sama besarnya.
 5. Angka 2,5 berwarna putih terdapat di pojok kiri bawah dan pojok kanan atas.

6. Nomor dan huruf-huruf seri yang berwarna merah berada di bagian belakang, dicetak dua kali dan letaknya sebaris: di sebelah kiri atas dan kanan bawah. Selain itu ia juga terdiri atas tiga huruf yang dimulai dengan huruf “IB” dan diikuti dengan enam angka.

Selain itu, uang Irian Barat seri Presiden Sukarno ini juga dikeluarkan dalam pecahan 5 (lima) Rupiah, 10 (sepuluh) Rupiah, dan 100 (seratus) Rupiah. Adapun ciri-ciri utama dari ketiga pecahan ini, di antaranya:

1. Memiliki gambar utama Presiden Sukarno di bagian depan, yang terletak di bagian kiri dengan latar belakang sekumpulan pohon tebu.
2. Untuk ilustrasi bagian belakang merupakan gambar penari dari berbagai daerah.
3. Memiliki tanda air Presiden Sukarno yang terletak di bagian kanan.
4. Di bagian kanan dekat pinggiran, terdapat seutas benang keamanan di dalam kertasnya yang dapat dilihat dan terasa jika diraba.
5. Di bagian tengah, tampak gambar Garuda sebagai lambang negara, sementara di bawahnya tertulis kata “Irian Barat.”
6. Di bagian tengah atas juga terdapat kata “Bank Indonesia” berwarna putih, serta nominal dalam huruf yang terletak di bagian kanan bawah.
7. Tanda tahun 1960 terletak di bagian kanan atas. Sedangkan tanda tangan Gubernur Bank Indonesia (Soerjadi) dan Direktur Bank Indonesia (Hertijanto) berada di bagian tengah agak ke bawah.
8. Pecahan ini memiliki latar belakang lukisan dari pahatan batu Candi Borobudur dan lukisan pahatan batu lainnya yang halus.



Gambar 5.8. Tampak depan dan belakang dari pecahan 5 Rupiah Irian Barat.

Sumber: Koleksi Oeang Noesantara - OeN

Ketiga pecahan uang ini juga memiliki beberapa ciri khusus yang bisa dijabarkan sebagai berikut:

a) Pecahan 5 (lima) Rupiah:

1. Berukuran 67 x 134 mm
2. Di bagian depan didominasi oleh warna abu-abu tua dengan warna latar belakang hijau, kuning, dan ungu. Gambar Garuda sebagai lambang negara dan kata “Irian Barat” dicetak dengan warna merah muda.

3. Bagian belakang didominasi oleh warna abu-abu tua dengan warna latar belakang hijau, kuning, dan ungu. Ilustrasi utama di bagian belakang adalah gambar seorang penari perempuan dari Bagi yang terletak di sisi kanan. Sementara di bagian kiri terdapat lukisan pahatan batu yang terinspirasi dari pintu gerbang Candi Sari.
 4. Ketentuan hukum pidana terletak di pinggiran bawah dalam satu baris yang terdiri dari huruf yang sama besarnya.
 5. Nama dan huruf seri yang berwarna merah ditempatkan pula di bagian belakang, dicetak dua kali sebaris di bagian kiri atas dan kanan bawah, dan terdiri dari tiga huruf yang dimulai dengan huruf "IB" dan enam angka.
- b) Pecahan 10 (sepuluh) Rupiah
1. Berukuran 70 x 140 mm
 2. Di bagian depan didominasi oleh warna utama merah muda dengan warna latar belakang ungu, kuning, dan hijau. Gambar Garuda dan kata "Irian Barat" dicetak dengan warna hijau.
 3. Di bagian belakang didominasi oleh warna utama merah muda dengan warna latar belakang hijau dan ungu. Ilustrasi utama di bagian belakang adalah dua orang penari Legong dari Bali yang terletak di sisi kanan.
 4. Di bagian pinggiran kiri terdapat roset dalam garis-garis putih dengan nominal angka yang dilingkari oleh lukisan pahat. Sementara di pojok kiri tampak lukisan pahatan batu yang terinspirasi dari Candi Prambanan.
 5. Ketentuan hukum pidana terletak di pinggiran bawah dalam satu baris yang terdiri dari huruf-huruf yang sama besarnya.
 6. Di pojok kiri bawah dan pojok kanan atas terdapat angka 10 berwarna putih. Sementara di bagian pinggiran tengah



Gambar 5.9. Tampak depan dan belakang dari pecahan 10 Rupiah Irian Barat.

Sumber: Koleksi Oeang Noesantara - OeN

atas tertulis kata “sepuluh” dalam warna merah jambu.

7. Nomor dan huruf seri yang berwarna merah juga terletak di sisi belakang, dicetak dua kali sebaris di bagian kiri atas dan kanan bawah, dan terdiri dari tiga huruf yang dimulai dengan huruf “IB” dan enam angka.

c) Pecahan 100 (seratus) Rupiah

1. Berukuran 79 x 158 mm.



Gambar 5.10. Tampak depan dan belakang dari pecahan 100 Rupiah Irian Barat.

Sumber: Koleksi Oeang Noesantara - OeN

2. Bagian depan didominasi oleh warna utama hijau dan abu-abu dengan warna latar belakang jingga dan ungu. Untuk kata “Irian Barat” dicetak dalam warna jingga.
3. Bagian belakang didominasi oleh warna utama merah, ungu, dan jingga dengan warna latar belakang kuning, biru, dan hijau muda. Ilustrasi utama di bagian belakang adalah seorang perempuan dan laki-laki Minangkabau yang terletak di sisi kanan, beserta latar belakang

bangunan tempat korban. Di bagian pojok kiri atas terdapat ilustrasi kepala naga dari sebuah tiang upacara. Sementara di bagian pinggiran sebelah kiri dan bawah tampak motif batik Jawa kuno.

4. Ketentuan hukum pidana terletak di pinggiran bawah, tercetak dalam satu baris, dengan warna abu-abu kebiruan.
5. Angka “100” terdapat di pinggiran kanan atas dengan warna jingga, sedangkan kata “seratus rupiah” tercetak dalam satu baris di bagian kiri bawah dengan warna abu-abu kebiruan.
6. Nomor dan huruf seri yang berwarna merah juga terletak di sisi belakang, dicetak dua kali sebaris di bagian kiri atas dan kanan bawah, dan terdiri dari tiga huruf yang dimulai dengan huruf “IB” dan enam angka.

Terhitung sejak tanggal 19 April 1963, satuan uang seri Presiden Sukarno mulai didistribusikan ke seluruh kantor cabang yang tersebar di Papua, dengan besaran nominal sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.2. berikut:

Tabel 5.2. Besaran nominal distribusi uang seri Presiden Sukarno di Papua

Kantor Cabang	Jumlah (IBRp.)
Kotabaru	17.680.000
Biak	4.964.000
Sorong	2.964.000
Manokwari	2.964.000
Merauke	2.964.000
TOTAL	31.468.000

Sumber: “Pengedaran Uang,” Surat KB No. 11/1/UPU/PEKAS, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 15 Mei 1963.

Proses dislokasi uang sudah dilakukan sebelum tanggal 1 Mei 1963 ke seluruh kantor cabang, terkecuali untuk cabang Sorong yang baru dilakukan setelahnya karena kesukaran pengangkutan.¹² Bank Indonesia telah berupaya meminta bantuan UNTEA untuk memfasilitasi proses pengangkutan, yang pada awalnya telah disetujui. Namun, dua kali upaya pengangkutan gagal akibat tidak tersedianya pesawat. Pada percobaan ketiga, UNTEA menjanjikan pengiriman pesawat jenis 'Beaver' yang dijadwalkan pada 7 Mei 1963, tetapi sekali lagi pesawat tersebut tidak pernah datang. Akibat kegagalan transportasi udara, akhirnya diputuskan bahwa dislokasi di Sorong akan dilakukan melalui jalur laut, yang menyebabkan keterlambatan hingga satu minggu bagi cabang di wilayah tersebut.

Mengingat besarnya khazanah KCBI Kotabaru, pimpinan cabang M. Rifai sempat mengajukan permintaan penambahan kas. Namun, pada pengiriman tahap kedua, ia secara khusus meminta uang kertas dengan pecahan kecil, yaitu IBRp1, 2½, 5, dan 10. Rifai menekankan bahwa pecahan kecil lebih disukai dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam transaksi sehari-hari. Sementara itu, untuk persediaan uang logam, cabang Kotabaru masih memiliki simpanan sebesar IBRp175.680, yang diperkirakan cukup untuk setidaknya enam bulan ke depan.

Dalam rangka penarikan uang NNG (Nederlandse Nieuw-Guinea Gulden) yang secara resmi akan dimulai pada 1 Juni 1963, BI memutuskan untuk menggandeng Djawatan Pos sebagai satu-satunya lembaga resmi yang turut serta dalam proses ini. Langkah ini menandai kali pertama Djawatan Pos berpartisipasi dalam

12 Dalam sejarah ekonomi Indonesia, proses dislokasi mata uang sering kali terjadi sebagai bagian dari perubahan politik dan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah transisi kekuasaan dari masa kolonial ke pemerintahan Indonesia, di mana sistem moneter warisan kolonial mengalami perombakan besar. Proses ini tidak hanya melibatkan perubahan fisik uang yang beredar, tetapi juga mencakup penyesuaian nilai tukar, pengaturan ulang sistem keuangan, serta adaptasi ekonomi masyarakat terhadap mata uang baru.

proses penarikan mata uang di Indonesia.

Pada prinsipnya, Djawatan Pos menyetujui permintaan BI, namun mengajukan dua hal penting untuk diperhatikan. *Pertama*, kas di kantor-kantor pos pembantu di daerah sangat terbatas, sehingga diperkirakan tidak akan mampu menampung proses penukaran uang secara optimal. Oleh karena itu, Djawatan Pos meminta BI untuk menyediakan uang panjar (uang muka) yang besarnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan didistribusikan ke kantor pos pembantu yang memerlukannya. *Kedua*, Djawatan Pos memperkirakan bahwa proses penukaran uang ini akan meningkatkan beban kerja karyawan, termasuk kemungkinan harus bekerja lembur. Sebagai kompensasi, Djawatan Pos mengajukan permohonan agar para karyawan menerima uang premi sebesar setengah sen per 100 lembar uang yang ditukarkan.

Menurut laporan Dinas Keuangan, jumlah uang NNG yang masih beredar di Papua diperkirakan berkisar di angka NNG 27 juta. Dari jumlah tersebut, NNG 7 juta telah masuk ke dalam kas dan tidak lagi diedarkan, yang berarti masih ada sekitar NNG 20 juta yang masih beredar di masyarakat, dan sebagian besar dalam bentuk pecahan kecil.¹³

Untuk mempercepat proses penukaran, pimpinan cabang BI berkoordinasi dengan berbagai perusahaan dan toko guna membantu menerima penukaran mata uang dari masyarakat sebanyak mungkin. Namun, langkah ini bersifat sukarela, mengingat BI tidak dapat memberikan fasilitas tambahan, seperti uang panjar atau insentif lain bagi pihak yang bersedia membantu. Satu-satunya bentuk kompensasi yang dapat dijanjikan adalah pelayanan prioritas dalam proses penukaran atau penyetoran di kantor cabang BI.

Menjelang akhir Mei 1963, BI mulai mengintensifkan sosialisasi

13 "Surat Edaran Penarikan/Penukaran Uang Ngf. di Wilayah Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia, No. 11/4, Djakarta, 24 Djanuari 1964.

terkait dengan penarikan NNG. Seluruh perangkat komunikasi resmi pemerintah, termasuk radio, jawatan penerangan, dan surat kabar lokal, dikerahkan guna memastikan informasi ini tersebar luas ke masyarakat. Berbagai poster interaktif pun disebar di lokasi-lokasi strategis yang dilalui banyak orang, seperti pasar, sekolah, hingga gedung-gedung pemerintahan.

Sesuai dengan rencana awal, batas akhir penukaran NNG ditetapkan pada 30 November 1963. Namun, mempertimbangkan tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur komunikasi di Papua, serta berbagai kendala teknis lainnya, pemerintah pun memutuskan untuk memperpanjang masa penukaran hingga 29 Februari 1964. Barulah setelah tanggal tersebut, proses penukaran tidak lagi dilayani, kecuali bagi individu atau entitas yang memiliki alasan yang kuat dan dapat dibenarkan. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam mengakomodasi kondisi lapangan, sekaligus menegaskan keseriusan dalam menyelesaikan transisi moneter di wilayah Papua.¹⁴

Dalam rangka menstabilkan peredaran uang di Papua, Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat (Sek-KIB) mengerahkan seluruh tenaga dan sumber dayanya untuk memastikan transisi sistem keuangan berjalan lancar. Di daerah pesisir, sebagian besar penduduk dilaporkan sudah terbiasa menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran, meskipun distribusinya masih belum merata. Sebelum pengenalan uang kertas, masyarakat Papua secara tradisional menggunakan kulit kerang sebagai alat tukar dan pembayaran, sebuah praktik ekonomi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tradisi ini bahkan masih bertahan di beberapa wilayah pedalaman, meskipun Rupiah telah diperkenalkan sebagai mata uang resmi. Menyadari tantangan ini, Sek-KIB terus berupaya melakukan sosialisasi dan indoktrinasi

14 "Surat Edaran Penarikan/Penukaran Uang Ngf. di Wilayah Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia, No. 11/4, Djakarta, 24 Djanuari 1964.

mengenai penggunaan Rupiah, dengan tujuan memastikan penerimaan dan adopsinya secara luas di kalangan masyarakat Papua.¹⁵

Berdasarkan laporan kantor berita *Reuter*, penerimaan masyarakat terhadap Rupiah Irian Barat cukup baik meskipun di berbagai tempat masih menghadapi serangkaian penolakan. Sejumlah toko dan kantor dikabarkan masih enggan menerima mata uang ini lantaran sosialisasi yang tidak merata. Salah satu insiden terjadi ketika dua jurnalis asal Rusia mencoba membeli daging kaleng dengan mata uang IBRp., namun mereka diberitahu bahwa satu-satunya mata uang yang diterima adalah Gulden Nugini Belanda (NNG). Pada saat itu, NNG memang masih menjadi alat tukar utama di berbagai wilayah Papua, sehingga IBRp. belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat setempat.¹⁶

Sekalipun membutuhkan waktu cukup lama untuk proses penerapannya, strategi penggunaan Rupiah Irian Barat terbukti cukup efektif dalam mengendalikan harga di Papua. Meskipun Indonesia beberapa kali dilanda hiperinflasi, kondisi moneter di Papua dilaporkan relatif lebih stabil. Namun, stabilitas ini tidak sepenuhnya mengisolasi Papua dari dampak ekonomi nasional—penduduk tetap merasakan kenaikan harga akibat inflasi, terutama untuk barang kebutuhan pokok.

Faktor utama yang memperburuk situasi harga di Papua adalah keterbatasan pasokan barang serta perbedaan sistem harga dengan wilayah lain di Indonesia. Tingginya biaya transportasi dan ketergantungan terhadap impor membuat harga-harga di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.¹⁷ Seiring

15 “Penghapusan Karantina Moneter di Irian Barat Belum Bisa Dilaksanakan,” *Kompas*, 12 Januari 1966.

16 “Soekarno Morgen in Kota Baroe: Moeilijkheden met de West-Irian Roepia,” *Leeuwarder Courant*, 3 Mei 1963.

17 Sebagai bagian dari kebijakan perdagangan nasional, Menteri Perdagangan Republik Indonesia awalnya menetapkan 22 jenis barang yang memerlukan izin khusus untuk bisa diangkut ke Papua dari wilayah lain di Indonesia. Barang-

berjalannya waktu, Rupiah Irian Barat pun mulai menghadapi tekanan inflasi tinggi, terutama saat proses integrasinya ke dalam pasar uang dan komoditas Indonesia.

Mata uang ini mengalami beberapa kali devaluasi terhadap mata uang asing, dimulai pada 1965, kemudian berlanjut pada 1967 dan 1970. Penyesuaian nilai tukar ini dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan daya beli masyarakat, sekaligus menyesuaikan ekonomi Papua dengan kebijakan moneter nasional yang terus berubah. Namun, tantangan dalam distribusi barang serta kesenjangan ekonomi tetap menjadi faktor utama dalam stabilitas ekonomi Papua pasca integrasi.¹⁸

Untuk meredam inflasi yang terus meningkat serta penurunan standar hidup di kawasan perkotaan Papua, pemerintah pusat melaksanakan pengiriman darurat bahan makanan dan pasokan lainnya melalui udara pada akhir tahun 1966. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap memburuknya kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya stabilisasi ekonomi di Papua, berbagai komoditas pun dibebaskan dari kebijakan pengendalian harga yang sebelumnya diterapkan pada 1963. Upah minimum dan gaji pegawai negeri pun juga mengalami peningkatan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya beli masyarakat.¹⁹

Dengan diterapkannya berbagai kebijakan ini, pemerintah Indonesia pun berharap aktivitas ekonomi di Papua dapat kembali normal dan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap barang kebutuhan pokok. Namun, tantangan seperti biaya

barang yang masuk dalam daftar ini mencakup hasil bumi, seperti beras, gula, karet, teh, kopra, tembakau, dan kopi. Selain itu, terdapat juga hasil tambang, termasuk emas, perak, minyak bumi, timah, dan komoditas lainnya. Lihat "Barang-Barang yang Perlu Izin untuk Diangkut ke IB," *Merdeka*, 25 April 1963.

18 Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," hlm. 54.

19 Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," hlm. 54.

distribusi yang tinggi serta ketergantungan terhadap pasokan luar tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi kestabilan ekonomi wilayah ini.

C. Penerbitan Rupiah Baru Pasca Transisi

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Papua pasca transisi kekuasaan, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan karantina moneter dan politik di wilayah tersebut. Selama diberlakukannya karantina moneter, pemerintah sempat menerapkan kebijakan untuk tidak mengizinkan bank-bank lain beroperasi di Papua. Langkah ini diambil guna memastikan pengawasan ketat terhadap lalu lintas pembayaran dan untuk mencegah pemberian kredit yang berisiko dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi, seluruh kebutuhan perdagangan dan aktivitas ekonomi pada saat itu masih dapat sepenuhnya dilayani oleh Bank Indonesia.

Memasuki pertengahan 1960-an, karantina politik di Papua perlahan mulai dilonggarkan seiring dengan meningkatnya kontrol pemerintahan pusat. Namun, karantina moneter tetap diberlakukan hingga awal 1970-an, sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan sistem keuangan. Melalui penghapusan karantina moneter, pemerintah mengharapkan hanya akan ada satu sistem moneter yang berlaku di Papua, dengan Rupiah menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Pemerintah pusat sejatinya telah berulang kali mengupayakan penghapusan karantina moneter di Papua, dengan harapan proses integrasi ekonomi Papua dengan sistem nasional bisa berlangsung lebih cepat. Salah satu langkah konkret yang sempat dilakukan pada periode 1965-1966 adalah membentuk kepanitiaan khusus yang melibatkan seluruh unsur dari berbagai departemen terkait, termasuk keuangan, perbankan, devisa, serta Sek-KIB. Kepanitiaan ini diketuai oleh Prof. Dr. Jusuf Ismail dan bertugas untuk

mengumpulkan data serta bahan-bahan penting yang diperlukan pemerintah sebelum proses implementasi penuh Rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah di Papua.²⁰

Pada 13 Desember 1965, pemerintah pusat sempat mengeluarkan “Rupiah Baru” yang diklaim sebagai mata uang pemersatu yang sah digunakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Kebijakan ini didasarkan pada Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965. Namun terhitung tanggal 15 September 1966, jenis-jenis uang Rupiah seri “S” baru yang sempat dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan Penetapan Presiden No. 27/1965, ternyata harus ditunda berlakunya bagi provinsi Papua. Kebijakan ini diambil lantaran kondisi ekonomi dan moneter di Papua yang dianggap masih belum stabil. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut Rupiah Irian Barat pun masih menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di Papua.

Di tengah berbagai langkah stabilisasi ekonomi, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan moneter yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi di Papua. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah penetapan nilai tukar baru antara mata uang IBRp. dan Rupiah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 6 Agustus 1965, ditetapkan bahwa nilai perbandingan satuan IBRp. terhadap satuan uang Rupiah yang berlaku di wilayah Republik Indonesia lainnya adalah IBRp 1- = Rp500.²¹

Nilai ini terus mengalami perubahan seiring dengan hiperinflasi yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Hanya dalam tempo setahun saja (September 1965 – Oktober 1966), Rupiah Irian Barat telah mengalami tiga kali perubahan nilai. Fluktuasi nilai ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan ekonomi di tengah transisi kekuasaan Indonesia pasca peristiwa

20 “Panitia untuk Penghapusan Karantina Moneter Politik di Irian Barat,” *Kompas*, 5 Juli 1965.

21 “Nilai Rupiah Irbar,” *Sinar Harapan*, 13 Agustus 1965.

G30S/1965.

Menjelang akhir tahun 1965, pemerintah Indonesia sempat mengeluarkan kebijakan moneter berupa Penpres No. 26/27 Tahun 1965 yang salah satu poinnya adalah penyelarasan uang Rupiah baru dengan IBRp. Kebijakan ini pun dianggap berhasil “memberikan arah yang baik efeknya bagi perkembangan perekonomian di Irian Barat.” Kemudian pada 13 Desember 1965, terhitung sejak pukul 20.00 WIB, Presiden RI menetapkan keluarnya uang Rupiah baru dan menarik Rupiah lama. Nilai perbandingan antara kedua mata uang ini adalah Rp1 (baru) = Rp1.000 (lama), terkecuali untuk wilayah Papua.²²

Namun hingga awal Januari 1966, penghapusan karantina moneter di Papua ternyata masih belum bisa dilakukan. Penundaan pun terpaksa dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, serta memastikan kelancaran pembangunan di Papua. Pemerintah mempertimbangkan bahwa perubahan sistem mata uang yang terlalu cepat dapat berdampak negatif terhadap perekonomian lokal, terutama dalam hal daya beli masyarakat, harga komoditas, dan kesiapan infrastruktur keuangan di Papua. Dengan keputusan ini, Rupiah Irian Barat pun tetap menjadi satu-satunya mata uang resmi di wilayah tersebut.²³

Dalam sebuah dokumen rahasia yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI, D. Ashari, dan ditujukan kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera, Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan, Menteri Utama Bidang Politik dan Luar Negeri, serta Menteri Dalam Negeri, pemerintah menyampaikan penjelasan serta usulan terkait permasalahan ekonomi di Papua. Dalam surat bertanggal 24 Desember 1966 tersebut, ditegaskan bahwa kondisi ekonomi di Papua masih dalam keadaan memprihatinkan.

22 “Uang Rupiah Baru Keluar,” *Kompas*, 14 Desember 1965.

23 Penundaan ini diatur dalam Surat Keputusan No. 31/Ek/Kep/9/1966. Lihat “Uang Rp. Baru IRBAR Ditunda Masa Lakunja,” *Angkatan Bersendjata*, 23 September 1966.

Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang dianggap sebagai penyebab stagnasi ekonomi dan perdagangan di Papua, yang kemudian menjadi fokus utama pemerintah untuk segera ditangani, yaitu:²⁴

- Tidak ada atau macetnya *dropping* devisa yang diberikan oleh pemerintah pusat (cover devisa). Sebagaimana diketahui, ekonomi Papua adalah ekonomi impor;
- Pasokan barang dari wilayah Indonesia lainnya (Indonesianisasi *supply*) juga mengalami kemacetan yang semakin parah. Persoalan ini juga bisa dipecah lagi menjadi tiga sebab, yaitu:
 1. Adanya disparitas harga yang semakin tinggi antara harga pembelian (terutama di Jakarta) dengan harga penjualan di Papua. Hal ini disebabkan karena masih berlakunya peraturan pengendalian harga yang begitu ketat di Papua, di samping kuatnya arus inflasi di daerah-daerah Republik Indonesia lainnya.
 2. Kesulitan dalam hal pengangkutan, mulai dari jadwal pelayaran yang tidak tetap, tingginya tarif angkutan laut, hingga risiko kehilangan atau kerusakan barang selama perjalanan.
 3. Tidak adanya dorongan bagi pedagang antar pulau untuk mengirim barang ke Papua oleh karena disparitas harga yang tinggi (rugi), kekosongan barang-barang impor di Papua, hingga larangan pengiriman antar pulau untuk beberapa hasil alam Papua, seperti damar, rotan, kulit buaya, dan lain sebagainya.
- Penyedotan barang-barang impor yang ada di Papua untuk dibawa atau dikirim ke wilayah RI lainnya.

Setelah pembubaran Sekretariat Koordinator Urusan Irian

24 "Masalah Ekonomi di Irian Barat," *Arsip Meneg Ekuin Tahun 1967-1973*, No. 1632, 24 Desember 1966.

Barat (Sek-KIB), seluruh urusan administrasi dan pengelolaan Papua secara resmi dialihkan kepada Biro Irian Barat, yang berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Di bawah koordinasi biro ini, pemerintah mulai mengintensifkan pengiriman barang-barang konsumsi, seperti beras, gula, garam, sabun, dan kebutuhan pokok lainnya, guna memperkecil disparitas harga yang masih tinggi di Papua dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Selain itu, Departemen Keuangan secara rutin menyalurkan subsidi dalam bentuk uang, dengan mekanisme distribusi yang dikoordinasikan oleh Biro Irian Barat.²⁵

Selain itu, pemerintah pusat juga menyediakan devisa sebesar Rp6 juta per kuartal untuk mendukung kebutuhan pasokan di Papua. PT. Berdikari turut berperan dalam memasok bahan-bahan pokok dengan memanfaatkan kredit pasokan (*supply credit*) yang diperoleh dari sebuah perusahaan swasta di Australia senilai US\$ 2 juta. Selain PT Berdikari, pemerintah juga menunjuk dua perusahaan swasta nasional sebagai pemasok kebutuhan di Papua, yaitu CV Muara Madju dan CV Berkat, untuk menjamin ketersediaan barang pokok di Papua.²⁶

Sebagai upaya lanjutan, Menteri Perdagangan Indonesia mengusulkan pembentukan sebuah instansi khusus yang bersifat interdepartemental, dengan melibatkan unsur-unsur dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, dan Komando Logistik Nasional (Kolognas). Kemudian terkait dengan karantina moneter, pemerintah menyimpulkan bahwa kebijakan ini masih perlu dilanjutkan. Berbagai upaya untuk mengakhiri karantina moneter (dekarantinisasi) tetap dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan faktor politik dan psikologis yang ada.

Untuk mendukung proses Indonesianisasi *supply*, Menteri Perdagangan juga mengusulkan agar ditetapkan aturan

25 "Subsidi untuk Irbat," *Kompas*, 13 Mei 1966.

26 "Supply untuk Irian Barat Rp. 6 Djuta per Kwartal," *Kompas*, 17 Mei 1967.

atau ketentuan baru yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan situasi kala itu. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sambil tetap mendukung integrasi ekonomi Papua ke dalam kerangka perekonomian nasional. Beberapa strategi tersebut di antaranya:

1. Penetapan kurs baru antara IBRp. dengan Rupiah yang sebelumnya 1:1 menjadi 1:5.
2. Pengendalian harga di Papua harus diupayakan lebih keras. Selain itu, perlu juga dilakukan penggolongan jenis-jenis barang, seperti:
 - Barang Golongan A, yang merupakan barang kebutuhan primer, seperti beras, gula, garam, minyak goreng, dan lain-lain. Untuk barang ini perlu ditetapkan harganya.
 - Barang Golongan B, yang merupakan barang kebutuhan sekunder, seperti teh, kopi, dan lain sebagainya. Harga barang ini ditetapkan atas dasar kalkulasi yang telah disesuaikan dengan harga pembelian dan juga ongkos-ongkos.
 - Barang Golongan C, yang adalah barang-barang lainnya, seperti alat-alat kecantikan, mainan anak, dan sebagainya. Khusus untuk barang ini harganya dibebaskan dan tidak perlu diawasi.

Usulan lain yang tidak kalah penting adalah menghilangkan sifat Jakarta-sentris, salah satunya dengan membuka perdagangan antarpulau dari luar Papua ke wilayah Papua. Selain itu, subsidi yang telah berjalan perlu dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan agar lebih efektif. Terakhir, guna merangsang aktivitas perdagangan antarpulau sekaligus meningkatkan intensitas pelayaran nasional, muncul usulan agar pemerintah daerah Irian Barat memberikan izin untuk mengeksport hasil alam Papua ke wilayah lain di Indonesia. Strategi ini diharapkan dapat

Tabel 5.3. Nilai Tukar Rupiah Irian Barat terhadap Rupiah dan Dolar Amerika (1963 – 1971)

Periode	Dolar Amerika (US\$) ke Rupiah Irian Barat (IBRp.)	Rupiah Irian Barat (IBRp.) ke Rupiah (Rp.)
1963	3,62	62,25
1964	3,62	142,0
28 September 1965	3,62	500,0
13 Desember 1965	10,0	1000,0
30 Oktober 1966	10,0	2,76
3 April 1967	10,0	10,0
17 April 1970	20,0	18,9
23 Agustus 1971	21,96	18,9

Sumber: Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 8:3, hlm. 53.

mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.²⁷

Lantaran kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang terus-menerus tidak stabil, Rupiah Irian Barat pun berulang kali mengalami fluktuasi pasca tahun 1966. Bila merujuk Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1967, terhitung sejak 3 April 1967, nilai tukar IBRp. ditetapkan sebesar US\$ 1 = IBRp10 dan IBRp1 = Rp 10. Penetapan kurs ini mengacu pada kurs *Bill of Exchange* (BE) yang berlaku saat itu, yaitu 85, yang kemudian dibulatkan menjadi 100. Namun, sejak penetapan tersebut hingga menjelang akhir tahun 1969, tidak ada penyesuaian nilai tukar yang dilakukan, yang pada akhirnya merugikan perekonomian di Papua.

Perkembangan kurs BE di Jakarta menyebabkan pembukaan impor di Papua harus dibayar dengan IBRp32,60 per US\$ 1. Akibatnya, harga barang-barang impor tidak dapat disesuaikan

27 "Masalah Ekonomi di Irian Barat," *Arsip Meneg Ekuin Tahun 1967-1973*, No. 1632, 24 Desember 1966.

Tabel 5.4. Nilai Tukar Mata Uang Eropa dan Amerika terhadap Rupiah Irian Barat (IBRp.) (per 31 Maret 1964)

Mata Uang	Nilai terhadap IBRp.
Pound Sterling (Stg.£.)	10,14
Dolar Amerika Serikat (US \$)	3,62
Gulden Belanda (Ned.Gld.)	1
Deutsche Mark (D.M.)	0,91
Franc Swiss (Sw.fr.)	0,83
Franc Perancis (Fr.fr.)	0,73
Franc Belgia (100 B.fr.)	7,24
Krona Denmark (D.Cr.)	0,52
Krona Swedia (Sw.Cr.)	0,70
Krona Norwegia (N.Cr.)	0,51
Escudo Portugis (100 Escudo)	12,59
Lira Italia (100 Lire)	0,58
Schilling Austria (100 Austrian Schilling)	13,92

Sumber: “Kurs2 jang Dipergunakan untuk Penutupan Buku pada Tanggal 31 Maret 1964,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 11 Maret 1964.

dengan kurs resmi yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan ketimpangan harga. Rendahnya nilai tukar ini juga berdampak negatif pada ekspor Papua dan memperlemah daya beli masyarakat dengan pendapatan tetap (*fixed income earners*). Kenaikan harga barang yang dipengaruhi oleh kurs BE Jakarta jelas semakin membebani masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi di Papua.

Selain kebijakan nilai tukar, salah satu faktor yang memperburuk kondisi ekonomi di Papua adalah perbedaan signifikan dalam regulasi bea masuk dan pungutan impor dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Di sebagian besar

Tabel 5.5. Nilai Tukar Mata Uang Asia dan Pasifik terhadap Rupiah Irian Barat (IBRp.) (per 31 Maret 1964)

Mata Uang	Nilai terhadap IBRp.
Gulden Suriname/Antillen (Sur./Ant.Gld.)	1,92
Dolar Malaya (Mal.\$)	1,18
Won Korea (K.R.)	1,18
Dolar Hong Kong (Hkg.\$)	0,63
Kyat Burma (Burmese Kyat)	0,76
Pound Ceylon/Sri Lanka (Ceylon £)	0,76
Indian Rupee	0,76
Pakistan Rupee	0,76
Pound Australia (Australian £)	8,11
Pound Selandia Baru (N.Z. £)	10,06
Rand Afrika Selatan (Rand)	5,07
Dolar Kanada (Can.\$)	3,35

Sumber: "Kurs2 yang Dipergunakan untuk Penutupan Buku pada Tanggal 31 Maret 1964," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 11 Maret 1964.

wilayah Indonesia, bea masuk ditetapkan dalam rentang 0 hingga 300 persen, sedangkan di Papua batasannya jauh lebih rendah, yakni hanya 0 hingga 24 persen. Selain itu, Pungutan Impor Tambahan (PIT) yang berlaku secara nasional hanya diterapkan di Papua untuk barang-barang Golongan III, dengan tarif sebesar 25 persen.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong arus impor ke Papua, pada praktiknya, kebijakan ini justru memicu aliran barang-barang impor keluar dari Papua ke wilayah lain. Disparitas tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pasokan barang di Papua yang memengaruhi kestabilan harga, menurunkan daya beli masyarakat, dan menghambat daya saing ekonomi.

Tabel 5.6. Perbandingan Tarif Impor antara Papua dengan Wilayah Indonesia Lainnya (Per Oktober 1972)

Komoditas	Tarif Indonesia (%)	Tarif Papua (%)
Ayam	30	0
Ikan	20	9
Susu kental manis	75	75
Kopi dan teh	150	9
Gula	60	9
Minuman ringan berkarbonasi	210	0
Bir	210	0
Tembakau	20	9
Tekstil	sekitar 100	0 hingga 9
Baja	0 hingga 40	0 hingga 9
Mesin listrik	20 hingga 30	9
Mesin lainnya	0 hingga 75 (kebanyakan 20 atau 30)	0 hingga 9 (kebanyakan 9)
Semen	130	9
Kayu	60	9
Mobil sedan	200	75
Van pengiriman	30	9
Bus	60	9
Truk (rakitan)	60	9
Pesawat terbang	0	0

Sumber: Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," hlm. 64.

Hasil peninjauan anggota DPR-GR ke Papua pada Agustus 1969 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Papua tidak mampu mengimbangi kenaikan harga yang terjadi di wilayah tersebut. Meskipun pemerintah telah memberikan subsidi, harga yang dapat ditekan hanya terbatas pada sembilan bahan pokok, sementara

barang-barang lain tetap mengalami lonjakan harga yang sulit dijangkau oleh penduduk lokal. Selain itu, kebijakan impor barang ke Papua, yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, sering kali tidak tepat sasaran. Banyak barang impor justru dibeli kembali oleh pendatang dari luar Papua, sehingga manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat asli Papua.

Selain permasalahan ekonomi, kasus malnutrisi di Papua menjadi krisis serius yang dilaporkan memerlukan penanganan segera. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah kurangnya distribusi bahan makanan dan obat-obatan, yang sebagian besar masih bergantung pada impor dari luar negeri. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp 3,1 miliar untuk tahun anggaran 1969/70, ditambah dengan bantuan dari PBB melalui FUNDWI (*Fund of the United Nations for the Development of West Irian*).²⁸ Pendidikan di Papua pun menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus perbaikan. Namun, meskipun telah ada alokasi dana yang cukup besar, pengelolannya dinilai tidak efektif, sehingga dampak nyata terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat Papua masih sangat terbatas.

Kunjungan kerja anggota DPR-GR juga menyimpulkan bahwa penyebab utama tingginya harga barang di Papua adalah nilai tukar antara Rupiah Irian Barat dan Rupiah Indonesia yang terlalu rendah, yakni 1:10. Oleh sebab itu, muncul usulan agar permasalahan moneter di Papua mendapatkan prioritas

28 FUNDWI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan tugas utama mendukung pembangunan di Papua setelah wilayah tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia. Secara keseluruhan, tugas FUNDWI difokuskan pada percepatan pembangunan Papua dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat setempat, guna mengurangi ketimpangan pembangunan dengan daerah Indonesia lainnya. FUNDWI banyak berperan dalam memberikan dana dan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan, yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal.

penanganan, sehingga berbagai permasalahan krusial lainnya, seperti distribusi barang dan stabilitas harga, dapat diselesaikan secara bertahap.²⁹

Timpangnya nilai tukar valuta asing di Papua tidak hanya menyulitkan investor asing, tetapi juga para pejabat asing dari UNTEA. Mereka lebih memilih menukarkan Dolar Amerika Serikat (US\$) yang dimiliki di Jakarta, dan setelah mendapatkan izin dari Badan Lalu Lintas Devisa (BLLD), dana tersebut baru ditransfer ke Papua. Dengan strategi ini, mereka bisa memperoleh nilai tukar sebesar IBRp32,60 per US\$, sekalipun masih harus dikurangi biaya transaksi.

Metode serupa juga diduga diterapkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di Papua, seperti Freeport Sulphur Indonesia Inc. dan P.T. Pacific Nickel Indonesia. Strategi ini memang memungkinkan mereka memaksimalkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar, tetapi secara bersamaan memperburuk ketidakseimbangan moneter di wilayah tersebut, yang akhirnya turut memengaruhi perekonomian lokal.

Setelah menimbang berbagai persoalan yang dihadapi, Gubernur BI saat itu, Radius Prawiro, menekankan pentingnya percepatan integrasi ekonomi antara Papua dengan wilayah Indonesia lainnya. Integrasi ekonomi ini mencakup kesatuan mata uang, pengaturan perdagangan, sistem pembayaran, dan aspek-aspek lainnya. Sebagai langkah awal menuju penyatuan mata uang di seluruh Indonesia, diperlukan penyesuaian nilai tukar IBRp. terhadap US\$ dan Rp. agar mencapai tingkat yang wajar.

Penyesuaian ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan nilai tukar yang ada, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mencabut subsidi bahan-bahan pokok di Papua. Dengan cara demikian, penyatuan ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan pun dapat segera diwujudkan. Oleh karena itu, kurs baru

29 "Daja Beli Rakjat Irbar Tak Dapat Mengimbangi Harga-Harga," *Kompas*, 5 September 1969.

berdasarkan nilai *Bill of Exchange* (BE) di Jakarta perlu segera ditetapkan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan berikut:³⁰

1. Pada dasarnya, jumlah gaji dan upah dalam IBRp. tidak boleh berubah pada saat berlakunya kurs baru IBRp. terhadap valuta asing dan Rupiah yang berlaku di daerah Republik Indonesia lainnya, baik bagi mereka yang bekerja pada pemerintah maupun swasta.
2. Harga barang-barang impor harus disesuaikan dengan nilai baru IBRp. kecuali untuk harga barang-barang Golongan I, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 30/SK/IV/67 tanggal 13 April 1967, yang dalam kalkulasi memang masih memerlukan subsidi.
3. Tarif-tarif jasa seperti hotel, listrik, telepon, kawat, penerbangan, dan lain sebagainya, harus selekas mungkin dihitung kembali.
4. Belanja barang atau ongkos kantor dalam anggaran 1969/70 dari Papua juga perlu disesuaikan kembali dengan kurs baru.
5. Anggaran untuk pekerjaan-pekerjaan umum harus menyesuaikan kalkulasi kurs yang baru.
6. Mengadakan panitia setempat di bawah koordinasi Dinas Keuangan Irian Barat guna menentukan sejauh mana diperlukan suatu penilaian kembali (*herwaardering*) dari berbagai jenis hutang-piutang tertentu, termasuk juga simpanan/tabungan.
7. Tetap mengamankan pengadaan *supply* barang-barang yang termasuk dalam Golongan I.
8. Memperlakukan sistem Bonus Ekspor terhadap ekspor Papua dengan ketentuan:

30 "Pokok-pokok Tindakan Moneter Irian Barat yang Diusulkan oleh Gubernur Bank Sentral," *Arsip Meneg Ekuin Tahun 1967-1973*, No. 1632, 19 September 1969; Lihat juga "Tindakan-tindakan Moneter yang Perlu untuk Landasan Penjehtaan Keadaan Ekonomi dan Keuangan di Irian Barat sebagai Persiapan Penjatuan Mata Uang di Irian Barat dan Wilayah RI Lainnya," *Arsip Meneg Ekuin Tahun 1967-1973*, No. 1632, 1969.

- Penggolongan barang-barang ekspor keras dan lemah tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di Papua.
 - Export tax sebesar 5 persen yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah Irian Barat.
 - Alokasi Devisa Daerah Otomatis (ADO) sebanyak 10 persen dari hasil devisa ekspor berdasarkan harga FOB (*Freight on Board*) bersih diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten asal barang, dan/atau dari mana barang-barang ekspor tersebut dikapalkan ke luar negeri.
9. Menjamin kelancaran dan keteraturan hubungan laut dan udara, baik di Irian Barat maupun di wilayah RI lainnya.
 10. Tetap menjaga dipatuhinya karantina moneter dan ekonomi di Irian Barat.

Selanjutnya, kembali diusulkan penyesuaian kurs baru dengan nilai perbandingan US\$ 1 = IBRp18 dan IBRp1 = Rp18. Kebijakan kurs ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga dan menekan beban subsidi, sehingga memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi di Papua. Untuk memberikan gambaran mengenai dampak perubahan kurs ini terhadap harga barang dari berbagai golongan, berikut ilustrasinya:

1. Barang Golongan I (contoh: beras)

Jika harga beras di luar negeri adalah US\$ 130 per ton atau US\$ 0,13 per kilogram, dengan kurs baru IBRp18, harga pokok beras (di luar biaya angkutan) menjadi IBRp2,34 per kilogram. Jika beras tersebut dijual dengan harga IBRp2, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar IBRp0,34 per kilogram atau setara Rp6,12. Sebelum penyesuaian kurs, harga pokok beras mencapai IBRp4,238 per kilogram. Jika dijual seharga IBRp2, subsidi yang harus diberikan pemerintah adalah sebesar IBRp2,238 per kilogram.

2. Barang Golongan II (contoh: susu impor)

Jika harga susu kaleng di luar negeri adalah US\$ 0,20 per

kaleng, dengan kurs baru harga pokok susu menjadi IBRp3,60 per kaleng. Sebelumnya, dengan kurs yang berlaku, harga pokok susu mencapai IBRp6,52 per kaleng.

3. Barang Golongan III (contoh: arloji)

Jika harga impor arloji adalah US\$ 100, dengan menggunakan DP sebesar Rp400, harga pokok arloji dapat dihitung sebagai berikut:

- Dengan kurs baru: $\text{IBRp}(100 \times 400 \div 18) = \text{IBRp}2.222,22$.
- Dengan kurs sebelumnya: $\text{IBRp}(100 \times 40 \div 10) = \text{IBRp}4.000$.

Sebagai tambahan, Gubernur BI memberikan rincian perbandingan anggaran belanja Papua untuk periode 1969/70 dengan menggunakan kurs baru yang telah diterapkan, sebagaimana bisa dilihat dalam Tabel 5.7. berikut:

Tabel 5.7. Perbandingan Anggaran Belanja Irian Barat 1969/70 dengan Kurs Lama dan Baru

No.	Komponen	Kurs Lama (IBRp.)	Kurs Baru (IBRp.)
1	Gaji pegawai	160.224	105.150
2	Pengeluaran material	28.471	18.900
3	Biaya perjalanan	30.206	20.750
4	Biaya politik dan sosial	99.810	58.200
5	Subsidi untuk komunikasi via laut dan udara	39.880	22.000
6	Pekerjaan umum	100.786	78.000
7	Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)	52.924	30.000
	TOTAL	512.301	333.000
1	Operasi-operasi politik dan sosial	20.000	20.000
2	Subsidi untuk pasokan beras	170.000	30.000
3	Subsidi untuk bahan bakar	44.500	20.000
	TOTAL	746.801	403.000

Konversi ke dalam Rupiah	Rp7.468.010	Rp7.254.000
Direktorat Irian Barat dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa	Rp522.500	Rp522.500
TOTAL	Rp8.000.510	Rp7.776.500

Sumber: "Pokok-pokok Tindakan Moneter Irian Barat yang Diusulkan oleh Gubernur Bank Sentral," *Arsip Meneg Ekuin Tahun 1967-1973*, No. 1632, 19 September 1969.

Terhitung sejak 1 September 1969, Rupiah Irian Barat mulai dapat ditukar langsung dengan Rupiah nasional melalui Bank Ekspor-Impor Indonesia. Perluasan fasilitas penukaran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan aktivitas komersial dari kantor-kantor cabang BI di Papua. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari pengalihan aktivitas komersial kantor-kantor cabang BI di wilayah tersebut kepada Bank Ekspor-Impor Indonesia, guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan transaksi keuangan dan perdagangan.³¹

Penukaran dan transfer uang tersebut dikenakan "Sumbangan Wajib bagi Daerah Provinsi Irian Barat" sebesar lima persen dari jumlah uang IBRp., kecuali untuk transfer yang berkaitan dengan pembayaran transaksi perdagangan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Irian Barat No. 51/67 tanggal 17 Juli 1967. Selain sumbangan wajib tersebut, terdapat juga sumbangan tambahan yang dikenakan pada penukaran uang hingga jumlah tertentu, yang kemudian digunakan untuk pembayaran ke luar Provinsi Papua selama proses perjalanan. Sisa 95 persen dari jumlah uang yang ditukarkan kemudian dibayarkan sesuai kurs beli yang berlaku saat itu (IBRp1 = Rp9,80), setelah dikurangi provisi.³²

Dalam rangka mengontrol aliran dana yang masuk ke

31 "Rupiah I.B. Bisa Ditukarkan di Bank Exim," *Kompas*, 12 Januari 1970.

32 "Penukaran Uang Kertas IBRp.," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 2/110/UAO/OT, Djakarta, 2 Desember 1969. Lihat juga "Rupiah I.B. Bisa Ditukarkan di Bank Exim," *Kompas*, 12 Januari 1970.

Papua, setiap transfer dari wilayah Republik Indonesia lainnya yang masuk ke Papua untuk keperluan jasa, memerlukan izin dari Badan Lalu Lintas Devisa (BLLD). Pelaksanaan transfer ini dapat disalurkan melalui Bank Devisa yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Selain itu, pembawaan atau pemasukan Rupiah dari wilayah RI ke Papua juga harus mendapat izin dari BLLD, kecuali untuk jumlah yang tidak melebihi Rp500. Ketentuan ini diatur dalam Pengumuman BLLD No. 5/Imp/BLLD/86 tanggal 25 Juli 1966.

Kesempatan untuk menukar secara terbatas Rupiah Irian Barat ke dalam Rupiah nasional guna keperluan perjalanan ke wilayah RI lainnya disediakan oleh Bank Indonesia cabang Jayapura. Proses penukaran ini dapat dilakukan melalui kantor-kantor cabang Bank Ekspor-Import (Exim) di Papua, yang berlokasi di Biak, Manokwari, Sorong, dan Merauke. Adapun kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah kebutuhan perjalanan dan aktivitas jasa antarwilayah.³³

D. Proses Pengrupiahan Papua

Setelah bertahun-tahun berusaha melakukan integrasi ekonomi Papua ke dalam sistem ekonomi nasional, upaya Pemerintah Indonesia pada akhirnya menemui titik terang pada awal tahun 1970. Salah satu pencapaian penting dalam proses ini adalah pengenalan resmi mata uang Rupiah di Papua, yang sebenarnya telah dimulai sejak pertengahan 1960-an. Melalui proses pengrupiahan ini, mata uang lokal yang dikenal sebagai IBRp. secara bertahap ditarik dari peredaran dan digantikan oleh Rupiah nasional. Langkah strategis ini kemudian dikenal dengan sebutan "Pengrupiahan Irian Barat," yang bertujuan untuk menyatukan sistem moneter Papua dengan wilayah Republik Indonesia lainnya. Momen ini menjadi salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah perekonomian Indonesia, karena untuk pertama kalinya,

33 "Rupiah I.B. Bisa Ditukarkan di Bank Exim," *Kompas*, 12 Januari 1970.

seluruh wilayah Indonesia menggunakan satu mata uang yang sama sebagai alat transaksi resmi.

Sebagai langkah persiapan, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk meninjau ulang dan menetapkan kembali nilai tukar Rupiah Irian Barat terhadap Rupiah nasional serta valuta asing. Perbaikan ekonomi juga menjadi prioritas utama yang harus segera dilakukan dalam rangka mempersiapkan kesatuan moneter tersebut. Adapun detail terkait kebijakan ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 1970 tentang “Nilai Tukar Satuan Rupiah Irian Barat.”

Bank Ekspor-Impor Indonesia (Bank Exim) kemudian resmi ditunjuk sebagai penyalur utama dari Rupiah nasional tersebut. Dengan tanggung jawab ini, Bank Exim diminta untuk melakukan berbagai persiapan penting, mulai dari pengedaran uang, manajemen kredit, pengelolaan transaksi luar negeri, administrasi devisa, pembukuan, hingga tata kelola kepegawaian. Namun, karena kapasitas khazanah Bank Exim yang terbatas, muncul usulan agar pengiriman uang Rupiah dilakukan secara bertahap, guna menghindari tekanan likuiditas yang berlebihan dan memastikan transisi keuangan berjalan dengan lancar. Selain itu, mengingat masih sulitnya komunikasi antar daerah di Papua, termasuk di kota-kota utama seperti Merauke, Sorong, dan Manokwari, muncul usulan agar BI menetapkan jangka waktu yang cukup untuk pelaksanaan batas waktu penukaran uang.³⁴

Di sektor perkreditan, Bank Exim menginstruksikan seluruh kantor cabangnya untuk tidak memberikan kredit baru guna menghindari ketidakstabilan keuangan selama transisi. Selain itu, Bank Exim juga bertugas menetapkan nilai barang-barang jaminan, dengan mempertimbangkan perkiraan kenaikan harga pasar seiring dengan diedarkannya Rupiah nasional di Papua. Salah satu tantangan utama dalam kebijakan ini adalah selisih

34 “Risalah Mengenai Berlakunya Rupiah Umum di Irian Barat,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, Djakarta, 12 Maret 1971.

suku bunga yang cukup signifikan antara Rupiah Irian Barat dan Rupiah nasional. Oleh karena itu, muncul usulan agar diberikan masa transisi yang memadai guna memungkinkan penyesuaian terhadap perbedaan tingkat bunga, sehingga dampaknya terhadap sektor keuangan dan kredit di Papua dapat diminimalisir.

Untuk mengakomodasi penukaran uang di daerah-daerah Papua yang tidak memiliki kantor cabang Bank Exim, pengaturan sepenuhnya diserahkan kepada KCBI Jayapura. Sebagai bagian dari upaya ini, Bank Exim akan mengirimkan enam tenaga kasir ke Papua guna melakukan berbagai persiapan teknis yang diperlukan. KCBI Jayapura secara khusus mendapatkan tambahan tiga tenaga kasir untuk mendukung kelancaran pengedaran uang di seluruh wilayah Papua.

Sebelum proses pengrupiahan di Papua secara resmi dimulai, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor perdagangan. Salah satu isu utama adalah penggolongan barang dan penetapan tarif bea cukai, di mana Papua masih memiliki ketentuan khusus dengan tarif yang ditetapkan dalam IBRp. Selain itu, terdapat permasalahan dalam tarif angkutan laut dan udara dari Papua ke wilayah lain di Republik Indonesia, yang perlu disesuaikan agar mendukung kelancaran transisi ekonomi. Penyesuaian tarif ini menjadi penting mengingat biaya transportasi yang tinggi di Papua, yang dapat berdampak pada stabilitas harga barang dan efektivitas perdagangan antarwilayah selama masa integrasi moneter.³⁵

Terhitung sejak 17 April 1970, lalu lintas pembayaran antara Papua dan wilayah lain di Republik Indonesia resmi dibebaskan. Melalui kebijakan ini, Rupiah Irian Barat dapat masuk ke wilayah RI, dan sebaliknya, Rupiah nasional juga dapat beredar di Papua tanpa memerlukan izin dari Bank Indonesia. Itu berarti, IBRp. tidak lagi dianggap sebagai valuta asing maupun devisa, sehingga

35 "Pengrupiahan Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/17/UAO/OT, Jakarta, 11 Mei 1971.

biaya provisi tidak lagi dikenakan untuk mata uang ini. Namun untuk provisi yang sifatnya merupakan pelayanan bank kepada masyarakat, seperti untuk transfer ke Papua dan sebaliknya, tetap dipungut sesuai dengan tarif yang berlaku. Selain mengatur dengan jelas mengenai lalu lintas pembayaran di Papua, regulasi ini juga mengatur pembebasan transfer uang antara Papua dan wilayah RI lainnya, yang sebelumnya masih dibatasi.³⁶

Dalam Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada 16 Februari 1971, diputuskan bahwa mata uang Rupiah kembali dinyatakan sebagai alat transaksi resmi di Papua. Selama masa transisi menuju penggunaan penuh Rupiah, Rupiah Irian Barat tetap diakui sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai tukar IBRp1 = Rp18,9. Sementara itu, nilai tukar Dolar Amerika terhadap IBRp. ditetapkan sebesar US\$ 1 = IBRp20.³⁷

Proses penukaran Rupiah Irian Barat ke Dolar AS tidak dapat dilakukan secara langsung. Bila seseorang masih memiliki IBRp. dan ingin menukarkannya ke Dolar AS, maka ia harus terlebih dahulu menukar IBRp. ke Rupiah, sebelum akhirnya dapat membeli Dolar AS dengan kurs yang telah ditentukan. Kebijakan ini juga berlaku dalam perhitungan pada rekening penjualan devisa umum, di mana seluruh transaksi secara otomatis dilakukan dalam Rupiah nasional.

Pada saat itu, nilai tukar 1 US\$ setara dengan 378 Rupiah Indonesia, yang berarti 1 IBRp. hanya memiliki nilai setara dengan US\$ 0,05. Sebagai perbandingan, pada tahun 1963, 1 (satu) Gulden Irian Barat—mata uang yang digunakan sebelum integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia—memiliki nilai setara dengan US\$ 3,62. Ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu hanya delapan

36 Pembebasan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/GBI/70, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 16/1970, yang diumumkan pada 17 April 1970. Lihat “Lalulintas Pembayaran antara Wilayah RI dan Irian Barat Dibebaskan,” *Kompas*, 20 April 1970.

37 “Uang Rupiah RI Juga Berlaku untuk Irian Barat,” *Kompas*, 17 Februari 1971.

tahun, Rupiah Irian Barat mengalami penurunan nilai hingga 82 persen. Depresiasi ini menggambarkan tekanan ekonomi yang sangat signifikan, yang terjadi akibat ketidakstabilan inflasi dan perubahan kebijakan moneter di Papua.

D.1. Pembentukan ‘Tim Pengrupiahan Irian Barat’

Guna memastikan proses pengrupiahan di Papua berjalan lancar, Direktur BI saat itu, Djoeana Koesoemahardja, memutuskan untuk membentuk sebuah tim khusus yang diberi nama “Tim Pelaksana Pengrupiahan Irian Barat” pada awal 1971. Tim ini diketuai oleh Arko Baskono, Kepala Urusan Administrasi dan Organisasi Bank Indonesia, dengan tiga orang anggota sebagai berikut: Soejatno Soemardjo (Kepala Urusan Pengedaran Uang), S.B. Kaunang (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Kerja), B. Harjadi (Kepala Biro Pengawasan Kantor Pusat Bank Ekspor-Impor Indonesia). Pengalaman mereka dalam hal kepemimpinan di sektor perbankan daerah menunjukkan peran strategis mereka dalam mengelola kebijakan moneter dan operasional perbankan di tingkat regional.³⁸

Sebagai langkah awal, tim ini diberangkatkan ke Jayapura pada 16 Mei 1971. Kedatangan mereka bukan dalam kapasitas sebagai Tim Moneter Bank Indonesia, melainkan untuk menyampaikan surat keputusan dari Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengrupiahan di wilayah tersebut. Tim ini menghabiskan waktu sembilan hari di Papua untuk menjalankan tugas mereka, yang mencakup koordinasi kebijakan, penyampaian regulasi baru, serta pemantauan kesiapan lapangan dalam rangka memastikan transisi moneter berjalan

38 Arko Baksono dan Soejatno Soemardjo adalah dua figur yang memiliki pengalaman dalam manajemen perbankan di Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) pada awal 1960-an. Arko Baksono sebelumnya menjabat sebagai manajer KCBI Solo, sementara Soejatno Soemardjo pernah menjabat sebagai manajer KCBI Kediri dalam periode yang sama.

lancar dan efektif.³⁹

Perjalanan tim keuangan dalam rangka pengrupiahan Papua dimulai dari Biak, mengingat tidak adanya penerbangan langsung ke Jayapura. Setelah menginap semalam di Biak, tim melanjutkan perjalanan ke Jayapura untuk bertemu dengan Soemeleh, Wakil Kepala Daerah Pos XII Jayapura. Dalam pertemuan tersebut, Arko Baksono menyampaikan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI No. Kep. 351/MK/II/5/1971 tertanggal 15 Mei 1971, yang berisi penyesuaian pemungutan pajak di Papua. Salah satu poin utama dalam SK ini adalah penggantian tarif bea materai berdasarkan *Zegelverordering* 1921 dengan tarif yang merujuk pada Aturan Bea Materai 1921, yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kebijakan ini, di Papua berarti akan mulai diterapkan sistem materai tempel dan prangko sesuai dengan yang berlaku secara nasional. Strategi ini menjadi penting guna menandai integrasi penuh sistem administrasi fiskal Papua dengan kebijakan nasional, sehingga memastikan bahwa mekanisme pajak dan bea materai di Papua selaras dengan standar nasional.⁴⁰

Pada 19 Mei 1971, tim ini kembali mengadakan pertemuan dengan Soemeleh untuk membahas jumlah uang panjar yang harus disediakan oleh kantor-kantor pos di Papua dalam rangka pelaksanaan proses penukaran Rupiah. Sebagai bagian dari prosedur, setiap kantor pos di Papua diwajibkan mengirimkan

39 Lihat "Laporan Perdjalanan Team Pelaksana Pengrupiahan Irian Barat ke Djajapura," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 16 – 24 Mei 1971.

40 Sebelumnya, di Papua digunakan materai tempel sebesar IBRp3- (sama dengan Rp56,70), sedangkan di wilayah Republik Indonesia lainnya digunakan tiga macam materai tempel, yakni Rp0,50- untuk cek atau wesel, Rp1- untuk kuitansi, dan Rp25- untuk surat kuasa. Meskipun penyamaan tarif bea materai telah dirancang sebagai bagian dari integrasi fiskal dan moneter Papua, upaya ini tidak bisa langsung diterapkan. Salah satu hambatan utama adalah hampir seluruh kantor pos di Papua belum memiliki persediaan materai dan prangko sesuai standar nasional. Lihat "Laporan Perdjalanan Team Pelaksana Pengrupiahan Irian Barat ke Djajapura," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 16 – 24 Mei 1971.

Tabel 5.8. Jumlah Uang Panjar yang Harus Disediakan Cabang Kantor Pos di Papua dalam Rangka Pengrupiahan

Cabang Kantor Pos	Jumlah Uang Panjar (Rp.)
Jayapura	5.000.000
Wamena	2.000.000
Sarmi	2.000.000
TOTAL	9.000.000
Biak	5.000.000
Serui	2.000.000
Nabire	2.000.000
Enarotali	2.000.000
Kokonao	2.000.000
Kaimana	2.000.000
TOTAL	15.000.000
Manokwari	5.000.000
Ransiki	2.000.000
TOTAL	7.000.000
Sorong	5.000.000
Teminabuan	2.000.000
Fak-Fak	2.000.000
TOTAL	9.000.000
Merauke	5.000.000
Tanahmerah	2.000.000
TOTAL	7.000.000
TOTAL KESELURUHAN	Rp50.000.000

Sumber: "Laporan Perdjalan Team Pelaksana Pengrupiahan Irian Barat ke Djajapura,"
Koleksi Arsip Bank Indonesia, 16 – 24 Mei 1971.

laporan terperinci kepada Kantor Cabang Bank Indonesia di Jayapura setiap bulan terkait pelaksanaan penukaran Rupiah tersebut. Setelah melalui diskusi yang alot, disepakati bahwa

Kantor Pusat BI di Jakarta akan menyediakan dana sebesar Rp50 juta, dengan rincian alokasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.8.

Pada 18 Mei 1971, tim ini mengadakan pertemuan dengan Panglima Kodam Tjenderawasih, Brigjen Acub Zaenal. Dalam pertemuan tersebut, Acub mengemukakan kekhawatirannya karena tidak menerima instruksi resmi dari Kantor Pusat mengenai persiapan yang perlu dilakukan dalam proses transisi moneter ini. Ia juga menyoroti bahwa Papua telah mengalami dua kali perubahan nilai tukar dalam waktu singkat, yakni ketika 1 IBRp. disesuaikan menjadi Rp10, hingga kemudian disesuaikan lagi menjadi Rp18,90. Acub sendiri mengaku cemas dengan kesiapan Papua dalam menghadapi perubahan ekonomi yang tiba-tiba ini, khususnya dalam aspek logistik, distribusi uang, serta kesiapan administrasi di lapangan.

Lebih jauh lagi, Acub mengemukakan potensi kekacauan yang dapat terjadi jika proses pengrupiahan Papua dipaksakan tanpa aturan yang matang. Menurutnya, instansi terkait seperti Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, dan Departemen Perhubungan seharusnya terlebih dahulu menyusun regulasi yang lebih rinci sebelum kebijakan ini dieksekusi di lapangan. Namun Acub tetap menyatakan komitmennya untuk mendukung dan melaksanakan program pengrupiahan Papua. Apalagi kebijakan ini telah mendapat persetujuan resmi dan ditandatangani langsung oleh Presiden Soeharto. Ia pun menegaskan bahwa Kodam Tjenderawasih akan berupaya sekuat tenaga untuk memastikan transisi moneter tersebut berjalan dengan baik di Papua.

Sebagai tindak lanjut, Acub mengusulkan diadakannya rapat antara tim dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), yang melibatkan Pimpinan Jawatan Bea Cukai, Pajak, Kantor Pos, serta Pimpinan Kantor Cabang Bank Indonesia dan Bank Ekspor-Import Indonesia. Selain itu, Acub Zaenal juga berencana bertolak ke

Jakarta pada 27 Mei 1971 untuk bertemu langsung dengan Presiden Soeharto. Dalam pertemuan tersebut, ia akan menyampaikan berbagai tantangan dan kesulitan yang kemungkinan besar akan muncul di lapangan terkait implementasi pengrupiahan Irian Barat.

Rapat yang diusulkan oleh Brigjen Acub Zaenal akhirnya dilaksanakan pada 21 Mei 1971. Dalam pertemuan ini, muncul pertanyaan utama mengenai status penggunaan IBRp. setelah 31 Mei 1971. Pimpinan tim, Arko Baksono, menjelaskan bahwa IBRp. masih dapat digunakan sebagai alat transaksi, namun tidak akan lagi diedarkan oleh pihak bank. Jadi, Rupiah Irian Barat secara bertahap akan ditarik dari peredaran. Sebelumnya, Gubernur Irian Barat, Frans Kaisiepo, mengusulkan agar pengrupiahan dilakukan setelah Pemilu, dengan alasan stabilitas keamanan. Namun, keputusan final dari Presiden Soeharto memastikan bahwa kebijakan ini harus tetap dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.⁴¹

Dalam pertemuan ini, Brigjen Acub Zaenal sempat menanyakan kepada seluruh kepala jawatan yang hadir apakah mereka telah menerima instruksi resmi terkait kebijakan ini. Namun hampir seluruhnya menjawab belum. Mengingat masih minimnya koordinasi dan kurangnya arahan yang jelas, Acub pun kembali menegaskan pentingnya dikeluarkan instruksi resmi untuk menghindari potensi kekacauan dalam pelaksanaan pengrupiahan di lapangan.

Pada 22 Mei 1971, tim pengrupiahan melanjutkan perjalanan ke Biak untuk bertemu dengan Laksamana Madya Soebijakto, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Pimpinan Bank Exim cabang Biak dan dilaksanakan pada hari berikutnya. Dalam pertemuan tersebut, Soebijakto menyatakan optimismenya

41 Lihat "Laporan Perjalan Team Pelaksana Pengrupiahan Irian Barat ke Djajapura," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 16 - 24 Mei 1971.

terhadap kebijakan pengrupiahan Papua, yang ia anggap sebagai “langkah maju menuju penyatuan wilayah-wilayah Republik Indonesia.” Ia pun menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan selama proses transisi moneter berlangsung.

Selain aspek politik dan stabilitas, pengrupiahan ini juga dipandang sebagai solusi bagi permasalahan transfer uang yang selama ini dihadapi oleh Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Selain itu, sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, Papua memang perlu segera menyesuaikan peraturan moneternya agar selaras dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Soebijakto mengakui bahwa gesekan atau guncangan kecil mungkin tidak dapat dihindari selama proses transisi, namun ia menegaskan komitmennya untuk meminimalkan potensi konflik demi keberhasilan pengrupiahan Papua.⁴²

Proses pengrupiahan Papua pun dijadwalkan akan dimulai pada Senin, 31 Mei 1971, dengan melibatkan seluruh kantor pos, kantor cabang Bank Ekspor-Impor di Irian Barat, serta Bank Indonesia di Jayapura. Sebagai bagian dari persiapan, seluruh kantor cabang akan ditutup untuk umum pada 29 Mei 1971, dua hari sebelum pelaksanaan resmi. Penutupan ini dilakukan guna mempersiapkan administrasi, menyesuaikan tata usaha, dan memastikan kelancaran proses transisi moneter.

Sekitar sebulan sebelum pelaksanaan pengrupiahan, BI memastikan bahwa seluruh kebutuhan terkait penyediaan uang Rupiah di kantor cabang telah terpenuhi. Selain itu, berbagai aspek keuangan seperti urusan kredit, deposito, tabungan berhadiah, serta aspek lain yang berkaitan dengan transisi moneter juga telah selesai disiapkan. Sebagai bagian dari upaya sosialisasi, tim pengrupiahan meminta bantuan Gubernur Irian Barat untuk menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan ini melalui media massa, sehingga masyarakat dapat memahami secara jelas

42 Lihat “Laporan Perdjalan Team Pelaksana Pengrupiahan Irian Barat ke Djajapura,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 16 – 24 Mei 1971.

proses serta implikasi dari pengrupiahan, guna menghindari kesalahpahaman atau kepanikan di kalangan publik.

D.2. Proses Penarikan Rupiah Irian Barat

Terhitung sejak 31 Mei 1971, mata uang Rupiah Irian Barat pun mulai ditarik secara bertahap dari peredaran. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, bank-bank dilarang membayarkan atau mengeluarkan IBRp. dari kasnya kepada masyarakat, sehingga peredaran mata uang ini secara perlahan mulai dihentikan. Adapun pecahan yang ditarik mencakup berbagai denominasi, mulai dari IBRp100, IBRp10, IBRp5, IBRp2,50, IBRp1, hingga pecahan kecil seperti IBRp0,50, IBRp0,25, IBRp0,10, IBRp0,05, dan IBRp0,01. Selama proses penarikan tersebut, Rupiah Irian Barat tetap dapat digunakan sebagai alat transaksi resmi secara bersamaan dengan Rupiah nasional selama masa transisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pengrupiahan tanpa menimbulkan gangguan pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Guna memastikan kelancaran proses pengrupiahan di Papua, Kantor Pos di berbagai wilayah berperan aktif dalam mengumpulkan IBRp. dan mengirimkannya ke Kantor Pos Jayapura. Selanjutnya, dana yang terkumpul disetorkan ke KCBI Jayapura atas nama "K.D. Pos XII Djajapura." Untuk memantau perkembangan pengrupiahan sekaligus mencegah munculnya berbagai kendala administratif selama proses penarikan, setiap bulannya Kantor Pos diwajibkan mengirimkan laporan terperinci kepada Bank Indonesia Jayapura mengenai pelaksanaan kegiatan penukaran ini. Sementara itu, Bank Exim tetap difungsikan sebagai 'Kantor Kas' yang bertugas memasok kebutuhan tunai untuk Kantor Pos di berbagai daerah. Adapun pasokan ini disesuaikan dengan instruksi yang diberikan oleh KCBI Jayapura melalui Bank Exim Jayapura.⁴³

43 "Uang Pandjar untuk Kantor Pos dalam Rangka Pengrupiahan Irian Barat,"



Gambar 5.11. Suasana salah satu kantor pos di Merauke yang kelak digunakan sebagai salah satu lokasi penukaran Rupiah.

Sumber: Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nederlands Nieuw Guinea, November 1961. Nummer toegang: 2.24.05.02. <http://hdl.handle.net/10648/ae364884-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>

Setelah seluruh aspek teknis pengrupiahan diselesaikan, BI melalui Kantor Pusatnya di Jakarta mulai melaksanakan pengiriman uang Rupiah ke Papua dalam beberapa tahap. Proses pengiriman ini dirancang dengan cermat untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah di berbagai wilayah strategis di Papua. Setiap tahapan *dropping* dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan, distribusi yang merata, serta kesiapan infrastruktur perbankan di daerah tujuan.

Pada 2 April 1971, Bank Exim Sorong mulai menerima kiriman uang sebesar Rp450 juta dalam 108 peti yang diangkut menggunakan kapal laut *Wandebori* milik PELNI. Pada hari

yang sama, Bank Exim Biak juga menerima kiriman hampir Rp500 juta, terdiri atas 113 peti, yang diangkut oleh kapal yang sama. Selanjutnya, pada 5 April 1971, Bank Exim Manokwari mendapatkan kiriman uang sebesar Rp450 juta yang dikemas dalam 108 peti dan diangkut oleh kapal *Venice*. Dengan kapal yang sama, 291 peti uang dengan total nominal Rp500 juta dikirim ke Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura. Rincian pengiriman ke Jayapura meliputi 150 peti berisi uang logam dengan pecahan Rp1-hingga Rp10-, serta 141 peti berisi uang kertas dengan pecahan Rp25- hingga Rp1.000-. Sementara itu, untuk Bank Exim Merauke, pengiriman dilakukan secara khusus dari Jayapura oleh Bank Indonesia Cabang Jayapura menggunakan pesawat, dengan alokasi tahap pertama sebesar Rp450 juta.⁴⁴

Tabel 5.9. Rincian Pengiriman Rupiah Tahap Pertama dari Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta ke Kantor Cabang Bank Indonesia di Papua

Bank Exim Sorong (108 Peti)		
Uang Seri Sudirman		
Jumlah Peti	Pecahan	Total
10	Rp1.000	Rp200 juta
21	Rp500	Rp210 juta
11	Rp100	Rp22 juta
11	Rp50	Rp11 juta
10	Rp25	Rp5 juta
Uang Logam		
10	Rp10	Rp1 juta
12	Rp5	Rp0,60 juta
10	Rp2	Rp0,20 juta
10	Rp1	Rp0,10 juta
Uang Seri Dwikora		

44 "Program Pelaksanaan Pengrupiahan Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/17/UAO/OT, Djakarta, 11 Mei 1971.

1	Rp0,50	Rp0,05
1	Rp0,25	Rp0,025
1	Rp0,10	Rp0,010
TOTAL = 108 Peti		Rp449,985 juta

Bank Exim Biak (113 Peti)

Uang Seri Sudirman

Jumlah Peti	Pecahan	Total
10	Rp1.000	Rp200 juta
26	Rp500	Rp260 juta
11	Rp100	Rp22 juta
11	Rp50	Rp11 juta
10	Rp25	Rp5 juta

Uang Logam

10	Rp10	Rp1 juta
12	Rp5	Rp0,60 juta
10	Rp2	Rp0,20 juta
10	Rp1	Rp0,10 juta

Uang Seri Dwikora

1	Rp0,50	Rp0,05
1	Rp0,25	Rp0,025
1	Rp0,10	Rp0,010
TOTAL = 108 Peti		Rp499,985 juta

Bank Exim Manokwari (108 Peti)⁴⁵

Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura (291 Peti)

Uang Seri Sudirman

Jumlah Peti	Pecahan	Total
10	Rp1.000	Rp200 juta
20	Rp500	Rp200 juta
35	Rp100	Rp70 juta

45 Untuk jumlah peti, pecahan, dan total uang yang dikirimkan, sama persis dengan yang dikirimkan ke Bank Exim Sorong.

16	Rp50	Rp16 juta
10	Rp25	Rp5 juta
Uang Logam		
50	Rp10	Rp5 juta
50	Rp5	Rp2,5 juta
50	Rp2	Rp1 juta
50	Rp1	Rp0,50 juta
TOTAL = 291 Peti		Rp500 juta

Sumber: "Risalah Rapat Mengenai Berlakunya Rupiah Umum di Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/1/DIR, Djakarta, 6 April 1971.

D.3. Beberapa Kendala Pengrupiahan di Lapangan

Proses pengenalan Rupiah nasional di Papua ternyata tidak sepenuhnya berlangsung mulus. Perbedaan nilai tukar menjadi salah satu kendala utama, di mana masyarakat setempat kesulitan memahami konversi dari IBRp. ke Rupiah nasional. Banyak warga yang sudah terbiasa menggunakan IBRp. memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem moneter yang baru. Selain itu, ketimpangan harga antara Papua dan wilayah lainnya di Indonesia semakin memperumit transisi ini. Harga barang kebutuhan pokok di Papua sering kali lebih tinggi dibandingkan daerah lain, menyebabkan kebingungan dan keresahan di kalangan masyarakat.

Dalam laporan Sunjoto Kusumodidjojo, Pimpinan KCBI Jayapura, kepada Kantor Pusat BI di Jakarta, diuraikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengrupiahan di Papua. Meskipun Rupiah secara resmi telah dinyatakan berlaku di Irian Barat sejak 18 Februari 1971, kenyataannya mata uang ini belum sepenuhnya digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sunjoto mengidentifikasi dua faktor utama yang menghambat proses ini. *Pertama*, nilai tukar yang tidak bulat antara IBRp. dan Rupiah menyulitkan masyarakat dalam melakukan konversi langsung,

sehingga menimbulkan kebingungan dalam transaksi. *Kedua*, harga barang di Papua yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk membelanjakan uang mereka di luar Papua, sehingga aliran Rupiah di wilayah tersebut belum berjalan optimal. Alasan kedua tentu jauh lebih kuat ketimbang alasan pertama, sebab menurut Sunjoto “walaupun kursnja (Rupiah nasional) tidak sederhana, tetapi djikalau harga-harga di Irian Barat djauh lebih murah daripada di daerah RI lainnja, uang Rupiah toch akan mengalir masuk ke dalam wilayah Irian Barat.”⁴⁶

Setelah BI memulai distribusi Rupiah pada 1 Juni 1971, mata uang ini mulai beredar di Papua. Namun, kehadiran Rupiah di pasar menciptakan dualisme harga. Toko-toko dan pasar mencantumkan harga dalam Rupiah dengan sangat rinci, hingga bilangan sen. Namun, dalam praktiknya, nilai di belakang koma nyaris tidak memiliki daya beli yang signifikan. Fenomena ini terjadi karena Rupiah Irian Barat masih diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan tetap menjadi satuan hitung utama dalam transaksi sehari-hari. Sementara itu, Rupiah nasional hanya berperan sebagai ekuivalen nilai, sehingga masyarakat masih lebih terbiasa menggunakan IBRp. dalam transaksi mereka.

Sunjoto memberikan dua contoh yang umum terjadi di masyarakat. *Pertama*, ketika seseorang bertanya kepada pedagang tentang harga satu kaleng limun, jawaban yang hampir pasti muncul adalah “empat Rupiah.” Namun, yang dimaksud bukanlah Rp75,60 dalam Rupiah nasional, melainkan IBRp4-. *Kedua*, ketika bertransaksi di toko, pembeli masih cenderung membayar dengan IBRp. terlebih dahulu, sebelum pedagang mencocokkannya dengan tabel konversi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, IBRp. masih berperan sebagai mata uang utama dalam perdagangan sehari-hari, sedangkan Rupiah nasional masih

46 “Perkembangan Pengrupiahan Irian Barat,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/8/ UAO/OT, Djajapura, 27 Djuli 1971.

dianggap sebagai nilai pembanding semata.

Beberapa pedagang bahkan kerap menolak pembayaran dalam mata uang Rupiah dan lebih memilih menukarkan Rupiah yang mereka miliki dengan IBRp. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak penduduk berusaha mempertahankan atau menyimpan uang IBRp. untuk digunakan pada keperluan tertentu, misalnya saat berbelanja di pasar. Sunjoto memperkirakan ada empat faktor utama yang menjadi penyebabnya, yaitu:⁴⁷

1. Kebingungan dalam melakukan konversi dari IBRp. ke Rupiah;
2. Uang kertas Rupiah terlalu banyak macamnya bila dibandingkan dengan uang kertas IBRp. Sebagai catatan, uang kertas Rupiah terdiri dari 16 macam, sedangkan uang kertas IBRp. hanya terdiri dari lima macam;
3. Pecahan uang kertas Rupiah banyak yang mirip satu dengan yang lain, ciri-cirinya dianggap kurang menonjol (*opvallend*); Uang IBRp. dianggap lebih ringkas.

Sunjoto memprediksi bahwa situasi ini akan terus berlanjut selama mata uang IBRp. masih diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Ia memperkirakan masyarakat baru akan mulai beralih sepenuhnya ke Rupiah nasional setelah IBRp. secara resmi ditarik dari peredaran. Dengan demikian, konversi nilai tukar yang masih membingungkan pun akan berkurang, dan angka-angka di belakang koma dalam harga Rupiah nasional akan semakin jarang digunakan dalam praktik transaksi sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pun akan menyesuaikan diri dengan sistem moneter baru, dan penggunaan Rupiah nasional akan semakin mengakar dalam kehidupan ekonomi Papua.

Hingga Juli 1971, jumlah uang kartal IBRp. yang masih beredar di masyarakat diperkirakan sekitar IBRp145 juta. Sebelum proses penarikan dimulai pada 31 Mei 1971, jumlah uang kartal IBRp.

47 "Perkembangan Pengrupiahan Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/8/ UAO/OT, Djajapura, 27 Djuli 1971.

yang beredar mencapai sekitar IBRp204 juta. Diperkirakan, dari total IBRp145 juta yang masih beredar, sekitar IBRp10 hingga 20 juta berada di luar Papua. Asumsi ini didasarkan pada fakta bahwa dalam periode Januari hingga Mei 1971, terjadi transaksi IBRp. dalam jumlah yang cukup besar di Kantor Pusat Jakarta. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa sebagian dari uang tersebut telah berpindah ke luar wilayah Papua melalui berbagai aktivitas transaksi.⁴⁸

Tabel 5.10. Hasil Penukaran/Penarikan Mata Uang IBRp. di Seluruh Irian Barat (1 Juni – 14 Juli 1971)

Periode (1971)	Jumlah (dalam juta)	Rata-rata dalam Sehari (dalam juta)
1 – 9 Juni	22,5	2,8
10 – 16 Juni	12,9	2,1
17 – 23 Juni	8,1	1,3
24 – 30 Juni	7,6	1,2
1 – 7 Juli	6,6	1,1
8 – 14 Juli	5,6	0,9

Sumber: “Perkembangan Pengrupiahan Irian Barat,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/8/ UAO/OT, Djajapura, 27 Djuli 1971.

Berdasarkan data yang tersedia, *inflow* mata uang IBRp. terus mengalami penurunan signifikan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh berkurangnya jumlah IBRp. yang masih beredar di masyarakat. Meskipun BI tidak memiliki data lengkap mengenai jumlah penukar di seluruh Papua, statistik dari loket KCBI Jayapura dapat dijadikan rujukan. Pada minggu pertama Juni 1971, jumlah penukar di BI Jayapura berkisar antara 20 hingga 65 orang per hari. Namun, angka ini terus menurun, bahkan

48 “Perkembangan Pengrupiahan Irian Barat,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/8/ UAO/OT, Djajapura, 27 Djuli 1971.

mencapai di bawah 20 orang per hari, dengan jumlah penukar yang hanya sekitar 10 orang di beberapa kesempatan. Melihat tren ini, Sunjoto Kusumodidjojo mengusulkan perpanjangan batas waktu penukaran di beberapa lokasi di Papua bila diperlukan. Kebijakan ini dianggap penting untuk memastikan penduduk, terutama masyarakat asli Papua, tetap memiliki kesempatan untuk menukarkan sisa mata uang IBRp. mereka sebelum masa berlaku resminya benar-benar berakhir.

Meskipun Rupiah dan IBRp. masih berlaku secara bersamaan di Papua, dampak signifikan terhadap tingkat harga secara umum tidak terlalu terlihat, kecuali pada beberapa barang kebutuhan sehari-hari di pasar. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan pedagang yang menggunakan perbandingan kurs 1:20 untuk menyederhanakan konversi harga ke dalam Rupiah. Namun, mayoritas masyarakat masih lebih nyaman menggunakan IBRp. dalam transaksi mereka. Untuk mempercepat adopsi Rupiah nasional sebagai satu-satunya alat pembayaran di Papua, Sunjoto Kusumodidjojo mengusulkan dua opsi. *Pertama*, melarang pencantuman harga dalam IBRp., sehingga para pedagang hanya diperbolehkan mencantumkan harga dalam Rupiah. *Kedua*, menyatakan bahwa IBRp. tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.⁴⁹

Sunjoto menilai bahwa cara pertama, yaitu melarang pencantuman harga dalam IBRp., tidak akan terlalu efektif. Toko-toko kemungkinan besar tetap akan menyimpan tabel konversi untuk memudahkan pembayaran dalam IBRp., sehingga larangan tersebut tidak akan mengubah kebiasaan transaksi masyarakat secara signifikan. Selain itu, kebijakan ini juga bertentangan dengan pengumuman resmi pemerintah dan Bank Indonesia yang sebelumnya menyatakan bahwa IBRp. masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Sebaliknya, cara kedua,

49 "Perkembangan Pengrupiahan Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/8/ UAO/OT, Djajapura, 27 Djuli 1971.

yakni menyatakan IBRp. tidak lagi berlaku, dianggap sebagai langkah yang lebih efektif. Dengan demikian, cepat atau lambat, masyarakat akan terdorong untuk beradaptasi sepenuhnya dengan penggunaan Rupiah nasional sebagai satu-satunya mata uang resmi di Papua.

Awal peredaran Rupiah di samping IBRp. diklaim sempat menyebabkan penurunan harga di Papua. Kepala Kejaksaan Tinggi Jayapura, J. Warouw, menerangkan bahwa masyarakat Papua masih berupaya menyesuaikan diri dengan nilai tukar yang baru. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, banyak warga merasa terkejut dengan daftar harga (*prijsopgave*) barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya, pasta gigi yang sebelumnya dijual dengan harga IBRp20 kini dihargai Rp400. Begitu pula dengan seikat kangkung yang harganya berubah dari IBRp5 menjadi Rp100. Perubahan angka yang cukup besar tersebut membuat masyarakat cenderung menahan diri untuk membeli barang, meskipun jika dihitung melalui konversi, harga barang-barang tersebut sebenarnya tetap sama. Akibatnya, terjadi penurunan harga beberapa barang di wilayah Papua. Sebagai solusi cepat untuk mengatasi persoalan ini, Warouw mengusulkan agar daftar harga barang-barang kebutuhan sehari-hari dicantumkan dalam dua mata uang, yakni IBRp. dan Rupiah, guna memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

Secara keseluruhan, peredaran mata uang Rupiah di Papua tidak menimbulkan persoalan serius. Namun, pada masa awal pengenalannya, sempat terjadi beberapa kasus penipuan yang menyasar penduduk asli. Penipuan tersebut diduga dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi transisi mata uang.⁵⁰ Sayangnya, informasi lebih rinci mengenai kasus ini tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Warouw, sehingga detail insiden tersebut tetap menjadi tanda tanya.

50 "Beredaran Rupiah Disamping Rupiah Irbar Menurunkan Harga-harga di Irbar," *Kompas*, 19 Agustus 1971.

Pada 3 Januari 1973, BI secara resmi mengumumkan bahwa Rupiah Irian Barat akan ditarik sepenuhnya dari peredaran. Keputusan ini pun menandai berakhirnya penggunaan mata uang khusus di Papua dan mengukuhkan Rupiah nasional sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai bagian dari kebijakan ini, terhitung sejak 31 Maret 1973, seluruh pecahan IBRp. dinyatakan tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran resmi. Namun, pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menukarkan sisa IBRp. yang mereka miliki. Proses penukaran IBRp. hanya dapat dilakukan di kantor-kantor cabang atau kas Bank Indonesia serta bank-bank pemerintah lainnya.⁵¹

Tahapan penukaran dilakukan secara bertahap di berbagai lembaga keuangan resmi. Pada tahap awal, mulai 1 April 1973 hingga 31 Maret 1974, kantor-kantor cabang Bank Ekspor-Import Indonesia ditunjuk untuk melayani penukaran. Selanjutnya, dari 1 April 1973 hingga 31 Maret 1983, kantor-kantor cabang Bank Indonesia tetap melayani penukaran bagi masyarakat yang belum sempat melakukan konversi dalam periode sebelumnya. Sebagai tahap akhir, mulai 1 April 1983 hingga 31 Maret 2003, proses penukaran dapat dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem moneter baru serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pengrupahan di Papua.

Dari seluruh pembahasan Bab, bisa disimpulkan bahwa Penerbitan IBRp. tidak hanya berfungsi sebagai langkah teknis dalam penyesuaian sistem moneter Papua dengan kebijakan ekonomi Indonesia, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Mata uang ini menjadi representasi nyata dari proses integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia, sekaligus menandai

51 "Batas Waktu Penukaran Rupiah Irbat 31 Maret 1973," *Kompas*, 4 Januari 1973.

berakhirnya dominasi sistem keuangan kolonial Belanda yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Meskipun masa penggunaannya relatif singkat, IBRp. mencerminkan dinamika ekonomi yang erat kaitannya dengan perubahan politik besar di Papua. Mata uang ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal selama periode transisi dari pemerintahan kolonial Belanda ke pemerintahan Indonesia. Keberadaannya menjadi bagian dari sejarah panjang penyatuan Papua dengan Indonesia, menandai langkah awal dalam integrasi ekonomi dan moneter yang lebih luas. §

Perkembangan Tabungan di Papua Pasca-Integrasi

Setelah resmi terintegrasi ke dalam wilayah Indonesia, sistem tabungan di Papua sempat terbagi menjadi dua kategori utama. *Pertama*, tabungan yang tersimpan di bekas Bank Tabungan Kantor Pos Belanda, yang merupakan warisan dari sistem perbankan kolonial. *Kedua*, adalah tabungan yang berkembang setelah Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia, yang sering disebut sebagai “tabungan pembebasan.” Sistem tabungan ini mulai meningkat seiring dengan upaya pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan sistem perbankan nasional di Papua dan mendorong masyarakat setempat untuk menggunakan layanan keuangan yang lebih terintegrasi dengan sistem ekonomi nasional.

Pada akhir tahun 1963, 1964,

dan pertengahan 1965, saldo tabungan yang tersimpan di bank pos Belanda masing-masing tercatat sebesar IBRp. 83.523,05, IBRp. 71.732,48, dan IBRp. 66.776,91. Penurunan saldo ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam sistem keuangan pasca-integrasi Papua ke dalam Indonesia. Seiring dengan proses transisi ini, pemerintah mengambil langkah untuk mengembalikan tabungan tersebut kepada pemiliknya yang berjumlah 2.762 orang. Rata-rata setiap deposan menerima IBRp. 24,25 pada akhir Juni 1965. Pengembalian dana ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengalihkan sistem perbankan di Papua dari yang sebelumnya dikelola oleh administrasi kolonial Belanda menuju sistem perbankan nasional Indonesia.

Pihak BI mengklaim bahwa sektor perbankan dan tabungan masyarakat di Papua mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pasca-integrasi. Pada akhir tahun

1963, total saldo tabungan di Papua tercatat sebesar IBRp. 89.347,96. Angka ini mengalami lonjakan tajam pada akhir 1964, menjadi IBRp. 770.218,59, yang menunjukkan peningkatan aktivitas keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan baru. Peningkatan ini terus berlanjut hingga pertengahan 1965, dengan total saldo tabungan lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai IBRp. 1.507.450,46.

Selain pertumbuhan saldo tabungan, jumlah deposit juga menunjukkan pola perubahan yang menarik. Antara tahun 1963 dan 1964, jumlah deposit di Papua mengalami fluktuasi signifikan, yakni masing-masing 297.683 orang dan 2.416 orang. Sementara itu, saldo rata-rata per deposit juga mengalami perubahan yang cukup mencolok. Pada akhir 1963, saldo rata-rata per deposit tercatat sebesar IBRp. 300,83, lalu sempat meningkat menjadi IBRp. 1.127,70 pada 1964, sebelum mengalami penurunan menjadi IBRp. 624 pada pertengahan 1965. Jika dikonversikan dengan nilai tukar Rp. 69.06 untuk setiap IBRp., rata-rata tabungan per kapita dalam Rupiah Indonesia setara dengan Rp 20.775,32 pada tahun 1963, naik signifikan menjadi Rp 77.878,96 pada 1964, sebelum turun kembali menjadi Rp 40.680 pada pertengahan 1965.

Berdasarkan laporan BI, fenomena ini mencerminkan adanya dinamika dalam sistem keuangan Papua pada masa transisi, di mana masyarakat mulai menyesuaikan diri

dengan kebijakan moneter dan sistem perbankan yang baru. Lonjakan saldo tabungan dapat diinterpretasikan sebagai meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi formal, sementara fluktuasi jumlah deposit dan saldo rata-rata menunjukkan adanya penyesuaian yang masih berlangsung dalam kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan masyarakat Papua pasca-integrasi.

Angka-angka tersebut juga dianggap BI menggambarkan kapasitas menabung yang cukup tinggi di Papua, yang diklaim melebihi wilayah lain di Indonesia pada masa itu. Selain itu, peningkatan drastis saldo tabungan juga menunjukkan adanya kepercayaan yang tumbuh terhadap sistem keuangan yang baru setelah Papua bergabung dengan Indonesia. Namun, fluktuasi saldo rata-rata per deposit juga dapat mengindikasikan dinamika ekonomi yang kompleks, di mana faktor-faktor seperti inflasi, kebijakan moneter, dan perubahan nilai tukar memainkan peran penting terkait bagaimana masyarakat Papua menyimpan uangnya pada periode transisi ini.

Referensi

- Bank Indonesia, Report for the Year 1960-1965.* Jakarta: PN Pertjetakan Gita Karya, 1966.
- Garnaut, Ross dan Chris Manning. "An Economic Survey of West Irian. Part I," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 8:3, (1971), hlm. 33-65.



Gambar 5.12. Mata uang Rupiah seri Sudirman yang beberapa pecahannya dianggap membingungkan bagi masyarakat Irian Barat, seperti pecahan Rp25- dan Rp500- & pecahan Rp2,5 dan Rp10-.

Sumber: OeN, *Oeang Noesantara*, (Bandung: Genera Publishing, 2015), hlm. 423 - 432.

BAB VI
KCBI JAYAPURA DAN
PEMBANGUNAN EKONOMI PAPUA,
1968 – 1998

Setelah berhasil mengintegrasikan Papua ke dalam sistem moneter dan perekonomian nasional Indonesia, terutama melalui proses panjang pengrupiahan, Pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Indonesia segera melangkah ke proses berikutnya, yaitu memantapkan gerak pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Bab ini akan membahas secara garis besar kontribusi Bank Indonesia melalui kantor cabangnya di Jayapura terhadap pelaksanaan program-program pembanguan di Papua.

Namun demikian, untuk mengawali pembahasan terlebih dahulu akan disajikan pembahasan tentang upaya Bank Indonesia untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai Bank Sentral nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang baru Nomor 13 tahun 1968. Ini utamanya mencakup proses pelepasan aktivitas

komersial BI dan pengalihannya kepada bank-bank komersial nasional yang ada di Papua.

A. Pelepasan Aktivitas Komersial Bank Indonesia

Di tengah kemelut politik dan ekonomi yang melanda Indonesia menjelang akhir 1960-an, BI bersama pemerintah pusat terus berupaya merumuskan format yang lebih tepat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Bank Sentral. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah pengesahan undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Melalui undang-undang baru ini, BI secara resmi tidak lagi menjalankan fungsi perbankan komersial. Sebagai gantinya, lembaga ini difokuskan sepenuhnya sebagai otoritas moneter yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter nasional.¹

Sebelum undang-undang tersebut disahkan, BI masih memegang sejumlah fungsi yang merupakan warisan dari masa kolonial, termasuk aktivitas sebagai bank komersial. Padahal, dalam sistem ekonomi modern, fungsi bank sentral dan bank komersial seharusnya dipisahkan secara tegas. Bank sentral idealnya berperan sebagai pengelola kebijakan makro-ekonomi, seperti pengendalian inflasi, penetapan suku bunga, pengaturan sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sebaliknya, bank komersial difokuskan pada pelayanan keuangan mikro kepada masyarakat, seperti simpanan, pemberian kredit, serta layanan transaksi perbankan lainnya.

Rancangan undang-undang (RUU) tersebut secara resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada 3 November 1968, yang menandai dimulainya babak baru dalam pengelolaan kebijakan moneter

1 Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 165-179.

dan peran strategis BI sebagai Bank Sentral yang independen.² Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun sistem keuangan nasional yang lebih stabil, efisien, dan terarah. Dengan demikian, langkah pelepasan aktivitas komersial BI bukan hanya merupakan penyesuaian terhadap prinsip tata kelola keuangan yang sehat, tetapi juga menjadi upaya penting untuk menyejajarkan sistem perbankan Indonesia dengan standar internasional. Reformasi ini memungkinkan BI untuk lebih fokus dan profesional dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai otoritas moneter yang independen dan kredibel.

Sebagai bagian dari penyesuaian ini, Direksi Bank Negara Indonesia Unit I memutuskan bahwa, terhitung sejak 1 Juni 1968, seluruh aktivitas komersial yang terkait dengan hubungan pembayaran luar negeri, termasuk perdagangan antar-pulau, dihentikan. Selanjutnya, efektif sejak 21 Juni 1968, Bank Negara Indonesia tidak lagi diperbolehkan melakukan pengiriman uang atau penerbitan wesel bank, kecuali untuk beberapa urusan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, seperti:

- Transfer yang menyangkut keuangan pemerintah.
- Transfer dari satu bank ke bank lainnya, seperti dari pusat ke cabang atau sebaliknya yang bertujuan untuk tambahan likuiditas. Sementara transfer yang bertujuan untuk keuntungan perseorangan/perusahaan swasta tidak diperbolehkan.
- Transfer dari perwakilan negara asing, seperti kedutaan besar, konsulat, dan lain sebagainya.
- Transfer oleh pegawai bank sendiri yang ditujukan untuk keperluan keluarga maupun sebaliknya.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak berlangsung seragam

2 Merujuk pada UU tersebut, nama Bank Negara Indonesia Unit I pun diubah menjadi Bank Indonesia yang selanjutnya menjalankan fungsinya sebagai Bank Sentral.

di seluruh wilayah Indonesia. Di Papua, pelepasan aktivitas komersial tidak dapat segera dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu itu tidak ada satu pun bank milik pemerintah selain BI yang beroperasi di wilayah tersebut. Akibatnya, tidak tersedia lembaga keuangan yang mampu langsung mengambil alih tugas-tugas ekonomi dan lalu lintas keuangan dari BI. Oleh karena itu, proses pengalihan dilakukan secara bertahap dengan serangkaian persiapan administratif dan kelembagaan yang detail.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1968 tentang “Pelepasan Aktivitas Komersial dari Cabang-Cabang Bank Indonesia di Wilayah Irian Barat,” pemerintah mengatur proses pelepasan fungsi komersial BI dengan pendekatan yang hati-hati dan terencana. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran arus ekonomi dan sistem pembayaran di wilayah tersebut tidak terganggu. Sebagai bagian dari kebijakan ini, seluruh aktivitas komersial di KCBI di Papua harus dihentikan selambat-lambatnya pada akhir tahun 1969. Nantinya, BI hanya akan mempertahankan satu kantor cabang di Sukarnapura (Jayapura), yang bertugas menjalankan fungsi utama sebagai Bank Sentral.

Pada 30 Oktober 1968, Djoeana Koesoemahardja, selaku Gubernur BI menetapkan “Panitia Intern Masalah Irian Barat” yang bertugas mempercepat proses pelaksanaan penyerahan fungsi komersial BI di wilayah tersebut. Kepanitiaan ini terdiri dari beberapa pejabat pusat, yaitu Arko Baksono (Ketua, Kepala Urusan Pengawasan Intern), J.A. Sereh (Wakil Ketua, Kepala Urusan Administrasi dan Organisasi), Soetomo (Anggota, Wakil Kepala Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank-Bank), serta Soemartono (Anggota, Kepala Urusan Materil).

Untuk memperkuat tim, panitia memasukkan tiga anggota tambahan dan satu penulis, yaitu Bambang Susilo (Anggota, Bagian Personalia), Oemar Said (Kepala Bagian Pegawai), S.B. Kaunang (Kepala Bagian Tata Kelola), serta W. Piga (Penulis,

Bagian Pengawasan Cabang-Cabang). Tugas utama kepanitiaan ini adalah menyampaikan laporan kepada Direksi BI mengenai segala informasi yang berkaitan dengan proses penyerahan fungsi komersial di Papua. Mereka diberikan waktu sekitar satu minggu untuk menyusun laporan tersebut.³

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tim ini menyimpulkan, seluruh kantor cabang BI di Papua saat itu masih aktif menjalankan fungsi perbankan komersial. Kondisi ini terjadi lantaran masih belum hadirnya bank-bank komersial lain di sana, sehingga BI secara praktis harus mengambil alih peran itu demi menjaga kelangsungan layanan keuangan. Di sisi lain, aktivitas BI sebagai bank sentral, khususnya di cabang Jayapura, masih tergolong minim. Sebagian besar kegiatan justru terfokus pada layanan komersial, seperti penghimpunan dana dan pemberian kredit, yang sejatinya bukan menjadi tugas utama dari sebuah bank sentral.

Dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Papua serta jauhnya jarak antar-daerah tingkat II, ditambah dengan masih terbatasnya infrastruktur komunikasi dan transportasi, rencana likuidasi kantor cabang BI di Merauke, Sorong, dan Manokwari berpotensi menimbulkan masalah serius, terutama dalam hal penyediaan uang tunai (*cash supply*) bagi wilayah-wilayah tersebut.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu keberatan dari pemerintah daerah, mengingat keberadaan kantor cabang selama ini sangat penting dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan likuidasi harus dirumuskan dengan penuh kehati-hatian dan melalui konsultasi yang menyeluruh dengan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini penting

3 "Kertas Karya tentang Posisi Tjabang-Tjabang BNI Unit I di Irian Barat dalam Rangka Penetapan Undang-Undang tentang Bank Sentral Baru," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 6 November 1968; "Program Kerdja Panitya Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 22 November 1968.

untuk memastikan bahwa hubungan baik antara BI sebagai otoritas moneter dan pemerintah daerah tetap terjaga secara konstruktif.

Dari perspektif operasional dan permodalan, kantor-kantor cabang Bank Sentral di Merauke, Sorong, Manokwari, dan Biak dilaporkan terus mengalami kerugian. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah terpusatnya hampir seluruh aktivitas perkreditan di Jayapura. Sementara kantor-kantor cabang lainnya hanya berperan sebagai perantara atau penyalur dana. Ketimpangan ini mengakibatkan rendahnya efektivitas operasional dan ketidakseimbangan dalam kontribusi keuangan antar cabang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, tim pengkaji merekomendasikan agar bank yang kelak menggantikan peran kantor cabang BI di wilayah-wilayah tersebut juga memiliki kehadiran operasional di Jayapura. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pengelolaan kredit dan meminimalkan potensi kerugian.

Selanjutnya, tim mengusulkan tiga nama bank alternatif sebagai kandidat pengganti, yang didasarkan pada sejumlah kriteria penting, seperti kemampuan dalam mengembangkan sektor-sektor potensial seperti perikanan, kehutanan, dan pertambangan; tingkat likuiditas dan kekuatan permodalan; ketersediaan tenaga profesional; serta rekam jejak institusi tersebut dalam menangani kegiatan komersial, khususnya dalam sektor ekspor dan impor.

Tiga alternatif bank diajukan sebagai pengganti peran kantor-kantor cabang BI di Papua, masing-masing dengan keunggulan dan rekam jejak yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal. Alternatif pertama adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Unit II Ekspor-Impor, yang dinilai paling sesuai karena memiliki spesialisasi dalam aktivitas perdagangan luar negeri, khususnya ekspor dan impor. Selain itu, unit ini juga memiliki *historische rechten* (hak sejarah) atas sejumlah kegiatan perbankan di Papua,

yang membuat transisinya lebih leluasa secara kelembagaan maupun administratif.

Alternatif kedua adalah BNI Unit IV, yang selain memiliki pengalaman dalam menangani perdagangan internasional, juga dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pengembangan sektor kehutanan dan perkebunan—dua sektor yang menjanjikan di wilayah Papua namun belum digarap secara optimal.

Sementara itu, BNI Unit III dipertimbangkan sebagai alternatif ketiga, dengan pertimbangan atas kiprah unit ini yang telah cukup aktif dalam mendukung pertumbuhan sektor perikanan di Papua. Potensi hasil laut yang melimpah di kawasan ini akan lebih maksimal jika didukung oleh lembaga perbankan yang sudah memiliki pengalaman dan infrastruktur dalam bidang tersebut.⁴

Dengan mempertimbangkan kapabilitas masing-masing unit, pemilihan bank pengganti diharapkan tidak hanya akan menjamin keberlangsungan layanan keuangan di Papua, tetapi juga membuka peluang baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor-sektor unggulan. Secara keseluruhan, bank pengganti yang ditunjuk diharapkan mampu menjalankan operasionalnya secara mandiri tanpa ketergantungan pada dukungan likuiditas dari Bank Sentral. Kemandirian ini menjadi aspek krusial dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang secara geografis menantang seperti Papua.

Dalam hal kepegawaian, tim menekankan pentingnya agar bank umum pemerintah yang akan mengambil alih seluruh kantor cabang ini juga menyerap para pegawainya. Menurut tim, kebijakan kepegawaian perlu dirancang secara hati-hati agar pegawai dari kantor-kantor yang dilikuidasi “tidak diperlakukan

4 “Kertas Karya tentang Posisi Tjabang-Tjabang BNI Unit I di Irian Barat dalam Rangka Penetapan Undang-Undang tentang Bank Sentral Baru,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 6 November 1968; “Program Kerdja Panitya Irian Barat,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 22 November 1968.

sebagai inventaris, melainkan diperlakukan sebagai manusia.”⁵ Mereka harus diberikan kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin tetap bekerja di lingkungan Bank Sentral atau beralih ke bank yang ditunjuk. Sebaliknya, bagi pegawai yang bukan berasal dari daerah setempat dan ingin bergabung dengan bank tersebut, kesempatan seluas-luasnya juga harus diberikan.

Tim juga merekomendasikan agar pegawai lokal diberikan prioritas untuk direkrut menjadi bagian dari bank umum milik pemerintah yang akan mengambil alih peran BI di Papua. Selain itu, penyesuaian (*inpassing*) terhadap skema gaji pokok yang telah ditetapkan sejak 1 September 1968 perlu segera dilaksanakan bagi para pegawai yang dipindahkan. Kebijakan ini penting untuk menjamin bahwa mereka tidak mengalami kerugian finansial akibat perpindahan tersebut. Prinsip dasarnya adalah memastikan bahwa hak-hak keuangan para pegawai tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan dalam proses transisi ini.

Selanjutnya, tim merekomendasikan agar proses likuidasi kantor-kantor cabang BI dilaksanakan secara hati-hati dan terstruktur, guna menghindari kekosongan layanan di sektor perbankan. Artinya, penyerahan operasional komersial perlu terlebih dahulu difinalisasi secara administratif di Kantor Pusat, sementara penyerahan fisik kantor cabang dilakukan secara serentak di daerah. Pendekatan ini dirancang untuk menjamin keberlanjutan layanan perbankan tanpa gangguan.

Tim ini kemudian membentuk tim gabungan (*joint-team*) yang bertugas menjalin kontak langsung dengan perwakilan Bank Ekspor-Impor. Tim tersebut terdiri dari Soetomo sebagai Ketua (Wakil Kepala Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank-Bank), Nelwan sebagai Anggota (Kepala Bagian Pengawasan Cabang-Cabang), Soedarno sebagai Anggota (Wakil Kepala Urusan

5 “Prinsip-Prinsip tentang Penjerahan/Pengambil Alihan Fungsi Komersial Tjabang-Tjabang Bank Indonesia kepada/oleh Bank Ekspor-Impor Indonesia di Irian Barat,” Lampiran I & II, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1968.

Luar Negeri), dan Munir sebagai Anggota (Wakil Kepala Urusan Pengawasan Kredit).⁶

Pada akhirnya, diputuskan bahwa seluruh aktivitas komersial kantor cabang BI di Papua—baik operasional maupun administratif—akan dialihkan sepenuhnya kepada Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor-Impor. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang yang baru, unit ini akan berdiri sebagai entitas perbankan tersendiri dengan nama Bank Ekspor-Impor Indonesia, efektif mulai 31 Desember 1968.

Direksi Bank Ekspor-Impor Indonesia, yang diwakili oleh C. Budiman dan I.S. Hidajat, secara prinsip menyetujui rencana pengambilalihan aktivitas komersial BI tersebut. Mereka memperkirakan bahwa seluruh proses peralihan kantor-kantor cabang dapat dilakukan secara serentak pada tanggal 1 April 1969. Sebagai langkah awal, sejak 1 Maret 1969 pihak Bank Ekspor-Impor telah menugaskan dua orang petugas di masing-masing cabang untuk membantu kelancaran masa transisi. Selain itu, dua pegawai Bank Ekspor-Impor, yakni Surjadi dan B.N. Arismunandar, juga ditugaskan untuk melakukan observasi langsung di lapangan (*on the spot*) bersama tim dari BI.⁷

Selanjutnya, seluruh simpanan giro di Jayapura—baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah (kecuali simpanan yang terkait dengan pos APBN)—akan dialihkan kepada Bank Ekspor-Impor. Hal yang sama berlaku untuk seluruh debitur di sektor komersial. Sementara itu, terkait dengan inventaris, seluruh aset milik BI di Sorong, Biak, Manokwari, dan Merauke, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, akan diserahkan kepada Bank Ekspor-Impor. Nilai pengganti atas aset-

6 “Prinsip-Prinsip tentang Penjerahan/Pengambil Alihan Fungsi Komersial Tjabang-Tjabang Bank Indonesia kepada/oleh Bank Ekspor-Impor Indonesia di Irian Barat,” Lampiran I & II, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1968.

7 “Pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia 1968 di Wilayah Irian Barat,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 9 Desember 1968.

aset tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan kedua belah pihak.⁸

Jadi, penyerahan tersebut mencakup seluruh kantor berikut personel lokal, inventaris, dan aset-aset lainnya. Namun demikian, kantor cabang Jayapura tidak termasuk dalam penyerahan ini dan tetap berada di bawah pengelolaan BI Pusat. Proses alih kelola ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan para karyawan agar tidak dirugikan, dan selama masa transisi, para pegawai diimbau untuk tetap tenang dan melaksanakan tugas seperti biasa.

Untuk kantor cabang Biak, akan dilakukan penataan khusus melalui kerja sama antara BI dan Bank Ekspor-Import. Penataan ini diperlukan mengingat peran strategis cabang Biak sebagai pusat pasokan uang tunai (*cash supply*) bagi kantor cabang Bank Indonesia di Jayapura.

Sebagai bagian dari persiapan, Bank Ekspor-Import akan menugaskan tenaga profesional untuk memimpin setiap kantor cabang yang akan diambil alih. Sementara itu, mengingat kantor cabang Jayapura tetap dipertahankan oleh BI, lembaga ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dari Bank Tabungan dan Bank Negara Indonesia yang rencananya akan dilikuidasi.

Awalnya, penyelesaian proses penyerahan serta dimulainya operasional seluruh kantor cabang Bank Ekspor-Import ditargetkan paling lambat pada 1 April 1969, atau setidaknya pertengahan tahun 1969. Meski demikian, nama-nama pejabat yang akan menduduki posisi pimpinan di cabang-cabang tersebut telah ditentukan sejak Juni 1969. Selama proses pelepasan aktivitas komersial belum sepenuhnya rampung, seluruh KCBI di Papua tetap menjalankan fungsi operasionalnya seperti biasa untuk memastikan kontinuitas layanan perbankan di wilayah tersebut.⁹

8 Terkecuali untuk gedung-gedung dan inventaris yang adalah eks-NHM mengingat seluruh inventaris tersebut didapat Bank Indonesia melalui proses nasionalisasi.

9 "Pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia 1968 di Wilayah Irian Barat,"

Tabel 6.1. Daftar Pejabat yang Diplot untuk Menduduki Posisi Pimpinan di Bank Ekspor-Impor Indonesia Cabang Papua

Nama	Posisi di Bank Ekspor-Impor
N. Arismunandar	Koordinator Cabang Bank Ekspor-Impor Indonesia Seluruh Irian Barat (Jayapura)
Sovian S. Nasution	Pimpinan Cabang Jayapura
Drs. J. Regar	Pimpinan Cabang Biak
Tedjamukti Suwarja Affandie	Pimpinan Cabang Manokwari
Darjono	Pimpinan Cabang Merauke
B.L.W.O. van der Velden	Pimpinan Cabang Sorong

Sumber: Koleksi Arsip Bank Ekspor-Impor Indonesia No. 390, 17 Juni 1969.

Namun, karena sejumlah kendala teknis dan administratif, peresmian operasional kantor cabang Bank Ekspor-Impor harus ditunda hingga 1 September 1969. Pada tanggal tersebut, prosesi serah-terima secara resmi dilangsungkan di Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para pimpinan cabang serta disaksikan oleh perwakilan dari Kantor Pusat kedua institusi. BI diwakili oleh dua Direktur, yakni M. Djoeana Koesoemahardja dan R.A. Kartadjoemena. Sementara dari pihak Bank Ekspor-Impor Indonesia hadir Direktur Utama Surjono Sastrohadikusumo dan Direktur I.S. Hidajat.

Dalam prosesi ini, BI secara resmi menyerahkan seluruh hak, kewajiban, kekayaan, serta perlengkapan milik kantor cabangnya di Biak, Sorong, Manokwari, dan Merauke kepada Bank Ekspor-Impor Indonesia. Penyerahan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1968 dan disahkan melalui penandatanganan dokumen oleh kedua belah pihak pada tanggal yang sama di Jakarta. Langkah ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dari restrukturisasi sistem perbankan nasional, khususnya di wilayah

PENGUMUMAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40/1968 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D. 15.6.1.21 tanggal 23 Januari 1969, mulai tanggal 1 SEPTEMBER 1969 akan membuka Kantor2 Tjabang dikota-kota :

1. DJAJAPURA
2. BIAK
3. MANOKWARI
4. SORONG
5. MERAUKE

guna menerima penyerahan tugas komersil yang selama ini diselenggarakan oleh BANK INDONESIA dan untuk selanjutnya melajani semua usaha umum perbankan.

Bertalian dengan peresmian pembukaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 September 1969, maka Kantor2 Tjabang BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA di Irian Barat baru akan mulai melajani umum pada tanggal 2 September 1969.

Demikianlah agar chalajak ramai maklum adanja.—

**BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA
TJABANG DJAJAPURA**

62/IT.

Gambar 6.1. Pengumuman mengenai penyerahan tugas komersil dari Kantor Cabang Bank Indonesia di Papua kepada Bank Ekspor – Impor Indonesia.

Sumber: Koleksi Arsip Bank Ekspor-Impor Indonesia No. 390, 17 Juni 1969.

Papua, sehingga peran bank umum dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat dapat diperkuat.

Secara bersamaan di Jayapura, juga dilangsungkan prosesi serah terima antara Bank Tabungan Pos dan Bank Ekspor-Impor Indonesia terkait pengalihan inventaris, serta antara BI dan Bank Ekspor-Impor terkait pengalihan aktivitas komersial. Dalam acara tersebut, Bank Tabungan Pos diwakili oleh Direktur Muda R. Abdul

Sjukur dan Kepala Cabang Jayapura, M. Sodik. Sementara itu, BI dan Bank Ekspor-Impor masing-masing diwakili oleh pimpinan cabangnya, R. Sujoto dan B.M. Aris Munandar.

Dalam acara serah terima tersebut, M.B. Ramandey selaku perwakilan Gubernur Irian Barat menyampaikan harapannya agar kehadiran Bank Ekspor-Impor dapat menjawab aspirasi masyarakat Papua. Ia menekankan pentingnya peran strategis lembaga keuangan ini dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun. “Dengan adanya Bank Ekspor Impor di Irbar, diharapkan adanya stimulasi atau perangsang untuk memajukan ekspor impor di daerah ini,” ujarnya. Ramandey juga menegaskan bahwa kehadiran bank tersebut akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengumpulkan dan menyalurkan hasil ekspor mereka.

Dalam sambutannya, Ketua Bank Sentral Pusat, Drs. Sutomo, mengumumkan bahwa seluruh KCBI di Papua akan ditutup, kecuali cabang Jayapura. Kantor ini akan tetap menjalankan fungsi sebagai bank sentral, khususnya dalam melayani kepentingan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga internasional. Selain itu, akan didirikan pula kantor remise di Biak yang bertugas menangani pengiriman uang berdasarkan instruksi Bank Indonesia, guna memastikan kelancaran sistem pembayaran.

Sementara itu, B.M. Aris Munandar menyoroti bahwa tugas utama Bank Ekspor-Impor di Papua adalah memperbaiki kondisi ekonomi setempat melalui penguatan sektor perdagangan. Sejak pendiriannya pada 1968, Bank Exim telah berkembang pesat dengan membuka 30 cabang, lima di antaranya berada di Papua. R. Abdul Sjukur turut menambahkan bahwa meskipun operasional Bank Tabungan Pos di Papua resmi ditutup, kegiatan perbankan yang bersifat tabungan akan tetap diteruskan oleh Perusahaan Negara Pos dan Giro.¹⁰ Singkat cerita, seluruh rangkaian prosesi

10 “Aktivitas Komersil di Irbar Diserahkan Kepada Bank Exim,” *Tjenderawasih*, 1 September 1969.

ini menandai langkah penting dalam restrukturisasi pengelolaan sektor keuangan di Jayapura, dengan tujuan memperkuat sistem moneter dan memperluas jangkauan layanan perbankan di wilayah Papua.

Di Biak, pasca penyerahan seluruh aset kepada Bank Ekspor-Impor, sempat muncul usulan agar BI tetap diizinkan menggunakan ruang khasanah di Kantor Perbendaharaan Biak, termasuk ruang tambahan bagi para pegawai Bank Sentral yang masih bertugas di wilayah tersebut. Usulan ini diajukan sebagai langkah antisipatif apabila ke depannya volume uang tunai yang harus disediakan di Biak meningkat secara signifikan dan melampaui kapasitas khasanah yang tersedia. Dalam skenario seperti itu, perluasan fasilitas khasanah Kantor Kas dianggap sebagai solusi strategis yang layak dipertimbangkan.

Namun, rencana ini akhirnya ditunda menyusul dimulainya proyek pembangunan khasanah baru di Jayapura. Fasilitas khasanah tersebut dirancang untuk menjadi pusat penyimpanan utama uang kas di Papua, termasuk cadangan besi (*iron stock*) yang dibutuhkan untuk menopang stabilitas keuangan di wilayah ini. Dengan kehadiran khasanah baru tersebut, pengiriman uang tunai tidak perlu lagi dilakukan dalam jumlah kecil via jalur udara ke Biak. Sebaliknya, pasokan uang dapat dikirim dalam volume besar langsung ke Jayapura menggunakan kapal laut, yang dinilai lebih efisien dan mampu menekan biaya logistik secara signifikan.¹¹

Selanjutnya, sempat muncul usulan untuk mempertahankan fungsi Kantor Remise BI di Biak. Usulan ini didasarkan pada kendala logistik, khususnya tidak adanya jalur penerbangan langsung antara Jakarta dan Jayapura, yang dinilai menyulitkan distribusi uang kas ke wilayah Papua. Menanggapi kebutuhan tersebut, pada 1 September 1969, Bank Indonesia secara resmi mendirikan Kantor Remise di Biak. Kantor ini berfungsi sebagai

11 "Perluasan Chazanah Bank Indonesia Tjabang Biak," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 2/14/UM/Bg.

titik penampungan sementara bagi pengiriman uang tunai dari Jakarta yang ditujukan untuk KCBI Jayapura maupun Bank Ekspor-Impor di Papua.

Secara struktural, Kantor Remise Biak berada di bawah pengawasan langsung KCBI Jayapura, dan seluruh personilnya bertanggung jawab kepada pimpinan cabang KCBI Jayapura. Namun demikian, keberadaan kantor ini bersifat sementara. Seiring dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapan operasional Bank Ekspor-Impor, pada 1 Juni 1970, Kantor Remise Biak resmi ditutup. Seluruh tugasnya kemudian dialihkan kepada Kantor Cabang Bank Ekspor-Impor di Biak.

Sebagai tindak lanjut, dibentuklah fasilitas Kas Titipan di kantor Bank Ekspor-Impor Biak. Fasilitas ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah distribusi *cash supply* ke kantor-kantor cabang di wilayah Papua lainnya, seperti Manokwari, Sorong, dan Merauke. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan menjamin ketersediaan uang tunai di seluruh kawasan tersebut.

Di Sorong, setelah proses serah terima aset dari Kantor Cabang BI kepada Bank Ekspor-Impor Indonesia selesai dilaksanakan, fungsi komersial BI di wilayah tersebut secara resmi berakhir. Subardja, selaku Bupati Sorong, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kontribusi nyata KCBI Sorong dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ia juga berharap agar Bank Ekspor-Impor dapat melanjutkan kiprah positif yang telah dibangun oleh BI, khususnya dalam memperkuat pelayanan perbankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sorong.¹²

Sementara itu, di Merauke, pada tanggal 1 September 1969, seluruh hak dan kewajiban, kekayaan, serta perlengkapan KCBI di Merauke secara resmi dialihkan kepada Bank Ekspor-Impor Indonesia. Pengalihan ini mencakup seluruh aspek operasional

12 "Serahterima Tugas Perbankan di Merauke dan Sorong," *Tjenderawasih*, 2 September 1969.

P E N G U M U M A N

Dengan ini diberitahukan kepada chalaajak ramai bahwa berdasarkan Undang2 No.13 tahun 1968 tentang - Bank Sentral jo Peraturan Pemerin - tah No.40 tahun 1968, Bank Indone - sia tidak lagi melakukan aktivitas - komersil.

Berhubung dengan itu Bank Indone - sia Tjabang Merauke mulai tanggal 1 September 1969 akan ditutup dan - segala hak dan kewajiban,kekajaan - serta perlengkapannya diserahkan ke - pada Bank Ekspor Impor Indonesia - Tjabang Merauke. Untuk selanjutnya Bank Ekspor Impor Indonesia Tjabang Merauke akan memberikan pelajaan - djasa2 perbankan baik untuk keper - luan Pemerintah/Pemerintah Daerah - maupun untuk keperluan badan2 dan/ atau golongan2 masjarakat lainnya.

Guna keperluan penutupan buku - dalam rangka penjerahan tersebut - Kantor/Kas kami akan ditutup untuk - umum pada tanggal 30 Agustus 1969.-

Dengan demikian segala keper - luan kas diharapkan agar diselesai - kan sebelum tanggal tersebut dia -

~~tas. Sekian pengumuman kami agar ja
berkeperentingan maklum adanya.~~

Merauke, 22 Agustus 1969.

Pemimpin Tjabang
BANK INDONESIA

ttd,

(Ekotjipto SH).

Gambar 6.2.

Pengumuman
Penyerahan Aktivitas
Komersil BI kepada Bank
Ekspor-Impor di Merauke.

Sumber: *Harian Merauke*, 25
Agustus 1969.

untuk mendukung pelayanan jasa perbankan bagi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat umum. Proses serah terima dilakukan langsung oleh Eko Tjipto, selaku Pimpinan KCBI Merauke, kepada Darjono, pimpinan Bank Ekspor-Impor Cabang Merauke. Dalam sambutannya, Kolonel Begoh Sumarto, Ketua Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Merauke, menyampaikan harapan agar Bank Ekspor-Impor dapat menjadi motor penggerak

peningkatan produktivitas masyarakat di berbagai sektor ekonomi. Harapan senada juga diungkapkan oleh Bupati Merauke, Darmowidigdo, yang menegaskan pentingnya peran Bank Ekspor-Impor dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung kemajuan wilayah Merauke secara menyeluruh.¹³

Singkat cerita, proses alih fungsi perbankan dari BI kepada Bank Ekspor-Impor Indonesia pada tahun 1969 menandai babak baru dalam penguatan sistem keuangan nasional di Papua. Harapan besar pun disematkan kepada Bank Ekspor-Impor untuk melanjutkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah. Dengan berakhirnya fungsi komersial BI dan dimulainya operasional Bank Ekspor-Impor, Papua memasuki tahap konsolidasi sistem keuangan yang lebih terintegrasi dalam kerangka pembangunan nasional. Dalam kaitan itu, menarik tentunya untuk melihat bagaimana kiprah dari KCBI Jayapura sebagai satu-satunya kantor cabang yang masih dipertahankan di Papua.

B. Persiapan KCBI Jayapura sebagai Kantor Cabang Tunggal

B.1. Restrukturisasi Organisasi dan Kepegawaian

Penutupan KCBI Biak, Merauke, Manokwari, dan Sorong pada tahun 1969 menandai dimulainya fase baru dalam kehadiran Bank Sentral di Papua, dengan KCBI Jayapura ditetapkan sebagai satu-satunya perwakilan resmi Bank Indonesia di wilayah tersebut. Keputusan ini tidak semata bertujuan efisiensi administratif, melainkan bagian dari strategi restrukturisasi kelembagaan yang lebih luas, guna menyesuaikan peran BI pasca reformasi fungsinya sebagai otoritas moneter.

13 "Serahterima Tugas Perbankan di Merauke dan Sorong," *Harian Tjenderawasih*, 2 September 1969.

Untuk itu, berbagai penyesuaian dilakukan, mulai dari aspek kepegawaian, operasional, hingga pengelolaan aset. Fokus utama tertuju pada bidang personalia, mengingat pentingnya memastikan keberlanjutan layanan dan stabilitas organisasi di tengah transisi. Langkah awal yang ditempuh adalah restrukturisasi organisasi, baik di lingkungan KCBI Jayapura maupun Bank Ekspor-Impor Indonesia yang mengambil alih fungsi-fungsi komersial di Papua.

Setelah reorganisasi dilakukan dengan melakukan penutupan kantor-kantor cabang BI di Biak, Sorong, Manokwari, dan Merauke, maka seluruh fungsi Bank Sentral di Papua secara penuh dipusatkan di KCBI Jayapura. Sebagai satu-satunya representasi Bank Sentral, KCBI Jayapura menjalankan peran utamanya sebagai bank sirkulasi, khususnya dalam mendistribusikan kebutuhan uang tunai (*cash supply*) ke berbagai wilayah. Dalam menjalankan fungsi ini, KCBI Jayapura dibantu oleh Kantor Remise Biak yang berada di bawah struktur Kas Besar BI Jayapura.¹⁴

Secara operasional, Kantor Remise Biak bertugas menerima kiriman kas dari Kantor Pusat Jakarta—baik dalam bentuk Rupiah biasa maupun Rupiah Irian Barat (IBRp)—dan mendistribusikannya kepada kantor-kantor cabang Bank Ekspor-Impor Indonesia di Sorong dan Manokwari. Pengiriman ini dilakukan berdasarkan instruksi dari KCBI Jayapura dan permintaan dari Bank Ekspor Impor cabang Biak. Kantor Remise Biak juga bertugas menampung kelebihan kas dari kantor-kantor cabang Bank Ekspor-Impor di wilayah tersebut, termasuk dari Merauke.

Pada praktiknya, Kantor Remise Biak akan menampung pengiriman-pengiriman remise dari Kantor Pusat Jakarta, biasanya berupa tambahan kas untuk Papua, baik IBRp maupun Rupiah biasa. Kantor Remise Biak juga bertanggung jawab dalam hal pengiriman uang Rupiah Irian Barat (IBRp) dan Rupiah biasa kepada kantor-kantor cabang BEII di Sorong dan manokwari.

14 "Surat Edaran Kantor Remise Bank Indonesia Biak," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1969.

Penugasan tersebut dilakukan berdasarkan pada instruksi KCBI Jayapura yang diberikan atas permintaan Kantor Cabang Bank Ekspor Impor Indonesia di Biak. Selain itu, kantor ini juga akan menampung kelebihan kas dari kantor-kantor cabang Bank Ekspor Impor Indonesia di Sorong, Manokwari, dan Merauke.¹⁵

Dari sisi personalia, pelaksanaan tugas dan fungsi KCBI di Papua ditopang oleh dua kelompok pegawai, yaitu pegawai lokal dan pegawai pusat (*home staff*). Pegawai lokal adalah tenaga kerja yang direkrut langsung dari wilayah setempat, dengan peran utama pada aspek-aspek administratif dan operasional dasar kantor cabang. Sementara itu, pegawai pusat merupakan aparatur Bank Indonesia yang ditempatkan secara khusus dari kantor pusat untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis dan teknis kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan koordinasi lintas instansi. Dalam proses restrukturisasi pasca penutupan kantor cabang di luar Jayapura, kedua kelompok ini mengalami penyesuaian tugas sesuai dengan karakteristik dan tanggung jawab masing-masing.

Informasi mengenai kondisi kepegawaian KCBI di wilayah Papua pada periode transisi ini dapat ditemukan, antara lain, dalam laporan perjalanan dinas Team Penindjauan Irian Barat kepada Kepala Urusan Personalia Bank Indonesia, tertanggal 24 September 1969. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa seluruh pegawai lokal KCBI yang sebelumnya bertugas di Biak, Sorong, Manokwari, dan Merauke, terhitung mulai 1 September 1969, secara resmi dialihkan penugasannya menjadi pegawai Bank Ekspor-Impor Indonesia.¹⁶

Secara administratif, para pegawai tersebut diberhentikan

15 "Bahan Pidato Direksi Bank Indonesia Berhubung dengan Penyerahan Kantor-Kantor Tjabang Bank Indonesia di Irian Barat kepada Bank Ekspor Impor Indonesia," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1969.

16 "Laporan Perjalanan Dinas Team Penindjauan Irian Barat kepada Kepala Urusan Personalia Bank Indonesia," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1969.

dengan hormat dari Bank Indonesia, untuk kemudian menjalankan tugas baru sebagai pegawai Bank Ekspor-Impor Indonesia. Hal tersebut tercantum pada surat keterangan yang didalamnya menyatakan bahwa

“...mereka telah bekerdja di Bank Indonesia dan diberhentikan dengan hormat karena mendjadi pegawai2 Bank Ekspor impor Indonesia dan Direksi Bank Indonesia mengutjapkan terima kasih atas segala bantuan dan djasa2-nja kepada Bank.”¹⁷

Lebih lanjut, dalam surat keterangan tersebut juga dicantumkan informasi mengenai masa dinas serta keterangan administratif lainnya terkait masing-masing pegawai. Hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa dalam skema penyesuaian ini, masa kerja para pegawai lokal selama bertugas di BI tetap diakui dan dihargai sebagai bagian dari masa kerja mereka di Bank Ekspor-Impor Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan adanya upaya untuk menjaga kontinuitas hak kepegawaian dan memberikan kepastian status bagi para pegawai yang terdampak oleh proses alih tugas tersebut.¹⁸

Dalam implementasinya, proses peralihan tugas kepegawaian dari BI ke Bank Ekspor-Impor Indonesia tidak sepenuhnya berjalan mulus. Masih merujuk pada laporan yang sama, tercatat adanya sejumlah dinamika, salah satunya terkait keputusan seorang pegawai lokal bernama Atmo Suwito. Ia secara tegas memilih untuk tidak mengikuti alih status ke Bank Ekspor-Impor dan justru mengajukan mutasi ke KCBI Jember, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Direksi BI. Pilihan ini mencerminkan bahwa tidak semua pegawai bersedia diberhentikan dari status

17 “Laporan Perjalanan Dinas Team Peninjauan Irian Barat kepada Kepala Urusan Personalia Bank Indonesia,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1969.

18 “Bahan Pidato Direksi Bank Indonesia Berhubung dengan Penjerahan Kantor2 Tjabang Bank Indonesia di Irian Barat kepada Bank Ekspor Impor Indonesia,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1969.

pegawai BI demi bergabung dengan institusi baru. Atmo Suwito bahkan rela menanggung sendiri biaya kepindahannya demi tetap mempertahankan kedudukannya sebagai pegawai BI.¹⁹

Permasalahan lain yang turut mencuat dalam proses peralihan adalah menyangkut hak asuransi dan jaminan kesehatan para pegawai. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah milik Soedirdjo, seorang pejabat lokal eks-KCBI Manokwari, yang secara administratif tercatat sebagai pegawai Bank Ekspor-Impor Indonesia sejak 1 September 1969. Namun demikian, sejak awal Juli 1969, Soedirdjo tengah menjalani perawatan medis di Jakarta atas izin dari BI Pusat. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan pengobatan Soedirdjo pasca-peralihan status kepegawaian. Terlebih lagi, ia belum secara efektif menjalankan tugasnya di bawah institusi baru.

Menanggapi situasi tersebut, Direksi BI akhirnya mengambil keputusan strategis dengan tetap menanggung seluruh biaya pengobatan Soedirdjo, termasuk biaya perjalanan kembali ke Manokwari. Keputusan ini dilandaskan pada fakta bahwa secara operasional, Bank Ekspor-Impor Indonesia belum sepenuhnya menjalankan fungsinya di wilayah tersebut. Dengan demikian, selama institusi baru belum aktif secara fisik, tanggung jawab terhadap hak-hak pegawai yang sedang dalam masa transisi tetap berada di bawah kewenangan BI.

Berbeda dengan pegawai lokal yang sebagian besar dialih-tugaskan menjadi pegawai Bank Ekspor-Impor Indonesia, sebagian besar pegawai penempatan Kantor Pusat—yang dikenal sebagai *home staff*—memilih untuk ditarik kembali dari wilayah kerja BI di Papua. Padahal, mereka sebenarnya juga memperoleh kesempatan untuk bergabung dan melanjutkan karier di Bank Ekspor-Impor Indonesia. Meski demikian, terdapat sejumlah nama yang memilih

19 "Laporan Perjalanan Dinas Team Peninjauan Irian Barat kepada Kepala Urusan Personalia Bank Indonesia," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1969.

untuk tetap bertugas di institusi baru tersebut. Di antaranya adalah Jozef Wai (eks Pemegang Buku BI Jayapura), Tarjono (eks Tata Usaha BI Biak), Madi Soetrisno (eks Kasir BI Biak), J.N. Soemokil (Pemegang Buku Pembantu BI Biak), serta Kristiono Djaja (eks Kuasa Kas BI Merauke). Adapun daftar lengkap *home staff* yang memilih untuk tidak bergabung dengan Bank Ekspor-Import Indonesia tersedia dalam data berikut ini:

Tabel 6.2. Daftar Nama Pegawai yang Tidak Dialihkan ke Bank Ekspor-Import Indonesia

Nama Pegawai	Jabatan	KCBI
M.A Soerjadi	Pemimpin Cabang	Biak
C.R. Danaprawira	Pemimpin Cabang	Sorong
Pariman Herryman	Kuasa Kas	Sorong
J.W. Soesilo	Kasir	Sorong
Niman	Kasir	Sorong
Hardjo Santoso	Pemimpin Cabang	Manokwari
Roeslan Ahmadi	Kuasa Kas	Manokwari
J.H. Halauwet	Pemegang Buku Pembantu	Manokwari
T.H. Kerdiat	Kasir	Manokwari
L.A.U.A Pattylaka	Pegawai Tata Usaha	Manokwari
Eko Tjipto S.H.	Pemimpin Cabang	Merauke
Ramlan Rafani	Pemegang Buku Pembantu	Merauke

Sumber: Diolah dari "Laporan Perjalanan Dinas Team Penindjauan Irian Barat kepada Kepala Urusan Personalia Bank Indonesia," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1969.

Berdasarkan data yang tersedia, hampir seluruh pegawai yang tercantum dalam daftar tersebut ditarik penugasannya dari wilayah Papua, kecuali Pariman Herryman yang kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Kuasa Kas Bank Indonesia di Jayapura. Meski demikian, tidak semua pegawai langsung meninggalkan Papua setelah keputusan penarikan dikeluarkan.

Beberapa di antaranya mengajukan penundaan karena alasan keluarga. Misalnya, Hardjo Santoso, mantan Pemimpin KCBI Manokwari, baru kembali ke tempat tugas berikutnya pada akhir November 1969—padahal semestinya ia ditarik sejak 1 September—karena harus menunggu bayinya cukup kuat untuk melakukan perjalanan udara. Situasi serupa juga dialami oleh J.W. Soesilo, mantan kasir KCBI Sorong, yang mengajukan permohonan penundaan hingga akhir Oktober 1969 demi mendampingi anak-anaknya menjalani ujian kenaikan kelas di tingkat SD dan SMP.

Dengan ditariknya sebagian besar pegawai dari wilayah Papua, KCBI Jayapura yang sejak 1 September 1969 menjadi satu-satunya representasi Bank Indonesia di Papua, resmi dipimpin oleh R. Soejoto. Untuk memperkuat struktur organisasi, turut ditugaskan Soediono dan Pariman Herryman—mantan Kuasa Kas KCBI Sorong—sebagai Kuasa Kas KCBI Jayapura, serta Sjahial Djosan sebagai staf Tata Usaha. Sementara itu, beberapa *home staff* lainnya tetap melanjutkan penugasannya di Kantor Kas Remise Biak sesuai Keputusan Kantor Pusat BI. Soeparman S.H. ditunjuk sebagai Pemimpin Cabang Pengganti, sedangkan posisi kasir dipercayakan kepada Dodot Roekhido, mantan Kasir KCBI Manokwari.²⁰



Gambar 6.4. Bagan Organisasi dan Personalia Kantor Cabang Bank Indonesia – Jayapura.

Sumber: “Laporan Perjalanan Dinas Team Penindjauan Irian Barat kepada Kepala Urusan Personalia Bank Indonesia,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1969.

20 “Laporan Perjalanan Dinas Team Penindjauan Irian Barat kepada Kepala Urusan Personalia Bank Indonesia,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1969.

Terlepas dari penyesuaian tugas yang telah dilakukan terhadap pegawai lokal maupun *home staff*, Kantor Kas Remise Biak yang dibentuk untuk mendukung fungsi moneter KCBI Jayapura ternyata masih menghadapi kekurangan tenaga kerja, khususnya dalam bidang teknis lapangan. Salah satu kebutuhan yang mendesak adalah seorang pengemudi (sopir), posisi yang tidak tercantum dalam formasi resmi sesuai ketetapan dari BI Pusat. Ketika KCBI Jayapura mengajukan permohonan tambahan pegawai melalui memo ke BI Pusat di Jakarta, permintaan tersebut belum dapat langsung dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya skema rekrutmen yang sesuai, serta situasi internal BI Pusat yang saat itu sedang difokuskan pada proses ‘pembersihan pegawai’ dari unsur-unsur yang terindikasi terlibat dalam peristiwa G30S. Dalam konteks tersebut, BI Pusat lebih mengutamakan pelaksanaan *clearance test* bagi pegawai yang ada, dibanding membuka rekrutmen baru. Sebagai tindak lanjut, BI Jayapura kemudian diberi mandat untuk membentuk sebuah tim khusus yang dinamai “Team Screening Cabang Bank Indonesia Jayapura.”

B.2. Pembentukan Tim Skrining KCBI Jayapura

Instruksi terkait dengan pembentukan Tim Skrining di KCBI Jayapura merupakan bagian dari *grand design* Pemerintah Orde Baru dalam upaya memulihkan keamanan dan ketertiban pasca meletusnya peristiwa G30S/1965, seperti yang tercantum pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1969 tentang Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Arahan pembentukan Team Screening Cabang sebenarnya sudah disampaikan oleh pimpinan BI Pusat sejak Juni 1969, melalui sebuah memo No. 2/GBI/Biro 69 tanggal 12 Juni 1969. Namun, karena proses pembentukan team yang cukup memakan waktu lama, juga karena KCBI di wilayah Papua pada saat itu sedang dalam proses reorganisasi, maka arahan tersebut baru dapat

ditindaklanjuti setelah September 1969.²¹

Langkah awal pembentukan Team Screening KCBI Jayapura dimulai dengan konsultasi antara Pemimpin KCBI Jayapura, R. Soejoto, dan Tim Screening Daerah (Teningda) wilayah Papua. Dalam konsultasi tersebut, R. Soejoto menyerahkan hasil *clearance test* pribadinya kepada Teningda sebagai dasar pertimbangan. Setelah hasil tersebut disetujui, barulah Pemimpin Cabang memperoleh kewenangan untuk membentuk tim dan memilih anggota-anggotanya. Dalam proses pemilihan, ketua tim diperkenankan melakukan *clearance test* terhadap calon anggota, dengan mempertimbangkan kesiapan serta kelayakan ideologis dan mental mereka untuk menjalankan tugas. Selanjutnya, susunan anggota yang telah diseleksi akan dilaporkan kembali kepada Direksi BI untuk memperoleh pengesahan resmi.²²

Pada bulan Oktober 1969, pimpinan KCBI Jayapura secara resmi menyampaikan surat kepada Direksi BI di Jakarta mengenai susunan Team Screening KCBI Jayapura. Susunan ini telah memperoleh persetujuan dari Panglima Daerah Militer XVII/Tjendrawasih, yang saat itu juga menjabat sebagai Pelaksana Khusus (Laksus) Panglima Komando untuk Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Daerah Irian Barat. Adapun susunan Tim Screening NCBI Jayapura tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Ketua merangkap anggota : R. Soejoto (Pemimpin KCBI Jayapura)

21 "Surat Menyurat antara BI Jayapura dengan BI Pusat, No. 2/5/BIRO/Sk/Direksi Bank Indonesia tentang Team Screening Tjabang," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*; KODAM V/Jayakarta, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan KODAM V/JAYA*. (Jakarta: Dinas Sejarah Militer, 1974), hlm. 388.

22 "Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Team Screening Kantor Tjabang Bank Indonesia di Daerah," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1969.

23 "Surat Menyurat antara BI Jayapura dengan BI Pusat, No. 2/5/BIRO/Sk/Direksi Bank Indonesia tentang Team Screening Tjabang," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

2. Sekretaris merangkap anggota : Soediono (Kuasa Kas KCBI Jayapura)
3. Anggota : Sjahrial Djosan (Staf Tata Usaha KCBI Jayapura)

Sebagai pelaksana di tingkat kantor cabang, Team Screening Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran dan ketepatan proses *clearance test* bagi seluruh pegawai. Tujuan utama dari uji kelayakan ini adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai latar belakang pribadi dan organisasi setiap pegawai, guna mengidentifikasi potensi keterkaitan dengan organisasi atau aktivitas politik tertentu, khususnya pasca peristiwa G30S.

Clearance test dilakukan melalui pengisian formulir yang mencakup sejumlah pertanyaan dan harus diselesaikan dalam waktu tiga jam. Formulir ini terdiri atas lima bagian utama: identitas pribadi, riwayat hidup, sikap mental, keterlibatan dalam G30S, dan pandangan terhadap Orde Baru. Setelah formulir dikumpulkan, Team Screening bertugas memverifikasi kelengkapan isian. Apabila ditemukan bagian yang belum terisi secara lengkap atau menimbulkan pertanyaan, tim berwenang untuk melakukan wawancara langsung terhadap pegawai terkait.²⁴

Pada tahap berikutnya, Tim Screening KCBI Jayapura bertugas melaporkan seluruh hasil kerja mereka—termasuk laporan tertulis, data informasi, serta hasil wawancara atau integrasi pegawai—kepada Team Screening Daerah (Teningda) untuk kemudian dinilai oleh Laksus Pangkopkamtib. Tim ini juga diwajibkan menyusun laporan periodik berupa laporan triwulanan dan tahunan yang disampaikan ke Kantor Pusat BI di Jakarta, dengan tembusan kepada Teningda dan Tim Screening Perbankan.²⁵

24 "Penelitian Clearance Test Para Pegawai BI Djajapura, No. 4/2/UP/Pg," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 19 Agustus 1971.

25 "Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Team Screening Kantor Tjabang Bank

Awalnya dirancang untuk menyeleksi pegawai internal yang telah bekerja, prosedur *clearance test* ini kemudian berkembang menjadi prasyarat wajib bagi setiap calon pegawai Bank Indonesia. Tugas Team Screening pun diperluas, termasuk memastikan bahwa para kandidat tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi atau gerakan yang dianggap membahayakan stabilitas nasional.

Singkat cerita, pembentukan Team Screening menjadi salah satu tugas pertama yang dilakukan oleh KCBI Jayapura pasca ditutupnya kantor cabang di wilayah Papua lainnya. Proses pembentukan team tersebut turut mewarnai serangkaian tahapan restrukturisasi lembaga, yang dipersiapkan untuk memperkuat formasi KCBI Jayapura sebagai representasi tunggal Bank Sentral di Papua. Secara umum, restrukturisasi ini berjalan dengan cukup lancar, meskipun tidak sepenuhnya lepas dari berbagai tantangan kecil.

Tahapan selanjutnya berfokus pada perbaikan infrastruktur dan inventarisasi aset, mengingat sebagian besar fasilitas di Biak, Merauke, Manokwari, dan Sorong telah dialihkan kepada Bank Ekspor-Impor. Dalam konteks ini, Kantor Kas Remise Biak menjadi salah satu unit yang paling membutuhkan dukungan tambahan, terutama untuk menunjang pelaksanaan fungsi moneter BI di wilayah timur Indonesia. Di sisi lain, KCBI Jayapura juga terus mengupayakan peningkatan kualitas gedung operasional guna mendukung efektivitas dan efisiensi kerja kelembagaan ke depan.

B.3. Pembangunan Infrastruktur Kantor

Sebagaimana telah diulas dalam pembahasan sebelumnya, pada masa awal operasionalnya, KCBI di wilayah Papua menggunakan gedung eks *Nederlandsche Handel-Maatschappij* (NHM). Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur terus dilakukan secara bertahap untuk menunjang aktivitas

kelembagaan. Pembangunan ini tidak hanya mencakup gedung kantor operasional, tetapi juga fasilitas rumah dinas untuk mendukung kesejahteraan pegawai. Hingga tahun 1969, pembangunan kantor cabang dan rumah dinas masih berlangsung. Akan tetapi, penutupan KCBI di Manokwari, Biak, Merauke, dan Sorong berdampak langsung pada pengalihan aset, termasuk seluruh gedung, kendaraan bermotor, serta mesin-mesin kantor kepada Bank Ekspor-Impor Indonesia.²⁶

Transisi ini ternyata menyisakan persoalan administratif, terutama dalam proses pembayaran proyek-proyek pembangunan yang belum sepenuhnya rampung. Salah satu kasus terjadi pada pembayaran termin akhir proyek pembangunan dua unit rumah karyawan KCBI Sorong. Proyek tersebut dimulai pada tahun 1969 oleh Perusahaan Negara Nindya Karya cabang Sorong berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 1/Son/1/UM/Bg tanggal 21 Oktober 1968. Dalam kontrak itu, disebutkan bahwa proyek ini dilaksanakan dengan sistem borongan penuh senilai IBRp270.800, dan pembayaran dibagi menjadi lima termin. Namun, proses pembayaran terakhir sempat terhambat akibat belum lengkapnya dokumen akibat peralihan kewenangan dan pengelolaan aset antara kedua institusi.²⁷

Angsuran kelima pembangunan rumah dinas pegawai KCBI Sorong, bila merujuk kontrak kerja dengan PN Nindya Karya, seharusnya dibayarkan selambat-lambatnya pada tahun 1969.

26 “Pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia 1968 di wilayah Irian Barat,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 9 Desember 1968.

27 Dalam kontrak pembangunan tersebut, disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan dalam lima termin. Angsuran pertama sebesar 40% dari nilai kontrak, yakni IBRp108.320. Angsuran kedua sebesar 25% atau senilai IBRp67.700, kemudian diikuti oleh angsuran ketiga sebesar 20% senilai IBRp54.160. Angsuran keempat sebesar 10% atau IBRp27.080, dan angsuran kelima sebagai pembayaran terakhir sebesar 5%, yaitu IBRp13.540. Lihat “Surat Perdjudjian Antara Bank Indonesia Tjabang Sorong dengan P.N. Nindya Karya Perwakilan Sorong tentang Pelaksanaan Pembangunan 2 Buah Rumah,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 1/Son/1/UM/BG.

Namun, pada tahun 1971, PN Nindya Karya baru mengirimkan tagihan termin akhir sebesar IBRp13.540. Tagihan tersebut diterima oleh KCBI Jayapura, sebagai satu-satunya kantor cabang BI yang masih aktif di wilayah Papua. Situasi ini menimbulkan kebingungan, karena sejak 31 Agustus 1969, bangunan yang dimaksud telah resmi dialihkan kepada Bank Ekspor-Impor Indonesia. Pertanyaan yang mengemuka adalah: kepada siapa tanggung jawab pembayaran ini harus dialihkan?²⁸ Mengingat mantan Pemimpin KCBI Sorong, C.R. Danaprawira, telah ditugaskan ke Jakarta, maka KCBI Jayapura meneruskan persoalan ini ke Kantor Pusat. Setelah melalui serangkaian diskusi dan surat-menyurat, akhirnya pada Mei 1972, BI menyetujui untuk melunasi sisa pembayaran tersebut kepada PN Nindya Karya.²⁹

Masalah lain yang turut mencuat adalah terbatasnya fasilitas rumah dinas untuk pegawai Kantor Kas Remise BI Biak. Pasca alih aset dari BI Biak kepada Bank Ekspor-Impor, kantor BI hanya menyisakan satu rumah dinas dan satu paviliun kecil, yang telah ditempati oleh Soeparman beserta keluarganya. Sementara itu, dua pegawai *home staff* lainnya—Darmojo dan Dodot Rhoekido—juga memerlukan tempat tinggal dinas. Sembari menunggu pembangunan rumah dinas baru, keduanya terpaksa ditempatkan sementara di hotel, dengan biaya operasional yang tentu menjadi beban tambahan bagi institusi.³⁰

Di sisi lain, KCBI Jayapura terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung operasional lembaga, mencakup renovasi gedung kantor dan rumah dinas pegawai. Pada tahun 1971, renovasi dilakukan terhadap rumah dinas Pemimpin Cabang,

28 "Tagihan Pembayaran Termijn Terachir Kontrak Pembangunan 2 Buah Rumah Pegawai Ex Bank Indonesia Sorong, No. 4/19/UPI/PT," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

29 "Termijn Terachir Dua Buah Rumah di Sorong, No. 5/1/UM/Bg," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1972.

30 "Laporan Perjalanan Dinas Team Peninjauan Irian Barat kepada Kepala Urusan Personalia Bank Indonesia," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1969.



Gambar 6.5. Proses Pembangunan KCBI Jayapura sekitar tahun 1971 – 1974.

Sumber: Koleksi Arsip Bank Indonesia.

sementara gedung operasional kantor KCBI Jayapura turut mengalami pembaruan, khususnya pada bagian fasad (tampak depan). Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Biro Arsitek dan Insinyur Gumarna yang berkedudukan di Bandung dan Jakarta, dengan pelaksana konstruksi dari PT Utama Karya. Upaya pengembangan fisik ini berlanjut hingga tahun 1974, saat KCBI Jayapura membangun tembok pembatas mengelilingi kompleks kantor sebagai bagian dari pengamanan dan penataan lingkungan kantor.

Seiring dengan dinamika pembangunan nasional di era Orde Baru, peran lembaga-lembaga negara turut mengalami penyesuaian agar selaras dengan arah kebijakan ekonomi makro yang telah digariskan pemerintah. Sebagai lembaga keuangan negara yang strategis, KCBI Jayapura pun berada dalam pusaran perubahan tersebut. Kebutuhan untuk menata ulang sistem keuangan regional, termasuk peran dan fungsi lembaga perbankan, menjadi agenda penting dalam mewujudkan stabilitas moneter dan fiskal jangka panjang.

C. Tugas dan Fungsi Baru KCBI Jayapura

Dalam menjalankan peran barunya sebagai perwakilan Bank Sentral di Papua, KCBI Jayapura mempunyai berbagai fungsi baru, di antaranya adalah sebagai penasihat Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam bidang ekonomi dan moneter, membantu penanggulangan masalah-masalah ekonomi di wilayah ini, serta menjadi *financial-agent* dari Pemerintah Pusat. Selain itu, KCBI Jayapura juga tetap bertanggungjawab dalam mengawasi fungsi bank-bank milik pemerintah dan perkembangan moneter di wilayah Papua.

Terkait dengan fungsi pengawasan perbankan, Bank Indonesia Jayapura secara rutin menyusun laporan berkala mengenai kondisi perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya di wilayah Irian

Barat. Pada dekade 1970-an, misalnya, KCBI Jayapura mencatat bahwa terdapat dua bank utama yang aktif beroperasi di wilayah tersebut, yakni Bank Ekspor-Impor Indonesia (BEII) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Jaringan BEII tersebar cukup luas di berbagai kota seperti Jayapura, Tembagapura, Manokwari, Sorong, Merauke, Fak-Fak, Nabire, dan Biak. Sementara itu, BPD memiliki cakupan yang lebih terbatas, dengan dua kantor utama yang berlokasi di Jayapura dan Sorong.³¹

Tabel 6.3. Jumlah Kantor Bank di Wilayah Kerja Kantor Cabang BI Jayapura pada 1977

No.	Jenis/Kelompok Bank	Kt. Pusat	Kt. Cabang	Kt. Daerah	Jumlah
1	Bank Umum	-	10	-	10
	Pemerintah	-	-	-	-
	Swasta	-	-	-	-
	Nasional Devisa	-	-	-	-
	Nasional non-Devisa	-	-	-	-
2	Bank Pembangunan	-	-	-	-
	Pemerintah	-	-	-	-
	Daerah	-	-	-	-
3	Bank Tabungan	-	-	-	-
	Pemerintah	-	-	-	-
	Swasta	-	-	-	-
4	Bank-Bank Sekunder	-	-	-	-
	Bank Desa	-	-	-	-
	Lambung Desa	-	-	-	-
	Bank Pasar	-	-	-	-
	Bank Koperasi	-	-	-	-

Sumber: "Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1981," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1981.

31 "Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1980-an," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

Selain BPD dan BEII, di Papua juga berdiri sebuah lembaga pembiayaan bernama *The Irian Jaya Joint Development Foundation* (JDF). Lembaga ini didirikan pada 21 Desember 1970 oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh J.A. Sereh, bekerja sama dengan FUNDWI (*Fund of the United Nations for the Development of West Irian*)/UNDP (*United Nations Development Program*). Dengan modal awal sebesar Rp37,8 juta dan US\$ 100.000, JDF bertujuan untuk mendukung pencapaian pembangunan ekonomi di Papua melalui penyediaan persiapan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, JDF menyelenggarakan berbagai program seperti riset, penanaman modal, bantuan teknis, serta menjalin kerja sama dengan BAPPEDA setempat.³²

Salah satu fokus perhatian Pemerintah Indonesia, BI dan juga FUNDWI adalah sektor pendidikan. Pemerintah Indonesia dan BI, melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), memainkan peran utama dalam pengembangan infrastruktur pendidikan dasar dan tinggi. Alokasi dana dalam skema Repelita difokuskan pada proyek-proyek berskala besar seperti rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan peralatan olahraga, serta pembangunan sarana dan prasarana Universitas Cenderawasih. Salah satu capaian signifikan adalah pembangunan asrama, ruang kuliah, dan museum Universitas Cenderawasih dengan alokasi dana sebesar Rp 97,1 juta. Selain itu, pemerintah juga mengerahkan anggaran Satgas untuk mendistribusikan 200 guru ke wilayah pegunungan, menjangkau daerah-daerah terpencil yang minim tenaga pengajar.³³

Sementara itu, FUNDWI turut melengkapi inisiatif Pemerintah Indonesia dengan pendekatan teknis dan berbasis kapasitas kelembagaan. Fokus FUNDWI lebih diarahkan pada pengembangan

32 "Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1980-an," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

33 Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part I," hlm. 50.

kualitas pendidikan melalui program-program seperti pelatihan guru, pembangunan sekolah contoh, dukungan terhadap perencanaan pendidikan, serta pengadaan pusat pelatihan kejuruan. FUNDWI juga berkontribusi terhadap Universitas Cenderawasih dengan menyediakan buku, menunjuk tenaga profesional, dan memberikan beasiswa bagi program studi antropologi. Meskipun alokasi dananya lebih kecil dibandingkan dengan program pemerintah, intervensi FUNDWI menyentuh aspek strategis yang memperkuat keberlanjutan pendidikan di Papua.

Tabel 6.4. Alokasi Dana Pembangunan untuk Sektor Pendidikan di Papua, 1969-1973

Proyek	Program	Alokasi Dana	Kemajuan
<i>Dalam juta rupiah (Rp.)</i>			
Rehabilitasi Gedung Sekolah	Rencana Pembangunan Lima Tahun	30,5	Rehabilitasi dan perabotan selesai untuk sekitar enam sekolah.
Peralatan Olahraga untuk Sekolah	Rencana Pembangunan Lima Tahun	7,5	Selesai.
Universitas Cenderawasih	Rencana Pembangunan Lima Tahun	97,1	Asrama dan ruang kuliah telah dibangun, museum dalam tahap pembangunan, dan biaya berlangganan jurnal asing telah dibayar.
Pengadaan Guru ke Pegunungan	Satgas	n.a.	Anggaran Satgas membayar 200 guru di sekolah pegunungan.
<i>Dalam juta dollar (\$)</i>			
Pusat Pelatihan Kejuruan	FUNDWI	1,56	Satu pusat pelatihan kejuruan telah didirikan di Jayapura dan satu direncanakan untuk Manokwari.

Perencanaan dan Administrasi Pendidikan	FUNDWI	0,18	Seorang ahli dipekerjakan untuk memberikan saran perencanaan dan koordinasi pendidikan.
Gedung Sekolah dan Sekolah Contoh	FUNDWI	0,09	Satu sekolah contoh telah selesai dibangun dan satu lagi sedang dalam tahap pembangunan.
Pelatihan Guru	FUNDWI	0,61	Pemberian saran ahli, peralatan untuk perguruan guru, dan bantuan pelatihan guru telah dimulai.
Universitas Cenderawasih	FUNDWI	0,24	Penunjukan profesional dan beasiswa di Institut Antropologi telah dibiayai, dan buku-buku telah disediakan.
Pengembangan Komunitas	FUNDWI	0,11	Peralatan dan saran untuk pengembangan komunitas telah disediakan.

Sumber: Ross Garnaut & Chris Manning, "An Economic Survey of West Irian. Part 1," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 8:3, hlm. 50.

Memasuki Repelita ke-2, struktur pemerintahan dan pembangunan di Irian Barat disesuaikan atau disamakan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, seperti penghapusan sistem distrik di Irian Barat. Lantaran masa kerja FUNDWI berakhir pada tahun 1973, seluruh proyek pembangunan di sana kemudian diteruskan oleh United Nations Development Program (UNDP). Adapun untuk proyek-proyek yang sudah dirampungkan, selanjutnya diserahkan kepada departemen-departemen bersangkutan maupun secara sektoral.³⁴

Sebagai perwakilan Bank Sentral di daerah, KCBI Jayapura secara berkala melakukan pengawasan terhadap kondisi dan

34 "Irian Barat Disamakan," *Kompas*, 19 Oktober 1972.

kinerja BEII, BPD, serta JDF. Pengawasan khusus diberikan kepada BEII Jayapura, mengingat lembaga ini menggantikan peran komersial BI di wilayah tersebut. Pada tahun 1979, KCBI Jayapura mencatat bahwa hanya sekitar 30% dana BEII Jayapura digunakan untuk penyaluran kredit, sementara selebihnya dikembalikan ke Kantor Pusat di Jakarta. Minimnya penyaluran kredit ini disebabkan oleh masih terbatasnya aktivitas ekonomi serta karakteristik dunia usaha lokal yang belum berkembang optimal.³⁵

Selain itu, BEII Jayapura juga menghadapi persoalan dalam pelayanan. Di satu sisi, bank ini memiliki tanggung jawab sebagai pemegang kas pemerintah daerah, sementara di sisi lain, jumlah nasabah terus bertambah seiring meningkatnya minat masyarakat untuk menabung. Kombinasi antara keterbatasan jumlah pegawai dan sempitnya ruang kerja menyebabkan pelayanan menjadi lambat. Penambahan pegawai pun sulit direalisasikan karena keterbatasan fasilitas pendukung di kantor yang ada.³⁶

Tingginya antusiasme masyarakat Papua untuk menabung ternyata membawa dampak yang tak sepenuhnya positif. Pada tahun 1979, KCBI Jayapura mengungkap kasus manipulasi tabungan nasabah yang melibatkan sejumlah pegawai Kantor Cabang BEII Jayapura. Berdasarkan hasil penyelidikan, praktik manipulatif ini telah berlangsung sejak 1975 namun baru terdeteksi pada Mei 1979, saat dilakukan proses pencocokan (*seldering*) antara kartu-kartu Tabanas dan saldo buku besar. Nilai kerugian akibat manipulasi tersebut mencapai Rp76.424.750. Modus operandi para pelaku mencakup pengubahan angka setoran dalam slip, pengabaian pencatatan dalam buku kas, serta pemalsuan kwitansi penarikan dan tanda tangan nasabah. Menindaklanjuti temuan ini, KCBI Jayapura melayangkan surat No.

35 "Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1980-an," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

36 "Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1980-an: Bagian Perbankan," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

12/73/UPPB/PBD tanggal 28 November 1979 kepada Direksi BEII Pusat, yang kemudian menindaklanjutinya dengan penyelidikan internal lebih mendalam.³⁷

Selain BEII, KCBI Jayapura juga melakukan pengawasan rutin terhadap BPD dan JDF. Sejak beberapa tahun terakhir ketika laporan disusun, BPD mengalami kesulitan struktural, mulai dari lemahnya kompetensi pimpinan hingga belum terpenuhinya modal dari pemerintah daerah. Bahkan, hampir 90% kredit yang disalurkan mengalami kemacetan. JDF menghadapi kondisi serupa, dengan sekitar 60% kreditnya mengalami tunggakan, khususnya di sektor pertanian.³⁸

Dalam kasus BPD, KCBI Jayapura mencatat adanya potensi konflik kepentingan dalam pengangkatan direktur utamanya, yang diketahui memiliki sejumlah usaha pribadi dan keluarga yang memperoleh fasilitas kredit dari BPD. Surat teguran pun dikeluarkan oleh KCBI Jayapura melalui surat No. 12/8 UPPB/PPTR tertanggal 17 September 1979 kepada Gubernur/KDH Tingkat I Irian Barat, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada pemerintah daerah.³⁹

Di wilayah pedalaman seperti Wamena, JDF menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang beroperasi, dengan jumlah nasabah sekitar 60 orang. Kegiatan JDF didukung oleh Kantor Pos yang menangani transfer dana dan penerimaan tabungan. Namun, keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan lambannya pelayanan, termasuk dalam penarikan gaji, pengiriman uang, penukaran uang, penyimpanan tabungan, dan pembiayaan. Kondisi ini mengulang permasalahan serupa seperti yang terjadi di Jayapura.

Sementara itu, Sorong menunjukkan dinamika ekonomi yang

37 "Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1980-an: Bagian Perbankan," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

38 "Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1980-an: Bagian Perbankan," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

39 "Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1980-an: Bagian Perbankan," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

lebih aktif. Di wilayah ini, BEII, BPD, dan JDF beroperasi secara bersamaan. Namun demikian, BEII Sorong juga menghadapi kendala serupa dalam penyaluran kredit, akibat minimnya aktivitas ekonomi setempat. Sejak 1976, sekitar 39% dana BEII Sorong setiap tahunnya dikembalikan ke kantor pusat karena tidak terserap secara optimal. Di sisi lain, BPD Sorong dibayangi masalah tunggakan kredit dan persoalan manajemen pegawai.⁴⁰

Dalam kapasitasnya sebagai representasi Bank Sentral, KCBI Jayapura turut memberikan rekomendasi dan masukan kebijakan kepada pemerintah daerah. Di Genyem, misalnya, KCBI Jayapura merekomendasikan penghentian kegiatan Badan Kerjasama Kredit Kecamatan (BK3), sebuah unit khusus BPD yang bergerak di bidang kredit konsumsi, karena tingginya tunggakan serta ketidaksesuaian penyaluran dana. Atas saran BI, BK3 kemudian diubah fungsinya menjadi lembaga penghubung yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan.⁴¹

Memasuki awal 1980-an, kerja sama antara Bank Indonesia dengan Universitas Cenderawasih terus menguat. KCBI Jayapura beberapa kali menyalurkan bantuan untuk pengadaan koleksi buku dan pengembangan sarana Perpustakaan Universitas Cenderawasih. Dukungan ini diberikan sebagai bagian dari komitmen BI dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia, sekaligus memperluas akses informasi dan literasi akademik bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Selain itu, hal ini menjadi salah satu wujud kontribusi nyata BI dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Papua.

Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan perhatian BI terhadap aspek sosial dalam pembangunan, tetapi juga menegaskan

40 "Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1980-an: Bagian Perbankan," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

41 "Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1980-an: Bagian Perbankan," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

posisinya sebagai *financial agent* pemerintah yang turut berperan dalam mendorong kemajuan sektor strategis daerah, termasuk pendidikan. Dalam kerangka pembangunan nasional, strategi seperti ini memperkuat fungsi BI sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas moneter dan sistem keuangan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menciptakan fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah terdepan dan terluar seperti Papua.

D. KCBI Jayapura dan Papua dalam Gerak Pembangunan Nasional

Seperti sudah disinggung sebelumnya, perubahan fungsi dan peran KCBI Jayapura sebagai perwakilan Bank Sentral di wilayah Papua tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika politik dan ekonomi nasional. Pada tahun 1968, bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1968 mengenai pelepasan aktivitas komersial BI di Papua, pemerintah Orde Baru juga mulai merancang arah pembangunan nasional melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita I (1969–1974), yang dicanangkan pada awal 1969, merupakan langkah awal dalam menata kembali struktur perekonomian Indonesia yang sempat mengalami kemerosotan tajam akibat gejolak politik dan inflasi tinggi di era sebelumnya. Rencana ini mencakup sasaran-sasaran makroekonomi, sektoral, sosial, dan demografis dalam satu kerangka analisis pembangunan nasional yang terkoordinasi dan berorientasi pada stabilisasi serta pertumbuhan ekonomi.⁴²

Perekonomian Papua pada periode ini bertumpu pada tiga sektor utama, yakni hasil hutan, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Dengan lebih dari 75% wilayahnya tertutup hutan

42 Hal Hill, *The Indonesian Economy* (Second Edition). (Cambridge University Press: 2000), hlm. 97.

hujan tropis, Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Potensi hutan Papua mencakup berbagai jenis kayu bernilai tinggi seperti agathis, kayu besi, atoa, dan kayu kuku, serta produk hasil hutan non-kayu seperti damar dan kopal. Hutan lindung seluas 170.000 hektar dan kawasan suaka alam seluas lebih dari 1 juta hektar menjadi indikasi pentingnya sektor ini dalam skema pembangunan daerah.

Sektor perikanan juga berperan vital dalam struktur ekonomi lokal. Dengan garis pantai yang panjang dan perairan yang kaya, wilayah seperti Sorong (termasuk perairan sekitar Pulau Kawe dan Waigeo), utara Pulau Salawati, dan Merauke menjadi pusat kegiatan nelayan. Perikanan tangkap, terutama udang laut, menjadi salah satu komoditas ekspor andalan dari wilayah ini. Di sisi lain, sektor pertanian pada masa itu masih dalam tahap awal pengembangan. Meskipun beberapa daerah transmigrasi seperti Merauke, Manokwari, Nabire, dan Jayapura telah mulai menanam padi, hasil produksinya masih terbatas untuk konsumsi rumah tangga. Ketergantungan terhadap bahan pangan dari luar daerah masih tinggi, dan upaya swasembada pangan belum dapat terwujud.

Berbeda dengan pertanian, sektor perkebunan telah menunjukkan geliat yang lebih menjanjikan. Beberapa daerah seperti Merauke (kopra dan karet), Sorong (kopra), Fak-Fak (pala), serta Serui, Manokwari, dan Jayapura (cokelat) mulai terlibat dalam kegiatan ekspor hasil perkebunan. Komoditas ekspor utama dari Papua pada periode 1970-an mencakup udang, kulit buaya, kayu, pala, dan bunga pala, yang semuanya memberikan kontribusi penting bagi pendapatan daerah maupun devisa nasional. Tabel 6.5 di bawah ini menunjukkan perkembangan volume dan nilai ekspor dari wilayah Papua dalam kurun waktu 1975–1977, mencerminkan dinamika dan kontribusi sektor-sektor utama tersebut dalam ekonomi regional.

Tabel 6.5. Perkembangan Angka Ekspor di Irian Barat Selama Tiga Tahun 1975 - 1977

No	Komoditi	1975		1976		1977	
		US\$	%	US\$	%	US\$	%
1	Udang	9.868	86	11.923	82	17.049	80
2	Pala/Bunga Pala	987	9	1.096	8	907	4
3	Kayu	140	1	420	3	1.468	7
4	Kulit Buaya	426	4	614	4	982	5
5	Ikan	-	-	330	2	805	4
6	Karet	46	-	84	1	-	-
7	Kopal	9	-	30	-	24	-
8	Troca Shell	1	-	7	-	13	-
9	Kedelai	5	-	-	-	-	-
	Jumlah	11.482	100	14.504	100	21.248	100

Sumber: "Laporan Bank Indonesia Jayapura," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1978.

Pada tahun 1975, komoditas udang menjadi primadona ekspor Papua dengan nilai mencapai 9.868 ribu US\$, atau setara dengan 86% dari total nilai ekspor daerah tersebut. Dominasi udang terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan peningkatan nilai ekspor menjadi 11.923 ribu US\$ (82%) pada 1976 dan mencapai puncaknya pada 1977 sebesar 17.409 ribu US\$ (82%). Data ini menegaskan bahwa perikanan, khususnya sektor udang, menjadi pilar utama ekonomi ekspor Papua selama pertengahan 1970-an.

Selain udang, komoditas pala dan bunga pala juga menunjukkan kontribusi yang stabil, meskipun nilainya relatif lebih kecil. Pada 1975 nilai ekspor komoditas ini tercatat sebesar 987 ribu US\$, kemudian meningkat menjadi 1.095 ribu US\$ pada 1976 dan 1.097 ribu US\$ pada 1977. Stabilitas ini mencerminkan peran penting sektor perkebunan dalam menopang perekonomian

lokal, terutama di wilayah-wilayah seperti Fak-Fak yang dikenal sebagai penghasil utama pala.

Komoditas lain seperti kayu dan kulit buaya statistik perdagangannya menunjukkan fluktuasi seiring dinamika permintaan pasar internasional. Nilai ekspor kayu meningkat tajam dari 140 ribu US\$ (1975) menjadi 426 ribu US\$ (1977), mencerminkan mulai aktifnya pengelolaan potensi hutan tropis yang melimpah di wilayah ini. Sementara itu, ekspor kulit buaya relatif stagnan, meskipun tetap memiliki nilai ekonomi tersendiri sebagai produk eksotis yang memiliki pasar khusus di luar negeri.

Hal yang menarik adalah peningkatan drastis ekspor ikan selain udang, dari hanya 46 ribu US\$ pada 1975 menjadi 380 ribu US\$ pada 1977. Lonjakan ini menandakan adanya perluasan sektor perikanan ke komoditas lain dan kemungkinan meningkatnya upaya diversifikasi ekonomi daerah. Secara keseluruhan, total ekspor Papua menunjukkan pertumbuhan yang konsisten: dari 11.482 ribu US\$ (1975) menjadi 14.504 ribu US\$ (1976), dan akhirnya mencapai 21.248 ribu US\$ pada tahun 1977. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan potensi alam Papua, tetapi juga peningkatan efektivitas berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong ekspor daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional pasca era Sukarno.

Di luar sektor kehutanan, perkebunan, dan perikanan, pertambangan juga menjadi sektor yang diperhitungkan dalam struktur ekonomi Papua. Pada masa itu, tercatat dua lokasi pertambangan besar yang aktif, yaitu tambang nikel di wilayah Sorong dan Jayapura, serta tambang tembaga di Tembagapura yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Kehadiran sektor pertambangan menjadi penting karena berkontribusi pada penerimaan daerah dan menciptakan peluang kerja, meskipun tantangan sosial dan lingkungan mulai menjadi perhatian dalam dekade berikutnya.⁴³

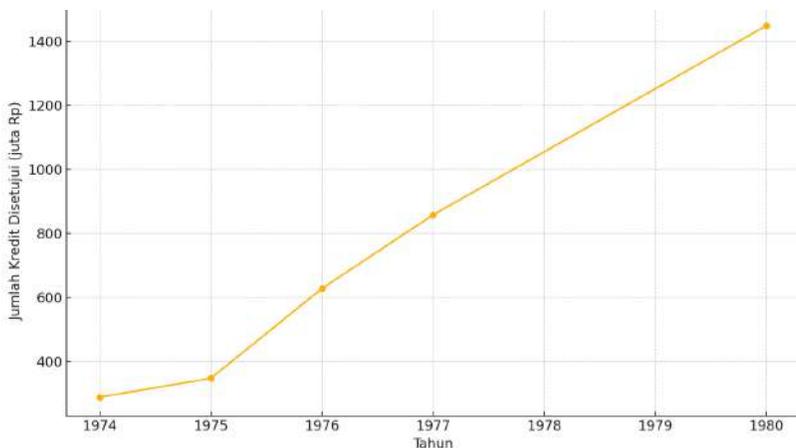
43 “Memperkenalkan Propinsi Irian Jaya,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1977.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan wilayah dan penguatan sektor-sektor ekonomi lokal, Pemerintah Orde Baru sejak Repelita I (1969–1974) mulai memperkenalkan berbagai skema pembiayaan, termasuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). KLBI menjadi instrumen penting bagi BI untuk mendorong aktivitas produksi melalui penyaluran kredit berbunga rendah. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan ini adalah program Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang menyasar pelaku usaha kecil dan menengah.⁴⁴

Program KIK memberikan pembiayaan maksimal Rp5 juta dengan bunga tetap sebesar 12% per tahun selama jangka waktu lima tahun. Dalam skema ini, BI menanggung 80% dari total kredit, sementara 20% ditanggung oleh bank pelaksana. Kredit ini ditujukan untuk perluasan kapasitas produksi barang dan jasa, dengan pengecualian sektor hiburan. Di sisi lain, KMKP ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja jangka menengah-panjang, dengan komposisi pendanaan 70% oleh BI dan 30% oleh bank pelaksana, serta tidak memiliki batasan sektor usaha.

Di Papua, penyaluran KIK dan KMKP mulai dilakukan sejak 1974 dengan melibatkan BEII sebagai mitra pelaksana. Meskipun belum terlalu besar skalanya, data menunjukkan tren pertumbuhan positif baik dari sisi jumlah nasabah maupun dana yang disalurkan. Jumlah penerima KIK/KMKP meningkat dari 126 nasabah pada 1974 menjadi 268 nasabah pada 1975. Angka ini kembali melonjak menjadi 449 pada 1976 dan mencapai 555 nasabah pada 1977. Peningkatan ini mencerminkan bertumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap akses pembiayaan produktif, sekaligus mencerminkan mulai terbangunnya infrastruktur keuangan di wilayah yang sebelumnya sangat terbatas dalam hal akses modal. Jumlah dana yang disalurkan dalam periode tersebut

44 Abdul Azis dan A. Herani Rusland, "Peranan Bank Indonesia dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," dalam *Seri Kebanksentralan No.1*, Bank Indonesia, (2009), hlm. 45.



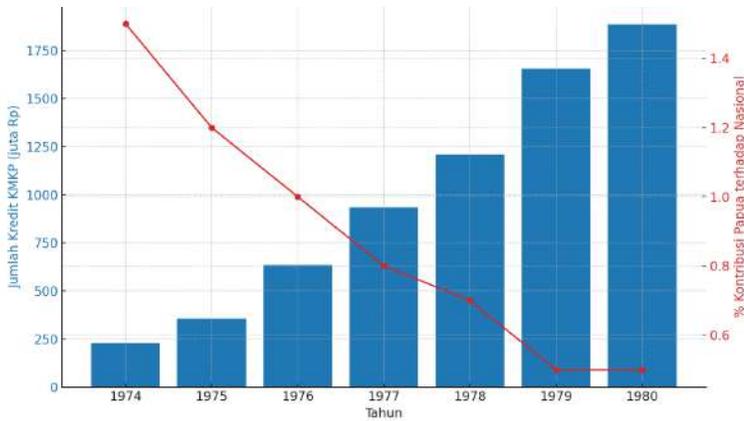
Grafik 6.1. Penyaluran Kredit Investasi Kecil (KIK) di Papua, 1974-1980

Sumber: "Laporan Kredit Investasi Kecil KCBI Jayapura," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

juga terus bertambah, sebagaimana terlihat dalam grafik 6.1.

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa sepanjang periode 1974–1980 terjadi peningkatan yang cukup stabil dalam penyaluran KIK di Papua. Sebagai pelaksana utama, BEII memainkan peran sentral dalam realisasi program ini. Pada tahun 1974, jumlah kredit yang disetujui mencapai Rp288 juta, menandai awal dari upaya konkret pemberdayaan ekonomi lokal. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 1975 mencatat kenaikan sebesar 20,5% dibandingkan tahun sebelumnya, diikuti oleh lonjakan tajam pada 1976 sebesar 80,9%, sehingga total kumulatif kredit mencapai Rp628 juta. Meski setelah 1976 laju kenaikan mulai melambat, akumulasi kredit tetap menunjukkan tren positif. Pada 1977, total kredit mencapai Rp858 juta, dan pada 1980 melonjak menjadi Rp1.450 juta dengan kenaikan tahunan sebesar 8,55%.

Tidak tercatatnya kontribusi dari Bank Pembangunan Daerah



Grafik 6.2. Perkembangan Jumlah Kredit KMKP dan Kontribusi Papua terhadap Nasional (1974-1980)

Sumber: "Laporan Kredit Modal Kerja Permanen KCBI Jayapura," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

(BPD) selama periode tersebut menegaskan dominasi BEII dalam pelaksanaan program KIK di Papua. Sementara itu, persentase kontribusi Papua terhadap total nasional menjadi indikator penting yang mencerminkan posisi strategis wilayah ini dalam peta kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah pusat. Secara umum, peningkatan penyaluran KIK di Papua mencerminkan konsistensi pemerintah dalam memperkuat ekonomi daerah melalui akses pembiayaan. Kendati laju pertumbuhan tahunan mengalami fluktuasi, tren kumulatif yang terus meningkat menunjukkan bahwa Papua mendapat perhatian serius dalam kerangka pembangunan nasional, khususnya dalam upaya integrasi ekonomi kawasan timur Indonesia dengan pusat.

Perkembangan jumlah kredit yang disetujui dalam skema KMKP secara umum menunjukkan pola yang serupa dengan KIK. Pada tahun 1974, penyaluran KMKP di wilayah kerja KCBI Jayapura mencapai Rp230 juta. Dalam tiga tahun berikutnya, terjadi

lonjakan signifikan dalam penyaluran kredit, mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal. Puncaknya terjadi pada tahun 1976, saat jumlah kumulatif kredit mencapai Rp634 juta, dengan tingkat kenaikan tahunan tertinggi sebesar 78,6%. Peningkatan ini mencerminkan dorongan besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua, khususnya pada tahap awal pelaksanaan program.

Namun demikian, setelah masa pertumbuhan awal yang cukup dinamis, laju pertumbuhan penyaluran kredit mulai melambat. Pada tahun 1977, total kumulatif kredit meningkat menjadi Rp934 juta dengan laju kenaikan 48,7%, dan terus melambat hingga tahun 1980, ketika total kumulatif kredit mencapai Rp1.885 juta, dengan kenaikan tahunan terakhir sebesar 14,0%. Melambatnya pertumbuhan ini bisa mencerminkan mulai tercapainya titik jenuh program atau munculnya tantangan struktural di tingkat lokal yang membatasi ekspansi lebih lanjut.

Dari sisi kontribusi terhadap skala nasional, peran Papua dalam total penyaluran KMKP mengalami penurunan signifikan, dari 1,5% pada tahun 1974 menjadi hanya 0,5% pada tahun 1980. Penurunan ini mencerminkan semakin ketatnya persaingan alokasi kredit secara nasional, di mana wilayah-wilayah lain mungkin memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menyerap dana kredit. Kendati demikian, skema KMKP tetap menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan ekonomi Papua. Program ini bukan hanya memperkuat peran lembaga keuangan nasional seperti Bank Ekspor-Impor Indonesia di tingkat daerah, tetapi juga memperluas akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi lokal. Secara umum, alokasi kredit perbankan di wilayah ini banyak terserap oleh sektor perdagangan dan perindustrian, meskipun sektor lain seperti pertanian dan jasa juga turut menerima dukungan pembiayaan. Data berikut akan menunjukkan perkembangan penyaluran kredit menurut sektor ekonomi di wilayah kerja KCBI Jayapura.

Tabel 6.6. Perkembangan Jumlah Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi di Wilayah Kerja Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura

Sektor ekonomi	1977	1978	1979	1980
Pertanian	594	615	259	629
Pertambangan	-	-	-	-
Perindustrian	1.313	1.309	2.518	3.683
Perdagangan	3.169	2.869	3.094	3.146
Jasa-jasa	805	939	1.049	1.805
lain-lain	550	932	1.006	1.342

Sumber: "Laporan Bank Indonesia Jayapura 1980 Bagian Moneter," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

Berdasarkan data di Tabel 6.6, terlihat bahwa alokasi penyaluran kredit perbankan di wilayah Papua selama periode 1974–1980 sebagian besar terserap oleh sektor perdagangan. Hal ini mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi rakyat, khususnya melalui pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat interaksi dan perputaran komoditas masyarakat setempat. Sektor unggulan berikutnya adalah sektor industri, yang menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sebaliknya, sektor pertanian—meskipun dianggap memiliki potensi besar—ternyata belum mampu menyerap bantuan kredit secara optimal. Salah satu penyebab utama adalah karena pada periode tersebut, pertanian di Papua masih berada dalam tahap awal pengembangan, baik dari sisi infrastruktur maupun kapasitas SDM. Sementara itu, sektor pertambangan sama sekali tidak tercatat sebagai penerima alokasi kredit perbankan, karena seluruh kebutuhan pembiayaannya umumnya dipenuhi melalui investasi langsung, baik dari modal asing maupun nasional.

Secara keseluruhan, penyaluran KIK/KMKP di wilayah kerja KCBI Jayapura sepanjang periode tersebut mencerminkan dinamika pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung

di Papua. Program ini, meskipun dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan geografis, menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah berupaya mengintegrasikan wilayah timur Indonesia ke dalam arus pembangunan nasional. Skema ini juga memperlihatkan peran penting KIK/KMKP sebagai instrumen utama dalam mendukung pemerataan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan pusat.

Sebagai bagian dari kerangka besar Repelita, pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk pengembangan ekonomi Papua setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 1980/1981 misalnya, Provinsi Papua memperoleh dana pembangunan proyek Pelita sebesar Rp31.045.612.500. Dana tersebut disalurkan melalui 27 kementerian dan lembaga non-departemen, dan mencakup berbagai sektor strategis. Alokasi anggaran meliputi proyek-proyek infrastruktur seperti pembukaan jalan, pembangunan jaringan listrik, dan fasilitas keagamaan; sektor pertanian yang mencakup pembangunan jaringan irigasi, pembinaan pertanian pangan, serta penyiapan lahan transmigrasi; dan sektor pendidikan serta sosial masyarakat, termasuk pembinaan suku terasing, bantuan bencana alam, pengembangan perguruan tinggi, pemberdayaan kelompok rentan seperti tuna wisma, serta pengembangan industri kecil dan ekonomi lemah.⁴⁵

Selain bersumber dari kredit perbankan dan alokasi anggaran pemerintah, pembangunan wilayah Papua pada masa Orde Baru juga didukung oleh investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dua skema investasi utama yang berlaku saat itu adalah Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang bertujuan untuk menarik masuknya teknologi

45 "Laporan KCBI Jayapura Tahun 1980-an," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.



Gambar 6.6. Presiden Soeharto pada saat peresmian Jalan Tembus Ganyem-Sentani sepanjang 60 km di Desa Kemiri.

Sumber: *Album Pembangunan Indonesia Masa Orde Baru.* (Jakarta: Lembaga Publikasi Pendidikan, Kebudayaan, dan Pembangunan Indonesia, 1978), hlm. 770

dan modal asing, terutama untuk sektor-sektor yang belum berkembang secara optimal oleh modal nasional seperti industri dasar dan pertambangan. Sementara itu, PMDN diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, dengan fokus pada penguatan kapasitas investasi dalam negeri, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta nasional.⁴⁶

Di Papua, hingga tahun 1977 tercatat terdapat delapan proyek PMA di sektor perikanan dengan total nilai investasi sebesar 45,53 juta USD, serta dua proyek joint venture antara investor asing dan Pemerintah Indonesia dengan nilai investasi mencapai 226,92 juta

46 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2818); Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2853).

USD. Investasi asing di bidang perikanan ini mayoritas berasal dari Jepang (64%), disusul Amerika Serikat (20%), Taiwan (9%), dan Jerman Barat (7%). Selain sektor perikanan, investasi asing juga mengalir ke sektor pertambangan, antara lain melalui perusahaan Pasifik Nikel Indonesia yang beroperasi di Sorong dan Jayapura, serta Freeport Indonesia Incorporated yang mengeksplorasi tembaga di wilayah Tembagapura. Di sisi lain, PMDN tercatat sebanyak lima proyek dengan total investasi sebesar Rp9.818 juta hingga akhir Juli 1977.⁴⁷

Pada tahun 1980, Papua juga menerima bantuan kredit luar negeri untuk mendukung proyek-proyek strategis, seperti proyek kelistrikan *West Irian Power*, pengembangan perikanan melalui *Sorong Fisheries Development*, serta dua proyek eksplorasi minyak bumi. Proyek *West Irian Power* bertujuan untuk memperluas infrastruktur kelistrikan di Papua dan mendapatkan komitmen kredit sebesar 2,6 juta USD dari Asian Development Bank (ADB), meskipun hingga 1977 realisasinya baru mencapai 0,2 juta USD. Sebaliknya, proyek *Sorong Fisheries Development* yang juga dibiayai oleh ADB dengan nilai 8,9 juta USD mencatat pencapaian yang lebih tinggi, dengan realisasi sebesar 7,3 juta USD. Dua proyek lainnya yaitu *oil sector (seismic survey)* dan *oil sector (exploration drillings)*, masing-masing senilai 8,2 juta USD, seluruhnya didanai dan direalisasikan oleh Pemerintah Jepang. Proyek-proyek tersebut menjadi cerminan dari upaya pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan Papua melalui kerja sama internasional di sektor-sektor unggulan.

Dari seluruh uraian terdahulu, jelas kiranya bahwa sebagai *financial agent* bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua, KCBI Jayapura memainkan peran strategis dalam seluruh proses pengembangan dana pembangunan. Peran ini mencakup pengelolaan dana Repelita, penyaluran PMA dan PMDN, hingga

47 "Memperkenalkan Propinsi Irian Jaya," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1977.

Tabel 6.7. Proyek-Proyek yang Dibiayai dengan Bantuan/Kredit Luar Negeri Wilayah Kerja BI Jayapura

No	Nama Proyek	Donor	Persetujuan Kredit		Realisasi
			Tanggal	Jumlah (US\$ jutaan)	
1	West Irian Power	ADB	12/04/1973	2,6*	0,2
2	Sorong Fisheries Development	ADB	20/12/1973	7,9	7,3
3	Oil Sector (Seismic Survey)	Jepang	22/03/1974	8,2	8,2
4	Oil Sector (Exploration Drillings)	Jepang	22/03/1974	8,2	8,2

Keterangan: *) Sisa kredit yang tidak direalisasikan telah dibatalkan tanggal 16 Juni 1978, karena pihak ADB tidak dapat memperpanjang tanggal berlakunya loan.

Sumber: "Lampiran Laporan KCBI Jayapura 1980-an," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.

fasilitasi berbagai bentuk bantuan dan kredit luar negeri. Dalam pelaksanaannya, KCBI Jayapura tidak hanya bertindak sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai analis dan penasihat ekonomi yang aktif menilai potensi daerah—meliputi sumber daya alam, infrastruktur, serta dinamika pasar lokal. Informasi ini menjadi acuan penting bagi investor, baik domestik maupun internasional, dalam mengambil keputusan investasi di wilayah tersebut.

Selain itu, KCBI Jayapura turut berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang mendukung iklim investasi, serta menyediakan data dan kajian ekonomi yang relevan untuk mendorong pengembangan sektor-sektor prioritas. Di sisi lain, fungsi pengawasan juga tetap dijalankan dengan ketat, melalui pemantauan terhadap aktivitas perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk memastikan bahwa proses penyaluran kredit berlangsung secara transparan, efisien, dan sesuai ketentuan. Dengan peran ganda sebagai fasilitator, penasihat,

sekaligus pengawas, KCBI Jayapura dapat dikatakan menjadi katalisator penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di Papua pada masa Orde Baru. §

BAB VII

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) PAPUA DAN PEMBANGUNAN PAPUA HINGGA ERA OTONOMI KHUSUS, 1998 – 2024

Menjelang akhir dekade 1990-an, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mendalam dan berdampak luas. Krisis ini tidak hanya mengguncang sektor ekonomi, tetapi juga merembet menjadi gejolak sosial dan politik, yang berpuncak pada runtuhnya Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, setelah berkuasa sejak 1966. Pergantian rezim ini menandai tonggak sejarah penting dalam perjalanan politik Indonesia, dengan dimulainya era Reformasi yang membawa semangat demokratisasi dan perubahan struktural dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bagian dari agenda Reformasi, pemerintah mengadopsi kebijakan desentralisasi pemerintahan yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.¹

Di Papua—yang sebelum tahun 2001 masih dikenal dengan nama Irian Jaya—euforia Reformasi turut melahirkan tuntutan politik akan otonomi yang lebih luas. Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Salah satu implementasi dari kebijakan Otsus ini adalah pemekaran wilayah administratif, yang diawali dengan pembentukan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada tahun 1999. Pemekaran berlanjut pada tahun 2022 dengan terbentuknya empat provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, sehingga keseluruhan wilayah Papua kini terbagi menjadi enam provinsi.

Sejumlah indikator menunjukkan bahwa kebijakan Otonomi Khusus telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Meski demikian, tantangan besar masih membayangi, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan kapasitas pemerintahan daerah. Selain itu, kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia tetap menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Dalam konteks inilah, kehadiran Bank Indonesia di Tanah Papua diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

1 Kedua undang-undang ini menjadi bagian dari paket reformasi politik yang juga meliputi pengesahan sejumlah undang-undang penting lainnya, seperti Undang-Undang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 1999), Undang-Undang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR (UU No. 4 Tahun 1999), Undang-Undang Pemilihan Umum (UU No. 3 Tahun 1999), dan Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999). Lihat Susanto Zuhdi, “Epilog: Masa Awal Reformasi,” dalam Taufik Abdullah (ed.), *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Dari Orde Baru Hingga Reformasi*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve & Kemendikbud, 2012), hlm. 649.

Bab ini mengkaji dinamika perkembangan ekonomi Papua sejak terjadinya Krisis Ekonomi 1998 hingga periode kontemporer, dengan penekanan khusus pada peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Papua. Pembahasan akan mencakup kontribusi KPwBI dalam proses pemulihan ekonomi pasca krisis, serta perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi Papua di era Otonomi Khusus.

Sebagai catatan, fokus pembahasan dalam bab ini diarahkan pada wilayah kerja KPwBI Papua, yang meliputi seluruh wilayah setelah pemekaran administratif tahun 2003 hingga 2022. Untuk menghindari kerancuan, istilah “wilayah Papua” dalam bab ini merujuk kepada gabungan Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

A. Papua dalam Pusaran Krisis Ekonomi Tahun 1998

A.1. Dampak Krisis Ekonomi 1998

Krisis Ekonomi 1998 merupakan salah satu catatan kelam dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia. Krisis ini dipicu oleh jatuhnya nilai tukar mata uang Baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat, yang kemudian menimbulkan efek domino di berbagai negara Asia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, krisis tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami devaluasi tajam, dari sekitar Rp2.000 per dolar Amerika Serikat sebelum krisis, menjadi lebih dari Rp17.000 per dolar pada puncak krisis di awal tahun 1998.

Di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya mencapai 7–8 persen per tahun, tersembunyi berbagai kelemahan struktural. Di antaranya adalah tingginya utang luar negeri (ULN) sektor swasta, lemahnya tata kelola pemerintahan yang diwarnai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tingginya rasio kredit macet di sektor perbankan akibat lemahnya pengawasan,

ketergantungan pada ekspor sumber daya alam (SDA) yang rentan terhadap fluktuasi harga global, serta keterbatasan devisa yang membatasi ruang intervensi pemerintah.

Akibatnya, krisis moneter tersebut segera berkembang menjadi krisis ekonomi yang lebih luas, dengan dampak serius di berbagai sektor. Di bidang ekonomi, krisis menyebabkan inflasi yang tidak terkendali akibat mahalannya harga barang impor, kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar ULN, kolapsnya sistem perbankan karena krisis likuiditas, serta peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Sementara itu, di ranah sosial-politik, krisis memicu gelombang kerusuhan sosial, huru-hara, penjarahan, serta demonstrasi besar-besaran.

Pada akhirnya, krisis ini bertransformasi menjadi krisis politik yang menggerus legitimasi pemerintahan Presiden Soeharto. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan tekanan publik yang terus membesar memuncak pada tumbangnya rezim Orde Baru pada pertengahan Mei 1998, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya era Reformasi. Dari rahim Reformasi ini, kelak lahir sejumlah kebijakan fundamental seperti Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Kebebasan Pers, perubahan sistem pemilihan umum, pembatasan masa jabatan presiden, hingga penguatan independensi Bank Indonesia.²

Sebagaimana daerah lain di Indonesia, Papua turut merasakan dampak berat dari krisis ini. Sebagai daerah konsumen yang sangat bergantung pada pasokan barang dari luar, Papua mengalami lonjakan harga barang pokok akibat kenaikan harga di daerah produsen serta biaya transportasi yang melonjak tajam seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kelangkaan barang seperti beras, gula, dan minyak goreng menjadi persoalan serius,

2 M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200, 4th edition*. (New York: Palgrave MacMillan, 2008), hlm. 377-78.

terutama di wilayah pedalaman yang bergantung pada distribusi lewat pesawat perintis. Harga tiket pun melonjak tajam sebagai dampak kenaikan harga suku cadang dan BBM. Akibatnya, daya beli masyarakat merosot tajam, aktivitas ekonomi melambat, dan angka kemiskinan serta pengangguran meningkat secara signifikan.

Selain tekanan inflasi, keterbatasan infrastruktur dasar dan sulitnya akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi memperburuk situasi ekonomi Papua. Krisis fiskal di tingkat pusat menyebabkan banyak program pembangunan di Papua tertunda atau bahkan dibatalkan, sehingga memperlebar ketertinggalan Papua dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Meskipun demikian, menurut Julius Ary Mollet, profesor ekonomi dari Universitas Cenderawasih, dampak krisis di Papua relatif lebih ringan dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat adat Papua yang masih bergantung pada sektor pertanian subsisten, perikanan, dan kegiatan berburu, sektor-sektor yang relatif tidak terlalu terdampak oleh krisis keuangan global. Selain itu, aliran dana bantuan dari pemerintah pusat membantu menjaga denyut perekonomian lokal di tengah terpaan krisis nasional.³

A.2. Peran Bank Indonesia dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1998

Menghadapi dampak krisis ekonomi dan moneter 1998, Bank Indonesia — yang saat itu belum berstatus sebagai lembaga independen dan masih menjadi bagian dari pemerintah — mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk membantu memulihkan perekonomian nasional. Upaya ini mencakup

3 Julius Ary Mollet, "The Dynamics of Contemporary Local-Government Policies and Economic Development in West Papua," *Development in Practice*, Vol. 21, No. 2, (2011), hlm. 232-243.

restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan, penguatan regulasi sektor keuangan, serta peluncuran program penjaminan simpanan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Di samping stabilisasi sektor keuangan, Bank Indonesia juga berupaya mendukung ketahanan sektor riil, terutama dengan mendorong usaha kecil agar dapat bertahan dan bertumbuh di tengah krisis. Berbagai kebijakan dirancang untuk tujuan ini, antara lain pemberlakuan kewajiban Kredit Usaha Kecil (KUK), pemberian bantuan keuangan melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), penyaluran dana luar negeri dalam skema *two-step loan* (TSL), pemberian bantuan teknis, serta pengembangan kelembagaan usaha kecil.

Pada 8 Agustus 1997, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan pelonggaran untuk memperluas cakupan KUK. Beberapa ketentuan utama yang diberlakukan antara lain:

- Plafon kredit hingga Rp700 juta yang disalurkan kepada usaha kecil dalam Program Kemitraan Terpadu (PKT) dapat diperhitungkan sebagai KUK.
- Plafon kredit hingga Rp2 miliar kepada koperasi dalam kerangka PKT dapat diakui sebagai KUK.
- Penyaluran KUK dalam rangka PKT dapat dilakukan melalui usaha besar, sepanjang efektif untuk mendukung usaha kecil.

Selanjutnya, pada 28 Oktober 1997, Bank Indonesia memperluas cakupan program kreditnya dengan meluncurkan beberapa skema baru, yaitu:

- Kredit Usaha Tani (KUT): untuk mendukung intensifikasi sektor padi, palawija, dan hortikultura.
- Kredit kepada Koperasi Unit Desa (KKUD): untuk mendukung pengadaan padi, palawija, hortikultura, cengkeh, dan pupuk, serta membiayai investasi di sektor agribisnis.
- Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA):

untuk membiayai kegiatan usaha produktif anggota koperasi maupun koperasi sebagai unit usaha.

Di samping itu, sejumlah langkah tambahan dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah untuk memperkuat usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, di antaranya:

- Memberikan insentif kepada perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit program, termasuk membuka perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) kepada bank-bank yang realisasi KUK-nya tinggi, menaikkan suku bunga KKPA dan KKUD dari 14% menjadi 16%, serta memberikan bantuan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- Menyediakan Kredit Modal Kerja bagi Usaha Kecil Menengah (KMK-UKM) melalui bank-bank BUMN dan Bank Bukopin, dengan prioritas penyaluran kepada korban PHK dan pelaku UKM eksportir.
- Mengembangkan program bantuan untuk desa tertinggal serta skema Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU), yang ditujukan kepada kelompok Program Kesejahteraan Rakyat (ProKesra) bermitra dengan UKM.
- Mendorong pelaksanaan program padat karya dan memperluas pembiayaannya.

Dalam konteks Papua, dukungan pemerintah terhadap sektor riil juga difasilitasi melalui KPwBI Papua. Salah satu bentuk nyata dukungan ini adalah penyaluran kredit program KUT dan Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM). Program KUT disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, Bank Danamon, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan Program KPKM disalurkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI).

Melalui berbagai inisiatif ini, Bank Indonesia tidak hanya berupaya mengatasi dampak langsung krisis, tetapi juga membangun fondasi pemulihan ekonomi nasional yang lebih

inklusif, termasuk bagi wilayah Papua yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan pembangunan tersendiri.

B. Otonomi Daerah, Otonomi Khusus dan Pemekaran Wilayah

B.1. Otonomi Daerah dan Lahirnya Otonomi Khusus

Kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu produk utama dari era Reformasi yang lahir pasca krisis ekonomi 1998 dan runtuhnya Orde Baru. Kebijakan ini dirancang sebagai respons terhadap ketidakpuasan daerah-daerah terhadap sentralisasi kekuasaan di masa Orde Baru, yang dianggap sebagai salah satu sumber ketimpangan pembangunan nasional. Pada masa itu, pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas anggaran, regulasi, dan pengambilan kebijakan di seluruh wilayah Indonesia.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi fondasi hukum bagi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Secara substansial, otonomi daerah bertujuan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dari pusat ke daerah, menciptakan perimbangan keuangan yang lebih adil melalui pembagian hasil sumber daya alam, memperkenalkan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD secara langsung, serta memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meskipun membawa banyak manfaat, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat dan bertambahnya kapasitas fiskal daerah, pelaksanaan otonomi daerah juga menghadapi sejumlah tantangan serius. Maraknya korupsi, ketimpangan pembangunan antar daerah, kapasitas pemerintahan daerah yang tidak merata, serta konflik kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi isu-isu yang mencuat dalam praktik di lapangan.

Di Papua, implementasi otonomi daerah bahkan memunculkan tuntutan yang lebih radikal, yakni permintaan otonomi yang lebih luas. Tuntutan ini dipicu oleh persepsi ketidakadilan yang berkembang di kalangan masyarakat, khususnya elit lokal, yang menilai bahwa ketertinggalan Papua merupakan hasil dari kebijakan ekonomi-politik nasional yang tidak berpihak kepada mereka. Salah satu contoh yang menjadi simbol ketidakadilan tersebut adalah operasional PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.

Pada masa krisis ekonomi 1998, ketika banyak perusahaan nasional kolaps, Freeport justru menikmati keuntungan besar karena harga tembaga dan emas sebagai produk utama tetap stabil, bahkan meningkat sebagai aset lindung nilai (*safe haven*). Dengan pendapatan yang berbasis dolar Amerika Serikat, Freeport mendapat keuntungan berlipat dari depresiasi rupiah, memperdalam ketidakpuasan masyarakat Papua yang merasa tidak mendapatkan manfaat adil dari sumber daya alam mereka.

Dalam konteks tersebut, kemunduran ekonomi Papua yang berbanding terbalik dengan kejayaan korporasi multinasional menjadi momentum bagi masyarakat Papua untuk menuntut hak-hak yang lebih luas, termasuk hak pengelolaan sumber daya alam, dan bahkan di beberapa kalangan, menyerukan tuntutan kemerdekaan. Di tengah gelombang tuntutan ini, pemerintah Indonesia akhirnya merespons dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus), di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.

UU Otsus memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah Papua untuk mengatur urusan domestik, dengan pengecualian untuk bidang hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan moneter dan fiskal, serta urusan agama dan peradilan. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah pemberian Dana Otonomi Khusus sebesar 2 persen

dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, yang diperuntukkan untuk mendukung program-program pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, hingga tahun 2021.

Secara substansi, UU Otsus memuat sejumlah terobosan penting, antara lain:

- Pengakuan identitas dan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak pengelolaan tanah ulayat dan sumber daya alam,
- Peningkatan alokasi pendapatan daerah,
- Kewenangan legislatif untuk membentuk peraturan daerah khusus dan peraturan daerah istimewa,
- Penetapan bahwa gubernur dan wakil gubernur Papua harus berasal dari orang asli Papua (OAP),
- Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representatif berbasis adat dan budaya.

Berkat implementasi UU Otsus, Papua mencatat sejumlah kemajuan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan kesehatan. PDRB mengalami peningkatan, dan angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan. Namun demikian, ketimpangan sosial juga ikut meningkat, sebagaimana tercermin dalam naiknya indeks rasio Gini, bukan karena bertambahnya penduduk miskin, melainkan karena kelompok kaya mengalami kenaikan pendapatan yang jauh lebih cepat.

Namun demikian, implementasi UU Otsus masih jauh dari optimal. Banyak pihak di Papua memandang Otsus semata-mata sebagai tambahan dana fiskal, bukan sebagai perluasan kewenangan politik. Pemahaman ini membuat Otsus rentan terhadap praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi. Selain itu, afirmasi yang berlebihan terhadap orang asli Papua —seperti ketentuan bahwa 80 persen aparatur sipil negara harus OAP— turut memperburuk kapasitas tata kelola, karena sering kali

mengabaikan aspek kompetensi.⁴

Belum meratanya pembangunan, terutama di daerah-daerah terpencil, menjadi persoalan serius lain dalam pelaksanaan Otsus. Sektor pendidikan di pedalaman, misalnya, justru mengalami kemunduran akibat pengusiran misionaris dan sukarelawan asing yang sebelumnya berkontribusi dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas. Penggantian mereka dengan tenaga pengajar dari luar Papua yang belum sepenuhnya siap turut memperburuk situasi. Program-program pemberdayaan berbasis dana Otsus juga, dalam beberapa kasus, justru menimbulkan ketergantungan dan menurunkan produktivitas masyarakat. Lebih jauh lagi, Otsus belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aspirasi sebagian kelompok masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan, sebagaimana terus diperjuangkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

B.2. Pemekaran Wilayah Administrasi

Kebijakan Otonomi Khusus Papua tidak hanya membawa perubahan dalam struktur pemerintahan daerah, tetapi juga mendorong dilakukannya pemekaran wilayah administratif. Tujuan utama pemekaran ini adalah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, dan memperkuat pelayanan publik di wilayah yang memiliki tantangan geografis yang berat.

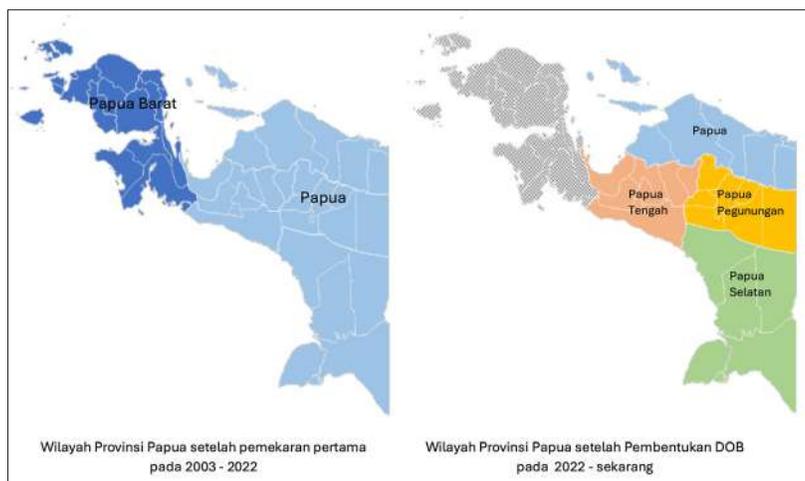
Rencana awal pemekaran telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, yang mengatur pembagian Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi, yakni Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Timur. Namun, implementasinya menghadapi banyak penolakan, sehingga baru pada tahun 2003,

4 Budy P. Resosudarmo, Julius Ary Mollet, Uumbu R. Raya dan Hans Kaiwai, "Development in Papua After Special Autonomy," dalam Hal Hill (ed.), *Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia*. (Singapore: ISEAS, 2014), hlm. 434 & 452-455.

melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003, Provinsi Papua secara resmi dimekarkan menjadi dua provinsi: Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat.

Pada 11 November 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun demikian, keberadaan provinsi tersebut tetap dinyatakan sah. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, nama Provinsi Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat.

Seiring dengan pembentukan Provinsi Papua Barat, Bank Indonesia merespons kebutuhan penguatan kelembagaan di wilayah baru ini dengan mendirikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Papua Barat di Kota Manokwari. Inisiatif pendirian kantor ini bermula dari permintaan resmi Gubernur Papua Barat pada 22 Oktober 2012, dengan tujuan utama untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan meningkatkan akses layanan perbankan di wilayah tersebut.



Gambar 7.1. Proses pemekaran wilayah Papua antara tahun 2003 hingga 2022.

Tabel 7.1. Pembagian Kabupaten/ Kota di Papua setelah Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)

Provinsi Papua	Provinsi Papua Tengah
1. Kota Jayapura (ibukota)	1. Kabupaten Nabire (ibukota)
2. Kabupaten Jayapura	2. Kabupaten Mimika
3. Kabupaten Keerom	3. Kabupaten Paniai
4. Kabupaten Sarmi	4. Kabupaten Puncak
5. Kabupaten Mamberamo Raya	5. Kabupaten Puncak Jaya
6. Kabupaten Waropen	6. Kabupaten Dogiyai
7. Kabupaten Kepulauan Yapen	7. Kabupaten Deiyai
8. Kabupaten Biak Numfor	8. Kabupaten Intan Jaya
9. Kabupaten Supiori	
Provinsi Papua Pegunungan	Provinsi Papua Selatan
1. Kabupaten Jayawijaya	1. Kabupaten Merauke
2. Kabupaten Pegunungan Bintang	2. Kabupaten Boven Digoel
3. Kabupaten Tolikara	3. Kabupaten Mappi
4. Kabupaten Yahukimo	4. Kabupaten Asmat
5. Kabupaten Mamberamo Tengah	
6. Kabupaten Yalimo	
7. Kabupaten Lanny Jaya	
8. Kabupaten Nduga	

Sumber: "Pemekaran Papua, Ini Rincian 3 Provinsi Baru," *Tempo*, 4 Juli 2022. <https://www.tempo.co/politik/pemekaran-papua-ini-rincian-3-provinsi-baru-329026>. Artikel diakses pada 13 Mei 2025.

Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia membentuk tim lintas satuan kerja yang dipimpin oleh Henri N. Tanor, yang kemudian ditunjuk sebagai Kepala KPwBI Papua Barat pertama. Kantor ini diresmikan pada 4 Desember 2014 oleh Gubernur Bank Indonesia saat itu, Agus D.W. Martowardojo. Menariknya, gedung yang digunakan merupakan bekas kantor Bappeda Papua Barat, yang sebelumnya juga pernah difungsikan sebagai gedung Nederlandsch Handel-Maatschappij (NHM) dan Bank Ekspor-Impor Indonesia (BEII). Dengan peresmian ini, Papua kini memiliki dua Kantor

Perwakilan Bank Indonesia, yaitu KPwBI Papua di Jayapura dan KPwBI Papua Barat di Manokwari.

Selain itu, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus dan upaya percepatan pembangunan di Papua, pemerintah Indonesia melakukan pemekaran wilayah administratif pada tahun 2022. Melalui Undang-Undang Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022, Provinsi Papua yang sebelumnya terdiri atas 29 kabupaten/kota dimekarkan menjadi empat provinsi, yaitu: Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Pemekaran ini didasarkan pada pembagian tradisional lima wilayah adat di Papua dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.⁵ Tabel 7.1 merangkum pembagian kabupaten/kota berdasarkan provinsi hasil pemekaran tersebut.

C. Pembangunan Papua di Era Otonomi Khusus (Otsus)

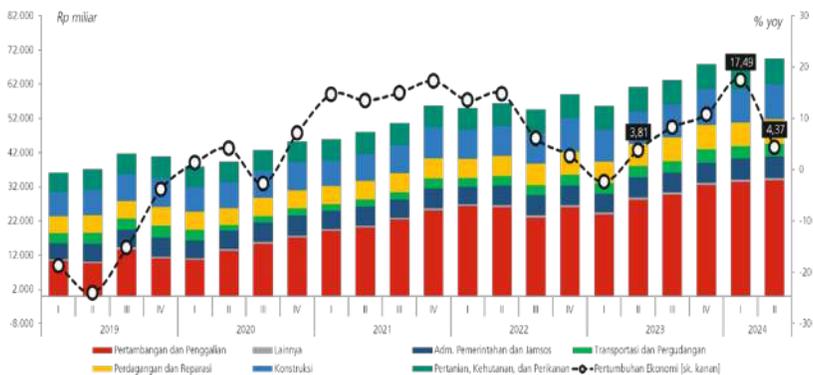
C.1. Perkembangan PDRB Wilayah Papua

Wilayah Papua dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional maupun nasional. Pada tahun 2023, PDRB Papua atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp181,93 triliun. Angka ini menempatkan Papua sebagai penyumbang sekitar 15 persen terhadap total perekonomian kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), menempati peringkat ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Dalam skala nasional, perekonomian Papua menempati peringkat ke-15, dengan kontribusi sekitar 1,5 persen terhadap PDRB nasional.

5 Kelima wilayah adat tersebut yakni Mamta dan Saereri menjadi Provinsi Papua; Ha Anim menjadi Provinsi Papua Selatan; La Pago menjadi Provinsi Papua Pegunungan; dan Mee Pago menjadi Provinsi Papua Tengah.

Secara struktural, perekonomian Papua masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian, meskipun kontribusi sektor ini cenderung mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor lain, terutama sektor konstruksi dan pertanian. Ketergantungan tinggi terhadap sektor pertambangan membuat perekonomian Papua rentan terhadap fluktuasi produksi dan harga komoditas global. Kondisi ini pernah terlihat pada tahun 2019, ketika PDRB Papua mengalami kontraksi sebesar -15,74 persen akibat transisi operasi PT. Freeport Indonesia dari metode penambangan terbuka ke penambangan bawah tanah.

Pada triwulan II tahun 2024, struktur PDRB Papua menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi kontributor utama dengan andil sebesar 43,21 persen. Di luar sektor pertambangan, sektor konstruksi menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 11,58 persen, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,45 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang 8,44 persen, sedangkan sektor administrasi



Grafik 7.1. Perkembangan PDRB Wilayah Papua Berdasarkan Lapangan Usaha (2019-2024)

Sumber: Diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), 2019-2024.

pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memberikan kontribusi sebesar 7,94 persen terhadap struktur ekonomi wilayah. Meskipun demikian, upaya diversifikasi ekonomi terus didorong untuk mengurangi ketergantungan berlebih pada sektor pertambangan, memperkuat ketahanan ekonomi regional, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif lainnya.

C.1.1. Peran dan Tantangan Sektor Pertambangan di Papua

Dengan kekayaan mineralnya yang melimpah, Papua telah menjadi salah satu pusat industri pertambangan terpenting di Indonesia. Sektor ini memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui kontribusi terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan menyumbang 60,76 persen terhadap perekonomian Papua pada tahun 2000. Meskipun kontribusinya menurun menjadi 43,21 persen pada triwulan II tahun 2024 seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Namun pertambangan diperkirakan tetap akan menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi Papua dalam beberapa tahun mendatang.

PT. Freeport Indonesia, sebagai pengelola pertambangan tembaga, emas, dan perak di Tembagapura, Kabupaten Mimika, berkontribusi signifikan tidak hanya terhadap ekonomi Papua, tetapi juga terhadap perekonomian nasional. Perusahaan ini menyumbang sekitar 2,15 persen dari total nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023, memperkuat posisi sektor pertambangan sebagai salah satu penghasil devisa utama negara.

Namun demikian, keberlanjutan sektor pertambangan di Papua menghadapi berbagai tantangan serius yang perlu ditangani dengan pendekatan komprehensif. Dari segi sosial, kesenjangan antara perusahaan besar dan masyarakat lokal, serta konflik terkait pembagian manfaat ekonomi, terus memicu

ketegangan di tingkat komunitas. Di bidang ekonomi, volatilitas harga komoditas di pasar global menciptakan ketidakpastian yang berdampak langsung terhadap stabilitas sektor pertambangan dan perekonomian daerah secara keseluruhan. Sementara itu, dampak lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem, semakin memperbesar risiko jangka panjang dari eksploitasi sumber daya mineral secara intensif.

Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, pengembangan industri pertambangan di Papua ke depan harus berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Penerapan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi dampak ekologis, peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar lebih berperan aktif dalam rantai nilai industri pertambangan menjadi kunci utama. Kolaborasi erat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diperlukan untuk membangun sektor pertambangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

C.1.2. Dinamika Pembangunan Infrastruktur di Papua

Pada triwulan II tahun 2024, sektor konstruksi menjadi salah satu pilar utama perekonomian Papua dengan kontribusi sebesar 11,58 persen terhadap PDRB, menjadikannya sektor terbesar kedua setelah pertambangan. Sejak tahun 2018, sektor konstruksi telah menggantikan sektor pertanian di posisi ini. Pertumbuhan sektor ini sejalan dengan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang berfokus pada pengurangan ketimpangan regional, peningkatan aksesibilitas, dan percepatan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah terluar.

Dalam satu dekade terakhir, berbagai proyek infrastruktur strategis telah dibangun di Papua. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan,

Tabel 7.2. Proyek-proyek Infrastruktur Penting di Papua, 2014-2024

No.	Jenis Infrastruktur	Tujuan	Keterangan
1	Jalan dan Jembatan	Meningkatkan konektivitas di darat	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan transportasi Papua sepanjang 3.259 km, dengan 2.907 km telah tersambung. Khusus untuk proyek Trans Papua di Provinsi Papua, sepanjang 865 kilometer jalan telah berhasil dibangun dalam periode 2015-2019. Selain itu, pembangunan jalan perbatasan juga dilaksanakan dengan total panjang mencapai 1.098 kilometer. Pembangunan Jembatan Youtefa di Jayapura pada 2015. Jembatan sepanjang 1,3 km ini sebelumnya bernama Jembatan Holtekamp yang menjadi salah satu jalur strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
2	Bandara dan Pelabuhan	Meningkatkan konektivitas di udara dan laut	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan renovasi bandara, yakni Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah. Pembangunan dan renovasi pelabuhan, yakni Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui.
3	Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kedaulatan negara. Memperkuat pertahanan dan keamanan. Meningkatkan efisiensi pelayanan. Menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> PLBN Sota (Merauke) PLBN Skouw (Jayapura) PLBN Yetetkun (Boven Digoel) <p>Catatan: Ketiga PLBN di atas berbatasan langsung dengan Papua Nugini.</p>

4	Fasilitas Publik	Sarana Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Arena akuatik. • Istora Bangkit seluas 33.016-meter persegi. • Stadion Utama Lukas Enembe seluas 26.520-meter persegi. • Arena Sepatu Roda seluas 26.520-meter persegi. • Arena Dayung dengan lintasan sepanjang 2.200 meter. • Lokasi Panahan seluas 10.100-meter persegi.
Sarana Kebudayaan			<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Papua Youth Creative Hub (PYCH)
Sarana Pendidikan			<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 179 sekolah • Pembangunan 1 Perguruan Tinggi Negeri
Sarana Kesehatan			<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Rumah Sakit dan Puskesmas dengan fasilitas yang lengkap. • Penambahan tenaga kesehatan.
5	Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. • Mendukung pengentasan kemiskinan dan perlindungan keluarga berpenghasilan rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Wamena, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Fakfak, dan wilayah lainnya.
6	Proyek Sanitasi dan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan layak. • Meningkatkan sanitasi yang baik untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Wamena, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Fakfak, dan wilayah lainnya.

Sumber: Dokumentasi Internal KPw BI Papua.

infrastruktur perbatasan, serta fasilitas publik seperti arena olahraga, pusat kebudayaan, sekolah, rumah sakit, dan sarana air bersih. Beberapa infrastruktur utama tersebut tercantum pada Tabel 7.2.

Pembangunan infrastruktur ini sebagian besar dibiayai melalui dana APBN, Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Desa, Dana Infrastruktur Khusus Papua, dan berbagai inisiatif dari Pemerintah Pusat. Selain itu, pemerintah memberikan insentif khusus untuk menarik investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun, realisasi proyek infrastruktur di Papua tidak lepas dari berbagai tantangan berat. Faktor geografis yang sulit—seperti medan pegunungan dan hutan lebat—menyulitkan logistik dan konstruksi. Keterbatasan sumber daya manusia lokal yang terampil memaksa pengadaan tenaga kerja dari luar daerah, sementara biaya logistik untuk pengangkutan bahan baku dan alat berat sangat tinggi. Selain itu, masalah keamanan akibat konflik di beberapa daerah dan tantangan pembebasan lahan yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat turut memperumit pelaksanaan proyek.

Meskipun demikian, secara umum, pembangunan infrastruktur di Papua telah membawa dampak positif yang nyata. Peningkatan mobilitas dan konektivitas antarwilayah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan.

C.1.3. Peran Strategis dan Pengembangan Sektor Pertanian di Papua

Pada triwulan II tahun 2024, sektor pertanian berkontribusi sebesar 9,45 persen terhadap PDRB Papua, menjadikannya sektor terbesar ketiga setelah pertambangan dan konstruksi. Meskipun

kontribusi terhadap PDRB relatif lebih kecil dibandingkan dua sektor tersebut, pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Papua, mencerminkan peran strategisnya dalam perekonomian wilayah.

Menurut data BPS tahun 2023, sektor pertanian secara keseluruhan menyumbang 10,08 persen terhadap PDRB Papua. Kontribusi ini meliputi subsektor tanaman pangan, pengelolaan kehutanan dan penebangan kayu, serta perikanan. Sementara itu, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 menunjukkan bahwa Papua memiliki luas hutan mencapai 29,37 juta hektar, yang mendukung potensi besar sektor kehutanan dan pertanian.

Pasca pemekaran wilayah menjadi DOB, peran sektor pertanian semakin menonjol di provinsi-provinsi hasil pemekaran. Di Provinsi Papua Selatan, sektor ini menyumbang 22,06 persen terhadap PDRB, di Papua Pegunungan 16,82 persen, dan di Papua Induk 14,46 persen. Sementara itu, di Papua Tengah, kontribusi sektor pertanian relatif lebih kecil, tertutup oleh dominasi sektor pertambangan. Berdasarkan distribusi subsektor, sektor pertanian di Papua terbagi sebagai berikut: subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian yang menyumbang 48,54 persen; subsektor perikanan 42,32 persen; dan subsektor kehutanan serta penebangan kayu 9,14.

Sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pemerintah mencanangkan berbagai program pengembangan, mulai dari modernisasi pertanian hingga hilirisasi produk pertanian. Salah satu inisiatif utama adalah Program Lumbung Pangan Papua, yang bertujuan membuka lahan pertanian skala besar dengan penerapan teknologi modern, seperti mekanisasi pertanian, penggunaan bibit unggul, dan sistem irigasi yang lebih terkendali.

Lokasi utama program produksi pangan ini tersebar di

beberapa kabupaten, antara lain Merauke, Jayapura, dan Keerom, dengan komoditas utama yang dikembangkan meliputi padi, jagung, kedelai, dan tebu. Lumbung Pangan Merauke, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), menargetkan pembukaan lahan seluas 2 juta hektar untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

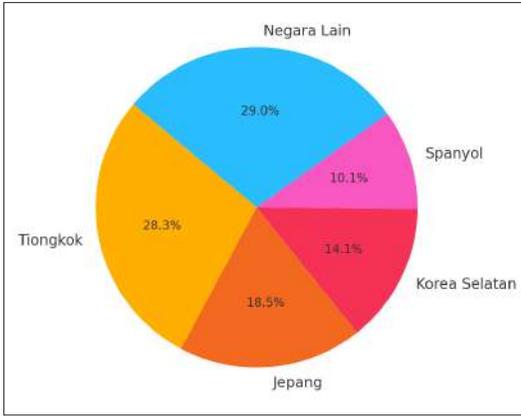
C.2. Indikator Perekonomian Lainnya di Papua

Selain PDRB, sejumlah indikator lain seperti nilai ekspor-impor, tingkat inflasi, dan kondisi ketenagakerjaan juga penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika perekonomian wilayah Papua. Berdasarkan beberapa indikator ini, terlihat bahwa Papua masih memiliki ruang ekonomi yang luas untuk mengembangkan sektor non-tambang, di samping perlunya pemerataan pembangunan untuk mengendalikan inflasi serta menarik lebih banyak investasi guna menekan tingkat pengangguran.

C.2.1. Ekspor – Impor

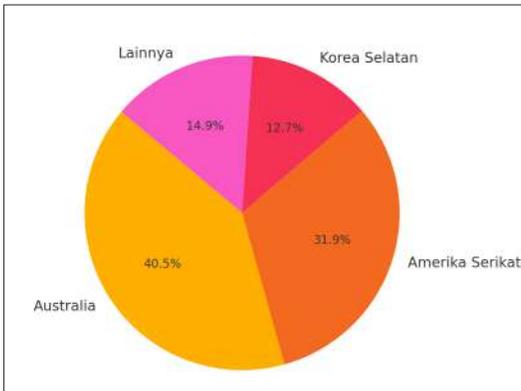
Struktur ekspor Papua hampir selalu didominasi oleh sektor pertambangan, khususnya ekspor konsentrat tembaga yang mencakup hampir 99 persen dari total ekspor wilayah. Sebaliknya, kontribusi sektor non-tambang terhadap ekspor masih sangat kecil, sekitar 1 persen. Pada triwulan IV tahun 2022, nilai ekspor Papua mencapai 46.273,41 juta dolar AS, berkontribusi sebesar 2,15 persen terhadap total ekspor nasional. Di sisi lain, nilai impor wilayah Papua tercatat sebesar 5.029,30 juta dolar AS atau sekitar 0,20 persen dari total impor nasional, sebagian besar berupa bahan baku untuk mendukung produksi sektor pertambangan. Dengan demikian, dalam periode tersebut, Papua berhasil menyumbangkan devisa sebesar 6.029,30 juta dolar AS.

Negara tujuan utama ekspor konsentrat tembaga dari Papua



Grafik 7.1. Pangsa Pasar Ekspor Konsentrat Tembaga Papua (Triwulan IV 2022)

Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Papua, *Laporan Perekonomian Provinsi Papua*. (Jayapura: KPw BI Papua, 2023).



Grafik 7.2. Pangsa Pasar Ekspor Non-Tambang Papua (Triwulan IV 2023)

Sumber: KPw Bank Indonesia Provinsi Papua, *Laporan Perekonomian Provinsi Papua*. (Jayapura: KPw BI Papua, 2023).

adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Spanyol, dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 28,3 persen, 18,5 persen, 14,1 persen, dan 10,1 persen. Keempat negara ini secara akumulatif menyerap sekitar 71 persen dari total ekspor konsentrat tembaga Papua.

Sementara itu, untuk ekspor non-tambang, nilai yang dicatat pada triwulan IV 2023 mencapai 23,80 juta dolar AS, setara dengan 1,26 persen dari total ekspor nonmigas wilayah Papua. Komoditas

utama ekspor non-tambang adalah kayu olahan, dengan negara tujuan utama Australia (40,46 persen), Amerika Serikat (31,90 persen), dan Korea Selatan (12,70 persen). Selain kayu olahan, komoditas perikanan juga diekspor, meskipun kontribusinya masih relatif kecil, sekitar 0,01 persen.

C.2.2. Upaya Pengendalian Inflasi di Papua

Inflasi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat perubahan harga barang dan jasa dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Kenaikan inflasi umumnya berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakat, karena nilai riil uang yang mereka miliki berkurang. Mencermati dinamika perekonomian Papua, pada tahun 2024 BPS menambah dua daerah baru sebagai kota/kabupaten Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayawijaya. Penambahan ini melengkapi tiga daerah yang sebelumnya sudah menjadi basis penghitungan inflasi di Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika. Dengan cakupan yang lebih luas, pengukuran inflasi di Papua diharapkan menjadi lebih representatif dalam menggambarkan dinamika harga dan daya beli masyarakat di berbagai wilayah. Dengan penambahan dua kabupaten IHK baru, pengukuran inflasi di Papua kini mencakup keterwakilan dari masing-masing provinsi di wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan analisis perbandingan tingkat inflasi antarprovinsi secara lebih akurat.

Berdasarkan data per November 2024, terdapat variasi tingkat inflasi *year-on-year* (y-o-y) di masing-masing provinsi, yaitu Provinsi Papua (2,46 persen), Provinsi Papua Selatan (1,23 persen), Provinsi Papua Tengah (4,35 persen), Provinsi Papua Pegunungan (3,58 persen). Perbedaan tingkat inflasi tersebut dipengaruhi oleh dinamika spasial di tiap wilayah, termasuk faktor-faktor seperti distribusi barang, ketersediaan pasokan, serta karakteristik

permintaan lokal.⁶

Sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, KPw BI Papua bersama para pemangku kepentingan daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pangan (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengimplementasikan berbagai strategi yang berlandaskan prinsip 4K: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Salah satu inisiatif utama yang dijalankan adalah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program ini melibatkan berbagai aksi nyata, antara lain:⁷

- Intensifikasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memperkuat jaringan pasokan komoditas pangan,
- Penyelenggaraan Gerakan Pasar Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen,
- Penguatan koordinasi kelembagaan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal,
- *Capacity building* dan pendampingan petani, khususnya untuk komoditas yang berkontribusi besar terhadap inflasi, seperti beras, cabai rawit, bawang merah, dan ikan laut.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, pengendalian inflasi di Papua pun dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga mendukung stabilitas ekonomi regional dan menjaga daya beli masyarakat.

C.2.3. Kondisi Ketenagakerjaan di Papua

Berdasarkan data BPS tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja di

6 KPw Bank Indonesia Provinsi Papua, *Laporan Perekonomian Provinsi Papua*. (Jayapura: KPw BI Papua, 2024), hlm.. 24-37.

7 Lihat "Bank Indonesia Harap TPID Papua Tingkatkan Kolaborasi Melalui GNPIP," *Antara*, 18 Oktober 2024. <https://papua.antaranews.com/berita/730361/bank-indonesia-harap-tpid-papua-tingkatkan-kolaborasi-melalui-gnpip>.

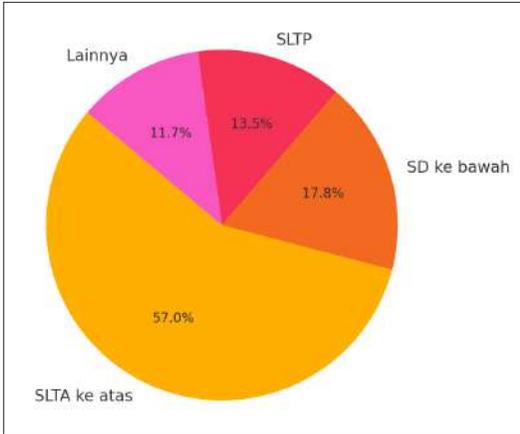
Papua, yakni penduduk berusia 15 tahun ke atas, tercatat sebanyak 2,56 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 52,84 persen adalah laki-laki dan 47,16 persen perempuan. Dari total penduduk usia kerja, sebanyak 1,99 juta orang atau 77,75 persen tergolong sebagai angkatan kerja, sementara sisanya termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja karena bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain di luar aktivitas ekonomi. Selanjutnya, dari 1,99 juta angkatan kerja tersebut, sekitar 1,93 juta orang telah bekerja, sementara sisanya masih menganggur. Komposisi pekerja didominasi oleh laki-laki sebanyak 57,79 persen, sedangkan perempuan sebesar 42,21 persen.⁸

Sebagai indikator utama untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan, digunakan dua parameter: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, yakni mereka yang masuk dalam angkatan kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Di Papua, nilai TPAK tercatat sebesar 77,75 persen, menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi.

Di sisi lain, TPT mencerminkan persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT di Papua pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,83 persen.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas pengangguran berasal dari kelompok penduduk berpendidikan SLTA ke atas, yaitu sebanyak 32.116 orang atau 57,01 persen. Sedangkan 10.045 orang (17,83 persen) adalah lulusan pendidikan dasar (SD ke bawah), dan 7.599 orang (13,49 persen) lulusan SLTP. Data ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pendidikan relatif tinggi, belum tentu langsung berbanding lurus dengan kemudahan mendapatkan

8 BPS Provinsi Papua, *Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Papua*. (Jayapura: BPS Provinsi Papua, 2023), hlm. 45-62.



Grafik 7.3. Komposisi Pengangguran di Papua Berdasarkan Tingkat Pendidikan (2022)

Sumber: BPS Provinsi Papua, *Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Papua*. (Jayapura: BPS Provinsi Papua, 2023).

pekerjaan, mengingat struktur lapangan kerja di Papua masih didominasi oleh sektor informal dan subsisten.

C.3. Tantangan Pengembangan Perekonomian Wilayah Papua

Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, perekonomian Papua masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang menghambat optimalisasi pembangunan ekonomi. Beberapa isu utama meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM), kondisi keamanan, kepastian hukum, dan kendala geografis.

C.3.1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Data BPS tahun 2024 menunjukkan masih rendahnya kualitas SDM di Papua. Hal ini tercermin dari skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Provinsi Papua Pegunungan mencatat IPM sebesar 54,43, sedangkan Provinsi Papua mencapai 73,83. Sebagai perbandingan, rata-rata IPM nasional berada di angka 75,02.

Rendahnya IPM ini sebagian besar disebabkan oleh tingkat pendidikan yang belum merata. Di wilayah perkotaan, lulusan SMA mendominasi penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan proporsi 40,27 persen. Namun, di daerah pedesaan, sebanyak 47,28 persen penduduk berusia produktif bahkan tidak memiliki ijazah. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di wilayah Papua juga merupakan yang tertinggi di Indonesia, dengan rata-rata mencapai 24,36 persen di empat provinsi yang ada.⁹

C.3.2. Kondisi Keamanan

Kondisi keamanan menjadi tantangan serius bagi pengembangan ekonomi di Papua. Terdapat dua jenis konflik utama yang terjadi, yaitu konflik horizontal yang merupakan konflik antar kelompok masyarakat setara, seperti perang antarsuku. Lalu ada juga konflik vertikal, yang adalah konflik antara negara dengan kelompok separatis, khususnya antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dilihat dari intensitas konflik, wilayah di Papua dapat diklasifikasikan menjadi tiga zona, yakni (a) Zona hijau: wilayah tanpa konflik; (b) Zona kuning: wilayah dengan konflik horizontal; dan (c) Zona merah: wilayah dengan konflik horizontal dan vertikal. Beberapa daerah yang masuk kategori zona merah antara lain Puncak, Mimika, Yahukimo, Keerom, Jayawijaya, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Paniai, dan Puncak Jaya.

C.3.3. Kepastian Hukum

Minimnya kepastian hukum menjadi faktor penghambat investasi di Papua. Dalam beberapa kasus, terdapat ketidaksesuaian antara hukum negara dengan hukum adat. Sebagai contoh, lahan yang telah dibeli secara sah berdasarkan hukum nasional masih bisa

9 BPS Indonesia, "Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024," *Berita Resmi Statistik* No. 85/11/Th.XXVII, 15 November 2024.

disengketakan melalui mekanisme hukum adat. Sebagai contoh adalah beberapa kasus pemalangan lahan, yang diawali dari ketidakpuasan atas pembagian hak ulayat, atau tuntutan dari anggota masyarakat adat yang merasa tidak terakomodasi. Ketidakpastian ini meningkatkan risiko usaha dan mengurangi daya tarik Papua sebagai tujuan investasi.

C.3.4. Hambatan Geografis

Letak geografis Papua yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional menimbulkan biaya logistik yang tinggi, baik untuk pengadaan bahan baku maupun distribusi produk ke luar wilayah. Kondisi ini menghambat pencapaian *economies of scale*. Selain itu, keterbatasan infrastruktur transportasi juga menjadi kendala besar, mengingat banyak wilayah di Papua hanya dapat dijangkau melalui jalur udara atau laut. Minimnya konektivitas antardaerah memperberat tantangan pembangunan ekonomi di wilayah ini.

C.4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru¹⁰

C.4.1. Potensi Pariwisata Papua

Dalam pengembangan sektor pariwisata di Papua, Bank Indonesia memegang peranan penting, meskipun kontribusinya tidak bersifat langsung terhadap pembangunan fisik destinasi wisata. Peran utama BI terletak pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya melalui pengendalian inflasi dan stabilisasi harga barang dan jasa, yang menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli wisatawan tetap terjaga, sehingga biaya konsumsi selama berwisata di Papua menjadi lebih terjangkau dan dapat bersaing dengan destinasi lain.

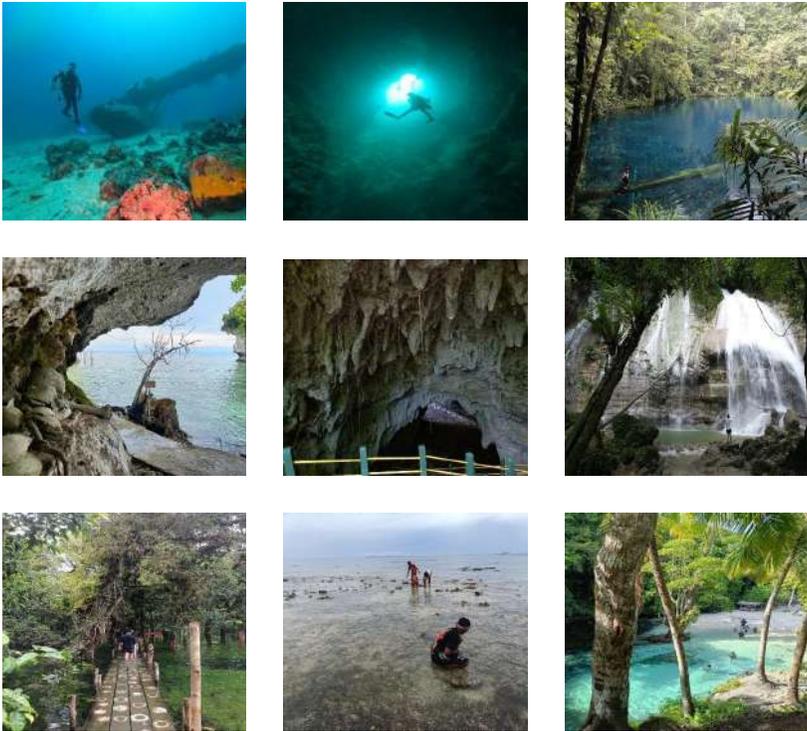
Alam, budaya, dan sejarah Papua menawarkan pengalaman

10 Uraian pada bagian ini disarikan dari *Laporan Perekonomian Provinsi Papua 2024*. (Jayapura: KPW BI Papua, 2024).

wisata yang unik dan otentik, yang sulit ditemukan di daerah lain di Indonesia. Namun, keterbatasan akses dan biaya perjalanan yang relatif tinggi membuat banyak destinasi wisata di Papua masih belum terekspos secara luas. Di sisi lain, kondisi ini justru membantu menjaga kelestarian dan keaslian berbagai aset pariwisata Papua, menjadikannya tetap asri dan asli. Beberapa destinasi wisata utama di Papua antara lain adalah Merauke di Papua Selatan, Nabire di Papua Tengah, serta Kota dan Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua. Salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata besar namun belum banyak dikenal adalah Kabupaten Biak Numfor.

Biak Numfor, yang terletak di Teluk Cendrawasih, terdiri atas dua pulau besar, yaitu Biak dan Numfor, serta 42 pulau kecil yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil dan terumbu karang. Sebagai bagian dari Segitiga Karang Dunia (*coral triangle*), Biak menyimpan kekayaan hayati laut yang melimpah, namun selama ini sering kali tenggelam di bawah bayang-bayang popularitas Raja Ampat di Papua Barat Daya. Potensi wisata Biak sangat beragam, meliputi keindahan bawah laut, pesona alam daratan, hingga kekayaan sejarah.

Di bawah laut, Biak menawarkan sejumlah spot menyelam ikonik, di antaranya Catalina Wreck, sebuah lokasi penyelaman dalam Kota Biak yang memperlihatkan kerangka pesawat amfibi Catalina buatan Amerika Serikat yang tenggelam pada masa Perang Dunia II, serta Wundi Cave, sebuah *dive spot* dengan pilar-pilar tebing bawah laut yang spektakuler. Di daratan, Biak menyuguhkan destinasi seperti Telaga Biru Samares, sebuah telaga alami berair jernih yang terletak di tengah hutan dekat pantai; Kuburan Tua Padwa, situs kuburan kuno masyarakat Biak sebelum masuknya ajaran Kristen, di mana jenazah diletakkan di tebing-tebing pantai; serta Gua Jepang Binsari, sebuah gua bersejarah yang menjadi saksi bisu terkuburnya lebih dari tiga ribu tentara Jepang akibat pemboman oleh pasukan Sekutu pada masa Perang Dunia II.



Gambar 7.2. Beberapa destinasi wisata di Biak. Dari kiri atas ke kanan: Catalina Wreck, Wundi Cave, Telaga Biru Samares, Kuburan Tua Padwa, Gua Jepang Binsari, Air terjun Warsafak, Negeri Dongeng, anak-anak mencari ikan di Pantai Wadibu, Laguna di Pantai Angopi.

Sumber: Koleksi Pribadi Setian dan Dandung T Marsetyo (KPW BI Papua)

Selain destinasi ikonik tersebut, Biak juga menawarkan kekayaan alam lain seperti pantai-pantai indah, air terjun alami, taman burung, desa nelayan tradisional, pasar rakyat, hutan mangrove, dan pulau-pulau pasir. Lokasi wisata di Biak umumnya berdekatan dan dihubungkan oleh jalan raya yang baik, sehingga dalam satu hari perjalanan, wisatawan dapat mengunjungi hingga empat destinasi berbeda. Dari segi infrastruktur pendukung, Biak

telah memiliki bandara internasional, pelabuhan, hotel berbintang, akses internet, dan pusat perbelanjaan, yang mendukung pengembangan sektor pariwisata secara lebih luas. Kesadaran masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti dengan menghindari penggunaan bom ikan, menjadi modal penting bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan di wilayah ini.

Meskipun demikian, tantangan aksesibilitas tetap menjadi salah satu kendala utama. Saat ini, hanya tersedia beberapa penerbangan menuju Biak, yakni Lion Air dari Jayapura, serta Lion Air dan Sriwijaya Air dari Makassar. Kendati demikian, Biak mulai dikenal secara global sebagai destinasi khusus bagi komunitas tertentu, seperti penggemar kapal pesiar (*yacht*) internasional, pengamat burung dari Amerika Serikat dan Eropa, serta peziarah asal Jepang yang ingin mengenang leluhur mereka yang gugur di sana. Dengan kombinasi antara keindahan alam, kekayaan sejarah, serta upaya pelestarian yang konsisten, Biak Numfor memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu tujuan pariwisata unggulan di Indonesia bagian timur.

Selain Biak, Kabupaten Jayawijaya, yang terletak di Provinsi Papua Pegunungan, menawarkan bentang alam pegunungan yang spektakuler serta kekayaan budaya asli Papua yang masih terjaga dalam keseharian masyarakatnya. Wamena, sebagai ibukota Jayawijaya, dikenal luas dengan jargon “Belum ke Papua bila belum ke Wamena,” mencerminkan reputasinya sebagai pusat otentisitas budaya Papua. Salah satu destinasi andalan di kawasan ini adalah Lembah Baliem, sebuah lembah subur yang dikelilingi pegunungan hijau dan menjadi pusat kehidupan suku-suku asli seperti Dani, Yali, dan Lani. Di kawasan ini, wisatawan dapat menyaksikan langsung masyarakat yang beraktivitas dengan pakaian tradisional koteka dan tinggal di honai, rumah adat berbentuk jamur yang dirancang untuk menahan suhu dingin pegunungan.

Festival Lembah Baliem, yang digelar setiap tahun, menjadi



Gambar 7.3. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Jayawijaya. Dari kiri atas ke kanan: Masyarakat Suku Asli, Anak-anak Suku Asli, Tari Perang, Batas Batu Highland, Air Terjun Mboa, Danau Habema, Taman Nasional Lorentz.

Sumber: Koleksi Pribaid Fiqhi Anugerah (KPw BI Papua)

daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Festival ini menampilkan simulasi perang adat, pertunjukan seni tradisional, serta berbagai ritual budaya, sehingga memperkaya pengalaman wisata budaya di Papua. Keunikan lain di kawasan ini adalah tradisi produksi garam pegunungan yang bersumber dari mata air asin, yang dapat ditemukan di desa-desa seperti Kimbim dan Asologaima. Selain itu, Wamena juga menawarkan atraksi budaya berupa mumi tradisional, yakni jenazah para leluhur dan tokoh masyarakat yang diawetkan dengan cara pengasapan. Mumi terkenal di antaranya berasal dari Desa Aikima, yang diperkirakan berusia 300 tahun, dan dari Desa Jiwika yang berusia sekitar 250 tahun. Di Desa Aikima pula, wisatawan dapat menemukan pasir putih yang merupakan bagian dari bekas danau purba.

Tidak hanya budaya, Jayawijaya juga menyuguhkan pesona alam luar biasa. Salah satunya adalah Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid, puncak tertinggi di Indonesia yang diselimuti salju abadi dan menjadi bagian dari Seven Summits dunia. Keberadaannya selalu menarik perhatian para pendaki dari seluruh penjuru dunia. Di kawasan ini juga terdapat Danau Habema, sebuah danau yang disakralkan oleh masyarakat Suku Dani dan terletak di ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut, di tengah Taman Nasional Lorentz.

Guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Jayawijaya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal meningkatkan aksesibilitas dan menekan biaya perjalanan menuju kawasan ini. Selain itu, menciptakan suasana aman dan nyaman bagi wisatawan menjadi faktor kunci untuk mengoptimalkan potensi Jayawijaya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Papua.

C.4.2. Potensi Perikanan Papua

Provinsi Papua memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat

besar, dengan wilayah laut yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717. Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 1.170 mil laut dan perairan teritorial seluas 45.510 kilometer persegi. Selain Kota dan Kabupaten Jayapura, sentra utama perikanan tangkap juga terletak di Biak dan Sarmi. Komoditas utama yang dihasilkan adalah ikan pelagis besar, khususnya kelompok Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT), meskipun komoditas lain seperti tenggiri, kerapu, dan udang juga memiliki prospek yang menjanjikan. Berdasarkan data BPS tahun 2022 yang diolah pada 2024, Provinsi Papua menyumbang sekitar 4 persen atau 49.464 ton dari total produksi nasional perikanan tangkap TCT.

Potensi perikanan tangkap di WPP 717 ini didukung oleh hasil-hasil penelitian ilmiah. Penelitian Safruddin dan Zainuddin menunjukkan bahwa perairan Pasifik di sebelah utara Papua merupakan jalur migrasi utama ikan pelagis besar.¹¹ Sementara itu, penelitian Hisyam dan Sumardi menjelaskan bahwa arus laut di perairan utara Papua membawa massa air yang kaya nutrisi, yang mendukung produktivitas dasar rantai makanan laut dan memperkuat populasi ikan pelagis di kawasan tersebut.¹² Melihat peluang ini, Pemerintah Indonesia telah membangun sentra perikanan terpadu di Biak, yang dilengkapi dengan sarana pelabuhan, *cold storage*, *air blast freezer*, serta fasilitas wisata dan kuliner. Biak bahkan telah mulai mengeksport ikan TCT ke Jepang, memperluas kontribusinya dalam perdagangan internasional.

Sementara itu, Provinsi Papua Selatan, yang masuk dalam WPP 718, meliputi Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur. Dengan garis pantai yang membentang di bagian selatan

11 Safruddin R. Hidayat & M. Zainuddin, "Daerah Penangkapan Ikan Cakalang Berbasis Data Citra Oseanografi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713," *TORANI: Journal Fisheries and Marine Science*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 51-60.

12 Muhammad Hisyam dan Sitti Rosnafi'an Sumardi, "Analisis Perbandingan Kualitas Air Laut Teluk Youtefa dan Yos Sudarso, Jayapura, Papua," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, Vol. 16. No. 2, (2024), hlm. 253-263.

Indonesia dan berbatasan langsung dengan Laut Arafura dan Samudera Hindia, wilayah ini menjadi jalur migrasi berbagai spesies ikan, sehingga menghasilkan keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Sentra utama perikanan di Papua Selatan berada di Kabupaten Asmat, Kepulauan Merauke, dan Kabupaten Mappi. Menurut data BPS tahun 2024, Papua Selatan berhasil mengekspor kepiting dengan nilai mencapai 409,60 ribu dolar AS pada tahun 2023.

Produk perikanan dari Papua dan Papua Selatan tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi bahan baku utama bagi restoran di Jawa, Bali, dan Sulawesi, serta dalam skala kecil diekspor ke negara-negara seperti Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat. Melihat pentingnya sektor ini, KPw BI Papua pun turut berperan aktif dalam mendukung pengembangan perikanan daerah, antara lain melalui program penguatan klaster unggulan, fasilitasi akses keuangan, serta peningkatan kapasitas nelayan dan UMKM berbasis hasil laut. Bank Indonesia juga mendorong perluasan penggunaan sistem pembayaran non-tunai di sentra-sentra pelelangan ikan dan pasar tradisional, guna meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat literasi keuangan, serta mendorong integrasi sektor perikanan lokal ke dalam ekosistem ekonomi digital.

Meski potensinya besar, sektor perikanan Papua dan Papua Selatan masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah lemahnya kelembagaan nelayan yang menghambat posisi tawar dalam rantai nilai produksi, belum optimalnya tata kelola perikanan, keterbatasan sarana dan prasarana untuk penangkapan hingga pemasaran, serta akses permodalan yang terbatas. Di samping itu, persoalan lingkungan seperti degradasi ekosistem laut dan praktik penangkapan ikan berlebihan menjadi ancaman serius yang harus segera ditangani untuk memastikan keberlanjutan sektor ini. Dalam konteks ini, sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk dukungan

berkelanjutan dari Bank Indonesia dalam membangun ekosistem ekonomi lokal yang tangguh, menjadi sangat krusial untuk masa depan perikanan Papua.

C.4.3. Perkembangan Kerajinan Ukir di Papua

Kerajinan patung dari Papua merupakan salah satu bentuk ekonomi kreatif yang telah mendapat pengakuan di tingkat internasional. Dua ikon utama kerajinan patung Papua adalah patung Suku Asmat dari Papua Selatan dan patung Suku Kamoro dari Papua Tengah. Kedua suku ini mendiami wilayah pesisir selatan Pulau Papua dan memiliki tradisi seni ukir yang kuat serta makna budaya yang dalam.

Patung Asmat mulai dikenal dunia secara luas sejak peristiwa hilangnya Michael Rockefeller pada tahun 1961. Putra Gubernur New York tersebut awalnya tertarik untuk memamerkan patung-patung Asmat di Museum of Primitive Art di New York. Namun peristiwa tragis dalam ekspedisinya justru membuka mata dunia terhadap kekayaan budaya Asmat. Bagi masyarakat Asmat, seni ukir adalah warisan turun-temurun yang berfungsi sebagai penghubung antara dunia manusia dan roh leluhur. Setiap patung Asmat dibuat tanpa sketsa, mencerminkan kehidupan spiritual dan sosial masyarakat, dengan detail ukiran yang penuh simbolisme. Keistimewaan ini membuat patung Asmat sangat dihargai oleh kolektor dan museum di Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Para pematung Asmat, atau yang juga dikenal dengan nama Wow-Ipits, bahkan kerap diundang untuk mengajar di berbagai universitas di luar negeri.

Koleksi seni Suku Asmat saat ini dapat dinikmati di Museum Asmat yang didirikan atas prakarsa misionaris Katolik, RP Frank Trenkenschuh, pada tahun 1971. Museum ini sekarang memiliki lebih dari 2.400 karya seni. Guna melestarikan dan mempromosikan tradisi ukir Asmat, setiap tahun diselenggarakan



Gambar 7.4. Berbagai bentuk hasil kerajinan patung Asmat. Dari kiri ke kanan: arwah leluhur, diterkam buaya dan mengarungi sungai

Sumber: Koleksi Pribadi Dandung Tri Marsetyo (KPw BI Papua)

Festival Asmat Pokman—dengan “pok” berarti “karya” dan “man” berarti “tangan.” Festival ini diinisiasi oleh Keuskupan Agats pada tahun 1981 dan mengundang ratusan pematung yang berlomba memperkenalkan karya mereka. Pada tahun 2023, nilai transaksi dalam festival ini mencapai Rp3 miliar, lantaran berhasil menarik wisatawan dan kolektor mancanegara. Selain melalui festival dan museum, patung Asmat juga banyak dipasarkan melalui jalur ekspor informal, terutama melalui Bali. Salah satu patung Asmat yang paling dikenal adalah *Mbis*, sebuah ukiran nenek moyang setinggi 5–8 meter yang menggambarkan kekuatan, kesuburan, dan hubungan manusia dengan alam.¹³

13 “Seni Ukir Asmat, Warisan Budaya yang Mendunia,” *Jubi.id*, 20 Juni 2024. <https://jubi.id/seni-budaya/2024/seni-ukir-asmat-warisan-budaya-yang-mendunia/>

Di sisi lain, patung Suku Kamoro, meskipun berada di bawah bayang-bayang ketenaran patung Asmat, juga memiliki daya tarik yang tak kalah kuat. Patung Kamoro merupakan bagian integral dari budaya suku Kamoro dan dirayakan melalui Festival Kamoro Kakuru yang pertama kali diadakan pada tahun 1998. Festival ini dipelopori oleh Dr. Kal Muller yang melihat pentingnya revitalisasi seni ukir Kamoro yang sempat mengalami kemunduran. Dukungan dari Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe dan PT. Freeport Indonesia memperkuat pengembangan seni ukir Kamoro, dengan membangun etalase pameran di Timika dan Jakarta serta berpartisipasi aktif dalam berbagai ajang budaya nasional dan internasional. Salah satu ikon utama dalam tradisi ukir Kamoro adalah *Mbitoro*, totem leluhur suci yang digunakan dalam upacara inisiasi anak laki-laki. *Mbitoro*, dengan tinggi mencapai 10–15 meter, ditempatkan di bagian depan rumah adat Karapao dan dipahat melalui ritual sakral yang tidak boleh disaksikan oleh perempuan.

Dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kerajinan patung Asmat dan Kamoro, KPw BI Papua turut berperan aktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Dukungan tersebut meliputi penguatan kluster ekonomi kreatif, fasilitasi promosi melalui *event* budaya dan pameran nasional, pelatihan peningkatan kapasitas perajin, serta perluasan akses sistem pembayaran digital untuk transaksi karya seni. Bank Indonesia melihat kerajinan berbasis budaya ini tidak hanya sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi lokal yang potensial di masa depan.

Dengan kekayaan seni ukir yang otentik dan dukungan ekosistem yang semakin kuat, kerajinan patung Asmat dan Kamoro berpotensi menjadi duta budaya Papua di kancah dunia sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.

D. KPw BI Provinsi Papua di Era Otonomi Daerah

Seiring dengan dinamika reformasi politik nasional pasca-krisis 1998, KPw BI Papua juga mengalami transformasi kelembagaan yang signifikan. Jika pada awalnya peran KPw BI Papua terbatas pada operasional sistem pembayaran dan pengawasan perbankan, maka dalam perkembangannya, mandat dan fungsi lembaga ini diperluas seiring dengan perubahan arah kebijakan Bank Indonesia pasca terbitnya undang-undang baru tentang Bank Indonesia tahun 1999 dan 2004.

KPw BI Papua kini menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, memperkuat sistem keuangan regional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi ini juga mencakup penguatan fungsi advisory kepada pemerintah daerah, pengembangan UMKM, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta optimalisasi peran KPw BI dalam mendukung ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal Papua.

D.1 Transformasi Kelembagaan KPw BI Papua

Selain melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus, salah satu capaian penting reformasi pasca-Krisis Ekonomi 1998 adalah Undang-Undang tentang Independensi Bank Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga independen dengan tujuan tunggal, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI diberikan tugas utama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Dengan demikian, BI secara struktural berdiri di luar pemerintahan, dan Gubernur Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari Kabinet.

Sejak berstatus independen, Kantor Bank Indonesia (KBI)

mengalami sejumlah evolusi kelembagaan. Pada tahun 2007, BI menyempurnakan struktur organisasi KBI yang sebelumnya berdasarkan ketentuan tahun 1996. Penyempurnaan ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diatur melalui Surat Edaran No. 9/12/INTERN tanggal 30 Maret 2007, efektif sejak 2 April 2007, di mana KBI Kelas I yang semula berjumlah lima (Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar) bertambah menjadi sembilan, dengan penambahan KBI Padang, Palembang, Banjarmasin, dan Denpasar. Namun demikian, KBI Jayapura tetap berada pada klasifikasi Kelas III, di bawah koordinasi KBI Makassar yang menjadi koordinator wilayah timur, termasuk Manado, Palu, Kendari, Ambon, Jayapura, dan Ternate.¹⁴

Tahap kedua penyempurnaan organisasi dilakukan melalui Surat Edaran No. 9/24/INTERN tanggal 26 Juni 2007, berlaku mulai 2 Juli 2007.¹⁵ Dalam ketentuan ini, peran seluruh Kantor Bank Indonesia diperkuat melalui penyesuaian visi, misi, fungsi, dan tugas pokok, yaitu:

- Memberikan masukan kepada Kantor Pusat mengenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah;
- Menyelenggarakan operasional sistem pembayaran tunai dan nontunai sesuai kebutuhan ekonomi daerah;
- Melaksanakan pengawasan terhadap perbankan di wilayah kerja;
- Memberikan saran kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan ekonomi berbasis kajian yang akurat.

Penyempurnaan ini sejalan dengan arah strategis Bank Indonesia untuk memperkuat fungsi Kantor Bank Indonesia sebagai penasihat (*advisor*) pemerintah daerah. Salah satu bentuk

14 SE 9/12/INTERN tanggal 30 maret 2007 perihal Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia Tahap I.

15 SE 9/12/INTERN tanggal 30 maret 2007 perihal Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia Tahap II.

konkret implementasi adalah penempatan lebih banyak Pegawai Muda Bank Indonesia di kantor-kantor daerah, menggantikan kecenderungan sebelumnya yang lebih memusatkan pegawai di Kantor Pusat Jakarta. Produk-produk yang dihasilkan dalam kerangka ini antara lain Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA), Statistik Perbankan Indonesia (SPI), dan Statistik Sistem Pembayaran (SSP), yang kemudian dikompilasi menjadi satu dalam SEKDA.

Selain itu, sebagai bagian dari penyempurnaan kelembagaan, diterbitkan pula laporan triwulan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKDA) yang berisi kajian komprehensif kondisi perekonomian daerah. Seiring perkembangan, PEKDA berevolusi menjadi Kajian Ekonomi Regional (KER) dan akhirnya menjadi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP), yang disusun berdasarkan koordinasi erat dengan Pemerintah Daerah, BPS, sektor perbankan, dan pemangku kebijakan lainnya. LPP mencakup informasi tentang: (a) Perkembangan ekonomi regional dan inflasi; (b) Moneter, perbankan, dan sistem pembayaran; (c) Ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat; (d) Keuangan daerah; (e) Prospek perekonomian regional; (f) Penelitian pengembangan (seperti pengembangan UMKM dan investasi daerah).

Transformasi kelembagaan berlanjut pada tahun 2012, melalui Surat Edaran No. 14/10/INTERN, di mana penyebutan Kantor Bank Indonesia (KBI) diubah menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI), termasuk untuk Jayapura. Perubahan nomenklatur ini bertujuan memperkuat citra kelembagaan dan kesetaraan BI dengan unsur Muspida serta memperluas cakupan kerja hingga ke seluruh wilayah provinsi, tidak hanya di ibukota.¹⁶

Perubahan besar lainnya terjadi pada 31 Desember 2013, ketika fungsi pengawasan perbankan dialihkan dari Bank

16 SE 14/10/INTERN tanggal 18 maret 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/Intern tanggal 2 April 2012 tentang Nama Jabatan, Nama dan Rubrik Satuan Kerja dan Unit Kerja di Bank Indonesia.

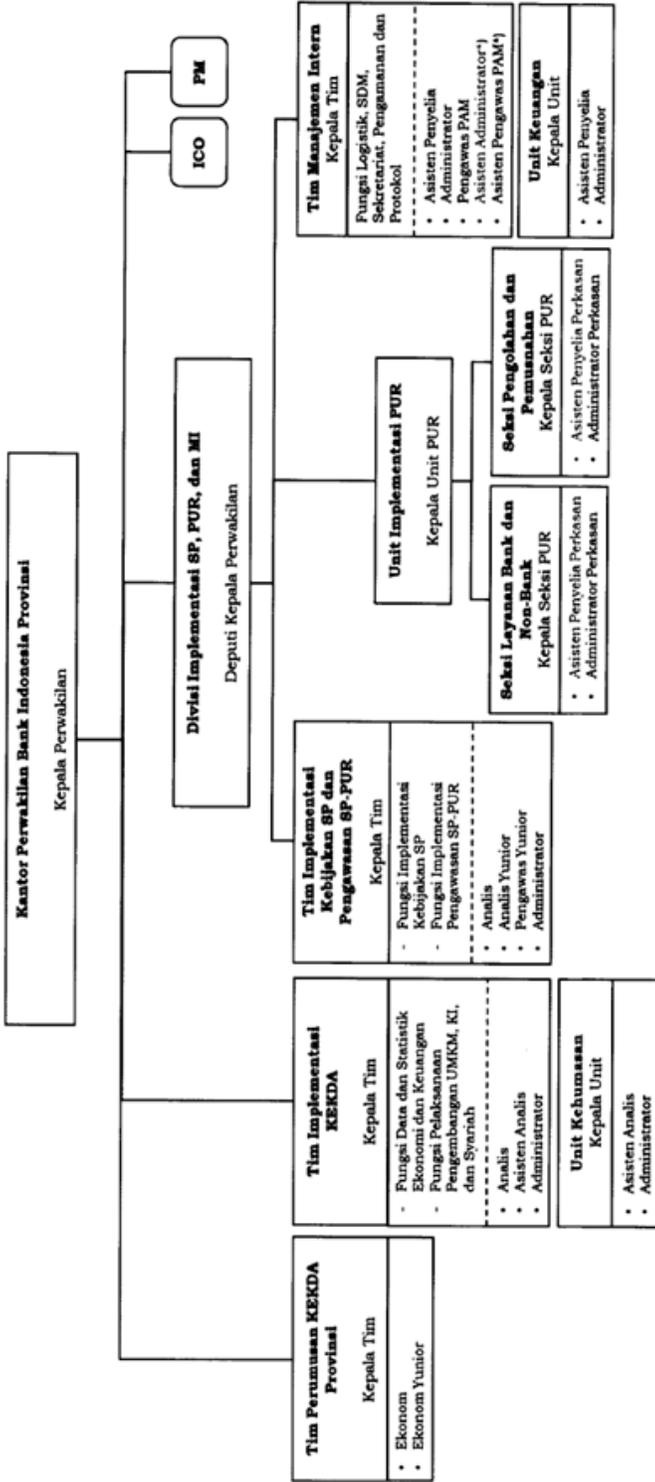
Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sejak itu, BI fokus pada pengawasan makroprudensial sistem keuangan, sementara pengawasan mikroprudensial bank individual dilakukan oleh OJK. Pengalihan ini menyebabkan pelaksanaan tugas pengawasan di KPw BI Papua bertransisi, meskipun secara administratif, hingga akhir 2015 fungsi OJK masih berbagi fasilitas gedung KPw BI Papua sebelum memiliki kantor sendiri.

Pada akhir tahun 2014, sejalan dengan pemekaran wilayah Papua yang melahirkan Provinsi Papua Barat, Bank Indonesia mendirikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat di Manokwari. Kemudian, berdasarkan Surat Edaran No. 18/82/INTERN tanggal 30 September 2016, KPw BI Papua diklasifikasikan sebagai Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Kelompok B, sejajar dengan KPwDN di provinsi-provinsi utama seperti DKI Jakarta, Bali, Sumatera Selatan, dan lainnya.¹⁷ Ketentuan ini diperkuat kembali dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern No. 22/37/PADG Intern/2020.

Sebagai bagian dari KPwDN Kelompok B, KPw BI Papua mengemban tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, termasuk koordinasi dan komunikasi kebijakan ekonomi daerah;
2. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait pengembangan ekonomi daerah, ekonomi syariah, dan kehumasan;
3. Menjalankan operasional sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah, dan kliring di daerah;
4. Melaksanakan pengawasan, perizinan, dan perlindungan konsumen di sektor sistem pembayaran serta pengelolaan uang Rupiah.

17 SE 18/82/INTERN tanggal 30 September 2016 perihal Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok B.



Keterangan:
1) Jabatan grand/cathering

Gambar 7.5. Struktur Organisasi KPw BI Provinsi Papua

Sumber: PADG 22/37/PADG Intern/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) Kelompok B.

Sejalan dengan pemekaran wilayah Provinsi Papua pada 22 Juli 2022, yang ditandai dengan terbentuknya tiga DOB, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, cakupan wilayah kerja KPw BI Papua mengalami perluasan yang signifikan. Kini, selain Provinsi Papua, wilayah kerja KPw BI Papua juga mencakup ketiga provinsi baru tersebut. Perluasan wilayah ini membawa sejumlah tantangan baru bagi KPw BI Papua.

Pertama, medan kerja yang berat. Sebagian besar wilayah kerja tidak dapat diakses melalui jalur darat dan hanya dapat dijangkau melalui pesawat udara atau kapal laut. Selain itu, beberapa titik di wilayah Papua tergolong dalam kategori kurang aman atau bahkan tidak aman, yang memperbesar tantangan mobilitas dan pelaksanaan tugas.

Kedua, kesenjangan pembangunan antarprovinsi. Tingkat ketimpangan yang cukup tinggi dalam hal sumber daya manusia, sumber daya alam, serta infrastruktur antarprovinsi menyebabkan variasi persoalan di setiap daerah. Akibatnya, program kerja dan pendekatan solusi yang ditawarkan pun harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing provinsi.

Ketiga, kesiapan pemerintahan daerah baru. Pemerintahan provinsi di DOB belum sepenuhnya dapat berfungsi efektif, karena masih dihadapkan pada berbagai persoalan administratif. Hambatan tersebut meliputi belum lengkapnya struktur organisasi dan jabatan, ketidakjelasan pembagian tugas dan wewenang antara provinsi dan kabupaten/kota, adaptasi sumber daya manusia terhadap tugas dan tanggung jawab baru, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional pemerintahan.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan ini, KPw BI Papua pun berupaya menyesuaikan strategi kerja, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta melakukan pendekatan yang lebih adaptif agar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas regional tetap dapat terjaga secara optimal.

D.2. Pelaksanaan Tugas di KPw BI Provinsi Papua

Merujuk pada lima tugas pokok dan struktur organisasi yang berlaku, peran KPw BI Papua dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu: (1) Perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah; (2) Pengawasan dan penyelenggaraan sistem pembayaran; (3) Pengedaran uang. Dalam implementasinya, ketiga kelompok tugas ini dilaksanakan secara sinergis untuk mencapai efektivitas, efisiensi, serta menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

D.2.1 Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah¹⁸

Pelaksanaan dua tugas pokok pertama, yaitu implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah serta koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengembangan ekonomi daerah, ekonomi syariah, dan kehumasan, menjadi domain Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (TPKP) dan Tim Implementasi KEKDA (TIK).

Secara umum, TPKP bertugas mengelola informasi, menyusun proyeksi ekonomi daerah, memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, serta berperan sebagai fasilitator dalam mengangkat isu-isu strategis daerah ke tingkat pusat. Selain itu, TPKP juga berperan dalam menyusun materi komunikasi dan edukasi terkait kebanksentralan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat terhadap peran dan fungsi Bank Indonesia.

Selama periode 2022–2024, KPw BI Papua telah menghasilkan tujuh kajian strategis, di antaranya: (1) Pemanfaatan kendaraan

18 Pembahasan pada bagian ini disarikan dari laporan-laporan yang disusun oleh Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah serta Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, KPw Bank Indonesia Papua dan Papua Barat 2022 - 2024.

listrik di Kabupaten Asmat; (2) Peluang pengembangan ekonomi hijau di Papua; (3) Kajian neraca pangan Kota Jayapura; (4) Pengembangan perdagangan lalu lintas di PLBN Skouw; (5) Strategi optimalisasi lahan untuk komoditas pangan strategis; (6) Model pengembangan sub-sektor perikanan tangkap tuna, cakalang, dan tongkol berbasis kearifan lokal di Kota Jayapura; (7) Kajian neraca pangan dan rantai nilai komoditas strategis di Kabupaten Merauke.

Sementara itu, TIK melaksanakan fungsi operasional di bidang statistik ekonomi dan keuangan melalui Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan (FDSEK), pengelolaan komunikasi publik melalui Unit Kehumasan (UK), serta pemberdayaan ekonomi melalui Fungsi Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah (FPPUKIS).

Untuk menghasilkan laporan dan analisis perekonomian yang akurat dan terpercaya, FDSEK secara rutin melakukan lima jenis survei utama, yaitu Survei Konsumen (SK), Survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Survei Pemantauan Harga (SPH), Survei Pedagang Eceran (SPE), dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), serta liaison dengan pelaku ekonomi di wilayah Papua.

Dalam bidang kehumasan, UK secara konsisten menyelenggarakan Bincang-Bincang Media yang melibatkan media lokal dan nasional, serta mendukung kegiatan pengendalian inflasi daerah, antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Selain itu, UK juga mengkoordinir penyaluran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan mengelola layanan perpustakaan publik KPw BI Papua.

Adapun FPPUKIS berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, memperluas akses keuangan, serta mendorong pemberdayaan UMKM, masyarakat subsisten, dan pesantren. Karena cakupan tugas FPPUKIS cukup luas, pembahasan lebih rinci mengenai produk dan programnya akan disampaikan pada bab tersendiri.

D.2.2. Pengawasan dan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran di Papua

Pelaksanaan tugas pokok ketiga dan keempat KPw DN Kelas B di KPw BI Provinsi Papua—yakni implementasi kebijakan Sistem Pembayaran (SP), Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), dan Keuangan Inklusif (KI)—dilakukan melalui operasional SP non-tunai serta kegiatan pengawasan, perizinan, dan perlindungan konsumen di bidang SP dan PUR. Seluruh mandat ini menjadi tanggung jawab utama Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP-PUR (TSP).

Sebelum perkembangan sistem pembayaran yang dinamis dan digital seperti saat ini, sistem pembayaran Bank Indonesia terbatas pada layanan kliring antarbank atau kliring lokal. Namun, seiring meningkatnya tuntutan transaksi baik dari sisi nominal maupun volume, Bank Indonesia meluncurkan BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) pada 17 November 2000.

Di wilayah kerja KPw BI Papua, untuk mendukung operasional *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), terdapat dua Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD), yakni di Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. KPWD Jayapura diikuti oleh 17 bank peserta, sementara KPWD Biak diikuti oleh enam bank peserta. Jumlah transaksi warkat debit menunjukkan tren peningkatan tahunan, meskipun dengan fluktuasi bulanan.

Pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), sebuah standar pembayaran berbasis QR Code. Kehadiran QRIS melengkapi sistem pembayaran yang telah ada, seperti transaksi uang tunai, transfer bank, dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). QRIS menghadirkan metode pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal (cemumuah).¹⁹

19 Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Indonesia: Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), hlm. 75.

Diluncurkan sebelum merebaknya pandemi COVID-19, QRIS berkontribusi besar dalam mendorong transaksi tanpa kontak fisik, sehingga turut mendukung upaya pencegahan penyebaran virus. Penggunaan QRIS di Papua menunjukkan pertumbuhan pesat, di mana pada 2020 tercatat 26.691 merchant dengan volume transaksi 4.605. Hingga September 2024, jumlah merchant meningkat hampir delapan kali lipat menjadi 209.847 dengan volume transaksi 10.334.527. Pengguna QRIS di Papua mencapai 210.057 orang.²⁰

Namun demikian, penyebaran QRIS belum merata di seluruh Papua karena keterbatasan jaringan telekomunikasi dan rendahnya literasi keuangan digital di beberapa wilayah. Untuk mengatasi tantangan ini, Bank Indonesia bersama *stakeholders* seperti Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, pemuka agama, dan akademisi memperkuat sinergi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi guna memperluas penerimaan QRIS.

Setelah QRIS, Bank Indonesia meluncurkan BI-FAST pada 21 Desember 2021, sebagai modernisasi dari Sistem Kliring Nasional (SKN) dan RTGS. Dengan biaya transaksi yang lebih rendah, kehadiran BI-FAST disambut antusias oleh masyarakat, tercermin dari peningkatan volume dan nilai transaksi secara signifikan.²¹

Selain menjadi penyelenggara sistem pembayaran digital, Tim Sistem Pembayaran di KPw BI Papua juga berperan aktif dalam pengawasan penggunaan uang Rupiah, terutama mengingat wilayah Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Terdapat dua titik perbatasan utama, yaitu Skouw di Jayapura (Provinsi Papua) dan Sota di Merauke (Provinsi Papua Selatan).

20 “BI Papua Barat: Transaksi QRIS pada Januari-Oktober Rp765,87 Miliar,” *Antara*, 3 Desember 2024. Lihat <https://papuabaratarantaranews.com/berita/55797/bi-papua-barat-transaksi-qr-is-pada-januari-oktober-rp76587-miliar>. Artikel diakses pada 12 Mei 2025.

21 Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021: Bangkit dan Optimis: Transformasi Kebijakan dan Kelembagaan untuk Pemulihan Ekonomi*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), hlm. 76.

Untuk memastikan masyarakat tetap bertransaksi menggunakan Rupiah di wilayah perbatasan, KPw BI Papua mengawasi dua Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), yakni PT Jaya Utama Mandiri di Entrop dan PT Brata Eddy Batas di Pasar Hamadi. Selain itu, tersedia lima tempat penukaran uang resmi, empat di Pasar Perbatasan Skouw dan satu di Pasar Perbatasan Sota. Penyediaan layanan ini merupakan strategi “jemput bola” agar masyarakat dapat menukar valuta asing tanpa harus ke Kota Jayapura.

D.2.3. Pendistribusian Uang di Daerah

Pelaksanaan tugas pokok kelima untuk KPw DN Kelas B di KPw BI Provinsi Papua, yakni operasional Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), menjadi domain Unit Implementasi PUR. Wilayah kerja Unit Implementasi PUR KPw BI Papua meliputi empat provinsi dengan cakupan 29 kabupaten/kota, ditambah satu wilayah tambahan, yakni Kabupaten Sorong, yang secara geografis masuk dalam wilayah kerja KPw BI Papua Barat. Pengelolaan Kas Titipan Sorong tetap berada di bawah KPw BI Papua karena saat KPw BI Papua Barat dibentuk pada tahun 2004, kapasitas infrastrukturnya belum mencukupi kebutuhan likuiditas wilayah Sorong.

Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur di Papua, khususnya akses jalur darat antarkabupaten dari Jayapura hingga Merauke, mengakibatkan distribusi uang memerlukan biaya tinggi. Untuk memastikan uang Rupiah beredar dalam kondisi layak edar, sesuai denominasi, dan tepat waktu, distribusi uang dilakukan melalui maskapai udara, baik komersial maupun charter flight, serta kapal laut.

Saat ini, KPw BI Papua memiliki tujuh Kas Titipan, yaitu di Sorong, Biak, Nabire, dan Serui (dijangkau melalui jalur laut dan udara), serta Wamena, Timika, dan Merauke (dijangkau melalui jalur udara). Kegiatan Distribusi Kas Keliling Luar Kota (KKLK)

dilaksanakan di seluruh 29 kabupaten/kota di Papua, kecuali empat wilayah yang memiliki akses darat, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi. Untuk daerah yang tidak terjangkau jalan raya, distribusi menggunakan pesawat jenis *caravan* melalui sistem carter.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG), fungsi PUR dan SP (Sistem Pembayaran) di KPw BI Papua memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi untuk menjaga kedaulatan NKRI. Salah satu inisiatifnya adalah melalui sosialisasi Program Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah dan layanan kas keliling ke daerah perbatasan. Pada tahun 2018, KPw BI Papua membentuk Satuan Tugas Pengawasan (SATGASWAL) bersama 11 instansi terkait untuk memastikan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah perbatasan RI-PNG. Sosialisasi CBP tidak hanya menekankan pentingnya keaslian dan perawatan fisik uang Rupiah, tetapi juga menanamkan pemahaman tentang peran Rupiah sebagai simbol identitas nasional serta fungsinya dalam perekonomian nasional.

Sejak tahun 2022, KPw BI Papua juga menjalankan program tahunan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) bekerja sama dengan Markas Besar Angkatan Laut. Melalui penggunaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), tim ERB mengunjungi pulau-pulau Terdepan, Tertinggal, dan Terpencil (3T) di Papua. Selain mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi CBP dan memberikan layanan penukaran Uang Tidak Layak Edar (UTLE) maupun uang rusak, program ini juga menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan peralatan pendukung pendidikan seperti laptop dan proyektor. Beberapa daerah yang telah dikunjungi dalam misi ERB antara lain Pulau Liki, Distrik Teba Warembori, Waropen, Pulau Yapen, Pulau Numfor, Pulau Bepondi, Pulau Pai, Pulau Owi, dan Pulau Bras.

Salah satu tantangan terberat yang pernah dihadapi dalam pengelolaan uang rupiah di Papua terjadi pada masa pandemi

COVID-19 tahun 2020, ketika diberlakukan kebijakan *total lockdown* yang menutup seluruh akses keluar masuk bandara, baik dari maupun ke luar Papua. Dalam situasi darurat tersebut, KPw BI Papua memperoleh izin dan akses khusus dari Pemerintah Provinsi Papua melalui koordinasi intensif dengan Inspektorat Pengelolaan Uang Rupiah (IPUR) Papua, guna memastikan bahwa uang kartal tetap beredar di wilayah Papua dalam kondisi layak edar, sesuai denominasi, dan tepat waktu.

Untuk mengatasi hambatan distribusi, Unit Implementasi PUR melaksanakan pengiriman uang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Distribusi dilakukan menggunakan *charter flight* bekerja sama dengan maskapai lokal, seperti Alda Air. Langkah ini menjadi krusial untuk menjaga kelancaran transaksi ekonomi masyarakat Papua di tengah keterbatasan mobilitas akibat pandemi.

E. Sinergi Kelembagaan TPID dan Pembinaan UMKM

Dalam menjalankan tugasnya, KPw BI Provinsi Papua tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perbankan, pengusaha, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan media massa. Bentuk sinergi ini antara lain tercermin dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), program pengembangan UMKM, dan Festival Kopi Papua.

E.1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

TPID merupakan salah satu wujud sinergi strategis antara KPw BI Papua dan berbagai *stakeholders* daerah untuk menjaga stabilitas inflasi, yang menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Indonesia menghadapi tantangan inflasi yang kompleks, yang tidak hanya berasal dari sisi permintaan, tetapi

juga dari gangguan sisi pasokan, seperti hambatan produksi, distribusi, serta kebijakan harga pemerintah atas komoditas strategis seperti BBM dan bahan pangan.

Karakteristik inflasi tersebut menuntut koordinasi erat antarinstansi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, TPID dibentuk sebagai forum koordinasi yang menghubungkan kebijakan pengendalian inflasi antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah. TPID tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi dan harmonisasi kebijakan, tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan inflasi berbasis karakteristik wilayah.²²

Kesadaran terhadap pentingnya koordinasi ini mulai menguat sejak 2005, ketika pemerintah dan Bank Indonesia mendorong pembentukan TPID. Awalnya TPID berfungsi sebagai forum komunikasi antarwilayah. Perkembangan signifikan terjadi pada 2013 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/SJ tentang “Menjaga Ketersediaan Barang dan Jasa di Daerah,” yang mendorong pembentukan TPID di seluruh Indonesia hingga mencapai 197 unit pada awal 2014.²³

Di Tanah Papua, pengendalian inflasi mulai diperkuat setelah Kota Jayapura menjadi kota Indeks Harga Konsumen (IHK) pertama pada 1998. Kota Jayapura mengalami inflasi tinggi pada periode 1998–2008, dengan rata-rata inflasi tahunan sekitar 10%. Kondisi tersebut mendorong pembentukan TPID Provinsi Papua pada 18 Oktober 2010 dan TPID Kota Jayapura pada 30 November 2012. Sejak itu, pembentukan TPID di kabupaten/kota lainnya di Papua terus berkembang.

Pada tahun 2021, TPID Provinsi Papua meraih penghargaan TPID Provinsi Terbaik 2020 untuk wilayah Nusa Tenggara–

22 TPID, *Buku Petunjuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah*. (Jakarta: Pokjanas TPID, 2014), hlm. iii.

23 Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/SJ tentang “Menjaga Ketersediaan Barang dan Jasa di Daerah”.

Maluku–Papua (Nusampua) dengan program “Pengendalian Inflasi Terintegrasi di Masa Pandemi COVID-19.” Di tingkat kabupaten/kota, TPID Kota Jayapura juga dinobatkan sebagai TPID Kabupaten/Kota Terbaik 2020 melalui program “Tifa Kaka” (Peningkatan Kapasitas Produksi Komoditas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan). Pada Rakornas TPID 2024, TPID Kota Jayapura kembali masuk dalam tiga besar nominasi TPID Terbaik wilayah Nusampua.

Sebagai inisiatif lanjutan, Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk memperkuat pengendalian inflasi, terutama pada komoditas pangan strategis. Di Papua, GNPIP 2022 dilaksanakan di Kabupaten Merauke, GNPIP 2023 di Kabupaten Keerom, dan GNPIP 2024 kembali di Kabupaten Merauke. Program GNPIP menitikberatkan pada strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Selain itu, rangkaian GNPIP 2024 di Papua memperluas berbagai inisiatif, antara lain:

- Pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) sebanyak 439 kali di empat provinsi DOB Papua.
- Perluasan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) melalui Program PI-KEKDA.
- Pemberian bantuan alsintan dan saprotan kepada kelompok tani.
- Hilirisasi produk pertanian dan penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri.
- Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan fasilitasi distribusi pangan.

Inovasi lain yang diinisiasi KPw BI Papua dalam 2024 mencakup:

- Pembentukan *Jaringan Petani Papua Berdaya* (JANIPA).
- Gerakan sinergi Masjid, Pondok Pesantren, Petani, dan

Instansi (Gerobak Sentani).

- Gerakan Bersama dengan Gereja (Gerbang Kasih) untuk stabilisasi pasokan pangan.
- Penandatanganan MoU Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara distributor Sulawesi Selatan dan Jayapura.
- Pengembangan bawang putih di Wamena dan penggunaan teknologi *True Shallot Seed* (TSS) untuk bawang merah.
- Penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) tentang Inflasi Daerah untuk Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Seluruh inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat Bank Indonesia dan TPID dalam mendorong stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua secara berkelanjutan.

E.2. Pengembangan UMKM di Papua: Sinergi Bank Indonesia dan Stakeholders

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk sinergi strategis antara KPw BI Provinsi Papua dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini bertujuan mendorong peningkatan produktivitas untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan dan mengoptimalkan potensi komoditas unggulan daerah, sehingga mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen ini semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang menempatkan Bank Indonesia sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan mandat untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Sejauh ini, KPw BI Papua telah melakukan pembinaan kepada berbagai UMKM di sektor pangan, komoditas unggulan, dan

kerajinan. Pada sektor pangan, pembinaan mencakup Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) padi, cabai, bawang merah, dan perikanan. Untuk komoditas unggulan, BI membina kelompok petani kopi di Papua Pegunungan serta kakao di Provinsi Papua. Sementara di sektor kerajinan (kriya), pembinaan diberikan kepada pengrajin kain, tas noken, dan patung khas Papua.

Dalam perjalanan pengembangan UMKM, berbagai tantangan seperti rendahnya kualitas SDM, keterbatasan infrastruktur, dan hambatan logistik kerap dihadapi. Namun, berkat pendekatan yang konsisten dan kolaboratif, banyak UMKM binaan Bank Indonesia yang kini mampu berkembang pesat dan menembus pasar nasional bahkan internasional.

Salah satu contoh sukses adalah pembinaan terhadap Koperasi Produsen Emas Hijau Papua, yang bergerak di bidang kopi. Sejak 2023, pembinaan dilakukan secara *end-to-end*, mencakup pelatihan di kebun bersama para ahli, penyediaan sarana produksi, hingga pendampingan bisnis. Di sisi hilir, KPw BI Papua mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi seperti studi banding ke Koperasi Klasik Beans di Jawa Barat, kurasi kopi, *sensory bootcamp*, pelatihan dan kompetisi barista, serta penyelenggaraan Festival Kopi Papua. Puncaknya, perluasan akses pasar difasilitasi melalui partisipasi dalam ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI), *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)*, *Singapore Coffee Week*, hingga *World of Coffee 2024* di Kopenhagen, dengan mencatatkan transaksi senilai 1,45 miliar rupiah.

Selain itu, untuk memperluas dampak dan mendorong lahirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif, pada tahun 2024 KPw BI Papua bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua menyelenggarakan Festival Cenderawasih, 17-19 Mei 2024. Kegiatan ini mengusung fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui edukasi, literasi keuangan, dan digitalisasi UMKM. Festival ini juga bersinergi dengan program nasional Bank Indonesia lainnya seperti *Road to*



Gambar 7.6. Penyelenggaraan Festival Cenderawasih 2024 yang merupakan program unggulan KPW BI Papua bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Sumber: Dokumentasi Internal KPW BI Papua.

Festival Ekonomi Syariah (FESyar), Road to Karya Kreatif Indonesia (KKI), Pre-event Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), dan Kick Off Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah Papua.

Festival Cenderawasih berhasil menarik perhatian luar biasa dari masyarakat Papua. Selama tiga hari pelaksanaan, acara ini dihadiri oleh lebih dari 11.000 pengunjung. Tak hanya menjadi ajang promosi budaya, festival ini juga mencatatkan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi pelaku UMKM lokal, dengan total omzet mencapai Rp708.000.000. Menariknya, sebesar 90,73% dari total transaksi tersebut dilakukan melalui QRIS, mencerminkan tingkat adopsi teknologi pembayaran digital yang semakin tinggi di kalangan masyarakat dan pelaku usaha di Papua.

E.3. Festival Kopi Papua: Mengangkat Kopi Papua ke Pentas Dunia

Festival Kopi Papua (Feskop) merupakan salah satu upaya penting KPw BI Papua dalam mendorong pengembangan industri kopi sebagai sektor ekonomi kreatif potensial di Tanah Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Statistik Indonesia 2023, kapasitas ekspor kopi Indonesia pada tahun 2023 tercatat meningkat sebesar 12,92% (*year-on-year*) dengan nilai mencapai USD 1,13 miliar. Negara tujuan utama ekspor meliputi Amerika Serikat, Mesir, Jerman, dan Malaysia. Di tengah peningkatan tersebut, kopi Papua menonjol dengan keunikan cita rasa yang khas, hasil dari proses budidaya berbasis kearifan lokal. Budidaya kopi di Papua dilakukan melalui gotong royong masyarakat kampung, menggunakan bahan-bahan organik untuk menjaga keseimbangan ekosistem, serta mengikuti prosedur panen dan pengolahan ketat dengan metode *full wash* guna menjaga konsistensi rasa. Ditambah dengan karakteristik geografis yang mendukung, yaitu penanaman di ketinggian lebih dari 1.700 meter di atas permukaan laut, kopi Papua memiliki kekhasan rasa yang

membedakannya dari kopi daerah lain di Indonesia.

Namun demikian, produktivitas kopi Papua belum optimal. Berdasarkan data BPS tahun 2022, luas lahan perkebunan kopi di Papua mencapai 13.991 hektar, tetapi hanya menghasilkan produksi sebesar 2.799 ton. Menyadari potensi besar yang belum tergarap ini, KPw BI Papua sejak tahun 2018 menyelenggarakan Feskop sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan industri kopi secara *end-to-end*. Feskop juga menjadi bagian dari kampanye nasional Bank Indonesia seperti Karya Kreatif Indonesia (KKI), Pekan QRIS Nasional, Cinta Bangsa Paham Rupiah, Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (BBI), dan Bangsa Berwisata di Indonesia (BWI).

Selama penyelenggaraan, Feskop menghadirkan berbagai aktivitas mulai dari pameran UMKM kopi, hiburan, talkshow tentang potensi dan industri kopi, workshop kompetensi pelaku industri kopi, *coaching clinic brewing*, kompetisi barista, hingga pojok literasi kopi. Event ini juga menjadi sarana bagi para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar nasional dan internasional melalui kehadiran agregator kopi. Pelaksanaan Feskop selalu mengedepankan sinergi pentahelix, melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas kopi, akademisi, dan media massa sebagai mitra strategis.

Antusiasme masyarakat terhadap Feskop terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, Feskop berhasil mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp600.000.000 dengan jumlah pengunjung mencapai 10.650 orang. Sementara itu, pada tahun 2024, Feskop menorehkan pencapaian yang lebih gemilang dengan total penjualan sebesar Rp1.048.979.300, transaksi ekspor mencapai Rp1,45 miliar, hasil *business matching* sebesar Rp22.500.000, dan jumlah pengunjung yang membludak hingga 33.921 orang. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai inovasi baru, seperti peningkatan jumlah tenant, fasilitas *coffee lounge slowbar*, serta kolaborasi aktif dengan berbagai komunitas seperti komunitas



Gambar 7.7. Antusiasme masyarakat Kota Jayapura menyaksikan Festival Kopi Papua 2024.

Sumber: Dokumentasi Internal KPw BI Papua.

baca, komunitas lari, komunitas kopi, dan lain-lain.

Melalui seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Festival Kopi Papua tidak hanya mengangkat kopi Papua ke panggung nasional dan internasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, dan penguatan pariwisata daerah.

Demikianlah, dari seluruh uraian Bab ini dapat disimpulkan bahwa kehadiran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang perkembangan ekonomi Papua. KPw BI Papua senantiasa berupaya memainkan peran penting dan memberikan kontribusi nyata dalam gerak pembangunan di wilayah ini, sekaligus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Melalui kebijakan otonomi, baik Otonomi Daerah maupun Otonomi Khusus,

Papua mendapatkan ruang yang lebih luas untuk mengelola pembangunan daerahnya secara mandiri. Namun demikian, tantangan struktural seperti ketergantungan terhadap sumber daya alam, ketimpangan pembangunan, serta lemahnya kapasitas administrasi tetap menjadi hambatan yang harus dihadapi.

Dalam konteks tersebut, KPw BI Papua memegang peran yang sangat vital. Tugasnya tidak hanya terbatas pada pengendalian inflasi dan stabilitas sistem pembayaran, tetapi juga mencakup upaya aktif dalam mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat sektor riil, memperluas inklusi keuangan, serta membangun ketahanan ekonomi lokal. Seluruh kontribusi ini dijalankan melalui berbagai program, baik dalam kapasitas sebagai mitra aktif pemerintah daerah, maupun melalui fasilitasi dan pendampingan bagi pelaku usaha dan komunitas lokal.

Ke depan, menghadapi tantangan globalisasi, perubahan iklim, serta dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, peran KPw BI Papua akan menjadi semakin strategis. Diperlukan inovasi kebijakan, penguatan sinergi lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan untuk membangun ekonomi Papua yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Besar harapannya, KPw BI Papua akan terus menjadi garda terdepan dalam membangun kedaulatan ekonomi di wilayah paling timur Indonesia ini. §

PT. Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar dan paling strategis di Indonesia, yang beroperasi di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kehadiran perusahaan ini dianggap memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, khususnya Papua, melalui penerimaan negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp50 triliun per tahun serta penyerapan tenaga kerja yang mencapai hampir 31.000 orang, mayoritas di antaranya merupakan tenaga kerja lokal.

Awal mula kehadiran Freeport di Papua ditandai dengan penemuan cadangan emas dan tembaga di kawasan Ertsberg (Gunung Bijih) pada tahun 1936

oleh geolog Belanda, Jean Jacques Dozy. Penemuan tersebut membuka jalan bagi eksplorasi dan pengembangan tambang berskala besar. Pada tahun 1967, PTFI menandatangani Kontrak Karya (KK) pertama dengan Pemerintah Indonesia untuk jangka waktu 30 tahun. Enam tahun kemudian, pada tahun 1973, PTFI resmi memulai kegiatan penambangan di Ertsberg, yang menjadi tonggak peralihan dari sistem pertambangan tradisional ke model pertambangan modern yang berskala besar.

Kontrak karya kedua ditandatangani pada tahun 1991 sebagai perpanjangan dari kontrak pertama, dengan masa berlaku selama 30 tahun dan hak perpanjangan sebanyak dua kali, ma-

sing-masing untuk jangka waktu 10 tahun. Pada tahun yang sama, PTFI memulai pengoperasian tambang terbuka Grasberg (Gunung Rumpit) untuk menggantikan tambang Ertsberg yang telah habis cadangannya pada 1990.

Tonggak penting lainnya terjadi pada 12 Juli 2018, ketika pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan Freeport-McMoRan (FCX) dan Rio Tinto. Dalam perjanjian tersebut, Inalum menyatakan komitmennya untuk mengakuisisi hak partisipasi Rio Tinto di PTFI dan 100% saham FCX di PT Indocopper Investama, yang menguasai 9,36% saham PTFI. Nilai transaksi tersebut mencapai USD 3,85 miliar. Komitmen ini direalisasikan pada 21 Desember 2018, menjadikan Indonesia—yang sebelumnya hanya memiliki 10% saham—resmi menjadi pemegang saham mayoritas PTFI dengan kepemilikan sebesar 51,2%.

Pada tahun 2019, kegiatan penambangan di tambang terbuka Grasberg dihentikan karena cadangan bijih telah menipis. Sejak itu, PTFI beralih ke penambangan bawah tanah yang membutuhkan investasi besar dan teknologi tinggi. Menurut *Harian Kompas* (23 Maret 2019),

sepanjang tahun 2018 tambang Grasberg menghasilkan sekitar 182.000 ton bijih per hari, yang mengandung 569.500 ton tembaga, 85,6 ton emas, dan 117 ton perak.

Terbaru, pada Mei 2024, pemerintah Indonesia memperpanjang masa operasi PTFI hingga tahun 2061, setelah kontrak sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 2041. Perpanjangan ini disertai dengan penambahan 10% saham kepada pemerintah Indonesia, sehingga total kepemilikan negara atas PTFI meningkat menjadi 61%.

SENI UKIR KAMORO DAN YAYASAN MARAMOWE WEAIKU KAMOROWE

Seni ukir Kamoro mungkin belum sepopuler seni ukir Asmat, meskipun keduanya berasal dari wilayah pesisir selatan Pulau Papua. Bagi masyarakat Suku Kamoro, seni ukir bukan sekadar ekspresi artistik, melainkan bagian integral dari identitas budaya. Sayangnya, seni ini sempat terancam punah akibat berbagai pelanggaran yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan pada masa lalu.

Kehadiran PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika—yang merupakan wilayah asal Suku Kamoro dan Suku Amungme—secara perlahan turut membuka ruang bagi seni ukir Kamoro untuk dikenal lebih luas, termasuk di tingkat internasional. Upaya tersebut diperkuat melalui penyelenggaraan festival tahunan *Kamoro Kakuru*, yang digagas oleh Dr. Kal Muller, seorang antropolog yang prihatin atas rendahnya apresiasi serta minimnya nilai jual hasil karya para seniman Kamoro.

Pada tahun 1995, bersama tiga seniman Kamoro, Dr. Kal Muller mengunjungi kampung-kampung di wilayah Kamoro untuk mensosialisasikan gagasan festival budaya. Festival ini mencakup lomba dayung, tari tradisional, pameran makanan, kerajinan tangan, dan lelang ukiran terbaik. Seluruh acara ini dikurasi langsung oleh Dr. Muller, yang memang dikenal memiliki pengalaman luas dalam hal menilai seni ukir etnik, termasuk dari Afrika. Sejumlah karya yang dipamerkan berhasil terjual hingga ratusan dolar, yang menumbuhkan optimisme dan semangat baru di kalangan seniman ukir Kamoro. Festival *Kamoro Kakuru* akhirnya terselenggara pertama kali pada tahun 1998 dan menjadi tonggak penting dalam pelestarian seni ukir Kamoro.

Seni ukir Kamoro dikenal karena bentuknya yang ekspresif, dengan garis dan lekukan tajam hasil guratan alat-alat sederhana. Ukiran-ukiran ini sarat mak-



Beberapa hasil kerajinan ukir yang dihasilkan oleh Suku Kamoro.

Sumber: Koleksi Foto Dandung Marsetyo

na dan mengandung kisah-kisah tradisional yang bersifat sakral. Misalnya, *Mbitoro*—tiang totem leluhur—yang dalam proses pembuatannya tidak boleh disaksikan oleh perempuan. Beberapa ukiran lainnya bahkan hanya boleh dijelaskan kepada kalangan tertentu, terutama laki-laki. Seniman ukir Kamoro dikenal dengan sebutan *Maramowe*, dan profesi ini hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Setiap keluarga dalam Suku Kamoro menganggap dirinya berasal dari garis keturunan hewan tertentu—seperti ikan, penyu, buaya, atau bu-

rung—dan hanya boleh mengukir figur hewan sesuai asal keturunannya. Jika ingin mengukir figur dari hewan lain, mereka harus meminta izin dari pemilik garis keturunan tersebut.

Mengacu pada klasifikasi Dr. Kal Muller, seni ukir Kamoro dibagi ke dalam tiga kategori: (1) Benda ritual, seperti *Mbitoro* (tiang leluhur), *Wemawe* (figur leluhur), *Yamate* (perisai), *Eme* (gendang/tifa), *Mbiikao* (topeng roh), dan *Pekoro/Paru* (wadah makanan/sagu); (2) Benda sehari-hari, seperti *Ku* (perahu), *Po* (dayung), *Wapuri apenata* (alat pangkur



Proses pembuatan salah satu patung totem dari Suku Kamoro.

Sumber: Koleksi Foto Dandung Marsetyo.

sagu), *Otekapa* (alat bantu jalan), senjata tradisional, peralatan memasak, *Etae* (tas dari batang rumput), *Kopa* (anyaman pandan), dan busana adat; (3) Krea-si bebas, yang mencakup ukiran bentuk hewan, tumbuhan, serta ilustrasi alam.

Untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya ini, Dr. Kal Muller bersama Luluk Intarti mendirikan *Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe* pada tahun 1996. Yayasan yang kini dipimpin oleh Herman Kiripi, seorang tokoh asli Kamoro, menaungi lebih dari 550 seniman ukir dari 30 kampung di pesisir Kabupaten Mimika.

Salah satu tantangan utama dalam pelestarian seni ukir ini adalah proses pengumpulan karya dari kampung-kampung terpencil yang hanya dapat di-

jangkau dengan perahu. Dalam proses perjalanannya pengumpulan ini bisa memakan waktu 3 jam hingga 2 hari. Pada tahun 2022, perahu angkut yang biasa digunakan pun rusak akibat banjir dan usia pakainya yang sudah tua. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2024, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua memberikan dukungan melalui pengadaan dua unit perahu dan satu unit mesin motor tempel, dengan total bantuan senilai Rp232 juta.

Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen KPw BI Papua untuk turut melestarikan warisan budaya bangsa sekaligus mendorong pengembangan ekonomi baru berbasis kearifan lokal, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

BAB VIII

PENUTUP

Sejak awal pendiriannya, Kantor Cabang Bank Indonesia di Papua (waktu itu disebut Irian Barat) memang menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan kantor-kantor cabang BI di wilayah Indonesia lainnya. Perbedaan ini tidak terlepas dari posisi unik Papua dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, mulai dari masa sebelum kedatangan kolonialisme Belanda, masa integrasi ke dalam negara kolonial Hindia Belanda, hingga akhirnya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sebagian besar lintasan sejarah tersebut, Papua tampak sebagai sebuah wilayah *frontier* baik secara politik maupun ekonomi.

Secara geografis, wilayah Papua yang luas, terutama di bagian pedalamannya yang masih berupa hutan belantara, sebagian besar

tidak berpenghuni atau hanya dihuni oleh komunitas masyarakat kesukuan (*tribal society*) dalam jumlah kecil dengan tingkat kehidupan yang relatif sederhana. Oleh karena itu, interaksi dengan dunia luar umumnya terjadi di wilayah pesisir, baik di bagian utara, barat, maupun selatan. Sebagai contoh, di wilayah Kepala Burung dan Kepulauan Raja Ampat, telah berkembang masyarakat dengan struktur sosial yang lebih kompleks, bahkan sejumlah kerajaan kecil telah berdiri jauh sebelum kedatangan para penjelajah Eropa. Daerah-daerah pesisir inilah yang kemudian menjadi incaran ekspansi kekuasaan dari kerajaan-kerajaan di Kepulauan Maluku, seperti Ternate, Tidore, dan Bacan, terutama sejak abad ke-16.

Karakteristik Papua sebagai *frontier* politik dan ekonomi semakin terlihat ketika kekuatan-kekuatan Eropa, seperti Portugis, Inggris, dan Belanda, bersaing dengan kerajaan-kerajaan Maluku Utara untuk memperebutkan monopoli perdagangan di wilayah ini. Sepanjang abad ke-17 hingga abad ke-18, terjadi sejumlah konflik dan peperangan antara berbagai kekuatan tersebut, yang tidak jarang melibatkan penduduk lokal dari berbagai wilayah di Papua. Persaingan ini berlangsung hingga awal abad ke-19, sebelum akhirnya tercapai semacam pembagian wilayah: Belanda mengklaim bagian barat Pulau Nugini, sementara Inggris, Australia, dan Jerman menguasai bagian timurnya.

Meskipun demikian, Belanda tidak segera mengeksplorasi atau membangun Papua Barat sebagaimana yang mereka lakukan di wilayah-wilayah lain di Nusantara. Proses pembentukan negara kolonial (*colonial state formation*) di wilayah ini berjalan sangat lambat, mengingat tantangan geografis, demografis, dan sosial-kultural yang berbeda, serta tingginya biaya yang diperlukan. Akibatnya, selama masa ‘pasifikasi dan kolonialisasi’, kehadiran negara kolonial di pedalaman tetap sangat terbatas, dibandingkan dengan penetrasi aktivitas zending dan misi-misi gereja katolik dan protestan yang jauh lebih aktif dan luas.

Menjelang meletusnya Perang Dunia II di wilayah Pasifik, perkembangan ekonomi Papua bagian barat masih relatif terbatas, akibat minimnya investasi Belanda di bidang infrastruktur transportasi, birokrasi pemerintahan, pelayanan publik, perkebunan, pertambangan, maupun perdagangan. Kondisi ini pula yang menyebabkan Papua tidak menjadi target utama dalam invasi militer Jepang ke Hindia Belanda dan Papua Nugini. Kendati demikian, dampak perang tetap dirasakan di Papua, meskipun tidak seintensif wilayah lainnya. Sekali lagi, Papua menjadi rebutan berbagai kekuatan asing.

Setelah perang berakhir, Belanda dengan dukungan Sekutu pimpinan Inggris dan Amerika Serikat, kembali menguasai Papua bagian barat. Ironisnya, upaya Belanda untuk mempertahankan wilayah ini berlangsung pada saat mereka menghadapi perlawanan sengit dari Republik Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, tidak mengherankan jika Belanda, yang didesak oleh dunia internasional untuk menyelesaikan konfliknya dengan Republik Indonesia pada akhir 1949, berupaya keras mempertahankan kekuasaan mereka atas Papua bagian barat, menjadikannya sebagai benteng terakhir dari kekuasaan kolonial mereka di Nusantara.

Pasca Perundingan KMB, Papua memasuki fase baru dalam sejarahnya sebagai wilayah *frontier*. Wilayah ini kembali menjadi objek sengketa, diperebutkan oleh Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, yang memandangnya sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah teritorialnya yang baru saja memperoleh pengakuan internasional. Dari sudut pandang Pemerintah Indonesia, sikap Belanda yang menggantungkan status Papua dipandang sebagai kelanjutan dari politik imperialisme mereka atas Republik Indonesia.

Dalam konteks inilah Presiden Sukarno menggelorakan 'konfrontasi ekonomi', sebagai bagian dari kampanye TRIKORA, terhadap Belanda yang diwujudkan melalui pendirian lima

kantor cabang Bank Indonesia di Jayapura pada tahun 1962, serta di Sorong, Biak, Manokwari, dan Merauke pada tahun 1963. Kelima kota ini dipilih karena merupakan pusat-pusat strategis baik secara ekonomi maupun politik di wilayah Irian Barat. Dengan demikian, pendirian kantor-kantor cabang BI ini tidak semata-mata dilihat dari sudut pandang kepentingan ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari strategi politik simbolik untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Langkah ini diperkuat dengan penerbitan mata uang khusus 'Rupiah Irian Barat', yang bertujuan mempercepat proses integrasi wilayah ini ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, melengkapi upaya-upaya diplomatik dan konfrontasi militer yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia sebelumnya.

Dengan caranya sendiri sebagai bank sentral, Bank Indonesia berperan penting dalam proses integrasi Papua, yang secara resmi dikukuhkan melalui pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969, di mana mayoritas perwakilan penduduk Papua memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Momen ini menjadi titik balik penting bagi Papua, menandai berakhirnya sejarah panjangnya sebagai sebuah *frontier* ekonomi-politik, dan mengakhiri statusnya sebagai wilayah perebutan berbagai kekuatan asing. Dari sudut pandang Pemerintah Indonesia, keputusan penduduk Papua untuk bergabung NKRI ini merupakan kepercayaan sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama melalui pembangunan yang komprehensif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dalam kerangka inilah, Bank Indonesia melalui kantor-kantor cabangnya di Papua berperan sebagai mitra utama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya menciptakan stabilitas ekonomi dan moneter, mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis, menyediakan fasilitas kredit dan pendampingan usaha bagi masyarakat, serta mengeksplorasi potensi-potensi

ekonomi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Papua.

Sebagai wilayah yang paling akhir bergabung ke dalam NKRI, Papua memiliki sejumlah permasalahan yang kompleks, di antaranya adalah ketimpangan infrastruktur, lambatnya pertumbuhan ekonomi regional, serta kualitas sumber daya manusia yang membutuhkan perhatian khusus. Kondisi ini mendorong Bank Indonesia untuk menyesuaikan program-programnya di wilayah tersebut. Stabilitas keamanan, yang di beberapa bagian masih menjadi isu utama, turut menjadi faktor penting dalam perencanaan operasional BI, terutama dalam upaya memperkuat kedudukan rupiah dan pemeratakan distribusinya sebagai mata uang nasional di tengah tantangan geografis, tingkat monetisasi yang rendah, perkembangan ekonomi yang tidak merata, dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Sebagai contoh, untuk menjaga ketersediaan uang tunai rupiah di seluruh Papua Barat, sejak awal periode Orde Baru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Papua—yang kemudian dirampingkan menjadi satu kantor utama di Jayapura—dibantu oleh Kantor Remise di Biak dalam mendistribusikan rupiah melalui transportasi udara.

Hingga akhir 1970-an, hanya terdapat dua bank lain yang beroperasi di wilayah Papua selain Bank Indonesia, yaitu Bank Ekspor Impor dan Bank Pembangunan Daerah, yang keseluruhan jaringannya hanya mencakup sekitar sepuluh kantor. Pada masa ini, bank-bank tersebut menjadi pilar penunjang bagi perkembangan tiga sektor ekonomi utama di Papua, yaitu kehutanan, pertanian/perkebunan, dan maritim. Ketiga sektor tersebut menjadi penyerap terbesar program Kredit Investasi Kecil (KIK) yang disalurkan oleh Bank Ekspor-Impor Indonesia, dengan nilai kredit yang meningkat dari Rp288 juta pada tahun 1974 menjadi Rp1.470 juta pada tahun 1980. Untuk skema Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), nilai penyerapan kreditnya juga melonjak dari Rp230 juta pada tahun 1974 menjadi Rp1.885 juta pada tahun 1980. Secara keseluruhan, jumlah kredit perbankan di

Papua tumbuh dari Rp550 juta pada tahun 1977 menjadi Rp1.342 juta pada tahun 1980, dengan sebagian besar penyaluran diarahkan ke sektor perdagangan dan industri. Data-data ini menunjukkan adanya peningkatan geliat ekonomi di Papua, yang ditopang oleh keberadaan dan peran aktif Bank Indonesia setempat.

Namun demikian, geliat ekonomi Papua tersebut mengalami guncangan di akhir tahun 1990an, saat krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi-politik melanda Indonesia. Meskipun dampak krisis tersebut di Papua tidak separah di wilayah Indonesia lainnya seperti Jawa dan Sumatra, kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua tetap merasakan dampaknya. Inflasi yang meningkat tajam menurunkan daya beli masyarakat, melumpuhkan aktivitas perekonomian, serta meningkatkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur dan layanan publik, sementara kapasitas keuangan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat. Dalam menghadapi kondisi tersebut, KPw BI Papua melaksanakan berbagai program untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran program Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM) yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, Bank Danamon, Bank BRI, dan Bank BNI.

Pada tingkat nasional, krisis ekonomi-politik tersebut juga membawa perubahan besar dengan runtuhnya Pemerintahan Orde Baru dan lahirnya pemerintahan baru yang mengusung semangat reformasi. Salah satu langkah utama reformasi adalah penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999. Khusus untuk Papua, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) bagi Papua. Melalui UU ini, Pemerintah Daerah Provinsi Papua memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola urusan domestiknya,

mendapatkan pengakuan atas identitas dan hak adat masyarakat Papua, serta memperoleh Dana Otonomi Khusus untuk mendukung pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. UU ini juga secara resmi mengubah nama provinsi ini menjadi Provinsi Papua.

Merespons pemberlakuan UU Otsus tersebut, Bank Indonesia - baik di tingkat pusat maupun di KPw BI Papua - melakukan berbagai penyesuaian dan reorganisasi. Pemekaran wilayah Papua mendorong BI untuk menambah satu kantor cabang baru di Manokwari pada tahun 2012 guna memperkuat pelaksanaan fungsi-fungsi bank sentral di daerah. Hal ini bertujuan mempermudah KPw BI Papua dalam menjalankan tugas utamanya: membantu perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, mengawasi dan menyelenggarakan sistem pembayaran, serta mendistribusikan uang rupiah di wilayah Papua.

Sejalan dengan tugas-tugas tersebut, melalui Surat Edaran No. 9/24/INTERN tertanggal 26 Juni 2007, Bank Indonesia Pusat menetapkan beberapa tugas tambahan bagi KPw BI Papua, antara lain memberikan masukan kepada Kantor Pusat mengenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah, melaksanakan operasional sistem pembayaran tunai dan nontunai sesuai kebutuhan daerah, mengawasi perbankan di wilayah kerja, serta memberikan saran kepada pemerintah daerah terkait kebijakan ekonomi berdasarkan hasil kajian yang akurat.

Dalam upaya menjalankan tugas tersebut, KPw BI Papua juga aktif berpartisipasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). KPw BI Papua bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program-program GNPIP di Papua mencakup intensifikasi

Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM), penguatan koordinasi kelembagaan, capacity building, serta pendampingan bagi petani dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama dalam komoditas beras, cabai rawit, bawang merah, dan ikan laut. Selain itu, KPw BI Papua juga berkontribusi dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi baru di Papua, terutama sektor pariwisata.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa berkat diberlakukannya UU Otsus, Papua mencatatkan kemajuan di berbagai bidang, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang turut mendorong peningkatan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan GDP per kapita. Namun demikian, sejumlah kalangan juga menilai bahwa implementasi undang-undang otsus tersebut tidak sepenuhnya berhasil mewujudkan tujuan atau agenda yang diharapkan. Akibatnya, berbagai permasalahan fundamental, termasuk isu keamanan, masih tetap membayangi pembangunan dan perkembangan ekonomi di Papua.

Demikianlah, sepanjang sejarah keberadaannya di ‘bumi cendrawasih’ ini, KPw BI Papua senantiasa terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk meneguhkan kedaulatan politik dan ekonomi di wilayah ini sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga bank sentral yang bergerak di sektor keuangan dan ekonomi, KPw BI Papua telah menjalankan fungsi utamanya sebagai peneguh kedaulatan ekonomi wilayah ini, sekaligus menjadi ujung tombak upaya pemerintah dalam mengintegrasikan Papua ke dalam sistem perekonomian nasional. Di sisi lain, KPw BI Papua juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Papua, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. §

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Laporan

Arsip Meneg Ekuin

- (1966). "Masalah Ekonomi di Irian Barat." *Arsip Meneg Ekuin Tahun 1967-1973*, No. 1632, 24 Desember 1966.
- (1969). "Pokok-pokok Tindakan Moneter Irian Barat yang Diusulkan oleh Gubernur Bank Sentral," *Arsip Meneg Ekuin Tahun 1967-1973*, No. 1632, 19 September 1969.
- (1969). "Tindakan-tindakan Moneter yang Perlu untuk Landasan Penjehatan Keadaan Ekonomi dan Keuangan di Irian Barat sebagai Persiapan Penjatuan Mata Uang di Irian Barat dan Wilayah RI Lainnya," *Arsip Meneg Ekuin Tahun 1967-1973*, No. 1632, 1969.

Arsip dan Laporan Bank Indonesia

- “Berkas Gedung Kantor/Ruang Dinas KCBI Biak, 1964/1968,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.
- “Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1980-an: Bagian Perbankan,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.
- “Tagihan Pembayaran Termijn Terachir Kontrak Pembangunan 2 Buah Rumah Pegawai Ex Bank Indonesia Sorong, No. 4/19/UPI/PT,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.
- “Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Team Screening Kantor Tjbang Bank Indonesia di Daerah,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.
- “Data Kantor Cabang Bank Indonesia Jayapura Tahun 1980-an,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.
- (1962). “Speech Held at the Opening Reception of the Bank Indonesia Branch in Kotabaru by the Deputy Governor of Bank Indonesia, Dr. Soerjadi.” Lampiran Surat KB No. 10 dari Kotabaru, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 13 Desember 1962.
- (1963). “Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1963 tentang Satuan Uang Rupiah jang Khusus Berlaku untuk Daerah Propinsi Irian Barat,” *Bundel Arsip Irian Barat Bank Indonesia Tahun 1963*, DPFL/SKA-DPLF/ROP/47/2/0875
- (1963). “Surat Keputusan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri/Gubernur dan Direktur Bank Indonesia,” *Bundel Arsip Irian Barat Bank Indonesia Tahun 1963*, I.B. No. 4.
- (1963). “Keputusan Bersama Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan, dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral.” *Bundel Arsip Irian Barat Bank Indonesia Tahun 1963*, No. BPN I.3.1.9.
- (1963). “Surat kepada Kepala UNTEA Melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kotabaru,” dalam Surat No. 10/1064/ULN/LN tanggal 14 Januari 1963, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 14 Januari 1963.

- (1963). "Rentjana Pembukaan Kantor-Kantor Tjabang Bank Indonesia di Manokwari, Sorong dan Merauke." Surat KB No. 10 tanggal 8 Februari 1963, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 8 Februari 1963.
- (1963). "Tjabang Biak," dalam Surat KB No. 10/3/UU/INSP, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 21 Februari 1963.
- (1963). "Pembukaan Kantor-Kantor Tjabang Bank Indonesia di Manokwari, Sorong dan Merauke." Surat KB No. 10/6/UU/INSP, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 2 Maret 1963.
- (1963). "Pengoperan Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. di Kotabaru," Surat KB No. 10/7/UU/INSP, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 Maret 1963.
- (1963). "Persediaan Uang Kas," Surat No. 11/1/UPU/Pekas, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 3 April 1963.
- (1963). "Pengedaran Uang di Irian Barat Mulai 1 Mei 1963," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 11/1, Djakarta, 10 April 1963.
- (1963). "Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia, No. 7/63/KEP/MUBS, Djakarta, 23 April 1963.
- (1963). "Sorong Petroleum Company," Surat No. 11/1/ULN/HPLN, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 25 April 1963.
- (1963). "Hubungan dengan Bank-Bank di Luar Negeri." Surat No. 11/6/ULN/HPLN, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 10 Mei 1963.
- (1963). "Pengedaran Uang di Irian Barat Mulai 1 Mei 1963," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 11/3, Djakarta, 12 Juni 1963.
- (1963). "Penjerahan Pimpinan Kantor Bank Indonesia Tjabang Kotabaru dari Sdr. M. Rifai kepada Sdr. Gusti Abdul Azis." Surat KB No. 11/2/UU/INSP, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 8 Juli 1963.
- (1963). "Laporan Perjalanan di Irian Barat tanggal 22 Agustus 1963 s/d 17 September 1963." *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 September 1963.

- (1963). "N.V. Handel-Mij Pho Eng Liong." Surat No. 11/6/UM/PK, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 4 Oktober 1963.
- (1963). "Uang Hadiah Natal," Surat KB No. 11/7/UU/PEG, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 18 November 1963.
- (1963). "Bank Negara Indonesia, Hong Kong," Surat No. 11/3/U LN/HPLN, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 26 November 1963.
- (1964). "Surat Edaran Penarikan/Penukaran Uang Ngf. di Wilayah Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia, No. 11/4, Djakarta, 24 Januari 1964.
- (1964). "Kurs2 jang Dipergunakan untuk Penutupan Buku pada Tanggal 31 Maret 1964," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 11 Maret 1964.
- (1964). "Lampiran S.E. No. 11/5 Rupa-Rupa Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 24 Maret 1964.
- (1965). "Laporan Pemimpin Tjabang Sukarnapura (Gusti Abdul Aziz) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan jang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.
- (1965). "Laporan Pemimpin Tjabang Biak (Bambang Susilo) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan yang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.
- (1965). "Laporan Pemimpin Tjabang Merauke (Sjamsuddin Sudjaja) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan jang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.

- (1965). "Laporan Pemimpin Tjabang Manokwari (Noek Hartono) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.
- (1965). "Laporan Pemimpin Tjabang Sorong (Soegiono) pada Konperensi BERDIKARI Direktur Bank Tjabang, Pemimpin-pemimpin Tjabang, dan Perwakilan-perwakilan yang Diadakan di Kantor Pusat Bank Indonesia Djakarta pada Tanggal 4 Mei 1965 s/d 8 Mei 1965," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, DPLF/SKA-DPLF/ROP/47/1/0872.
- (1968). "Prinsip-Prinsip tentang Penjerahan/Pengambil Alihan Fungsi Komersial Tjabang-Tjabang Bank Indonesia kepada/oleh Bank Ekspor-Impor Indonesia di Irian Barat," Lampiran I & II, *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1968.
- (1968). "Kertas Karya tentang Posisi Tjabang-Tjabang BNI Unit I di Irian Barat dalam Rangka Penetapan Undang-Undang tentang Bank Sentral Baru," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 6 November 1968.
- (1968). "Program Kerdja Panitia Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 22 November 1968.
- (1968). "Pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia 1968 di Wilayah Irian Barat," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 9 Desember 1968.
- (1969). "Laporan Perjalanan Dinas Team Penindjauan Irian Barat kepada Kepala Urusan Personalial Bank Indonesia," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.
- (1969). "Surat Edaran Kantor Remise Bank Indonesia Biak," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.
- (1969). "Bahan Pidato Direksi Bank Indonesia Berhubung dengan Penyerahan Kantor-Kantor Tjabang Bank Indonesia di Irian Barat kepada Bank Ekspor Impor Indonesia," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.
- (1969). "Penukaran Uang Kertas IBRp.," *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 2/110/UAO/OT, Djakarta, 2 Desember 1969.

- (1971). “Risalah Rapat Mengenai Berlakunya Rupiah Umum di Irian Barat,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/1/DIR, Jakarta, 6 April 1971.
- (1971). “Program Pelaksanaan Pengrupiahan Irian Barat,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/17/UAO/OT, Jakarta, 11 Mei 1971.
- (1971). “Laporan Perjalanan Dinas Team Pelaksana Pengrupiahan Irian Barat ke Djajapura,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 16 – 24 Mei 1971.
- (1971). “Uang Pandjar untuk Kantor Pos dalam Rangka Pengrupiahan Irian Barat,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/11/UAO/OT, Djajapura, 22 Juni 1971.
- (1971). “Perkembangan Pengrupiahan Irian Barat,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, No. 4/8/UAO/OT, Djajapura, 27 Juli 1971.
- (1971). “Penelitian Clearance Test Para Pegawai BI Djajapura, No. 4/2/UP/Pg,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 19 Agustus 1971.
- (1972). “Termijn Terachir Dua Buah Rumah di Sorong, No. 5/1/UM/Bg,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1972.
- (1977). “Memperkenalkan Propinsi Irian Jaya,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*.
- (1978). “Laporan Bank Indonesia Jayapura,” *Koleksi Arsip Bank Indonesia*, 1978.
- (2007). “SE 9/12/INTERN tanggal 30 Maret 2007 Perihal Penyempurnaan Organisasi Kantor Bank Indonesia Tahap I.”
- (2013). “SE 14/10/INTERN tanggal 18 Maret 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/Intern tanggal 2 April 2012 tentang Nama Jabatan, Nama dan Rubrik Satuan Kerja dan Unit Kerja di Bank Indonesia.”
- (2016). “SE 18/82/INTERN tanggal 30 September 2016 perihal Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok B.”
- (2020). “Padg 22/37/PADG Intern/2020 tanggal 17 Juli 2020

tentang Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) Kelompok B.”

Bank Indonesia (1966). *Report for the Year 1960-1965*. Jakarta: PN Pertjetakan Gita Karya.

Bank Indonesia (1972). *Report for the Financial Year 1970/71*. Jakarta: Bank Indonesia.

BPS Provinsi Papua (2023). *Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Papua*. Jayapura: BPS Provinsi Papua.

KPw Bank Indonesia Provinsi Papua (2024). *Laporan Perekonomian Provinsi Papua*. Jayapura: KPw BI Papua.

Surat Kabar

Algemeen Dagblad

“NHM Kreeg in Nieuw Guinea Andere Naam,” *Algemeen Dagblad*, 26 Maret 1963.

Algemeen Indisch Dagblad

“Bank Indonesia Opent Agentschap op Lombok,” *Algemeen Indisch Dagblad*, 4 September 1957.

Angkatan Bersendjata

“Uang Rp. Baru IRBAR Ditunda Masa Lakunja,” *Angkatan Bersendjata*, 23 September 1966.

Antara

“BI Papua Barat: Transaksi QRIS pada Januari-Oktober Rp. 765,87 Miliar,” *Antara*, 3 Desember 2024. Lihat <https://papuabarot.antaranews.com/berita/55797/bi-papua-barat-transaksi-qrisk-pada-januari-oktober-rp76587-miliar>. Artikel diakses pada 12 Mei 2025.

De Nieuwsgier

“Bank Indonesia en Toerisme,” *De Nieuwsgier*, 1 Februari 1956.

“Mr. Sjafruddin,” *De Nieuwsgier*, 20 Maret 1956.

De Preanger Bode

“Nieuw Guinea voorheen en thans,” *De Preanger Bode*, 18 April 1913.

De Telegraaf

“Ned. Handel-Mij,” *De Telegraaf*, 30 Maret 1963.

De Tijd-Maasbode

“Zij zijn Gemakkelijk te Winnen, Veel Papoea’s verbroederen zich al met Indonesiërs,” *De Tijd-Maasbode*, 11 Desember 1962.

Het Nieuwsblad voor Sumatra

“Agentschap van Bank Indonesia in Ampenan,” *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 29 Agustus 1957.

Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië

“Een Studie over de Klappercultuur,” *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, 20 Januari 1922.

Java Post

“Soal Irian Tak Mudah,” *Java Post*, 6 Desember 1950.

Kedaulatan Rakjat

“Komando Mandala Pembebasan Irbar Dibubarkan,” *Kedaulatan Rakjat*, 7 Mei 1963.

Kompas

“Panitia untuk Penghapusan Karantina Moneter Politik di Irian Barat,” *Kompas*, 5 Juli 1965.

“Status Irian Barat,” *Kompas*, 26 Agustus 1965.

“7 Orang Wakil Irbar dalam DPRGR,” *Kompas*, 18 November 1965.

“Uang Rupiah Baru Keluar,” *Kompas*, 14 Desember 1965.

- “Penghapusan Karantina Moneter di Irian Barat Belum Bisa Dilaksanakan,” *Kompas*, 12 Januari 1966.
- “Pertjakapan tentang Irian Barat,” *Kompas*, 9 Mei 1966.
- “Subsidi untuk Irbar,” *Kompas*, 13 Mei 1966.
- “Supply untuk Irian Barat Rp. 6 Djuta per Kwartal,” *Kompas*, 17 Mei 1967.
- “Daja Beli Rakjat Irbar Tak Dapat Mengimbangi Harga-Harga,” *Kompas*, 5 September 1969.
- “Pembangunan Sektor Sosial-Budaja di Irian Barat,” *Kompas*, 8 September 1969.
- “Seluruh Djabatan Penting Irian Barat Sudah Dipegang Putera Irbar,” *Kompas*, 17 November 1969.
- “Rupiah I.B. Bisa Ditukarkan di Bank Exim,” *Kompas*, 12 Januari 1970.
- “Lalulintas Pembajaran antara Wilajah RI dan Irian Barat Dibebaskan,” *Kompas*, 20 April 1970.
- Uang Rupiah RI Djuga Berlaku untuk Irian Barat,” *Kompas*, 17 Februari 1971.
- “Beredarnja Rupiah Disamping Rupiah Irbar Menurunkan Harga-harga di Irbar,” *Kompas*, 19 Agustus 1971.
- “Irian Barat Disamakan,” *Kompas*, 19 Oktober 1972.
- “Batas Waktu Penukaran Rupiah Irbar 31 Maret 1973,” *Kompas*, 4 Januari 1973.

Leeuwarder Courant

- “Soekarno Morgen in Kota Baroe: Moeilijkheden met de West-Irian Roepia,” *Leeuwarder Courant*, 3 Mei 1963.

Limburgsch Dagblad

- “Verkoop Eigendommen en Belangen van NHM aan Nationale Bank Indonesia,” *Limburgsch Dagblad*, 22 Februari 1963.
- “Ontheffing uit hun Functie van Enkele N-Guinea-Raadsleden,” *Limburgsch Dagblad*, 26 April 1963.

Merdeka

- “Semua Warga Negara 18-40 Tahun Dipanggil untuk Mobilisasi Umum,” *Merdeka*, 25 Januari 1962.
- “NHM di Irian Barat Mau Didjual Kepada Indonesia,” *Merdeka*, 21 Februari 1963.
- “Belanda Edarkan Uang Palsu dan Perhebat Inflasi,” *Merdeka*, 27 Februari 1963.
- “Keswari di IB,” *Merdeka*, 15 Maret 1963.
- “Deklarasi Ekonomi (I),” *Merdeka*, 30 Maret 1963.
- “Jang Punja Duit pada Panik,” *Merdeka*, 30 Maret 1963.
- “Rupiah Khusus untuk IB,” *Merdeka*, 2 April 1963.
- “Barang-Barang jang Perlu Izin untuk Diangkut ke IB,” *Merdeka*, 25 April 1963.
- “Irian Barat Ditinjau dari Segi Penerangan,” *Merdeka*, 30 April 1963.
- “Sekitar Pemerintahan Irian Barat,” *Merdeka*, 30 April 1963.
- “Dewan Papua Bubar,” *Merdeka*, 2 Mei 1963.
- “Kurs Rp. I.B.” *Merdeka*, 2 Mei 1963.
- “Kemenangan RI Tidaklah Diperoleh dengan Mudah,” *Merdeka*, 3 Mei 1963.
- “Dr. Djalal Abdoh: UNTEA Telah Tjapai Tudjuannja,” *Merdeka*, 3 Mei 1963.
- “Bebaskan Rakjat Irian Barat dari Kemelaratan dan Kegelapan,” *Merdeka*, 3 Mei 1963.
- “Puntjak Trikora dan Puntjak Soekarno,” *Merdeka*, 3 Mei 1963.
- “Sekdjen PBB akan Dirikan Dana untuk Irian Barat,” *Merdeka*, 6 Mei 1963.
- “Presiden Soekarno di Irian Barat,” *Merdeka*, 6 Mei 1963.
- “Piagam Pemberian Gelar Maha Putera Irian Barat kepada Presiden Sukarno,” *Merdeka*, 6 Mei 1963.
- “Puntjak Karstens djadi Puntjak Soekarno,” *Merdeka*, 6 Mei 1963.

Nieuwe Eindhovense Krant

“Indonesië opent bankkantoor in Hollandia,” *Nieuwe Eindhovense Krant*, 13 Desember 1962.

Sinar Harapan

“Nilai Rupiah Irbar,” *Sinar Harapan*, 13 Agustus 1965.

Sin Po

“Irian dalam Lemari Es Belanda: Indonesia Pertahankan Claim Nasionalnja, Irian Masuk RI,” *Sin Po*, 27 Februari 1951.

“Soal Irian,” *Sin Po*, 17 April 1951.

“Kabinet Terlahir Djuga,” *Sin Po*, 27 April 1951.

“24 Djuta untuk Irian Barat,” *Sin Po*, 9 Mei 1951.

“Irian Barat Diperdjuangkan Terus,” *Sin Po*, 12 Juni 1951.

“Irian Djadjahan Belanda,” *Sin Po*, 5 November 1951.

“Masalah Irian: Pemerintah Akan Nyatakan Sikapnja,” *Sin Po*, 6 November 1951.

“Sukiman Panggil Lamping,” *Sin Po*, 7 November 1951.

“Yamin Usulkan Propinsi Irian Barat,” *Sin Po*, 9 November 1951.

“Putuskan Perundingan dengan Belanda,” *Sin Po*, 13 November 1951.

“Kerdja-sama dengan Belanda Tidak Mungkin Lagi,” *Sin Po*, 15 November 1951.

“Belanda Protes Terhadap Utjapan Onvriendelijke Daad,” *Sin Po*, 16 November 1951.

“Supomo Harap Goodwill Indonesia Disambut Baik,” *Sin Po*, 4 Desember 1951.

“Lagi Sendjata untuk Irian: Kapal Talise Masuk Priok,” *Sin Po*, 20 Desember 1951.

“Peristiwa Blitar dan Talisse,” *Sin Po*, 26 Desember 1951.

“Sendjata-Sendjata Belanda Dibeslah di Makassar,” *Sin Po*, 26 Desember 1951.

- “Demonstrasi Irian,” *Sin Po*, 27 Desember 1951.
- “Keputusan Kongres Gerwis,” *Sin Po*, 27 Desember 1951.
- “Gedung Kabinet Dipenuhi Poster-Poster Irian,” *Sin Po*, 31 Desember 1951.
- “Sendjata Gelap ke Irian,” *Sin Po*, 9 Januari 1952.
- “Soal Sendjata ke Irian,” *Sin Po*, 25 Januari 1952.
- “Boleh Berunding, Tapi Atas Dasar Irian Masuk Indonesia,” *Sin Po*, 11 Februari 1952.
- “Irian Masuk Grondwet Belanda,” *Sin Po*, 20 Februari 1952.
- “Asjura Hari Libur,” *Sin Po*, 27 September 1952.

Tempo

- “Pemekaran Papua, Ini Rincian 3 Provinsi Baru,” *Tempo*, 4 Juli 2022.
<https://www.tempo.co/politik/pemekaran-papua-ini-rincian-3-provinsi-baru-329026>. Artikel diakses pada 13 Mei 2025.
- “Silas Papare: Intel dan Mantri di Papua yang Melawan Belanda,” *Tempo*, 23 Agustus 2023.

Tjenderawasih

- “Lebih Banjak Dibutuhkan Tenaga-Tenaga Indonesia,” *Tjenderawasih*, 13 November 1962.
- “Mr. Goedhart Puas atas Kelantjaran di Irian Barat,” *Tjenderawasih*, 13 November 1962.
- “100 Guru Pria dan Wanita Tiba,” *Tjenderawasih*, 8 Desember 1962.
- “Brantas Angkut 30 Ton Gula untuk Biak,” *Tjenderawasih*, 10 Desember 1962.
- “Bank Indonesia Punja Tjabang di Bumi Tjenderawasih,” *Tjenderawasih*, 13 Desember 1962.
- “Pendidikan Rakjat,” *Tjenderawasih*, 13 Desember 1962.
- “Tjabang BI di Kotabaru Bekerdja Menurut Kebutuhan Setempat (I),” *Tjenderawasih*, 13 Desember 1962.
- “Bahan-Bahan Konsumsi untuk Irian Barat Mulai Datang,” *Tjenderawasih*, 14 Desember 1962.

- “KB Antara Kotabaru Dibuka pada Hari Ulang Tahunnja ke-25,”
Tjenderawasih, 14 Desember 1962.
- “Dua Kantor Perburuhan Tjabang Telah Diresmikan,”
Tjenderawasih, 5 Februari 1963.
- “Pengiriman Uang Sudah Dimulai,” *Tjenderawasih*, 8 Februari 1963.
- “Murid-Murid Minta Buku Lagu Nasional dan Wadjib,”
Tjenderawasih, 21 Februari 1963.
- “Stabilisasi Ekonomi,” *Tjenderawasih*, 22 Februari 1963.
- “Stabilisasi Ekonomi, Bukan Pertahankan Kemewahan,”
Tjenderawasih, 22 Februari 1963.
- “NHM Dioper Bank Indonesia,” *Tjenderawasih*, 22 Februari 1963.
- “Badan Pengurus Masjarakat Tionghoa,” *Tjenderawasih*, 5 Maret 1963.
- “Tindakan Tidak Sah dan Tidak Bermoral akan Ditindak Sekerasnja,” *Tjenderawasih*, 16 Maret 1963.
- “Bank Indonesia Tjabang Sorong Dibuka,” *Tjenderawasih*, 16 Maret 1963.
- “Bank Indonesia Oper Nederlands Handel N.V.,” *Tjenderawasih*, 25 Maret 1963.
- “Impor jang Teratur Didjalankan oleh Irian Bhakti,” *Tjenderawasih*, 26 Maret 1963.
- “Pembentukan Koperasi Primer Kosgoro,” *Tjenderawasih*, 30 Maret 1963.
- “Sumbangkan Bahan Sandang untuk Merauke,” *Tjenderawasih*, 10 April 1963.
- “Irian Bhakti Aktip Distribusi,” *Tjenderawasih*, 16 April 1963.
- “Bank Indonesia Buka Terus,” *Tjenderawasih*, 22 April 1963.
- “Atjara Tgl 1 Mei,” *Tjenderawasih*, 22 April 1963.
- “Merdeka adalah Bekerdja Keras,” *Tjenderawasih*, 26 April 1963.
- “Aktivitas Komersil di Irbar Diserahkan Kepada Bank Exim,”
Tjenderawasih, 1 September 1969.
- “Serahterima Tugas Perbankan di Merauke dan Sorong,”
Tjenderawasih, 2 September 1969.

Warta Bhakti

“Djarak Djakarta-Kotabaru Sama dengan Perdjalanannya ke Hongkong,” *Warta Bhakti*, 6 Mei 1963.

Buku & Bab dalam Buku

- (1936). *Inheemsche Bevolking van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden en De Molukken*, Deel V. Batavia: Departemen van Economische Zaken – Landsdrukkerij.
- Abdullah, Taufik (ed.) (2012). *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Dari Orde Baru Hingga Reformasi*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve & Kemendikbud.
- Astuti, M.S.P. (2008). *Apakah Mereka Mata-mata: Orang-orang Jepang di Indonesia (1868-1942)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Andaya, L.Y. (1993). *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Azis, A. dan A. Herani Rusland. (2009). “Peranan Bank Indonesia dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” Dalam *Seri Kebanksentralan No.1*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bachtiar, H.W. (1994). “Sejarah Irian Jaya.” Dalam Koentjaraningrat (ed.), *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djambatan.
- Budiarjo, C. & Liem Soei Liong. (1988). *West Papua, the Obliteration of a People*, 3rd edition. London: TAPOL, the Indonesian Human Rights Campaign.
- Bellwood, P. (eds.) (2006). *The Austronesian: Historical and Comparative Perspective*. Canberra: Australian National University Press.
- Bijlmer, H.J.T. (1922). *Anthropological Results of the Dutch Scientific Central New-Guinea Expedition A° 1920 Followed by an Essay on the Anthropology of the Papuans*. Leiden: N.V. Boekhandel en Drukkerij Voorheen E.J. Brill.

- Bijlmer, H.J.T. (1935). "Bevolking," *Nieuw Guinee*, Deel I, Hoofdstuk VII, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. Amsterdam: J.H. de Bussy.
- Boelaars, J. (1986). *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Booth, A. (1998). *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. London: Macmillan.
- Boschma, H. (1937). "Zeeproducten, Visscherij, en Vogeljacht," *Nieuw Guinee*, Deel II, Hoofdstuk XIII, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. Amsterdam: J.H. de Bussy.
- Carafano, J.J. (2021). *Brutal War: Jungle Fighting in Papua New Guinea, 1942*. London/Colorado: Lynne Rienner Publisher.
- Cholil, M. (1979). *Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Coast, J. (2015). *Recruit to Revolution Adventure and Politics During the Indonesian Struggle for Independence*. Kopenhagen: Nordic Institute for Asian Studies.
- Departemen Penerangan RI. (1962). *Pembebasan Irian Barat: Kumpulan Pidato Presiden Sukarno dan Keterangan-Keterangan Mengenai Perjuangan Pembebasan Irian Barat dari 17 Agustus 1961 sampai 17 Agustus 1962*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Dick, H. (2006). "The Indonesian Economy in the 1950s: Multiple Exchange Rates and Business Networks and Center-Region Relations." Dalam H. Samuel & H. S. Nordholt (ed.), *Indonesia in Transition: Rethinking 'Civil Society', 'Region', and 'Crisis'*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamhari, S. A. (1995). *Tri Komando Rakyat: Pembebasan Irian Barat (Trikor)*. Jakarta: Markas Besar ABRI, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Drooglever, P. (2009). *An Act of Free Choice: Decolonization and the Right to Self-Determination in West Papua*. Oxford: Oneworld

Publications.

- Ellen, R. F. (2003). *On the Edge of the Banda Zone: Past and Present in the Social Organization of a Moluccan Trading Network*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Garnaut, R., & Manning, C. (1971). *Irian Jaya: The Transformation of a Melanesian Economy*. Canberra: Australian National University.
- Geurtjens, H. (1937). "De Katholieke Missie op Nieuw Guinee," Hoofdstuk X, *Nieuw Guinee*, Deel I, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. Amsterdam: J.H. de Bussy.
- Groen, P. (2010). "The War in The Pacific." Dalam Peter Post, W. H. Frederick, I. Heidebrink, & S. Sato (Ed.), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War*. Leiden: Brill.
- Hill, H. (2000), *The Indonesian Economy* (Second Edition). Cambridge University Press.
- Hovenkamp, W.A. (1937). *Bestuur, Justitie, Politie, en Financien*. Amsterdam: De Bussy.
- Kanumoyoso, B. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kamma, F.C. (1955). *De Messiaanse Koréri-Bewegingen in het Biak-Noemfoorse Cultuurgebied*. Den Haag: J.N. Voorhoeve.
- Kamma, F.C. (1972). *Koreri: Messianic Movement in the Biak-Numfor Culture Area*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Klein, W.C. (1934). *Economische Gegevens Betreffende Nederlandsch Nieuw Guinea*, Uitgegeven door het Nieuw Guinea Comite, April 1934, Den Haag. Leiden: Brill.
- Klein, W.C. (1937). "In- en Uitvoer, Handel en Nijverheid," *Nieuw Guinee*, Deel III, Hoofdstuk XV, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. Amsterdam: J.H. de Bussy.
- Klein, W.C. & R.N. De Ruyter van Steveninck. (1937). "Luchtverkenning en Luchtverkeer in Nederlandsch en Australische Nieuw Guinee," *Nieuw Guinee*, Deel III, Hoofdstuk XXIII, hlm. 1044-1049.
- Laksana, A.S. (2017). *E. Soekasah Somawidjaja: Bankir, Irjenbang &*

- Diplomat yang Pendiam*. Jakarta: Bianglala Kreasi Media.
- Lekkerkerker, C. (1938). *Land en Volk van Java*. Batavia: Wolters.
- Lijphart, A. (1966). *The Trauma of Decolonization*. New Haven & London: Yale University Press.
- Lindblad, J.T. (2008). *Bridges to New Business: The Economic Decolonization of Indonesia*. Leiden: Brill.
- Lindblad, J.T. & Post, P. (ed.). (2009). *Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective*. Leiden: KITLV.
- Nawiyanto, dkk. (2024). *Rupiah untuk Kedaulatan Negara*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Onim, J.F. (1997). "A Regional History of Desa Wersar (in the Sub-District of Teminabuan) on the South Coast of the Bird's Head in Irian Jaya Indonesia." Paper presented at the conference *Perspectives on the Bird's Head of Irian Jaya, Indonesia*, Universiteit Leiden, 13-17 Oktober 1997.
- Penders, C.L.M. (2002). *The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia 1945-1962*. Queensland: University of Queensland Press.
- Ptak, R. (2006). *Exotische Vogel: Chinesische Beschreibungen und Importe. East Asian Maritime History 3*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Rahardjo, D. (1995). *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Raliby, O. (1953). *Documenta Historica: Sedjarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perdjuaangan Negara Republik Indonesia*. Djakarta: Bulan-Bintang.
- Reid, A. (1990). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. Volume One: The Lands Below the Winds*. New Haven: Yale University Press.
- Rommelink, W. (ed.) (2015). *The Invasion of the Dutch East Indies*. Leiden: Leiden University Press – The War History Office of the National Defense College of Japan.
- Resosudarmo, Budy P. Julius Ary Mollet, Uumbu R. Raya dan

- Hans Kaiwai. (2014). "Development in Papua After Special Autonomy." Dalam Hal Hill (ed.), *Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Ricklefs, M.C. (2008). *A History of Modern Indonesia since c. 1200, 4th Edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Russell, L. (2001). "Introduction." Dalam Lynette Russell (ed.), *Colonial-Frontiers: Indigenous-European Encounters in Settlers Societies*. Manchester: Manchester University Press.
- Saltford, J. (2003). *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of a Betrayal*. London & New York: Routledge Curzon.
- Scheller, H.K. (2004). *The European Central Banks: History, Role, and Functions*. Frankfurt: European Central Bank.
- Schoorl, P. (2001). *Belanda di Irian Jaya: Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962*. Jakarta: Garba Budaya.
- Shiraishi, T. (2021). *The Phantom World of Digul. Policing as Politics in Colonial Indonesia, 1926-1941*. Singapore/Kyoto: NUS Press & Kyoto University Press.
- Sinaga, R. (2013). *Masa Kuasa Belanda di Papua, 1898-1962*. Depok: Komunitas Bambu.
- Siswanto. (2020). *Indonesia dan Diplomasi Irian Barat 1949-1962: Memanfaatkan Perang Dingin*. Jakarta : LIPI Press.
- Slama, M. (2015). "Papua as an Islamic Frontier: Preaching in 'the Jungle' and the Multiplicity of Spatio-Temporal Hierarchisations." Dalam M. Slama & J. Munro (Ed.), *From 'Stone-Age' to 'Real-Time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities*. Canberra: Australian University Press.
- Soebandrio. (2001). *Meluruskan Sejarah Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Kepala Bangsa-saku.
- Soekarno, (1965). *Di Bawah Bendera Revolusi*. (Djilid Kedua, Tjetakan Kedua). Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Steenbrink, K. (2010). "Christianity." Dalam Peter Post, dkk. (ed.),

- The Encyclopedia of Indonesia* (hlm. 316). Leiden: Brill.
- Suryawan, I.N. (2020). *Siasat Elite Mencuri Kuasa: Dinamika Pemekaran Daerah di Papua Barat*. Yogyakarta: Basabasi.
- Takagi, Y. (2016). *Central Banking as State Building: Policymakers and Their Nationalism in the Philippines, 1933-1964*. Singapore: National University Singapore Press.
- Tideman, J. (1935). "Algemeene Inleiding," *Nieuw Guinee*, Deel I. Amsterdam: Molukken Instituut - J.H. De Bussy.
- Timmer, J. (2015). "Papua Coming of Age: The Cycle of Man's Civilization and the Other Papuan Histories." Dalam M. Slama & J. Munro (Ed.), *From 'Stone-Age' to 'Real-Time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities*. Canberra: Australian University Press.
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah. (2014). *Buku Petunjuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah*. Jakarta: Pokjanas TPID.
- van der Veer, K. (1937). "Land- en Tuinbouw," *Nieuw Guinee*, Deel II, Hoofdstuk XII, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. Amsterdam: J.H. de Bussy.
- van Hasselt, F.J.F. (1937). "De Zending op Nieuw Guinee," *Nieuw Guinee*, Deel I, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. Amsterdam: J.H. de Bussy.
- van Patot, J.W.T. (1937). "Scheepvaart en Verkeer te Land," *Nieuw Guinee*, Deel III, Hoofdstuk XVI, Uitgegeven voor Het Molukken-Instituut. Amsterdam: J.H. de Bussy.
- Wanggai, T.V.M. (2008). "Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua." Disertasi, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta.
- Widjojo, M. (2009). *The Revolt of Prince Nuku: Cross-Cultural Alliance-Making in Maluku 1780-1810*. Leiden/Boston: Brill.
- Wolters, W. G. (2012). "Decolonizing Money: Central Banks in the Philippines and Indonesia." Dalam E. Bogaerts & R. Raben (eds.), *Beyond Empire and Nation: The Decolonization of African and Asian Societies, 1930s-1970s*. Leiden: Brill.

Yamin, M. (1956). *Kedaulatan Indonesia atas Irian Barat yaitu tentang Tuntutan Rakyat terhadap Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Bukittinggi-Jakarta-Medan: Nusantara.

Jurnal

- Gordon, B. K. (1963-1964). "The Potential for Indonesian Expansionism," *Pacific Affairs*, 36(4): 378-393. <https://doi.org/10.2307/2754684>
- Garnaut, R. & Chris Manning. (1972). "An Economic Survey of West Irian. Part I," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 8, No. 3: 33-65. <https://doi.org/10.1080/00074917212331332118>
- Gelpke, J.S. (1993). "On the Origin of the Name Papua," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 149, No. 2: 318-332. <https://www.jstor.org/stable/27864458>
- Hidayat, Safruddin R. & M. Zainuddin (2020). "Daerah Penangkapan Ikan Cakalang Berbasis Data Citra Oseanografi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713," *TORANI: Journal Fisheries and Marine Science*, Vol. 3, No. 2: 51-60.
- Hisyam, Muhammad & Sitti Rosnafi'an Sumardi (2024). "Analisis Perbandingan Kualitas Air Laut Teluk Youtefa dan Yos Sudarso, Jayapura, Papua," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, Vol. 16. No. 2: 253-263.
- Iwamoto, H. (1997). "The Pacific War in Relation to Japanese Settlers in Papua and New Guinea," *South Pacific Study*, Vol. 17, No. 2: 301-328.
- Mollet, J.A. (2011) "The Dynamics of Contemporary Local-Government Policies and Economic Development in West Papua," *Development in Practice*, Vol. 21, No. 2: 232-243. <https://www.jstor.org/stable/23048470>
- Nordholt, H.S. (2011). "Indonesia in the 1950s: Nation, Modernity, and the Post-Colonial State," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 2011, Vol. 167, No. 4: 386-404. <https://www.jstor.org/stable/23048470>

- org/stable/41329000
- Phillips, M.E. (2007). "The Pre-War Fear of Japanese Espionage: Its Impact and Legacy," *Journal of Contemporary History*, Vol. 42 (2): 243-265. <https://www.jstor.org/stable/30036444>
- Rouine, C. B. (2022). "Economic Decolonisation and the Role of the Central Bank in Postcolonial Development in Tunisia," *Africa Development*, 47(1): 135-158. <https://www.jstor.org/stable/e48508433>
- van Der Veur, P. W. (1964). "The United Nations in West Irian: A Critique," *International Organization*, 18(1): 53-73. <https://www.jstor.org/stable/2705569>
- Warnk, H. (2020). "The Coming of Islam and Moluccan-Malay Culture to New Guinea c. 1500-1920," *Indonesia and the Malay World* 110: 109-134. <https://doi.org/10.1080/13639811003665454>



Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Indonesia
<https://www.bi.go.id>

